PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 1888

SARTONO KARTODIRJO

Pemberontakan Petani di Banten 1888

Oleh

Sartono Kartodirdjo

PRAKATA

Tujuan pertama studi ini adalah membahas aspek-aspek tertentu dari gerakan-gerakan sosial yang melibatkan lapisan-lapisan luas rakyat biasa di Indonesia. Di dalam historiograti Indonesia, pembahasan pokok persoalan seperti ini memang masih jarang sekali, dan satu-satunya contoh yang menonjol adalah analisa Schrieke mengenai komunisme di pantai barat Sumatera (Schrieke, 1959, hal. 85-166). Seperti Schrieke, saya membatasi pembahasan saya pada satu gerakan spesifik di seta daerah spesiflk. Saya telah mempelajari pemberontakan Banten tahun 1888 dengan latar belakang masyarakat Banten abad XIX, dan, dalam hal kebangkitan kembali kehidupan keagamaan yang dibahas dalam Bab V, di dalam kerangka gerakan keagamaan pada umumnya di Jawa abad XIX. Harapan saya adalah bahwa karya ini akan sekedar menandai suatu awal dari kegiatan studi semacam ini dan mungkin akan digunakan sebagai sebuah contoh dalam riset mengenai messiah ini di masa-masa mendatang. Dengan demikian maka dapatlah kiranya diharapkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi-implikasi - di bidang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan - dari dampak dominasi Barat terhadap masyarakat tradisional Indonesia di satu pihak, dan mengenai peranan rakyat biasa dalam pembentukan sejarah Indonesia di lain pihak.

Kita, yang hidup dalam abad krisis-krisis, yang melahirkan pembaharuan dan revolusi, tentunya akan menganggap studi mengenai gerakan-gerakan sosial tidak hanya menarik tetapi juga bermanfaat. Selain dari itu, di dalam suatu kurun waktu yang penuh dengan konflik dan ketegangan, sebagai akibat perubahan sosial yang cepat, semakin dirasakan perlunya memahami kekuatankekuatan penggerak di dalam masyarakat. Studi kasus mengenai gerakan-gerakan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual mengenai pemberontakan tahun 1888 di Banten, melainkan juga dimaksudkan sebagai sumbangsih kepada usaha-usaha untuk menjelaskan proses sosial umumnya di Indonesia abad XIX. Pemahaman mengenai hakikat gerakan-gerakan sosial di masa lampau sering kali dapat diterapkan kepada studi mengenai gerakan-gerakan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa dengan istilah "pribumi" ("native") di dalam buku ini senantiasa dimaksudkan penduduk asli bukan Eropa dalam masyarakat Indonesia. Dengan Batavia dimaksudkan Jakarta sekarang. Penggunaan sebutan-sebutan itu hanyalah untuk memudahkan saja, sesuai dengan terminologi resmi yang berlaku di zaman kolonial, dan kiranya tak perlu lagi dijelaskan di sini bahwa penggunaan sebutan-sebutan itu tidak

mencerminkan suatu pendirian tertentu.

Sepatah kata perlu dikemukakan mengenai ejaan kata-kata Indonesia, termasuk kata-kata Banten, Jawa, Sunda dan Melayu. Saya telah senantiasa berusaha menggunakan ejaan sebagaimana yang lazim di Indonesia sekarang ini. Kata-kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai dengan lafal dan ejaan Indonesia yang lazim. Ejaan yang biasa digunakan oleh para ahli Islamologi diberikan dalam daftar kata-kata. Dalam beberapa hal saya tetap menggunakan ejaan Balanda yang lama, misalnya nama surat-surat kabar.

Tanpa kebaikan hati orang lain, kiranya sedikit saja penyelidikan yang dapat diselesaikan. Dalam hal saya, saya benar-benar sangat mengandalkan kepada dorongan semangat, bantuan dan perhatian yang diberikan oleh penasihat-penasihat intelektual saya selama empat tahun terakhir masa belajar saya sebagai mahasiswa di Universitas Yale dan Universitas Chicago, dan sebagai tenaga riset di Universitas Amsterdam. Saya sangat berterima kasih kepada Profesor Harry J. Benda dan Profesor Karl J. Pelzer, keduanya dari Yale, atas dukungan dan dorongan semangat yang telah mereka berikan kepada saya. Minat saya dalam pokok masalah yang dibahas dalam buku ini telah dibangkitkan selama pertemuan-pertemuan seminar yang dipimpin oleh Profesor Harry J. Benda. Saya telah beruntung mendapat kesempatan mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan terkemuka di Yale dan di Universitas Chicago, dan yang telah memberikan kepada saya sejumlah alat dan konsep kerja antar cabang ilmu pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial.

Saya ingin menyatakan terima kasih saya kepada Profesor L.O. Schuman dari Lembaga Penyelidikan Timur Dekat Modern dari Universitas Amsterdam, atas kesabarannya selama ia membahas sekian banyaknya soal-soal Islamologi dengan saya, dan atas kritik-kritik yang telah diberikannya sebagai seorang ahli, sehingga saya terhindar dari kekeliruan-kekeliruan tertentu. Saya juga berutang budi kepada Profesor A.JR Kobben, yang telah membaca bab-bab yang menyangkut bidang keahliannya, dan saya berterima kasih atas kritik-kritiknya yang sangat bermanfaat.

Secara khusus saya merasa berutang budi kepada Profesor W.F. Wertheim dari Departemen Sosiologi dan Sejarah Modern Asia Tenggara Universitas Amsterdam, yang telah bertindak sebagai sponsor selama saya tinggal di Negeri Belanda. la telah memberikan dorongan kepada studi saya dengan segala cara, telah dengan sabar memupuk pertumbuhan karya ini melalui sekian banyak konferensi dan pembahasan dan sesungguhnya telah membantu mengusahakan agar buku ini bisa terbit. Pendekatan sosiologisnya terhadap sejarah Indonesia telah mendasari sebagian besar pekerjaan saya, dan utang budi saja kepadanya tak temilai.

Dengan rasa terima kasih saya mengenang kembali rangsangan dan kecerahan pikiran yang telah saya peroleh dari pembahasan-pembahasan dengan Profesor G.F. Pijper dan Profesor G.WJ. Drewes, Dr. Th. Pigeaud, dan Drs. R. Nieuwenhuys. Profesor Drewes telah berbaik hati memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca manuskrip *Sejarah Haji Mangsur* dari Koleksi Snouck Hurgronje. Dr. J. Noorduyn, Sekretaris *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, dengan ramahnya telah mengizinkan saya untuk membaca bahan-bahan yang belum diterbitkan.

Saya juga berhutang budi kepada Drs. The Siauw Giap, yang telah memberikan saran-saran yang bermanfaat mengenai sumber-sumber bahan; kepada Dr. C. Vreedede Stuers, Drs. R. Mollema dan Mr. A. van Marle, yang telah membantu saya dengan pelbagai cara.

Tanpa fasilltas-fasilitas dan bantuan praktis yang telah disediakan oleh Departemen Sosiologi dan Sejarah Modern Asia Tenggara Universitas Amsterdam, tugas saya tentunya akan jauh lebih sulit. Kepada Drs JB. van Hall, kepala perpustakaan Perpustakaan Pusat Lembaga Tropis Kerajaan di Amsterdam, dan stafnya, saya sangat berhutang budi atas bantuan untuk memperoleh bahan-bahan terbitan. Saya juga ingin menyatakan terima kasih saya kepada staf perpustakaan Universitas Amsterdam dan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde* atas keramah-tamahan mereka terhadap seorang mahawiswa asing.

Pernyataan terima kasih yang khusus saya tujukan kepada Mr. H.G. Wondaal dari Arsip

Negara di Schaarbergen dan stafnya, atas bantuan mereka yang sangat saya hargai; mereka telah menyediakan fasilitas-fasilitas kerja sehingga saya dapat menggunakan dokumen-dokumen dan data-data. Saya juga menyatakan terima kasih saya kepada staf *Algerneen Rijksarchief* di dan Haag atas bantuan yang telah mereka berikan.

Pernyataan-pemyataan terima kasih saya tujukan kepada orang-orang yang telah membantu memungkinkan studi ini. saya terutama berterima kasih kepada Fakultas Kesenian dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada dan Departemen Sejarahnya, atas dukungan yang telah mereka berikan kepada pelaksanaan studi ini; mereka mempunyai visi untuk melihat nilai dalam studi yang telah saya usulkan itu dan telah mengizinkan saya untuk menjalani cuti besar. Di sini saya ingin menyatakan terima kasih saya kepada Profesor H. Johannes dan Profesor Siti Baroroh-Baried, Drs. T. Ibrahim Alfian, Soeri Soeroto M.A. dan banyak rekan sejawat saya.

Kepada pejabat-pejabat Rockefeller Foundation saya tujukan terima kasih saya karena mereka telah memungkinkan studi ini dari segi keuangannya melalui suatu *fellowship*, yang mula-mula membawa saya ke Amerika Serikat dan kemudian ke Negeri Belanda. Saya terutama berterima kasih kepada Mr. Boyd R. Compton, Assistant Director *Rockefeller Foundation*, yang telah memberikan dukungan kepada studi saya dengan penuh perhatian dan pengertian.

Sebuah award dari Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Negeri Belanda yang bermurah hati telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan penyelidikan-penyelidikan saya. Pernyataan teriina kasih juga saya tujukan kepada Kementerian ini, dan khususnya kepada Miss E. Talsma, M.L., atas bantuan keuangan yang telah memungkinkan diadakannya koreksi terhadap naskah Inggris saya yang asli. Saya berterima kasih kepada Mrs. C.M. van Staalen yang telah melakukan tugas yang berat, yakni mengoreksi manuskrip dan membaca cetakan percobaannya.

Saya ingin menyatakan terima kasih saya kepada Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde yang telah memungkinkan diterbitkannya tesis ini. Terima kasih saya yang khusus saya tujukan kepada Dr. J. Noorduyn atas bantuannya dalam mernpersiapkan penerbitan buku ini. saya sangat berterima kasih kepada *Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research*, yang dengan bantuan keuangannya telah memungkinkan terbitnya buku ini.

Saya juga ingin menyatakan rasa terima kasih saya kepada ayah dan ibu mertua saya, R.M.E. Kadarisman Pusposudibjo, atas kebaikan mereka memelihara anak-anak saya selama saya dan istri saya berada di luar negeri. Kepada istri saya tertuju rasa terima kasih saya atas bantuannya yang tak ternilai dan kesabarannya selama saya mempersiapkan buku ini.

Saya ingin menyatakan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang telah menunjukkan perhatian mereka terhadap pekerjaan saya; di antaranya, Dr. H.J. de Graaf, Dr. L. Sluimers, Dr. M. Makagiansar, dan Drs. A.B. Lapian.

Dalam pada itu, meskipun saya telah mendapat bantuan dari banyak pihak, namun buku ini dengan sendirinya menjadi tanggung jawab saya sendiri, dan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah kesalahan-kesalahan saya.

e-books a.mudjahid chudari 2006

Bab I

PENGANTAR

POKOK PEMBAHASAN

Pemberontakan tahun 1888 yang dibahas dalam studi ini terjadi di distrik Anyer di ujung barat laut Pulau Jawa. Meskipun pemberontakan berkobar dalam jangka waktu yang relatif singkat - dari tanggal 9 sampai denpn tanggal 30 Juli - pergolakan sosial yang mendahuluinya harus ditelusuri kembali sampai ke awal tahun-tahun tujuh puluhan. Pemberontakan ini hanya merupakan satu di antara serentetan pemberontakan yang telah terjadi di Banten selama abad XIX, dan ia juga merupakan satu contoh dari ledakan-ledakan sosial yang sedang melanda seluruh Pulau Jawa ketika itu. Dokumen-dokumen Kementerian Urusan Jajahan yang mencakup abad yang lalu memuat laporan tentang banyak pemberontakan dan percobaan-percobaan pemberontakan di kalangan petani.[1] Gerakan-gerakan milenari yang menyertai kegelisahan dan gejolak sosial, bermunculan di pelbagai daerah di Pulau Jawa, sementara gerakan kebangkitan kembali agama menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah agama dan perkumpulan mistik keagamaan yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Sesungguhnya abad XIX merupakan suatu periode pergolakan sosial yang menyertai perubahan sosial sebagai akibat pengaruh Barat yang semangkin kuat. Orang dapat menyaksikan suatu modernisasi perekonomian dan masyarakat politik yang semakin meningkat. Seluruh proses peralihan dari tradisionalitas ke modernitas ditandai oleh goncangan-goncangan sosial yang silih berganti dan yang menyerupai pemberontakan tahun 1888 di Banten. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di harnpir semua keresidenan di Jawa dan di daerah-daerah Kerajaan[2], memperlihatkan karakteristik yang sama. Pemberontakan-pemberontakan itu bersifat tradisional, lokal atau regional, dan berumur pendek. Sebagai gerakan sosial, pemberontakan-pemberontakan itu semuanya tidak menunjukkan ciri-ciri modern seperti organised, ideologi-ideologi modern, dan agitasi yang meliputi seluruh negeri.[3] Bagian terbesar dari pemberontakan-pemberontakan petani itu bersifat lokal dan tak mempunyai hubungan satu sama lain. Petani-petani itu tidak tahu untuk apa mereka berontak; secara samar-samar mereka ingin menggulingkan pemerintah, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengambil bagian di dalam suatu gerakan sosial yang revolusioner. Yang pasti adalah bahwa tidak ada realisme dalam tujuan yang dikemukakan oleh kaum pemberontak. Mungkin sekali pemimpin-pemimpin mereka pun tidak memiliki pengetahuan politik yang diperlukan untuk membuat rencana rencana yang realistic seandainya pemberontakan berhasil. Oleh karena itu, maka pemberontakan-pemberontakan itu sudah seharusnya gagal, dan semua ledakan itu dengan pasti disusul oleh tragedi tindakan-tindakan penumpasan yang sama.[4]

Arti penting jenis pemberontakan ini tidaklah pertama-tama karena dampaknya terhadap perkembangan politik, melainkan terletak dalam fakta bahwa kejadiannya yang endemik selama abad XIX dapat dipandang sebagai suatu manifestasi dari pergolakan agraris yang merupakan arus bawah dari alur perkembangan politik selama periode "Pax Neerlandica".[5] Sampai saat jatuhnya rezim Belanda, nampaknya ada rasa tidak puas yang meluas yang senantiasa membara di bawah permukaan. Kebanyakan penulis masa itu menganggap pemberontakan-pemberontakan itu sebagai suatu ledakan fanatisme atau suatu huru-hara menentang pajak yang tidak disenangi. Mereka biasanya sudah puas dengan mengemukakan faktor-faktor agama atau ekonomi sebagai penyebabnya. Sesungguhnya, pelbagai macam rasa tidak senang mencapai puncaknya selama kerusuhan-kerusuhan seperti itu; baik di bidang ekonomi dan sosial maupun di bidang keagamaan dan politik.

Di dalam rangka kontak antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia,

pemberontakan-pemberontakan petani dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan protes terhadap masuknya perekonomian Barat yang tidak diinginkan dan terhadap pengawasan politik, dua hal yang merongrong tatanan masyarakat tradisional.[6] Dengan mulai berlakunya perekonomian uang, timbulnya buruh upahan dan ditegakkannya administrasi pusat, maka terjadilah keruntuhan umum struktur ekonomi dan politik yang tradisional.[7] Terganggunya keseimbangan lama masyarakat tradisional tidak disangsikan lagi telah menimbulkan frustrasi dan rasa tersingkir yang umum, dan perasaan-perasaan itu, jika dikomunikasikan, lalu berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu tak boleh tidak akan meledak apabila dapat difokuskan di bawah suatu pimpinan yang mampu mengarahkan potensi agresif itu terhadap sasaran-sasaran tertentu yang dianggap bermusuhan atau menuju pewujudan gagasan-gagasan tentang milenari. Di daerah-daerah, di mana agama memainkan peranan yang dominan, pemimpin-pemimpin agama dengan mudah menempati kedudukan sebagai pernimpin dalam gerakan-gerakan rakyat dengan jalan membungkus pesan milenari mereka itu dengan istilah-istilah keagamaan. Oleh karena itu, gerakan-gerakan pemberontakan yang mereka lancarkan itu juga dapat dianggap sebagai gerakan keagamaan dan gerakan milenaris.[8]

Studi ini terutama menyoroti gerakan-gerakan pemberontakan di daerah yang sejak dulu merupakan daerah yang paling rusuh di Pulau Jawa, yakni Banten.[9] Dibandingkan dengan pemberontakan-pemberontakan petani di negeri lain dan dalam periode-periode lain, pemberontakan tahun 1888 di Banten itu tidak merupakan suatu pemberontakan yang besar. Pemberontakan ini dipilih sebagai pokok studi, bukan pertama-tama mengingat konsekuensi-konsekuensinya, melainkan sebagai suatu gejala yang khas dari perubahan sosial dan perkembangan yang menyertainya, yakni pergolakan sosial, yang begitu menonjol di Jawa abad XIX. Selain dari itu, akan dicoba menyelidiki masalah-masalah yang oleh para ahli sejarah dianggap kurang penting, untuk membuat sejarah Indonesia lebih komprehensif. Untuk maksud ini tidak boleh tidak kita harus memperluas lingkup permasalahannya, bukan topiknya-dan memperhalus metodologi yang relevan.

Istilah "Pemberontakan petani" ("*Peasant revolt*") memerlukan sedikit penjelasan. Istilah itu tidak berarti bahwa peserta-pesertanya terdiri dari petani semata-mata. Sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan petani, pemimpin-pemimpinnya jarang sekali petani biasa. Mereka berasal dari golongan-golongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, dan mereka adalah pemuka-pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat, jadi orang-orang yang statusnya memudahkan penilaian mengenai tujuan suatu gerakan dan yang dapat berfungsi sebagai suatu fokus identifikasi simbolis. Hanya dalam arti yang terbatas saja pemberontakan yang terjadi dalam abad XIX di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemberontakan petani yang murni. Peranan yang dimainkan oleh golongan-golongan lain dalam pemberontakan-pemberontakan itu akan ditelaah kemudian. Pemimpin-pemimpinnya mempakan satu golongan elite, yang mengembangkan dan menyebarkan ramalan-ramalan dan visi sejarah yang sudah turun-temurun mengenai akan datangnya Ratu Adil atau Mahdi. Dalam banyak hal, pemuka-pemuka agamalah yang telah memberikan bentuk yang populer kepada ramalan-ramalan itu dan menerjemahkannya ke dalam perbuatan dengan jalan menarik massa rakyat agar berontak. Anggota-anggota gerakan itu terdiri dari petani, akan tetapi pimpinan organisasinya berada di tangan kaum elite pedesaan. Seperti akan kita lihat nanti, guru agama atau pemimpin mistik memainkan peranan utama dalam hampir semua pemberontakan besar dalam arti relatif - yang tercatat.

ORIENTASI-ORIENTASI HISTORIS YANG ADA

Kepustakaan yang ada sekarang mengenai historiografi kolonial di Indonesia memberikan kesan bahwa belum ada pemberontakan petani yang telah dibahas secara khusus, dan bahwa pemberontakan-pemberontakan itu hanya disinggung sambil lalu saja.[10] Akan tetapi tidaklah benar kesimpulan bahwa kaum tani tidak memainkan peranan apa-apa dalam sejarah

Indonesia, bahwa mereka bersikap masa bodoh, selalu penurut dan pasrah kepada nasib. Huru-hara dan pemberontakan-pemberontakan petani yang terjadi berulang-ulang dan merupakan wabah sosial dalam sejarah Jawa abad XIX, merupakan bukti tentang peranan histons yang telah dimainkan oleh kaum tani. Gambaran sejarah mengenai abad itu akan menjadi lebih jelas apabila tekanan tidak lagi diberikan hanya kepada sejarah politic dan ekonomi semata-mata, yang hanya mencatat perdebatan-perdebatan parlemen mengenai pembaruan-pembaruan kolonial dan tindakan-tindakan resmi pemerintah.[11]

Kritik saya terhadap pendekatan konvensional dalam historiografi kolonial didasarkan atas fakta bahwa pendekatan itu mengenggap rakyat pada umumnya dan kaum tani pada khususnya hanya memainkan peranan yang sangat pasif saja: Pertama, historiografi kolonial mengenai abad XIX memberikan tekanan yang besar kepada susunan lembaga-lembaga pemerintah pada umumnya dan kepada soal pembuatan undang-undang dan pelaksanaannya, dan jarang melampaui tingkat struktur-struktur formal.[12] Kedua, sikap yang Belanda sentris memandang sejarah Indonesia hanya sebagai sambungan sejarah Belanda, dan oleh karenanya, menurut pandangan itu, rakyat Indonesia tidak memainkan peranan yang aktif.[13] Dengan demikian, maka sejarah Indonesia abad XIX untuk sebagian besar hanya merupakan sejarah rezim kolonial Belanda.

Padahal, meskipun sejarah kaum petani di Indonesia dalam historiografi kolonial mungkin kelihatannya begitu datar dan seragam, namun ia mengandung arus-arus yang mengalir terus sampai ke zaman modern. Selama abad-abad XIX dan XX nampak tanda-tanda yang jelas tentang adanya pergolakan petani dan revolusionisme agraris yang aktif. Hingga kini, sedikit sekali, kalaupun ada, yang telah ditulis mengenai kaum petani Indonesia dan pemberontakan-pemberontakan mereka, sementara dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan mereka jarang saja dipelajari. Pemberontakan-pemberontakan itu, yang merupakan gerakan-gerakan sosial dalam arti yang luas, telah dilupakan oleh ahli-ahli sejarah kolonial[14] oleh karena dianggap sebagai pra-politic, tidak artikulat, dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang besar. Fakta-fakta yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial itu juga tak mempunyai arti yang besar bagi ahli-ahli sejarah yang tidak menggali lebih dalam dari laporan-laporan sejarah yang terutama bersifat politic, dan yang bertolak dari anggapan bahwa jaringan sejarah politik itu disangga oleh kerangka yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal, badan-badan politik dan peperangan. Sejarah yang terlalu mengutamakan politik itu nampaknya tak memuaskan karena perspektifnya sempit; kita harus menembus lapisan permukaan peristiwa-peristiwa nasional di atas "pentas utama" sejarah kolonial dan menyelidiki kekuatan-kekuatan yang mendasarinya yang bekerja dalam masyarakat kolonial. Kita harus meninggalkan pendekatan historiografi kolonial, yang mengikuti kecenderungan umum studi sejarah konvensional dengan hanya menyerap fakta-fakta mengenai peristiwa-peristiwa dan episode-episode politik yang besar. Kita harus menembus sampai ke tingkat faktor-faktor yang mengkondisikan peristiwa-peristiwa itu. Dilihat dari sudut pandangan ini, peristiwa-peristiwa sejarah yang unik menjadi manifestasi kekuatan-kekuatan yang lebih fundamental yang menampakkan diri di permukaan.

Satu kelemahan lainnya dari pendekatan yang disebut di atas itu adalah bahwa ia tidak memperhatikan aspek-aspek struktural sejarah Indonesia; dengan demiklan ia tidak dapat menyingkapkan bukan saja proses-proses sosial yang mendasari proses-proses politik, melainkan juga keseluruhan matrik tata hubungan ekonomi sosial dan politik masyarakat Indonesia di masa lampau. Jelaslah bahwa suatu pendekatan struktural terhadap sejarah Indonesia akan dapat memberikan sorotan yang lebih jelas mengenai pelbagai segi masyarakat Indonesia dan pola-pola perkembangannya.[15] Pendekatan ini untuk sebagian akan dapat meniadakan prasangka historiografi kolonial yang Belanda-sentris di satu pihak, dan di pihak lain akan memungkinkan kita untuk merekonstruksikan pola-pola sejarah di dalam suatu kerangka referensi yang Indonesia-sentris.[16]

TINJAUAN MENGENAI BEBERAPA STUDI

Di antara para penulis mengenai gerakan-gerakan sosial di Indonesia yang sedikit jumlahnya, kita pertama-tama dapat mengemukakan narna Drewes.[17] Jelas bahwa minat Drewes tidak sama dengan minat penulis buku ini, dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengritiknya karena ia tidak melakukan apa yang tidak hendak dilakukannya. Karya Drewes dimulai dengan suatu uraian yang lengkap mengenai riwayat hidup tiap orang ulama Jawa, kegiatan kegiatan mereka mengakibatkan mereka kemudian disingkirkan oleh pemerintah kolonial; bagian kedua memuat pembahasan yang mendalam mengenai ajaran-ajaran mereka, sedangkan bagian ketiga membahas pelbagai harapan mesianik dan eskatologi. Sesungguhnya, tujuan utama Drewes adalah suatu analisa teks mengenai ajaran-ajaran milenari atau mesianik. Studi filologis in! hampir mengabaikan samasekali apa yang oleh van der Kroef dinamakan "dinamika kultural alirran-aliran mesianik".[18]

Berbeda dengan van der Kroef, kami lebih memperhatikan aspek-aspek sosiologis dari gerakan-gerakan sosial itu. Kekayaan faktual dari studinya menjadikannya satu titik tolak yang baik bagi pertanyaan-pertanyaan dalam kaitannya dengan teori-teori atau konsep-konsep yang baru. Di dalam golongan-golongan manakah berakarnya ajaran mesianik itu? Kondisi-kondisi sosial yang bagaimanakah yang berlaku ketika ajaran itu muncul? Konflik macam apakah yang terdapat ketika itu dan apa fungsi ajaran itu di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tetap tak terjawab oleh Drewes atau, paling banter, hanya dibahas secara tersirat di dalam deskripsi tentang perkembangan gerakan-gerakan itu. Sesungguhnya, yang kita jumpai di sini adalah suatu jenis sejarah ide-ide dan bukan sejarah gerakan-gerakan sosial. Sumber-sumber yang rupa-rupanya telah digunakan oleh Drewes sebetulnya sangat cocok bagi usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.[19] Meskipun karya Drewes, *De Drie Javaansche Goeroes* mempunyai lingkup yang terbatas, kehadirannya telah mengisi salah satu kekosongan yang besar dalam historiografi mengenai gerakan-gerakan sosial di Indonesia.

Drewes bukanlah orang pertama yang menulis studi semacam ini mengenai ajaran-ajaran mesianik di Jawa; Wisellus, Cohen Stuart, Brandes, dan Snouck Hurgronje telah mendahuluinya.[20] Ketiga ilmuwan yang pertama membahas perkembangan gagasan tentang akan datangnya Ratu Adil, dan harapan-harapan milenari sepanjang sejarah Jawa, yang telah dapat ditelusuri kembali sampai kepada perubahan perubahan dalam struktur-struktur idologis yang terjadi dalatn jangka waktu yang lama. Pengamatan-pengamatan mereka mengenai pokok persoalan ini tidak melampaui ide-ide konstitutif dari gerakan-gerakan milenari Jawa yang tradisional. Dalam tulisan-tulisan Cohen Stuart dan Brandes terdapat penyajian mengenai orang-orang yang membawa gagasan-gagasan itu, akan tetapi tidak ada penyorotan mengenai fakta-fakta yang menyangkut kolektif-kolektif sosial sebagai pendukung gerakan. Catatan ini juga berlaku bagi karya Snouck Hurgronje, yang menyoroti gagasan tentang kedatangan Mahdi seperti yang berkembang di negeri-negeri Islam. Suatu analisa struktural mengenai gagasan-gagasan mesianik itu membawa penulis buku ini kepada kesimpulan bahwa mesianisme, dipandang sebagai semacam filsafat sejarah, mengandung gagasan - mengenai gerakan sejarah manusia yang linear dengan memasukkan ke dalamnya beberapa unsur siklis.[21]

Suatu tinjauan tentang pelbagai jenis pengungkapan harapan-harapan terhadap milenari telah diberikan baru-baru ini oleh van der Kroef.[22] la membedakan antara lima kategorl gagasan milenari, tapi ia tidak menyebut-nyebut kasus Banten, yang menurut pendapat saya tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari kategori-kategori berikut ini;

(1) ramalan-ramalan *Jayabaya*;

(2) *paswara* Bali;

(3) kompleks *Erucakra Ratu Adil Mahdi*;

(4) gerakan Samin dan Samat;

(5) aliran-aliran mesianik di Indonesia yang sudah merdeka.

Seperti akan ditunjukkan nanti, gagasan milenari kaum pemberontak di Banten tidak mengandung ramalan-rarnalan Jayabaya ataupun apa yang oleh van der Kroef dinamakan kompleks Erucakra Ratu Adil Mahdi. Selain dari itu, masih bisa diperdebatkan apakah ideologi

nasional yang baru, seperti Pancasila, atau , doktrin-doktrin politik lainnya, seperti Pancasetia atau Pancadarma, bisa dihubungkm dengan aliran-aliran mesianik dengan cara yang diasumsikan oleh van der Kroef di dalam studinya. Dalam hubungan ini hendaknya jangan dilupakan bahwa proses sekularisasi dan modernisasi sudah berlangsung pada saat kebangkitan gerakan nasionalis Indonesia dan pecahnya Revolusi Indonesia. Apabila pembedaan itu dilihat tidak pertama-tama dalam aspek fungsionalnya, melainkan dalam aspek rasionalitasnya, maka kita dapat menyingkapkan perbedaan-perbedaan esensial antara harapan-harapan mesianik dan ideologi nasionai atau doktrin-doktrin politik seperti yang disebutkan di atas. Penulis buku ini lebih cenderung untuk mengidentifikasikan Pancasila, Pancasetia dan Pbncadarma sebagai penunusan-perumusan cita-cita politik dalam filsafat politik dan bukan sebagai harapan-harapan mesianik. Dalam studi mengenai gerakan-gerakan sosial di Indonesia adalah penting sekali untuk mengadakan pembedaan yang jelas antara gerakan-gerakan yang kuno dan gerakan-gerakan yang modern,[23] yang pertama merupakan gerakan-gerakan mesianik Jawa dan yang kedua merupakan gerakan-gerakan nasionalis dan revolusioner.

Pergolakan-pergolakan sosial di Jawa abad XIX itu sendiri, apakah itu merupakan manifestasi milenari atau tidak, sudah barang tentu tidak luput dari perhatian; sejumlah studi mutakhir yang terpencar-pencar, yang kebanyakan bersifat deskriptif, telah ditulis orang mengenai pokok persoalan ini.[24] Kiranya perlu dikemukakan bahwa karya-karya deskriptif itu akan berguna dalam usaha mengumpulkan data-data faktual yang berkaitan dengan gerakan-gerakan milenari sebelum kita mulai mencari bahan-bahan dokumenter yang sudah ada mengenai gerakan-gerakan itu. Akan tetapi oleh karena karya-karya itu sering kali hanya merupakan laporan-laporan percobaan, yang bersifat bagian-bagian saja dan tidak lengkap, maka tulisan-tulisan itu harus dianggap sebagai sumber-sumber yang sedikit banyaknya masih meragukan bagi suatu studi sejarah.

Dalam kaitannya dengan pemberontakan Banten, tulisan anonim dalam *De Indische Gids* dapat dianggap sebagai laporan yang paling ekstensif hingga kini.[25] Kelebihannya terletak pada informasi faktualnya yang terperinci mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemberontakan itu. Rupa-rupanya penulisnya dengan mudah dapat menggunakan dokumen-dokumen mutakhir, namun demikian disayangkan bahwa ia tidak menyebutkan sumber-sumber yang telah digunakannya. Besar sekali kemungkinannya bahwa ia telah menggunakan tidak hanya suratkabar-suratkabar tetapi juga dokunen-dokumen resmi pemerintah. Kronologi kegiatan-kegiatan persiapan kaum pemberontak mungkin hanya dapat diketahui dari catatan-catatan pemerintah,[26] oleh karena gerakan itu tetap merupakan rahasia sampai saat meletusnya. Tulisan yang tebalnya tujuh puluh halaman itu merupakan laporan yang mengisahkan jalannya peristiwa tanpa mengemukakan sesuatu permasalahan atau membuat sesuatu analisa. Tidak ada pemberian warna yang khusus. Hanya pada akhir tulisan disebut-rebut tentang kemungkinan-kemungltinan penyebabnya, yang menurut penulisnya, terutama bersifat keagamaan: suatu komplotan orang-orang Islam mengancam rezim kolonial Belanda, dan dengan lihai memanfaatkan perasaan-perasaan keagamaan penduduk.

Dalam tahun 1892 van Sandick menerbitkan sebuah buku mengenai kondisi-kondisi sosio-ekonomis dan politrk di Banten tahun-tahun delapan puhluhan.[27] Jelas sekali bahwa karangan itu sangat mengandalkan kepada suratkabar-suratkabar dan majalah-majalah waktu itu. Karangan itu berguna sejauh ia memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi penelitian faktual. Penulisnya secara menyolok menunjukkan perhatian yang besar dan simpati yang mendalann terhadap penderitaan penduduk, sebagaimana terbukti dengan jelas sekali dari kecaman-kecamannya terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial. Buku itu juga perlu dikemukakan karena memberikan informasi yang berguna mengenai soal-soal rincian yang jarang ditemukan dalam catatan-catatan pemerintah.[28]

Suatu tinjauan sepintas lalu mengenai kepustakaan tentang gerakan-gerakan milenari di pelbagai bagian dunia menunjukkan bahwa mengenai masalah ini terdapat banyak sekah bahan-bahan serta studi. studi yang ekstetsif.[29] Di antara studi-studi mengenai gerakan-gerakan itu, banyak yang membahas gerakan dalam situasi kolonial yang melibatkan suatu penolakan terhadap dominasi penguasa-penguasa asing.[30] Bentuk-bentuk pengejawantahan

protes-protes sosial atau gerakan-gerakan nativistik itu cukup menarik perhatian.[31] Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan mengenai sekian banyaknya gerakan sosial yang telah bermunculari dengan suburnya di Indonesia dalam abad-abad XIX dan XX, agar tersedia sumber-sumber bahan dari sejarah Indonesia bagi korpus teori-teori mengenai gerakan-gerakan sosial pada umumnya. Selain itu, perhatian teoretis yang semakin besar terhadap gerakan-gerakan sosial di tempat-tempat lain memberi petunjuk bahwa gerakan-gerakan sosial di Indonesia patut dijadikan pokok penyelidikan.

LINGKUP DAN TUJUAN STUDI

Studi ini hampir seluruhnya hanya mengenai gerakan-gerakan sosial di Banten abad XIX saja. Pembatasan itu difokuskan dengan alasan yang jelas: Penyelidikan ini akan lebih bermanfaat jika terbatas pada suatu daerah saja, yang lebih jelas batas-batasnya secara geografis dan kultural. Studi ini direncanakan menurut garis-garis yang diterangkan di bagian lain, dan tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengenai latar belakang kultural dan keagamaan dari permasalahannya, dan untuk menghubungkan fenomen historis dari pemberontakan-pemberontakan petani sebagai gerakan sosial dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik tertentu di Banten.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa tujuan studi ini tidak hanya untuk melukiskan apa yang terjadi dan kapan, melainkan juga bagaimana dan apa sebabnya hal itu terjadi. Persoalan-persoalan itu jelas mengacu kepada masalah-masalah sebab-musabab atau faktor-faktor kondisional.[32] Kita harus menyingkapkan pelbagai garis perkembangan dan kecenderungan yang semakin meningkat untuk melakukan pemberontakan. Unsur-unsur konstitutif atau faktor-faktor tertentu dari kondisi situasional yang terdapat pada waktu terjadinya gerakan itu harus ditelusuri kembali sampai kepada tempat kejadiannya yang khas agar kita menemukan identitas dan kontinuitasnya. Oleh karena itu suatu penyelidikan genetik dan analitik akan dilakukan secara serentak. Penyusunan urutan bab-bab dalam studi ini disesuaikan dengan rancangan teoretis ini. Faktor-faktor yang relevan akan diangkat dan dikaji perkembangan historisnya untuk dapat menjelaskan gerakan dari segi faktor-faktor ini, yang merupakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi genesis gerakan dan kontinuitasnya.[33] Oleh karena kondisi-kondisi mengandung benih perkembangan-perkembangan di masa mendatang, maka kita harus menjelaskan gerakan sosial atas dasar kondisi-kondisi yang terdapat beberapa dasawarsa sebelum meletusnya pemberontakan. Selain dari itu, kita harus memahami bagaimana terjadinya perjalinan di antara kondisi-kondisi itu. Oleh karena kondisi sosial suatu masyarakat jelas ada kaitannya dengan keadaan ekononri dan politiknya, maka kekuatan-kekuatan yang menimbulkan perubahan di bidang yang satu, juga menyebabkan semacam perubahan di bidang lainnya.

ORIENTASI DAN PENDEKATAN TEORETIS

Secara umum sudah diketahui bahwa gerakan-gerakan sosial sebagai satu proses merupakan satu hal yang sangat kompleks. Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas mengacu kepada pelbagai dimensi atau aspek dari gerakan-gerakan itu. Pendekatannya bisa dilakukan melalui pelbagai jalur metodologis atau perspektif teoretis dan yang terpenting adalah jalan atau perspektif ekonomis, sosiologis, politikologis dan kultural-antropologis. Untuk tujuan-tujuan analitis, sejumlah aspek dari fenomen-fenomen yang kompleks itu dapat diisolasikan, akan tetapi hal ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan distorsi pada konteks yang bersangkutan. Kita dapat mengandaikan bahwa pertemuan, beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Sebelum mencapai titik pertemuan itu, faktor-faktor itu masing-masing mengalami perkembangannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan teoretis ini, kita akan membahas secara terpisah-pisah aspek-aspek sosio-ekonomis, politis dan

keagamaan, yang merupakan faktor-faktor kondisional gerakan itu.

Di samping itu, perlu dikemukakan bahwa situasi yang kompleks itu juga dapat ditinjau dari segi insiden-insiden dan urutan-urutan insiden yang menentukan hubungan sebab-akibat di antara faktor-faktor variabel, apakah itu ekonomis, sosial, politic atau keagamaan. Arti penting yang relatif harus diberikan kepada suatu faktor kausal tertentu atau suatu determinan dari gerakan sosial itu. Ahli sejarah yang berpendirian bahwa sebuah faktor tunggal merupakan satu-satunya penentu dari gerakan itu mungkin sedikit sekali jumlahnya.

Untuk dapat memberikan penjelasan yang memadai, kita harus menggunakan banyak alat analisa. Mengingat sangat kompleksnya pokok persoalan ini, maka suatu deskripsi historis saja tidak akan cukup. Sifat gerakan-gerakan sosial itu sendiri menghendaki agar penjelasan genetis dilengkapi dengan penjelasan analitis. Dalam hubungan ini, pendekatan-pendekatan lain dapat ditambahkan kepada pendekatan historis. Disiphn-disiplin lain, seperti sosiologi, antropologi sosial, dan ilmu politik berada pada kedudukan yang lebih baik untuk menganalisa fenomen gerakan-gerakan sosial. Konstruksi-konstruksi konsepsial atau teori-teori mereka jelas mempunyai daya menjelaskan yang lebih besar daripada penuturan sejarah yang polos. Oleh sebab itu, dalam mencari petunjuk-petunjuk ke arah kondisi-kondisi kausal gerakan-gerakan sosial, kita harus mempertemukan disiplin-disiplin itu. Penggunaan pemahaman-pemahaman yang telah dicapai oleh disiplin-disiplin itu tidak boleh tidak akan memperkokoh analisa kita dan memperluas pandangan kita mengenai gerakan itu.

Satu-satunya pokok persoalan yang jelas jelas memperlihatkan saling ketergantungan yang aktual atau potensial antara sejarah dan sosiologi, adalah gerakan sosial. Pilihan atas topik ini memberikan kesempatan yang luas untuk mengkombinasikan kedua garis penyelidikan.[34] Bukanlah maksud saya untuk mengadakan suatu analisa sosiologis, oleh karena pendekatan saya dalam studi ini pertama-tama dan terutama sekali adalah pendekatan historis, yang difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang berurutan dan urutan-urutan peristiwa. Pendekatan saya akan terbatas pada penggunaan konsep-konsep sosiologis, baik sebagai kriteria selektif dalam penyusunan data-data maupun dalam penyusunan tuturan historis. Pendekatan multi-dimensional ini digunakan untuk memperkaya pembahasan historis masalahnya. Dimensi-dimensi baru akan dibuka dan akan membantu pemahaman gerakan-gerakan sosial. Oleh karena gerakan-gerakan ini menjadi fokus dalam pemahaman proses-proses sosial, ekonomis dan politik, maka masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan gerakan-gerakan itu akan disaring melalui pertimbangan perhatian bersama dari pelbagai disiplin itu dalam masalah-masalah tersebut. Studi mengenai gerakan-gerakan sosial mencakup masalah-masalah solidaritas dan konflik golongan dan kita tidak boleh tidak harus memberikan tekanan kepada aspek-aspek golongan seperti perilaku, organisasi, pengelompokan, pimpinan, ideologi dan sebagainya. Maksud saya adalah untuk menunjukkan hubungan dinamis, artinya interaksi kausal antara kelompok-kelmnpok sosial dalam gerakan itu. Suatu penjelasan akan diberikan dari segi status dan peranan golongan elite. Kita juga harus memperhatikan konfigurasi sosial, lembaga-lembaga sosial, norma-norma, dan nilai-nilai, begitu pula sikap-sikap ideologis sejauh hal itu membentuk dan mengkondisikan gerakan. Orang-orang yang menekuni sejarah Indonesia telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap sejarah politik, sementara masalah-masalah perubahan sosial, disintegrasi dan disorganisasi sosial serta hal-hal yang menyertainya - pergolakan, konflik dan mobilitas sosial - telah diabaikan. Masalah konflik sosial di antara pelbagai kelas dalam masyarakat Banten jelas merupakan salah satu masalah yang paling terasa di mana-mana.[35]

Dalam menganalisa konflik-konflik sosial di dalam masyarakat Banten, kita harus memperhatikan sistem-sistem nilai tradisional dan keagamaan, sebagai satu kekuatan konservatif yang menentang westernisasi. Akulturasi yang mencapai pelbagai tingkatan telah menimbulkan faksionalisme, yang pada gilirannya mempercepat disintegrasi masyarakat Banten. Masyarakat Banten tidak lagi dalam keadaan yang statis dan seimbang, melainkan terdiri dari golongan-golongan yang saling bersaing, yang bersikap antagonistic dan bersengketa satu sama lain, sehingga menyeret masyarakat ke titik kekacauan.[36] Yang esensial bagi jenis analisa ini adalah studi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk dan komposisi pola-pola nilai dalam masyarakat Banten. Usaha untuk mengadakan

korelasi antara kecenderungan-kecenderungan sosial dan peristiwa-peristiwa politik di satu pihak dan pola-pola kultural di pihak lain melibatkan suatu pendekatan sosio-antropologis.[37]

Gagasan milenari yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin agama untuk menghasut rakyat agar memberontak dapat dijelaskan dari sudut pandangan sosiologi dan antropologi sosial atas dasar suatu orientasi keagamaan atau ideologi golongan-golongan yang merasa dirugikan, yang bertujuan memulihkan apa yang mereka anggap sebagai tatanan tradisional.[38] Mengapa peranan nabi-nabi atau pemimpin-pernimpin agama di dalam pemberontakan, konsep-konsep antropologi sosial dan ilmu politik sangat berguna untuk menangani masalah masalah dalam hubungan ini. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai determinan-detemiinan gerakan sosial, kita perlu memperhitungkan proses politik sebagai suatu konsep yang mengacu kepada interaksi antara pelbagai unsur sosial yang bersaing untuk memperoleh alokasi otoritas.[39] Analisa semacam ini hanya dapat dilaksanakan dengan berhasil jika kita menggunakan konsep-konsep dan konstruksi-konstruksi teoretis yang dipinjam dari ilmu politik.

Pendekatan-pendekatan yang terdahulu terhadap gerakan-gerakan sosiaI di Indonesia tidak mempunyai validitas sosio-historis. Selain itu, masalah-masalah seperti yang telah disebutkan di atas biasanya tidak dikemukakan oleh ahli-ahli sejarah politlk yang ortodoks yang menulis mengenai sejarah Indonesia. Di dalam studi in! hendak diusahakan untuk mengimbangi penyempitan topik dengan perluasan prespektif Dengan jalan memperbanyak variabel-variabel dan memperluas kerangka referensi, masalah-masalahnya dapat digarap secara lebih kompeten dan dengan lingkup serta kedalaman yang lebih besar. Penggarapan bahan historis dengan cara itu tidak hanya akan menempatkan struktur penuturan peristiwa-perlstiwa dalam perspektif yang tepat, melainkan juga akan mengubah kesan yang telah diberikan oleh sudut pandangan ahli sejarah kolonial. Sekarang marilah kita menelaah sumber-sumber sejarahnya.

BAHAN SUMBER

Di dalam studi ini saya telah menggunakan sumber-sumber dalam jumlah yang terbatas; yang terpenting adalah dokumen dokumen dari Kementerian Urusan Jajahan. Kita akan melihat nanti bahwa dokumen-dokumen itu hanya merupakan sisa-sisa dari sebagian kecil dari realitas; dokumen-dolcumen itu mencatat kegiatan pejabat-pejabat pemerintah dan opsir-opsir tentara, serta transaksi-transaksi administratif oleh badan-badan pemerintah. Dan perangkat catatan-catatan ini pun sangat terbatas, oleh karena arsip-arsip kolonial metropolitan hanya menyimpan korespondensi antara pemerintah kolonial dan pejabat-pejabat metropolitian. Umpamanya, dalam banyak hal berita-berita acara dan catatan-catatan prosedural dari pemerintah kolonial tidak dimasukkan. Tindasan-tindasan dari sebagian bahan-bahan itu ada juga yang sampai di arsip-arsip metropolitan, akan tetapi hal ini tergantung kepada kebijaksanaan negara kolonial. [40] Yang jelas adalah bahwa pemberontakan-pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan selalu mendapat perhatian yang seksama, oleh karena peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai bersifat politik dan merupakan bahaya potensial terhadap usaha negara kolonial untuk memelihara "ketentraman dan ketertiban".[41]

Seperti dapat diduga semula, arsip-arsip Kementerian Urusan Jajahan menyimpan sedikit saja, kalaupun ada, bahan mengenai catatan-catatan pemerintah setempat. Akan tetapi, bahan-bahan itu merupakan sumber-sumber yang tak ternilai bagi sejarah sosial dan ekonorni dan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai hubungan-hubungan sosial di tingkat setempat. Hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa saja ada beberapa catatan yang dilampirkan pada dokumen-dokumen yang dilkirimkan kepada pejabat-pejabat metropolitan. Oleh karena pemberontakan Banten itu sangat mencemaskan pemerintah Belanda, maka dokumen-dokumen catatan pemerintah kolonial telah sampai juga di arsip-arsip metropolitan. Untuk tujuan kita, laporan-laporan dan surat-surat resmi dari pejabat-pejabat, ketetapan-ketetapan pemerintah, catatan-catatan harian militer, berita-berita resmi, berita-berita acara konferensi, memoranda, dan transaksi-transaksi administratif dan politik lainnya sangat

penting artinya. Juga perlu disebutkan berita-berita acara pengadilan.

Dokumen-dokumen yang paling relevan bagi pemberontakan Banten adalah sebagai berikut: laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, termasuk lampiran-lampirannya yang tebal-tebal;[42] laporan-laporan dan surat-surat resmi - baik yang bersifat rahasia maupun yang tidak - dari pejabat-pejabat pemerintah; nasihat-nasihat dari Dewan Hindia (Raud van Indie); berita-berita resmi dari pejabat-pejabat daerah kepada pemerintah pusat; catatan-catatan harian militer yang memuat sebagian besar data mengenai jalannya pemberontakan; catatan-catatan mengenai pemeriksaan kaum pemberontak oleh pengadilan; ketetapan gubernur jenderal mengenai pengangkatan atau pemecatan pegawai-pegawai negeri sipil, dan pembuangan kaum pemberontak. Perlu dikemukakan bahwa otentisitas dokumen-dokumen itu tidak perlu diragukan lagi, dan oleh karena itu tidak dilakukan usaha untuk mengadakan kritik ekstern terhadapnya. Sebaliknya, kritik intern sangat diperlukan. Seperti yang dapat diduga sebelumnya, dokumen-dokumen pemerintah itu ditulis dari sudut pandangan pejabat-pejabat kolonial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ada pelbagai faktor subyektif yang berpengaruh. Sesungguhnya, dokumen-dokumen resmi hampir semata-mata ditulis dari sudut pandangan pemerintah. Pejabat-pejabat pemerintah, dengan kompetensi mereka yang khusus dalam soal-soal rutin administratif, sering kali cenderung menganggap laporan-laporan itu, yang secara kontinyu diharapkan dari mereka, sebagai sesuatu yang rutin dan sebagai formalitas yang harus dikirirnkan cepat-cepat dan bukannya dibuat secara akurat. Dengan itikad yang paling baik sekalipun, kadang-kadang tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tulis-menulis yang sangat banyak itu tepat pada waktunya dan dengan akurat.[43] Sudah barang tentu, dokumen-dokumen yang menyangkut soal-soal yang sangat penting dibuat secara lebih seksama. Namun demikian, masih disangsikan apakah penilaian pejabat-pejabat Belanda mengenai penduduk yang hidup di dalam suatu kerangka kultural yang berbeda sekali dengan kerangka kultural mereka, dapat dipercaya begitu saja. Dalam kasus pemberontakan Banten, pejabat tertinggi Departemen Dalam Negeri diangkat sebagai Komisaris Pemerintah dan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan.[44] Oleh karena pekerjaan ini dipersulit oleh pelbagai faktor, hasilnya jauh dari meyakinkan. Waktu yang diberikan kepada si penyelidik terbatas, sehingga ia tidak dapat melakukan penyelidikan yang seksama. Situasi sesudah peristiwa pemberontakan dan kedudukan pamongpraja, dalam hubungannya dengan penduduk sama sekali tidak memudahkan diadakannya tanya jawab yang terbuka. Nampaknya rakyat tidak mau mempergunakan kesempatan itu untuk dengan bebas mengemukakan keluhan-keluhan atau unek-unek mereka. Sebaliknya mereka bersikap hati-hati sekali dan penuh syak wasangka terhadap setiap tindakan pihak pamongpraja.[45] Lagi pula, mereka yang melakukan penyelidikan tidak menghiraukan kerangka referensi sosiologis, sehingga akibatnya tidak diadakan analisa kelas dan tidak ada perhatian terhadap kelas-kelas rendahan masyarakat Banten. Maka tidaklah mengherankan kalau dokumen-dokumen resmi jarang memuat keterangan tentang kedudukan sosio-ekonomis anggota-anggota biasa dalam kelompok pemberontak.

Dapat dikatakan bahwa laporan-laporan yang ditulis tidak lama sesudah pemberontakan itu, terlalu didasarkan atas pengandaian-pengandaian yang lemah dan kesaksian-kesaksian yang dangkal tanpa pembuktian yang kuat.[46] Ada kecurigaan bahwa pejabat-pejabat daerah telah berusaha untuk menyenangkan pemerintah pusat. Kecurigaan pemerintah pusat itu diperkuat oleh kenyataan bahwa meletusnya pemberontakan itu samasekali di luar dugaan pejabat-pejabat setempat dan bahwa mereka tidak dapat memberikan informasi yang terperinci dan seksama segera setelah peristiwa itu terjadi.[47] Tidak mengherankan bahwa suatu penyelidikan mengenai ketidakmampuan personil administratif daerah dianggap perlu diadakan dengan segera.[48]

Oleh karena mereka terlibat secara langsung di dalam peristiwa itu, maka pejabat-pejabat melakukan pemeriksaan secara subyektif dan tidak bebas samasekali dari prasangka. Hal itu sering tercermin dalam penafsiran-penafsiran mereka. Perasaan takut terhadap fanatisme dan terhadap komplotan-komplotan orang Islam mencerminkan suatu suasana mental yang meluas di kalangan orang-orang Eropa.[49] Agar mereka dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah pemberontakan meluas atau terulang kembali, pejabat-pejabat itu berusaha

keras untuk mengetahui sebab-sebab dan motif-motif yang telah menimbulkan perbuatan-perbuatan kejam dan kekerasan itu. Oleh karena itu laporan-laporan mereka dalam banyak hal sangat terperinci, terutama mengenai data-data statistiknya. Yang patut dikemukakan adalah kenyataan bahwa uraian-uralan mereka mengenai perbuatan-perbuatan yang kejam dan mengerikan yang dilakukan oleh kaum pemberontak ditulis dengan bahasa yang obyektif dan tanpa banyak emosi. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa walaupun tidak ada maksud untuk melakukan pemutarbalikan dengan sengaja, kekeliman-kekeliruan dan kealpaan tidak dapat dihindarkan. Sebagian dari informasi mereka memang merangsang namun tidak sampai membuat persoalannya lebih jelas bagi kita.[50] Sudah dapat diduga sebelumnya bahwa alarn pikiran, gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan sosial penduduk dalam banyak hal tldak dicatat. Suara mereka harnpir-hampir tak terdengar.[51] Oleh sebab itu, maka dokumen-dokumen pemerintah tidak mencerminkan secara langsung sebagian besar kehidupan rakyat, terutama kaum tani. Seperti biasanya, kegiatan-keglatan mereka tidak menarik perhatian para pejabat dan karenanya kegiatan-kegiatan itu pada umumnya tak tercatat. Banyak realitas kehidupan yang kongkrit, balk di kota-kota kecil maupun di daerah-daerah pedesaan, biasanya luput dari perhatian. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa orang-orang yang mempunyai gagasan-gagasan revolusioner itu samasekali bukan orang-orang yang tidak mampu mengutarakan pikiran mereka, akan tetapi rupa-rupanya mereka tidak meninggalkan sesuatu keterangan tertulis mengenai gerakan mereka.

Kembali kepada laporan Direktur Departemen Dalam Negeri: sudah sejak awalnya laporan itu sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi tertentu mengenai sebab-sebab pemberontakan, seperti fanatisme, kesuftan-kesulitan ekonomi dan pemerintahan yang buruk. Kita harus waspada terhadap pemutarbalikan yang dilakukan oleh informan-informan Direktur dengan maksud untuk membela kepentingan mereka sebagai pegawai kecil, memenuhi keinginan-keinginan pribadi atau menyalahkan lawan-lawan mereka. Mereka memberikan informasi dengan pelbagai motivasi, seperti untuk mendapat pujian, atau mereka menyarankan suatu pembaruan atau penyelesaian dengan tujuan memperkuat kedudukan mereka sendiri. Pejabat-pejabat merasakan perlunya menghormat atasan mereka dan mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan umum pemerintah. Selain itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa pejabat-pejabat senior senantiasa mampu untuk memperlakukan bawahan-bawahan mereka dengan cara yang sama dan obyektif; kecaman-kecaman dilancarkan terhadap bawahan-bawahan yang keras kepala, sedangkan kesayangan-kesayangan mereka dibela.[52] Dalam hubungan ini ada baiknya kita memperbandingkan pendapat-pendapat atau laporan-laporan pejabat-pejabat itu dengan riwayat hidup mereka atau komentar-komentar yang diberikan mengenai mereka oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka.[53] Sudah barang tentu penilaian-penilaian orang-orang yang disebut terakhir itu akan diberi bobot sesuai dengan simpati atau antipati mereka terhadap pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Dalam membaca pelbagai catatan resmi itu, klta akan memperoleh kesan bahwa banyak pejabat melaporkan fakta-fakta yang sama dari sumber yang sama. Mereka sering kali saling mengandalkan atau meminjam satu sama lain. Informasi tangan-pertama biasanya berasal dari mata-mata pemerintah, yang perlu dicurigai oleh karena sudah diketahui bahwa dalam banyak hal mereka memutarbalikkan atau memalsukan informasi.[54] Mengenai laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin agama selama waktu persiapan, orang dapat mengatakan bahwa laporan-laporan itu jauh dari akurat atau lengkap, justru oleh karena kegiatan-kegiatan itu hampir dirahasiakan semasekali sampai saat terakhir. Laporan *post eventum* merupakan rekonstruksi dari kepingan-kepingan pengakuan pemberontak-pemberontak yang ditawan. Seperti yang terlihat dari catatan sidang-sidang pengadilan, hanya sedikit saja data mengenai kegiatan-kegiatan pemberontak dapat diperoleh, oleh karena sudah hampir merupakan suatu pola sikap para terdakwa dalam sidang-sidang pengadilan itu untuk tetap menyangkal tuduhan-tuduhan terhadap mereka.[55] Oleh karena terbatasnya jumlah catatan dan mengingat sifat dokumendokumen itu sendiri, maka kekosongan-kekosongan akan tetap banyak. Dalam hubungan ini, suratkabar-suratkabar tidak hanya memberikan banyak informasi pelengkap akan tetapi juga menyingkapkan hubungan-hubungan informal dan situasi-situasi yang tidak akan pernah dicatat dalam dokumen-dokumen pemerintah. Sudah diketahui umum bahwa situasi dan kondisi sosial yang terdapat pada waktu itu dianggap sebagai sudah

mestinya, sementara hubungan-hubungan yang intim dan banyak liku-likunya antara para pejabat, baik Eropa maupun pribumi, dan dunia tidak-resmi biasanya tidak masuk laporan.[56] Meskipun sebagian besar suratkabar ditandai oleh sikap yang memillak, namun nilai mereka sebagai sumber tidak boleh dianggep sepele, oleh karena mereka secara menyolok menentang pemerintah kolonial dan menyingkapkan banyak fakta mengenai sikap-sikap politik dalam masyarakat kolonial pada saat pemberontakan itu. Sebagai wakil-wakil pendapat umum, suratkabar-suratkabar itu dapat digunakan untuk menguji sumber-sumber resmi; mereka sering kali mencerniinkan gagasan-gagasan sikap-sikap dan kepentingan golongan-golongan sosial di luar dunia resmi, seperti pemilik-pemilik perkebunan, pengusaha-pengusaha, dan dengan sendirinya, wartawan-wartawan. Meskipun laporan suratkabar-suratkabar itu boleh dikatakan dangkal, namun sebagian besar masih dapat digunakan sebagai bahan sumber. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengecek data, fakta dan pendapat yang terdapat dalam catatan-catatan resmi. Sesungguhnya, di dalam masyarakat kolonial dengan birokrasinya yang sangat berkuasa, suratkabar-suratkabar merupakan publik yang berpikiran kritis, dan satu sarana pendapat yang berpengaruh. Ia berfungsi sebagai satu alat yang memberikan publisitas dengan efek yang baik, dan peristiwa-peristiwa serta tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat-pejabat disingkapkan kepada umum. Kadang-kadang suratkabar-suratkabar itu melancarkan kecarnan-kecaman yang tajam terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan terhadap tokoh-tokoh terkemuka dunia resmi.[57] Sketsa-sketsa biografis dari pejabat-pejabat senior sangat berguna sebagai latar belakang dalam menilai tulisan-tulisan mereka. Dibandingkan dengan laporan-laporan resmi, suratkabar-suratkabar itu kurang akurat dalam menggarap fakta-fakta. Yang disebut pertama lebih dapat diandalkan dan dipercaya oleh karena demi kepentingan pejabat-pejabat itu sendiri dan opsir-opsir tentara untuk memberikan laporan yang akurat. Kepentingan mereka terletak dalam laporan yang akurat bukan dalam laporan yang tidak akurat. Di samping itu, pada waktu itu pejabat-pejabat pemerintah dianggap mempunyai fasilitas-fasilitas untuk memperoleh informasi yang lebih banyak. Sejauh mereka mengemukakan fakta-fakta dan bukan pendapat atau dugaan, maka informasi itu dapat dikatakan bisa dipercaya: kepercayaan penuh biasanya diberikan kepada laporan-laporan resmi.

RANGKUMAN MASALAH

Studi ini, didasarkan atas hipotesa bahwa gerakan keagamaan, yang pada hakikatnya merupakan gerakan sosial, bisa diperkirakan mempunyai hubungan yang khusus dengan kelas-kelas sosial, dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku bagi mereka, dan dengan etos kultural di dalam golongan-golongan sosial itu. Dalam Bab II, penulis akan mencoba menunjukkan hubungan antara orientasi ideologis gerakan itu dan golongan-golongan sosial dari mana gerakan itu memperoleh anggota-anggotanya. Perpecahan sosial yang tajam dalam masyarakat Banten dapat dijelaskan dari segi posisi sosio-ekonomis golongan-golongan yang saling bertentangan. Dampak kebudayaan Barat telah mempertajam konflik sosial itu.[58]

Di Banten, seperti halnya di seluruh Indonesia, abad XIX ditandai oleh kontak yang semakin meningkat dengan dunia Barat. Seperti telah dikemukakan, perekonomian uang, perpajakan yang seragam, administrasi yang terpusat dan sarana-sarana komunikasi yang modern merupakan gejala-gejala yang menyertai penetrasi kekuasaan kolonial yang berlangsung secara berangsur-angsur. Kebijaksanaan fiskai, administratif dan peradilan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pribumi baik di tingkat regional maupun di tingkat lokal. Pelaksanaan pajak kepala, peraturan-peraturan tentang rodi, dan vaksinasi tak disangsikan lagi sangat mempengaruhi kehidupan kaum petani dan karenanya menyebabkan timbulnya kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena pemberontakan petani hampir seluruhnya merupakan satu fenomen pedesaan, maka pertanyaannya adalah sampai sejauh mana ada korelasi antara penetrasi sistem ekonomi Barat dan ketidakstabilan situasi sosial yang berkecenderungan untuk meletus menjadi pemberontakkan.[59] Apakah ada tekanan-tekanan tambahan yang menyebabkan

ketidakstabilan itu menjadi lebih gawat lagi? Jawaban-jawabannya mengacu kepada banyak segi dari fonemen itu.

Oleh karena kita sudah berasumsi bahwa ada korelasi antara gerakan itu dan kelas-kelas sosial di Banten, maka stratifikasi sosial masyarakat Banten harus dianalisa. Dari lapisan-lapisan manakah peserta-peserta gerakan itu diangkat dan digerakkan? Dan dari lapisan-lapisan mana pemimpin-pemimpinnya? Bagaimana kedudukan sosio-ekonomis mereka pada umumnya? Dalam mendefinisikan status sosial kelompok pemberontak, maka faktor-faktor ekonomi seperti pemilikan tanah, penyewaan tanah dan penguasaan tanah akan dianggap sebagai determinan-determinan yang relevan. Proses perubahan sebagai gejala yang menyertai masuknya kebudayaan Barat secara progresif telah melahirkan golongan-golongan sosial baru dan menyebabkan suatu re-stratifikasi dalam masyarakat Banten. Kaum bangsawan, yakni aristokrasi tradisional, telah merosot kedudukannya dan menjadi miskin dan karenanya tidak mempunyai kekuasaan politik iagi, meskipun mereka masih mempunyai prestise sosial. Dalam menghadapi disintegrasi sosial, kaum aristokrat tradisional dan kaum petani masih terus berpegang pada peranan-peranan tradisional mereka. Seperti akan terlihat nanti, dalam banyak hal mereka bekerja sama untuk melawan penetrasi sistem-sistem nilai Barat lebih lanjut. Semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan rasa tersingkir dan frustrasi yang mendalam di kalangan kaum elite agama, yang dengan sendirinya berusaha mengadakan persekutuan politik dengan kedua golongan tadi. Golongan yang baru dapat diidentifikasikan sebagai aristokrasi modern, yang terutama terdiri dari pegawai negeri atau birokrat. Golongan itu muncul bersamaan dengan ekspansi administrasi Belanda, sebagai golongan elite baru yang menganjurkan modernisasi sementara mereka sendiri untuk sebagian masih tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional. Aristokrasi lama melihat dalam perkembangan ini satu kesempatan untuk mempertahankan prestise dan pengaruh sosialnya, sementara mereka berusaha memulihkan kedudukan mereka dengan jalan memperkuat afinitasnya dengan elite baru. Dengan ini kita sampai kepada masalah-masalah yang akan dibahas dalam Bab III.

Dampak umum kekuasaan formal Belanda terhadap sistem politik di Banten akan merupakan pokok perhatian dalam bab ini. Adanya kekuasaan Belanda secara berdampingan inilah yang telah menimbulkan suatu situasi politik yang semakin tidak stabil. Situasi ini tercemun dalam pemberontakan-pemberontakan yang silih berganti. Pemerintah kolonial secara berangsur-angsur membangun satu sistem birokrasi yang memaksakan peraturan-peraturan legal-rasional kepada rakyat. Kaum bangsawan yang sudah menjadi miskin dan pemimpin-pemimpin agama lalu merupakan kekuatan-kekuatan yang melawan penguasa-penguasa kolonial.

Ketegangan antara aristokrasi tradisional dan elite agama di satu pihak jauh lebih kentara. Selama beberapa dasawarsa persekutuan-perselcutuan yang rapuh sering terjadi; sementara proses peleburan golongan yang terakhir itu ke dalam sistem administratif kolonial berlangsung, permusuhan terbuka terus meningkat. Kegiatan-kegiatan agitasi dari pihak pemimpin-pemimpin agama ditujukan terhadap elite baru dan penguasa-penguasa kolonial. Mereka menggunakan gerakan-gerakan milenari dan kekerasan, sementara elite baru pada akhimya bersedia menyesuaikan diri kepada unsur yang dominan dalam masyarakat Banten, yakni penguasa kolonial. Lalu akan ditunjukkan bahwa golongan-golongan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat Banten dipengaruhi secara berbeda-beda oleh proses westernisasi dan bahwa, karenanya, orang-orang dari pelbagai golongan terlibat dengan cara-cara yang berbeda dalam konflik institusional itu. Elite agama dan sebagian dari aristrokrasi lama tetap berorientasi kepada tradisionalitas, sementara elite baru lebih cenderung untuk menerima baik modernisasi, meskipun masih terdapat kesetiaan institusional yang dualistis. Sebagai akibat adanya afinitas antara elite baru dan kaum bangsawan, prestise yang pertama menjadi bertambah. Dilihat dari segi akulturasi, kita dapat menganggap gerakan-gerakan sosial di Banten sebagai satu bentuk konflik antara golongan-golongan yang dapat dibedakan satu sama lain dan menganut norma-norma dan nilai-nilai yang saling berlawanan. Di bawah pengaruh Barat, masyarakat Banten terpecah menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan berdasarkan kesetiaan kepada lembaga-lembaga tradisional atau kepada lembaga-lembaga yang didatangkan dari luar.

Dampak Barat itu mempunyai efek yang mengganggu keseimbangan pola-pola integrasi politik yang tradisional, dan kekuasaan Belanda yang sudah berdiri kokoh menyebabkan sulitnya bagi kekuatan-kekuatan tradisional untuk mempertahankan pengaruh mereka atas masyarakat. Satu-satunya cara untuk bereaksi terhadap efek yang mengacaukan lembaga-lembaga tradisional adalah memobilisasi kaum petani dan melawan kekuasaan kolonial.[60]

Pergolakan sosial yang kronis (lihat Bab IV) merupakan salah satu gejala disintegrasi masyarakat Banten setelah runtuhnya kesultanan. la merupakan akibat ketidakstabilan sistem politik yang berlangsung di Banten sejak kuartal pertama abad XIX. Di satu pihak terjadi bentrokan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern serta keambrukan kekuatan-kekuatan sosial yang lama, sementara di lain pihak tidak ada kekuatan integratif sebagai penggantinya. Persekutuannya dengan kekuasaan yang dominan telah menyebabkan kedudukan elite baru bertambah kuat, akan tetapi untuk waktu yang lama pengaruhnya tidak efektif, oleh karena rakyat sudah terbiasa memandang pemerintah kolonial dan kekuasaan politiknya dengan sikap tidak hormat, menghina dan malahan membangkang. Pergolakan lokal merupakan satu ciri yang menonjol, dan mencerminkan kemunduran dan ketidakefektifan administrasi. Pejabat-pejabat lokal tidak mampu memelihara ketertiban dan ketentraman di daerah-daerah pedesaan. Keadaan yang kacau itu menampakkan dirt dalam bentuk perampokan, pembegalan, penyamunan dan perbuatan-perbuatan di luar hukum.[61] Kejahatan-kejahatan itu berkembang subur akibat memburuknya administrasi lokal dan tidak berdayanya polisi. Ada baiknya untuk menelaah hubungan yang terdapat antara unsur-unsur yang membangkang dan rakyat pada umumnya, dan pamongpraja atau pemberontak-pemberontak pada khususnya. Adalah satu kenyataan bahwa unsur-unsur yang rusuh di Banten mendapat bantuan dan dorongan dari rakyat setempat, dan sering kali menimbulkan rasa simpati dan kagum di kalangan rakyat jelata. Malahan ada kasus-kasus di mana mereka bisa bergaul dengan pamongpraja; dalam kasus-kasus lainnya mereka bergabung dengan pemberontak-pemberontak politik. DI dalam kerangka situasional masyarakat Banten abad XIX, pergolakan sosial bisa dianggap tidak saja sebagai gejala kacaunya tatanan kehidupan, melainkan juga sebagai kancah peleburan tempat munculnya kebangkitan agama di satu pihak dan pemberontakan di pihak lain.

Suatu kebangkitan kembali agama (lihat Bab V) meluas ke seluruh Pulau Jawa dan bagian-bagian besar Indonesia selama pertengahan kedua abad XIX. Ini ada korelasinya dengan meningkatnya jumlah orang yang naik haji, beredarnya pesan terakhir Nabi, meningkatnya kegiatan orang-orang yang berdakwah dari tempat ke tempat, dan bermunculannya tarekat-tarekat Islam dan sekolah-sekolah agama. Kebangkitan kembali agama ini mampu mencetuskan tanggapan yang emosional terhadap situasi-situasi yang mengganggu atau yang menimbulkan frustrasi. Tarekat-tarekat yang tumbuh dengan suburnya mendorong fanatisme, sedangkan gagasan eskatologis Islam mengubah para anggota tarekat-tarekat itu menjadi kelompok-kelompok revolusioner yang miliitan, yang.bertujuan menggulingkan kekuasaan kolonial.[62]

Dalam studi mengenai konflik sosial sebagai salah satu aspek utama gerakan sosial, kita harus memberikan perhatian kepada peranan yang menentukan yang dimainkan oleh elite agama, oleh karena golongan ini terdiri dari penduduk pedesaan, seperti juga kaum petani, dan menentang modernisasi serta berusaha mencegah perubahan sosial di Banten. Nilai-nilai keagamaan digunakan untuk memperkuat nilai-nilai tradisional dan untuk melawan pengaruh-pengaruh Barat yang melanggar dan merongrong keefektifan norma-norma tradisional. Elite tradisional secara berangsur-angsur dibatasi pengaruhnya oleh pihak yang berkuasa dan dipaksa untuk mengambil sikap agresif. Mereka mengembangkan seperangkat kebiasaan-kebiasaan menurut sistem norma tarekat-tarekat tertentu, yang dijadikan dasar bagi tuntutan mereka atas prestasi sosial yang tinggi dan juga atas monopoli penggunaan paksaan. Sistem normatif ini menimbulkan kekuasaan politik dengan akibat bahwa elite agama tampil sebagai lawan kuat birokrat-birokrat kolonial. Kekuasaan dan pengawasan sosial beralih dari pejabat-pejabat ke tangan pemimpin-pemimpin agama. Dengan mendirikan tarekat-tarekat dan sekolah-sekolah agama, yang disebut belakangan ini berhasil mempertahankan kekuasaan mereka. Pada waktu yang bersamaan, tarekat-tarekat mistik sebagai satu lembaga sosial tumbuh

menjadi suatu sistem kekuasaan dan memerintah dengan menggunakan paksaan dan otoritas. Sesungguhnya, tarekat-tarekat itu merupakan satu ancaman potensial baik terhadap pemerintahan lokal maupun terhadap pemerintahan pusat. Dengan semakin meningkatnya kekacauan, ambisi pemimpin-pemimpin agama tidak lagi terbatas pada komunitas lokal, dan perjuangan memperebutkan pengaruh atas kaum tani telah mendorong mereka untuk mencari dukungan dari sumber-sumber tambahan di luar komunitas dan golongan mereka sendiri. Meskipun kemudian terbentuk suatu hubungan di antara pemimpin-pemimpin agama itu, namun tidak sampai lahir suatu organisasi yang meliputi seluruh negeri dengan satu badan pimpinan pusat. Sebagai akibatnya, mereka tetap lemah sebagai pemimpin-pemimpin gerakan dan tidak mampu bertindak secara kolektif dalam suatu pemberontakan besar-besaran. Dalam hubungan ini, perlu diberikan tekanan kepada fungsi tarekat-tarekat mistik sebagai alat organisasi untuk meningkatkan kesadaran golongan atau untuk memberikan satu mekanisme yang efektif untuk mengembangkan solidaritas dan untuk meningkatkan agitasi. Perkembangan mereka didukung dan dipermudah oleh kampanye-kampanye kebangkitan kembali yang melanda seluruh negeri selama lebih dari satu dasawarsa. Kampanye-kampanye itu menumbuhkan satu suasana yang bersemangat dan bergairah, disertai perasaan tidak senang terhadap elite sekuler. Oleh karena golongan ini sudah dicemari kebudayaan yang asing dan kafir, maka mereka tidak dapat diberi tempat di dalam struktur otoritas yang karismatik itu. Tarekat-tarekat itu nampaknya mempunyai daya tarik yang kuat bagi kaum tani yang tergolong lapisan sosial bawahan. Periode persiapan pemberontakan (lihat Bab VI) harus dilihat dari segi iklim kebangkitan kembali yang penuh gairah itu.

Dalam Bab VI, disajikan suatu laporan tuturan mengenai peristiwa-peristiwa terpenting yang mendahului ledakan pemberontakan itu, mulai dari tahap pendahuluan untuk mengobarkan semangat massa sampai kepada tahap formal persiapan yang sesungguhnya. Keresahan umum memanifestasikan dirinya dalam agitasi yang meningkat di kalangan murid-murid sekolah agama, dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh para ulama untuk mengunjungi pusat-pusat lembaga keagamaan di pelbagai daerah di Pulau Jawa dan dalam meningkatnya prestise dan pengaruh kaum ulama di kalangan petani. Selain dari itu, di dalam lingkungan tarekat-tarekat orang semakin ramai berbicara tentang pemberontakan dan "perang jihad". Semua fenomen itu dapat dipandang sebagai gejala permulaan suatu gerakan revolusioner. Dengan semakin mendekatnya saat pemberontakan, nampak kegiatan yang meningkat di kalangan kaum ulama, sementara perhatian rakyat dipusatkan kepada gagasan Perang Suci, dan kepada harapan akan kembalinya kesultanan. Dan akhirnya, menjelmalah suatu tujuan politik revolusi, yakni penghancuran pemerintahan kolonial. Dengan adanya kegairahan kolektif di kalangan anggota-anggota tarekat, keresahan dan rasa tidak puas dapat diintegrasikan: anggota-anggota tarekat itu setiap saat dapat dikerahkan sebagai massa-massa yang aktif untuk usaha-usaha bersama, yakni pewujudan gagasan milenari.

Waktu persiapan adalah periode di mana pemimpin-pernimpin gerakan tampil ke depan, komunikasi di antara para pemimpin itu dibentuk dan diperkuat, dan rencana serta siasat disusun. Cara-cara propagandanya antara lain adalah berkampanye terhadap penguasa kolonial, indoktrinasl serentak mengenai gagasan Perang Suci, dan menawarkan janji-janji yang menggiurkan seperti penghapusan pajak dan pembentukan sebuah negara Islam.

Bab VII melukiskan pemberontakan yang sebenarnya yang meletus pada malam hari tanggal 9 Juli 1888. Pemberontakan utama terjadi di Cilegon di mana pemusatan pemberontakan yang terbesar meledak dalam tindakan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan perampokan. Teror menandai periode yang singkat itu, di mana Cilegon diduduki oleh kaum pemberontak. Kita harus menyehdiki apa yang menjadi sasaran massa itu. Siapa-siapa yang jatuh sebagai korban pembunuhan dan penganiayaan? Siapa-siapa yang merupakan sasaran sernula kaum pemberontak? Apakah ada suatu pemerintahan teror? Adakah bukti tentang kebencian terhadap penguasa-penguasa asing dan terhadap pejabat-pejabat pribumi yang setia kepada mereka? Terhadap siapa kebencian rakyat itu ditujukan? Apakah ada keinginan untuk melakukan perampokan-perampokan?

Deskripsi itu dimaksudkan untuk mencakup seluruh proses, mulai dari serangan yang pertama sampai kepada tertawannya pemimpin-pemimpin utama pemberontakan. Tahap

terakhir pemberontakan dibahas dalam Bab VIII, dan terutama mengenai usaha menolong korban-korban yang selamat dari pertumpahan darah dan pengejaran terhadap pemimpin-pemimpin pemberontakan yang memakan waktu yang lama.

Pokok-pokok utama yang disajikan dalam Bab IX diberi judul "Kelanjutannya". Di antara tindakan-tindakan drastis yang diambil oleh pemerintah adalah: menempatkan pasukan-pasukan kecil di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat pemberontakan, pemecatan pejabat-pejabat yang dianggap bersalah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang di bidang administratif sehingga menimbulkan perasaan tidak puas dan kebencian di kalangan rakyat, pencabutan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan mengenai pemungutan pelbagai macam pajak. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil tindakan-tindakan jangka panjang untuk mencegah terulangnya pemberontakan. Sekolah-sekolah agama dan guru-guru agama ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah. Satu kebijaksanaan baru harus diambil mengenai peraturan-peraturan Kerja Wajib, sewa tanah, pajak perdagangan dan pajak kepala. Untuk mengetahui sebab-sebab utama perasaan tidak puas di kalangan rakyat, diselenggarakan suatu penyelidikan yang ekstensif oleh pemerintah pusat.

CATATAN METODOLOGIS

Dalam pengantar ini, telah dikemukakan beberapa di antara variabel-variabel yang paling menentukan yang telah mempengaruhi perkembangan gerakan; akan tetapi kita masih belum membahas pelbagai kombinasi historis yang kongkrit dari variabel-variabel itu serta efeknya yang kongkrit terhadap meletusnya pemberontakan. Analisa masalah-masalah itu penting artinya bagi pemahaman dinamika golongan-golongan, lembaga-lembaga dan nilai-nilai, yang menuju kepada pematangan semangat pemberontakan. Di dalam studi ini digunakan pendekatan faktor sebagai pelengkap analisa proses, yang memperbedakan tahap-tahap perkembangan menurut urutannya. Dalam bab-bab berikut ini, pendekatan proses diberi tekanan, sedangkan bab terakhir akan membahas beberapa aspek analitis dari gerakan itu. Metodologi ini didasarkan atas prinsip tentang. perlunya memandang suatu gerakan sosial seperti gerakan ini dari perspektif waktu dan perkembangan, sebelum dapat diadakan perbandingan sistematik atau analisa teoretis. Analisa terakhir bertujuan untuk menyoroti konfigurasi-konfigurasi dan memperbesar dimensi-dimensi gerakan.

Seperti telah dikemukakan di atas, pemberontakan itu, sebagai buah hasil suatu gerakan sosial yang telah berlangsung lama, dapat dipandang dari segi akulturasi pada umumnya, dan mfenarisme pada khususnya.[63] Kontak kebudayaan mengakibatkan perubahan institusional yang dinamis, menimbulkan destrukturalisasi dan diferensiasi norma-norma, nilai-nilai, dan simbol-simbol. Dari sudut pandangan sosiologis, kita dengan mudah dapat melihat proses-proses perubahan sosial dan gejala-gejala yang menyertainya-konflik sosial, disorganisasi dan reintegrasi sosial.[64] Suatu penjelasan berdasarkan sosiologi agama akan menampilkan proses-proses yang esensial seperti sekularisasi, identifikasi golongan dan *escapism*.[65] Sebenarnya analisa ini hanya mencakup pula unsur-unsur yang esensial dari gerakan sosial, seperti tujuan-tujuan, ideologi, kohesi golongan, organisasi dan taktik.[66] Dan akhimya, transformasi politik yang terjadi selama abad XIX dapat dianalisa dari segi peralihan dari otoritas tradisional ke otoritas legal-rasional, dan gerakan itu sendiri dari segi penyelenggaraan otoritas karismatk.[67]

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Di dalam dokumen-dokumen itu digunakan istilah-istilah yang berlainan untuk menunjukkan kategori kerusuhan-kerusuhan itu. Kemsuhan-kerusuhan itu dengan jelas dibedakan dari

pemberontakan- pemberontakan besar dengan proporsi-proporsi yang menyerupai peperangan, sepeti Perang Aceh atau Perang Jawa. Istilah-istilah yang digunakan itu adalah: *onlusten* dalam Vb.13 Jan. 1859. no. 15; *ongeregeldheden* dalam Vb. 16 Des. 1964; R Kab.; complot dalam Vb. 2 Okt.1865, E Kab.; *samenscholingen* dalam Vb. 8 Okt. 1866, C Kab.; *woelingen* dalam Vb. 27 Nov. 1871, no. 20; *onrust* dalam MR 1886, no. 90a; *rustverstoring* dalam MR 1888, no. 413. Di dalam studi ini tidak diadakan pembedaan yang tajam antara kedua kategori pemberontakan itu, oleh karena kedua-duanya mempunyai banyak karakteristik yang sama; kedua-duanya bersifat tradisional dan regional, berbeda sekali dengan gerakan-gerakan nasional yang modern. Pemberontakan-pemberontakan itu juga harus dibedakan dari revolusi-revolusi istana atau peperangan suksesi.

[2] Pemberontakan-pemberontakan yang besar jumlahnya itu yang telah tedadi di Pulau Jawa selama kurun waktu 1840 sampai 1875 telah dicatat oleh de Waal (1876, hal. 228-229). Menurut dia, hanya dalam tahun-tahun 1844,1847,1860, 1863,1871 dan 1874 sajalah tidak terjadi pemberontakan. Daftar itu tidak lengkap, sejumlah pemberontakan tidak dicantumkan, seperti tahun 1864 di Klaten; 1865 di Cirebon, Tegal, Yogyakarta, dan Kedu; tahun 1872 di Pekalongan. Gerakan-gerakan dengan sifat yang khusus dilukiskan secara terpisah. Ini merupakan satu pertanda, bahwa pemerintah kolonial sudah menyadari arti gerakan semacam ini. De Waal selama beberapa waktu bekerja sebagai Sekretaris Pemerintah Pusat di Hindia Belanda, sehingga ia dapat menggunakan dokumen-dokumen resmi.

[3] Dalam studi ini digunakan pembedaan yang diadakan oleh Hobsbawn antara gerakan-gerakan kuno (archaic), dan gerakan-gerakan urban atau industrial, lihat Hobsbawn (1963, hal. 6). Karakteristtk-karakteristik modern itu dapat ditemukan dalam gerakan-gerakan sosial modern seperti yang dimaksud oleh Heberle, umpamanya, gerakan buruh, gerakan petani, Naziisme, Zionisme, Komuninne. Konsepnya mengenai gerakan sosial begitu luas sehingga mencakup pula gerakan-gerakan nativistik dan gerakan-gerakan petani. Lihat Heberle (1949, hal. 6).

[4] Sifat bunuhdiri dari pemberontakan-pemberontakan petani di Jawa merupakan hal yang inheren dengan bentuk magic-religius dari pengejawantahan perjuangan mereka. Di sini kita menjumpai perbedaan yang sesungguhnya antara pemberontakan-pamberontakan itu dan gerakan-gerakan politik yang modern dengan ideologi yang sekular serta alat-alat organisasi yang efektif. Akan tetapi kita harus ingat, bahwa terdapat suatu kesinambungan dari pemberontakan-pemberontakan religius pra-modern sampai kepada gerakan-gerakan revolusioner yang besar-besaran dari bersifat sekular. Pemberontakan tahun 1888 di Banten harus kita tempatkan pada satu titik dalam kontinuum itu. Lihat Talmon dalam AES, Vol. III (1962), hal.125-148.

[5] Istilah *'Pax Neerlandica'* mengacu kepada periode kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia di mana ketentraman dari ketertiban harus ditegakkan di seluruh Nusantara; apa yang dinamakan pasifikasi di banyak daerah di luar Jawa /Outer Provinces) ketika itu sudah berakhir.

[6] Penjelasan gerakan-gerakan petani atau *melinarisme* dari segi bentrokan antara kekuasaan kolonial dari masyarakat tradisional, dapat ditemukan di dalam banyak studi, umpamanya, Bodrogi (1951), Balandier (1953), Emmet (1956), Worsley (1957), Kobben (1959), Pieris (1962), Lanternari (1963). Hal itu relevan bagi studi ini karena mengacu kepada kondisi-kondisi yang telah diciptakan oleh kolonialisme dari kepada peristiwa-peristiwa, proses-proses dari kecenderungan-kecenderungan yang ikut membantu timbulnya aliran-aliran anti-Barat.

[7] Di sini cukup disebutkan karya-karya standar yang sudah ada mengenai transformasi dari tradisionalitas ke modernitas, umpamanya karya-karya yang ditulis oleh Burger (1949-1950), Schrieke (1955), Wertheim (1959).

[8] Yang sangat membantu usaha untuk mengetahui identitas pemberontakan-pemberontakan petani dari gerakan-gerakan sosial di Jawa dalam abad XIX adalah studi-studi yang inklusif mengenai gerakan-gerakan milenarisme yang diterbitkan akhir-akhir ini oleh Guaraglia (1959), Muhlman (1961), Thrupp (1962), Lanternari (1963). Sejauh menyangkut gerakan-gerakan di Indonesia, studi-studi itu tidak mengacu kepada data-data mengenai gerakan-gerakan lain dalam abad XIX, kecuali yang ditulis oleh Drewes (1925). Bahan studi ini dimaksudkan untuk menyajikan data-data baru bagi perbandingan *cross-cultural* dari aspek-aspek khusus gerakan-gerakan itu.

[9] Bagian terbesar dari pemberontakan-pemberontakan di Banten telah disebutkan atau dilukiskan dalam karya-karya Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832), hal. 87-88; Francis, Vol. 11(1856-1860), hal. 51-78; de Waal, Vol. 1 (1876) hal. 219-222; lihat juga artikel-artikel dalam TNI (1859), no. 1, hal.135-187; TNI (1870), no. 2. hal. 325-341.

[10] Dapat dikatakan bahwa karya-karya yang diterbitkan akhir-akhir ini mengenai sejarah Indonesia pada umumnya melupakan pemberontakan-pemberontakan petani atau hanya menyinggungnya sepintas lain. Karya-karya abad XIX jelas memberlkan perhatian yang lebih besar kepada hal tersebut. Van Deventer dari Veth menus deskripsi-deskripsi singkat mengenai sejumlah kerusuhan; lihat van Deventer, Vol. II (1886-1887), hal. 72, 110; Veth, Vol. II (1896), hal. 404. Deskripsi Stapel mengenai pemberontakan-pemberontakan di Banten meliputi setengah halaman, lihat Stapel, Vol. V (1938-1939), hal. 285. Dalam buku-buku de Graaf dari Vlekke topik ini tidak disebut-rebut.

[11] Pierson (1877), Colenbrander (1925-1926), Stapel (1938-1939), Vlekke (1959).

[12] Pendekatan semacam ini sesuai dengan konsep ahli sejarah konvensional mengenai historiografi. Semua fakta di luar gelanggang politer dari tindakan-tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah dikesampingkan. Contoh-contoh yang tipikal dari historlografi -kolonial mengenai Indonesia adalah Meinsma (1872-1875), van Deventer (1886-1887), Veth (1896). Buku yang disebut paling akhir itu juga menunjukkan bahwa sejarah bangsa-bangsa bukan Barat sudah dinaikkan derajatnya dan menjadi otonorn, terpisah dari bidang etnologi.

[13] Salah satu usaha untuk meninggalkan sudut pandangan ini dilakukan oleh van Leur (1955). Buku-buku Schrieke (1955, 1957) juga mencerminkan sudut pandangan baru. Dalam periode sesudah perang, Resink (1950) menyusun beberapa konsep yang Indonesia-sentris. Masalah pendekatan baru ini telah dibahas secara luas selama Seminar mengenai Sejarah Indonesia di Yogyakarta, dalam tahun 1957. Lihat juga tulisan-tulisan yang lebih baru mengenai pendekatan-pendekatan baru, Small (1951), Benda (1962), Soedjatmoko, Mohammad Ali, Resink dari McT. Kahin, eds. (1965), Wertheim (1965).

[14] Esey-esey yang penting mengenai pemberontakan-pemberontakan petani kebanyakan merupakan artikel-artikel mutakhir dalam majalah-majalah atau suratkabar-suratkabar: TNl (1870, 1871), IG (1886, 1888, 1889, 1891, 1892), WNI (1888-1889, 1889-1890); De Loeomotief (1888, 1889), lava Bode (1886,1888), Bataviaaseh Handelsblad (1888).

[15] Mengenai pendekatan struktural terhadap sejarah Asia Tenggara, lihat Benda dalam JSAH, Vol. III, no. 1 (1962), hal. 106-138. Penulis buku ini telah mencoba menggunakan pendekatan multidimensional dengan referensi khusus kepada sejarah Gerakan Nasional di Indonesia; lihat Sartono Kartodirdjo dalam JSAH, Vol. III, no.1(1962), hal. 67-94).

[16] Yang sangat esensial bagi sudut pandangan yang Indonesia-sentris adalah peranan aktif manusia Indonesia dalam sejarah Indonesia yang merupakan kontras dengan peranan ekstra yang dikenakan kepadanya oleh ahli-ahli sejarah kolonial dalam historiografi kolonial. Penggunaan pendekatan stnaktural akan berguna dalam usaha menemukan pelbagai aspek perkembangan historis di Indonesia, di mana *dramatis personae*-nya adalah orang-orang Indonesia sendiri.

[17] Drewes(1925)

[18] Van der Kroef dalam CSSH, Vol. I (1958-1959), hal. 299.

[19] Sepengetahuan kami, penuturan yang ia sajikan mengenai gerakan di Banyumas untuk sebagian dapat didentifikasiran dengan laporan yang telah ditulis oleh residen Banyumas, tertanggal 12 Januari 1889, dalam MR. 1889, no. 41; mengenai sebuah laporan sebelumnya, lihat Exh. 3 Febr.1887, no. 68.

[20] Masing-masing di antara mereka melakukan satu studi filologis mengenai gagasan-gagasan dan konstruksi-konstruksi konseptual; gagasan-gagasan dan kosntruksi-konstruksi itu ditafsirkan dan dievaluasi secara kritis; penulis-penulisnya tidak begitu memperhatikan makna gagasan-gagasan itu bagi rakyat. Lihat Wiselius (1872), Cohen Stuart (1872), Brandes (1889), Snouck Hurgronje (1923).

[21] Sebuah studi yang terdahulu oleh penulis buku ini membahas sejumlah aspek struktural dari gagasan-gagasan mesin yang telah berkembang di Pulau Jawa, dan kesimpulannya adalah bahwa filsafat Jawa mengenai sejarah seperti yang diekspresikan dalam pelbagai gagasan mesianis selama berabad-abad, membayangkan sejarah sebagai suatu perkembangan yang linear dengan beberapa ciri siklis. Lihat Sartono Kartodirdjo (1959).

[22] Van der Kroef, dalam *CSSH*, Vol. I (1958-1959), hal. 299-323.

[23] Hobsbawn (1963), hal. 6; konsep tentang dikotomi gerakan-gerakan sosial ini memerlukan beberapa penghalusan. Mungkin lebih baik untuk memandang pelbagai bentuk gerakan sosial sebagai kasus-kasus dalam suatu kontinum dari gerakan-gerakan religius sampai kepada gerakan-gerakan sekular. Mengenai pemberontakan tahun 1888 di Banten, masalahnya adalah untuk mendefinisikan peranan yang telah dimainkan oleh gagasan-gagasan *magic-religius* atau mesianis di dalam gerakan itu. Mengenai suatu penelaahan yang kritis tentang asumsi-asumsi teoretis dari studi-studi terakhir mengenai gerakan-gerakan sosial, lihat Talmon dalam *AES*, Vol. III (1962), hal.145 -146.

[24] Beberapa contoh di antaranya adalah: komplotan Mangkuwijoyo dalam tahun 1865, dalam *TNI* (1871), no. 2, hal. 206-210;kerusuhan-kerusuhan di Bekasi, dalam *TNI*, (1873), no. 2, hal. 305f; peristiwa Pulung, dalam *IG* (1886), no. 1, hal. 231-238, 378-380; peristiwa Ciomas dalam *IG* (1886), no. 2, haL 941f; peristiwa Sriraton, dalam *IG* (1889), no. 1, hal. 216-221; juga dalam *IG* (1889), no. 2, hal. 776; huru-hara di Campea, dalam *IG* (1892), no. 2, hal. 1920-1926.

[25] *IG* (1891), no. 2, hal.1137-1206.

[26] Bandingkan *IG* (1891), no. 2, hal.1148-1162 dengan laporan dari Kontrolir Serang tertanggal 19 Mai 1889, no. 16, yang terdapat dalam *MR*. 1889, no. 376.

[27] Van Sandick (1892).

[28] Van Sandick (1892), hal. 28-86, di mana dibahas wabah penyakit ternak. Penulisnya pernah tinggal beberapa lama di daerah itu dan mengenal kondisi-kondisi kehidupan yang terdapat pada waktu itu. Mengenai kritik terhadap pandangan van Sandick. lihat H. Djajadiningrat dalam Handelingen (1921), hal. 309; cf. Snoudc Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, no. 1 (1924), hal. 251-256.

[29] Beberapa contoh: Abegg (1928). Waft (1943), Schlosser (1949), Balandier (1955), Barnett (1957), Cohn (1957), Worsley (1957), Anderson (1958), Kobben (1959).

[30] Bodrogi (1951), Guiart (1951), Balandier (1953), Pieris (1962); sebuah tinjauan yang komprehensif mengenai gerakan-gerakan milenarisme sebagai perjuangan melawan kekuasaan asing terdapat dalam buku Lanternari; lihat Lanternari (1963).

[31] Manifestasi-manifestasi seperti kultus-kultus Cargo di Melanesia, tari Roh di America Utara, Kimbangisme di Afrika, Mahdisme di Africa Utara dan negerl-negeri Islam lainnya, semuanya

telah dipelajari secara mendalam dan menyeluruh.

[32] Dalam studi ini tidak ada pembahasan filosofis, untuk ini kiranya cukup disebutkan penulis-penulis seperti McIver (1943), Morris Cohen (1947), Dovring (1960), van Dyke (1960), Aron (1961). Konsep-konsep "sebab akibat dan kondisi sosial" digunakan semata-mata sebagai alat metodologis. Seluruh prosedur analisa dan sintesa harus didasarkan atas suatu rancangan teoretis, di mana konsep-konsep merupakan unsur-unsur utamanya. Didefinisikan secara luas, istilah "kondisi" mengacu kepada suatu motif, variabel atau sebab. Lihat van Dyke (1960), hal. 39.

[33] Kondisi-kondisi dikatakan perlu apabila kehadirannya esensial bagi kejadian fenomen yang bersangkutan; kondisi-kondisi itu dirasakan memadai jika kehadirannya sudah cukup untuk menimbulkan kejadian itu; lihat van Dyke (1960), hal. 39.

[34] Dalam beberapa studi terakhir telah diadakan pendekatan antara sosiologi dan sejarah, yakni oleh Worsley (1957), Wilson (1960),Cohn (1961), Hobsbawn (1963). Pada umumnya orang terpaksa menggunakan disiplin-disiplin itu mengingat sifat pokok persoalannya itu sendiri serta bahan-bahan yang tersedia.

[35] Semua aspek gerakan-gerakan sosial itu telah dipelajari dari sudut pandangan sosiologis, umpamanya oleh Yoder (1927-1928), Meadows (1943), Steward J. Burgess (1944), Heberle (1949), King (1956).

[36] Akhir-akhir ini semakin banyak studi memberikan tekanan kepada aspek-aspek konflik sosial yang bersifat menentukan dalam masyarakat, sementara teori tentang ekuilibrium sosial dikecam keras. Lihat Leach (1954), Gluckman (1963), Firth (1964), Wertheim (1965). Masyarakat Banten dalam abad XIX merupakan satu contoh dari situasi konflik yang kronis.

[37] Menurut Evans-Pritchard (1961, hal. 14-15), gerakan-gerakan sosial, karena sifat-sifat dasarnya, menjadi suatu bidang bersama bagi beberapa disiplin. Bandingkan: Tahnon dalam AES, Vol. LII (1962), hal.126.

[38] Menurut sementara ahli antropologi sosial di Inggris, lingkup antropologi sosial adalah identik dengan lingkup apa yang oleh ilmuwan-ilmuwan kontinental dinamakan sosiologi, ditinjau dari segi bidang dan metodanya; lihat Evans-Pritchard (1948)

[39] . Lihat Max Weber (1964); konsep mengenai otoritas tradisional, karismatik dan legal-rasional bisa diuji dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Banten abad XIX.

[40] Dokumen-dokumen yang disimpan dalam arsip-arsip bekas Kementerian Urusan Jajahan di kategorikan di bawah judul-judul berikut: Geheim-en Kabinets Verbaal (notulen-notulen rahasia dan notulen-notulen kabinet), *Exhibitum* (semua korespondensi yang masuk di Kementerian Urusan Jajahan), Mailrapport (laporan melalui pos yang berisi tindasan-tindasan korespondensi, laporan-laporan, keputusan-keputusan), Geheime Oost Indische Besluiten (keputusan-keputusan rahasia), Oost•Indische Besluiten (keputusan-keputusan), Verbaal van het Departement (berita-berita acara Departemen). Laporan-laporan melalui pos dikirimkan ke Negeri Belanda mulai tahun 1872. Dokumen-dokumen itu dapat dicari melalui agenda-agenda, indeks-indeks dan daftar-daftar. Mengenai kasus pemberontakan Banten tahun 1888, data-datanya yang relevan terdapat di dalam semua kategori dokumen-dokumen itu, akan tetapi sebagian besar dari padanya dapat dicari dalam verbaal, exhibitum, mailrapport dan Oost-In dische Besluiten. Soal-soal lokal dan regional tidak mendapat perhatian pemerintah metropolitan, kecuali jika soal-soal itu relevan bagi pemberontakan. Mengenai sumber-sumber arsip, lihat van de Wal (1963), hal. xvii f.

[41] Di dalam Koloniale Verslagen dan juga di dalam Politieke Verslagen yang terdahulu, yakni sebelum tahun 1856 ada disebut-sebut mengenai kerusuhan-kerusuhan sebagai peristiwa-peristiwa yang sangat penting, umpamanya laporan politik yang meliputi periode 1839-1848,

dalam Exh. 31 Januari 1851, 27 bis; idem, selama tahun 1849, dalam exh. 27 Agustus 1851, .no. 220. geheim; , idem, selama tahun 1851, dalam Exh. 14 Des. 1852, no. 438, geheim; idem, selama tahun 1852, dalam Exh. 27 Mei 1853, no. 225, *geheim*.

[42] Bahan yang sangat penting bagi studi ini diambil dari perangkat dokumen-dokumen, yang dalam arsip-arsip kolonial diberi kode Vb. 7 Feb. 1889, no. 4. Ia terdiri dari 163 dokumen, di antaranya yang paling tebal adalah laporan Direktur Departemen Dalam Negeri. Lampiran-lampiran laporan ini mengacu kepada, umpamanya, daftar orang-orang yang terbunuh dan luka-luka, daftar ulama-ulama di afdeling Anyer, sebuah daftar tempat-tempat keramat, ringkasan pemeriksaan atas pemberontak-pemberontak yang ditahan, laporan-laporan mengenai jumlah haji, mengenai pajak perdagangan, dan sebagainya.

[43] Satu hal yang dtketahui benar oleh orang-orang dari zaman itu adalah bahwa administrasi kolonial sudah kewalahan dengan "pekerjaan kertas". Pada umumnya ada keluhan-keluhan mengenai sangat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyusun laporan-laporan, mulai dari laporan desa sampai kepada laporan tahunan dari Menteri Urusan Jajahan kepada parlemen; lihat WNI (1889-1890), hal. 749-750. Salah satu konsekuensi yang berat adalah bahwa pamongpraja tidak mempunyai waktu untuk menyelidiki kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan rakyat; lihat WNI (1889-1890), hal.1312.

[44] Direktur Departemen Dalam Negeri diangkat dengan ketetapan Gubernur Jenderal tanggal 15 Juli 1888, no. 4. Selain bertugas menyelidiki situasi di Banten, ia juga harus membuat laporan, terutama mengenai sebab-sebab pemberontakan.

[45] Hanya 18 informan telah ditanyai mengenai sebab-sebab pemberontakan, dan 19 informan mengenai motivasi pemberontakan. Penyelidikan yang ekstensif tidak dapat dilakukan. Lihat Lampiran D dan H dari Vb. 7 Feb. 1889, no. 4. Dalam banyak hal, rakyat tidak mau menunjukkan tempat-tempat sembunyi kaum pemberontak; lihat Kawat 12 Juli 1888, no. 826, dari Komandan Tentara kepada Gubernur Jenderal dalam MR 1888 no. 484; Kawat 16 Juli 1888, no. 143, dari Residen Banten kepada Gubemur Jenderal, dalam MR 1888, no. 496.

[46] Selain laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, juga ada laporan Residen Banten tanggal 17 Juli 1888 L^3 B dalam MR 1888, no. 496; dan sebuah laporan lainnya dari residen itu tertanggal 22 Sept. 1888, no. 77, dalam Exh. 27 Des. 1888, no. 117. Yang disebut pertama telah dikecam keras oleh Dewan Hindia, yang menyatakan bahwa laporan itu tidak akurat dan terlalu berat sebelah karena memuat penilaian-penilaian apriori. Laporan itu terlalu bersandar pada pernyataan-pernyataan yang dibertakan oleh pejabat-pejabat daerah; tidak ada dilakukan penyelidikan di desa-desa. Khususnya mengenai sebab-sebab pemberontakan, Dewan Hindia menganggap laporan itu tidak meyakinkan; lihat Advis Dewan Hindia, 5 Oktober 1888, dalam Exh. 27 Des. 1888, no. 117.

[47] Pada sore hari tanggal 9 Juli 1888, tidak dapat dikirimkan informasi kepada Gubernur Jenderal mengenai di mana beradanya Residen, Asisten Residen Anyer, dan Bupati Serang, juga mengenai perkembangan-perkembangan selanjutnya di Cilegon; lihat Kawat tanggal 9 Juli 1888, no. 69 dalam MR 1888, no. 484. Malahan-sampai pada tanggal 10 Juli 1888 pun, pejabat-pejabat di Serang masih belum mengetahui sebab-sebab pemberontakan; lihat Kawat tanggal 10 Ju(i 1888, no. 81, dalam MR 1888, no. 484. Ketidakmampuan Residen untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat telah mengakibatkan yang terakhir ini tidak percaya lagi kepadanya; lihat Surat Resmi Gubernur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan tanggal 15 Juli 1888, no. 973, dalam Exh. 18 Agustus 1888, no. 13; lihat juga Ketetapan Gubernur Jenderal tanggal 15 Juli 1888, no. 4.

[48] Lihat Oost-Indisch Besluit (selanjutnya disingkat OIB.) tanggal 15 Juli 1888, no. 4.

[49] Dalam banyak laporan, fanatisme disebut-sebut sebagai satu di antara sebab-sebab utama

pemberontakan; lihat Surat Resmi Residen Banten tanggal 17 JuH 1888 La B, dalam MR 1888, no. 496; lihat juga Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, 19 Juli 1888, La B, dalam MR 1888, no. 506.

[50] Dalam banyak ketetapan disebut-sebut tentang surat-surat resmi rahasia dari residen-residen yang agaknya berisi informasi untuk digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai kenaikan pangkat, penurunan pangkat atau pemecatan pejabat-pejabat; surat-surat resmi ini tentunya berisi banyak informasi mengenai orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi sayangnya kebanyakan dari surat-surat itu sulit diperoleh sebagai akibat cara penggolongannya.

[51] Mengenai informasi yang tersedia tentang informan-informan tersebut di atas, lihat catatan no. 45. Nampaknya sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini berat sebelah, sedangkan untuk mengetahui motif-motif yang sebenarnya di belakang tindakan kaum pemberontak sangat sulit. Ketiadaan kemampuan untuk mengutarakan pikiran ini rupa-rupanya merupakan satu ciri yang umum dari gerakan-gerakan tradisional. Lihat Hugenholtz (1959) mengenai sumber-sumber yang berat sebelah dalam pemberontakan-pemberontakan petani.

[52] Satu contoh dapat ditunjukkan di dalam laporan Direktur Departemen Dalam Negeri itu, di mana ia menyalahkan asisten residen Anyer, Gubels, sedangkan residen, Engelbrecht, tidak dikecam samasekali. Yang berguna sekali dalam mengevaluasi penilaian Direktur itu adalah artikel mengenai riwayat hidupnya, dalam WNI (1889-1890), hal. 252; hal. 621-625. Menurut artikel itu: "Pens van Vleuten adalah tajam, cekatan, dan hidup, oleh karenanya ia terkadang keburu nafsu, dan sekati-sekali fantastic".

[53] Sketsa-sketsa singkat mengenai riwayat hidup pejabat-pejabat terdapat dalam WNI (1888-1889), umpamanya, mengenai pejabat-pejabat di Banten; Haga, komandan tentara; Andre Wiltens, wakil ketua Dewan Hindia; banyak residen di Jawa, dan sebagainya.

[54] Laporan-laporan dari mata-mata pemerintah kadang-kadang dilampirkan pada berita acara sidang-sidang pengadilan; lihat Proces Verbnal (selanjutnya disingkat P.V.) tanggal 1 Mei 1889, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76. Seorang mata-mata yang terkenal busuk, yang mengemukakan tuduhan-tuduhan palsu, adalah orang yang bernama Mas Haji Mohammad Sadik, yang dipekerjakan oleh kontrolir Serang, de Chauvigny de Blot; Lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 234. Cf. Catatan Snouck Hurgroiqe tanggal 15 Agustus 1892, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal. 1986-1999.

[55] Berita-berita acara dari sidang-sidang pengadilan itu merupakan bukti mengenai sikap tersebut; lihat Exh. 28 Jan. 1889, no. 74; Exh. 11 Feb. 1889, no. 77; Exh. 23 Feb. 1889, no. 68, dan seterusnya. Lihat juga Bab VIII, catatan no. 96.

[56] Untuk suatu desktipsi mengenai situasi di Banten, dan juga mengenai hubungan di kalangan orang-orang Eropa serta sikap Residen, (Brat Bataviasch Handelsblud, Mail Editie (1885), hal. 509-511, 620-621, 691-692. Dalam hal ini, dapat dilihat suratkabar-suratkabar lainnya seperti Java bode, Indische Mail, De Locomotlef.

[57] Lihat WNI (1888-1889), khususnya artikel-artikel "Surat-surat dari seorang amtenar". Untuk artikel-artikel yang khususnya mengenai pejabat-pejabat di Banten, lihat ENI (1888-1889) hal. 7-11, 42-44. Lihat juga artikel-artikel Bantamsche Brieven' (Surat-surat dari Banten).

[58] Ada baiknya untuk mempelajari kasus-kasus konflik sebelumnya di Banten zaman kesultanan, untuk mengetahui sampai sejauh mana konfltk itu menjadi meningkat akibat masuknya Barat. Lihat van der Aa, dalam BKI, seri ke 4, Vol. V (1881), hal.1-125.

[59] Sebuah karya yang harus diperbandingkan dengan studi ini adalah laporan Banten (Benda-McVey, 1960), yang membahas pemberontakan Komunis dalam 1926-1927. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan untuk berontak harus dicari.

[60] Peranan kaum ulama di daerah-daerah pedesaan dan sikap menentang mereka terhadap penguasa-penguasa sekuler dibahas oleh Benda (1958, hal.15-18).

[61] Gejala-gejala keresahan sosial ini belum pernah dijadikan pokok studi yang serius; lihat Wulfften-Palthe (1949) dan Meyer (1949-1950) mengenai perampokan-perampokan belum lama berselang; lihat juga Groneman (1891) mengenai perampokan-perampokan dalam abad XIX.

[62] Untuk studi-studi umum menjenai sekte-sekte, lihat Simmel (1906), Gillin (1911), Niebuhr (1929), Wilson (1961). Untuk tulisan-tulisan kontemporer mengenai tarekat-tarekat Sufi di Jawa, Mist van dan Berg (1882), Holle (1886), Schuunman (1890), Snouck Hurgrorge (1924), dan Pijper (1934). Lihat juga artikel-arael dalam TN! (1869), 1870, 1889), MNZG (1884, 1887, 1888, 1892).

[63] Korelasi antara milenarisme dan akulturasi telah dipelajari oleh Barber (1941), Linton (1948), Wallace (1956), Herakovits (1958), Mair (1958).

[64] Untuk studi-studi mengenai agama dan perubahan sosial, lihat Wallis (1943), Yinger (1957).

[65] Untuk satu sinopsis yang baik mengenai teori-teori baru tentang korelasi antera gerakan-gerakan keagaman perebutan kekuasaan, lihat Mair, dalam CSSH, Vol.1(1958-1959), ha112-135; lihat juga Yinger (1963).

[66] Untuk atudi-studi Yang bersifat umum mengenai gerakan-gerakan sosial, lihat Steward J. Burgess (1943-1944), Heberle (1951), King (1962).

[67] Almond dan Coleman (1960), P4mns (1960), Eisenstadt (1961), Max Weber (1964).

Bab II

LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMIS

DAERAH PERISTIWA DAN FAKTOR-FAKTOR EKOLOGIS YANG RELEVAN

Banten, yang terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, luasnya sekitar 114 mil persegi. Menurut angka statistik resmi, penduduk Banten dalam tahun 1892 berjumlah 568.935 jiwa; daerah yang paling padat penduduknya adalah distrik Cilegon.[1] Berkaitan dengan kepadatan penduduk adalah keadaan penggarapan tanah, yang pada gilirannya sangat tergantung kepada lingkungan fisik. Daerah itu dapat dibagi menjadi dua bagian yang sangat berbeda satu sama lain. Bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan, untuk bagian terbesar terdiri dari hutan dan sangat jarang penduduknya. Daerah itu jarang menjadi ajang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Banten.[2] Sebaliknya, Banten Utara dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir abad XIX tanahnya untuk sebagian besar sudah digarap dan karenanya penduduknya jauh lebih padat.[3] Banyak kota di daerah ini, di antaranya Banten, Tamiang dan Pontang sudah sangat tua usianya; kelahirannya dapat ditelusuri kembali sampai ke abad XVI.[4]

Kesultanan Banten, yang didirikan dalam tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari kerajaan Demak di Jawa Tengah dan dihapuskan oleh Daendels dalam tahun 1808, meliputi daerah pesisir utara sebagai intinya, sedangkan wilayah-wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan Banten, bagian barat Bogor dan Jakarta, dan juga Lampung di Sumatera bagian selatan.[5] Daerah yang oleh pelawat-pelawat Portugis dinamakan Sunda Bantam itu, sejak zaman dulu merupakan sebuah pusat perdagangan lada; ia maju pesat setelah Malaka direbut oleh orang-orang Portugis dalam tahun 1511, namun kemudian memudar dengan cepat sebagai pusat perdagangan sejak Belanda mendirikan Batavia dalam tahun 1619.[6]

Daerah itu dapat dicapai dari banyak jurusan. *Postweg* (jalan Pos) yang terkenal itu, yang dibangun dalam tahun 1808, dimulai dari ujung barat Pulau Jawa, yakni Anyer, dan membentang sepanjang pulau itu sampai ke ujung paling timur. Jalan kereta api dibangun dalam tahun 1896 dan menghubungkan Banten secara langsung dengan Batavia. Banten mempunyai banyak pelabuhan kecil, yang terpenting di antaranya adalah Anyer.

Golongan etnik yang terbesar di Banten adalah Sunda yang kebanyakan berdiam di Banten Selatan. Orang-orang Jawa terdapat di bagian utara, sedangkan orang-orang Baduy mendiami daerah pegunungan di selatan. Bagian utara, yang membentang dari Anyer sampai Tanara, secara administratif dibagi menjadi dua *afdelingen*, yakni Serang dan Anyer. Penduduk daerah itu merupakan keturunan orang-orang Jawa yang datang dari Demak dan Cirebon dan dalam perjalanan waktu berbaur dengan orang-orang Sunda, Bugis, Melayu dan Lampung.[7] Selain ada perbedaan-perbedaan dalam hal bahasa dan adat-istiadat, maka dalam hal penampilan fisik dan watak orang Banten Utara menunjukkan perbedaan yang nyata dengan orang Sunda dan orang Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.[8] Di kalangan orang-orang Belanda, orang Banten Utara terkenal fanatik dalam hal agama, bersikap agresif dan bersemangat memberontak. Sesungguhnya mereka bukan semacam petani yang terdapat di Jawa Tengah bagian selatan, melainkan merupakan kelompok-kelompok perantau yang cerdas.[9] Di antara unsur-unsur yang merupakan ramuan yang membentuk kebudayaan mereka, hampir tak terdapat ciri-ciri peradaban Hindu-Jawa. Dalam kenyataannya, penetrasi Islam sangat mendalam.

Perbedaan-perbedaan yang nyata sekah antara Banten Utara dan Banten Selatan itu tak

disangsikan lagi disebabkan untuk sebagian oleh perbedaan-perbedaan lingkungan alam, satu faktor ekologis, dan juga oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat sosio-kultural atau historis. Lingkungan alam menampilkan diri dalam tiap segi. Sebagian besar Banten Selatan terdiri dari pegunungan; di sebelah barat, pegunungan itu dilanjutkan dari gugusan gunung-gunung di selatan terus menuju ke utara sampai ke puncak Gunung Gede. Sebuah daerah perbukitan yang luas membentang di sekitar gunung itu, meliputi sebagian besar daerah itu. Di sebelah barat dan timur, bukit-bukit itu melereng dengan landai lalu disambung oleh dataran-dataran rendah yang diliputi persawahan dan menghampar sampai ke laut. Di daerah itu terdapat banyak variasi dalam corak lanskapnya, dan karenanya, juga dalam hal cara-cara penggunaan tanah. Dataran-dataran rendah dan lereng-lereng gunung di utara merupakan kontras dengan daerah berbukit-bukit di Banten Utara dan Selatan di satu pihak dan dengan daerah pegunungan di selatan di pihak lain.[10] Di lereng-lereng gunung dan di dataran-dataran rendah Banten Utaralah terdapat bagian terbesar daerah persawahan yang beririgasi. Menurut tradisi setempat, sawah-sawah itu di masa lampau telah dibuka di dataran bagian utara oleh orang-orang Jawa yang pindah ke sana dan oleh karenanya tanah-tanah milik sultan terdapat di sana.[11] Oleh karena daerah-daerah pegunungan dan pebukitan di selatan kering dan tak dapat diairi dengan irigasi, maka di sana orang menanam padi di tanah kering, yang dinamakan *tipar* atau *huma*. Tipar juga terdapat di daerah-daerah pebukitan di utara, akan tetapi tanaman yang paling karakteristik di sana adalah tebu, kacang, kapas dan kelapa. Di samping tanaman komersial, di sana juga terdapat beberapa industri. Industri itu menimbulkan pemusatan penduduk, terutama di distrik Cilegon.[12] Jelaslah bahwa faktor-faktor ekonomi lebih menguntungkan bagian utara, yang meliputi daerah-daerah penghasrl beras utama dan letaknya dekat jalur-jalur dan pusat-pusat perdagangan.

STRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI AGRARIA

Dalam studi ini perhatian diberikan kepada masalah sejauh mana faktor-faktor ekonomi mempunyai korelasi dengan struktur sosial masyarakat Banten pada umumnya dan masyarakat petani di Banten Utara pada khususnya. Apakah ada korelasi antara kelas-kelas ekonomi dan perbedaan sosial dan politik yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat itu? Dengan memperhatikan perkembangan keresahan agraria, kita harus menyelidiki masalah konflik di antara pelbagai golongan sosial secara lebih terperinci, untuk dapat menemukan determinan-determinan sosio-ekonomis dari gerakan sosial yang telah mencetuskan pemberontakan petani itu. Di sini akan diadakan satu analisa kelas, dan masyarakat Banten akan dipandang sebagai satu gelanggang konflik di antara kelas-kelas itu.[13] Untuk tujuan analitis, suatu penjelasan mengenai masyarakat Banten dari segi pembagian kelas *bi-modal* yang klasik tidak mencukupi; oleh karena itu, maka agar supaya tata hubungan yang berbelit-belit di antara pelbagai kelas dapat dibikin terang, analisa golongan harus diperhalus.[14] Selain itu, pemberian tekanan kepada dinamika dalam analisa ini menyebabkan perlunya diberikan penjelasan mengenai pergeseran-pergeseran sosial yang terjadi dalam perjalanan waktu, begitu pula mengenai proses politiknya. Kita tak boleh tidak harus menelusuri kembali perkembangan historis yang merupakan pokok perhatian studi ini sampai ke periode kesultanan Banten, sepanjang dapat diperoleh data yang cukup dapat dipercaya.

Satu ungkapan yang sudah lazim adalah bahwa, dalam masyarakat yang agraris, tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan yang utama, dan karenanya pemilikannya membawa prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk desa yang tradi. sional didasarkan atas pemilikan tanah. Hak dan kewajiban ditentukan atas dasar yang sama. Pemukul-rataan ini memang berlaku bagi sebagian besar Pulau Jawa abad XIX, akan tetapi disangsikan relevansinya dengan Banten dalam periode yang disoroti dalam studi ini. Di samping pemilikan tanah, terdapat pelbagai faktor ekologis dan historis yang ikut berperan, sehingga keadaannya tidak sampai berkembang menjadi cara-cara penggunaan tanah dan organisasi sosial yang kaku dan khas Jawa sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat pedesaan yang pada dasarnya bersifat statis di daerah-daerah pesawahan dataran rendah.[15]

Ada yang mengatakan bahwa Banten "tidak mengenal pembedaan kelas".[16] Sudah barang tentu ungkapan itu lebih merupakan satu klise daripada satu penilaian yang dapat dipercaya mengenai situasi, namun demfkian, ungkapan klise itu mungkin ada dasarnya juga dalam realitas sosial. Mari kita perhatikan secara lebih seksama struktur sosial Banten abad XIX dan ciri-ciri latar belakang agrarisnya.

Di Banten, dengan perekonomiannya yang terutama sekali bersifat agraris, penduduk desa secara pukul rata adalah petani dan penanam padi, entah sebagai pemilik tanah entah sebagai penggarap bagi hasil. Namun demikian, hal yang menyolok adalah sejumlah besar penduduk desa mencari nafkah sebagai pedagang, nelayan atau tukang, atau sebagai pengusaha industri.[17] Juga perlu disebutkan satu kategori petani yang melakukan pelbagai usaha dan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dalam kenyataannya, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak secara penuh melainkan secara sambilan saja, atau melakukannya selama tidak ada pekerjaan di sawah atau ladang. Pada umumnya sumber-sumber penghasilan alternatif itu telah dikembangkan secara tradisional.[18] Satu contoh yang sangat nyata adalah apa yang dikenal sebagai migrasi musiman ke Batavia atau Lampung, yang didorong oleh adanya kekurangan tenaga kerja di tempat-tempat itu dan oleh sarana perhubungan yang baik.[19] Dibandingkan dengan seluruh tenaga kerja yang ada, jumlah yang merantau itu boleh dikatakan kecil sekali, lagi pula kebanyakan dari mereka meninggalkan kampung halaman hanya untuk waktu-waktu yang singkat saja di antara musim-musim kesibukan di sawah atau ladang.[20] Mayoritas yang sangat besar dari rakyat masih tetap petani, sementara sebagian kecil saja dari seluruh penduduk yang bekerja mencari nafkah di bidang perdagangan dan kerajinan tangan. Meskipun ada tenaga kerja yang merantau, namun pada umumnya dikatakan bahwa di daerah itu tidak ada tanda-tanda kelebihan penduduk.[21] Selain itu, dengan mengingat perimbangan sumber-sumber daya utama perekonomian desa, tidak ada alasan untuk menduga bahwa di sana terdapat kesulitan-kesulitan ekonomi dalam tahun-tahun tarakhir sebelum pemberontakan.[22]

Seperti di banyak masyarakat agraris, dua perangkat fakta mempunyai arti penting yang khas di antara kondisi-kondisi yang menentukan kehidupan dan perburuhan di daerah-daerah pedesaan, yakni yang menyangkut pemilikan tanah dan penyewaan tanah di satu pihak dan teknik-teknik bertani di lain pihak. Faktor-faktor itu teramat penting artinya, oleh karena pada tingkat terakhir faktor-faktor itu menentukan siapa-siapa yang akan melakukan pekerjaan yang diperlukan dan berapa besarnya bagian yang akan mereka peroleh dari hasilnya. Sistem hak atas tanah di Banten abad XIX berasal dari zaman kesultanan, meskipun ia telah mengalami banyak perubahan sebagai akibat masuknya administrasi kolonial. Pada bagian akhir tahun-tahun enam puluhan, masalah-masalah yang menyangkut pemilikan tanah dan sewa tanah bersumber pada hadiah-hadiah tanah yang diberikan kepada anggota-anggota kerabat sultan dan pejabat-pejabat negara, serta kepada lembaga-lembaga keagamaan, yang tanah-tanah miliknya terutama terletak di daerah inti kesultanan yang lama.

Dikatakan bahwa kolonialisasi yang dipimpin oleh penakluk-penakluk muslim dari Demak dan Cirebon itu menggunakan teknik bertani yang baru secara besar-besaran, yakni cara menanam padi di sawah. Sawah-sawah yang dinamakan sawah negara rupa-rupanya merupakan sawah yang paling tua. Petani-petani yang menggarap sawah negara atau tanah milik sultan itu terbagi dalam dua kategori: petani-petani *mardika*, yakni orang-orang yang telah diberi status sebagai orang merdeka oleh karena mereka telah menyatakan tunduk kepada kaum penakluk dan memeluk agama Islam, dan kaum *abdi* yang telah ditaklukan dengan kekerasan dan dijadikan budak.[23]

Lembaga sawah negara, yang berasal dari awal periode kesultanan dan masih hidup dalam pertengahan kedua abad XIX, mengacu tidak hanya kepada kondisi-kondisi pemilikan tanah, akan tetapi juga kepada arti penting pemilikan tanah di bidang sosial dan politik. Sawah negara sesungguhnya adalah semua sawah yang telah dibuka atas perintah sultan atau anggota keluarganya yang telah dihadiahi tanah itu, sehingga sawah itu menjadi miliknya.[24] Sawah negara ini pada umumnya dianggap sebagai tanah kesultanan. Akan tetapi, bagi sultan, memiliki tanah saja tidak cukup. Tanah itu tidak menghasilkan keuntungan kecuali jika digarap; oleh karena itu, ia lalu menghadiahkan tanah atau hak penggunaannya sebagai imbalan atas tenaga

kerja. Sawah negara yang meliputi daerah-daerah dataran rendah sekitar Teluk Banten dibagi-bagikan kepada petani dengan syarat bahwa mereka menggarapnya dan membayar upeti kepada sultan sebesar sepersepuluh dari hasilnya.[25] Dalam kenyataannya, *privilese* untuk menggunakan tanah milik sultan itu dikaitkan dengan kutipan pajak atas hasil panen dan kewajiban melakukan kerja bakti untuk sultan.[26] Pada mulanya, hak milik atas sawah negara itu pada dasarnya berada di tangan sultan atau orang yang dihadiahi tanah itu. Rupa-rupanya, mereka yang telah membuka tanah, atau keturunan mereka, mempunyai hak pertama atas hasilnya, meskipun sultan atau orang yang telah dihadiahi tanah itu nampaknya mempunyai hak untuk mengusir setiap petani yang tidak disenanginya,[27] sebagaimana dikemukakan oleh Yule dalam laporannya, "para penggarap bisa diusir dengan sewenang-wenang".[28] Namun demikian, dilaporkan juga bahwa para penggarap dapat meninggalkan garapan mereka kapan saja mereka mau.[29] Yang relevan dengan masalah ini adalah soal bagaimana hak-hak atas tanah itu bisa jatuh ke tangan anggota-anggota elite politik. Sampai sejauh mana pemilikan atas tanah ada kaitannya dengan jabatan politik di satu pihak, dan di pihak lain sampai sejauh mana hal itu ada kaitannya dengan kelas yang berkuasa?

Oleh karena fungsi sultan untuk memberikan perlindungan mengakibatkan ia menguasai perekonomian, maka mobilisasi produksi digunakan untuk menunjang rumah tangganya, keluarganya, dan pejabat-pejabat negara. Untuk pendapatan mereka, mereka mengandalkan tidak hanya kepada kutipan pajak perdagangan, melainkan juga kepada hasil pertanian di daerah-daerah pedesaan.[30] Nampaknya sudah merupakan satu kebiasaan lama yang dapat kita jumpai di negara-negara birokratis yang agraris; pembagian tanah di antara pengiring-pengiring pribadi sang raja ─ pejabat-pejabat rumah tangganya, anggota-anggota kerabatnya, orang-orang kesayangannya ─ selalu menyusul penaklukan sebuah daerah dan pembentukan sebuah negara. Tanah yang dianugerahkan dinamakan *sawah ganjaran* atau *pusaka laden* atau *pecaton*,[31] dan istilah yang dipakai berbeda-beda sesuai dengan orang yang menerima hadiah itu: kawargaan, jika tanah itu diberikan kepada anak-anak sultan dari istri-istrinya yang sah; *kanayakan*, jika diberikan kepada anak-anak sultan dari selir-selimya atau kepada orang-orang kesayangan sultan; *pangawulaan*, jika dihadiahkan kepada pejabat-pejabat yang menggunakan hasilnya untuk membiayai hidup mereka selama masa jabatan mereka.[32] Kedua golongan pertama yang dianugrahi tanah itu tidak hanya berhak atas bagian hasil panen yang tadinya diserahkan kepada sultan, akan tetapi juga berhak untuk menggunakan tenaga kerja rakyat untuk membuka tanah baru atau untuk melakukan pelbagai macam kerja bakti baginya.[33] Oleh karena sultan dan orang yang telah dianugerahi tanah itu biasanya tinggal di keraton, mereka mengangkat orang-orang yang mewakili kepentingan mereka yang oleh karena itu juga mendapat kekuasaan-kekuasaan tertentu.[34] Perlu dikemukakan bahwa pusaka laden yang dihadiahkan kepada anggota-anggota kerabat sultan dianggap telah diberikan untuk selama-lamanya, dan biasanya tanah-tanah itu diwariskan secara turun-temurun akan tetapi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan sultan.[35]

Oleh karena hak atas sawah negara sebagai pusaka itu terbatas, maka banyak di antara pemegang hak itu kemudian membuka tanah-tanah baru dengan menggunakan hak atas kerja bakti yang melekat pada tanah-tanah pusaka itu. Dengan cara demikian, mereka tidak hanya memperbesar pendapatan mereka, akan tetapi juga memperoleh tanah atas dasar hak milik penuh. Tanah yang dibuka dengan cara itu dinamakan *tanah yasa*. Dengan sendirinya petani-petani biasa pun mulai membuka sawah yasa, didorong oleh hasil yang diperoleh dari penggarapan sawah. Rangsangan lainnya mungkin terletak dalam kenyataan bahwa penggarap-penggarap sawah yasa harus menyerahkan upeti kepada sultan atau orang yang dihadiahi tanah itu sebagai tanda patuh; ini dinamakan *pakukusut* dan lebih sedikit daripada *lelanjan* yang dikutip dari penggarap-penggarap *sawah negara*.[36] Adalah satu kenyataan bahwa pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang paling diutamakan oleh birokrasi sultan. Khususnya pajak-pajak atas tanah dan atas tenaga kerja jelas merupakan sumber-sumber konflik yang ditimbulkannya. Lembaga-lembaga pedesaan dan kondisi-kondisi agraris di daerah yang bersangkutan, di saat pecahnya pemberontakan yang merupakan pokok studi ini berakar dalam lembaga-lembaga pedesaan dan kondisi-kondisi agraris yang terdapat di zaman kesultanan.

Dalam tahun 1808 Daendels menghapuskan tanah-tanah milik sultan serta wajib kerja bakti yang melekat pada tanah-tanah itu, lalu memungut seperlima bagian dari hasil panen sebagai pajak tanah untuk seluruh daerah dataran rendah di Banten. Beberapa tahun kemudian Raffles menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah.[37] Pemegang-pemegang hak atas tanah pusaka menerima ganti rugi atas kehilangan pendapatan dari upeti dan kerja bakti, sedangkan pemilik-pemilik *sawah yasa* tetap berhak atas *pakukusut* mereka. Akan tetapi ketentuan-ketentuan itu telah membuka kesempatan bagi perbuatan sewenang-wenang yang serius. Dalam perjalanan waktu, hak-hak yang turun-temurun atas sawah negara, baik sebagai pusaka maupun sebagai pecaton, dan atas sawah yasa, menjadi sumber-sumber korupsi dan penyelewengan di kalangan pamongpraja. Jelaslah bahwa anggota-anggota kerabat sultan dan pejabat-pejabat kesultanan, orang-orang yang paling beruntung di bawah sistem yang lama, cenderung untuk menghendaki kembalinya kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan oleh karena itu mereka berusaha mempertahankan hak-hak mereka, meskipun mereka sudah menerima ganti-rugi.[38] Selain itu, orang-orang yang telah dianugerahi tanah oleh sultan, dengan gigih menentang diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena hal itu juga akan menyebabkan mereka kehilangan banyak pengaruh politik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan banyak rasa tidak puas dan itulah yang dianggap sebagai sumber kerusuhan-kerusuhan di Banten sampai tahun 1830.[39] Sejak semula, pemerintah telah dihalang-halangi untuk memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai keadaan tanah-tanah kesultanan, sehingga orang-orang yang telah dianugerahi tanah-tanah itu dapat terus mengutip upeti-upeti yang tradisional. Dengan demikian, maka rakyat mendapat kesan bahwa pengutipan berganda itu telah mendapat restu pemerintah; akibatnya timbul satu situasi di mana segala kesalahan dilimpahkan kepada pemerintah. Sebenarnya ada satu peluang lain untuk menarik keuntungan dari ketidaktahuan rakyat biasa; dalam perjalanan waktu menjadi sulit bagi rakyat mengetahui apakah tanah yang telah dibuka dengan kerja wajib itu diperuntukkan negara atau orang yang telah dianugerahi tanah itu oleh sultan. Yang oleh penggarap-penggarapnya dianggap sebagai sawah negara, oleh orang-orang yang telah menerima tanah itu dari sultan diakui sebagai sawah yasa dengan segala hak yang melekat padanya. Mengenai sawah kategori pertama, maka sesudah kekuasaan beralih ke tangan Belanda, hak miliknya dipegang oleh penggarapnya, akan tetapi upeti yang tadinya dikutip oleh sultan atau orang yang dianugerahi tanah itu kemudian dipungut oleh pemerintah dalam bentuk sewa tanah. Mengenai sawah kategori kedua, maka orang-orang yang memegang hak milik atasnya berhak untuk mengutip pakukusut dari penggarapnya. Di sini timbul suatu konflik kepentingan yang mencekam masyarakat Banten sampai meletusnya pemberontakan. Beberapa kasus akan menjelaskan situasi konflik yang berlangsung lama itu. Laporan mengenai hak atas tanah di Banten dalam tahun 1870 memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus-kasus di Banten Utara.[40]

KONFLIK MENGENAI HAK TANAH

Kliwon Serang menggunakan dalih telah menerima sawah pusaka dari ayahnya, Raden Saca, untuk menuntut hak mengutip pakukusut dari sebidang sawah di Kubanglaban Kidul. Akan tetapi tidak ada bukti-bukti untuk memperkuat tuntutannya itu. Anehnya bidang sawah itu dalam daftar tahun 1866 tercatat sebagai *sawah yasa*, sedangkan dalam daftar-daftar sebelumnya ia tercatat sebagai *sawah negara*. Untuk menghindari konflik, bupati Serang mernerintahkan penggarap-penggarap sawah itu supaya membayar *pakukusut*.[41] Di sebuah desa lain, yakni desa Mangan, beberapa anggota kerabat kliwon tetap mempunyai hak untuk mengutip pakukusut dari penggarap-penggarap sawah tertentu, yang diakui sebagai *sawah yasa* milik anggota-anggota kerabat kliwon itu.

Sebuah contoh mengenai pemilikan secara tidak sah atas *sawah negara* oleh anggota-anggota pamongpraja atau kerabat-kerabat mereka dapat ditunjukkan dalam kasus Badamusalam. Dalam tahun 1868 sekitar 25 bau dari 90 bau sawah negara digarap oleh penduduk desa, sedangkan sisanya diterlantarkan oleh karena banyak orang telah meninggal

sedang yang lainnya telah meninggalkan desa itu. Dari sawah yang digarap itu, 5 bau sudah sejak hampir 30 tahun yang lalu diberikan kepada *jaro* dan *pengiwa*. Dalam tahun 1858, ayah jaksa kepala, Aria Nitidiwiria, menyatakan bersedia menggarapnya atas dasar bagi hasil dengan mereka. Alasannya adalah bahwa ia hendak memanfaatkan tanah yang terlantar itu untuk sementara waktu, selama rakyat belum mampu menggarapnya sendiri. Enam tahun kemudian, permintaan rakyat agar tanah itu dikembalikan kepada mereka ditolak mentah-mentah oleh jaksa kepala. Akhimya, seorang demang, dengan seizin bupati Serang, mengambil alih 30 bau. Karena adanya kepercayaan yang bersifat tahayul, 15 bau dibiarkan terlantar terus.[42]

Satu kasus lain yang menarik adalah hak milik atas *sawah negara* atau *sawah yasa* yang dituntut oleh anggota-anggota kerabat sultan. Di zaman kesultanan, rakyat Tras diwajibkan membayar upeti kepada sultan sebanyak *dua sanga* untuk tiap *caeng*. Pangeran Khalzie, yang bertindak sebagai kuasa Sultan, mencoba mengutip dua *sanga* untuk tiap *bau*, akan tetapi rakyat hanya bersedia membayar dua *sanga* untuk dua belas bau. Setelah Pangeran Khalzie meninggal, rakyat tidak lagi membayar kutipan itu, karena dua hal: pertama, sewa tanah sementara itu sudah diberlakukan, dan kedua, kutipan tersebut merupakan hak yang dianugerahkan oleh sultan kepada Pangeran Khalzie pribadi. Bupati Serang, RA Mandura Raja Jayanegara,[43] menawarkan untuk menyediakan bibit dan kerbau-kerbau yang diperlukan untuk menggarap sawah itu, serta untuk membayar sewa tanahnya, dengan syarat bahwa ia menerima separo dari hasil panennya. Rakyat menerima baik tawaran itu untuk jangka waktu tiga tahun, dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai biaya untuk menggarap tanah mereka mengingat daerah itu sedang dilanda kekurangan makanan, dan juga karena mereka takut terhadap bupati. la kemudian digantikan oleh R.A.A. Condronegoro, yang menuntut pungutan sebanyak separo hasil panen, oleh karena ia menganggap sawah-sawah itu sebagai miliknya pribadi. Dalam tahun 1865, istrinya menjual sawah-sawah itu kepada Demang Trumbu, yang mengakibatkan penduduk desa sejak itu menolak setiap tuntutan yang diajukan oleh bupati. Sebenarnya, rakyat hanya mengakui dua belas bau sebagai milik pribadi Pangeran Khalzie. Lagi pula, menurut silsilah Banten ahli waris sultan yang paling langsung adalah Sultan Alih, dan bukan istri bupati, Ratu Siti Aminah.[44]

Sebagai contoh terakhir kami kemukakan kasus yang serupa, yang terjadi di Sedayu. Desa ini belum pernah dianugerahkan kepada anggota keluarga sultan, dan sultan sendiri hanya menerima sepersepuluh bagian dari hasil panen. Setelah diberlakukannya ketentuan Daendels dalam tahun 1808, rakyat desa itu tidak membayar upeti lagi. Akan tetapi dalam tahun 1863, istri Bupati Serang tersebut di atas menuntut kutipan yang sebesar sepersepuluh bagian itu. Tuntutan itu didasarkan atas fakta bahwa ia adalah keturunan langsung sultan dan karenanya berhak atas sawah negara sebagai sawah pusaka. Pelbagai usulnya telah ditolak, dan juga ancamannya untuk menjual sawah itu tidak dihiraukan. Dalam tahun 1865, kira-kira pada saat panen, seorang petugas telah diutus untuk mengutip upeti itu akan tetapi penduduk desa menolak. Perlu dikemukakan bahwa dalam peristiwa ini demang dan kepala desa memihak istri bupati, meskipun tuntutannya samasekali tidak berdasar. Hal ini memang bisa dimengerti, oleh karena ternyata semua anggota pengurus desa dan demang telah memiliki sawah negara secara tidak sah dan dibebaskan dari kewajiban membayar upeti kepada istri bupati itu. Tuntutan-tuntutan serupa telah diajukan terhadap sawah-sawah di desa-desa lain, umpamanya di Ragas, dan Kanari.[45]

Pembagian sawah negara di Kadikaran menyingkapkan secara lebih menyolok lagi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh kaum elite. Dari 16 bau sawah negara, 4 bau diberikan kepada kepala desa untuk keperluan resmi, 2 bau diusahakan oleh patih Lebak sebagai kebun kelapa, 3 bau diberikan kepada jaksa kepala, sedangkan 7 bau dipecah-pecah menjadi 28 bagian dan diberikan kepada penduduk desa.[46]

Satu contoh penyelewengan lainnya yang menarik adalah penggadaian sawah. Dilaporkan bahwa Jayakusuma, setelah dipecat sebagai *patih* Lebak, menganjurkan kepada rakyat di distrik Ciruas agar mereka menggadaikan sawah mereka kepadanya. Jika mereka menuruti nasihatnya, maka ia sebagai pemegang surat gadai akan mengutip 5% sebagai cicilan tahunan dari pinjaman ditambah dengan separo hasil panen,[47] lalu ia akan membayar pajak tanah. Menurut catatan, dalam tahun 1869 sekitar 40 atau 50 bau telah digadaikan kepada

Jayakusuma untuk empat atau lima ribu gulden.[48] Dalam konteks ini tidak akan dicoba melukiskan prinsip-prinsip gadai dan sewa; kiranya cukup dikemukakan bahwa praktek menyewakan dan menggadaikan tanah sudah merupakan hal yang lazim di bagian utara Banten dalam akhir tahun-tahun enam puluhan.

Dari ke-52 desa, di mana terdapat sawah, 42 di antaranya mempunyai kebiasaan sawah dapat digadaikan jika pemiliknya menerima pinjaman. Di sepuluh desa lainnya kebiasaan itu tidak dikenal. Ada pelbagai bentuk menegaskan persetujuan mengenai suatu transaksi tanah.[49] Cara-cara transaksi tanah lainnya yang ketika itu sudah terdapat di Banten adalah menjadikan tanah sebagai jaminan, dan persetujuan bagi hasil, yang masing-masing disebut *nglanjak* dan *memaro* atau *mertelu*. Di 34 di antara 52 desa itu, persetujuan bagi hasil merupakan hal yang sangat lazim.[50] Ada dua lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan persetujuan bagi hasil. Yang pertama, yang disebut *mlayang*, merupakan satu perjanjian di mana tuan tanah harus menyerahkan sebagian dari hasil panen kepada penggarap, biasanya sekitar 10 sanga untuk tiap 3 bau.[51] Lembaga kedua disebut *hejoan*, di mana pinjaman uang harus dibayar kembali dengan hasil panen; umpamanya, pinjaman satu gulden, harus kembali dengan 40, 60, 80 atau 100 kati. Sistem panjer ini dikenal di 18 dari 52 desa tersebut.[52]

Penjelasan itu menyingkapkan beberapa aspek dari perubahan yang telah terjadi dalam perekonomian agraris di Banten. Pertama, hubungan antara kaum petani dan elite sudah ditandai oleh konflik-konfiik dan bentrokan-bentrokan kepentingan yang sering terjadi dan dicetuskan oleh pembaruan-pembaruan yang diadakan dalam perekonomian agraris. Kedua, perpecahan sosial itu dipergawat oleh persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kerja-kerja bakti yang diwajibkan, yang merupakan hal yang inheren bagi perekonomian tradisional dan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan tanah. Ketiga, efek-efek yang mengganggu dari penetrasi perekonomian uang sudah mulai dirasakan, mengakibatkan pemindahan hak atas tanah dan pemusatan pemilikan tanah.

WAJIB KERJA BAKTI

Pengutipan tenaga kerja, seperti halnya pemilikan tanah, berasal dari zaman kesultanan. Pada waktu itu terdapat satu garis pemisah yang tajam antara dua pajak pokok-pajak berupa hasil tanaman dan pajak berupa tenaga kerja dan kewajiban untuk membayar pajak dalam bentuk kerja itu dikenakan terhadap orang-orang dari pelbagai status. Semua penggarap sawah negara, apakah mereka itu termasuk kaum *abdi* atau orang-orang *rnardika*, diwajibkan menyumbangkan tenaga mereka untuk kepentingan umum, seperti membuat jalan-jalan umum, ikut berperang, membuka tanah baru. Selain kewajiban-kewajiban itu, kaum abdi juga diharuskan memberikan sejumlah jasa pribadi, kepada sultan atau para pembesar, umpamanya sebagai pelayan di rumah mereka, memikul tandu mereka atau barang-barang mereka dalam perjalanan.[53] Dalam kaitannya dengan situasi di daerah yang mempunyai sawah negara, wajib kerja bakti itu sering dianggap sebagai melekat pada hak garap tanah.[54] Anggapan itu benar sejauh menyangkut daerah-daerah tanah kesultanan di mana, pada tahap permulaan pemukiman orang-orang Jawa, tanah dan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mengembangkan persawahan. Oleh karena keadaan pada bagian akhir tahun-tahun enam puluhan dapat dipandang sebagai yang paling menonjol yang terdapat di zaman kesultanan, maka pembedaan di atas itu esensial bagi pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan kerja wajib di Banten abad XIX.

Oleh karena itu, maka dalam hubungannya dengan berbagai kerja bakti yang diwajibkan di Banten itu adalah sangat penting untuk membedakan antara daerah sawah negara atau tanah-tanah kesultanan dan daerah-daerah lainnya. Seperti telah dikemukakan di atas, hak penggarap untuk memetik hasil sawah negara dikaitkan dengan kewajiban kerja bakti untuk sultan atau orang yang dianugerahi tanah itu. Setelah kesultanan dihapuskan dalam tahun 1810, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para petani tidak berubah.[55] Dengan demikian, maka mereka yang tidak menggarap tanah yang termasuk sawah negara dibebaskan dari kewajiban kerja bakti,

meskipun mereka masih dapat dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Dalam tahun-tahun delapan puluhan, pekerjaan itu terutama terdiri dari apa yang dinamakan tugas-tugas *kemit*-tugas jaga dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan, jembatan dan irigasi, dan sebagainya. Kewajiban untuk menyumbangkan tenaga untuk keperluan perang sudah lama dihapuskan. Namun demikian, perkembangan ini tidak meniadakan kebutuhan akan tenaga petani, yang sering kali diminta dengan paksa oleh aristokrasi dalam usaha mereka memperoleh hak milik perorangan dan memperbesar pendapatan mereka. Tidak dapat dipastikan apakah mereka selalu menyediakan modal untuk menggarap tanah, atau apakah mereka hanya menggunakan hak-hak tradisional mereka dan memaksa para petani untuk terus menghormati hak-hak itu. Tidaklah berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa situasi di daerah-daerah pedesaan di Banten abad XIX sudah mengundang potensi-potensi konflik; dan salah satu sebabnya yang utama kiranya adalah penggunaan tenaga petani yang melampaui batas.

Satu contoh yang memberikan gambaran yang jelas mengenai pemerasan tenaga kerja petani adalah kasus Kadikaran, desa yang telah disebut di atas. Dalam berita-berita acara pengadilan tahun 1869, disebutkan bahwa satu tuduhan penipuan dalam rangka pengerahan tenaga kerja telah diajukan terhadap Jayakusuma, yang sebelumnya pernah bertugas sebagai denang di distrik Ciruas. Fakta-faktanya adalah sebagai berikut: seperti telah dikemukakan di atas, 2 bau sawah negara di Kadikaran telah diambil sebagai milik oleh Jayakusuma; kemudian ia mulai memeras tenaga petani, menggunakan tenaga mereka untuk membuka kebun kelapa. [56] Kepala-kepala desa diharuskan menyediakan dua sampai empat orang pekerja tiap hari, dan mereka itu tidak memperoleh upah ataupun makanan dari Jayakusuma. Penduduk desa diharuskan menyerahkan sejumlah bibit kelapa setiap ada perkawinan.[57]

Pada pertengahan tahun-tahun lima puluhan, Lebak juga sangat terkenal dengan praktek-praktek buruk itu. Pemerintah kolonial diminta perhatiannya terhadap fakta bahwa eksploatasi rakyat biasa oleh elite yang berkuasa sudah menjadi penyebab kegelisahan dan keadaan yang semakin memburuk.[58] Seorang pengamat membenarkan kecemasan itu dengan menunjukkan bahwa penindasan yang terus-menerus oleh anggota-anggota pamongpraja yang menyalahgunakan privilese mereka telah menimbulkan banyak penderitaan di kalangan penduduk. Selain diwajibkan menyerahkan pelbagai macam upeti seperti beras, kerbau, dan uang, rakyat juga diharuskan melakukan pelbagai kerja bakti seperti menjaga rumah anggota-anggota pamongpraja.membersihkan kebun-kebun mereka, mencari kayu bakar bagi mereka, mencari rumput untuk kuda-kuda mereka, dan sebagainya.[59] Dalam hubungan ini kiranya dapat dikemukakan kembali tuduhan yang telah diajukan oleh Asisten Residen Lebak terhadap bupati: memeras tenaga rakyat.[60]

PEMBARUAN-PEMBARUAN PEMERINTAH

Masalahnya sekarang adalah, sampai sejauh mana pembaruan-pembaruan Barat telah berhasil memajukan tenaga kerja yang bebas, mengurangi eksploatasi, dan mengatur pemilikan atas tanah untuk melindungi petani terhadap perbuatan sewenang-wenang pihak kelas-kelas yang berkuasa? Oleh karena itu perlu diselidiki praktek-praktek pembaruan setempat mengenai penghapusan perbudakan, pembagian kembali tanah-tanah kesultanan dan pengubahan pajak dalam natura menjadi pajak dalam bentuk uang. Lambannya pelaksanaan pembaruan-pembaruan itu sudah diketahui umum.[61] Kiranya tidak disangsikan lagi bahwa apa yang sudah dikenal sebagai kebijaksanaan sosio-ekonomis yang dualistis yang dijalankan oleh pihak Belanda, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pembaruan-pembaruan itu lambat sekali terlaksana. Di satu pihak pembaruan-pembaruan tersebut dapat dipandang sebagai usaha untuk menciptakan kerangka ekonomi modern, sementara di lain pihak pada usaha-usaha untuk mempertahankan tatanan sosio-ekonomi yang tradisional. Ketentuan membayar pajak dengan uang harus dilaksanakan dalam kerangka perekonomian rumah tangga yang agraris. Sebagai akibatnya, maka ketidakteraturan perubahan itu membatasi pelaksanaan pembaruan-pembaruan yang hendak diadakan.[62] Kondisi sosio-ekonomis di

Banten abad XIX merupakan satu contoh yang menyolok mengenai tidak memadainya pemndang-undangan modern sebagai sarana untuk meniadakan keburukan-keburukan sosial, apabila perekonomian daerah yang bersangkutan yang pada dasarnya masih agraris masih tetap mengikuti pola tradisional. Mengenai berbagai kerja-bakti wajib itu, banyaknya peraturan yang telah diberlakukan dalam abad XIX memberikan petunjuk yang jelas tentang adanya praktek-praktek sewenang-wenang yang paling buruk yang berkaitan dengan pelbagai beban yang dikenakan kepada kaum tani oleh pamongpraja, yang telah ditugaskan untuk mengerahkan orang-orang untuk melakukan kerja paksa dan untuk memungut pajak.[63]

Dua bentuk yang berbeda dari beban yang harus dipikul oleh petani sejak sekurang-kurangnya tiga abad yang lalu, secara *de jure* sudah ditiadakan. Perbudakan telah dihapuskan oleh Daendels dalam tahun 1808, bersama-sama dengan dihapuskannya tanah-tanah kesultanan yang kemudian dibagi-bagikan di kalangan rakyat. Setelah pembaruan yang pertama dalam tahun 1856, wajib kerja bakti secara berangsur-angsur dikurangi lima tahun sekali, sehingga tidak lama kemudian seseorang bisa bebas dari kerja wajib tertentu apabila ia membayar sejumlah uang tertentu,[64] dan kerja paksa yang harus dilakukan oleh penduduk desa untuk pejabat-pejabat pribum i- yang disebut kerja *pancen* - pada akhirnya dalam tahun 1882 diganti dengan pajak kepala sebesar satu gulden tiap orang.[65] Mengenai sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) di Banten, efek-efeknya hampir tak berarti dalam bagian akhir abad XIX, oleh karena sebagai akibat gagalnya pelbagai jenis tanaman, kebanyakan tanaman yang berdasarkan sistem itu telah dihapuskan sekitar pertengahan abad itu.[66]

Meskipun menurut peraturannya sudah lama dihapuskan, namun berbagai kerja wajib yang harus dilakukan oleh petani bagi kepala-kepala setempat dan daerah mereka masih tetap bertahan dalam pelbagai bentuk dan dengan menggunakan pelbagai kedok.[67] Dan dapat dipastikan bahwa kerja wajib itu malahan telah bertambah banyak, oleh karena struktur kekuasaan dan kelas dalam masyarakat tradisional menimbulkan kesan sebagai hal yang wajar bahwa upeti-upeti dan kewajiban-kewajiban dituntut dari kelas-kelas bawahan, dan ketentuan-ketentuan tradisi itu tidak menetapkan batas-batasnya secara eksplisit.[68] Mengenai Banten, generalisasi mengenai hubungan antara kaum petani dan aristokrasi ini harus diteliti dengan seksama; di satu pihak, sikap petani yang tradisional, sebagai akibat perbudakan dan wajib kerja bakti, dan dinyatakan dengan sikap hormat dan rasa berutang budi kepada kekuasaan dan status, merupakan satu kenyataan selama masa kesultanan; di lain pihak, sikap enggan membayar pajak dan melakukan kerja bakti tampil dengan jelas sekali setelah Banten diperintah langsung oleh Belanda. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa terlalu kecilnya gaji pegawai pemerintah dan pengeluaran-pengeluaran yang besar yang mereka perlukan untuk mempertahankan gengsi mereka, tidak membantu meningkatkan prestise dan pengarah mereka di kalangan penduduk [69] Sejarah Banten menyolok karena keresahan agrarisnya yang berlangsung terus-menerus dan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan. Tidaklah benar bahwa terdapat sikap masa bodoh di kalangan petani Banten terhadap kondisi-kondisi material dan politik. Dengan latar belakang persoalan-persoalan itulah kondisi petani Banten harus dilihat.

KERJA WAJIB BERKELANJUTAN

Adalah di luar lingkup studi ini untuk meninjau operasi-operasi pembaruan yang kompleks yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghapuskan berbagai kerja wajib setelah tahun 1856. Yang kami soroti adalah terutama sekian banyaknya jenis kerja paksa di Banten dan sistem kelas yang berkaitan dengannya. Seperti di daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, kerja wajib di Banten terutama terdiri dari kerja pada pekerjaan umum - atau *herendiensten*, pada proyek-proyek setempat-atau *desa-diensten*, dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk pejabat-pejabat - *pancendiensten*.[70] Dengan pengecualian daerah sawah negara, maka seorang anggota laki-laki yang sehat jasmaninya dari tiap rumah tangga diwajibkan melakukan pekerjaan itu.[71] Dalam tahun 1886, jumlah hari kerja seluruhnya adalah 972.032, dan melibatkan 102.886 orang; ini tidak termasuk hari-hari kerja pada proyek-proyek setempat.[72]

Harus dibedakan antara *baku*, yakni laki-laki yang sehat jasmani yang mewakili sebuah rumah tangga dan karenanya bisa dipanggil untuk melakukan kerja wajib, dan *sambatan*, pembantu, yakni semua laki-laki sehat lainnya. Mereka dikerahkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti *gugur gunung*. Jumlah hari kerja dibatasi paling banyak 52 hari, akan tetapi besar sekali kemungkinannya bahwa batas ini sering dilampaui.[73] Ada yang mengatakan bahwa di Serang dan Cilegon, rakyat diharuskan bekerja dua kali seminggu dan bukannya sekali.[74] Selain itu, perbedaan antara pekerjaan umum dan proyek-proyek setempat kadang-kadang kabur, sehingga hari-hari kerja yang ditetapkan untuk pekerjaan umum bisa dialihkan ke proyek setempat tanpa melanggar peraturan, sementara untuk *desa-diensten* tidak ditentukan batas-batasnya. *Pancendiensten* sangat terkenal keburukannya karena terlampau membebani rakyat, oleh karena, meskipun sudah ditetapkan batas-batasnya, pejabat-pejabat masih bisa menggunakan tenaga kerja dan jasa-jasa untuk kepentingan mereka pribadi.[75] Contoh-contoh mengenai tuntutan yang berlebih-lebihan dari pihak para pejabat bisa diperoleh dengan mudah. Kasus Lebak memberikan gambaran yang sangat jelas. Sebuah laporan dari asisten residen menyebutkan bahwa bupati, demang Parang Kujang, dan pejabat-pejabat lainnya telah memaksa penduduk desa untuk melakukan bukan hanya pekerjaan rumah tangga, melainkan juga persiapan-persiapan untuk peristiwa-peristiwa khusus.[76] Perlu dikemukakan bahwa, dalam menghadapi praktek-praktek sewenang-wenang yang terus-menerus ini, para petani biasanya tidak siap untuk membela kepentingan-kepentingan mereka terhadap penindasan pejabat-pejabat setempat. Sejumlah bentrokan antara pejabat-pejabat Eropa dan pejabat-pejabat pribumi, yang ditimbulkan oleh keadaan-keadaan seperti itu, dapat dipandang sebagai akibat dari salah satu aspek utama struktur administratif kolonial, yakni birokrasi yang dualistis. Tidaklah mengherankan bahwa pejabat-pejabat pribumi pada waktu itu berpedoman kepada norma-norma tradisional dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi mereka dan bukan kepada peraturan-peraturan birokrasi modern yang sangat rasional. Jelaslah, bahwa di dalam masyarakat yang berorientasi kepada tradisi seperti di Banten abad XIX pejabat-pejabat pribumi masih berpegang pada pandangan-pandangan yang mereka warisi.[77] Kebijaksanaan pemerintah kolonial yang dualistis ini telah menyebabkan adanya tekanan yang besar terhadap penduduk dan, selain dari itu, tidak membantu meningkatkan birokrasi yang rasionallegal, sebagai satu prasyarat untuk membuka Pulau Jawa bagi perdagangan dunia.[78] Penghapusan *pancendiensten* dalam tahun 1882 dapat dipandang sebagai satu langkah menuju modernisasi birokrasi kolonial, akan tetapi bebannya masih saja harus dipikul oleh kaum tani, yang sekarang diharuskan membayar pajak kepala sebagai pengganti *pancen*.

Perlu ditekankan di sini bahwa pelbagai kutipan yang telah disebutkan itu tidak pernah dikenakan terhadap semua penduduk. Selain ada pengecualian-pengecuallan atas dasar usia, dan kondisi-kondisi fisik serta keluarga, anggota kelas-kelas tertentu dibebaskan dari kerja wajib, umpamanya pegawai negeri dan keluarga mereka, pejabat-pejabat desa, pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat agama, dan segolongan penduduk desa yang melakukan tugas-tugas tertentu yang tetap.[79] Selain itu, setiap orang boleh membebaskan diri dari kewajiban bekerja pada pekerjaan-pekerjaan umum dengan jalan membayar pajak. Di desa-desa seperti Labuan dan Nyamuk, di mana terdapat banyak nelayan dan pedagang, kewajiban bekerja untuk memelihara jalan jalan umum atau bangunan-bangunan irigasi telah diganti dengan pembayaran pajak dengan uang tunai. Pekerja-pekerja yang merantau untuk sementara waktu ke Batavia atau Lampung, biasanya membebaskan diri mereka dari tugas wajib itu dengan jalan membayar dengan uang tunai. Sebaliknya, orang-orang muda yang pergi belajar di pesantren-pesantren di Jawa Timur dibebaskan dari pembayaran itu. Banyak orang dari kalangan agama di desa, seperti *penghulu* dan semua pejabat agama, personil mesjid, guru-guru agama dan para haji, termasuk dalam golongan yang berprivilese dan dibebaskan dari segala kerja wajib. Sesungguhnya dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa orang-orang yang mendapat privilese itu adalah mereka yang memiliki prestise, pengaruh dan kekayaan. Bukanlah satu kebetulan bahwa juga para pensiunan pegawai negeri, mereka yang menentang kepala desa dan petani-petani "kaya” dibebaskan dari kerja wajib. Sebaliknya, banyak orang dari kelas-kelas bawahan juga dibebaskan semata-mata karena mereka dengan satu dan lain cara diperbantukan kepada pegawai-pegawai negeri, pemerintahan desa, atau lembaga-lembaga keagamaan. Yang mengherankan adalah bahwa ada sejumlah anggota bangsawan lama yang tinggal di daerah-

daerah pedesaan, yang juga dikenakan pelbagai pajak dan wajib kerja bakti.[80] Sebagaimana disebutkan dalam laporan tahun 1870, mengenai pembebasan itu tidak ada keseragaman, dan di antara praktek-praktek setempat terdapat perbedaan-perbedaan yang besar; di beberapa desa, pejabat-pejabat hanya dibebaskan untuk sebagian, dan di tempat-tempat lainnya kewajiban-kewajiban itu juga dikenakan terhadap para haji dan pensiunan pegawai negeri.[81] Di dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan mengenai pembedaan-pembedaan setempat itu. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa di Banten Utara penduduk sering kali memperlihatkan keengganan untuk melakukan kerja wajib itu, terutama kerja *kemit*; karenanya peraturan-peraturan itu tidak bisa dipaksakan begitu saja kepada penduduk desa. Mereka cenderung untuk tawar-menawar mengenai hak dan kewajiban dan untuk memprotes tuntutan-tuntutan yang melewati batas. Beberapa kasus akan dibahas pada akhir bab ini. Bagaimanapun, pejabat-pejabat desalah yang memutuskan siapa-siapa yang akan dibebaskan dan siapa-siapa yang akan dipanggil untuk melakukan kerja wajib, apakah mereka mampu untuk mengalokasikan kerja wajib dan mendistribusikan bagian-bagian pekerjaan itu, atau tidak. Di Banten, kepala desa tidak mempunyai prestise dan kekuasaan sebesar yang dipunyai oleh rekan sejawatnya di daerah-daerah lain di Pulau Jawa.

Untuk melengkapkan pembahasan kami mengenai pekerjaan-pekerjaan wajib, beberapa catatan perlu dikemukakan mengenai *desadiensten*, yang tidak pernah diuraikan secara terperinci di dalam laporan-laporan kolonial. Untuk memberikan sekedar gambaran kepada pembaca mengenai volume pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat biasa di desa, kami harus menyebutkan satu per-satu pelbagai kategori *desadiensten*, yang samasekali bukan satu-satunya pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh penduduk desa. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah: *kemit* atau tugas jaga di dalam desa; *ronda* atau tugas berpatroli yang dilakukan di dalam lingkungan desa, di sub-distrik atau di jalan-jalan raya; *jaga surat* atau tugas pos; *gundal* atau tugas mengawal pegawai-pegawai negeri yang melakukan perjalanan; mengangkut tahanan; membuat dan memperbaiki jalan, jembatan dan bangunan-bangunan irigasi; merawat desa dan kuburan. Sudah barang tentu tidak ada peraturan yang memperinci jumlah pekerja yang harus dikerahkan untuk pelbagai pekerjaan wajib, dan tidak ada ditentukan betas-batas mengenai jumlah hari kerja untuk tiap penduduk desa. Perlu dikemukakan bahwa pembagian pelbagai macam pekerjaan wajib di dalam lingkungan desa diatur sedemikian rupa sehingga tiap pekerja wajib secara bergiliran melakukan tiap macam pekerjaan yang diwajibkan. Keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh kepala-kepala desa mengenai sikap ogah-ogahan penduduk desa untuk melakukan pekerjaan wajib setempat mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem itu tidak terintegrasi secara mendalam dengan adat-istiadat setempat dan dengan desa sebagai sebuah organisasi sosial. Seperti diketahui secara umum, organisasi desa di Banten dibentuk dalam tahun 1844; oleh karena itu ia tidak begitu homogen seperti desa di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ketiadaan bahan-bahan statistik menyulitkan usaha untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pekerjaan-pekerjaan wajib yang dikenakan, dan daftar-daftar catatan hanya memungkinkan perkiraan-perkiraan yang mendekati saja.[82] Secara umum dapat dikatakan bahwa kaum petani dianaktirikan dan harus memikul beban yang terlalu berat berupa pajak dan kerja bakti. Ini merupakan satu faktor penting yang ikut menciptakan keresahan agraria di Banten.

SISTEM STATUS

Dalam menelaah kondisi-kondisi sosio-ekonomis, kita juga harus menyelidiki sistem status dalam masyarakat Banten. Kita harus mengetahui bagaimana stratifikasi sosial di Banten abad XIX dan harus mengidentifikasikan kelas sosial atau golongan status yang dapat dicap sebagai "pemberontak". Selain itu, kita harus mengetahui apakah ada mobilitas sosial dan apabila ada sampai sejauh mana hal itu membantu ke arah terjadinya konflik sosial. Masalah yang kita hadapi sekarang mengharuskan kita untuk mempertanyakan hubungan antara golongan-golongan yang berkonflik dan kedudukan ekonornis mereka.

Sering dikatakan orang bahwa di kalangan penduduk Banten tidak ada perbedaan kelas.[83]

Akan tetapi di kalangan rakyat memang dikenal satu pengertian tentang stratifikasi, yang dinyatakan dengan istilah *undakan*. Masyarakat Banten, seperti setiap masyarakat tradisional lainnya, biasanya digambarkan sebagai mencerrninkan satu pembagian kelas yang *bi-modal*. Mayoritas rakyat yang sangat besar, atau rakyat biasa, yang mencakup petani, tukang, pedagang dan buruh, disebut *jalma leutik.* Perkataan *orang tani* dipakai untuk lapisan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bercocok tanam, tukang dan pedagang, akan tetapi nelayan tidak termasuk ke dalamnya. Suatu kelas atasan yang kecil jumlah anggotanya dan terdiri dari elite birokrasi dan bangsawan, disebut *priyayi*.[84] Seperti akan kita lihat nanti, struktur kekuasaan paralel dengan struktur kelas. Meskipun kelas-kelas itu dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain, mobllitas di antara keduanya adalah mungkin dalam abad XIX. Dalam membahas stratifikasi sosial sebuah masyarakat dalam peralihan, kita harus selalu ingat akan periode yang sedang menjadi pokok pembahasan itu. Sebenarnya, sifat dualistis itu terjadi secara berangsur-angsur selama abad itu dan merupakan hasil perubahan sosial. Oleh karena itulah maka mobilitas sosial merupakan satu gejala yang menyolok, dan kelas-kelas atau golongan-golongan status yang baru muncul tidak dapat dimasukkan ke dalam satu dikotomi yang tajam. Mari kita terlebih dulu menyelidiki struktur sosial di Banten di zaman kesultanan, yang dapat ditelusuri sebagai pangkal perkembangan-perkembangan selanjutnya.

Hirarki status tradisional itu terdiri dari kelas-kelas sebagai berikut. Pada puncak struktur sosial terdapat kelas berkuasa yang turun-temurun, yang terdiri dari golongan kerabat sultan. Di samping bangsawan tinggi ini dan dapat dibedakan dengannya adalah bangsawan rendahan, yang terdiri dari orang-orang dengan *pamor* yang boleh dikatakan lebih rendah dari pamor raja yang turun-temurun, yakni orang-orang keturunan pablawan-pahlawan legendaris dari masa pengislaman Banten, orang-orang keturunan putri sultan yang kedua, dan keturunan orang-orang yang bergelar raden.[85] Lalu menyusul di bawahnya pejabat-pejabat tinggi, yang pada mulanya adalah klien-klien atau pengikut-pengikut pribadi sultan.[86] Oleh karena diberi kekuasaan-kekuasaan legal, sejumlah pemimpin agama dimasukkan ke dalam elite birokrasi.[87] Di bawah mereka terdapat golongan *mardika* atau *kaum*. Seperti telah dikemukakan di atas, mereka yang dengan sukarela memeluk Islam dan keturunan mereka dapat dimasukkan ke dalamnya. Pada tingkat hirarki yang paling bawah adalah kaum *abdi* atau *hamba*, yakni orang-orang yang telah dikalahkan oleh penakluk-penakluk Islam dan dipaksa untuk memeluk Islam. Ke dalam kelas ini juga termasuk golongan *utangan*; mereka diwajibkan menjadi prajurit untuk memerangi bajak laut.

Pada puncak hirarki itu adalah sultan sendiri. Secara turun-temurun ia adalah kepala aristokrasi yang berkuasa. Keluarga sultan menduduki tingkat yang paling atas, dan semua anggotanya berhak atas anugerah tanah, *pusaka kawargaan* atau *kanayakan*, dan berhak atas kerja bakti dan upeti dari rakyat. Di dalam lingkungan bangsawan itu sendiri terdapat pelbagai tingkatan dan privilese; keturunan sultan sampai generasi ketiga disebut *warga*, dan mereka yang berada lebih bawah lagi dalam garis silsilah disebut *nayaka*. *Pangeran, Ratu* dan *Tubagus* adalah gelar anggota-anggota golongan yang pertama, sedangkan seorang *nayaka* biasanya hanya diperkenankan memakai gelar *Tubagus* atau *Ratu*. Di Banten juga terdapat satu golongan bangsawan yang tidak termasuk keluarga sultan dan menggunakan gelar-gelar seperti *Mas, Entol, Apun, Ujang* dan *Raden* untuk laki-laki, dan *Ayu* untuk wanita.[88] Gelar *Bagus* dan *Agus* yang tidak menunjukkan kebangsawanan, dipakai oleh orang-orang terhormat yang mempunyai prestise di kalangan rakyat.

Eselon birokrasi yang paling atas diduduki oleh *patih*, yakni *wazir* besar; di bawahnya adalah *tumenggung*, salah seorang di antara mereka mengetuai pengadllan, dan yang lainnya mengawasi perdagangan dan pabean, atau mengepalai pemerintahan provinsi atau daerah; fungsi *syahbandar* adalah bertindak sebagai penghubung antara sultan dan orang-orang asing.[89] Pada tingkatan yang lebih rendah dalam hirarki birokrasi terdapat *demang*, atau kepala distrik, para *mantri*, pelayan-pelayan dalam rumah tangga sultan, dan *lurah* atau kepala desa.[90] Pada akhir abad XVIII terdapat kelas pejabat yang lebih jelas di Kesultanan Banten dibandingkan dengan pada masa permulaannya, meskipun perkembangan hirarki birokrasinya tidak mencapai tingkat setinggi yang terdapat di negara-negara agraris, seperti di Mataram, dalam periode yang sama.[91] Perlu dicatat bahwa sudah nampak adanya satu garis pemisah

yang jelas antara elite yang berkuasa dan rakyat biasa.

Mengingat pentingnya kedudukan elite birokrasi - yang disebut priyayi - dalam hirarki status tradisional, maka asal-mulanya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Seperti diketahui secara umum, seleksi anggota-anggota kelas pejabat pada mulanya didasarkan atas kecakapan perorangan, akan tetapi ada satu kecenderungan yang kuat di mana jabatan-jabatan dipegang oleh keluarga-keluarga yang sama selama beberapa generasi. Kaum priyayi pada mulanya teridiri dari orang-orang yang karena mempunyai hubungan kekerabatan atau menjadi klien tradisional, atau karena menunjukkan bakat dan pengabdian kepada kepentingan raja, lalu diterima oleh raja. Dengan pelbagai cara, golongan elite ini mempertahankan diri dan meningkatkan prestisenya; umpamanya, mereka mungkin kawin dengan anggota bangsawan. Perlu dicatat bahwa jabatan-jabatan yang dipegang oleh priyayi dapat dirampas oleh sultan setiap saat dengan atau tanpa alasan, dan tanpa ganti rugi kepada keluarga yang bersangkutan. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Jawa lainnya, Kesultanan Banten tidak mempunyai suatu sistem administratif yang berkembang penuh; oleh karena itu maka skala hirarki birokrasinya juga terbatas. Sebagai akibatnya, maka pada umumnya urutan kedudukan-kedudukan kelas sosial menurut garis birokrasi telah digantikan oleh penggolongan status menurut garis keturunan bangsawan.

Pemerintah kolonial mendasarkan mekanisme administrasinya pada model Barat dan mengubah sebagian dari personil sultan atau anggota-anggota keluarganya menjadi birokrat-birokrat. Seperti di daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, elite birokrasi yang sedang berkembang merupakan satu golongan status fungsional yang tersendiri. Anggota-anggotanya diambil dari pelbagai lapisan masyarakat, bukan dari kaum bangsawan atau birokrat tradisional saja, melainkan juga dari rakyat biasa. Selama abad XIX komponen-komponen yang paling menonjol dari kelas pegawai negeri terdiri dari anggota-anggota bangsawan Banten atau setidak-tidaknya dari orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan mereka. Seperti yang akan ditunjukkan studi ini di bagian kemudian, ahli-ahli waris dari martabat sosial yang tinggi lebih disukai dalam pembentukan birokrasi administratif di Banten. Ini sesuai dengan kebijaksanaan dasar kolonial dalam masa peralihan dari apa yang dinamakan "pemerintahan tidak langsung" ke "pemerintahan langsung".[92] Yang menarik perhatian adalah kenyataan bahwa kabupaten-kabupaten di bagian selatan-Lebak dan Caringin- yang tidak mempunyai elite penguasa pribumi sendiri memperoleh banyak dari penguasa-penguasanya daripada aristokrasi Sunda yang berasal dari Priangan atau Bogor. [93]

Pada awal periode setelah Kesultanan Banten dihapuskan, orang-orang dari rakyat biasa yang disenangi diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan rendahan dalam birokrasi dengan restu pemerintah kolonial. Orang-orang yang mulai sebagai juru tulis, pemungut pajak atau kasir, mendapat kesempatan untuk naik pangkat.[94] Perlu dicatat bahwa perimbangan jumlah antara orang-orang berdarah bangsawan dan orang-orang dari rakyat biasa di dalam pemerintahan secara berangsur-angsur telah menjadi terbalik dalam abad XIX. Untuk memudahkan pelaksanaan kebijaksanaan kolonial, maka pada mulanya memang paling tepat untuk mengangkat aristokrat-aristokrat yang sudah mapan, bangsawan Banten atau kaum birokrat yang mempunyai afinitas dengan mereka, sebagai pejabat-pejabat tinggi. Mereka diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan penduduk desa, yang harus direbut hatinya ke pihak pemerintah kolonial; akan tetapi ketidakefektifan, perbuatan sewenang-wenang dan korupsi, atau malahan sabotase telah memaksa pemerintah kolonial untuk mengubah kebijaksanaan mereka. Kaum bangsawan yang tadinya menempati kedudukan yang paling atas dalam masyarakat Banten berangsur-angsur surut dan elite birokrasi modern sebagai aristokrasi baru menjadi inti dari golongan status.

Oleh karena kaum priyayi kebanyakan adalah birokrat, maka kebudayaan mereka sangat mengutamakan status. Mereka merasakan satu kebutuhan untuk meniru kebudayaan dan tradisi keraton di rumah mereka, dan untuk hidup mewah. Mereka dapat dibedakan dari orang-orang lain karena tempat tinggal mereka: lokasinya, ukurannya dan strukturnya, semuanya menunjukkan status pemiliknya. Mereka mempunyai banyak pelayan; pakaian mereka yang lain daripada yang lain, dan pelbagai simbol lainnya, menuntut penghormatan dari rakyat biasa. Mereka adalah pelindung dan penafsir tata cara kehidupan aristokrasi yang turun-temurun.[95]

Mari kita sekarang beralih kepada golongan-golongan sosial di luar kelas yang berkuasa, yang mencakup petani, tukang dan pedagang yakni orang tani; nelayan, dan orang-orang dari kalangan agama seperti kiyai dan haji. Di samping itu, harus pula disebut kaum abdi atau hamba, yang sampai pada akhir abad XIX masih bisa dijumpai sebagai orang-orang yang mengabdi kepada gusti atau tuan mereka.[96] Ke dalam kelas yang tidak berkuasa dapat dimasukkan anggota-anggota bangsawan rendahan, yang banyak di antaranya berdiam di daerah pedesaan. Bagian terbesar dari golongan-golongan tersebut di atas adalah penduduk pedesaan. Di dalam satu masyarakat yang mementingkan agama seperti di Banten, banyak dari tradisi dan kebiasaan diidentifikasikan dengan agama, sehingga akibatnya perbedaan antara kebudayaan pedesaan dan kebudayaan kota untuk sebagian menjadi kabur. Namun demikian, satu penelaahan secara sepintas lalu sekalipun akan menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan itu masih nampak. Bukannya tanpa arti bahwa kaum priyayi, sebagai eksponen utama kebudayaan kota, masih mempertahankan banyak ciri-ciri kebudayaan asli, apakah itu Jawa atau Sunda,[97] yang terungkap dalam gaya hidup mereka yang khas.

ELITE PEDESAAN

Untuk tujuan studi ini, perhatian kita harus kita pusatkan pada dua bagian penting dari kaum tani, yakni pengurus desa dan pemuka-pemuka agama, dan yang merupakan elite pedesaan. Peranan sosial mereka dan status yang menyertai peranan itu, jelaslah mempunyai arti yang penting sekali dalam lingkungan desa; khususnya para pemuka agama memainkan peranan yang esensial dalam gerakan sosial.

Dilihat dari penampilan mereka secara lahir, terdapat dua macam desa yang berlainan pada waktu itu. Yang pertama terdiri dari rumah-rumah dengan pekarangan yang terpisah satu sama lain atau dipagari dan dikelilingi kebun. Yang kedua terdiri dari rumah-rumah yang berkelompok-kelompok serupa dengan apa yang masih dapat kita lihat pada orang-orang Baduy. Tadinya kelompok-kelompok rumah itu merupakan pemukiman orang-orang yang termasuk satu kerabat.[98] Dalam perjalanan waktu berlangsunglah perpindahan secara umum menjauhi desa-desa yang terdiri dari kelompok-kelompok rumah itu untuk berdiam di desa-desa "terbuka". Dengan cara itu mereka berusaha menghindari pengawasan dari pihak pemerintah dan pengurus desa.[99] Dilihat dengan latar belakang perkembangan itu, dapat dipahami bahwa administrasi desa tidak dapat berjalan dengan efektif sampai tahun 1844. Dalam tahun itu, Residen Buyn mengadakan pembaruan untuk menghapuskan lokasi rumah-rumah beserta pekarangan para "tuan-tanah" yang terpencar-pencar, dan terbentuklah desa-desa baru yang terdiri dari kelompok-kelompok tempat tinggal.[100] Jelaslah bahwa tindakan administratif itu bertujuan untuk memperketat pengawasan politik terhadap penduduk pedesaan dan memperkokoh kekuasaan pengurus desa. Dalam kenyataannya, sekitar setengah abad kemudian, tidak lama setelah pecahnya pemberontakan, orang masih dapat mendengar keluhan pejabat-pejabat pemerintahan bahwa jaro pada umumnya tidak mempunyai kekuasaan dan wibawa.[101] Satu penelaahan yang lebih seksama mengenai organisasi administrasi desa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan dan peranan anggota-anggota pengurus desa.

Di zaman kesultanan, kepala desa diangkat oleh sultan atau orang yang oleh sultan telah dianugerahi tanah *pecaton* di desa yang bersangkutan. Tugas utama kepala desa adalah mengurus kepentingan mereka, seperti memungut upeti dan mengerahkan tenaga untuk kerja bakti.[102] Sering kali terjadi bahwa dalam satu desa terdapat beberapa jaro, yang mewakili majikannya masing-masing yang telah menerima anugerah tanah di sana sebagai pecaton. Mulai dari penghapusan Kesultanan Banten sampai tahun 1844, jaro-jaro itu rupa-rupanya diangkat oleh pemerintah berdasarkan saran yang diajukan oleh pemuka-pemuka desa atau demang.[103] Sejak tahun 1844, jaro dipilih oleh rakyat dan pilihan itu kemudian direstui pemerintah. Yang menarik adalah bahwa di antara jaro-jaro di Banten, 22 orang berhak memakai gelar lurah; mereka juga diberi wewenang untuk menyampaikan perintah-perintah dari kepala distrik kepada sejumlah jaro di daerah sekitamya.[104] Fungsi utama jaro adalah bertindak sebagai perantara antara penduduk setempat dan sistem administrasi yang lebih luas.

la pada umumnya mengurusi administrasi setempat, seperti memungut pajak, mengerahkan rakyat untuk kerja wajib, melaksanakan perintah-perintah atasan dan memberikan pelayanan administratif kepada penduduk desa seperti mengeluarkan pelbagai izin. Dalam pekerjaan sehari-hari jaro dibantu oleh pejabat-pejabat sebagai berikut:

1) *pangiwa* atau *panglaku*, yang bertugas mengeluarkan perintah-perintah;
2) juru tulis atau sekretaris jaro;
3) *jagakersa* atau agen polisi;
4) *kapetengan* atau *pancalang*, yakni pengantar surat;
5) *amil* atau pemungut pajak, terutama bertugas menerima jakat;
6) *merbot, modin* dan *ketib*, semuanya pegawai mesjid;
7) *kolot-kolot* atau *tuwa-tuwa* yakni orang-orang yang dipertua di desa.[105]

Anggota-anggota pengurus desa itu dipilih oleh jaro, kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan penduduk yang kurang terkemuka dan bukan dari kaum elite desa. Dengan sendirinya mereka tidak dihormati di kalangan penduduk desa, tidak pula mempunyai kekuasaan dan pengaruh. Hal itu mengakibatkan bahwa penduduk desa tidak pernah diganggu dengan tindakan yang tegas dan drastis dari pihak pengurus desa. Malahan pernah terjadi bahwa anggota-anggota pengurus itu dipilih oleh penduduk desa yang tidak begitu terhormat dengan maksud agar mereka tidak akan diganggu dalam perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar hukum. Ada kasus-kasus di mana orang-orang yang terkenal jahat dipilih dengan maksud untuk memudahkan usaha-usaha mengurangi perbuatan-perbuatan kriminil.[106]

Mengenai persyaratan bagi jaro dan pembantu-pembantunya, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Berlainan dengan perkiraan orang, tingkat melek huruf tidaklah terlalu rendah, terutama jika diperhitungkan banyaknya orang yang dapat menulis dan membaca huruf Melayu.[107] Kedua, pengangkatan jaro sering kali menjadi sasaran manipulasi golongan-golongan kepentingan di dalam dan di luar desa, di antaranya dapat disebutkan para haji, petani-petani kaya dan pegawai-pegawai negeri. Hal yang ketiga, yang erat kaitannya dengan yang kedua, adalah bahwa selama kedudukan jaro dipandang tidak lebih dari kedudukan seorang pesuruh atau seorang *factotum*, tak akan ada calon yang kompeten. Yang lebih penting artinya adalah kedudukan lurah, yang nampaknya mempunyai prestise yang lebih besar daripada jaro. Sesungguhnya, kedudukan lurah lebih tinggi daripada jaro dan hal itu diakui oleh desa-desa di sekitarnya. Kiranya akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana jalannya kegiatan politik setempat yang difokuskan pada peranan kepala desa, akan tetapi sumber-sumber yang tersedia hanya memberikan kepingan-kepingan informasi yang merangsang. Dalam konteks ini bukannya tidak pada tempatnya untuk menunjuk kepada contoh-contoh yang sedikit jumlahnya mengenai mana kami mempunyai sejumlah informasi.

Seperti telah dikemukakan di atas, penduduk desa lebih suka memilih orang yang tak berpengetahuan atau yang penurut daripada orang yang berkemauan keras yang dapat memaksakan kemauannya kepada orang-orang lain. Setiap dukungan yang diberikan oleh pemuka-pemuka agama dalam satu kampanye pentilihan merupakan jaminan bahwa kepentingan penduduk desa akan dilindungi dalam soal-soal seperti penetapan kerja wajib atau pajak. Sesungguhnya, jaro tidak dianggap sebagai wakil penduduk desa atau sebagai penguasa yang sesungguhnya di lingkungan mereka. Mudah dipahami mengapa para jaro, di bawah tekanan pejabat-pejabat pada tingkat di atas desa, membiarkan diri mereka dijadikan alat manipulasi tanah untuk kerugian rakyat biasa di desa. Yang sangat terkenal adalah seringnya para jaro berusaha membagi-bagikan tanah kesultanan kepada anggota-anggota bangsawan, pegawai negeri dan pemuka-pemuka desa. Sering kali ia membantu usaha mengkonversikan tanah-tanah dari kategori ini sementara penyewa-penyewanya masih mempunyai hak garap yang sah atasnya.[108] Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa sebenarnya terdapat faktor-faktor lain yang menembus batas-batas hirarki desa. Meskipun orang-orang yang dipertua atau kolot-kolot hanya melakukan fungsi seremonial dalam administrasi desa, mereka biasanya mempunyai kewibawaan terhadap penduduk desa. Kenyataan bahwa mereka bertindak sebagai juri dalam konflik-konflik di dalam lingkungan desa merupakan satu bukti yang nyata mengenai

kedudukan mereka. Di satu daerah yang sangat terkenal ketaatannya kepada agama, seperti daerah Banten, sudah sewajamya jika *penghulu* atau *amil*, yang secara resmi bertugas mengumpulkan zakat, menempati kedudukan yang penting di desa. Kekuasaannya sering kali melebihi kekuasaan jaro, dan pengangkatannya sedikit banyak ditentukan oleh pemuka-pemuka agama di daerah yang bersangkutan. Dalam usahanya mencari sebab-sebab pemberontakan, pemerintah kolonial menganggap jaro sebagai mata yang lemah dalam rantai administratif kolonial antara pemerintah pusat dan desa, dan oleh karena itu diusahakan untuk menegakkan kekuasaan dan kewibawaan jaro dengan jalan memberikan kepadanya lebih banyak tanah apanase, yang dilekatkan kepada posisinya.[109] Dua faktor lainnya yang menembus batas-batas hirarki desa dapat dikemukakan, yakni golongan *jawara* dan golongan agama. Golongan yang pertama pada umumnya terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang sering kali melakukan kegiatan-kegiatan kriminil.[110]

Sebelum kita membahas status dan peranan pemuka-pemuka agama, perlu disebutkan dua golongan sosial yang merupakan lapisan paling bawah dalam hirarki sosial, yakni golongan orang-orang yang tidak memiliki kondisi sosio-ekonomis seperti yang disebutkan di atas, dan yang cenderung untuk membangkang dengan jalan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara konvensional dipandang anti-sosial dan jahat, seperti melakukan perampokan, tak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup di luar hukum. Hal ini akan dibahas secara panjang lebar dalam Bab IV. Golongan kedua terdiri dari apa yang dinamakan orang-orang *bujang*. Mereka menyediakan tenaga mereka untuk melakukan jasa-jasa menurut permintaan para pemilik tanah. Sebenarnya, perekonomian sosial yang berlaku untuk sebagian sudah didasarkan atas sistem upah. Di banyak desa sudah merupakan kelaziman bagi para majikan (pemilik tanah-majikan) untuk mengadakan persetujuan-persetujuan kerja dengan para *bujang*, dan sering kali mereka ini bekerja dalam sebuah rumah tangga dengan mendapat makan dan pemondokan. Sudah tentu ada pelbagai macam persetujuan di mana bujang-bujang itu disewa sebagai buruh.[111] Akan tetapidisiniperhatian kita akau lebih ditujukan kepada status dan peranan sosial kaum bujang itu. Mereka tidak memiliki harta-benda seperti yang dipunyai oleh majikan mereka, akan tetapi sesuai dengan adat, mereka tidak dibebani kewajiban-kewajiban seperti yang harus dipikul oleh para pemilik tanah.[112] Mungkin beralasan untuk memandang golongan *bujang* sebagai unsur utama dari golongan proletar pedesaan. Proporsi penduduk yang memiliki tanah dibandingkan dengan kaum buruh tani yang tidak punya tanah merupakan satu hal yang penting, akan tetapi sayangnya soal ini tidak mudah disingkapkan. Survey-survey mengenai hak tanah sangat penting artinya karena memberikan informasi mengenai pemegang hak atas tanah, akan tetapi tidak memungkinkan kita untuk menghitung jumlah orang yang hidup semata-mata dari tenaga kerja mereka.[113] Adanya buruh-buruh upahan pedesaan di Banten abad XIX merupakan satu fakta yang diperkuat oleh hasil pengamatan bahwa tingkat upah sudah ditentukan oleh satu pengaturan yang permanen sesuai dengan kebiasaan setempat.[114] Persoalannya sekarang adalah, apakah eksistensi golongan bujang sebagai golongan buruh tani yang tidak punya tanah mengandung antagonisme terhadap golongan-golongan sosial lainnya? Adalah penting untuk mengetahui apakah gerakan pemberontakan tahun 1888 merupakan bukti bahwa antagonisme semacam itu memang ada. Dalam hal ini, sumber yang tersedia akan mengecewakan: sumber-sumber itu hampir tidak mengatakan apa-apa mengenai soal pemilikan tanah, yang dapat dianggap sebagai determinan utama dari status sosio-ekonomis orang-orang yang ikut dalam pemberontakan. Soal-soal seperti itu rupa-rupanya tidak mendapat perhatian orang-orang yang membuat laporan-laporan pemerintah waktu itu.

Kembali kepada golongan agama: adalah satu hal yang wajar sekali bahwa, di daerah yang hampir semua pendukung memeluk agama Islam, status kiyai dan haji sangat tinggi dan bahwa mereka dipandang sebagai simbol prestise sosial. Orang dapat membedakan tiga kategori haji:

(1) mereka yang pergi ke Mekah atas kemauan sendiri dan dengan biaya sendiri;

(2) mereka yang dikirim ke sana oleh orang tua mereka atau kerabat mereka untuk belajar teologi dan yang biasanya bermukim lama di Tanah Suci;

(3) mereka yang mempunyai nama buruk dan didesak oleh anggota-anggota keluarga mereka untuk naik haji agar mereka bertaubat.

Dalam kategori yang pertama dapat ditemukan orang-orang yang paling gist, rajin dinamis. Kategori haji yang kedua memiliki banyak pengetahuan dan sekembalinya dari Mekah kebanyakan dari mereka menjadi guru atau kiyai. Sebagian dari mereka menjadi petualang dan melakukan praktek-praktek yang buruk dengan menggunakan pengalaman yang telah mereka peroleh di lust negeri. Haji-haji dari kategori ketiga biasanya melanjutkan cara hidup mereka yang lama sekembali mereka dari Mekah.[115]

Kaum haji itu mempunyai penghasilan dari pelbagai sumber: memiliki tanah, beternak dan berdagang merupakan sumber penghasilan mereka yang utama. Mengajar merupakan satu sumber penghasilan yang penting bagi seorang haji. Di samping berdagang, meminjamkan uang juga merupakan salah satu kegiatan usaha kaum haji. Salah satu tugas resmi mereka adalah mengelola mesjid. Juga ada sementara haji yang menjadi kepala desa. Di samping pekerjaan-pekerjaan itu, seorang haji sering kali menjadi penasihat kerohanian bagi bekas murid-muridnya dan keluarga-keluarga mereka, dan ada juga yang menjadi dukun.[116]

Kebanyakan haji memiliki tanah, dan sebagian dari mereka adalah pemilik-pemilik tanah yang terkemuka. Hal itu membuat mereka sedikit-banyak mandiri di bidang ekonomi, dan juga mempunyai pengaruh atas segolongan orang yang tergantung kepada orang lain di bidang ekonomi. Tidaklah mengherankan bahwa keuntungan-keuntungan yang diperoleh kaum haji dari pemilikan mereka atas tanah meningkatkan kedudukan politik mereka dalam lingkungan desa. [117]

Di Banten, mengajar dianggap sebagai pekerjaan terhormat bagi seorang haji. Akan tetapi, meskipun merupakan satu pekerjaan yang terhormat, mengajar itu juga dianggap mendatangkan penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebanyakan pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh para haji. Meskipun demikian, banyak haji menjadi guru agama.[118] la perlu juga dikemukakan bahwa sejumlah haji, selain menjadi guru agama juga rrierangkap salah satu di antara pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas. Seorang haji sudah barang tentu mempunyai prestise yang lebih besar daripada seorang haji biasa yang mengajar, meskipun hal itu tidak berarti bahwa yang disebut pertama itu mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar. Seorang kiyai, sebagai seorang ulama yang sudah mapan dan memimpin sekotah agamanya sendiri, sudah sejak lama menempati kedudukan sentral dalam struktur sosial masyarakat pedesaan. Seorang kiyai dapat dipandang sebagai seorang ahli dalam menyampaikan ajaran Islam kepada para petani.[119] Peranan sosialnya, sebagai mata rantai utama antara sistem setempat dan lingkungan di atas tingkat desa atau, menurut istilah Redfield, antara Tradisi Kecil dan Tradisi Besar,[120] sarat dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menjamin dan memperbesar pengaruh sosialnya. Bagi penduduk desa di Banten Utara, di mana Islam sudah merupakan satu kepercayaan yang sangat ampuh, seorang kiyai merupakan tokoh sakral yang berkuasa dan tokoh sekular yang berpengaruh. Kesuciannya tidak karena mendapat reaksi dari pejabat-pejabat sekular, seperti sedikit-banyaknya merupakan hal yang lazim di zaman kesultanan, melainkan karena pengetahuannya mengenai Islam, karena ia telah menunaikan ibadah haji dan karena cara hidupnya yang khas. Kedudukannya di daerah-daerah pedesaan tak tergoyahkan dan kepemimpinannya menjadi satu ancaman yang laten bagi penguasa sekular pada umumnya, dan penguasa kolonial pada khususnya.

Dengan bermodalkan harta-benda, keterampilan dan pengalaman yang luas, banyak haji berhasil mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dan kekayaan mereka. Kegiatan-kegiatan usaha mereka dipermudah oleh sarana-sarana komunikasi yang ekstensif yang tersedia bagi mereka. Jelaslah bahwa status haji merupakan satu modal yang panting bagi kegiatan-kegiatan perdagangan dan financial. Seperti telah dikemukakan di atas, para haji ambil bagian dalam kegiatan meminjamkan uang dan menerima barang gadaian. Terdapat sumber-sumber referensi yang membuktikan bahwa pedagang-pedagang di daerah-daerah pedesaan terutama terdiri dari para haji.[121] Dalam kenyataannya, dengan berjalannya waktu kaum haji telah muncul sebagai kelas yang "makmur" di kalangan kaum tani, dan merupakan simbol kekuasaan politik dan finansial. Mereka mempunyai lebih banyak waktu senggang, yang dapat mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pada gilirannya, prestise mereka di bidang keagamaan memperbesar kekuasaan sosial mereka. Mereka pandai mengubah kehormatan dan prestise menjadi nilai-nilai yang praktis: di bidang materi berupa arus upeti dari

kaum petani, dan di bidang politik berupa dukungan dari pengikut-pengikut mereka di daerah pedesaan. Bagaimana mereka mengerahkan massa pengikut dan menyebarkan ideologi-ideologi mereka, dan apa sebabnya mereka bersikap bermusuhan terhadap pemerintah kolonial, merupakan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya . Kiranya di sini cukup disinggung kondisi-kondisi sosio-ekonomis para pemuka agama, yang telah memainkan peranan yang sangat panting dalam pergolakan-pergolakan sosial yang silih-berganti di Banten abad XIX

Satu aspek stratifikasi sosial masih akan ditelaah, yakni fluktuasi mobilitas sosial di Banten abad XIX. Akibat poligami di satu pihak, dan dihapuskannya kesultanan di lain pihak, kaum bangsawan tak dapat dihindarkan lagi mengalami suatu degradasi sosial en masse. pada waktu yang bersamaan, suatu daya tarik yang timbal-balik antara wanita-wanita bangsawan dan pejabat-pejabat tinggi dapat disaksikan dalam abad itu. Mengenai elite birokrasi yang baru atau kaum priyayi, mereka dapat dianggap sebagai golongan aristokrasi yang sedang naik, dan selama sistem administrasi kolonial sedang mengalami ekspansi, kantor-kantor administrasi masih mempunyai tempat bagi anggota-anggotanya yang masih muda. Satu hal yang menarik adalah bahwa komposisi korps pegawai negeri yang beraneka ragam tidak disangsikan lagi mencerminkan mobilitas sosial yang sedang berlangsung. Oleh karena di dalam pemerintahan kolonial agama mempunyai peranan yang kecil saja, maka ia tidak dapat menyediakan saluran untuk meningkatkan kedudukan sosial, sekurang-kurangnya tidak di dalam kerangka sistem politik yang berlaku ketika itu. Secara keseluruhan, masyarakat Banten tidak menunjukkan suatu sistem status yang kaku, dan terdapat banyak contoh yang membuktikan bahwa sering terjadi mobilitas vertikal. Sebaliknya, pemisahan diri elite birokrasi dari elite agama, satu gejala yang menyertai sekularisasi pemerintahan, telah mengakibatkan yang disebut belakangan itu kehilangan salah satu saluran utama untuk mobilitas ke atas. Meskipun elite agama mempunyai prestise simbolik yang besar sekali, namun nampaknya mereka tidak mempunyai kedudukan politik yang sepadan.[122] Tidak disangsikan lagi, hal itu merupakan salah satu sebab utama pemberontakan.

RASA TIDAK PUAS YANG DIRANGSANG OLEH PEMBARUAN

Di sini kita harus menyinggung beberapa masalah sosio-ekonomis yang mempunyai pengaruh yang langsung terhadap rasa tidak puas di kalangan rakyat Banten Utara dan yang erat kaitannya dengan pembaruan-pembaruan yang dilaksanakan dalam pertengahan kedua abad XIX.

Di dalam rangka penghapusan kewajiban berbagai kerja bakti secara berangsur-angsur, sebuah peraturan telah dikeluarkan dalam tahun 1882 yang menghapuskan semua kerja bakti untuk para *pejabat (pancendiensten)* dan menggantikannya dengan pajak kepala.[123] Menurut peraturan itu, yang wajib membayar pajak itu hanyalah mereka yang diharuskan melakukan kerja bakti (herendienstplichtigen). Sebagai pelaksanaan peraturan itu, Residen Spawn dari Banten memerintahkan agar semua laki-laki sehat yang berusia antara 15 dan 50 tahun dikenakan pajak itu.[124] Jelaslah bahwa peraturan itu didasarkan atas pengertian Spawn yang keliru mengenai kebiasaan yang berlaku mengenai kerja bakti. la beranggepan bahwa kerja bakti itu asal-mulanya merupakan semacam pajak tanah.[125] Oleh karena pajak kepala dijadikan pengganti kerja bakti, ia menganggapnya sebagai pajak yang dikenakan atas perorangan. Dalam hubungan ini perlu ditambahkan bahwa kebijaksanaan administratif Spawn bertujuan untuk menghindari keanekaragaman peraturan mengenai pemungutan pajak kepala di Keresidenan Banten. Seperti telah dikemukakan di atas, dalam hubungan dengan kewajiban melakukan kerja bakti, maka untuk daerah ini kita harus membedakan antara daerah di mana terdapat apa yang tadinya merupakan sawah negara, dan daerah selebihnya. Di daerah yang disebut pertama, hanya seorang saja dari tiap rumah tangga- yakni laki-laki kepala keluarga atau *baku*- yang dapat dikenakan wajib kerja bakti itu. Diberlakukannya peraturan Spawn menyebabkan para kepala rumah tangga harus memikul beban yang terlalu beret, oleh karena mereka harus membayar pajak kepala bagi semua anggota laki-laki yang kuat dan berusia

antara 15 dan 50 tahun di dalam keluarganya dan orang-orang menumpang yang merupakan pembantu rumah tangga. Keadaannya bertambah buruk, oleh karena pelaksanaan kerja bakti di Banten pengaturannya buruk dan pengawasannya tidak memadai, sehingga akibatnya semakin besarlah jumlah orang-yang menurut adat harus dikecualikan-diwajibkan melakukan kerja bakti itu.[126] Rasa tidak puas telah timbul di afdeling Anyer, oleh karena sebagian dari penduduk harus membayar pajak kepala, meskipun telah ada janji bahwa mereka akan dibebaskan dari pajak itu. Secara ringkas keadaannya adalah sebagai berikut: pada awal tahun 1888, telah diadakan suata penyelidikan mengenai prinsip-prinsip yang telah dijadikan dasar peraturan mengenai kerja bakti wajib di tahun-tahun sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa prinsip-prinsip itu tidak adil, para pejabat yang bersangkutan hays meninjau kemball daftarnya dan mencoret nama-nama mereka'yang tidak dapat dikenakan wajib kerja bakti. Sementara itu kepada orang-orang yang bersangkutan telah diberitahukan mengenai langkah yang sedang diambil itu, akan tetapi pada saat terakhir Asisten Residen Gubbels mengeluarkan perintah agar nama orang-orang itu dimasukkan ke dalam deftar tahun 1888. Tidak mengherankan bahwa rakyat menjadi sangat gusar dengan tindakan para pejabat yang kelihatannya tidak konsisten itu.[127] Menurut para pengamat, persoalan pajak kepala itu dapat dipandang sebagai salah satu penyebab pemberontakan. Pendapat kami adalah bahwa hal itu sekurang-kurangnya merupakan sata di antara faktor-faktor ekonomi yang membantu menimbulkan rasa tidak pauas di kalangan rakyat di daerah itu.

Salah satu persoalan penting yng berkaitan dengan pembaharuan-pembaharuan agraris menyangkut pemungutan sewa tanah. Banyak sekali survey yang telah diadakan, seperti survey kadaster dan survey-survey mengenai prosedur pemungutan pajak. Yang fundamental bagi yang disebut belakangan itu adalah masalah pemungutan sewa tanah secara komunal atau secara perorangan. Salah seorang pembaru yang gigih, yang menghendaki pemungutan secara komunal, adalah Sollewijn Gelpke, yang nasehatnya telah diterima baik di Banten pada awal tahun 1885.[128] Menurut sistem komunal ini, jumlah seluruh sewa tanah yang harus dibayar oleh tiap desa ditetapkan atas dasar angka-angka yang baru diperoleh mengenai luas tanah yang ditanami dan produktivitasnya. Pembayaran "sewa tanah komunal" ini harus dibagi di antara penduduk desa menurut kebijaksanaan mereka sendiri. Dalam teorinya, pembagian beban pajak itu dilakukan di bawah pengawasan ketat pegawai-pegawai pamongpraja, namun dalam kenyataannya hal itu tak mungkin dilaksanakan oleh karena mereka tidak memiliki data-data yang sebenantya mengenai luas tanah yang dimiliki oleh tiap penggarap serta kondisinya. Sesungguhnya data-data itu telah diubah atas dasar daftar-daftar desa, sehingga jumlah pajak seluruhnya sama dengan jumlah pajak "komunal" tersebut. Atas dasar data-data yang kebanyakan merupakan data-data rekaan itulah diadakan pembagian beban pajak di dalam lingkungan desa. Mengingat kondisi seperti itu,maka jelaslah bahwa pembagian itu dilakukan begitu rupa sehingga menguntungkan golongan-golongan yang dominan di tiap desa, di antaranya pasti termasuk anggota-anggota pengurus desa. Seperti telah sering dllaporkan oleh para pejabat, pembagian itu telah disalahgunakan oleh para jaro.[129] Elite pedesaan berada dalam kedudukan yang kuat untuk membayar pajak relatif kecil, oleh karena mereka dapat melakukan tekanan terhadap pejabat-pejabat desa untuk mengurangi bagian pajak yang harus mereka bayar. Akibatnya ialah rakyat biasa harus memikul beban yang lebih berat.

Satu peraturan administratif lainnya yang menimbulkan rasa tidak puas adalah penetapan pajak perdagangan. Dinaikkannya pajak ini telah menambah penyebab-penyebab kejengkelan yang sudah menumpuk di kalangan penduduk. Khususnya di distrik Bojonegoro, penetapan pajak perdagangan untuk pemitik-pemilik perahu rupa-rupanya telah dilaksanakan secara ketat sekali. Di beberapa desa di distrik itu, sepertl di Beji, Nyamuk, dan Bojonegoro, telah diterima pengaduan-pengaduan bahwa pajak perdagangan yang dikenakan atas perahu telah dinaikkan secara melampaui betas. pada awal tahun 1887, 35 pemilik perahu mengirimkan petisi kepada Residen Banten, meminta agar pajak perdagangan itu diturunkan.[130] Bagaimana terjadinya kenaikan pajak itu? Di tahun-tahun sebelumnya, pajak perdagangan untuk perahu ditetapkan tanpa memperhitungkan ruang muatan barang. Oleh karena peraturan itu dianggap tidak wajar oleh Gubbels, maka dalam tahun itu ia memerintahkan agar peraturan itu ditinjau kembali. Masalah yang sangat panting adalah kriteria apa yang harus dipakai untuk menetapkan pajak perdagangan atas perahu. Dalam satu pertemuan di antara anggota-anggota pamongpraja

dicapai kata sepakat bahwa untuk tiap *koyang* (satu unit tonase) akan dikenakan pajak sebesar sepuluh golden tanpa memperhitungkan ukuran perahunya. Begitu pula tempat tujuan perahu tidak dipersoalkan. Penghasilan rata-rata tiap perjalanan erat sekali kaitannya dengan kedua faktor itu. Dilihat dari segi ini, maka para pemilik perahu jelas dirugikan. Yang membuat keadaannya lebih buruk lagi adalah kekeliruan yang diperbuat dalam pengukuran perahu sehingga akibatnya tonase yang dicatat dalam daftar melebihi tonase yang sebenamya.[131] Selain itu, tahun 1887 kebetulan merupakan tahun yang buruk bagi pemilik-pemilik perahu. Pendek kata, pajak perdagangan itu dirasakan sebagai beban yang sangat menekan dan kejengkelan yang semakin berat kembali dinyatakan dalam bentuk sebuah petisi yang dikirimkan kepada Residen Banten oleh takyat distrik Kramat Watu dan Cilegon.[132] Kedua petisi itu tidak dipenuhi. Setelah pemberontakan, Gubbels dipersalahkan bahwa di satu pihak ia telah menangani persoalan-persoalan itu dengan cara yang serampangan, dan di lain pihak ia telah berkeras kepala mempertahankan satu keputusan meskipun sejak semula ia telah melihat ketidakkonsistennya. Selain itu dapat ditambahkan bahwa salah satu alasan untuk menolak permohonan itu adalah sebagaimana dinyatakan oleh Gubbels sendiri: "Oleh karena rakyat telah menyampaikan petisi mengenai penurunan (pajak), maka tidak mungkin permohonan itu diluluskan, sebab mereka nantinya akan menjadi kurang ajar.[133] Sesungguhnya Gubbels sedang berusaha untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang seragam mengenai pajak perdagangan di daerahnya tanpa memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kondisi-kondisi setempat. Bagi Anyer, yang mempunyai hubungan perdagangan yang sedang berkembang pesat dengan Sumatera Selatan, peraturan Itu tidak begitu merugikan ketimbang bagi Beji, Bojonegoro dan Nyamuk. Oleh karena tidak ada jalan lain untuk memparbaiki nasib mereka, pemilik-pemillk perahu di tempat-tampat itu mangancam akan menghentikan pelayaran perahu-perahu mereka apabila petisi mereka tidak dipenuhi. Sulit untuk mengetahui sampai sejauh mana hal itu telah membantu memperbesar ketegangan di kalangan penduduk pedesaan, akan tetapi yang menarik perhatian adalah bahwa sebagian besar kaum pemberontak berasal dari daerah itu.[134]

Di camping kasus.kasus mengenai penetapan pajak, pengutipan satu jenls pajak perdagangan yang istimewa di Cilegon, yakni pajak *pasar*, merupakan hal yang sangat menarik. Berdasarkan fasal 14 Ordanansi 17 Januari 1878, Residen Banten memerintahkan agar orang-orang yang berjualan di pasar dikenakan pajak pasar. Di Cilegon peraturan itu rupa-rupanya dilaksanakan dengan ketat sekali, dan kebaratan-keberatan yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang hanya kadang-kadang saja berjualan, tidak dihiraukan. Setiap orang yang berjualan di pasar harus membayar sekurang-kurangnya satu golden. Orang yang tidak membayar pajak itu diancam dengan hukuman kurungan atau denda sebesar 15 golden. Pernah terjadi bahwa mereka yang berada di pasar dan tidak memiliki surat lunas pajak ditangkapi dan rakyat yang menjadi panik berlarian meninggalkan pasar. Selama beberapa waktu tempat itu kosong pada hari-hari pasar.[135] Menurut laporan, 16 orang telah diajukan ke muka pengadilan dalam waktu dua bulan, yakni Juli dan Agustus 1887. Oleh karena berkas-berkas perkara itu telah dibakar ketika terjadi pemberontakan, tidak dapat diketahui lagi berapa banyaknya orang yang telah dipanggil oleh polisi dan berapa banyak dari mereka yang tidak memenuhi panggilan itu. Mudah dibayangkan bahwa pajak pasar itu telah memperberat beban pajak di daerah tersebut. Sudah barang tentu terdapat banyak lagi kejengkelan di kalangan rakyat di afdeling Anyer, akan tetapi apa yang telah disebutkan di atas itu dapat dianggap sebagai yang paling relevan bagi kondisi-kondisi sosio-ekonomis yang terdapat di daerah itu dalam tahun-tahun sebelum meletusnya pemberontakan.

KESULITAN EKONOMI YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA-BENCANA FISIK

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi-kondisi sosio-ekonomis telah menimbulkan tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang asing dan tak terduga sebelumnya, dan karenanya menjadi sumber frustrasi yang kumulatif. Perlu dikemukakan bahwa seluruh daerah itu telah sangat menderita akibat bencana-bencana

fisik yang silih-berganti melanda dalam tahun-tahun sebelum pemberontaka. Wabah penyakit ternak dalam tahun 1879 telah menurunkan jumlah seluruh ternak menjadi sepertiga sehingga terasa sekali kekurangan akan kerbau dan banyak sekali sawah terpaksa diterlantarkan. Tindakan yang diambil untuk mencegah meluasnya penyakit itu - yakni membunuh secara massal telah menimbulkan kerugian yang besar serta rasa cemas di kalangan rakyat. Jelas sekali bahwa seluruh agronomi daerah itu sangat terganggu.[136]

Tahun berikutnya muncul wabah demam yang menyebabkan lebih dari sepuluh persen penduduk meninggal dunia. Karena terdapat kekurangan yang sangat besar akan tenaga kerja, banyak sawah tak dapat digarap dan malahan ada panen yang tidak dapat dipetik. Akibatnya, satu musim kelaparan yang gawat tak dapat dielakkan lagi.[137]

Rakyat belum sempat bangun kembali dari semua penderitaan itu, ketika letusan dahsyat Gunung Krakatau dalam tahun 1883 menyebarkan kehancuran hebat di daerah itu; letusan itu banar-benar merupakan letusan yang paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah vulkanologi di Indanesia. Lebih dari 20.000 orang tewas, banyak desa yang makmur hancur dan sawah-sawah yang subur berubah menjadi tanah gersang. Penduduk memerlukan waktu beberapa tahun untuk bangkit kembali dari kehancuran itu.[138]

Tak disangsikan lagi bahwa wabah penyakit ternak dan wabah demam, serta kelaparan yang diakibatkannya, dan letusan Gunung Krakatau yang menyusul, telah merupakan pukulan yang hebat bagi penduduk: akibat merosotnya populasi ternak dan jumlah tenaga manusia yang tersedia, sekitar sepertiga dari tanah pertanian tidak dapat ditanami selama tahun-tahun bencana itu (1880-1882), sementara letusan Gunung Krakatau menyebabkan luas tanah yang tidak dapat digarap menjadi lebih besar lagi, terutama di bagian barat afdeling Caringin dan Anyer. Kegagalan panen selama beberapa tahun (1878-1886) telah menyebabkan keadaannya lebih buruk lagi.[139] Akan tetapi, lingkup studi ini tidak mengizinkan kami untuk membahas bencana-bencana fisik itu secara panjang lebar; namun demikian, sejauh ada kaitan yang langsung dengan kecenderungan penduduk untuk memberontak, bencana-bencana itu akan disinggung pada waktunya nanti. Cara ini dapat dibenarkan oleh kenyataan bahwa perhatian khusus kita tidaklah terutama difokuskan pada peristiwa-peristiwa historic yang unik, dengan pengaruhnya yang mendadak dalam bidang sosio~ekonomis, melainkan pada struktur-struktur, pola-pola, dan kecenderungan-kecenderungan sosio-ekonomis, yang membentuk kerangka di mana gerakan sosial yang menjadi pokok studi ini dapat ditempatkan.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Lihat Kolontaal Verslog, 1888-1889, Appendix A1, ha1.10. Cilegon mempunyai kepadatan penduduk 15.693 orang tiap mil persegi (1 mil geogr. =7407,4 m; lihat ENI, II). Jumlah penduduk rata-rata tiap hektar tanah yang digarap adalah 2,8 di distrik Cilegon dan 0,7 di diatrik Lebak.

[2] Satu pengecualian perlu dikemukakan, yakni apa yang dinamakan peristiwa Lebak yang timbul dari konflik antara Douwes Dekker, asisten residen, dan Karta Natanegara, bupati, keduanya dari daerah Lebak. Sebagai akibat luasnya publisitas mengenai tulisan-tulisan Douwes Dekker mengenai persoalan tersebut, maka peristiwa Lebak menjadi cukup terkenal. Lihat Multatuli, Volledige Werken, Vol. IX (1956); mengenai kerusuhan-kerusuhan dalam tahun-tahun tiga puluhan, lihat di bawah, Bab. IV, catatan no. 48.

[3] Banten Utara: 10.131 tiap mil persegi, Banten Selatan 2.787 tiap mil persegi.

[4] Armando Cortesao, Vol. I (1944), hal. 170; di sana disebutkan kota-kota pantai di Jawa Barat, seperti Sunda Bantam, Pontang, Cheguide, Tangara, Sunda Kalapa.

[5] Kota Banten diislamkan dalam tahun 1525, Sunda Kalapa tahun 1527, ketika namanya

diganti menjadi Jakarta. Lihat H. Djajadiningrat (1913).

[6] Mengenai pudamya Banten, lihat Schrieke (1955), hal. 49-65.

[7] Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832), hal. 169; lihat juga 77V1, Vol. VII part 1, (1845), hal. 353-363.

[8] Ciri-ciri rakyat Banten Utara telah dikemukakan oleh beberapa penulis, seperti Snouck Hurgonje dalam Catalan 15 Agustus 1892; Spaan, dalam Almanak der Indologische Vereeniging (1893), hal. 222-285; Van Vollenhoven, Vol. I (1918), hal. 697; H. Djajadiningrat, dalam Handelingen (1921), hal. 309-324; Multatuli, dalam Volledige Werken, Vol. ix (1956), hal. 535.

[9] Spaan, dalam *Almanak der Indologische Vereeniging* (1893), hal. 222-285; cf. Catalan Snouck Hurgronje tanggal 15 Agustus 1892.

[10] Fokkens,*Eindresume*, Vol. 1, part 2 (1902), hal. 30.

[11] Fokkens, *Eindresum*e Vol. I, (1901), hal. 17[8]; lihat juga Eindresume, Vol. II (1880), hal. I-4.

[12] Lihat Fokkens, *Eindresame* Vol. I, part 2 (1902), hal. 29-33. Mengenai industri, pembuatan minyak kelapa oleh apa yang dinamakan *orang kunceng*, yang merupakan orang-orang ahli di bidang industri ini dan mempunyai pabrik-pabrik di bagian bagian lain di Banten, umpamanya di Caringin dan Pandeglang, sudah terkenal.

[13] Konsep-konsep "kelas" dan "status" di sini dipakai dalam pengertian menurut Weber; lihat Gerth dan Mills (1958), ha1.180-195.

[14] Konsep dikotomis mengenai masyarakat tradisional, yang mencakup golongan priyayi (gentry) dan golongan tani (peasantry) memainkan peranan penting dalam teori Hagen, lihat Hagen (1962). Trikotomi pembagian masyarakat agraris yang tradisional menurut Kautsky, adalah terlalu digeneralisasikan, sehingga tidak bisa diterapkan pada masyatakat Banten; di sini sangat dibutuhkan stratifikasi yang lebih seksama, yang relevan bagi masyarakat-masyarakat historis; lihat Kautsky (1962), hal. 13-17.

[15] Geettz (1956), hal. 7; ter Haar (1948), hal. 72

[16] Benda dan McVey (1960), hal. 20.

[17] Menurut KoloniaaJ Verslag, 1888-1889, Appendix A, hal. 12-13, diadakan perincian sebagai berikut: petani 141.172; pedagang 7.158; nelayan 3.465; pandai besi 200; petani ikan 614; pegawai negeri 598; pejabat agama 1.084; kepala desa 6.132; haji 4.512; guru agama 706.

[18] Beberapa usaha industri merupakan spesialisasi-spesialisasi setempat sejak bebetapa generasi, seperti umpamanya industri kulit, pandai besi; dari desa-desa seperti itulah orang-otang merantau ka Batavia dan Lampung; lihat Fokkens, Eindresuml Vol. I, part 2, (1902), hal. 38.

[19] Setiap tahun sekitar 2000 orang pergi ke Batavia dan sekitar 3000 orang ke Lampung; lihat Fokkens, Eindresnme Vol. I, part 2, (1902), hal. 34,

[20] Pada akhir abad itu, perbandingan antara jumlah perantau dan jumlah laki-laki yang sehat secara keseluruhan adalah 1100 lawan 21.000; lihat Adatreeht6undels, Vol. IV (1911), hal. 454.

[21] *Ibidem*; ketika itu sudah ada satu golongan yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai tanah, yang antara lain mencakup orang-orang menumpang, bujang, kuli, orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan sebagainya; lihat juga 77V1(1869), no. 2, hal. 496; Lihat di bawah, hal. 71-72.

[22] Ketika itu ada surplus padi; dibandingkan dengan Pulau Jawa secara keseluruhan, angka perbandingan antara jumlah kerbau dan areal tanah pertanian dan jumlah penduduk di Banten adalah lebih baik daripada angka perbandingan untuk seluruh Pulau Jawa; lihat Fokkens,

Eindresume Vol. I, part 2 (1902), hal. 36.

[23] Eindresumi Vol. II (1880), hal. 1-2; Kern dalam IG (1906), no. 1, hal. 698; van VoHenhoven, Vol. I (1931), hel. 693.

[24] Eindresume Vol. II (1880), hal. 4; van Vollenhoven, Vol. I (1931), hal. 736-73T.

[25] Eindresume Vol. II (1880), hal. 5; van VoBen6oven, Vol. I (1931) hal. 739-740.

[26] Etndresumi, Vol. II (1880), hal. 4; van Vollenhoven, Vol. I (1931), hal. 733, 740.

[27] Kern dalam IG (1906), no. 1, hal. 709-710; van Vollenhoven, Vol. 1 (1931), hal. 740.

[28] Laporan Yule sebagaimana dikutip oleh Kern, dalam IC (1906), no. 1, hat. 709-710; cf. Bestirs (1954), ha1.106-107.

[29] Ibidem.

[30] Suatu perbandingan dengan kondisi-kondisi di Mataram abad XVIII menyingkapkan banyak hal, tetutama yang mengenai proses menjadi kakunya sistem pemilikan tanah dan siatem tanah apanase; lihat Rouffaer, dalam Adatrechtbundels, Vol. XXXIV (1931), hal. 233-378; cf. Penasihat mengenai Urusan Pribumi pada Gubernur Jenderal, 24 Agustus 1921, no. 560; ia menyatakan bahwa dalam perkembangan agraris terdapat satu kecenderungan yang kuat ke arah kondisi-kondisi yang terdapat di dalam apa yang dinamakan nagara agung, yakni daerah Inti Mataram.

[31] Lihat Resume nun het Onderzoek near de Regten van dan Inlander op den Grand in de Residentie Bantam (untuk selanjutnya disingkat Resume), 1871, hal. 70-71. Lihat juga sebuah tindasan dari laporan itu, dalam Vb.12 April 1870, no. 28.

[32] Ibidem;lihat juga TNI (1872), no. 2, hal. 371;Eindresume, Vol. II (1880), hal. 3; van Vollanhoven, Vol. I (1931), hat. 742.

[33] Mengenai kategori-kategori tanah dan sawah, lihat lebih lanjut Resume (1871), hal. 72-73;juga dalam TNI (1872), no. 1, hal. 364-384.

[34] Di Cibeber tetdapat 4 agen yang mewakili majikan mereka masing-masing sebagai pemegang apanase; lihat Eindresume, Vol. II (1880), hal. 3; lihat juga Resume (1871), hal. 146; laporan Yule dalam Bestirs (1954), hal. 106-107.

[35] Resume' (1871), hal. 71; juga dalam TNI (1872), no. 1, hal. 371. Lihat juga laporan Yule, dalam Bastin (1954), ha1.106-107.

[36] Eindreavme, Vol. II (1880), hal. 3-4; lihat juga laporan Spaan, dalam Eindreaume Vol. II (1880), Appends A; van VoHenhoven, Vol. I (1931), hal. 699, 714, 719.

[37] Eindresume Vol. II (1880), Appendix A, hal. 14 - 15 ; van Vollenhoven, Vol. 1 (1931), hal. 719. Lihat lebih lanjut Bastin (1954), ha1.105 -112.

[38] Resume' (1871), hal. 74; juga dalam TNI (1872), no. 1, hal. 374-375

[39] Ibidem.

[40] Semua kasus yang dibahas terdapat dalam laporan yang bersangkutan, yang diterbitkan sebagai Resume (1871), khususnya hal. 146-155; juga dalam TNI (1872), no. 2, hal.101-109.

[41] Resume (1871), hal.147; juga dalam TNI (1872), no. 2, hal.101-102.

[42] Resume` (1871), hal. 149-150; juga dalam TNI (1872), no. 2, hal. 103-104.

[43] Bupati-bupati Serang, yakni kabupaten di bagian utara, adalah berturut-turut: Ratu bagus Dipaningrat, R.A. Adisantika, R.T. Pringantaka, R.A. Jaya Kusumaningrat, R.A. Raja Mandura Jayanegara, R.A.A. Condronegoro, R.A.P. Gondokusumo, R.T. Sutadiningrat, R.T. Jayawinata; lihat Regeerlngsalmanak, 1821-1900.

[44] Lihat Appendix, no. III.

[45] Tuntutan Ratu Aminah telah ditolak dengan alasan-a)asan sebagai berikut:

1. Sultan Alih dan putra-putranya hidup;
2. hak saudaranya yang laki-laki, Hasan-in, mendahului haknya sendiri berdasarkan hukum Islam;
3. tidak ada bukti bahwa orang-orang tersebut telah menyerahkan hak-hak mereka kepadanya. Lihat Resume (1871), hal. 153-154, atau TNI (1872), no. 2, ha1.109.

[46] Resume (1871), hal.151; juga dalam TNI (1872), no. 2, ha1.105.

[47] P.V. 16 Nov. 1869 dalam Exh. 6 Sept. 1870, Z t ; cf. Subroto (1925), hal. 26-27, 42.

[48] P.V.16 Nov. 1869 dalam Exh. 6 Sept. 1870, Z^{11}.

[49] Resume (1871), hal.113 atau TNI (1872), no. 2, hal. 469-471.

[50] Resume (1871), ha1.120-121 atau TNI (1872), no. 2, hal. 474; lihat juga van Vollenhoven, Vol. I (1931), hal. 742, 746.

[51] Resume'(1871), hal.122 atau TNI (1872), no. 2, hal. 475.

[52] Ibidem.

[53] Jasa-jasa itu dituntut dari para abdi yang tinggal di Saminten, Mundu, Bojong dan Parigi; pemikul-pemikul tandu diambil dari Kranggan, Serdat, dan Pacet. Untuk perbandingan dengan situasi di daerah-daerah kesultanan di Jawa Tengah, khususnya yang mengenai penduduk apa yang dinamakan tanah *pangrambe* dan pelbagai kerja bakti yang harus dilakukan oleh kaum tani, lihat Resume (1871), hal. 229; TNI (1872), no. 2, hal. 352; Rouffaer, dalam Adatrechtbundels, Vol. XXXIV (1931), hal. 233378. Mengenai kaum abdi, lihat van Vollenhoven, Vol. I (1931) hal. 98 706, 721, 732; cf. Eindresume Vol. 11 (1880), hal. 2; Eindresume, Vol. 111 (1896), hal. 2-3

[54] Bahwasanya kerja bakti itu tak ada sangkut-pautnya dengan pemilikan tanah dinyatakan dengan tegas dalam beberapa laporan, umpamanya, Fokkens, Eindresumd Vol. I (1901), hal. 18'; surat resmi rahasia dari Residen Banten tertanggal 27 Feb. 1889, no. 58, dalam Vb. 28 Jan. 1890; no. 8.

[55] Fokkens, Eindresume Vol. I (1901), hal. 17°, 18'; vanVollenhoven, Vol. I (1931), hal. 719. Peraturen-petaturan untuk daerah tanah-tanah kesultanan diberJakukan di daetah-daerah lainnya di Banten setelah aneksasi.

[56] Kebun kelapa yang dimaksudkan telah diinggung sebelumnya, lihat di atas, hal. 52 ., lihat juga P.V. No. 17,1869, dan P.V. 21 Nov. 1869, keduanya dalam Exh. 6 Sept. 1810, z^{11}

[57] P.V. 21 Nov. 1869. Pembukaan kebun itu melibatkan 44 desa dan 25 kepala desa.

[58] Multatuli, Volledige Werken, Vol. I (1950), hal. 233-257; 391-419.

[59] Multatuli, Volledige Werken, Vol. IX (1956), hal. 445, 462.

[60] Multatuli, , Volledige Werken, Vol. (1950), hal. 401-419, terutama sural resminya kepada Residen Banten, 24 Feb. 1856.

[61] Penghapusan kerja wajib itu memerlukan waktu lebih dari setengah abad, yakni 1855-1916; dalam tahun 1882 pancendiensten dihapuskan. Pajak kepala diberlakukan tahun 1882, akan tetapi baru dalam tahun 1914 ditetapkan besarnya secara seragam; mengenai sewa tanah, pemungutan secara perorangan diganti dengan pemungutan secara komunal dalam tahun 1885. Lihat Schoch (1891); ENI di bawah judul belastingen den herendiensten.

[62] Mengenai perubahan yang tidak merata, lihat Eistenstadt (1961), hal. 14-15.

[63] Ketetapan 3 September 1864, no. 1: peraturan dan pembatasan pelbagai kerja wajib; Ordanansi 26 September 1867: pembatasan jumlah had kerja untuk poncendiensten; Ketetapan 14 Juni 1872, no. 66: pembatasan jarak pekerjaan yang harus dilakukan; Ordanansi

1 Juli1882: penurunan jumlah hari kerja dari 52 menjadi 42 tiap tahun dan penghapusan pancendiensten.

[64] ENI, I (1917), hal. 76-82.

[65] Mengenai seluruh perkembangan sekitar penghapusan kerja wajib secara berangsut-angsur, lihat Schoch (1891), juga ENI, khususnya artikel mengenai herendiensten.

[66] Resume (1871), ha1.181-226; juga TNI (1872), no. 2, ha1.272-301; mengenai penanaman kopi, lihat Nederburgh (1888), ha1.13.

[67] Sering kali sulit dibedakan antara kerja wajib dan kerja sukarela yang dilakukan untuk membantu sesama penduduk desa atau pejabat-pejabat, umpamanya jika ada pesta. Sesuai dengan adat, pelbagai sumbangan diserahkan secara sukarela dapat kesempatan-kesempatan khusus. Lihat Hadiningrat, yang dikutip dalam Eindresume, Vol.III (1896), hal. 294-295.

[68] Menurut etos rakyat biasa, mereka harus merasa senang tergantung kepada elite di atas mereka dan tunduk kepada penguasa. Sebaliknya kaum priyayi metganggap hak-hak istimewa dan kedudukan mereka berdasarkan keturunan sebagai sudah sewajarnya. Lihat Hagen (1962). Dalam hubungan ini, apa yang dinamakan 'knevelarijen" di Banten pada umumnya dan di Lebak pada khususnya harus ditelaah kembali secara seksama. Lihat Multatuli, *Volledige Werken*, Vol. IX (1956), hal. 549. Lihat juga pandangan Nieuwenhuys yang memberikan tekanan yang lebih besar kepada etos aristokrasi pribomi, dalam bukunya "Tussen twee werelden", (1959), hal. 159-197.

[69] Dalam usaha untuk menutup pengeluatan-pengeluaran mereka yang berlebih-lebihan, pajabat-pejabat biasanya menyalahgunakan kekuasaan administratif mereka dan memeras jasa-jasa dan sumbangan-sumbangan luar biasa dari rakyat; lihat Multatuli, Volledige Werken, Vol. IX (1956), hal. 420 ff; lihat juga WNI (1888-1889), hal.10-11.

[70] Fokkens, Eindrentme Vol. I (1901), hal. 23-27.

[71] Menurut Residen Banten, di dalam jawaban kepada Sekretaris Pemerintah, kerja-kerja wajib itu didasarkan atas tanah. Lihat Bergsma, Eindresume, Vol. III (1896), Appendix K^{11}- hal. 148; cf. Fokkens; Eindresume; Vol. I (1901), hal. 20.

[72] Nederburgh (1888), hal. 16-17; cf. Fokkens, E'indresume; Vol. 1, part 2 (1901), hal. 16-17; jumlah-jumlah sebagaimana yang dicantumkan dalam daftar-daftar menurut usul-usul komite tahun 1888: 1.357.733 hari kerja; dalam daftar tahun 1885-1890; 1.644.474.

[73] Menurut Ordonansi 15 Februari 1866. Ini telah diubah dengan Ketetapan 17 Mei 1882, no. 2, yang menetapkan jumlah hari kerja dengan maksimum 42 hari.

[74] Fokkena, Eindresume; Vol. 1, part 2 (1902), hal. 23.

[75] Ordanansi 26 September 1867, menetapkan jatah-jatah sebagai berikut: untuk bupati 40 orang, patih 15, kepala distrik 12, kliwon 8, asisten kepala distrik 6. Lihat Hergsma, Eindremmd,' Vol. III (1896), hal. 294-100

[76] Multatuli, Volledige Werken, Vol. IX (1956), hal. 417-422, 551.

[77] Untuk suatu analisa mengenai 'dual bureaucracy'; 1Brat HoxBta, dalam La Palom6ara (1963), ha1.182-183.

[78] Kebijaksanaan yang duatistis itu telah menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan, seperti tenaga kerja yang murah dan hak-hak yang terjamin. Seperti dikatakan oleh Fumivall: "free enterprise eventually became from a sosial and economic ideal to be almost a byword for capitalist exploitation". Lihat Furnivall (1948), hal. 225. Mengenai penetrasi usaha kapitalis ini, studi Burger terlalu memusatkan perhatiannya kepada pembebasan tanah dan tenaga kerja dari ikatan-ikatan tradisional, dan mengabaikan tekanan-tekanan yang masih dilakukan

terhadap penduduk dan dilakukan oleh sistem yang baru; lihat Burger (1939).

[79] Mengenai daftar kategori orang-orang yang dibebaskan dari kerja bakti, lihat Fokkens, Eindresumf, Vol. I (1901), 6a1. 20-22; juga Resume (1871) hal. 249-250, atau TNI (1872), no. 2, hal. 366-367.

[80] Resume (1871), hal. 250; juga dalam TNI (1872), no. 2, hal. 367.

[81] Ibidem.

[82] Kebanyakan data statistik baik dalam daftar-daftar resmi maupun dalam laporan-laporan tahunan hanya merupakan perkiraan-perkiraan kasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lihat Fokkens, Eindresume Vol. I (1901), hal. 15-16. Satu contoh mengenai pembagian kerja dalam sebuah desa: dari 150 orang laki-laki, 110 orang harus bekerja di jalan raya; 41 orang pada irigasi; separo dari laki-laki yang terkena wajib kerja bakti harus melakukan jaga di pos-pos jaga di jalan raya, yang separo lainnya harus melakukan ronda di desa. Satu contoh lainnya: dari 70 arang laki-laki, 50 orang harus bekerja bakti untuk kepala distrik, sisanya harus bekerja di jalan raya. Lihat Bergsma, Eindresume, Vol. III (1896), Appendix L, hal. 157. Mengenai pengaduan-pengaduan dari pihak jaro, lihat Eindresume Vol. II (1880), hal. 18. Di Banten Selatan, penduduknya biasanya lebih menurut.

[83] Lihat Benda dan McVey (1960), hal. 20.

[84] Bandingkan ini dengan dikotomi sosial di Jawa Tengah, yakrti priyayi dan wong cilik, lihat Koentjaraningrat, dalam Murdock, ed. (1960), hal. 89-93. Ia menganggap kaum bangsawan sebagai satu golongan yang terdiri dalam struktur sosial di kesultanan-kesultanan. Trikotomi Geertz, yakni *priyayi-santri-abangan* tidak sesoai dengan klasifikasi yang berlaku dalam masyarakat Jawa sendiri, yang mengikuti dikotomi yang disebutkan di atas, sedangkan klasifikasi berdasarkan agama adalah: *santri -abangan* atau *putihan-abangan*. Mengenei Banten, hampir semua priyayi termasuk golongan santri. Lihat Geertz (1960). Dalam karya-karya lain tidak diadakan pembedaan antara *priyayi* dan *ndara*, tihat Palmier (1960), *passim*; Van Niel (1960), *passim*. Istilah *bangsawan* (*nobility*) sangat membingungkan, oleh karena banyak priyayi bukan keturunan bangsawan.

[85] Lihat van den Berg (1902), hal. 18. Gelar raden berasal dari Jawa dan orang-orang bangsawan Banten yang pergi ke Jawa Tengah mengganti gelar-galar *tubagus* mereka dengan *raden*.

[86] Mengenai elite birokrasi di Banten di zaman kesultanan, lihat BKI' (1856), ha1.155-164.

[87] Pejabat-pejabat agama, seperti kadi, semua personil mesjid, dan mereka yang bertugas merawat tempat-tempat suci, diperbantukan kepada birokrasi kesultanan dan setelah aneksasi kesultanan mereka dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Fakih Najamudin yang menduduki jabatan ketua pengadilan di Banten.

[88] Van den Berg (1902), hal. 18-19;Resume (1871), hal. 2-3 atau TNI (1872)no.l,hal .243-244.

[89] Mengenai fungsi syahbandar di pelbagai daerah di Nusantara, lihat Purnadi Purbatjaraka, dalam JSAH, Vol. II, no.2 (1961), hal. I-9.

[90] Bandingkan ini dengan personil birokrasi di negara-negara tradisional lainnya, seperti Malaka, Mataram, atau Majapahit. Keempat syahbandar di Malaka diserahi urusan administrasi dan pengawasaa atas pedagang-pedagang asing. Kepala pengadilan agama di Malaka adalah kadi, di Mataram panghulu dan di Hanten Fakih Najamudin. Lihat van dan Berg, BKI, Vol. LIII (1901) hal. 1-80. Mengenai birokrasi di Majapahit, lihat Pigeaud, Vol. III, IV (1960); mengenai Malaka, lihat Cortesao, Vol. 11 (1940), hal. 229-289.

[91] Mengenai deskripsi tentang situasi di Banten dan birokrasinya dalam abad ke.16 dan abad

ke-17, lihat van Lour (1955), hal. 3-4,137-141; mengenai abad ke-18, BKI (185b), hal. 314-362.

[92] Istilah "tidak langsung" (' Indirect') tidak tepat benar; pada kenyataannya ia dianggap sebagai salah satu ungkapan yang paling membingungkan dalam kamus kolonial. Mengenai Banten, abad ke-19 menyaksikan suatu pergeseran secara berangsur-angsur dari sistemm pemerintahan "tidak langsung" ke sistem pemerintahan "langsung" ("direct'). Seiring dengan proses itu berlangsung perkembangan birokrasi kolonial yang-selama perjalanan abad itu-menurunkao kedudukan pengusaha-pengusaha di Banten sampai mereka merupakan alat rezim semata-mata. Lihat ketiga konsepsi alternatif dari Lugard (1922),ha1.194.

[93] Contoh.contohnya adalah: R.T. Karta Natanegara dari Bogor; lihat MI Vol. VII, no. 3 (1845), hal. 484; Suria Nataningrat, lihat van Sandick (1892), hal. 18; Lihat selanjutnya Bab III.

[94] TNI (1850), no. 2, hal. 211; A Djajadiningrat (1936), hal. 4, 92-95; lihat selanjutnya Bab III.

[95] Lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 25, 28-32, 33-36, 58-60. kami tidak mengabggap kepercayaan mistik aebagai esensial bagi kebudayaan priyayi sebagaimana dianggap oleh Geertz; lihat Geertz (1960). Hal, itu pasti tidak berlaku bagi priyayi di Banten. Perlu dikemukakan, bahwa sekularisasi di kalangan priyayi Banten tidak mencapai tingkat setinggi yang terdapat di kalangan priyayi di Jawa Tengah.

[96] Fokkens, Eindresume', Vol. I (1901), hal. 20.

[97] Lihat di atas, catatan no. 95; banyak unsur non-muslim dapat ditemukan dalam kebudayaan kota priyayi Banten. Lihat juga A. Djajadiningrat (1936), hal. 70-73, mengeaai pelajaran-pelajaran tentang cara hidup Jawa. Perbedaan yang nyata dalam cara hidup itu diungkapkan dalam pribahasa 'Nagara mawa tata, desa mawa cara", artinya, kota mempunyai tata tertibnya dan desa mempunyai adat-kebiasaannya. Makna yang tersirat dalam peribahasa itu menunjuk kepada perasaan lebih unggul di kalangan elite kota.

[98] Lihat Resume (1871),ha1.40.

[99] TNI (1859), no. 2, hal. 166. Rumah-rumah yang letaknya berpencaran itu dibangun dengan pelbagai pertimbangan, seperti untuk menghindari wajib kerja bakti yang melekat pada pemilikan tanah, dan untuk melindungi hak mereka atas tanah, yang sebagian besar telah dimiliki secara tidak sah. Situasi itu tidak membantu usaha memelihara ketertiban dan memperbesar kekuasaan pengurus desa.

[100] Ibidem; lihat juga Resume (1871). Mengenai ketidakefektifan administrasi desa, lihat Adatrechtbundels, Vol. IV (1911), hal. 87, juga dalam Onderzoek Mindere Welvaart, Economie der desas, Vol. IX (1911), hal 87-88.

[101] Surat resmi dari Residen Banten, 27 Februari 1889, no. 58, dalam Vb. 23 Jan. 1890, no. 22; mengenai satu laporan sebelumnya tentang prestise administrasi desa, lihat Statistiek van Java en Madoera, khusuanya Keresidenan Banten, yang ditulis dalam tahun 1836, dalam dokumen no. 3044 dari Algemeen Rijkaarchief, yang merupakan bagian dari Kementerian Urusan Jajahan.

[102] Resume (1871), hal. 6.

[103] Resume (1871), hat. 7.

[104] Resume (1871), hal.5. Selama periode penyelidikan (1870), sebanyak 22 lurah telah diselidiki di daerah itu yang meliputi 56 desa.

[105] Resume (1871), hal. 5-12; cf. Fokkens, Eindresume Vol. B (1901), hal. 9-13; juga Bergsma, Eindresmue Vol. III (1896), Mal. 221.

[106] Lihat A. Djajadiningrat (1936), hal.123-124; 136-139; 159-169.

[107] Dari 1522 jaro, 707 orang bisa membaca dan 447 orang bisa menulis huruf Latin; mengenai huruf Arab, jumlahnya berturut-tarut 966 dan 714 orang; lihat Holle dalam TBB, Vol.

VI (1891-1892), hal. 275-289. Lihat juga data-data tahun Ondenoek Mindere Welvcart, Econanie v.d. Dessa. Vol. IX (1911), hal. 47; di distrik: Cilegon 96%; di Kramat Watu 35% dari para jaro bisa mambaca dan menulis huruf Melayu (yakni huruf Arab).

[108] Dengan penyewa di sini dimaksudkan orang yang menguasai tanah, dalam hal ini sawah yang tergolong sawah negara. Kepentingannya terhadap sawah itu berakhir apabila ia membiarkannya tidak digarap dan apabila tanggul-tanggulnya — yang menandakan bahwa status tanah itu tidak mengizinkan pemilikan—telah hilang.

[109] Di Banten terdapat 1256 desa tanpa tanah apanase. Lihat surat resmi dari Diraktur Departemen Dalam Negeri 8 April 1889, no. 1957, dalam Vb. 28 Jan. 1889, no. 8. Usul dari Residen Banten agar para jaro dibebaskan dari kewajiban membayar sewa tanah telah ditolak.

[110] Mengenai kaum jawara, Misr Loze, dalam K^7; Vol. XXIII (1934), hal. 171-173; Lihat juga Meyer, dahun 'Japan wint de oorlog" (1946), hal. 22-24, atau artikelnya dalam Indanesia, Vol. III (1949-1950), hal. 178-189.

[111] Mengenai pelbagai ketentuan kontrak kerja upahan, lihat Resume (1871), hal.125-139.

[112] Resume (1871), hal. 247.

[113] Resume (1871), ha1.134-136.

[114] Resume (1871), hal.125-139.

[115] Lihat Onderzoek Mindere Welvaart, Economie v.d Dessa, Vol. III, part 1 (1911-1912), hal. 26-29. Pelbagai kategori haji yang ada telah dilukiskan secata terperinci, akan tetapi jumlah-jumlahnya yang pasti tidak diberikan. Lihat juga Adatrechtbundelr, Vol. IV (1911) hal. 36-45.

[116] Golongan-golongan menurut lapangan kerja yang disebutkan dalam catatan no. 17 tidak saling mengecualikan. Haji-haji dijumpai di dalam golongan-golongan pekerjaan lain, seperti golongan pedagang, dan golongan guru agama. CC KoloniaaJ Verslag (1889-1889), Appendix A, hal. 12-13. Ada disebut-sebut tentang haji-haji yang memiliki bidang-bidang tanah yang luas, tetutama di Serang dan Cilegon, akan tetapi data-data yang persis tidak ada. Lihat Ondenoek Mindere Wdvaart, Economie v.d. Dessa, Vol. III, part 1(1911-1912), ha1.10-11.

[117] Menurut catatan-catatan pengadilan yang banyak sekali jumlahnya, kebanyakan haji diidentifikasikan atau mengidentiflkasikan diri mereka sebagai *landbouwer*, artinya petani. Lihat Appendix IX.

[118] Lihat Appendix V.

[119] Mengenai fungsi kiyai sebagai perantara kebudayaan, lihat Geertz, dalam CSSN, Vol. II (1960), hal. 228-249.

[120] Redfield (1936). Oleh karena pengaruh Islam sangat kuat, maka tidak banyak tersisa dari Tradisi Kecil di Banten. Dalam konteks ini, studi-studi mengenai orang-orang Baduy akan menyingkapkan banyak hal yang hingga kini belum jelas, lihat Geise (1949). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, lapisan Jawa tradisional-Yang merupakan satu Tradisi Besar lainnya sangat nyata di Banten Utata. Lihat catatan no. 95.

[121] Adatrechtbundels, Vol. IV (1911), hal. 35-45.

[122] Untuk mendefinisikan tingkat sosial, dapat digunakan pelbagai kriterita: usia, kekayaan, keterampilan, pekerjaan, cara hidup, dan sebagainya. Jelaslah bahwa dalam periode yang sedang ditelaah, tidak terdapat ukuran yang menyeluruh di Banten; ketimpangan-ketimpangan dapat ditunjukkan antara ukuran yang digunakan di kalangan priyayi dan yang dihargai oleh orang-orang dari kalangan agama.

[123] Ordanansi 17 Mei 1882, dalam Staatsblad no. 137.

[124] Surat resmi dari Residen Spawn, 7 April 1882, no. 2143, dalam Vb. 7 Feb. 1889, no.4.

[125] Ibidem.

[126] Holle kepada Gubernur Jenderal, 23 Sept. 1888, dalam Vb. 7 Feb. 1889 no. 4.

[127] Surat resmi dari Reaiden Banten, 25 Okt.1888, no. 106, dalam Vb. 7 Feb. 1889, no.4.

[128] Direktur Departemen Dalam Negeri kepada Gubernur lenderal, 15 Maret 1889, no. 1414, dalam Vb. 23 Jan. 1889, no. 22.

[129] Ibidem. Lihat juga berita-berita secara konperensi pegawai-pegawai negeri di Serang pada tanggal 28 Agustus 1885, dalam Vb. 23 Jan. 1889, no. 22.

[130] Asisten Residen Anyer kepada Residen Banten, 17 Mei 1887, no. 527, dalam Vb. 7 Feb. 1889, no. 4, sebagai Appendix L. Lihat juga Appendix I.

[131] Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Lapor an DDl), 18 Sept. 1888, no. 5162 (dalam Vb. 7 Feb. 1889, no. 4), hal. 166.

[132] Laporan DDI, hal.171.

[133] Laporan DDI, hal.168.

[134] Orang-orang yang menyampaikan petisi itu berasal dari Nyamuk, Beji, dan Bojonegoro; daerah asal pemimpin-pemimpin pemberontakan yang paling terkemuka, yakni H. Wasid; dan H. Mahmud. Sejumlah besar pemberontakan juga berasal dari daerah ini. Cf. A Djajadiningrat (1936, ha1.120j, yang menyebutkan Bojonegroro sebagai tempat yang sangat terkenal dengan pencuri-pencurinya, penyelundup-penyelundupnya dan pelacur-pelacurnya. Lihat juga Appendix I.

[135] Laporan DDI, hal.186-187.

[136] Sampai bulan Juli 1880, sebanyak 46.299 kerbau dibunuh. Lihat van Kesteren, dalam IG (1891), no. 1, hal. 682. Lihat selanjutnya: IG (1882), no. 1, hal. 559 ff; TNI (1882), no. 2, hal. 253.

[137] Dalam jangka waktu empat bulan, yakni dari Januari sampai April 1880, jumlah yang meninggal adalah 12.162; lihat IG (1881), no. 1, hal. 690. Hanya 6107 bau sawah telah ditanami dibandingkan dengan 28.825 bau dalam tahun-tahun sebelumnya; lihat van Kesteren, dalam IG (1881), no. 1, hal. 683.

[138] Mengenai letusan Gunung Krakatau, kami mengacu kepada deskripsi yang diberikan oleh van Sandick (tanpa tanggal) dalam bukunya '"In het rijk van Vulkaan': Lihat juga laporan Residen Banten, dalam Javasche Courant 5 Oktober 1883, di mana ia mengemukakan bahwa dalam tempo dua bulan sebagian besar dari daerah itu telah pulih kembali dari kerusakan-kerusakan.

[139] Mengenai akibat-akibat bencana itu di bidang ekonomi, lihat Nederburgh (1888) dalam bukunya Tjilegon-Bantam-Java. Data-data dan angka-angkanya didasarkan atas Koloniale Verslagen dari 1872-1887. Berdasarkan angka-angka itu dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat-akibat letusan Gunung Krakatau di bidang ekonomi tidaklah lebih besar dibandingkan dengan akibat bencana-bencana sebelumnya. Kerusakan yang besar pada umumnya terbatas di daetah pantai Caringin dan Anyer, sedangkan wabah penyakit ternak dan wabah demam melanda daerah yang luas.

Bab III

PERKEMBANGAN POLITIK

BAGIAN KONSEP

Transformasi politik, sebagaimana yang terjadi di Banten dalam abad XIX, merupakan tema pokok bab ini. kita akan mencoba melukiskan proses perubahan, dari struktur-struktur politik tradisional menjadi struktur-struktur politik yang modern, yang mencontoh struktur-stutktur politik di dunia Barat. Proses transfomiasi di dalam konteks ini melibatkan suatu pergeseran pola-pola institusional, dari pola-pola kekuasaan yang tradisional ke arah penerimaan dan pelembagaan seperangkat norma dan sasaran-sasaran politik yang terutama diilhami oleh Barat. Di dalam studi ini akan dicoba menyingkapkan perbedaan yang esensial antara struktur-struktur kelembagaan politik yang tradisional dan yang modern berdasarkan pelbagai contoh historis. Perhatian yang khusus diberikan kepada konflik-konflik antar golongan yang inheren dalam perubahan institusional itu. Partisipasi, aspirasi dan tujuan politik dari pelbagai golongan sosial tidak boleh tidak menentukan batas-batas penting proses modernisasi itu. Sampai sejauh mana lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda itu mendorong perkembangan lembaga-lembaga politik modern, dan sampai sejauh mana lapisan-lapisan itu merintangi perkembangan tersebut, akan diselidiki. Tekanannya harus digeser dari studi-studi sejarah politik pada skala yang besar kepada studi-studi institusional yang lebih terperinci, yang akan memungkinkan kita untuk memahami secara lebih jelas bagaimana rakyat menyesuaikan diri mereka, ide-ide mereka, dan tindakan-tindakan mereka kepada situasi baru yang mereka hadapi. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa proses politik terutama dilihat sebagai satu proses golongan dan bahwa situasi politik dilukiskan sebagai terdiri dari interaksi di antara pelbagai unsur sosial.[1] Analisa ini menyangkut kaum aristokrat lama, pamongpraja kolonial, pemuka-pemuka agama dan kaum tani Banten; dan bukan peraturan-peraturan dan ordanansi-ordanansi pemerintah. Norma-norma dan tujuan-tujuan politik dibahas sebagai nilai-nilai representatif golongan-golongan sosial yang terlibat di dalam percaturan politik. Selain itu, di dalam rangka masyarakat Banten, lembaga-lembaga politik tidak semata-mata mengacu kepada "negara" atau "pemeeintah", melainkan cenderung untuk diasosiasikan dengan satuan-satuan sosial lainnya, seperti keluarga, golongan keturunan dan komunitas keagamaan.

Pengandaian-pengandain teoretia umum yang mendasari studi ini berkaitan dengan dua komponen utama. Pertama, penggunaan began konsep Weber mengenai pelembagaan kekuasaan, yang kiranya cocok bagi suatu analisa perbandingan mengenai lembaga-lembaga sosial yang tradisional dan yang modern di Banten. Proses diferensiasi struktural dalam sistem sosial yang terjadi dalam perjalanan waktu, telah melahirkan tape-tipe kekuasaan yang dapat dibedakan satu sama lain.[2] Kedua, tipologi orientasi-nilai sosial seperti yang dikonstruksikan oleh Parsons berguna untuk menyoroti lebih tajam diferensiasi dan variabilitas struktural sistem-sistem sosial yang tradisional dan yang modern. Variabel-variabel pola yang "diffuse" (menebar, tanpa batas-batas yang jelas) lawan yang "spesifik" (jelas batas-batasnya) dalam pengungkapan kekuasaan (otoritas), status yang berdasarkan "ascription" (askripsi) atau "achievement" (prestasi), dan norma-norma universalistik lawan norna-norma partikularistik, dapat ditunjukkan dalam pelbagai kasus transfer politik.[3]

Studi ini menggunakan sebagai titik-tolaknya deskripsi mengenai sistem tradisional di Banten, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. la merupakan masyarakat tradisional yang menjadi kacau akibat pengaruh Barat namun sementera itu pola-pola tradisionallah yang masih tetap dominan dalam kehidupan banyak golongan sosial di Banten

abad XIX. Hasil proses modernisasi itu juga sangat ditentukan oleh sifat warisan tradisional masyarakat tersebut. Perubahan-perubahan yang dipaksakan dari luar dibatasi oleh sikap-sikap dan penggolongan-penggolongan tradisional. Pengaruh yang dominan terhadap masyarakat Banten abad XIX adalah tradisi kesetiaan-kesetiaan dan nilai-nilai lama, yang memperlihatkan daya tahan yang luar biasa. Munculnya golongan-golongan politik baru di Banten sering kali berarti bahwa golongan-golongan itu dan bentuk-bentuk kekuasaan yang diasosiasikan dengan mereka mempunyai banyak karakteristik dari masyarakat tradisional. Perlu ditambahkan, bahwa perkembangan politik yang terjadi selama periode yang sedang ditelaah menunjukkan dengan jelas sekali bahwa telah timbul kesetiaan-kesetiaan dan pengelompokan-pengelompokan baru, sementara persekutuan-persekutuan lama dibubarkan. Di bawah kondisi-kondisi konflik, golongan berkuasa yang tradisional berusaha mempertahankan kekuasaan dan privilese mereka, sementara golongan-golongan baru, dengan dukungan penguasa kolonial, menentang rnereka. Naiknya kedudukan golongan yang disebut belakangan itu melahirkan persekutuan di antara mereka yang tidak memegang kekuasaan dan pengawasan, yakni kaum bangsawan dan pemuka-pemuka agama. Persaingan-persaingan dinyatakan dalam bentuk pengelompokan-pengelompokan politik, yang pada gilirannya dinyatakan dalam sikap mendukung atau merintangi penguasa-penguasa kolonial. Dalam hubungan ini, kita juga harus memperhatikan faksionalisme atau konflik di dalam golongan, di mana tiap golongan memperlihatkan perpecahan di dalam barisannya sendiri, apakah secara perorangan atau secara kelompok-kelompok.

Seperti telah dikemukakan di atas, sistem yang berorientasi kepada tradisi itu akan digunakan sebagai dasar deskripsi dan analisa kita. Hal ini memang logis, oleh karena modifikasi struktural yang disebabkan oleh organisasi politik Barat tidak berlangsung di dalam suatu vakum politik. Ia mengubah sistem politik yang tradisional menjadi sistem politik yang modern.

STRUKTUR POLITIK TRADISIONAL DAN KERUNTUHANNYA

Di dalam struktur negara tradisional, kekuasaan sultanlah yang mempunyai prerogatif, baik dalarn urusan politik maupun dalam urusan agama. Langsung di bawah sultan adalah para pangeran anggota keluarga sultan dan anggota-anggota kaum bangsawan lainnya. Di antara mereka ada yang bertugas mengawasi pasukan pengawal keraton dan budak-budak, akan tetapi sebagai anggota-anggota golongan keturunan sultan mereka biasanya tidak dimasukkan ke dalarn organisasi administratif.[4] Seperti halnya di negara-negara tradisional lainnya di Pulau Jawa, kekuasaan administratif dilimpahkan kepada anggota-anggota lapisan atas birokrasi (*bureaucratic gentry*). Yang mengepalai birokrasi pusat adalah patih (wazir besar), sedangkan fungsi pengadilan-keagamaan dipegang oleh *Fakih Najamudin*. Patih dibantu oleh dua *kliwon* yang biasanya juga disebut *patih*. Di bawah pejabat-pejabat tingkat teratas itu adalah para *punggawa*, yang ditugasi administrasi dan pengawasan atas penanaman lada, produksinya dan perdagangannya. Menyusul para syahbandar yang ditugasi administrasi dan pengawasan atas perdagangan luar negeri di kota-kota pelabuhan.[5] Sejajar dengan pejabat-pejabat terkemuka di kota-kota pelabuhan itu adalah para kepala daerah, yakni *bumi* Lebak, *pangeran* Caringin, dan *bupati* Pontang dan Jasinga. Kemudian menyusul sederetan punggawa, *ngabeuy, kliwon* dan *paliwara*,[6] yang bertugas mengawasi gudang-gudang dan urusan rumah tangga keraton, atau sebagai pejabat-pejabat penghubung. Meskipun pegawai-pegawai administrasi tadinya terdiri dari orang-orang kalangan rakyat biasa, ikatan-ikatan kekerabatan sering kali digunakan untuk mempererat hubungan antara sultan sebagai patron dan rakyat biasa sebagai kliennya. Sesudah lewat beberapa generasi, mekanisme politik dengan ikatan-ikatan yang "built-in" itu melahirkan suatu elite baru. Perlu dikemukakan, bahwa secara resminya jabatan-jabatan birokrasi itu tidak turun-temurun, meskipun ikatan-ikatan kekerabatan dengan elite birokrasi merupakan satu keuntungan dan memudahkan orang yang bersangkutan memperoleh jabatan jabatan itu.[7]

Pada awal abad XIX para *punggawa* diangkat oleh sultan untuk mengepalai administrasi

bagian-bagian kesultanan. Pada tingkat hirarki birokrasi yang paling bawah, para *ngabeuy* dan *lurah* ditugaskan untuk mengawasi sejumlah rumah tangga. Tugas utama mereka adalah memungut pajak dan upeti serta memelihara ketertiban umum. Jabatan ngabeuy sering kali dipegang secara turun-temurun dan dianggap agak patriarkal. Dalam menyelenggarakan kekuasaan mereka, para ngabeuy masih membutuhkan dukungan kekuasaan yang lebih tinggi. [8]

Meskipun pemilikan tanah mempunyai arti penting, pengawasan atasnya tidak merupakan satu-satunya landasan material kekuasaan politik para penguasa di Banten. Transaksi-transaksi komersial selalu berada di bawah pengawasan dan dikenakan pajak oleh pejabat-pejabat sultan. Selain dari itu, hak monopoli atas hasil-hasil pokok - seperti lada - merupakan salah satu prerogatif negara di bidang ekonomi. Selain menerima anugerah tanah dari Sultan, kaum aristokrat dan anggota-anggota birokrasi sultan mendapat penghasilan yang berasal dari pajak, sewa dan bagian dari keuntungan usaha-usaha komersial. Menurut sumber-sumber kami, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan ekonomi yang diambil oleh Sultan meliputi antara lain bea impor dan ekspor yang dikenakan atas perdagangan lada, tembakau, gambir, kapas dan sebagainya, dan pajak yang dikenakan atas ternak, rumah dan perahu. Selain itu, sultan juga memperoleh penghasilan dari menyewakan hak mengutip pajak pasar, pabrik gula, tanah milik dan sebagainya.[9] Sementara perdagangan di Banten mengalami kemunduran dalarn abad XVIII, pertanian menjadi semakin penting dalarn perekonomian Banten, sehingga akibatnya imbalan jasa untuk pejabat-pejabat terutama terdiri dari hadiah-hadiah tanah.[10]

Mengenai perjuangan politik di negara tradisional, maka di samping para pangeran keturunan raja, saingan-saingan potensial raja adalah kaum elite birokrasi dan agama. Kita telah melihat bahwa elite birokrasi tidak mampu mengembangkan satu kekuatan yang otonom, oleh karena secara ekonornia dan politia mereka dikuasai oleh sultan. Seringnya terjadi perkawinan antara anggota-anggota golongan itu dan anggota-anggota keluarga sultan memperlemah posisi mereka sebagai golongan politik. Mengenai elite agama, sebagian dari mereka di zaman Kesultanan Banten dimasukkan ke dalarn kerangka administratif pada umumnya. Dari sudut pandangan penguasa, pemuka-pemuka agama yang mengambang dapat merupakan ancaman bagi dirinya pribadi, oleh karena mereka mempunyai pengaruh karismatia yang besar, dan mereka mampu menghasut gerakan-gerakan keagamaan yang hebat. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa di negara-negara Islam yang tradisional, orang dapat melihat antagonisme antara guru-guru agama yang otonom dan pejabat-pejabat agama.[11] Mengenai pangeran-pangeran keturunan sultan, kaum bangsawan ini dapat dianggap sebagai perebut-perebut kekuasaan yang potensial. Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Banten, telah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh pangeran-pangeran yang membangkang, yang oleh karena menganggap dirinya cakap untuk memerintah lalu melawan kekuasaan sultan yang baru.[12] Perlu dicatat bahwa pemberontakan-pemberontakan yang tradisional sering kali menghasilkan perubahan-perubahan personil akan tetapi tidak mengubah sistemnya. Dengan diberlakukannya administrasi Barat, sistem itu mulai mengalami perubahan yang berangsur-angsur tapi mendasar. Kita harus menelaah kegiatan-kegiatan dan peranan-peranan politik golongan-golongan penting di kalangan elite politik. Proses modenusasi telah menyebabkan terjadinya penyesuaian kembali hirarki status secara besar-besaran yang kemudian melahirkan pola-pola kesetiaan politik. Aspirasi-aspirasi normatif golongan-golongan status yang berbeda-beda itu tercermin dalam cara-cara reaksi yang berbeda-beda terhadap modernisasi.

Ketika Belanda mengambil alih kesultanan, mereka menjumpai sebuah masyarakat yang sudah mempunyai sejarah pemerintahan birokratia yang panjang. Setelah muncul sebagai sebuah kerajaan pelabuhan, kesultanan itu dalam perjalanan eksistensinya telah mengembangkan birokrasi profesionalnya sendiri. Akan tetapi birokrasi itu tidak sampai berkembang mencapai tingkat setinggi yang dicapai di negara-negara birokrasi tradisional lainnya, seperti Mataram.[13] Celakanya, dalam dasawarsa sebelum aneksasi kesultanan oleh Belanda, Banten yang pernah merupakan sebuah negara yang sangat kuat dan makmur dengan kota pelabuhan yang paling besar di Indonesia, mengalami kemunduran yang cepat. Masa pemerintahan sultan-sultan terakhir penuh dengan perselisihan-perselisihan dan intrik-intrik sehingga anarki dan bencana-bencana merajalela. Meskipun daerah-daerah di sekitar

keraton sultan relatif tentram, daerah-daerah yang letaknya lebih jauh diteror oleh penyamun-penyamun, perampok-perampok dan orang-orang buangan.[14] Oleh karena dirongrong oleh perpecahan di dalam negeri, kesultanan dan penguasanya tidak dapat melawan tekanan-tekanan dan pungutan-pungutan yang dikenakan oleh pihak Belanda.

Setelah aneksasi Kesultanan Banten oleh Daendels dalam tahun 1808, sultan dan alat-alat politiknya dipertahankan akan tetapi ditempatkan di bawah pengawasan ketat pemerintah Belanda. Banten dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya dan luas wilayahnya sangat diperkecil.[15] Sultan Abu'n Natsr Mohamad Ishak Zainu'l Mustakin dibuang ke Amboina dan digantikan oleh Sultan Abu'l-Mafakhir Mohamad Aliudin.[16] la diperbolehkan memakai gelar sultan, akan tetapi pada kenyataannya ia hanya merupakan semacam boneka raja,[17] oleh karena Banten sekarang sudah dimasukkan ke dalam wilayah Belanda. "Kekuasaannya" ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat Banten, oleh karena ia menjadi permainan klik-klik para pemuka agama dan para wanita keraton yang secara diam-diam mendukung satu komplotan orang-orang yang tidak puas. Satu hal yang menarik perhatian adalah bahwa pembaruan-pembaruan yang diadakan dalam tahun 1808 telah memberikan pukulan yang hebat kepada aristokrasi Banten yang menikmati kedudukan yang istimewa.[18] Mereka takut akan kehilangan penghasilan mereka dari tanah atau jabatan mereka, yang memberikan kekuasaan, prestise dan kehormatan kepada mereka. Selain itu, sebagai orang-orang Islam yang fanatik. mereka dengan sendirinya membenci kekuasaan orang-orang kafir. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah di satu pihak untuk mendiskreditkan pemerintah Belanda di mata rakyat dan di lain pihak untuk membuat Belanda merasa segan memerintah Banten. Kedua tujuan itu kiranya akan bisa dicapai dengan jalan terus mengobarkan perpecahan dalam negeri dan mengekalkan keadaan anarki. Tujuan itu untuk sebagian dapat mereka capai, oleh karena pada tahun 1810 Belanda meninggalkan Banten Selatan dan menyerahkannya kepada sultan.[19] Akan tetapi keadaan politik itu tidak berlangsung lama, oleh karena dalam tahun 1813, - sesuai dengan persetujuan antara Raffles dan Bagus Mohamad, Banten Selatan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Inggris. Sebagai imbalannya, sultan diperbolehkan terus memakai gelarnya dan menerima gaji tahunan dari pemerintah.[20] Dalam tahun 1832, sultan yang terakhir dibuang ke Surabaya di mana ia hidup bersama-lama dengan dua orang pendahulunya.[21] Peranan pribadi mereka dalam percaturan politik di Banten telah dihapuskan, akan tetapi nanti akan ditunjukkan bahwa kesultanan masih terus mempunyai arti simbolia bagi orang Banten selama abad XIX. Selain itu, kaum bangsawan Banten sebagai komunitas keturunan para sultan tidak hanya terns mengIridupkan kenangan akan kesultanan di kalangan rakyat, melainkan juga melakukan kegiatan-kegiatan politik yang bertujuan menegakkan kembali kesultanan itu. Bukti-bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa kaum bangsawan sering kali terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan dan komplotan-komplotan untuk menggulingkan pemerintah koionial.

PERANAN POLITIK KAUM BANGSAWAN

Kiranya akan merupakan pemukulrataan yang berlebih-lebihan untuk berbicara mengenai kaum bangsawan Banten yang militan dan bersikap pemberontak. Pada kenyataannya, yang dapat dikatakan demikian hanya beberapa orang saja yang sangat berpengaruh dan penuh semangat: mereka dengan lihay memanfaatkan status tinggi dan prestise mereka untuk memegang pimpinan, kemudian mereka berhasil mempengaruhi kelas berkuasa yang baru dengan jalan menjalin satu jaringan kepentingan dan kesetiaan yang banyak liku-likunya di kalangan mereka. Berbeda sekali dengan kategori orang-orang bangsawan ini, banyak orang keturunan sultan hidup dalam keadaan miskin dan tergantung kepada tunjangan-tunjangan dari pemerintah Belanda. Sudah merupakan rahasia umum bahwa saudara-saudara dan putra-putra sultan yang dibuang hidup sebagai *bons vivants* di Surabaya dan terbenam dalam hutang karena keborosan mereka.[22] Sebagai orang-orang yang hidup dalam pembuangan, mereka tidak mempunyai kekuasaan dan tidak berakar dalam masyarakat, dan oleh karena itu mereka tidak dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang bermusuhan terbadap pemerintah kolonial.

Dilihat dari segi ini, kasus Sabidin, orang yang mengaku berhak atas takhta kesultanan, akan menarik sebagai satu contoh gerakan yang bertujuan menegakkan kembali kesultanan.

Mengenai kaum bangsawan di Banten, posisi mereka berlainan sekali. Di zaman kesultanan, jumlah bangsawan terus-menerus bertambah. Keluarga-keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan sultan terdapat di seluruh negeri, oleh karena poligami merupakan hal yang sangat lazim di kalangan anggota-anggota keluarga sultan. Lembaga perkawinan ini tak boleh tidak menyebabkan degradasi sosial yang luas. Kaum bangsawan Banten mencakup tingkatan-tingkatan mulai dari pangeran keturunan sultan sampai kepada orang terhormat biasa di pedesaan, yang cara hidupnya hampir-hampir tak dapat dibedakan dari cara hidup petani.[23] Setelah kesultanan dihapuskan sekalipun, kaum bangsawan merupakan komponen yang paling menarik dari aristokrasi, tidak saja karena jumlahnya, melainkan juga dalam hal prestise dan kesempatan. Akan tetapi harus diakui, bahwa kejadian tersebut di atas telah menyebabkan mereka kehilangan kepala keturunan aristokrasi yang sangat berpengaruh, yang secara bersinambung dapat memberikan anggota-anggota baru kepada kaum bangsawan. Oleh karena itu adalah sangat logia jika mereka berusaha mengatasi kemunduran itu dengan segala upaya yang ada pada mereka: memperluas pemilikan tanah, mengikat tali perkawinan dengan kelas berkuasa yang baru, memperbesar prestise mereka di bidang agama, atau malahan bekerja untuk pemerintah kolonial. Dalam kenyataannya, kaum bangsawan dalam banyak hal masih terus mempunyai banyak kelebihan sebagai titik-tolak, oleh karena status kebangsawanan tidak saja masih dianggap sebagai milik istimewa, melainkan juga sebagai tanda kemuliaan. Pada umumnya disadari, bahwa dengan masuknya birokrasi kolonial dan gejala yang menyertainya, yakni munculnya satu elite baru yang berkuasa, kaum bangsawan menjadi terpojok. Sepanjang abad XIX, mereka telah berhasil mempertahankan privilese, prestise dan kekuasaan mereka, dalam arti bahwa dalam percaturan politik di Banten, pemerintah kolonial terus memperhitungkan mereka. Untuk tujuan cita, cita harus memberikan perhatian yang besar kepada peranan yang mereka mainkan dalam usaha mempertahankan pengaruh mereka, dan kepada posisi mereka dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan di dalam rangka pertarungan politik yang banyak seginya. Untuk dapat memahami proses yang kompleks ini, kita akan menelaah beberapa kasus historia nanti.

Sejak permulaannya, kaum bangsawan mempunyai kedudukan yang jauh lebih menguritungkan dalam arena politik di Banten sesudah aneksasi, oleh karena administrasi kolonial yang baru tidak bisa berjalan tanpa dukungan kaum bangsawan Banten yang sangat berpengaruh itu. Ketika itu dirasakan sebagai tindakan yang paling tepat untuk mengangkat anggota-anggota bangsawan atau orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan mereka sebagai pejabat-pejabat tinggi selama tahap-tahap pertama pemerintahan Belanda, guna memudahkan pelaksanaan kebijaksanaan kolonial di daerah yang rusuh itu. Ketika itu rakyat Banten masih dianggap mempunyai loyalitas politik terhadap kaum bangsawan mereka. Sesunguhnya, di mata orang-orang Banten, kaum bangsawan Banten mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada pamongpraja- pada mulanya, pejabat-pejabat pamongpraja yang berasal dari rakyat biasa tidak dipandang tinggi oleh penduduk.[24] Kebijaksanaan tersebut telah menyebabkan orang-orang yang berdarah bangsawan menguasai tingkat-tingkat atasan birokrasi kolonial dengan cara yang sangat menyolok.[25] Maksud pemerintah kolonial adalah agar mereka berfungsi sebagai pengikat dalam proses perpaduan antara sistem politik yang baru dan tatanan masyarakat Banten yang lama. Pendek kata, mereka harus ditarik ke pihak pemerintah kolonial. Keadaan sosio-politik yang diliputi kegelisahan yang kronia selama beberapa dasawarsa administrasi Belanda di Banten merupakan satu petunjuk bahwa Belanda tidak memperoleh banyak manfaat dari kemampuan menyesuaikan diri kaum bangsawan Banten yang telah berhasil menduduki jabatan-jabatan tinggi. Kita dapat memperkirakan bahwa tujuan mereka tidaklah pertama-tama untuk membantu memperkokoh rezim Belanda, melainkan untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam masyarakat kelas atasan. Kegagalan untuk merijinakkan kaum bangsawan Banten itu telah memaksa Belanda untuk menempuh kebijaksanaan lain, yang dapat kita namalran kebijaksanaan untuk membangsawankan pamongpraja. [26]

Setelah usaha kaum bangsawan untuk memperkokoh kedudukan tradisional mereka yang

lebih tinggi melalui pengabdian profesional kepada pemerintah tidak begitu berhasil, nampak tanda-tanda adanya proses penyesuaian yang baru. Masih ada satu jalan lain untuk memulihkan prestise mereka, yakni melalui ikatan perkawinan dengan anggota-anggota kelas berkuasa yang baru. Anggota-anggota pamongpraja yang baru yang tidak berdarah bangsawan dan berkeinginan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan mereka dalam hal keturunan, kawin dengan wanita-wanita bangsawan Banten. Mereka berusaha untuk mengangkat diri mereka ke status bangsawan dan melebur di dalamnya. Oleh karena sering terjadi bahwa orang-orang yang beristri wanita bangsawan kelihatannya lebih berhasil menduduki jabatan jabatan tinggi, maka kawin campuran itu tidak hanya mendapat dorongan melainkan juga cenderung untuk menjadi mode. Nampaknya perpaduan antara kedua sub-golongan yang tadinya terpisah satu sama lain itu elite birokrasi dan kaum bangsawan lama-telah memperkokoh kedudukan mereka sebagai pemimpin. Sejalan dengan kecenderungan itu, anggota-anggota pamongpraja di Banten abad XIX dipimpin oleh satu bagian khusus dari kaum bangsawan Banten yang terdiri dari bangsawan-bangsawan lama dan baru. Sebagai pegawai negeri, mereka memperoleh banyak manfaat dari kedudukan yang mereka warisi dalam masyarakat dan dari pengakuan yang diberikan secara diam-diam kepada keunggulan sifat-sifat kepemimpinan mereka. Bupati-bupati terkemuka di Banten, yang kiranya dapat digolongkan ke dalam jenia pamongpraja itu adalah Mandura Raja Jayanegara, Condronegoro, Sutadiningrat, semuanya bupati Serang dalam masa jabatan terakhir mereka; dan Natadiningrat, bupati Pandeglang.[27] Mereka mempunyai ikatan perkawinan dengan keluarga sultan dan di antara sesama mereka. Dalam jangka waktu tiga generasi, satu jaringan ikatan kekerabatan terjalin di kalangan elite birokrasi, akan tetapi persaingan dan perselisihan-perselisihan menyebabkan mereka tidak dapat berkembang menjadi satu kelas berkuasa yang kuat. Dalam jangka waktu yang sama garia keturunan bangsawan berkurang, sehingga gerakan seperti peristiwa Sabidin tak boleh tidak batas menemui kegagalan akibat tidak adanya dukungan penuh dari penduduk, antara lain karena kaum bangsawan tidak lagi memegang peranan utama.

PERANAN PUTRI RATU SITI AMINAH

Ratu Siti Aminah tak disangsikan lagi merupakan satu di antara tokoh-tokoh yang paling terkemuka dalam percaturan politik di Banten selama pertengahan kedua abad XIX. Sebagai kemenakan Sultan Safiudin, ia tergolong putri keraton Banten yang bermartabat tinggi.[28] Perkawinannya dengan bupati Serang, Condronegoro, merupakan satu kemajuan dalam status sosial, yang memberikan penghasilan yang lebih besar dan kesempatan yang lebih baik. Di Banten abad XIX perkawinan antara wanita bangsawan dan pejabat yang berpangkat tinggi sudah merupakan satu kecenderungan yang umum.[29] Dalam tahun-tahun 1880-an, Ratu Siti Aminah dilukiskan sebagai seorang wanita lanjut usia yang boleh dikatakan gesit dan bersemangat. Ia merupakan tokoh yang dominan di lingkungan keluarga sultan. Selain itu – seperti dikatakan dalam laporan Belanda – ia juga merupakan penjelmaan Islam yang ortodoks, yang merupakan ciri khas kesultanan.[30] Pengaruhnya yang besar dirasakan tidak hanya oleh orang-orang keturunan sultan, melainkan juga oleh kalangan elite agama di Kasunyatan, Banten dan Kanari, yang merupakan pusat-pusat keagamaan di Keresidenan Banten.[31]

Seperti telah dilukiskan di atas, tuntutannya atas apa yang tadinya merupakan tanah-tanah sultan, telah ditolak dalam tahun 1868.[32] Oleh karena penghasilannya telah sangat berkurang, peranannya dalam masyarakat Banten semakin terbatas. Semakin berkurang pengaruhnya dalam masyarakat, semakin erat hubungannya dengan elite agama. Sampai batas tertentu, ia memperoleh kembali pengaruhnya dalam masyarakat dengan jalan memegang pimpinan kaum ortodoks. Perlu dikemukakan, bahwa kepatuhan rakyat kepada keluarga sultan pada dasarnya terbatas di bagian utara Banten. Ratu Siti Aminah menyadari bahwa hanya sebagian kecil saja dari penduduk yang akan mendukung usaha untuk memulihkan kesultanan. Tujuan utamanya adalah untuk membela dan memuliakan keluargariya dan dalam waktu yang bersamaan membela agama Islam. Untuk mencapai tujuan-tujuannya itu, ia terus-menerus melakukan intrik. Satu contoh yang terkenal dari intrik-intriknya itu adalah peristiwa Sabidin yang sangat terkenal

dalam tahun 1882. Tak disangsikan lagi bahwa Ratu Siti Aminah memperoleh keuntungan yang sangat besar bukan saja dari kedudukannya berdasarkan keturunan, melainkan juga dari kedudukannya sebagai ibu Bupati Serang dan mertua Bupati Pandeglang.[33]

Bupati Serang, Gondokusumo, tidak berani menentang ibunya; sering kali ia menurut karena takut dan bukan karena rasa kasih sayang. Sebagai akibatnya, maka bupati itu tidak bebas dalam tindakan-tindakannya melainkan didikte oleh ibunya. Oleh karena itu di kalangan pamongpraja ia dikenal sebagai seorang penguasa yang lemah, yang tidak mampu mengendalikan para pemuka agama.[34] Keengganannya untuk bergaul dengan orang-orang Eropa dianggap sebagai akibat keangkuhannya, akan tetapi ada juga yang menduga bahwa rasa takutlah yang menyebabkannya tidak mau mengadakan hubungan yang erat dengan orang-orang Eropa, ia takut bahwa pemuka-pemuka agama akan menuduhnya pro-Belanda. Sesungguhnya ia menyadari benar bahwa kedudukannya sepenuhnya tergantung kepada kekuasaan rezim kolonial.

Anggota terkemuka keluarga sultan lainnya adalah istri Bupati Sutadiningrat dari Pandeglang, yakni Ratu Hamsah, putri Ratu Siti Arninah,[35] orang mengatakan bahwa ia menyerupai ibunya. Keangkuhannya dan kehausannya akan kekuasaan sangat terkenal. Selain itu, keborosannya luar biasa, itulah sebabnya ia selalu dalam kesulitan keuangan. Di kalangan pemerintah orang merasa khawatir bahwa keadaan itu dapat membahayakan kedudukan suaminya.[36] Karena pelbagai alasan, Ratu Siti Aminah lebih akrab dengan Ratu Hamsah daripada dengan Bupati Serang. Pertama, yang disebut belakangan sedikit-banyak telah "berpikiran maju", dan telah menerima beberapa ide Barat. Kedua, istrinya tidak begitu taat kepada agama. Tidak mengherankan bahwa Ratu yang sudah lanjut usia itu lebih suka tinggal di Pandeglang daripada di Serang. Akan tetapi kecil sekali kemungkinannya bahwa ia dapat mempengaruhi penduduk Pandeglang, oleh karena ikatan mereka dengan keluarga sultan tidak pernah seerat ikatan antara keluarga sultan dengan penduduk daerah sekitar Serang, yang pernah merupakan daerah inti kesultanan. Kita dapat memperkirakan bahwa pengaruhnya di Pandeglang hanya terbatas kepada lingkungan terdekat keluarga bupati. Di dalam lingkungan keluarga ia dibiarkan melakukan intrik-intriknya dengan bebas.[37] Harus diakui, bahwa pada umumnya ia tidak dicintai karena ambisi-ambisinya yang besar itu.

PERISTIWA SABIDIN

Bagaimana intrik-intrik dilakukan di kalangan kaum bangsawan dan pamongpraja dengan memanipulasikan ikatan-ikatan kekerabatan, privilese, prestise dan kekuasaan, dengan jelas disingkapkan dalam peristiwa Sabidin, yang terjadi beberapa tahun sebelum meletusnya pemberontakan. la merupakan satu contoh usaha pihak aristokrasi Banten lama yang tak henti-hentinya untuk menghasut rakyat dan menghidupkan kembali kenangan mereka mengenai masa keemasan kesultanan. Sikap mendua banyak pembesar memungkinkan kegiatan-kegiatan itu berlangsung secara leluasa. Catatan-catatan masa itu menganggap peristiwa Sabidin sebagai satu manifestasi perasaan kaum elite Bartten yang sangat mendambakan dipulihkanrtya kesultanan.[38] Apapun motifnya, peristiwa itu telah menyingkapkan peranan politik yang dapat dimainkan oleh keluarga sultan dan cara-cara yang dapat mereka gunakan. Hubungan-hubungan yang terjalin erat antara pamongpraja dan kaum bangsawan telah memungkinkan seorang petualang seperti Sabidin memainkan peranan sebagai pangeran gadungan untuk waktu yang cukup lama.

Menurut *Java Bode*, Sabidin dilahirkan di Yogyakarta, sebagai anak seorang wanita Indonesia bernama Piet (sic).[39] Pada usia dua batas tahun ia pergi ke Surabaya dan mendapat pekerjaan di sebuah bengkel angkatan laut. la berturut-turut bekerja sebagai tukang gambar dan juru mudi. Secara kebetulan ia berkenalan dengan pelukia terkenal, Raden Saleh, yang membawanya ke Paria sebagai salah seorang pelayannya. Kembali di Batavia, Sabidin mendapat kenalan-kenalan baru, di antaranya R.M. Sunario, seorang cucu Mangku Negoro. Di kemudian hari ia dengan lihay memanfaatkan hubungan itu. Oleh karena ia masih merasa

tertarik oleh angkatan laut, ia bekerja sebagai pramugara, mula-mula di kapal "Angus", kemudian di kapal "Zeemeeuw". Beberapa waktu kemudian ia berhenti dari pekerjaannya dan mendarat di Onrust, dan dari sana ia menuju Karangantu, lalu Kasemen. Di sana ia bertemu dengan pensiunan patih Lebak, Jayakusuma, menantu Ratu Siti Aminah.[40] Bekas patih yang sudah tua itu merasa yakin bahwa Sabidin sebenamya adalah Pangeran Timor, putra Sultan Safiudin yang ketika itu hidup dalam pembuangan di Surabaya. Keyakinan Jayakusuma itu diperkuat ketika Haji Mohamad Arsyad, yang di kemudian hari menjadi penghulu kepala di Serang, juga mengenali Sabidin sebagai putra Sultan. Dengan identitas itulah ia kemudian diperkenalkan kepada Ratu Siti Aminah dan kepada Bupati Serang yang tanpa merasa curiga sedikit pun memperlakukannya sesuai dengan itu. Selain itu, penampilan fisiknya, tingkah lakunya yang sopan, dan kemampuannya untuk mengucapkan ayat-ayat al-Quran di luar kepala, telah memperkuat keyakinan mereka bahwa ia benar-benar seorang pangeran.

Residen Banten yang baru, A.J. Spaan, yang mengenal benar daerah itu karena telah pernah bertugas di sana sebelumnya, menjadi curiga; Bupati Serang harus meyakinkannya bahwa Pangeran Timor adalah orang baik-baik, yang tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk menduduki takhta nenek-moyangnya. Dengan membiarkan Pangeran Timor tinggal di rumahnya, Bupati akan dapat mengawasi segala gerak-geriknya. Oleh karena Residen masih saja menyangsikan asal-usul Sabidin sebagai keturunan sultan, Ratu Siti Aminah mendesak yang disebut belakangan agar pergi ke Cirebon untuk mendapatkan surat-surat yang otentik mengenai identifikasinya. Di sana ia dihormat sebagai orang keramat dan diberi gelar *Haji Maulana*. Perlu diketahui bahwa gelar kehormatan itu jarang diberikan, dan itu pun biasanya hanya kepada orang-orang berdarah Pangeran yang dianggap sebagai nabi atau pendiri negara Islam. Sementara itu ia berhasil memperoleh surat jalan laut dari Sekretaria Residen Cirebon, akan tetapi dalam perjalanan kembali ke Banten ia menempuh jalan darat melalui Bandung, Cianjur dan Bogor. Delapan hari sesudah ia kembali di Serang ia kawin dengan anak perempuan Jayakusuma, Sapirah. Tidak lama kemudian ia kawin lagi, juga dengan seorang wanita bangsawan, yakni Siti Zainah, anak Haji Tubagus Mikhlar, yang juga seorang *sentana*.

Dalam perjalanan kelilingnya, Sabidin diterima dengan ramah, mula-mula oleh patih Lebak, Jayapraja, ipar Bupati Pandeglang, kemudian oleh Haji Iyang di Cianjur dan Haji Saripah di Bandung. Terutama di Lebak ia mendapat sambutan yang sangat meriah, oleh karena yang dibangga-banggakan oleh patih di sana ialah bahwa ia mempunyai hubungan dengan keluarga sultan melalui perkawinannya dengan seorang ipar Ratu Hamsah, anak Ratu Siti Aminah. Kunjungan Sabidin sangat membesarkan hatinya dan memperkokoh ikatan di kalangan kaum bangsawan. Sementara itu, di Banten tersiar kabar angin bahwa Pangeran Timor mempunyai maksud untuk berusaha memulihkan hak-hak kesultanan, dengan didukung oleh keenam saudara laki-lakinya. Orang-orang Eropa di kalangan pamongpraja segera siap waspada. Karena menyadari bagaimana berbahayanya situasi itu, maka satu-satunya jalan bagi Sabidin adalah meninggalkan Banten secepat mungkin dan mondar-mandir antara Priangan dan Cirebon. Akhirnya ia ditangkap dan setelah dikonfrontasikan dengan anggota-anggota keluarga sultan yang sebenarnya di Surabaya, penipuan Sabidin dengan mudah dapat disingkapkan. la kemudian dijatuhi hukuman kerja paksa selama empat tahun.[41]

Menurut catatan-catatan masa itu, para penggerak utama peristiwa Sabidin itu adalah pensiunan patih Lebak, Jayakusuma, dan patih pada waktu itu, Tubagus Jayapraja.[42] Tidak disangsikan lagi, para pejabat Belanda merasa khawatir, bahwa sifat rakyat yang mudah percaya itu dapat diperatat secara lihay untuk mengerahkan pengikut-pengikut, dan bahwa penduduk yang sudah menjadi miskin itu dan harus memikul beban pajak yang paling berat, akan mudah dihasut. Hal itu telah dibuktikan dengan jelas oleh apa yang terjadi di mesjid lama Banten, Tiap hari Jumat rakyat berduyun-duyun ke sana untuk mendapat bagian dari air yang telah digunakan oleh Sabidin untuk mencuci kakinya sebelum salat Jumat.[43] Sesungguhnya, bagian terbesar penduduk begitu mudah percaya, sehingga mereka tidak sangsi lagi mengenai kesucian Sabidin dan bersedia memujanya sebagai orang kudus. Yang paling mengherankan orang-orang Eropa di kalangan pamongpraja adalah bahwa pejabat-pejabat tinggi Banten dan malahan anggota-anggota keluarga sultan yang terkemuka tidak hanya mau mengakui Sabidin sebagai putra Sultan Safiudin, melainkan juga berusaha keras untuk menyenangkannya dan

berkorban baginya, seperti menyerahkan anak perempuan mereka untuk diperistrinya. Apa sebabnya Tubagus Jayapraja memuja Sabidin, juga setelah ia terbuka kedoknya, dan dengan berbuat demikian Jayapraja membahayakan kedudukannya sendiri, tidak dapat dijelaskan dengan hanya meninjaunya dari segi penipuan dan petualangan. Satu penjelasan yang memuaskan tidak dapat diberikan selama catatan-catatan itu tidak memuat informasi dari kalangan dalam, namun demikian, dengan menelusuri kembali peranan yang telah dimainkan oleh bangsawan-bangsawan dan pejabat-pejabat pamongpraja itu, kita mungkin akan menemukan kuncinya. Dalam hubungan ini kami menunjuk kepada sebuah komplotan pada akhir tahun-tahun enam puluhan yang dipimpin oleh Jayakusuma sendiri.[44] Kegagalannya ketika itu mungkin tidak menghalang-halanginya untuk memanfaatkan kesempatan yang kedua di mana ia dapat melempar batu sembunyi tangan. Selain itu, selama anggota-anggota keluarga sultan yang terdekat masih hidup, selama itu pula kaum bangsawan tetap berkhayal bahwa kesultanan akan dapat dipulihkan melalui pemberontakan. Peranan yang begitu baik yang dimainkan oleh pangeran gadungan itu tak disangsikan lagi telah memperkuat gagasan tersebut, tak peduli bagaimana kesudahan gerakannya.

Yang penting bagi kita di sini adalah kenyataan bahwa peristiwa Sabidin merupakan gejala yang mencerminkan masyarakat Banten dalam peralihan. Selain artinya sebagai gerakan untuk memulihkan kedudukan sultan, peristiwa itu menunjukkan dengan jelas bahwa golongan-golongan yang berdasarkan garia keturunan dan terdiri dari anggota-anggota keluarga besar memainkan peranan penting dalam percaturan politik di Banten. Loyalitas lebih ditentukan oleh ikatan kerabat dan /atau garia keturunan ayah daripada oleh prinsip-prinsip yang abstrak. Aspek hubungan tradisional ini berkisar di sekitar keluarga sultan sebagai keluarga pertama di Banten. Dalam hubungan ini, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai soal bagaimana peranan-peranan sosial baru kaum elite birokrasi yang baru itu pada umumnya telah berkembang dari hubungan tradisional itu. Yang terutama menarik adalah di satu pihak bagaimana kaum bangsawan berusaha membina hubungan yang kekal dengan anggota-anggota pamongpraja, dan di lain pihak bagaimana yang disebut terakhir ini harus mengkonsolidasikan kedudukan mereka dengan jalan menggabungkan diri dengan keluarga sultan yang sudah mapan.

KEBIJAKSANAAN MENGENAI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pamongpraja Banten perlu dibahas cetera panjang lebar, oleh karena mereka tidak disangsikan lagi merupakan faktor kunci dalam perkembangan politik di masa peralihan di Banten. Di samping aspek-aspek kekerabatan yang telah disebutkan di atas, juga pola-pola penerimaan pegawai baru merupakan hal yang relevan bagi pemahaman pembentukan elite birokrasi baru. Sebagai buah ciptaan rezim Belanda, ia tak disangsikan lagi memperlihatkan cap kebijaksanaan kolonial dalam soal-soal pengangkatan dan penggantian pegawai. Sudah barang tentu birokrasi kolonial itu dibangun di dalam konteks lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan politik dl Banten. Oleh karena ia harus berakar kuat di dalam tatanan tradisional, ia pada permulaannya barus disesuaikan dengan loyalitas-loyalitas dan nilai-nilai lama. Struktur hirarki yang sudah ada dalam masyarakat Banten telah memudahkan pembentukan sistem birokrasi kolonial, sehingga di dalam hal ini tidak diperkirakan akan terjadi perubahan-perubahan radikal dalam struktur kekuasaan. Kenyataan bahwa ikatan-ikatan kewajiban dan ketergantungan politik untuk sebagian mengikuti garis-garia birokrasi hirarkia dan untuk sebagian lagi mengikuti garis-garia hubungan kekerabatan, tak boleh tidak mempengaruhi rencana kebijaksanaan kolonial. Dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya kita harus memusatkan perhatian kita kepada peranan bupati yang mempunyai arti yang menentukan dalam birokrasi kolonial. Ikhtisar berikut ini mengemukakan beberapa tahap perkembangan dalam pembentukan pamongpraja dengan tekanan khusus pada bupati.

Karena terus-menerus dilanda perpecahan di dalam negeri, Banten menjadi semakin rawan terhadap penetrasi Belanda. Sultan-sultan dan pangeran-pangeran selalu berusaha mencari sekutu yang kuat dan Belanda bersedia memberikan bantuan yang diminta itu dengan imbalan upeti dan kemudian kekuasaan penuh. Sejak tahun 1684 Banten merupakan jajahan Kompeni

(VOC), akan tetapi kesultanan dan semua lembaga politik pribumi tidak diganggunya.[45] Setelah kesultanan dihapuskan, diberlakukan satu sistem birokrasi baru, di mana Banten dibagi menjadi tiga kabupaten: utara, barat dan selatan. Kabupaten yang paling akhir dlperintah oleh sultan sampai tahun 1813.[46] Seperti disebutkan di muka, pemerintah kolonial sejak semula bertujuan mempersatukan kepentingannya sendiri dengan kepentingan aristokrasi lama, dengan jalan memberi jabatan kepada anggota-anggota bangsawan maupun kepada orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan mereka. Oleh karena itu, maka selama bagian pertama abad XIX, pemerintah kolonial memusatkan perhatiannya kepada sasaran-sasaran yang boleh dikatakan terbatas saja di Banten. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa suatu pergeseran kekuasaan yang mendadak, di mana rakyat dipaksa untuk menerima peraturan-peraturan dan peranan-peranan yang asing samasekali, mengandung risiko akan menimbulkan frustrasi dan rasa tidak puas yang besar, yang dapat meningkat menjadi pemberontakan. Tindakan-tindakan drastia yang telah diambil dalam tahun 1813 terpaksa dicabut kembali, oleh karena telah menimbulkan satu situasi kacau yang mendekati anarki.[47] Sesungguhnya, selama abad XIX Banten terkenal sebagai daerah yang sulit diperintah. Pamongpraja sering kali tidak berdaya. Perlu dicatat, bahwa dalam tahun-tahun dua puluhan, pejabat-pejabat Eropa yang sedikit sekali jumlahnya, kebanyakan tinggal di ibukota keresidenan. Sebagai akibat situasi politik itu, Belanda harus banyak bertumpu kepada pejabat-pejabat Banten dalam menangani administrasi di daerah itu. Kedudukannya yang lemah dengan sendirinya menyebabkan pemerintah kolonial berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam soal pengangkatan pegawai-pegawai pemerintah.

Yang ada kaitannya dengan masalah pengangkatan adalah masalah penggantian, yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas rezim mereka. Selama perjalanan abad XIX, masalah penggantian itu merupakan titik pusat kebijaksanaan birokrasi kolonial. Hal itu jelas berlaku bagi Banten, yang terkenal kekurangan pejabat yang baik, yang dapat dipakai untuk tujuan administrasi pemerintahan setempat, Pergolakan yang berlangsung terus menyingkapkan fakta yang menyedihkan bahwa pejabat-pejabat itu bukanlah pemimpin rakyat sesungguhnya. Jika pada akhir abad XIX pamongpraja memiliki kekuasaan, maka hal itu tidak lain hanya merupakan hasil kebijaksanaan untuk belajar dari kesalahan, yang memakan waktu yang lama, mengenai pengangkatan dan penggantian pejabat. Hasil itu baru diperoleh setelah melalui banyak pergolakan dan kerusuhan. Kasus Cilegon hanya merupakan satu dari sekian banyaknya contoh. Akan tetapi terlebih dulu akan dibahas kasus-kasus berikut ini.

Setelah R.A. Mandura Raja Jayanegara, bupati Serang, meninggal tahun 1849, baik anaknya, R Bagus Jayakarta - patih Serang - maupun menantu-menantunya, Tubagus Suramarja, kliwon Serang, dan Mas Wiroleksono, demang Ciomas, tidak diangkat untuk menggantikannya, dengan alasan bahwa mereka dianggap tidak akan mampu melakukan tugas bupati. Menurut residen Banten, R. Bagus Jayakarta adalah seorang yang tak berpengetahuan, tidak mengenal sopan santun, malas, tidak mempunyai rasa simpati terhadap rakyat, dan pemadat; Tubagus Suramarja pernah dipecat dan diangkat kembali hanya untuk menghormati mertuanya; dan Mas Wiroleksono terlalu kecil prestisenya.[48] Perlu dikemukakan bahwa bupati tersebut tidak mempunyai anak laki-laki dari istri pertamanya. Perkawinannya dengan istrinya yang pertama, Ratu Siti Aisah - ibu Sultan Safiudin - telah sangat memperkokoh kedudukannya, akan tetapi perlakuannya yang buruk terhadap istrinya itu telah menimbulkan kemarahan dan permusuhan yang besar di kalangan bangsawan Banten. Akhirnya, pemerintah mengangkat R.T.A. Condronegoro - ketika itu bupati Pandeglang sebagai bupati Serang. la tidak hanya cakap akan tetapi juga sangat berpengaruh di seluruh keresidenan. Selain itu, karena perkawinannya dengan Ratu Siti Aminah, ia mempunyai ikatan yang erat dengan keluarga sultan. Jabatannya yang lama diberikan kepada Mas Ario Nitinegara - patih Caringin - yang juga beristri seorang wanita dari keluarga sultan.[49] Dalam tahun itu juga, bupati Caringin, R.T.A. Wiriadijaya, meninggal dan digantikan oleh anaknya, R.T. Kusumanegara.[50] Keduanya berasal dari Bogor; mereka tidak disenangi, meskipun yang disebut belakangan sudah mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga sultan karena perkawinannya dengan saudara Ratu Siti Aminah.[51] Dapat diperkirakan bahwa pengangkatan Kusumanegara akan menimbulkan reaksi yang tajam; dan dalam kenyataannya reaksi itu meningkat menjadi pemberontakan yang

besar yang dikenal oleh umum sebagai pemberontakan Wakhia. Di sini kita dapati satu kebijaksanaan dalam soal pengangkatan yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang gawat. Dapat dimengerti jika Jayakarta menghasut pemberontakan itu, oleh karena sudah dua kali ia dilampaui. Tak disangsikan lagi ia telah manaruh harapan yang besar oleh karena pada waktu itu penggantian secara turun-temurun sedikit-banyaknya sudah merupakan satu pola umum di Jawa.[52] Juga di Banten kecenderungan umum itu bisa dilihat.

R.A.A. Condronegoro digantikan oleh .anak tirinya, RTP. Gondokusumo, yang sebelumnya adalah bupati Pandeglang. Condronegoro berasal dari rakyat biasa, akan tetapi dengan mengawini wanita keturunan sultan ia mengangkat derajat keluarganya sendiri, dan hal ini pada gilirannya memudahkan kenaikan pangkat anak tirinya itu.[53] Selama masa hidup mereka, faktor-faktor di luar birokrasi masih sangat menentukan kenaikan pangkat anggota-anggota pamongpraja di Banten. Demikian pula halnya dengan contoh kita yang kedua. R.T.A. Natadiningrat, bupati Pandeglang, digantikan oleh anak salungnya, R.T. Sutadiningrat, yang setelah terjadi peristiwa Cilegon dinaikkan pangkatnya menjadi bupati Serang. Adiknya, R. Bagus Jayawinata, menggantikannya sebagai bupati Serang. Setelah ia meninggal dalam tahun 1899, anak sulungnya, R.A. Jayadiningrat, menggantikannya sebagai bupati Serang. Natadiningrat dan Sutadiningrat kedua-duanya kawin dengan anggota keluarga sultan dan hal itu tidak disangsikan lagi telah menaikkan derajat mereka. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa kedua orang ini berhasil mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat terutama karena kemampuan dan kecocokan mereka untuk melakukan tugas pamongpraja. Untuk melengkapi daftar keluarga-keluarga bupati yang terkemuka, di mana jabatan bupati sekurang-kurangnya dipegang oleh dua generasi berturut-turut, dapat disebutkan di sini R.T. Karta Natanegara dan anaknya, R.T. Jayanegara; dan R.T. Suta Angunangun dan anaknya, R.T. Surawinangun. Yang disebut pertama adalah orang-orang Sunda berasal dari Bogor,[54] sedangkan yang belakangan adalah orang-orang Banten Selatan dan berasal dari rakyat biasa. [55]

Dari daftar di atas jelaslah bahwa pemerintah menghormati hak turun.temurun pada bupati sejauh hal itu bertepatan dengan persyaratan-persyaratan birokrasi yang esensial seperti kemampuan, kerajinan dan kesetiaan.[56] Nampaknya pemberian hak turun-temurun kepada sebuah keluarga bupati dimaksudkan untuk menjadi dukungan dan kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Orang-orang itu tentunya dapat diharapkan akan menyukai satu keadaan di mana prestise dan kedudukan mereka dijamin dan dihormati. Satu konsekuensi yang tidak menyenangkan dari dilanjutkannya hak-hak turun-temurun itu adalah tumbuhnya nepotisme di daerah itu.[57] Dan memang, setelah dua atau tiga generasi, keluarga-keluarga yang berkelompok-kelompok di sekitar pembesar-pembesar pamongpraja membangun satu jaringan hubungan dan ikatan kekerabatan, yang dalam waktu beberapa dasawarsa tumbuh menjadi satu klik yang memonopoli jabatan-jabatan di daerah itu. Keadaan yang demikianlah yang dijumpai di Banten dalam bagian akhir tahun-tahun delapan puluhan, sehingga terdengar keluhan-keluhan dari pejabat-pejabat pamongpraja yang merasa tidak dapat naik pangkat dengan cara apa pun semata-mata karena mereka tidak termasuk anggota keluarga yang berkuasa.[58] Kiranya tak perlu dijelaskan lagi, bahwa ikatan keturunan masih mempunyai arti yang penting di lingkungan pamongpraja Banten pada umumnya dan dalam soal pengangkatan anggota-anggotanya pada khususnya. Dalam hubungan ini kita jangan melupakan kenyataan bahwa adalah juga kebijaksanaan pemerintah kolonial untuk sejauh mungkin mengangkat orang-orang yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Di atas kami telah menyebut-nyebut adanya "orang-orang asing" di kalangan pamongpraja Banten. Apabila tidak tersedia pejabat-pejabat yang kompeten untuk mengisi jabatan yang kosong, pemerintah Belanda terpaksa mengangkat pejabat.pejabat dari luar Banten, biasanya dari Bogor atau Priangan. kita tahu bahwa R,T.A. Wiriadijaya, bupati Caringin, dan R.T. Karta Natanegara, bupati Lebak, keduanya berasal dari Bogor, sedangkan R.T. Suria Nataningrat berasal dari Priangan.

Khususnya perlu disebutkan di sini Raden Penna, patih Anyer pada saat meletusnya pemberontakan, yang dilahirkan dan dibesarkan di Batavia.[59] Disangsikan apakah kebijaksanaan itu dapat dibenarkan secara meyakinkan dengan jalan mengemukakan dalih

tidak adanya calon-calon setempat yang dianggap cocok untuk mengisi lowongan. Pemerintah pasti mengetahui bahwa pengangkatan orang-orang luar akan menimbulkan frustrasi dan kerikuhan, jika tidak lebih buruk lagi, di kalangan pamongpraja Banten. Beberapa residen dengan tepat sekali menyesalkan pengangkatan-pengangkatan itu dan menganggapnya sebagai kesalahan-kesalahan politik yang besar.[60] Meskipun sebagai anggota-anggota aristokrasi Sunda mereka ditempatkan di daerah-daerah yang penduduknya terutama terdiri dari orang-orang Sunda, rekan-rekan sejawat mereka menganggap mereka sebagai orang-orang luar yang mengganggu, yang mereka curigai dan menimbulkan iri hati mereka. Dapat dipahami mengapa "orang-orang asing" itu oleh Belanda dilukiskan sebagai lebih pandai dan gesit, jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena mereka ditempatkan dalam satu lingkungan yang asing dan tanpa ikatan-ikatan tradisional dengan penduduk setempat, mereka terpaksa bertumpu pada kekuasaan kolonial. Kesetiaan mereka yang teguh kepada Belanda di satu pihak, dan keterpisahan mereka dari lembaga-lembaga keagamaan di lain pihak, dianggap sebagai satu pukulan terhadap aristokrasi Banten. Oleh karena itu, beberapa pejabat "asing" itu berusaha memperbaiki kedudukan mereka dengan jalan mengawini wanita bangsawan Banten atau memimpin urusan keagamaan. Cara-cara itu nampaknya cukup efektif untuk menaptakan ikatan dengan penduduk. Setidak-tidaknya cara-cara itu berhasil mengurangi kemungkinan terjadinya pergesekan sebagai akibat hadirnya pejabat-pejabat pamongpraja "asing" di Banten. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa dalam bagian pertama abad XIX belum ada kecenderungan di pihak pamongpraja Banten untuk membentuk suatu "elite inti" yang relatif kohesif; demikian pula belum nampak tanda-tanda mobilisasi ikatan-ikatan kekerabatan untuk menentang pengangkatan pejabat-pejabat pamongpraja dari luar Banten. Selama dasawarsa-dasawarsa terakhir abad itu, konsolidasi kedudukan pejabat-pejabat Banten nampaknya telah membuat elite yang berkuasa agak lebih kompak dan mampu mempertahankan diri dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kita sudah mengetahui bahwa selama periode yang pertama, pejabat-pejabat pamongpraja bukan asal Banten, seperti Condronegoro, Wiriadijaya, dan Karta Natanegara, telah diangkat, dan berkat kemampuan mereka yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan setempat mereka berhasil mendirikan keluarga-keluarga-inti di Banten.

Mungkin ada baiknya untuk mengemukakan contoh-contoh pengangkatan "orang-orang asing" yang akibat-akibatnya sangat mengganggu administrasi kolonial di Banten. Pengangkatan Kusumanegara sebagai bupati Caringin dalam tahun 1849 telah menimbulkan rasa tidak puas yang besar di kalangan keturunan pendahulunya, yang dengan dukungan pemuka-pemuka agama, melancarkan pemberontakan Wakhia yang terkenal itu dalam tahun 1850. Tidaklah mengherankan bahwa anggota-anggota bangsawan Banten, R. Bagus Jayakarta, Tubagus Suramarja dan Tubagus Mustafa, masing-masing anak dan menantu-menantu bupati Caringin yang lama, sangat gusar dengan pengangkatan seorang pengganti yang bukan anggota keluarga mereka. Dalam bagian yang terpisah kita akan menelaah secara lebih seksama unsur-unsur sosial yang telah dikerahkan dalam pemberontakan itu. Kasus yang kedua, yang tidak kurang gawat konsekuensi-konsekuensinya, adalah pengangkatan Raden Penna sebagai patih Anyer. Peranannya dalam peristiwa Cilegon sangat penting. Dalam Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, Raden Penna dilukiskan sebagai seorang berpendidikan Barat, yang dalam ucapan dan tindak-tanduknya lebih Eropa daripada Indanesia.[61] Raden Penna, yang dilahirkan di Batavia dan dididik dalam lingkungan Barat, telah mengoper cara hidup Barat. Banyak aspek tindak-tanduknya sebagai pejabat pamongpraja dapat ditelusuri kembali kepada latar belakang kebudayaan ini. Secara menyolok ia memperlihatkan sikapnya sebagai lawan Bupati Serang, dan permusuhan di antara kedua pembesar itu dengan sendirinya menimbulkan banyak kerikuhan di kalangan pamongpraja di Banten. Setibanya di Banten, Raden Penna tidak mau melakukan kunjungan kehormatan kepada bupati. Selain dari itu, ia juga menolak mentah-mentah untuk memberikan penghormatan kepada bupati dan kepada orang-orang Eropa yang merupakan atasannya menurut cara tradisional, yakni dengan bersila di hadapan mereka. Permusuhan itu telah dipergawat oleh desas-desus yang menyatakan bahwa Residen dan Bupati Serang akan dipecat sebagai akibat peristiwa Sakam. Menurut desas-desus itu, jabatan mereka masing-masing akan dioper oleh Czernicki dan Raden Penna, oleh karena kedua orang itu telah bekerja

dengan baik sekali ketika terjadi peristiwa Ciomas.[62] Ada hal-hal lain yang menyebabkan Raden Penna terasing dari pamongpraja Banten. la merupakan gambaran seorang birokrat modern yang tulen, yang tidak mau menerima hadiah, juga jika hadiah itu diberikan sebagai tanda simpati dan bukan sebagai sogokan. la selalu mempertahankan jarak antara dia dan bawahannya, dan hal itu menyebabkan ia terpencil di daerahnya sendiri. Yang membuat kedudukannya lebih sulit lagi adalah sikapnya terhadap soal-soal agama. Karena latar belakang kebudayaannya, Raden Penna tidak memperlihatkan sikap hormat sebagaimana mestinya terhadap cara-cara ibadah orang Islam di Banten, seperti bersembahyang dan berzikir keras-keras, sehingga perasaan keagamaan penduduk sangat tersinggung.[63]

Di atas telah dikemukakan bahwa antusiasme terhadap agama merupakan salah satu jalan utama urituk merebut hati rakyat Banten, dan cara itu telah digunakan dengan pandai sekali oleh sejumlah pejabat pamongpraja "dari keturunan biasa" untuk meningkatkan kedudukan mereka. R.T. Suta Angunangun, seorang bupati Lebak, secara menyolok memperlihatkan ketaatannya kepada agama. la berkhotbah pada salat Jumat. Meskipun perbuatannya itu cukup wajar menurut pandangan orang-orang Islam, di mata pejabat-pejabat Belanda semangat keagamaannya itu berlebih-lebihan.[64] Di sini kita menjumpai salah satu hal yang paling menentukan dalam percaturan politik di Banten: bagaimana sikap pemerintah kolonial terhadap ide-ide dan praktek-praktek keagamaan penduduk, dan apa peranan politik pemuka-pemuka agama dalam melawan kebijaksanaan kolonial mengenai soal-soal agama? Untuk sementara kiranya cukup dikemukakan bahwa pemerintah kolonial sudah merasa curiga jika pejabat-pejabat pamongpraja menunjukkan kegiatan-kegiatan yang besar dalam urusan agama, dan dengan mudah mencap mereka sebagai fanatik. Dengan demikian pemerintah kolonial mempunyai sebuah senjata yang ampuh untuk menghalang-halangi pejabat-pejabat Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan agama dan memisahkan mereka dari pemuka-pemuka agama. Terutama setelah peristiwa Cilegon, tidak ada yang lebih ditakuti oleh pamongpraja daripada dicap fanatik, sehingga status pejabat pamongpraja kelihatannya tidak dapat dipertemukan dengan cara hidup seorang Muslim yang baik.[65] Pada akhir abad itu, sekularisasi pamongpraja di Banten sudah berjalan lancar.[66] Sebelum kita membahas elite agama sebagai golongan kekuasaan ketiga dalam gelanggang politik di Banten, perlu dikemukakan beberapa hal yang penting mengenai perkembangan pejabat-pejabat pamongpraja Banten sebagai satu kesatuan.

STRUKTUR BIROKRASI KOLONIAL DAN KONFLIK KELEMBAGAAN

Sampai di sini kiranya sudah jelas bahwa di dalam melaksanakan administrasi mereka, pihak Belanda secara berangsur-angsur memutuskan struktur hubungan-hubungan politik yang tradisional. Transformasi dari pola kekuasaan yang tradisional ke pola kekuasaan yang rasional-legal dilaksanakan selangkah demi selangkah. Dalam kenyataannya, berlakunya secara berdampingan dua kekuasaan yang berbeda secara esensial- yang masing-masing diwakili oleh residen dan oleh bupati- melahirkan satu sistem yang ambivalen dalam administrasi.

Dilihat dari segi pengangkatan dan penggantian pejabat-pejabat, birokrasi di Banten tidak dapat diidentifikasikan sebagai birokrasi yang benar-benar rasional-legal, di mana persyaratan-persyaratan teknia merupakan dasar utama untuk menyaring pejabat. Yang terjadi adalah sebaliknya, faktor-faktor di luar birokrasi, seperti derajat keluarga orang yang bersangkutan, yakni apakah orang itu punya hubungan keluarga dengan kaum bangsawan Banten atau tidak, dan apakah ia merupakan anggota keluarga lapisan atas atau tidak, pada umumnya menentukan pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Dalam pada itu, juga sangat diperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya bagi promosi seperti kemampuan, jasa dan prestasi. Dualisme ini berarti bahwa di satu pihak kebijaksanaan kolonial masih memperhitungkan faktor-faktor khusus seperti latar belakang keluarga, sedangkan di lain pihak ia juga menekankan aspek-aspek yang berlaku umum seperti persyaratan teknis.[67] Dalam pada itu, kelihatan ada pergeseran yang lamban tetapi mantap ke arah yang disebut belakangan. Pengangkatan orang-orang dari rakyat biasa dan orang-orang "asing" mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip rasional-legal dan dengan demikian mendorong tegaknya kekuasaan kolonial itu sendiri: pada kenyataannya, satu

kriteria yang esensial diberi tekanan yang khusus; yakni kesetiaan kepada pemerintah kolonial.

Penetrasi administrasi rasional-legal secara progresif jelas menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan yang besar dalam masyarakat Banten. Perubahan politik ini melahirkan konflik-kontlik kelembagaan yang memaksa pejabat-pejabat pamongpraja untuk berulang kali memainkan peranan yang saling bertentangan. Untuk dapat lebih memahami sikap umum pejabat-pejabat pamongpraja Banten, aspek perkembangan politik ini tidak dapat diabaikan. Ikatan-ikatan yang partikularistik sering kali bertentangan dengan norma-norma kepamongprajaan. Hubungan-hubungan kekerabatan pejabat pamongpraja yang sangat "*diffuse*" dan berdasarkan solidaritas memaksanya untuk memperlakukan orang-perorangan sebagai anggota kerabat, akan tetapi peranannya sebagai pejabat mengharuskannya untuk memperlakukan orang-orang itu tanpa mengingat kepentingan diri sendiri dan tanpa pilih bulu. Dengan terpusatnya kekuasaan, kekayaan dan prestise sekitar bupati, ia senantiasa ditekan untuk menggunakan kedudukannya dan hak-hak istimewanya untuk kepentingan anggota-anggota kerabatnya. la diharapkan membantu anggota-anggota keluarga besarnya, dan itu memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang besar yang harus dipikulnya.[68] Tuntutan-tuntutan dari piliak anggota-anggota kerabatnya jelas tidak dapat dipertemukan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Banyaknya pejabat pamongpraja yang dipecat karena korupsi atau apa yang dinamakan *knevelarijen* harus dijelaskan dari segi konflik kelembagaan. [69] Konsekuensi-konsekuensi yang penting dari situasi itu adalah lemahnya secara permanen keadaan keuangan pejabat dan kenyataan bahwa sejumlah besar pejabat yang telah dipecat sedikit-banyaknya mempunyai perasaan tidak senang terhadap pemerintah kolonial. Tidak mengherankan bahwa pejabat-pejabat yang demikian selalu terdapat di antara orang-orang yang ikut dalam pemberontakan.[70]

Nampaknya merupakan satu ciri yang khas dari struktur birokrasi, bukan saja di Banten melainkan di seluruh Pulau Jawa abad XIX, bahwa penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pribumi sangat menyolok dalam perkembangan administrasi kolonial.[71] Sementara administrasi pusat diselenggarakan menurut garis-garis birokrasi modern, pemerintah-pemerintah daerah dan lokal untuk sebagian masih tetap disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Pejabat-pejabat pribumi menerima gaji tetap untuk tugas-tugas administratif pada tingkat daerah atau lokal, akan tetapi di samping itu, bertambahnya prestise dan kekuasaan di lingkungan tradisional dapat dengan mudah diubah menjadi pelbagai macam pendapatan: upeti-upeti atau kerja wajib yang tradisional. Hal-hal itu mengingatkan orang kepada prerogatif-prerogatif pribadi yang dipunyai oleh penguasa dan pembantu-pembantunya dalam pemerintahan patrimonial. Dalam kenyataannya, selama periode peralihan politik tidak ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal pribadi dan soal-soal jabatan.[72] Dengan mudah dapat ditunjukkan contoh-contoh yang menyolok dari penyelewengan-penyelewengan di bidang administrasi: umpamanya, kasus Karta Negara, Surianegara dan Jayakusuma,[73] yang dituduh menggunakan uang pajak dan tenaga kerja penduduk seolah-olah miliknya pribadi. Dalam kasus-kasus itu kita menjumpai sesuatu yang dapat dipandang sebagai inheren pada birokrasi kolonial yang dualistis.

PERANAN POLITIK ELITE AGAMA

Elite agama terlibat dengan cara yang berbeda dalam konflik kelembagaan itu. Sementara pamongpraja secara keseluruhan memperlihatkan sikap menyesuaikan diri dengan sistem politik yang diberlakukan oleh Belanda, kaum elite agama cenderung untuk menolaknya. Semakin lanjut proses modernisasi- serta gejala yang menyertainya, yakni sekularisasi- semakin sengit perlawanan mereka, oleh karena mereka sudah mengikat diri sepenuhnya kepada norma-norma dan nilai-nilai Islam, yang samasekali tidak dapat diperdamaikan dengan sistem sekular. Kedudukan sosial mereka menjadi taruhan.

Oleh karena tiap sultan diakui sebagai kepala agama Islam di dalam wilayahnya, maka lembaga-lembaga keagamaan mendapat pengakuan dan perlindungan penuh sebagai agama

resmi negara. Banyak anggota elite agama dimasukkan ke dalam kerangka umum sistem administratif, dan membentuk satu kelas administratif religius di samping kelas administratif sekular. Jabatan ketua Mahkamah Agung dipegang oleh seorang ulama, yang biasanya memakai nama resmi *Fakih Najamudin*. Kaum elite agama menempati kedudukan yang strategis, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat pusat, sehingga mereka dapat dengan mudah berhubungan dengan keraton dan tingkat-tingkat atas birokrasi. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa ada unsur-unsur elite agama yang tidak mempunyai kekuasaan birokratis dan tetap menentang pejabat-pejabat sekular dan pejabat-pejabat agama.[74] Setelah kesultanan dihapuskan, kaum elite agama tidak lagi mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam soal-soal kebijaksanaan, meskipun dalam kenyataannya jabatan *Fakih Najamudin* tetap dipertahankan sampai tahun 1868 dan pengadilan-pengadilan agama masih diselenggarakan oleh pejabat-pejabat agama. Perbedaannya yang utama adalah bahwa peranan pejabat-pejabat agama -penghulu, personil mesjid- dikurangi sehingga menjadi peranan pejabat-pejabat biasa dan ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Untuk selebihnya, sebagian besar kaum elite agama masih mempunyai kebebasan dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama mereka, seperti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan agama, menyelenggarakan pesantren, dan malahan mendirikan tarekat-tarekat. Mengenai perjalanan naik haji, pemerintah berusaha untuk menekan jumlah jemaah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pembatasan selama abad itu, namun demikian dari tahun ke tahun jumlah mereka terus meningkat.[75] Dalam kenyataannya, dalam perjalanan waktu lembaga-lembaga yang melahirkan kekuatan-kekuatan militan yang menentang pemerintah kolonial tumbuh menjadi benteng-benteng kebangkitan kembali Islam. Bagaimana terjadinya hal itu akan dibahas dalam Bab V.

Untuk tujuan kita sekarang, perlu diselidiki persekutuan-persekutuan apa yang diadakan oleh kaum elite agama dalam memainkan peranan mereka. Dengan terus berlangsungnya proses modernisasi, semakin nampaklah perpecahan antara elite agama dan elite sekular. Menjadi jelaslah bahwa pola tradisional mengenai pengalokasian kedudukan kepada kaum elite agama tidak dapat diperdamaikan dengan hakikat pemerintahan sekular yang modern itu sendiri. Seperti telah dikemukakan di atas, sebagian dari kaum elite agama membiarkan diri mereka dijadikan alat untuk mendukung pamongpraja dan dimasukkan ke dalam kerangka umum administrasi kolonial. Akan tetapi, dengan berbuat demikian mereka kehilangan pengaruh atas penduduk yang beragama Islam dan kekuasaan mereka menjadi hampir tak ada artlnya lagi. Hubungan antara elite agama dan elite sekular ternyata tidak efektif dalam arti tidak saling memperkuat kekuasaan masing-masing. Adalah menarik bahwa antagonisme antara pejabat-pejabat dan golongan tidak resmi dari elite agama sudah terdapat di masa kesultanan; antagonisme ini semakin menampakkan diri di bawah kekuasaan kolonial. Yang pasti adalah bahwa simbol-simbol Islam dan ideologi yang erat hubungannya dengan itu tidak lagi dijadikan landasan lembaga-lembaga politik modern. Peranan agama dan peranan politik dipisahkan secara tajam satu sama lain, Kaum elite agama tidak lagi diperlukan untuk mendukung kekuasaan bupati, yang harus semakin bertumpu kepada penguasa kolonial. Tidak berlebih-lebihan kiranya untuk mengatakan bahwa peranan elite agama dalam administrasi kolonial telah diturunkan derajatnya menjadi sekedar peranan ritual atau seremonial.

Dengan jalan mempererat kerjasama mereka dengan pemerintah kolonial, pamongpraja semakin mengasingkan diri dari umat, Lagi pula, karena ingin sekali menyenangkan majikan kolonial mereka, mereka berusaha keras untuk tidak memperlihatkan semangat atau fanatisme keagamaan, dan dengan bersikap demikian mereka memutuskan hubungan tidak saja dengan kaum elite agama melainkan juga dengan seluruh umat Islam, yang memandang hina kekuasaan orang-orang kafir. Ide-ide keagamaan memasuki hampir setiap aspek kehidupan; hal ini penting artinya terutama di Banten, yang penduduknya terkenal sangat taat kepada agama. Terutama dalam periode kebangkitan kembali agama, setiap orang diukur dari segi agama, menurut kesalehannya, pengetahuannya atau keanggotaannya dalam salah satu tarekat.

Ukuran prestise yang didasarkan atas agama berbeda sekali dengan ukuran untuk kaum elite Barat dan kaum elite sekular; masing-masing menggunakan ukuran-ukuran status yang berlainan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa selama periode kebangkitan kembali

itu, para kiyai dan haji di Banten Utara lebih dihormati daripada pamongpraja. Yang lebih buruk lagi bagi yang disebut belakangan adalah bahwa penduduk tidak lagi memberikan dukungan politik kepada mereka, sebagai akibat rendahnya derajat sosio-religius mereka. Yang menarik perhatian adalah bahwa sementara di daerah-daerah lain keanggotaan dalam tarekat dipandang rendah dalam masyarakat, di Banten justru memberikan prestise.[76]

Kekuasaan politik para kiyai dan/atau haji sebagai guru tarekat atau guru ngaji dibuktikan dengan jelas oleh kasus tarekat Kadiriah dan pesantren-pesantren yang banyak sekali terdapat di Banten Utara selama tahun-tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan. Terutama para kiyai yang menjadi guru tarekat yang dihormati dan disegani oleh kebanyakan penduduk desa, dan dalam perjalanan waktu memperoleh pengaruh yang besar sekali.[77] Reputasi kiyai-kiyai yang terkemuka sering kali mendahului faktor-faktor lain sebagai sumber kewibawaan mereka. Sudah barang tentu, harta milik mereka sering kali dapat digunakan untuk mendukung tuntutan mereka atas kekuasaan politik. Kedudukan politik mereka yang relatif mandiri merupakan akibat dari tersedianya sumber-sumber daya seperti pemilikan tanah, keuntungan dari usaha dagang kecil-kecilan atau meminjamkan uang, dan persembahan dari murid-murid atau pengikut-pengikut mereka. Satu landasan materi lainnya yang perlu disebut adalah pengumpulan zakat dan fitrah yang pembagiannya masih berada di bawah pengawasan elite agama.[78]

Yang penting artinya bagi masalah persekutuan-persekutuan politik di Banten abad XIX adalah hubungan antara kaum elite agama dan kaum bangsawan Banten. Perkembangan percaturan politik di Banten dan konflik-konflik serta ketegangan-ketegangan yang ditimbulkannya tercermin dalam distribusi ikatan-ikatan persekutuan itu. Kaum bangsawan Banten terdiri dari beberapa sub-golongan dan cenderung untuk bertaut dengan satu golongan agama, oleh karena banyak dari anggota-anggotanya menjadi kiyai atau haji. Dalam kenyataannya, kedua golongan itu mengejar tujuan yang sama -mempertahankan sistem status tradisional. Seperti telah dikemukakan di atas, kedua golongan telah mengalami perubahan besar dan telah kehilangan bagian terbesar dari kekuasaan politik mereka; oleh karena itu mereka selalu ikut aktif dalam pergolakan-pergolakan politik. Selama abad XIX, kedua golongan merupakan unsur-unsur yang rusuh dan menyusahkan dalam arena politik di Banten. Persekutuan yang tak terputuskan antara Haji Wakhia dan Tubagus Jayakarta di satu pihak, dan antara Haji Wasid dan Kiyai Haji Tubagus Ismail di lain pihak, merupakan contoh yang nyata dari persekutuan yang sering terjadi di antara kelompok-kelompok dalam golongan-golongan tradisional itu.[79] Kita telah melihat bagaimana Ratu Siti Aminah, dalam usahanya untuk menegakkan kembali keluarganya, telah mencari dukungan kaum elite agama di pusat-pusat keagamaan lama di Banten.[80]

Persekutuan itu hanya merupakan persekutuan sebagian saja, oleh karena ikatan yang sudah ada antara Ratu Siti Aminah dan bupati-bupati Banten yang paling terkemuka .tidak memungkinkannya untuk mengadakan komitmen total dengan kaum elite agama. Bagaimanapun, kaum elite agama hanya diperlukan untuk mendukung usahanya memulihkan kedudukannya yang lama. Berbeda sekali dengan persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh R. Tubagus Jayakarta dan Kiyai Haji Tubagus Ismail, Ratu Siti Aminah rupa-rupanya tidak ingin benar-benar ikut dalam perlawanan yang terang-terangan terhadap pemerintah kolonial. Dilihat dari segi ini, dapat dimengerti bahwa pamongpraja pada umumnya dan bupati Serang -Condokusumo- pada khususnya mengambil sikap yang negatif atau ambivalen terhadap kaum elite agama. Di dalam pertarungan politik yang banyak seginya ini, kaum elite agama dan sebagian dari kaum bangsawan berkecenderungan untuk mengembangkan orientasi-orientasi politik yang lebih ekstrim dan ikut dalam gerakan-gerakan sosial yang radikal.

Pengaruh kaum elite agama yang sangat kuat tidak hanya terasa di kalangan lapisan-lapisan bawah penduduk, tetapi juga nampak di kalangan pejabat-pejabat Banten secara keseluruhan, baik yang berpangkat tinggi maupun yang berpangkat rendah. Mereka secara menyolok menunjukkan sikap hormat dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada para kiyai. Keadaannya menjadi sedemikian rupa sehingga dalam soal-soal resmi pun para pejabat sering kali memberi tahu para kiyai tentang tindakan yang akan diambil dan minta bantuan mereka dalam pelaksanaannya di kalangan rakyat.[81] Jika diingat bahwa banyak pejabat pamongpraja menjadi anggota tarekat Kadiriah, maka sikap mereka yang penuh hormat dan

taat kepada para kiyai itu mudah dipahami. Selain itu, mereka telah menuntut pelajaran pada guru-guru agama dan sejak kecil pada diri mereka telah ditanamkan rasa antipati terhadap pemerintah kolonial. Memang benar bahwa, seperti yang dikatakan oleh Residen Banten, pejabat-pejabat pamongpraja membenci Belanda dari lubuk hati mereka, meskipun hubungan di antara mereka kelihatannya ramah.[82]

HUBUNGAN ANTARA PEJABAT-PEJABAT BANTEN DAN EROPA

Satu aspek lainnya dari perkembangan politik di Banten akan dibahas. Oleh karena studi-studi yang mengenai kebijaksanaan kolonial Belanda dalam abad XIX sudah banyak sekali, maka cukup kiranya menunjuk kepada studi-studi itu sejauh yang menyangkut perkembangan politik pada tingkat pusat.[83] Apa yang khususnya terjadi pada tingkat daerah, seperti di Banten, harus diselidiki dengan memusatkan perhatian terhadap hubungan antara pejabat-pejabat Eropa dan pejabat-pejabat Banten khususnya, dan penduduk umumnya.

Satu perkembangan yang menyertai pernyataan pemerintah Belanda mengenai status Banten sebagai wilayah kekuasaannya, adalah pembentukan kerangka praktek-praktek legal dan administratif modern sebagai unsur-unsur birokrasi kolonial. Maka dikembangkanlah satu perangkat kepamongprajaan yang baru: satu jaringan administrator-administrator Belanda dengan cepat dibangun, dan kekuasaan politik didistribusikan di antara mereka; mereka ditugaskan untuk mengawasi kegiatan para bupati dan bawahan mereka. Administrator-administrator Belanda itu merupakan unsur-unsur birokrasi yang ditempatkan di antara pemerintah pusat dan pamongpraja pribumi di satu pihak, dan rakyat di lain pihak. Penetrasi personil asing dari birokrasi kolonial ke dalam struktur administratif tingkat daerah itu menyebabkan terjadinya pergeseran fokus kekuasaan dan tanggung jawab dari kekuasaan Bah para bupati berdasarkan tradisi kepada kekuasaan pemerintah Belanda. Satu konsekuensi yang langsung adalah merosotnya kedudukan para bupati, yang sekarang hanya merupakan agen-agen atau "boneka" majikan mereka, orang Belanda. [84]

Dalam hirarki pejabat-pejabat yang disusun oleh Belanda, residen hanya merupakan anak tangga yang lebih tinggi dari tangga kekuasaan di mana pejabat-pejabat pribumi merupakan anak tangga yang lebih rendah. Administrasi keresidenan -satu distrik artificial yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial- dipercayakan kepada *residen*, yang untuk itu diberi kekuasaan-kekuasaan yang besar yang melebihi kekuasaan yang pernah dimiliki oleh kepala-kepala daerah pribumi dalam organisasi yang tradisional. Residen bertanggung jawab atas ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban di daerahnya, dan mengawasi fungsi dan kegiatan semua pejabat setempat, baik Eropa maupun pribumi.[85] Mengenai sasaran-sasaran administrasi, pamongpraja kolonial nampaknya lebih mementingkan pemasukan pajak dan pemeliharaan tata tertib daripada pembangunan ekonomi dan sosial.

Pejabat-pejabat pamongpraja pribumi selama itu sangat merasakan kedudukan mereka sebagai bawahan Belanda, meskipun orang-orang Eropa yang menjadi atasan mereka sering kali menggunakan stratugi "diplomatik" jika memberi perintah kepada mereka. Sering kali dikatakan bahwa pejabat-pejabat pamongpraja Belanda memerintah dengan tangan besi yang bersarung beledu.[86] Hubungan atasan-bawahan ini juga diberi warna tradisional dengan penggunaan istilah-istilah kekerabatan. Bupati dianggap sebagai "adik" residen.[87] Dalam kenyataannya, sejumlah pejabat pamongpraja Belanda yang disebarkan dalam pemerintahan kolonial dan menempati kedudukan-kedudukan yang dominan, melakukan apa yang dapat dinamakan fungsi "Saudara Tua". Mata tajam pejabat-pejabat Belanda "hadir di mana-mana" semenjak dilembagakannya "*duumvirate*" yang terdiri dari bupati dan asisten residen di satu pihak, dan patih atau wedana dan kontrolir di lain pihak. *Kontrolir* merupakan mata rantai utama antara pamongpraja Belanda dan pamongpraja Banten, oleh karena fungsinya sebagai pengawas menyebabkannya berhubungan langsung dengan pejabat-pejabat pamongpraja pribumi pada tingkat bawah, dan dengan desa. la ditugaskan untuk memberikan semua informasi yang diperlukan oleh residen, la benar-benar berfungsi sebagai unsur penghubung

antara pejabat-pejabat Eropa dan pejabat-pejabat pribumi.[88] Karena kedudukannya yang unik itu, ia selalu berada di lapangan dan mempunyai banyak kesempatan untuk berhubungan secara langsung dengan penduduk. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa ia mempunyai hubungan pribadi yang akrab dengan rakyat. Selain tidak ada ikatan-ikatan moral, ketiadaan sarana komunikasi bersama yang memuaskan tidak memungkinkan dikembangkannya pengertian yang timbal batik. Kontrolir bisa raja sekali-sekali berpartisipasi secara aktif, namun ia tidak mungkin menjadi anggota masyarakat Banten. Dalam banyak hal, kontrolir harus bertumpu kepada informasi yang diberikan oleh kepala desa dan pejabat-pejabat sub-distrik. Oleh karena sering terjadi mutasi, hubungan antara pejabat-pejabat administratif Eropa dan pejabat-pejabat administratif pribumi relatif singkat saja. Khususnya di Banten, administrator-administrator Belanda harus menghadapi satu kompleks kecurigaan, salah pengertian, perlawanan negatif dan sabotase yang sangat rumit. Selain itu nampaknya pejabat-pejabat Eropa menghadapi suatu *esprit de corps* yang kuat di kalangan pejabat-pejabat pamongpraja Banten yang menyebabkan penyelewengan-penyelewengan administratif jarang dapat disingkapkan. Kecenderungan untuk melakukan "t*utupen*" ini sangat menyolok,[89] tidak hanya di kalangan pejabat-pejabat Banten sendiri, melainkan juga di kalangan administrator-administrator Belanda.[90]

Mengenai peristiwa Cilegon, selama bertahun-tahun sebelum meletusnya pemberontakan itu tidak ada samasekali hubungan yang erat antara pejabat-pejabat Banten dan pejabat-pejabat Belanda. Ledakan yang mendadak itu sangat mengejutkan pejabat-pejabat Belanda, oleh karena mereka samasekali tidak menerima informasi mengenai situasi yang sebenarnya di daerah itu. Ketidaktahuan mereka itu hampir-hampir tak dapat dipercaya, dan sebagai akibatnya, umum menyangsikan apakah pejabat-pejabat Belanda di Banten benar-benar cocok untuk tugas mereka. Untuk memahami lebih baik situasi pada waktu itu, beberapa pejabat Belanda perlu kita soroti secara lebih tajam. Pertama-tama, Residen Engelbrecht oleh orang-orang sezamannya ia dilukiskan sebagai orang yang bukan saja tidak konsisten dalam kebijaksanaannya akan tetapi juga tidak dapat dihubungi oleh bawahannya. Ia hebat dalam soal-soal kecil, seperti apa yang dinamakan "*batcircular*" (surat edaran mengenai kalong) dan larangan untuk menanam pohon buah-buahan di pinggir jalan; akan tetapi ia mengabaikan soal pembangunan jalan, jembatan dan pasanggrahan, yang begitu diperlukan di Banten. Yang menimbulkan rasa tak senang di kalangan luas adalah kebijaksanaannya mengenai pengangkatan dan pemecatan pejabat pamongpraja. Rupa-mpanya ia lebih menyukai anggota-anggota keluarga Banten yang terkemuka.[91] Baik di kalangan pamongpraja Banten maupun di kalangan orang-orang Belanda Engelbrecht tidak disenangi. Ia terkadang mencampuri urusan pribadi bawahannya.[92] Untuk melengkapi daftar kekurangan-kekurangannya, perlu disebutkan bahwa, mengenai kemampuannya sebagai administrator, kebijaksanaan Engelbrecht yang lemah sangat merugikan prestise pejabat-pejabat pamongpraja Belanda. Dikabarkan bahwa ia mudah dipengaruhi oleh Bupati Serang; dan sudah barang tentu residen, yang belum begitu lama tinggal di Banten itu bukan merupakan tandingan orang kawakan seperti Gondokusumo, yang kekuasaannya sudah berakar dalam masyarakat Banten. Umum mengetahui bahwa seringnya penggantian pejabat-pejabat Belanda sangat menguntungkan pejabat-pejabat pamongpraja Banten.[93]

Kebanyakan pejabat Belanda di bagian akhir tahun-tahun delapan puluhan dianggap tidak cocok untuk bertugas di Banten. Meskipun sebagian di antara mereka memiliki kualifikasi yang baik, mereka gagal menyelenggarakan satu administrasi yang baik. Secara sambil lalu perlu dikemukakan bahwa Banten sejak dulu merupakan sebuah keresidenan yang sulit diperintah dan penguasaan di sana pada umumnya dianggap sebagai semacam hukuman. Sebagai akibatnya, pejabat-pejabat Belanda yang ditempatkan di Banten tidak selalu tergolong ke dalam *fine fleur korps* pamongpraja.[94] Di antara administrator-administrator Belanda di Banten yang kita soroti, pertama-tama kita ketengahkan asisten residen Caringin, van der Meulen. Pengalamannya di Priangan dan pengetahuannya mengenai rakyat, bahasa mereka dan kebudayaan mereka, membuat dia secara teknis cocok untuk jabatannya itu. Ia dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya akan tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghilangkan jarak antara dia dan rakyat, Berbeda dengan van der Meulen, rekan sejawatnya di L,ebak, van der Ven, mempunyai pengetahuan yang sedikit sekali mengenai bahasa Melayu,

dan hal itu sangat mengbambat komunikasinya dengan pejabat-pejabat Banten. Yang disebut terakhir ini sangat mencela sikapnya yang lamban dalam menangani soal-soal administratif. Keluhan yang serupa dikemukakan mengenai Borgerhoff van den Bergh, asisten residen Pandeglang. Ia menunjukkan sikap masa bodoh terhadap pekerjaan rutin administrasi dan, seperti dikemukakan oleh seorang penulis anonim: andadikata di daerahnya terjadi apa yang telah terjadi di Cllegon, pastilah ia akan menjadi korban pembunuhan.[95] Sebelum kita membicarakan Gubbels, seorang di antara *dramaris personae* utama dalam peristiwa Cilegon, terlebih dulu perlu disebutkan para kontrolir. De Chauvigny de Blot dari Serang, Maas dari Caringin dan Hermens dari Pandeglang, semuanya merupakan pejabat-pejabat yang rajin, berjasa dan cukup ambisius; sebaliknya, rekan sejawat mereka di Gunung Kencana, Meyer, tidak bisa akur dengan pamongpraja pribumi oleh karena perangainya buruk. Namun demikian, disesalkan bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang banyak bergaul dengan penduduk atau mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengetahui banyak tentang apa yang terjadi di kalangan penduduk. De Blot tidak mengetahui apa-apa tentang komplotan dan rencana-rencana kaum pemberontak di daerahnya sebelum pemberontakan itu meletus.[96]

Last but not least, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Gubbels, asisten residen Anyer pada saat pemberontakan. Dalam kehidupan pribadinya, ia dikenal sebagai seorang yang jujur, suami dan ayah yang baik, dan seorang yang berpendidikan baik. Ia senang sekali menyendiri dan menyibukkan diri dengan belajar bahasa Italia dan Spanyol atau dengan pekerjaan ilmiah. Tidaklah mengherankan bahwa ia tetap merupakan orang asing di daerah administratifnya, oleh karena ia membatasi kontaknya dengan pejabat-pejabat Banten hanya pada hal-hal yang paling perlu saja. Konferensi bulanan diganti dengan "briefing" secara perorangan di rumah asisten residen. Orang menyangsikan apakah Gubbels mempunyai minat terhadap soal-soal yang menyangkut rakyat. Menurut kabar, ia tidak bermaksud tinggal di Indonesia lebih lama dari seperlunya dan keinginannya hanyalah secepat mungkin dipensiun agar ia bisa hidup tenang di Negeri Belanda bersama keluarganya.[97] Istrinya berperangai buruk, sakit-sakitan dan selalu merindukan tanah airnya. Hal itu menambah ketidakpopuleran keluarga itu di lingkungannya dan membuat mereka lebih terpencil lagi.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa hubungan yang terlalu akrab antara administrator-administrator Belanda dan pejabat-pejabat Banten mengandung bahaya, namun sikap yang angkuh dan menjauhkan diri dari masyarakat akan mengakibatkan pejabat yang bersangkutan tidak memiliki prasyarat untuk melaksanakan administrasi yang baik, yakni pengetahuan secara pribadi mengenai daerah dan rakyatnya. Seperti telah dikemukakan di atas, seringnya terjadi mutasi juga merupakan penyebab kenyataan bahwa pejabat~pejabat Belanda tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengenal daerah tempat mereka ditugaskan. Satu sumber benturan yang lebih serius dan menyebabkan frustrasi yang lebih besar lagi adalah kecurigaan di pihak setiap orang Banten mengenai motif-motif pemerintah kolonial untuk terus-menerus mengubah peraturan-peraturan mereka pada umumnya, dan mengenai sikap pemerintah terhadap soal-soal agama pada khususnya. Soal ini merupakan yang paling penting bagi terjadinya salah pengertian.[98]

Selain pengetahuan praktis yang cukup mengenai masyarakat, diperlukan syarat-syarat lain jika orang ingin menunaikan dengan baik tugas yang pelik, yakni menyelenggarakan kekuasaan secara hati-hati dan memperoleh kepercayaan rakyat. Itulah sebabnya mengapa pejabat-pejabat seperti Engelbrecht, Gubbels dan kebanyakan pejabat pamongpraja Belanda di Banten dalam bagian akhir tahun-tahun delapan puluhan tak boleh tidak harus mengalami kegagalan dan, yang lebih buruk lagi, mengapa mereka secara tidak sadar menimbulkan kecemasan yang luas dan bersamaan dengan itu kecenderungan untuk memberontak. Secara kasamya dapat dikatakan bahwa pejabat-pejabat Belanda dan Banten mengadakan kontak sosial satu lama lain dengan membawa nilainilai dan sistem-sistem kepercayaan yang berbeda secara mendasar. Seperti akan kita lihat nanti, persoalan utama dalam peristiwa Cilegon bukanlah pertama-lama diskriminasi rasial, melainkan dominasi politik asing dan gejala yang menyertainya, yakni pemerintahan "orang-orang kafir".

SITUASI POLITIK DALAM TAHUN-TAHUN 1870-AN DAN 1880-AN

Pengamatan kita yang terakhir terutama ditujukan terhadap beberapa aspek situasi politik di Banten selama dua dasawarsa terakhir sebelum pecahnya pemberontakan tahun 1888. Bukti-bukti yang tak meragukan lagi tentang adanya ketidakstabilan politik yang terus-menerus di Banten adalah banyaknya perbentengan-perbentengan yang tersebar di seluruh daerah itu: Serang, Anyer, Caringin, Cimanuk, Rangkasbitung, Pandeglang, dan Tanara. Di sana ditempatkan satuan-satuan militer yang masing-masing berkekuatan sekitar dua puluh lima orang. Sudah semenjak tahun 1870 detasemen-detasemen itu dianggap berkelebihan, namun baru dalam tahun 1876 satuan-satuan tentara itu ditarik dari Caringin, Pandeglang, Rangkasbitung dan Tanara. Bagi kita, penarikan tentara itu kelihatannya terlalu pagi, namun pihak Belanda baru menyadarinya kemudian.

Adalah jelas bahwa adanya perbentengan-perbentengan itu merupakan peringatan yang tetap bahwa pemerintah kolonial setiap saat siap untuk menggunakan kekerasan guna menindas pemberontakan rakyat. Sebenarnya, di kalangan pemerintah terdapat kecurigaan yang besar mengenai kegiatan pemimpin-pemimpin agama.[99] Di dalam laporan-laporan resrni, kegiatan-kegiatan itu selalu mendapat perhatian yang khusus. Mengenai situasi politik dalam bagian awal tahun-tahun tujuh puluhan, laporan-laporan itu menyatakan bahwa rakyat Banten hidup tentram dan bahwa pengaruh pemuka-pemuka agama hampir tak ada artinya.[100] Hal itu mungkin benar sejauh yang mengenai pengaruh para penghulu, yang diangkat oleh pemerintah Belanda setelah dihapuskannya jabatan *Fakih Najamudin* dalam tahun 1868.[101] Sebenarnya, sejak meninggalnya Haji Mohamad Adian dalam tahun 1859, tidak diangkat *Fakih Najamudin* yang baru sebagai penggantinya.[102] Sejak tahun itu, bupati dalam kenyataannya ditugaskan untuk mengawasi soal-soal keagamaan di daerahnya.[103] Langkah penting ini yang mengarah kepada sekularisasi tidak menimbulkan reaksi yang hebat dari pihak kaum elite agama, yang hanya merasa kecewa tanpa berbuat apa-apa ketika salah satu lembaga mereka yang otonom dihapuskan oleh pemerintah. Satu faktor lainnya perlu disebutkan yang juga dianggap sebagai penyebab pergolakan politik yang silih berganti di Banten. Daerah itu rapa-rupanya terlalu kecil bagi pembentukan sebuah unit administratif yang mandiri di dalam kerangka birokrasi yang modern. Pemindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain menimbulkan perlawanan yang sengit dari pamongpraja pribumi, yang pada dasarnya hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan kedudukan mereka yang sudah berakar di tempat mereka. Dalam hubungan ini, pejabat-pejabat Belanda memandang golongan pamongpraja yang seperti itu sebagai penyakit kanker dalam situasi politik di Banten.[104]

Sebagai penutup kiranya perlu dikemukakan bahwa di dalam masyarakat Banten, kaum elite yang berkuasa tidak terdiri dari satu golongan yang sepenuhnya merasa terikat kepada universalisme kepamongprajaan, dan satu golongan lainnya yang sepenuhnya merasa terikat kepada partikularisme kekerabatan; mereka terdiri dari perorangan-perorangan yang berusaha mengikuti kedua pola itu. Dualitas kesetiaan institusional itu di kalangan pamongpraja Banten sesungguhnya menandai tahap pertengahan jalan dalam perkembangan politik dari pemerintah tradisional menuju pemerintahan yang modern yang berdasarkan kekuasaan yang rasional-legal. Di dalam kerangka kemasyarakatan Banten, perkembangan itu menimbulkan perasaan sakit hati dan perlawanan di kalangan elite agama, yang mempunyai kekuasaan karismatik yang efektif terhadap penduduk. Dilihat dari segi ini, memang sudah sewajarnya bahwa ketegangan-ketegangan politik yang berlangsung terus sering kali menjelma dalam bentuk konflik di antara golongan-golongan yang tak kenal kompromi -para kiyai dan haji melawan pamongpraja yang modern- yang terikat kepada nonna-norma dan nilai-nilai yang saling bertentangan.

e-books a.mudjahid chudari 2006

[1] Konsep mengenai pemerintahan sebagai satu proses golongan (group process/ dapat ditemukan dalam karya-karya Bently (1908), khususnya Bab VII; Truman (1951), khususnya keempat bab pertama; tentang konsep Easton mengenai proses politik dilihat dari segi interaksi antara pelbagai golongan sosial, lihat Easton (1953), hal. 171-200.

[2] Mengenai ketiga tipe kekuasaan, lihat Weber (1964), hal. 324-429.

[3] Parsons (1951), hal.101-112.

[4] Lihat BKI (1856), hal. 155-159; bandingkan Malaka dengan Mataram; van den Berg, dalam BKI, Vol. LIII (1901), hal. 45-63.

[5] Mengenai pelbagai fungsi syahbandar, lihat Bab II, catatan kaki no. 89.

[6] Van Vollenhoven, Vol. I (1931), hal. 714; lihat juga BKI (1856), hal. 101-170.

[7] Satu pengecualian adalah jabatan kepala daerah Caringin, yang turun-temurun; lihat van Vollenhoven, Vol. I (1931), hal. 714.

[8] Bandingkan fungsi bekel di Vorstenlandern (Principalities), di mana kekuasaan raja yang sewenang-wenang telah menurunkan kedudukan pejabat desa ini menjadi pemungut pajak raja; lihat tulisan Rouffaer "VorstenLaoden" dalam Adatrechtbundels, Vol. XXXIV (1931), hal. 233-378. Di bawah kekuasaan Belanda, jabatan *ngabeuy* dipegang oleh apa yang dinamakan *mandoor*. Lihat Bergsma, Eindresume,' Vol. III (1896), Appendix, ha1.170-171.

[9] Mengenai struktur administrasi yang patrimonial, lihat Bendix (1962), hal. 346-347; juga van Leur (19s5), hal. 137-139. Cf. van der Sprenkel, dalam History and Theory, Vol. III (1964), hal. 348-370; dalam artikel ini terdapat penilaian dan kritik mengenai teori Weber tentang birokrasi patrimonial, dengan acuan khusus masyarakat Cina.

[10] BKI (1856),hal. 107-110.

[11] Pemberontakan pimpinan Kiyai Tapa dari 1748 sampai 1751 merupakan satu contoh yang baik sekali mengenai peranan politik pemuka-pemuka agama di dalam sebuah negara tradisional; Chat Stapel, Vol. IV (1938-1941), hal. 197-198; juga van der Aa dalam BKI, S. IV, Vol. V (1881), hal. 1-128. Mengenai suatu pembahasan umum tentang antagonisme antara kedua kelompok dalam elite agama, lihat Pigeaud, Javaansche Beschavingsgesehiedenis, MS. no. H. 717 a-c dari Koniriklijk InsNtuut voor Teal-, Land en Volkenkunde.

[12] Peperaogan memperebutkan takhta di Banten terjadi dalam tahun-tahun 1682, 1748 dan 1805; IBrat BKI, S.IV, Vol. V (1881), hal. 1-128; Kielstra (1917), hat. 34-58.

[13] Lihat Rouffaer, dalam Adanechtbundels, Vol. XXXIV (1931), hal. 233278; juga BKI, (1856), ha1.107-170. Cf. Bab II, catatan kaki no. 30.

[14] Lihat Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832), hal. 167-168; juga laporan Residen Tobias dalam TNI (1870), no. 2, hal. 319-327.

[15] Lampung, Tangerang dan Jasinga ditempatkan di bawah satuan-satuan administratif lain, sesuai dengan peraturan 22 Nov. 1808; lihat Daendels (1814), hal. 56.

[16] Mengenai daftar lengkap sultan-sultan Banten, lihat Lekkerkerker (1938), hal. 346-347. Keenam sultan terakhir adalah:

1. 1802-1805 S. Abdulfath Mohamad Mukhyi'din Zainu's Salihin
2. 1805-1808 S. Abu'n-Natsr Mohamad Ishak Zainu'l Mustakin (saudara no. 1)
3. 1808-1810 S. Abut-MafakhirMohamad Aliudin II (anak no. 2)
4. 1810-1813 S. Mohamad bin Mukhyi'din Zainu's Salihin (anak No. l)
5. 1814-1815 S. Mohamad Safiudin
6. S. Mohamad Rafiudin (anak no. 5)

[17] Dari segi status dan kekuasaan batas diadakan pembedaan antara bupati-bupati di pelbagai daerah di Pulau Jawa, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Lihat

artikel-artikel Resink mengenai kedudukan bupati, dalam ITR, Vol. CXLIX (1939); Vol. CL (1910); khususnya Vol. CXLIX (1939), hal. 732-775.

[18] Mengenai deklarasi yang menyatakan Banten sebagai daerah kekuasaan pemerintah dan menghapuskan perbudakan dalam tahun 1808, lihat Daendeh (1814), hal. 56.

[19] Menurut peraturan 22 Agustus 1810, dataran rendah dibagi menjadi dua kabupaten, yakni bagian barat dan bagian utara, sedangkan Banten Selatan diperintah oleh sultan; lihat Daendels (1814), Appendix no. VII.

[20] Van Deventer, Vol. I (1891), hal. 147-148.

[21] Lihat catatan kaki no. 15: Sultan Zainul'1 Mustakin diasingkan ke Batavia oleh Daendels dalam tahun 1808 dan kemudian oleh orang-orang Inggris dibuang ke Surabaya, di mana ia meninggal dunia dalam tahun 1848; Sultan Aliudin II diturunkan dari takhta dalam tahun 1810 dan diasingkan ke Batavia, kemudian dalam tahun 1826 dipindahkan ke Surabaya, di mana ia meninggal dunia dalam tahun 1849. Lihat Laporan Residen Tobias, dalam TNI (1870), no. 2, hal. 319-320; lihat juga Roorda van Eysinga, Vol. III, bagian 2 (1842), hal. 308.

[22] Sultan Rafiudin hidup bersama keluarganya di bagian selatan Surabaya. la seorang yang sangat pasif dan didominasi oleh istrinya. Meskipun pendapatannya 400 gulden setiap 10 hari, ia tak urung batas memikul beban utang akibat keborosan keluarganya; lihat TNI (1859), no. 1, hal. 29-30.

[23] Dalam tahun 1856, 14 anggota keluarga sultan menerima subsidi bulanan antara 100 dan 8 gulden, menunrt tingkat kebangsawanao mereka; lihat OIB. 22 Apr. 1856, no. 4 dan 17 Mei 1862, no. 25.

[24] Gelar bupati mengingatkan orang kepada suatu jabatan di zaman kesultanan yang tingkatnya boleh dikatakan rendah dalam hirarki; ketika itu ada jabatan tumenggung yang ditugaskan mengurus istal kuda, dapur atau kebun sultan. Lihat De Locomotief 3 Nov. 1888.

[25] Lihat Regeeringsalmonak, 1821-1833. Beberapa nama di antaranya adalah: P.A. Adisantika, P.A.A. Senajaya, R.B. Dipaningrat, R.A. Jays Kusumaningrat, R.B. Nitinegara.

[26] Seperti di daerah-daerah lainnya, pengangkatan bupati baru sedapat mungkin juga didasarkan atas prinsip keturunan, akan tetapi dengan syarat bahwa kualifikasi-kualifikasi lainnya tidak boleh diabaikan. Lihat Schrieke (1955), ha1.187-188.

[27] OIB. 5 Juli 1839, no. 14, mengenai Mandura Raja Jayanegara; OIB. 16 Sept. 1849, no. 12, mengenai Condronegoro dan Natadiningrat; OIB. 28 Sept. 1874, no. 8, mengenai Sutadiningrat.

[28] Lihat Appendix III.

[29] Beberapa contoh: Mandura Raja Jayanegara kawin dengan Ratu Siti Aisah, Condronegoro dengan Ratu Siti Aminah, Kusumanegara dengan Ratu Maju, Sutadiningrat dengan Ratu Siti Saodah dan kemudian juga dengan Ratu Hamsah. Lihat Appendix III.

[30] Surat resmi Residen Banten,18 Des. 1883, dalam MR 1884, no. 26.

[31] Dokumen-dokumen resmi mengenai pemberontakan Cilegon tidak memuat petunjuk bahwa Ratu Siti Aminah terlrbat di dalam komplotan itu.

[32] Disinggung dalam Bab II, haL 56-57.

[33] Lihat Appendix III.

[34] Surat resmi Residen Banten, 18 Des. 1883; lihat juga surat rahasia Residen Banten, 7 luli 1889, no. 249, dalam MR 1889, no. 597. Menurut hemat penulis, kelemahan Gondokusumo lebih disebabkan oleh keanggotaannya dalam tarekat Kadiriah. Lihat WNI (1888-1889), hal.110.

[35] Ratu Hamsah adalah soal Ratu Siti Aminah dari perkawinannya dengan Tubagus Makhmud;

lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 40, ia adalah istri kedua Sutadiningrat. Lihat surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no.249. Ia lebih dikenal sebagai R.A. Pujaningrat; lihat Groenhof (1920), hal. 3.

[36] Mengenai keborosan istti kedua Sutadiningrat, lihat surat resmi Residen Banten, 7 Iuli 1889, no. 249.

[37] Peranannya mengingatkan kita kepada peranan Ratu Syarifa, yang berhasil menjadikan kemenakannya orang yang berhak atas takhta, meskipun ia bukan keturunan bangsawan. Lihat BKI, S. IV, Vol. V (1881), hal.1-128.

[38] Java Bode, 18 Agustus 1888, hal. 194. Artikel itu didasarkan atas catatan-catatan pengadilan yang berkenaan dengan penuntutan atas Sabidin. Cf. Surat resmi Residen Banten, 19 Mei 1882, La P, dalam MR 1882, no. 592.

[39] Java Bode, 18 Agustus 1888, hal. 194; juga dalam van Sandiek (1892), hal. 131.

[40] Mengenai Jayakusuma, lihat Bab II, hal 60.

[41] Java Bode, 18 Agustus 1888, hal. 194; lihat juga van Sandick (1892), hal.131-138.

[42] Surat rahasia Residen Banten,19 Mei 1882, L^{a} P.

[43] Van Sandick (1892), hal. 136: Surat resmi Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58.

[44] Beberapa aspek dari komplotan itu akan dibahas dalam Bab IV. Kami sudah menyebut Jayakusuma dalam hubungan dengan penyerobotan tanah; lihat Bab II, hal. 60.

[45] De Jonge, Opkomst, Vol. VII (1873), hal. 394 ff.

[46] Daendels (1814), Appendix no. VII; van Deventer, Vol. I (1891), hal.147.

[47] Laporan Residen Tobias, dalam TNI (1870), no. 2, hal. 321-332.

[48] Lapotan mengenai situasi politik di Pulau Jawa, dan khususnya di Banten; dalam Exh. 27 Agustus 1851, no. 220, hal. I-7.

[49] Ibidem.

[50] *Wiriadijaya* di masa kecilnya lebih dikenal sebagai *Boncel;* berkat perlindungan seorang Eropa di Bogor, ia mencapai karier yang baik dalam dinas pamongpraja. Lihat A Djajadiningrat (1936), hal. 111.

[51] OIB. 8 Nov. 1864, no. 18. Lihat juga Appendix III.

[52] Hak-hak turun-temutun para bupati menjadi satu kebiasaan, meskipun tidak ditetapkan secara tesmi. Berkat kesetiaan para bupati dalam Perang Jawa (1825-1830), hak-hak itu dijanjikan dengan khidmat. Mengenai perkembangan hak-hak itu, Chat van Delden (1862), dan karya yang lebih baru, Schrieke (1955), khususnya hal. 201-221.

[53] Mengenai bebetapa fakta yang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang Condronegoro dan Gondokusumo, lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 40.

[54] Karta Natanegara adalah anak Raden Mohamad Tahir dan saudara bupati Bogor, Witanata, lihat 7NI, S. VII, Vol. 3 (1845), hal. 484; van Sandick (1892), hal. 218.

[55] OIB. 8 Maret 1876, no. 17; Botaviaaaeh Handelsblad, Mail Editie (1885), hal. SIO; lihat juga van Sandick (1892), ha1.14-15.

[56] Lihat van Delden (1862), hal. 42. Dalam pengangkatan bupati-bupati di Banten selalu dipakai kriteria tersebut. Lihat laporan mengenai situasi politik di Pulau Jawa, dalam Exh. 27 Agustus 1851, no. 220 dan juga Exh. 14 Desember 1852 no. 438. Mengenai penyelewengan-penyelewengan dalam pengangkatan pejabat-pejabat pamongpraja pribumi dalam bagian akhir abad XIX, lihat Catalan Snouck Hurgronje, 15 Agustus 1892. Lihat juga di bawah, Bab IX, hal. 400.

[57] Pejabat-pejabat pamongpraja yang berdarah bangsawan dan yang berasal dari rakyat biasa tidak diperlakukan sama; penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh yang disebut pertama tidak mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang berat dibandingkan dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh yang disebut belakangan, liltat WNI (1888-1889), hal. 10-11. Bandingkan dengan kasus-kasus di daerah-daerah lain di Jawa, lihat van Helsdingen, dalam KT, Vol. I (1912), hal. 196. Di salah satu keresidenan terdapat dua bupati, 12 wedana dan asisten wedana, 2 Jaksa dan 5 mantri, semuanya dari keluarga yang sama. Satu contoh lain disebutkan dalam IG (1881), no. 2, hal. 625 f. Di dalam satu keresidenan terdapat seorang bupati, seorang patih, seorang ajun kolektor, 5 dari 6 wedana dan 2 dari 6 asisten wedana. Khususnya mengenai Banten, perlu disebutkan keluarga Djajadiningrat; lihat Appendix III.

[58] Lihat WNI (1888-1889), hal. 11.

[59] Mengenai kepribadiannya, lihat deskripsi dalam Laporan DDI, hal. 153-160.

[60] Pengangkatan Suria Nataningrat sebagai bupati Lebak dianggap sebagai satu kesalahan politik yang besar dari pihak Spaan; lihat surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 249. Pengangkatan Karta Natanegara merupakan sukses. Lihat selanjutnya: De Locomotief, 28 Juli 1888. Mengenai Suria Nataningrat, lihat juga van Sandick (1892), hal. 11-22; Levyssohn Norman dalam Eigen Heard (1888), hal. 94-96.

[61] Lihat Laporan DDI, hal. 153-160. Lihat juga pengaduan-pengaduan yang dilancarkan terhadap R. Penna seperti yang dikemukakan dalam 4 surat kaleng yang dikirimkan kepada Direktur Departemen Dalam Negeri; renvooi (referensi) pemerintah tanggal 16 Juli 1888 no.12,372 dan no.12,373 28 Juli 1888, no. 13, 240; dalarn Vb. 7 Feb. 1889, no. 4, sebagai Appendix I dari laporan DDI.

[62] Laporan DDI, hal.156.

[63] Lihat daftar pengaduan, catatan no. 61. Cf. pernyataan Raden Penna sendiri mengenai pertemuan-pertemuan keagamaan di pekarangan H. Makid. Lihat pernyataan Raden Penna tanggal 6 Des. 1888, dalam Exh. 28 Jan.1889, no. 74.

[64] Surat resmi Asisten Residen Lebak, 28 Juli 1876, no. 1051/19, dalam Exh. 10 Feb. 1887, K2.

[65] Lihat Catatan Snouck Hurgronje, 15 Agustus 1892; lihat juga di bawah, Bab IX, hal. 400.

[66] Satu contoh tentang proses sekularisasi adalah riwayat hidup Achmad Djajadiningrat; lihat otobiografinya, A. Djajadiningrat (1936).

[67] Parsons (1951), hal. 101-112; juga Hoselitz: Levels of economic performance and bureaucratic structures, dalam La Palombara, ed., (1963), hal.181-183.

[68] Dua sebab dapat dikemukakan untuk menjelaskan beban materi yang berat yang harus dipikul oleh pejabat-pejabat pamongpraja, yakni, semangat saling bantu dan struktur kekerabatan yang bilateral; inti keluarga besar selalu bergeser dan cenderung untuk berpusat pada anggota-anggota yang terkemuka. Perlu ditambahkan bahwa pejabat-pejabat pamongpraja diharuskan menyediakan pelbagai fasilitas bagi atasan-atasan mereka yang mengunjungi daerah mereka. Lihat WNI (1888-1889), hal. 9-10.

[69] Ini menyangkut tuduhan-tuduhan yang terkenal yang dilancarkan oleh Multatuli terhadap Karta Natanegara; lihat Multatuli, Volledige Werken, Vol. IX (1956), hal. 411-480. Di sini kita jumpai ketiadaan pengertian mengenai latar belakang struktur patrimonial-birokratia Jawa; cf. Wertheim (1964), hal.127-130. Lihat juga Bab II, catatan no. 68.

[70] Pemberontakan Wakhia tahun 1850, petistiwa Usup tahun 1851, peristiwa Mas Pungut tahun 1862, komplotan Kolelet tahun 1867, peristiwa Ciruas tahun 1869, dan akhirnya pemberontakan Cilegon tahun 1888. Semuanya, kecuali yang terakhir, akan dibahas dalam bab berikut.

[71] Mengenai contoh-contoh *knevelarijen* di daerah-daerah lain, lihat TNI (1851), no. 2, hal. 35-43; 246-266; TNI (1853), no. 2, hal. 259; TNI (1854), no. 1, hal. 35; TNI (1860), no. 2, hal. 258-260.

[72] Wertheim (1964), ha1.115-117.

[73] Mengenai Karta Natanegara, lihat surat rahasia dari Asisten Residen Lebak kepada Residen Banten, 25 Feb. 1856, no. 91, dalarn buku du Perron, Verzameld Werk Vol. IV (1956), hal. 278-283; lihat juga Multatuli, Volledige Werken, Vol. IV (1956), hal. 551. Mengenai Surianegara, lihat Keputusan Rahasia tanggal 24 Juni 1868, L[8] V. Mengenai penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Jayakusuma, lihat di bawah, Bab IV, hal.175.

[74] Antagonisme antara golongan elite agama yang resmi dan anggota-anggotanya yang babas merupakan satu ciri yang umum di negara-negara Islam yang tradisional; lihat Cahen, dalam von Grunebaum, ed., (1955), hal. 132-163; Wertheim (1959), hal.197; Gibb (1962), hal. 3-32. Mengenai pembahasan tentang faksionalisme ini di negara-negara Jawa, Lihat Pigeaud, (MS,1943-1945), hal.125.

[75] Mengenai angka-angka tentang jumlah jemaah haji yang telah bertolak dan kembali ke tanah air sejak 1876, lihat laporan tentang pelaksanaan ibadah haji selama tahun-tahun 1888 dan 1889, dalam Vb. 29 Jan. 1889, no. 46 dan Vb. 24 Jan. 1890, no. 53; Lihat juga Vredenbregt, dalam BKI, Vol. CXVIII (1962), hal. 91-154.

[76] Lihat van den Berg, dalarn TBG, Vol. XXYIII (1883), ha1.161 ff.; juga IG (1891), no. 2, hal.1143-1144.

[77] IG (1891), no. 2, hal. 1143-1144; Laporan DDI, hal. 213-219; lihat juga Snouck Hurgronje, dalarn VG, Vol. IV, bagian 2, (1924), hal. 420.

[78] Mengenai zakat dan fitrah, lihat Adatrechtbundels Vol. XIV (1931), hal. 118-120; lihat juga Resume (1871), hal. 237-244 atau TNI (1872), no. 2, hal. 358-363. H. Wasid rupa-rupanya berhak untuk menerima zakat dari Cibeber, lihat Appendix VIII.

[79] Mengenai persekutuan antara H. Wakhia dan Jayakarta, lihat pemberontakan Wakhia dalam Bab IV; persekutuan antara H. Wasid dan H. Tubagus Ismail dalam pemberontakan Cilegon akan dibahas dalam Bab-bab VI, VII dan VIII.

[80] Pusat-pusat keagamaan lama adalah: Banten, Kasunyatan dan Kanari, dimana masing-masing 60, 40 dan 20 orang petugas agama mengurus tempat-tempat keramat yang sudah tua yang berasal dari zaman kesultanan; lihat Exh. 14 Mei 1863, no. 5. Mengenai deskripsi tempat-tempat keramat itu, lihat Groenhof (1920).

[81] Surat rahasia dari Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58; cf. IG (1891), no. 2, hal.1144.

[82] Ibidem. Mengenai penanaman kebencian terhadap pemerintahan orang-orang kafir, lihat A. Djajadiningat (1936), hal. 21-23.

[83] Beberapa di antaranya: Pierson (1877), Clive Day (1904), Stokvia (1912), Rutgers (1937), Welderen-Rangers (1947), Furnivall (1948).

[84] Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 157; cf. Catatannya tertanggal 15 Agustus 1892.

[85] Mengenai perkembangan pamongpraja, lihat de Kat Angelino, Vol. II (1930), hal. 74-102; yang dibahas adalah temtama pamongpraja di Pulau Jawa.

[86] Burger, dalam Gedenkboek (1956), hal. 90; kiranya perlu disebutkan apa yang dinamakan cara "perintah halus" yang digunakan dalam memberikan perintah.

[87] De Kat Angelino, Vol. II (1930), hal. 40.

[88] De Kat Angelino, Vol. II (1930), haL 91.

[89] "*Tutupen*" berarti menutup-nutupi; dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah kebijaksanaan para pejabat untuk merahasiakan infotmasi techadap atasan mereka untuk mencegah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut atau jangan sampai mereka dipersalahkan melakukan kesalahan atau keteledoran administratif.

[90] Surat rahasia dari Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58; baru 8 hari setelah meletusnya pemberontakan, Asisten Residen Lebak dan Caringin secara resmi diberi tahu tentang hal itu; lihat WNI (1888-1889), hal. 44.

[91] Lihat WNI (1888-1889), hal. 10-11.

[92] Pernah ia melarang bupati pensiun dari Lebak untuk memilih seorang administrator perkebunan, seorang sahabat baik bupati, untuk menjabat ketua sebuah panitia penyelenggara pesta khitanan cucu-cucu bupati. Alasan utamanya adalah bahwa Residen ingin mendukung Asisten Residen Lebak yang bersikap bermusuhan terhadap administrator tersebut; lihat Bataviaaseh Handelsblad, Moil Editie (1885), hal. 510511.

[93] Antara tahun 1816 dan 1890 terdapat sekitar 23 residen, yang berarti bahwa masing-masing secara pukul rata bertugas selama kurang lebih 3 tahun di daerah itu. Lihat TBB, Vol. II (1888), hat. 270-271. Dari tahun 1839 sampai 1889 hanya ada 3 bupati yang bectugas di Serang; Karta Natanegara menjabat bupati di sana dari 1839 sampai 1865.

[94] Pemerintahan yang buruk, yang merupakan penyebab utama pemberontakan-pembecontakan yang silih berganti, merupakan buah hasil kebijaksanaan kolonial yang pada dasarnya buruk, yang tujuannya adalah agar Banten tidak menjadi satu beban keuangan bagi pemerintah kolonial, oleh karena sewa tanah dan sistem tanam paksa tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Oleh karena Banten sudah terkenal dengan keadaannya yang kacau, pejabat-pejabat pamongptaja yang terbaik berhasil untuk tidak ditempatkan di Banten. Lihat Snouck Hurgronje, dalam IG,Vol. IV, bagian 2, (19-24), hal. 421 - 422.

[95] WNI (1888-1889), hal.114.

[96] WNI (1888-1889),113-115.

[97] Lihat Laporan DDI, ha1.150-153.

[98] Peraturan-peraturan mengenai pemungutan pajak, seperti pemungutan pajak tanah secara komunal dan pembagian beban pajak itu di antara penduduk desa, pajak perdagangan yang harus dibayar oleh pemilik-pemilik perahu dalam tahun 1886, pajak kepala yang menggantikan wajib kerja pancen setelah tahun 1882; lihat Bab II.

[99] Mereka selalu diawasi dengan seksama dan perhatian khusus diberikan kepada semua kegiatan mereka, seperti terbukti dari laporan-laporan pemerintah. Lihat laporan-laporan politik tahun 1839-1849, tahun 1850 dan tahun 1851, masing-masing dalam Exh. 31 Jan. 1851, no. 27 bis; Exh.14 Des. 1852, no. 438; Exh. 27 Mei 1853, no. 225.

[100] Laporan Panglima Tentara,19 Juli 1870, dalam Vb.16 Sept. 1870. no. 25. Kebenaran laporan ini disangsikan oleh karena ia hanya merupakan hasil kunjungan keliling yang singkat di Banten, dan ditulis tanpa latar belakang pengetahuan yang cukup mengenai daerah itu. Mungkin saja untuk sebagian ia benar, jika diingat bahwa kegiatan-kegiatan H. Abdul Karim dari Tanara dimulai dalam tahun 1873; lihat Bab VI.

[101] Menurut peraturan tahun 1859 (Staatsblad no. 102). Bupati ditugaskan mengawasi urusan agama di daerahnya. Jabatan *Fakih Najamudin* merupakan Lembaga keagamaan dari zaman kesultanan yang terus dipertahankan setelah dihapuskannya kesultanan itu. Lihat juga Snouck Hurgronje, dalam Gobe dan Adriaanse, Vol. I (1957), hat. 772; juga Vb. 14 Mei 1968, no. 5.

[102] Kedua *Fakih Najamudin* yang terakhir adalah Tubagus H. Abubakar, yang meninggal dunia dalam tahun 1835, dan H. Mohamad Adian, yang meninggal dunia pada tanggal 4 April

1859. Menurut Keputusan tanggal 3 Juli 1819, no. 10, gaji Fakih Najamudin adalah 80 golden sebulan, dan sebagian daripadanya adalah untuk keperluan mesjid Banten dan membayar gaji panghulu Kanari yang tidak seberapa besarnya; uang itu ditahan oleh Fakih Najamudin. Lihat Vb. 3 Agustus 1867, no. 86 dan Vb. Mei 1868, no. 5.

[103] Staatsblad 1859, no. 102. Mengenai kenyataan yang sesungguhnya, lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. I (1957), hat. 742-762.

[104] WNI (1889-1890), hat. 564-566.

Bab IV

KERESAHAN SOSIAL

BEBERAPA CIRI DAN FAKTOR KERESAHAN SOSIAL

Ada pelbagai alasan untuk memusatkan peLihatian kita kepada keresahan sosial di Banten abad XIX. *Pertama*, keresahan itu dapat menjelma menjadi gerakan-gerakan sosial yang mendominasi gelanggang sejarah di daerah itu.[1] Pergolakan-pergolakan sosial yang disertai ambruknya nilai-nilai tradisional ditandai oleh ketidakpuasan, suasana panas dan gelisah di kalangan penduduk. Situasi sedemikian sarat dengan ketegangan dan konflik sosial, yang mudah meletus menjadi pemberontakan. *Kedua*, pembahasan mengenai keresahan sosial dan beberapa konsekuensi politiknya dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai kecenderungan untuk berontak atau kehadiran suatu tradisi pemberontakan di Banten. Keresahan yang sudah meluas di kalangan rakyat itu mengungkapkan dirinya sebagai ledakan-ledakan yang silih berganti, bukan hanya berupa kerusuhan-kerusuhan, tetapi juga berupa komplotan-komplotan dan kejahatan-kejahatan sosial. Bilamana situasi tidak memungkinkan rakyat untuk menyalurkan ketegangan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemberontakan, mereka mencari jalan keluar bagi frustrasi dalam gerakan-gerakan keagamaan. *Ketiga*, keresahan sosial juga harus dijelaskan sebagai fenomena sosial, yang mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak resmi di dalam suatu masyarakat yang tertindas. Di samping golongan-golongan elite atau para pemegang kekuasaan seperti yang disebutkan dalam Bab III, yang menjadi pokok peLihatian kita secara khusus di dalam bab ini adalah golongan elite revolusioner, yang rupa-rupanya memiliki kekuasaan yang efektif di luar bidang politik mereka yang memegang kekuasaan formal. Kegelisahan yang berlangsung terus di Banten merupakan satu ciri yang menyolok mata, yang mencerminkan pembusukan administrasi daerah.

Sepanjang abad XIX Banten merupakan gelanggang pemberontakan, sehingga cukup alasan untuk menamakannya sebagai tempat persemaian kerusuhan yang sudah terkenal.[2] Satu pandangan sepintas atas peta sejarah Banten Utara menunjukkan bahwa di sana tak ada satu pun distrik yang tidak terkena oleh kerusuhan-kerusuhan sosial.[3] Sesungguhnya, pemberontakan di Banten abad XIX bukan merupakan gejala yang sporadik, melainkan merupakan ciri yang umum, endemik dan simptomatik dari masyarakat. Catatan-sejarah memberikan kesan adanya ledakan pemberontakan-pemberontakan rakyat yang silih berganti, dengan kadar kehebatan dan lingkup yang berbeda-beda. Mau tak mau kita harus mengemukakan pertanyaan, mengapa kecenderungan untuk berontak seperti itu terdapat di Banten, meskipun sebenarnya peLihatian kita lebih tertuju kepada keadaan sosial golongan-golongan yang memberontak. Penjelasan-penjelasan dari segi kepribadian orang Banten yang sangat individualistis lebih bersifat spekulatif daripada kongklusif.[4] Sejauh kita dapat berbicara tentang suatu "tradisi pemberontakan", satu penjelasan historic dengan peLihatian khusus kepada faktor-faktor sosial akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik.

Faktor-faktor yang ikut menyebabkan terjadinya pergolakan-pergolakan dan keresahan sosial adalah kompleks dan beraneka ragam. Faktor-faktor seperti disintegrasi tatanan tradisional dan,proses yang menyertainya, yakni semakin memburuknya sistem politik, dan tumbuhnya kebencian religius terhadap penguasa-penguasa asing, sangat menonjol dalam banyak pemberontakan di Banten abad XIX. Dengan ambruknya kesultanan, sistem kontrol yang tradisional tak dapat berfungsi lagi. Suasana kacau yang sedikit-dikitnya bersifat umum menandai hari-hari terakhir kesultanan yang memudar dengan cepatnya. Keadaan tidak menentu yang timbul di daerah itu setelah ambruknya kesultanan, dan anarki umum yang

berlangsung kemudian, sedikit-banyaknya membantu munculnya unsur-unsur pembangkang yang berulang kali melakukan kerusuhan-kerusuhan. Selama administrasi Belanda belum dapat dikonsolidasikan dan seluruh struktur kelembagaan belum mantap, keadaan rusuh itu berlangsung tetus. Terutama selama bagian pertama abad XIX, Banten mengalami anarki hukum yang meluas, sementara kerusuhan timbal hampir tiap-tiap tahun sekali. Aparat pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif, sehingga unsur-unsur pembangkang menguasai daerah-daerah pedesaan. Kekuasaan dan kendali administratif semakin terlepas dari tangan para pejabat.[5] Juga di tahun-tahun kemudian dalam abad itu, ketika pemerintahan kolonial sudah jauh lebih mantap, kelalaian di bidang administrasi masih nampak jelas dan menggejala tidak saja dalam sikap pamongpraja yang kesetiaannya tidak bisa diandalkan melainkan juga dalam tekanan agresif kekuatan-kekuatan sosial yang tersembunyi. Adalah menarik peLihatian bahwa motivasi-motivasi yang dikemukakan oleh kaum pemberontak untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka dan untuk memperoleh dukungan rakyat, tidak partama-tama dikaitkan dengan perasaan dendam terhadap administrasi setempat melainkan semata-mata dengan kenyataan bahwa mereka diperintah oleh penguasa-penguasa asing. Kita tidak boleh lupa bahwa beberapa komplotan dihasut oleh pejabat-pejabat pamongpraja yang marasa dikecewakan oleh pemerintah kolonial.[6]

Yang perlu dicatat adalah bahwa aspek politik merupakan hal yang menonjol dalam semua gerakan sosial yang dibahas dalam bab ini. Kebencian rakyat terhadap pamongpraja Banten hampir sama mendalamnya dengan permusuhan terhadap penguasa-penguasa asing. Perlawanan terhadap sewa tanah merupakan hal yang kronis di daerah di mana agen-agen pemerintah kolonial berusaha memberlakukannya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bahwa perlawanan yang sengit terhadap pemungutan pajak berkembang menjadi pemberontakan-pemberontakan yang sesungguhnya.[7] Kegusaran penduduk terhadap perpajakan menjadi bertambah sebagai akibat langkanya uang dan rendahnya harga hasil-hasil pertanian. Tidak berlebih-lebihan kiranya jika dikatakan bahwa seringnya terjadi kerusuhan sosial merupakan konsekuensi langsung dari penetrasi perekonomian uang ke dalam masyarakat Banten. Selain menimbulkan kegusaran penduduk itu, pemerintah kolonial juga mengancam kedudukan istimewa kaum aristokrat lama dan kaum elite agama. Tersisihnya mereka di bidang politik rupa-rupanya telah menyebabkan mereka mudah terpengaruh untuk melakukan pemberontakan sebagai cara untuk menyalurkan ketidakpuasan dan rasa dendam mereka, dan sikap memberontak ini diperkuat lagi oleh kebencian religius mereka terhadap kekuasaan "orang-orang kafir". Tidak disangsikan lagi bahwa hampir semua pemberontakan diwarnai oleh faktor keagamaan itu.

Dalam mempelajari ciri-ciri Ichas pemberontakan-pemberontakan di Banten abad XIX, kita kiranya boleh membuat satu generalisasi: sikap bermusuhan terhadap kekuasaan asing merupakan satu ciri yang menonjol dari pemberontakan-pemberontakan itu. Sesungguhnya, pemberontakan-pemberontakan itu bersifat revolusioner dalam arti bahwa tujuannya lebih dari sekedar menghancurkan birokrasi yang korup; pemberontakan-pemberontakan itu bertujuan menumbangkan sistem pemerintahan yang dibangun oleh penguasa asing. Pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipandang sebagai usaha untuk merebut kendali politik dari golongan pamongpraja kolonial. Dalam adu kekekuatan yang final kekuasaan kolonial selalu menang, oleh karena golongan-golongan yang memberontak lemah di bidang organisasi dan strategi sebagaimana yang telah dikembangkan oleh penguasa-penguasa Eropa. Selain itu, mereka secara menyolok tidak memiliki sofistikasi dan kemampuan untuk mengutarakan gagasan-gagasari mereka. Kesudahan yang fatal itu juga ada kaitannya dengan satu karakteristik lain yang menonjol dari gerakan-gerakan itu yang dapat diberi cap "tradisional".[8]

Seperti yang dapat kita baca dalam catatan-catatan sejarah, di samping ketidaksenangan mengenai berbagai pajak dan pemerasan tenaga manusia untuk keperluan kerja bakti, soal pemulihan kesultanan merupakan satu tema umum. Dokumen-dokumen yang ada tidak memberikan banyak informasi mengenai apa yang sebenarnya mereka maksudkan dengan kebangkitan kembali kesultanan itu. Yang dapat kita ketahui hanyalah bahwa impian tentang kembalinya kesultanan itu kadang-kadang dikaitkan dengan janji untuk menghapuskap pajak-pajak.[9] Selain itu, orang mempertanyakan apakah kaum pemberontak mengidentitlkasikan

periode kesultanan dengan zaman keemasan. Kita dapat mengasumsikan bahwa bagi kaum pemberontak yang sedang melawan pembaruan-pembaruan yang ditimbulkan oleh penguasa kolonial, kesultanan mencerminkan suatu nilai tradisional dan oleh karena itu dapat dimanfaatkan sebagai lambang pemersatu. Mitos politik ini, yang diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan yang mengisyaratkan akan segera tibanya pemulihan kesultanan lama, dengan jelas menggarisbawahi watak tradisional dari kebanyakan pemberontakan. Sejauh gerakan-gerakan itu mengandung harapan akan kembalinya kesultanan, mereka dapat dilukiskan sebagai gerakan milenari. Sesungguhnya, aspek milenari dari cita-cita tentang kesultanan itu dapat dipahami sebagai gagasan yang menyatakan bahwa situasi kolonial bisa berakhir dan bahwa keselarasan lama yang terdapat dalam tatanan tradisional bisa dipulihkan. [10] Di sini satu di antara karakteristik-karakteristik utama milenarianisme dapat ditunjukkan dengan jelas, yakni penolakan yang mendalam dan total terhadap situasi sekarang. Satu hal lainnya yang menyolok adalah bahwa gerakan-gerakan itu pada dasarnya tidak jelas mengenai caranya kesultanan itu hendak dipulihkan. Selain itu, selama orang-orang keturunan langsung para sultan Banten masih hidup, pencalonan orang-orang lain dari kalangan bangsawan hanya dapat mempunyai fungsi simbolis dan bukan substansial. Oleh karena itu tidak mungkin pemulihan kesultanan itu dipahami sebagai satu tujuan politik yang kongkrit. Sesungguhnya, kesultanan dapat dipandang sebagai satu unsur esensial dari tatanan tradisional yang hendak dipulihkan oleh gerakan-gerakan itu.

Kedua ciri itu biasanya dihubungkan dengan satu ciri religius: dan hasilnya adalah satu sikap militan yang berakar di dalam doktrin tentang Perang Sabil, di mana terjalin hasrat yang menggelora untuk memulihkan kesultanan dan untuk menghapuskan kekuasaan asing. Doktrin tentang Perang Sabil merupakan satu kepercayaan yang laten di dalam masyarakat Muslim yang disaat-saat penderitaan ternyata merupakan satu kekuatan yang ampuh untuk menggerakkan masaa rakyat. Dengan tibanya pasang naik dalam gerakan kebangkitan kembali agama dalam bagian akhir abad XIX, ideologi ini telah sangat meningkatkan potensi agresif rakyat Banten. Permusuhan yang membara terhadap Belanda, kerusuhan-kerusuhan kecil yang terjadi dari waktu ke waktu, dan pergolakan besar dalam tahun 1888, semuanya dapat dianggap sebagai digerakkan oleh semangat keagamaan yang menyala-nyala, jika bukan fanatisme, yang mengandung gagasan Perang Sabil.

Dalam kaitan ini terlihat adanya satu kecenderungan religius atau magis-religius yang kuat, yang menampakkan diri dalam meluasnya dan seringnya penggunaan jimat di kalangan kaum pemberontak. Keyakinan akan kebenaran perjuangan mereka diperkuat secara positif oleh kepercayaan mereka terhadap kekuatan magis jimat-jimat itu, yang dianggap dapat melindungi pemakainya secara efektif terhadap segala macam kejahatan dan kenaasan dan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperoleh kekebalan. Dengan jalan memenuhi kebutuhan akan keamanan fisik dan material, kultus jimat itu memberikan dorongan spiritual yang sangat besar kepada perjuangan melawan kaum kafir. Pendek kata, semangat perjuangan mereka begitu menyatu dengan kepercayaan mereka sehingga kaum pemberontak merasa pasti akan memperoleh kemenangan terhadap pasukan pemerintah kolonial yang bersenjata modern.[11]

KEPEMIMPINAN REVOLUSIONER

Untuk memahami dengan lebih baik hakikat pemberontakan, kita tak boleh tidak harus mempelajari masalah kepemirfipinannya. Gerakan-gerakan sosial menjadi bertambah besar karena adanya ketidakpuasan yang umum, dan suatu ledakan hanya tergantung kepada munculnya pemimpin-pemimpin. Tidak lama setelah kesultanan dihapuskan, ketika keadaan menjadi sangat kacau dan seluruh tatanan sosial kelihatannya sudah hampir ambruk, muncullah pemimpin-pemimpin yang ditakdirkan untuk memimpin mereka yang merasa tidak puas dalam usaha melawan kekuatan-kekuatan yang dominan. Yang menyusun barisan kaum pembangkang untuk bangkit memberontak adalah orang-orang yang dipandang hina dan berada di luar unsur-unsur yang teratur dari situasi politik yang baru. Kaum elite pedesaan yang lama, yang terdiri dari para pemilik tanah yang terkemukan dan kaum elite agama, yang sejak

semula sudah merasa sakit hati, melancarkan kampanye untuk memberikan perlawanan yang gigih. Dan sesungguhnya, usaha yang terus-menerus dilakukan oleh kaum elite revolusioner ini untuk membakar semangat telah menjadikan Banten satu daerah yang bergolak selama beberapa dasawarsa. Dalam perjalanan waktu, pelbagai unsur sosial bercampur baur di dalam pemberontakan: anggota-anggota pamongpraja, bangsawan, orang-orang dari kalangan agama, anggota-anggota pengurus. desa dan orang-orang yang sudah dinyatakan di luar hukum. Sebagian besar dari mereka tergolong "elite inti" dalam tatanan tradisional yang lama, sedangkan satu golongan kecil memang sejak dulu dianggap sebagai orang-orang yang "beroposisi". Jadi tidak akan meleset kiranya jika dikatakan bahwa elite revolusioner berasal dari pelbagai lapisan sosial dan bahwa di antara gerakan-gerakan yang mucul dalam abad XIX tidak ada yang semata-mata merupakan pekerjaan satu kelas sosial saja dalam masyarakat Banten. Tidak disangsikan lagi bahwa rakyat biasa di pedesaan tidak merupakan pelaku tunggal dalam pemberontakan-pemberontakan itu. Seperti telah dikemukakan di muka, hampir semua pemberontakan dipimpin oleh orang-orang yang bukan petani biasa. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan keinginan-keinginan terpendam dari bagian terbesar kaum tani dan untuk menyalurkan kekuatan kaum tani yang tidak teratur itu menjadi satu tekanan yang efektif. Kaum tani merupakan kekuatan fisik yang utama dan oleh karena itu merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam pemberontakan-pemberontakan itu. Sumber-sumber utarna pimpinan revolusioner adalah kelas atasan lama di pedesaan, kaum elite agama dan kaum bangsawan. [12] Dengan sendirinya krisis-krisis sosial dan politik yang silih berganti di dalam masyarakat Banten merupakan faktor-faktor yang penting dalam pembentukan golongan elite revolusioner ini. Adalah jelas pula bahwa krisis-krisis atu sendiri mungkin juga dicetuskan oleh konflik-konflik di antara atau di dalam lingkungan golongan-golongan elite yang sedang berkuasa di Banten. [13] Juga perlu dikemukan bahwa sejumlah pejabat pamongpraja terlibat di dalam pemberontakan karena sakit hati, sedangkan yang lainnya hanya ikut-ikutan saja dan bergabung dengan kaum pemberontak oleh karena dibebaskan dari penjara oleh mereka. Dalam beberapa hal kategori pemimpin-pernimpin ini dapat dianggap sebagai orang-orang yang telah memulai komplotan-komplotan atau pemberontakan-pemberontakan. Satu pengkajian yang seksama mengenai sejarah pemberontakan-pemberontakan di Banten menyingkapkan adanya sirkulasi golongan-golongan elite revolusioner, dimulai dengan kelas terpandang yang lama yang memberontak, disusul oleh aristokrasi tradisional dan diakhiri oleh kaum elite agama. Sekian mengenai kaum elite revolusioner.

PERANAN UNSUR-UNSUR PERUBAHAN DALAM GERAKAN-GERAKAN PROTES

Satu aspek lain dari keresahan sosial yang harus kita bahas secara singkat adalah yang berkaitan dengan perampokan, penyamunan, pembegalan dan perbuatan-perbuatan lainnya di luar hukum; pendek kata, unsur-unsur perusuh yang berkeliaran di daerah itu. Mereka tak pelak lagi merupakan hasil satu masyarakat yang kacau, yang memanifestasikan protes mereka dengan tindakan-tindakan permusuhan yang aktif ditujukan terhadap masyarakat yang tidak mampu menjamin ketertiban dan keadilan. Khususnya dalam pertengahan pertama abad XIX, yang dinamakan perampok, bandit atau penyamun di Banten itu sering kali adalah seorang anggota kaum pemilik tanah yang terkemuka atau kaum aristokrat lama yang kehilangan harta bendanya, lalu menempuh jalan 'di luar hukum' ini untuk membela diri dan mempertahankan hak-haknya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bahwa "bandit-bandit" itu sering kali terpaksa bekerja sama dengan kaum pemberontak melawan pejabat-pejabat penegak hukum. Sebaliknya, kaum pemberontak dengan mudah berubah menjadi gerombolan-gerombolan perampok, sehingga orang tidak dapat menarik garis batas yang tajam antara pemberontak dan perampok. Pemberontakan dan perampokan kedua-duanya harus dipandang sebagai manifestasi keresahan sosial pada waktu itu dan sebagai protes-protes rakyat terhadap penindasan. Selain itu, perampokan atau penyarnun juga merupakan pencerminan yang jelas dari sikap umum yang masa bodoh terhadap ketertiban umum yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial. Karena dengan terang-terangan melawan pihak penguasa, bandit-bandit pemberontak itu memperoleh simpati yang laten dari pihak penduduk. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan

pelbagai tingkat pemberontakan yang berbeda-beda yang dibahas dalam bagian ini.[14] Sejarah Banten menunjukkan bahwa dalam pertengahan pertama abad XIX bandit-bandit pemberontak itu nampaknya mempunyai watak politik yang jelas karena mereka menghasut agar melakukan perlawanan yang gigih terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi menjelang tahun-tahun 1880-an, bandit-bandit itu menjadi perampok-perampok dan penyamun-penyamun belaka, yang tidak mempunyai ikatan dengan gerakan-gerakan pemberontakan dan yang tujuan utamanya melakukan penggarongan tanpa pilih bulu. Mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka sebagai penjahat karena beberapa sebab: pertama, tidak ada kohesi dan koordinasi di antara badan-badan penegak hukum; kedua, kecurigaan terhadap pamongpraja begitu mendalam di kalangan rakyat sehingga mereka tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan pejabat-pejabat dalam usaha menangkapi unsur-unsur perusuh; ketiga, di samping kondisi-kondisi politik dan sosial itu, keadaan alam dengan gunung.gunungnya, hutan-hutannya dan sebagainya merupakan tempat perlidungan dan persembunyian yang baik sekali. Dengan mulai menciutnya ruang sosial bagi cara-cara hidup di luar hukum, komunitas-komunitas keagamaan menjadi semakin penting sebagai pusat-pusat kegiatan komplotan dan gerakan.gerakan pemberontakan. Untuk memberikan isi kepada pernyataan secara garis besar ini mengenai pola-pola dan kecenderungan-kecenderungan umum tersebut, di bawah ini akan disajikan pelbagai contoh yang kongkrit.

SATU DASAWARSA SITUASI POLITIK YANG MEMBURUK (1808-1819)

Pada awal bab ini telah dikemukakan bahwa Banten sudah terkenal dengan pemberontakan-pemberontakannya. Dan memang, selama dasawarsa yang dimulai segera setelah Banten ditempatkan langsung di bawah pemerintahan kolonial, nampak dengan jelas suatu kecenderungan menuju situasi yang semakin memburuk di daerah itu - suatu proses yang mempercepat frekuensi gangguan-gangguan sosial yang meletus secara membabi buta. Kerusuhan-kerusuhan setempat terus bermunculan silih berganti, beberapa di antaranya berkembang menjadi pemberontakan yang sesungguhnya. Dalam tahun 1809 segerombolan apa yang dinamakan bajak laut mengibarkan bendera pemberontakan sebagai jawaban atas beban kerja yang melampaui batas yang dikenakan oleh Daendels.[15] Tindakan-tindakan pemerasan itu dengan lihainya dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak untuk menimbulkan kebencian terhadap pemerintah kolonial; penyulutan api pemberontakan dimaksudkan untuk membuat pemerintah kolonial merasa segan untuk melanjutkan pemerintahannya di daerah yang rusuh itu. Di tengah-tengah kekacauan politik, anarki, ambruknya sistem administrasi, dan silih bergantinya gelombang-gelombang kekerasan itu, Sultan dinobatkan kembali dalam tahun 1810 untuk memerintah Banten Selatan. Eksperimen itu dimaksudkan di satu pihak agar Sultan dapat mengerahkan kesetiaan dan dukungan penduduk, dan di lain pihak agar tembaga-lembaga pengawasan dapat bekerja. Akan tetapi ternyata di bawah pemerintahan Sultan tidak terjadi perbaikan situasi oleh karena administrasinya, sepanjang yang menyangkut pemeliharaan ketertiban dalam negeri, pada dasarnya lemah dan korup. Selama bertahun-tahun selanjutnya, keadaan di Banten terus kacau dan tidak aman.

Selama masa pemerintahan Sultan, golongan-golongan yang memberontak tetap aktif, Sebagian dari mereka melakukan penyamunan-penyamunan, dan yang lainnya terus membangkang terhadap pihak berwajib. Orang tidak dapat membedakan antara partisan-partisan yang berjuang untuk mengembalikan kesultanan dan penyamun-penyamun biasa. Gerombolan-gerombolan partisan, yang dipimpin oleh Ngabehi Adam, Haji Yamin, Ngabehi Utu dan Ngabehi Ikram, terdiri dari orang-orang gelandangan, bajak-bajak, budak dan kaum disertir. Bagi pemberontak-pemberontak ini, harta benda yang diperoleh dari perampokan agaknya tidak pertama-tama merupakan tujuan melainkan sekedar alat untuk membantu pengikut-pengikut mereka, dan untuk menarik lebih banyak pengikut. Hal itu menunjukkan bahwa arah tujuan mereka terutama bersifat politik. Sebaliknya, gerombolan-gerombolan penyamun di bawah pimpinan orang-orang seperti Mas Bangsa, Mas Bima, Satron dan Noriman, terutama didorong oleh nafsu memperoleh kekayaan, meskipun mereka sering kali menggembar-gemborkan

gagasan-gagasan politik tentang pemulihan kesultanan dan pembebasan dari belenggu kekuasaan orang-orang Eropa.[16] Dengan mengambil tindakan bersama, mereka mampu bertahan, sehingga sebagai akibatnya, daerah itu selama bertahun-tahun dilanda serbuan.serbuan mereka yang ganas dan menjadi porak-poranda. Serangan-serangan setempat yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan kecil diselingi dengan serbuan-serbuan besar yang dilancarkan oleh pasokan yang besar, dan taktik gerilya seperti itu menyebabkan pemerintah kolonial benar-benar tidak berdaya untuk mengatasi situasi secara efektif. Dalam tahun 1815 serangan-serangan yang tiada henti-hentinya ini memuncak dalam pengepungan terhadap keraton Sultan di Pandeglang. Gerombolan-gerombolan penyamun itu dipimpin oleh Noriman, yang juga dikenal sebagai Sultan Kanoman. Meskipun pasukan-pasukan pernerintah berhasil memukul mundur serangan itu dan memaksa gerombolan untuk mundur, namun sulitlah untuk mengalahkan mereka sepenuhnya selama mereka mendapat dukungan dan kesetiaan rakyat.[17] Kelompok-kelompok partisan itu mulai berpencaran begitu di antara pemimpin-pemimpin mereka yang terkemuka ada yang meninggal atau menyeberang ke pihak pemerintah. Akan tetapi masa kekacauan belum lagi berakhir oleh karena gerombolan-gerombolan perampok masih terus berkeliaran dan meranjah daerah-daerah pedesaan yang belum mempunyai alat kepolisian yang efisien atau yang keadaan medannya menyulitkan komunikasi. Terutama daerah-daerah pebukitan dan pegunungan merupakan tempat-tempat persembunyian yang baik bagi penyamun. Pasukan-pasukan pemerintah tidak pernah diberi kesempatan untuk berhadapan dengan mereka dalam suatu pertarungan yang menentukan; penyamun-penyamun itu melarikan diri atau menghilang begitu pasukan pernerintah mendekat. Jelas bahwa lingkungan fisik merupakan tempat persembunyian alarm yang aman, namun demikian landasan kekuasaan mereka terutama dibentuk oleh bantuan yang diberikan oleh penduduk setempat. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa riwayat hidup yang luar biasa dari beberapa di antara perampok-perampok yang legendarya diliputi suasana romantik dan dikagumi oleh sebagian besar penduduk.[18] Kedudukan penyamun-penyamun itu diperkuat oleh dukungan yang mereka peroleh dari luar Banten berupa senjata dan amunisi. Selain itu, nampaknya sistem komunikasi mereka lebih efektif daripada sistem komunikasi pemerintah.[19] Perlu ditekankan, bahwa dalam pemberontakan-pemberontakan itu, peranan yang dimainkan oleh para. Pemimpinnya sangat penting. Kebanyakan kegiatan mereka tergantung kepada inisiatif pemimpin sebagai perorangan. Ini berarti bahwa kematian pemimpin-pemimpin terkemuka seperti Armaya, Wahud, Satron, Pangeran Sane dan Mas Bangsa merupakan pukulan yang sangat besar bagi perjuangan mereka.[20] Namun demikian, kekuatan gerombolan-gerombolan itu dengan cepat pulih kembali dengan tampilnya pemimpin-pemimpin baru. Pada bagian akhir tahun-tahun 1810-an, Haji Tassin, Moba, Mas Haji dan Mas Rakka memimpin gerombolan-gerombolan bandit dan perampok yang memberontak dan yang mencakup pula orang-orang pelarian dan disertir. Mereka mulai melakukan perampokan-perampokan tanpa merasa takut akan ditangkap, oleh karena alat-alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban praktis belum ada. Sesungguhnya, di seluruh Banten Selatan ketika itu hampir terdapat kekosongan administratif. Sistem kepamongprajaan dan personil perpajakan sama sekali tidak memadai untuk menunaikan tugas mereka dan, seperti dikatakan oleh Residen de Bruyn, administrasi kolonial hanya dipatuhi jika digunakan kekuatan militer yang besar.[21] Kaum pemberontak masih dapat membebaskan rakyat dari pejabat-pejabat yang mereka benci: Mandoor Lebak dibunuh setelah ia menerima inspektur sewa tanah menginap di rumahnya. Di kemudian hari, dalam pemberontakan yang terjadi pada akhir tahun 1818 dan awal tahun 1819, beberapa anggota pamongpraja yang bertugas memungut sewa tanah juga menjadi korban serangan yang tak kenal ampun. Dengan cara itu, kaum pemberontak dapat merebut dukungan dan rasa hormat penduduk melalui citra mereka sebagai pembela kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, pejabat-pejabat menjadi terisolasi dan kekuasaan pemerintah dihalaukan dari daerah-daerah pedesaan. Tidak mengherankan jika kebanyakan pejabat pamongpraja yang berpangkat tinggi pada waktu itu tinggal di kota-kota.[22] Sebagai akibat kelalaian administratif dan ketiadaan pengawasan pemerintah, timbullah satu situasi yang melahirkan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi kaum pemberontak. Situasi ini membenarkan pemyataan di atas, yakni bahwa selama dasawarsa pertama rezim kolonial, Banten dengan cepat mengalami keadaan yang semakin memburuk: ketidakmampuannya memberikan perlindungan hukum kepada rakyat telah melemahkan kedudukan pemerintah,

yang pada gilirannya memberikan kesempatan kepada gerombolan-gerombolan perampok untuk mengembangkan kekuatan mereka, dan seterusnya.

PEMBERONTAKAN-PEMBERONTAKAN BERKALA ANTARA 1820-1845

Pembentukan sebuah organisasi administrasi baru pada pertengahan tahun 1819 dapat dipandang sebagai satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam tekadnya untuk memperbaiki situasi di Banten yang sudah berada di tepi kehancuran.[23] Masih disangsikan apakah tindakan itu merupakan langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti dikatakan beberapa tahun kemudian oleh seorang yang hidup di zaman itu: setelah kesultanan dihapuskan di Banten, tidak ada tahun yang lewat tanpa pemberontakan.[24] Data-data yang tersedia yang tidak lengkap, menyebutkan setidak-tidaknya empat pemberontakan besar dalam tahun-tahun dua puluhan, yakni yang terjadi dalam tahun-tahun 1820, 1822, 1825 dan 1827.[25] Mengenai kedua pemberontakan yang pertama, cukup dikemukakan bahwa pemberontakan tahun 1820 yang dipimpin oleh Mas Raye disebabkan oleh peraturan yang mengharuskan penduduk untuk dicacar, sedangkan dalam tahun 1822 kaum pemberontak yang berkekuatan sekitar 500 orang mengepung Anyer tanpa hasil.[26]

Orang yang sebenarnya menghasut pemberontakan pada akhir tahun 1825 adalah Tumenggung Mohamad, seorang demang dari Menes. Ia dan pengikut-pengikutnya menolak untuk membayar pajak, dan gerakan itu kemudian berkembang menjadi huru-hara yang ditujukan terhadap pemungut-pemungut pajak. Ia menolak perintah residen untuk menghadap dan berlindung dalam kubu yang telah dibangun untuk menghalaukan pasukan pemerintah. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh pasukan-pasukan pemerintah terlalu kuat sehingga mereka dengan mudah dapat dicerai-beraikan dan terpaksa melarikan diri ke daerah pebukitan. Tumenggung Mohamad dan enam orang pengikutnya melintasi puncak Gunung Pulosari, melarikan diri ke perbatasan Pandeglang dan dari sana ke rawa-rawa Panimbang. Pasukan-pasukan pemerintah yang melakukan pengejaran di bawah pimpinan Letnan de Quay melacak mereka sampai ke Menes, tapi segera kehilangan jejak mereka. Faktor-faktor yang membantu Tumenggung Mohamad dan gerombolannya untuk mengelakkan diri dari kejaran pasukan-pasukan pemerintah bukanlah hanya karena medan operasi yang sulit, melainkan juga karena rasa hormat yang sangat mendalam dan rasa takut yang telah tumbuh di kalangan rakyat terhadap dirinya. Perlu dikemukakan bahwa pasukan pemerintah sering kali disesatkan oleh informasi palsu dalam usaha mereka mencari tempat persembunyian kaum pemberontak; satu bukti positif lainnya mengenai dukungan rakyat kepada Tumenggung Mohamad adalah bahwa selama berlangsungnya penguberan, kepala desa Menes bersekongkol dengannya. Di antara pengikut-pengikut Tumenggung Mohamad terdapat banyak orang dari kalangan agama. Oleh karena itu, tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat ditangkap dengan segera meskipun ia telah dinyatakan di luar hukum dan hadiah telah dijanjikan bagi orang yang dapat menangkapnya. Setelah semua cara lainnya tak berhasil, pihak berwajib menggunakan bujukan moral. Pemerintah menjanjikan perlakuan yang baik kepada pemimpin pemberontak itu dengan jalan merehabilitasinya apabila ia bersedia keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerah. Setelah mendapat pengampunan dari residen, Tumenggung Mohamad dan anak buahnya keluar dari persembunyian mereka dan menyerah.[27] Dengan demikian maka kebijaksanaan pengampunan membuahkan hasil sesuai dengan harapan pemerintah: kekuasaan unsur-unsur perusuh dapat dikurangi.

Akan tetapi dua tahun kemudian api pemberontakan kembali berkobar. Kali ini seorang tokoh lama di kalangan pemberontakpemberontak Banten tampll kembali; ia adalah Mas Jakaria yang sudah terkenal namanya, yang kepribadiannya di mata rakyat sudah diselubungi mitos. Dalam tahun 1811 ia pernah menduduki Pandeglang yang ketika itu merupakan kota keraton. Ia kemudian ditawan dan ditahan, tapi dalam bulan Agustus 1827 ia berhasil melarikan diri. Lalu hadiah sebesar seribu piaster Spanyol dijanjikan kepada siapa yang dapat menangkapnya. Oleh karena Mas Jakaria sangat dihormati di kalangan penduduk, ia dalam waktu singkat berhasil mengumpulkan banyak pengikut, dan tahun itu juga ia kembali menyerbu Pandeglang dan

membunuh anggota-anggota detasemen tentara di sana. [28] Setelah itu menyusul satu periode pengembaraan untuk menghindari pasukan-pasukan pemerintah yang terus mengejarnya. Dalam pengejaran terhadap kaum pemberontak, pasukan pemerintah menggunakan paksaan untuk memperoleh pengakuan dari rakyat dan membakar desa-desa sehingga menimbulkan ketakutan dan teror di kalangan penduduk. Pengembaraan Mas Jakaria berakhir ketika ia ditangkap beberapa bulan kemudian dan dijatuhi hukuman mati. la dipenggal kepalanya dan mayatnya dibakar. [29] Riwayat hidupnya sebagai pemberontak dan sebagai orang yang dinyatakan di luar hukum sangat luar biasa; ia dianggap sakti dan namanya diselubungi suasana keramat. Sayang tak ada informasi tentang perincian kegiatan-kegiatannya; dokumen-dokumen sejarah yang tersedia hanya memuat data-data tentang anggota-anggota kerabatnya. [30] Dalam tradisi sejarah Banten, yang dikenal sebagai Sejarah Haji Mansur, nama Mas Jakaria disebut-sebut dalam kaitannya dengan kerusuhan-kerusuhan di zaman pemerintahan Sultan Ishak, di mana ia sudah memainkan peranan yang penting. [31] Selain itu, diceriterakan bahwa silsilah Mas Jakaria dapat ditelusuri kembali sampai kepada Kiyai Santri yang terkenal itu, yang kuburan keramatnya terdapat di Kolle. Kiyai Santri dipuja sebagai seorang suci oleh penduduk dan orang memohon berkatnya sebelum memulai satu pekerjaan yang penting. Di masa hidupnya, Kiyai Santri mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan memimpin perlawanan yang berlangsung lama terhadap sultan. Perlu dicatat bahwa di masa kesultanan pun, anggota-anggota keluarga Jakaria tergolong ke dalam "elite-lawan",yang berarti bahwa mereka menempati kedudukan antagonistik terhadap kelas yang berkuasa. Setelah kesultanan dihapuskan, mereka tidak hanya mempertahankan kedudukan itu, tetapi malahan semakin menjadi gerombolan penjahat yang merupakan bagian dari dunia penjahat daerah pedesaan di Banten. Dalam kenyataannya, mereka diasingkan atau mengasingkan diri secara sukarela dari masyarakat, dan untuk dapat hidup dan melakukan pembalasan mereka membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata. Di sini kita menjumpai satu golongan kekuasaan bawah tanah yang di dalam periode yang sedang kita bahas itu sudah mempunyai tradisi pemberontakan. Ayah Jakaria adalah seorang pemberontak yang sudah terkenal dan hampir semua keturunannya memainkan peranan penting dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dalam tahun-tahun tiga puluhan dan empat puluhan. Pemberontak-pemberontak tulen ini tidak dapat disejajarkan dengan bandit-bandit pemberontak yang hanya ingin merampok dan merampas. Mengingat kegigihan perjuangan mereka dan pemberontakan-pemberontakan yang secara berturut-turut telah mereka prakarsai sejak zaman kesultanan, mereka dapat dianggap sebagai satu golongan elite revolusioner, yang peranan politiknya diutamakan. Jelaslah bahwa krisis-krisis yang silih berganti dalam arena politik Banten sangat menguntungkan bagi pelaksanaan peranan itu. Seperti kita ketahui, daerah-daereh pedesaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang berwajib, dan pengaruh unsur-unsur perusuh sangat dirasakan sampai akhir abad XIX. Dengan sendirinya kekosongan politik yang terdapat dalam awal abad itu memberikan kesempatan yang baik sekali kepada pemimpin-pemimpin pemberontak untuk menrperoleh kekuasaan, tidak hanya dengan menggunakan kekerasan atau iritimidasi, akan tetapi juga melalui karisma mereka. Menurut anggapan umum di sana, Mas Jakaria akan hidup kembali dan kedatangannya dinantikan dengan rasa takut dan hormat. [32] Oleh karena itu mudah dimengerti bahwa pemimpin-pemimpin pemberontak dengan mudah dapat memperoleh dukungan atau bantuan dari penduduk pedesaan tanpa harus menggunakan siasat licik. Dalam perjalanan waktu, keluarga Jakaria dan kelompok-kelompok lainnya dari kelas terpandang yang revolusioner membangun kubu-kubu setempat yang menjadi pusat kekuasaan dan mengandung ancaman yang potensial bagi pemerintah kolonial. Pemerintah secara bertahap meniadakan "sistem paralel" atau "sistem kekuasaan bayangan" semacam ini dengan jalan membuang anggota-anggotanya yang terkemuka. [33] Ketika administrasi kolonial menjadi semakin efektif, dan aristokrasi Banten bergabung dengan penguasa-penguasa asing, maka apa yang tersisa dari gerombolan-gerombolan pemberontak itu menjadi terisolasi dan tak berdaya, tanpa ikatan teritorial dan tanpa dukungan dari penduduk setempat. Sebagai akibatnya, keadaan itu memaksa banyak pemberontak dan orang-orang yang hidup di luar hukum untuk menjadi bandit-bandit profesional.

Pada akhir dasawarsa ketiga, kerusuhan-kerusuhan nampaknya dimulai di sekitar Serang. Sementara pasukan-pasukan pemerintah sedang memburu pemberontak-pemberontak yang

masih berkeliaran di Banten Selatan, sejumlah besar pemberontak bergerak menuju Serang dan mengancam akan menyerbunya. Dalam situasi yang gawat itu, dikerahkanlah sepasukan tentara yang terdiri dari kavaleri dan infanteri dan diperintahkan untuk melancarkan serangan balasan. Serangan itu dipimpin oleh Bupati Serang sendiri; sejumlah pemimpin pemberontak ditawan dan yang lainnya dihalaukan. Oleh karena kaum pemberontak terpaksa mengundurkan diri dengan tergesa-gesa, maka kerusuhan dan perampokan di dalam kota dapat dicegah.[34]

Dalam tahun-tahun 1830-an kembali terjadi secara berturut-turut pemberontakan-pemberontakan dan komplotan-komplotan: tahun 1831, 1833, 1836 dan 1839. Tahun-tahun itu sebenarnya merupakan titik-titik puncak kerusuhan yang berlangsung terus selama dasawarsa itu. Seperti dalam pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, pemimpin-pemimpin mereka yang tertawan terus dibuang. Setelah pemberontakan tahun 1836 dapat ditumpas, sejumlah pemberontak masih berkeliaran di keresidenan itu selama lebih kurang tiga tahun sampai pecah pemberontakan baru.[35] Di antara penghasut-penghasutnya terdapat beberapa pemimpin pemberontakan tahun 1836 yang dapat meloloskan diri: Ratu Bagus Ali, yang juga dikenal sebagai Kiyai Gede; Pangeran Radli; dan Mas Jebeng, salah seorang anak Mas Jakaria. Mereka mengerahkan pengikut-pengikut dengan jalan menjanjikan pembebasan dari kerja paksa apabila pemberontakan itu berhasil. Akan tetapi celakanya, pemimpin-pemimpin utamanya dapat ditangkap sebelum kaum pemberontak memulai aksi mereka. Tahun-tahun berikutnya masih rusuh, oleh karena begitu banyak pemberontak masih berkeliaran di daerah pedalaman. Mas Lamir dapat mengumpulkan pengikut yang besar jumlahnya dan yang tidak dapat dilumpuhkan dengan segera. Mas Jamir, seorang pemberontak terkenal dalam kerusuhan-kerusuhan tahun 1828 dan 1836, muncul kembali, akan tetapi segera dapat dikalahkan dan ditewaskan.[36]

Tak disangsikan lagi bahwa hal itu samasekali belum berarti bahwa kekuatan perusuh sudah dapat ditumpas habis. Peristiwa pembunuhan atas diri seorang Eropa yang bertugas mengawasi penanaman "*nopal* " mencerminkan situasi yang semakin memburuk.[37] Situasinya semakin memburuk lagi ketika tiga pemimpin pemberontak, yakni Mas Anom, Mas Serdang dan Mas Adang; semuanya anak-anak Mas Jakaria, bergabung dengan kaum pemberontak setelah berhasil meloloskan diri dari penjara di Banyuwangi.[38] Segera dapat diketahui bahwa mereka bermaksud menimbulkan .kerusuhan lagi pada permulaan bulan Puasa tahun 1841. Situasinya begitu gawat sehingga pejabat-pejabat tidak berani mengunjungi desa-desa. Akan tetapi pemberontakan itu baru meletus pada akhir 1845. Selama lima tahun sebelumnya, huru-hara dan perampokan-perampokan berkecamuk di mana-mana, meskipun semakin banyak pemberontak yang ditawan dan dipenjarakan.[39]

PERISTIWA CIKANDI TAHUN 1845

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada akhir tahun 1845 lebih dikenal sebagai peristiwa Cikandi, menurut nama perkebunan yang menjadi titik pusat serangan kaum pemberontak. pada tanggal 13 Desember kaum pemberontak merebut rumah tuan tanah di Cikandi Udik dan membunuh tuan tanah Kamphuys, istrinya dan lima orang anaknya. Semua orang Eropa di daerah sekitarnya dibunuh oleh perusuh-perusuh yang mengamuk, kecuali tiga anak lainnya dari keluarga Kamphuys yang diselamatkan oleh Bapa Sarinten, salah seorang pemimpin pemberontak.[40] Akan tetapi tidak ada perampokan oleh karena sudah dikeluarkan larangan yang keras. Kaum pemberontak bermarkas di rumah tuan tanah tersebut, di mana mereka mengibarkan bendera pemberontakan. Upacara-upacara ritual dilangsungkan di sana yang mengingatkan orang kepada upacara penghormatan raja. Dalam pada itu jumlah pemberontak sudah bertambah menjadi sekitar enam ratus orang. Rupa-rupanya mereka bermaksud untuk bertahan di perbentengan mereka itu. Taktik inilah yang memberi peluang kepada pasukan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam suatu pertempuran yang menentukan. Menyadari kegawatan situasi itu, Residen minta bantuan militer dari Batavia. Yang ia khawatirkan adalah bahwa insiden di Cikandi Udik itu akan merupakan tanda bagi perusuh-perusuh di daerah-daerah lainnya untuk bangkit memberontak. Jika itu terjadi maka seluruh keresidenan akan

segera penuh dengan pemberontak dan pos-pos depan militer yang kecil di Warung Gunung, Pandeglang dan Seringin akan dapat dilumpuhkan dengan mudah. Oleh karena itu Residen memutuskan untuk segera menyerang kaum pemberontak. Sebuah detasemen yang berkekuatan sekitar 80 orang diperintahkan untuk mengepung rumah tuan tanah itu, kaum pemberontak dipancing untuk bertempur dan setelah mereka mundur sebentar, perlawanan mereka dapat dipatahkan dan diceraiberaikan. Perlu dicatat, bahwa pernimpin-pemimpin pemberontak dengan nekat melakukan serangan terakhir terhadap pasukan pemerintah dengan keyakinan penuh akan kekebalan mereka.[41] Kekalahan besar itu telah menurunkan semangat kaum pemberontak dan secara berangsur-angsur kerusuhan-kerusuhan berakhir. kita akan melewati operasi pertolongan yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah, dan menyoroti pimpinan pemberontakan itu dan tujuan mereka yang sebenarnya.

Salah seorang penghasut utama pemberontakan itu adalah Amir, penduduk Bayuku, sebuah dusun yang terletak di dalam perkebunan tersebut. Oleh karena ia tidak mampir membayar pajak kepada tuan-tuannya, ia harus menjual kerbaunya atau meninggalkan dusun itu. Dalam keadaan bingung ia pergi ke Bapa Sarinten untuk minta nasihat dan dukungan moral. Seperti semua kiyai dan dukun di daerah itu, Bapa Sarinten mempunyai wibawa dan pengaruh yang besar. Menurut pendapatnya, kasus Amir itu mempunyai arti yang sangat panting dan hanya dapat diselesaikan dengan kekerasan. Akan tetapi pekerjaan yang nekat itu memerlukan banyak persiapan yang harus dilakukan secara rahasia. Langkah pertama untuk melaksanakan rencana itu adalah menghubungi Mas Endang dan Mas Rila dari Cikupa, dan Mas Ubid dari Kolle. Setelah itu Bapa Sarinten selama lebih kurang lima bulan mengadakan perjalanan keliling ke sebelah timur, lalu ke bagian-bagian tengah, barat dan selatan keresidenan itu, untuk mengerahkan pengikut dan dukungan bagi rencana pemberontakannya. la kembali dari perjalanan itu dengan disertai oleh Kiyai Gede dan Bapa Sapingi, keduanya dari daerah sekitar Batavia. Langkah berikutnya adalah minta kesediaan Mas Ubid untuk bergabung dan memberikan bantuannya dalam usaha memperoleh dukungan dari penduduk Kolle dan Pamarayan. Dan langkah terakhir yang juga sangat penting adalah mengundang anggota-anggota kerabat Mas Jakaria dan sekutu-sekutu mereka untuk ikut dalam pemberontakan. Nama-nama seperti Mas Anom, Mas Jebeng, Mas Serdang dan Mas Semarang mempunyai daya tarik yang kuat bagi penduduk. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, fakta bahwa keluarga Jakaria telah melibatkan diri dalam gerakan-gerakan pemberontakan di Banten selama beberapa dasawarsa telah menjadikan mereka pahlawan-pahlawan di mata takyat, dan karenanya nama-nama mereka berfungsi sebagai kekuatan pemersatu. Sampai-sampai seorang yang bemama Kasidin kemasukan roh ayah Mas Jakaria setelah mendengar bunyi sebuah gong; Ujang, seorang murid Kasidin, diakui sebagai adik Mas Jakaria, sementara seorang yang bernama Antonie (sic), dianggap sebagai seorang anak Mas Jakaria.[42] Meskipun mungkin aneh kedengarannya, namun penggunaan peranan-peranan khayalan ini sangat efektif untuk mengerahkan pengikut. Mengenai keturunan-keturunan Mas Jakaria yang sebenarnya, pertama-tama perlu disebutkan seorang wanita yang menjadi pemimpin pemberontak, yakni Mas Anjung, yang memainkan peranan yang sangat panting dalam komplotan itu. Meskipun ia kawin dengan demang Kolelet, Mas Ucim, ia ikut dalam intrik-intrik komplotan di luar pengetahuan suaminya. Sementara itu tersiar desas-desus tentang kehadiran dan kegiatan ketiga anak laki-laki Mas Jakaria yang sedang hidup mengembara di Banten sebagai pelarian. Dengan sendirinya desas-desus itu menimbulkan suasana panas di kalangan penduduk; sudah lama tiap usaha pemerintah untuk menangkap atau memusnahkan pemberontak-pemberontak yang lihay dan licin bagaikan belut itu telah gagal.[43] Untuk melengkapi daftar pemimpin-pemimpin pemberontak dapat kita sebutkan nama-nama Mas Ubid, seorang kemenakan dan menantu Mas Jakaria; Raden Yintan; Pangeran Lamir; dan seorang wanita pemberontak lainnya, Sarinam.[44]

Mari kita sekarang beralih kepada pembahasan mengenai aspek orientasi-tujuan pemberontakan ini. Upacara-upacara yang telah disinggung di atas menyingkapkan bahwa gerakan ini mempuyai beberapa ciri kebangkitan kembali, khususnya yang menyangkut pemulihan kesultanan. Dalam hal ini, maka pemberian gelar-gelar seperti Mas Gusti kepada Bapa Sarinem, dan Pangeran kepada Amir merupakan satu petunjuk yang jelas.[45] Kecenderungan kebangkitan kembali ini nampaknya bersifat anti-asing, dan bertujuan

mengakhiri kekuasaan orang-orang Eropa.[46] Pemusnahan orang-orang Eropa yang bermukim di Cikandi Udik merupakan bukti yang jelas. Pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari pemberontak-pemberontak yang ditawan membenarkan dugaan Residen bahwa peristiwa itu bukan merupakan insiden yang terpisah, melainkan pada mulanya dimaksudkan hanya sebagai isyarat atau bunga api yang harus mengobarkan pemberontakan di seluruh Banten.[47]

Terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa komplotan itu telah meluas dan mempunyai cabang-cabangnya di daerah Batavia yang berbatasan. Pengomplot-pengomplot itu juga bersekutu dengan kaum pemberontak di selatan yang dipimpin oleh Nyai Permata, ibu Nyai Gumpara yang merupakan wanita pemimpin pemberontak yang terkenal dari tahun 1836.[48] Sesungguhnya, kekalahan kaum pemberontak di Cikandi Udik berarti hancurnya suatu awal pemberontakan umum.

Akhirnya, beberapa catatan singkat mengenai segi-segi keagamaannya. Seperti telah disinggung di atas, kaum pemberontak telah menunjukkan keberanian yang fanatik dalam pertempuran, oleh karena mereka yakin bahwa jimat mereka telah membuat mereka kebal. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan semacam Perang Sabil, sebagaimana terbukti dari kenyataan bahwa mereka mengenakan pakaian dari kain lena yang berwarna putih. Di samping itu ziarah mereka ke makam Kiyai Santri yang keramat sebelum mereka memulai pemberontakan dapat dianggap sebagai satu pertanda bahwa mereka menyadari bahwa yang akan mereka lakukan itu adalah satu tugas suci.[49]

Sebagai penutup bagian mengenai kerusuhan-kerusuhan di Banten selama pertengahan pertama abad XIX ini, kita akan memberikan peLihatian kita kepada apa yang diperkirakan merupakan sebab utama pemberontakan-pemberontakan yang silih berganti bagaikan wabah itu. Salah satu sumber utama dari ketidakpuasan dan rasa dendam itu adalah tersisihnya kaum aristokrasi Banten yang lama, yang sangat merindukan masa keemasan mereka yang silam. Satu penyebab lainnya berakar dalam lembaga hak milik pribadi atas tanah, yang antara lain telah melahirkan di satu pihak sebuah kelas pemilik tanah yang berada, dan di lain pihak sebuah golongan yang jatuh melarat dan tergantung kepada para pemilik tanah.[50] Penyebab ketiga adalah sifat orang Banten yang terkenal sangat mementingkan agama. Selain itu, kerusuhan-kerusuhan yang berlarut-larut itu juga disebabkan oleh adanya lembaga-lembaga pemerintah yang dipaksakan dan tidak berakar dalam bumi Banten.

PEMBERONTAKAN WAKHIA TAHUN 1850

Di antara sekian banyak pergolakan sosial yang menandai sejarah Banten, kita dapat sebutkan pemberontakan tahun 1850, yang untuk mudahnya akan kita namakan saja pemberontakan Wakhia. Pada tanggal 24 Februari, Demang Cilegon dan stafnya dibunuh di Rohjambu ketika sedang melakukan perjalanan inspeksi. Mereka sama sekali tidak mengetahui adanya kaum pemberontak yang sedang bergerak maju, dan karena tidak mendapat peringatan dari kepala desa, Nasid, mereka masuk perangkap. Dalam bulan Januari sebenarnya telah tersiar desas-desus tentang adanya komplotan-komplotan dan pertemuan-pertemuan kaum perusuh, akan tetapi sebegitu jauh tidak diperoleh bukti-bukti yang membenarkannya. Data-data yang ada secara langsung menghubungkan desas-desus itu dengan operasi-operasi yang kemudian dilancarkan oleh pasukan-pasukan pemerintah untuk menundukkan kaum pemberontak.[51] Yang jauh lebih penting bagi pembahasan kita yang sekarang adalah apa yang sedang terjadi di kalangan-kalangan para pengomplot. Seperti telah dikemukakan di muka, penghasut utama pemberontakan ini ialah Raden Bagus Jayakarta, patih Serang.[52] Fakta bahwa telah dua kali ia dilampaui dalam hal pengangkatan bupati, telah memperkuat tekadnya untuk menggunakan kekerasan guna menyalurkan rasa dendamnya.[53] Ia ingin melampiaskan rasa dendamnya terhadap Bupati Seringin khususnya, dan pemerintah kolonial pada umumnya. Untuk dapat melaksanakan rencana pemberontakannya itu, ia berusaha mencari bantuan di kalangan pemuka-pemuka setempat yang berpengaruh, oleh karena ia sendiri sudah tidak mendapat dukungan rakyat lagi setelah ayahnya, R.A.A. Mandura Raja Jayanegara, meninggal

dunia. Selain dari itu, prestisenya menurun sebagai akibat adanya konflik antara dia dan ibu tirinya, Ratu Siti Aisah, mengenai harta warisan ayahnya. Oleh karena itu maka ia tidak dapat mengharapkan dukungan dari kaum bangsawan Banten yang berpengaruh. Sejak semula ia mempunyai hubungan yang erat dengan iparnya, Tubagus Suramarja, dan dengan saudara laki-laki orang yang disebut belakangan ini, yakni Tubagus Mustafa, yang tak henti-hentinya berusaha untuk mengobarkan kerusuhan. Untuk mewujudkannya diperlukan tindakan bersama dengan pemuka-pemuka setempat yang memberontak, seperti Tubagus Iskak atau Jekak, Mas Derik, Mas Diad, Satus, Nasid, Asidin, Haji Wakhia, dan Panghulu Dempol. Tubagus Iskak, seorang jaro dari Kedung Cindik yang sudah dipecat, mempunyai hubungan yang akrab dengan orang-orang yang tidak puas dan dengan perampok-perampok di keresidenan itu. Mas Derik mempunyai rasa permusuhan terhadap jaro di desanya, dan secara terang-terangan menolak perintah-perintahnya. Dikabarkan bahwa secara resmi ia tidak boleh menggunakan gelar Mas, namun kaum bangsawan Banten tidak dapat berbuat apa-apa. Mas Diad dapat dilukiskan sebagai seorang yang tak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan seorang pembangkang. Ia dan Mas Derik ditugaskan mengerahkan dari Lampung orang-orang yang selalu memainkan peranan penting dalam kerusuhan-kerusuhan di Banten. Terdapat petunjuk-petunjuk yang tak diragukan lagi bahwa di Lampung terdapat banyak orang Banten; mereka telah melarikan diri ke sana untuk meloloskan diri dari kejaran pemerintah kolonial atau untuk mengelakkan penindasan para pejabat. [54] Haji Wakhia, seorang penduduk yang kaya dari Budang Batu, sudah sejak beberapa lama menjadi buron. Untuk menghindarkan diri dari polisi, ia mula-mula bersenlbunyi di Lampung, dan kemudian pergi ke Mekah untuk naik haji. Tahun 1847 ia kembali sebagai seorang haji ke desanya. Kembali ia tidak mau membayar pajak dan tidak mendaftar, maka ia dipanggil untuk menghadap residen; akan tetapi sia-sia saja, ia tak kunjung muncul. Karena pemerintah mengkhawatirkan akibat-akibat yang tidak menyenangkan, tidak dilakukan penangkapan atas dirinya. Memang, prestisenya di kalangan penduduk Budang Batu tidak boleh dianggap enteng; ia dihormati sebagai seorang suci. Satu faktor penting lainnya adalah sikap penduduk Budang Batu yang sangat bermusuhan terhadap pemerintah. Sebelumnya mereka telah menunjukkan rasa permusuhan itu dengan jalan membunuh seluruh staf administrasi distrik yang terdiri dari lima belas orang pegawai. [55] Meskipun demikian tidak dilakukan penuntutan terhadap para pembunuhnya, sehingga penduduk di sana semakin berani. Ketiadaan sikap yang tegas di pihak pemerintah telah memperkuat rasa bangga mereka dan kesediaan mereka untuk mengikuti setiap pemimpin. Pendek kata, rasa bangga diri mereka dan kemampuan mereka untuk melakukan kekerasan secara tiba-tiba membuat mereka cocok untuk dijadikan bahan baku pemberontakan. Di samping itu, Budang Batu sudah sejak zaman dulu terkenal suka memberontak, juga di zaman kesultanan. Oleh karena itu para pengomplot hendak menjadikan penduduk Budang Batu dan daerah sekitarnya sebagai tulang punggung pemberontakan. Tubagus Iskak-lah yang mengajak Haji Wakhia turut dalam rencana pemberontakan mereka. Seruan Haji Wakhia rupa-rupanya telah disambut dengan semangat yang menyala-nyala, dan penduduk Budang Batu berjanji untuk ikut dalam pemberontakan dan berjuang untuk kepercayaan mereka. Persiapan-persiapan untuk melancarkan Perang Sabil dilakukan secara terns-menerus di bawah pimpinan Panghulu Dempol.

Tempat pemusatan lainnya adalah Pulau Merak dan sekitamya, di mana akan ditempatkan oreng-orang Lampung di bawah pimpinan Mas Diad. Untuk tujuan itu diperlukan loyalitas pemuka-pemuka setempat dan dukungan materi mereka; Satus, Nasid dan Asidin tak pelak lagi merupakan orang-orang yang harus direbut hatinya oleh kaum pemberontak. Oleh karena Patih tak mempunyai prestise, pribadinya tidak mempunyai daya tarik, oleh sebab itu harus dicari akal lain. Maka diciptakanlah sebuah mitos sosial, yang serupa dengan yang pemah tersiar selama peristiwa Cikandi. Seorang yang bemama Kajif diperkenalkan sebagai penjelmaan kembali Tubagus Urip. Tubagus Urip adalah seorang pemimpin pemberontak yang tewas dalam satu pemberontakan. Menurut cerita, ia sangat berani dan memiliki kesaktian, seperti tidak menjadi basah di bawah air hujan, dan tidak memerlukan tidur, makan, dan istirahat. la dianggap mampu mendatangkan angin ribut dan gempa bumi setiap saat. Berdasarkan kepercayaan rakyat tentang imortalitasnya, kaum pemberontak lalu menyebarkan kabar bahwa ia telah bangkit kembali untuk menjadi raja umat yang percaya. Kedatangannya untuk membawa kabar tentang akan terjadinya peristiwa-peristiwa besar: kekuasaan yang ada harus ditumbangkan. Mereka

yang mengakui kerajaan baru akan memperoleh gelar dan hadiah, sedangkan mereka yang tetap setia kepada kekuasaan asing akan dimusnahkan. Untuk mengukuhkan kepercayaan ini, kaum pemberontak menyebarkan kabar lain yang menyatakan bahwa seorang pahlawan lainnya, Haji Jamud, juga telah bangkit kembali untuk memimpin kaum pemberontak dari Lampung. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan lagi, para kepala desa pun bersedia menerima jimat dari tangan seorang kiyai yang bernama San.[56]

Selama berkobarnya pemberontakan, pimpinan berada dalam tangan orang-orang yang sangat populer dan sangat berpengaruh; kedua faktor itu diperlakukan untuk dapat membentuk dan memimpin pasukan pemberontak. Mas Diad, Tubagus Iskak, Mas Derik, dan Nasid memimpin pasukan yang dibentuk di Pulau Merak dan untuk sebagian terdiri dari orang-orang dari Lampung, sementara Haji Wakhia dan Panghulu Dempol memimpin penduduk Gudang Batu dan sekitarnya. Sementara itu, penghasut-penghasut utamanya, R.B. Jayakarta, ipamya dan saudara iparnya, tetap di belakang layar, sehingga dalam beberapa minggu pertama pejabat-pejabat pemerintah tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan kerusuhan-kerusuhan itu. Pemerintah tidak dapat mengambil tindakan tegas selama pengomplot-pengomplot utamanya belum diketahui. Situasinya menjadi gawat ketika setelah berlangsung tiga minggu pemerintah belum berhasil menangkap seorang pun dari para pemimpin pemberontak. Salah satu sebabnya yang utama adalah bahwa, berbeda dengan peristiwa Cikandi, gerombolan-gerombolannya sekarang lebih mobil dan lebih berpencaran. Gerombolan yang dipimpin oleh Mas Derik dan Nasid berada di pegunungan sebelah timur Pulau Merak, sebuah gerombolan lainnya di bawah pimpinan Mas Diad dan Tubagus Iskak berkeliaran di distrik Banten, sementara Haji Wakhia dan Panghulu Dempol beserta anak buah mereka beroperasi di daerah sebelah barat bukit-bukit Simari Kangen.[57] Sebab lainnya adalah bahwa keadaan medan - di dalam segitiga yang dibentuk oleh Serang, Anyer dan Ujung St. Nicholas – merupakan daerah yang sulit dan bergunung-gunung, yang untuk sebagian besar ditutupi hutan.

Kiranya akan melampaui lingkup studi ini untuk menceriterakan secara terperinci pertempuran-pertempuran yang terjadi antara kaum pemberontak dan pasukan pemerintah. Selama kurang lebih tiga bulan gerombolan-gerombolan pemberontak maju-mundur, diselingi serangan terhadap desa-desa atau kota-kota kecil, seperti Tanjak dan Anyer. Semakin lama mereka semakin terpaksa mengambil posisi bertahan. Meskipun mereka tidak mencapai sesuatu kemenangan, mereka tidak pernah dikalahkan secara definitif. Pertempuran di Tegalpapak pada tanggal 3 Mei merupakan pukulan yang hebat bagi kaum pemberontak dan moril mereka. Satu demi satu pemimpin-pemimpin mereka ditawan, akan tetapi dua orang di antara mereka, Tubagus Iskak dan Haji Wakhia berhasil lolos dan bersembunyi di Lampung.[58] Di sana Haji Wakhia kembali ikut dalam pemberontakan yang dilancarkan oleh Pangeran Singabranta dan Raden Intan, dua pemimpin rakyat Lampung yang telah memberikan perlindungan kepada pemberontak-pemberontak yang melarikan diri dari Banten. Haji Wakhia akhirnya jatuh ke tangan pasukan pemerintah dalam tahun 1856 dan dihukum mati; [59] ia meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak. Dua orang putranya, Madinah dan Afar, tetap di Lampung, sementara istrinya kembali ke Banten disertai oleh dua di antara anak-anaknya yang perempuan, Nyi Aminah dan Nyi Rainah, dan seorang anaknya yang laki-laki, Mesir. Setelah keluar dari tahanan di Serang, mereka menetap di desa asal Haji Wakhia, yang di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Arjawinangun, di mana mereka sangat dihormati oleh penduduk.[60]

Tidak adanya kegiatan apa-apa di pihak pemberontak setelah pertempuran di Tegalpapak, mungkin lebih disebabkan oleh ditangkapnya Patih, sehingga mereka kehilangan bimbingan.[61] Perlu dikemukakan, bahwa pada saat ia ditangkap; umum sudah lama mengetahui peranan yang telah dimainkannya dalam pemberontakan. Di pasar-pasar, orang secara terang-terangan berkata bahwa pemerintah sedang mencari pemimpin-pemimpin pemberontak ke segenap pelosok di seluruh negeri, sementara dalang-dalang utamanya bergerak bebas di Serang.[62] Sesungguhnya, Patih dengan cerdik sekali telah menggunakan mata-mata pemerintah untuk berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin pemberontak di lapangan. Jelaslah bahwa dengan penangkapan atas dirinya, pimpinan pusat seluruh operasi menjadi ambruk. Sampai di situ berakhirlah aksi bersama tersebut. Semua pemberontak yang masih hidup dan tertawan

dibuang.[63]

Jelas bahwa dukungan penduduk setempat sangat panting dalam gerakan ini. Ada desa-desa yang dengan sukarela memberikan bantuan kepada kaum pemberontak, umpamanya Parakan, Kedung Kemiri, Rohjambu, Cigading dan Ciwindu; desa-desa lain berbuat demikian di bawah tekanan, umpamanya Tanjak. Akan tetapi banyak sekali di antara para kepala desa yang tetap setia kepada pemerintah, meskipun di antara mereka ada yang horus dipaksa untuk membantu menangkap kaum pemberontak.[64] Pasukan tentara dalam kerja sama dengan para pejabat berhasil memisahkan penduduk dari kaum pemberontak, meskipun sering kali dengan menggunakan cara-cara yang kejam seperti membakar desa-desa atau melakukan intimidasi. [65]

Pemberontakan Wakhia merupakan satu contoh yang sangat jelas mengenai fakta bahwa pejabat-pejabat pamongpraja yang mengalami frustrasi, karena ambisi mereka dalam hal kenaikan pangkat tidak terpenuhi, memainkan peranan yang menentukan dalam mencetuskan gerakan-gerakan pemberontakan. Adanya pemuka-pemuka setempat tertentu yang mempunyai rasa dendam dan sudah nekad juga ikut memungkinkan pecahnya pemberontakan itu. Berkat adanya rangsangan atau paksaan, kaum petani ikut di dalam gerakan itu, di mana mereka hanya memainkan peranan pembantu saja. Bantuan yang besar diberikan oleh unsur-unsur perusuh. Ideologi dan mitos sosial digunakan untuk mengembangkan gerakan itu yang dalam pada itu tetap lemah oleh karena tidak ada ikatan yang kuat di antara satuan-satuannya.

KERUSUHAN-KERUSUHAN BESAR ANTARA 1851 DAN 1870

Selama dua dasawarsa berikutnya Banten masih terus dilanda kerusuhan-kerusuhan. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pola perkembangannya, karakteristik-karakteristiknya serta struktur-struktur dasarnya empat di antara kerusuhan-kerusuhan itu akan dibahas agak panjang lebar, yakni peristiwa Usup dalam tahun 1851, peristiwa Pungut dalam tahun 1862, kasus Kolelet dalam tahun 1866 dan kasus Jayakusuma dalam tahun 1869.[66]

Tidak lebih dari setahun setelah pemberontakan Wakhia, diketahui ada komplotan baru. Pada tanggal 15 April 1851, Mas Usup, jaro Tras Daud, dan keluarganya dibunuh oleh dua orang yang tidak dikenal. Insiden ini tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri; latar belakangnya dapat ditelusuri kembali sampai kepada permusuhan yang sudah berlangsung lama antara Mas Usup dan Panghulu Nur. Yang disebut belakangan ini selalu menentang perintah Mas Usup. Dalam bulan sebelum terjadinya pembunuhan itu sudah tersiar desas-desus mengenai akan timbulnya kerusuhan-kerusuhan. Tidaklah mengherankan apabila para pejabat mendapat kabar tentang adanya pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 17 orang di Tegalpapak dan tidak lama kemudian tentang adanya percobaan untuk membunuh residen. Semua peristiwa itu dikaitkan dengan komplotan yang didalangi oleh Mudin, yang telah meramalkan bahwa pemerintah kolonial mesti ambruk. la menamakan dirinya Madalim Basri dan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhamad. Sementara mengembara dan "berkhotbah" ia berhasil memperoleh dukungan rakyat bagi tujuannya. Pembantu-pembantu utamanya adalah Kamud dan Nur. Pembunuhan tersebut diduga dimaksudkan sebagai tanda dimulainya pemberontakan.[67] Setelah dua puluh pemberontak ditangkap dan dibuang gerakan itu pun berakhir. [68]

Dalam pertengahan kedua tahun 1862, pejabat-pejabat Banten sibuk melakukan pengejaran terhadap seorang yang bernama Pungut dan kawan-kawannya, yang berkeliaran di daerah itu dan tidak hanya mengancam akan menghancurkan ketentraman dan ketertiban di Banten, akan tetapi juga menghasut kerusuhan. Untuk menarik pengikut, Mas Pungut mengaku sebagai anggota keluarga sultan dan sebagai seorang anak Mas Jakaria.[69] la memaksa rakyat agar menghormatnya dan ia tak segan-segan menggunakan kekerasan apabila orang tidak man menghormatnya. Pada tanggal 19 September, Mas Pungut dan anak buahnya diketahui berada di hutan Cilangar. Pihak berwajib memutuskan untuk memikatnya ke dusun Tanjung dan mengepungnya di sana. Kaiji, kepala desa Cidoro, berhasil membujuk Mas Pungut untuk

singgah di rumah Usip, Bapa Asid, sementara 25 orang bersiap-siap untuk menghadangnya. Dalam usahanya yang nekad untuk meloloskan diri, Mas Pungut ditembak mati.[70]

Sekarang kita beralih ke dua contoh pergolakan sosial berikutnya, yang lebih tepat dinamakan komplotan. Kedua contoh itu jauh lebih penting artinya sebagai bukti adanya gerakan-gerakan yang silih berganti yang bertujuan melawan kekuasaan yang ada. Dilihat dari segi ini, tidak menjadi soal apakah gerakan-gerakan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang besar atau tidak.

Pusat-pusat komplotan tahun 1866 adalah distrik Kolelet - nama yang kemudian diberikan kepada peristiwa itu - dan perkebunan Cikandi. Menurut rencana para pengomplot, pemberontakan akan dimulai pada malam hari tanggal 27 Juli - atau tanggal 14 bulan Mulud menurut perhitungan tahun Jawa - dengan menyerang dan membakar habis kota Pandeglang. Dengan dapat diketahuinya komplotan itu pada waktunya, dapat dicegah ledakan huru-hara seperti yang telah sering kali dialami kota itu dalam beberapa dasawarsa sebelumnya. Di samping percobaan pemberontakan itu, beberapa hari sebelumnya telah dikirimkan surat-surat kaleng kepada residen dan bupati, yang berisi peringatan bahwa jiwa mereka dalam bahaya. Kira-kira pada waktu yang bersamaan, tujuh orang telah ditangkap dengan alasan telah menjual jimat dan melakukan penipuan. Juga perlu disebutkan penangkapan yang dilakukan atas diri seorang yang bernama Asmidin atas tuduhan menjual jimat dan menyebarkan kabar bahwa rakyat di distrik-distrik Cikandi, Ciruas dan Tanara sudah siap untuk melancarkan pemberontakan. Menurut sumber-sumber kami, ternyata kemudian bahwa kedua fakta yang terakhir tidak ada sangkut pautnya samasekali dengan komplotan tersebut.[71] Namun demikian fakta-fakta itu perlu disebutkan, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai keresahan umum yang terdapat di daerah-daerah itu.

Salah seorang tersangka utama adalah Mas Sutadiwiria, seorang bekas demang di Baros. la telah melakukan banyak perjalanan ke kabupaten-kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak, mencari kasus-kasus penyelewengan dan korupsi di kalangan pejabat-pejabat tinggi. [72] Kalangan pemerintah di Serang menduga bahwa dialah orang yang telah menulis surat-surat kaleng tersebut. Seorang lainnya yang dicurigai adalah bekas bupati Pandeglang, R.A.A. Natadiningrat; penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut menghasilkan dugaan bahwa ia telah ambil bagian di dalam komplotan. Dikabarkan bahwa ia telah menghadap Asisten Residen Pandeglang sebagai *acte de presence*. Setelah dilakukan penangkapan-penangkapan, ia tidak menampakan diri lagi di muka umum, dengan alasan sakit. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa orang di antara yang ditangkap itu adalah anggota keluarganya atau sahabatnya. [73]

Mereka yang ditangkap berjumlah tiga puluh dua orang; mereka kebanyakan berasal dari distrik-distrik Kolelet, Cikandi. Lebak dan Kramat Watu. Apabila kita mempeLihatikan daftar itu, maka yang menarik peLihatian adalah jumlah orang-orang yang telah pernah terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan sebelumnya. Judin pernah menjadi anak buah Mas Pungut, sedangkan Mas Marup pernah ambil bagian dalam pemberontakan tahun 1845 di Cikandi. Di antara mereka juga terdapat seorang cucu Mas Jakaria, yakni Mas Atar. Jelaslah bahwa penduduk perkebunan Cikandi telah ikut secara aktif di dalam komplotan itu. Hal itu tidak mengherankan, oleh karena Cikandi sudah terkenal sebagai tempat berkumpulnya bajingan-bajingan dan orang-orang yang tidak puas.[74]

Ihlam satu hal sumber-sumber kita itu mengecewakan: mereka tidak memberikan data-data yang kongkrit mengenai cita-cita para pengomplot dan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Sebaliknya, mengenai contoh berikutnya, ada catatan-catatan yang memuat informasi yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek gerakan itu.

Sekarang kita memasuki tahap terakhir dari gerakan-gerakan pemberontakan di Banten sebelum munculnya gerakan kebangkitan kembali agama. Seperti yang akan kita lihat, gerakan yang dipimpin oleh Tubagus Jayakusuma sudah memperlihatkan persamaan-persamaan yang menyolok dengan gerakan kebangkitan kembali seperti yang dimanifestasikan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan. Mula-mula, sejak tahun 1866, Tubagus Jayakusuma, yang ketika itu menjabat sebagai patih Lebak, mengajarkan apa yang dinamakan *Ilmu Tarik*,

sebuah ajaran yang menurut keterangannya adalah *sui generis*.[75] Biasanya, dalam bagian pertama pembayatan calon murid harus menaati dengan patuh segala peraturan yang ditetapkan oleh Jayakusuma. Setelah mempersiapkan diri melalui puasa, dan tirakat selama delapan bulan, calon-calon itu dengan resmi diterima dalam komunitas aliran tersebut. Ritual pembayatan formal dimulai dengan memandikan para calon yang kemudian disuruh duduk di atas sehelai kain katun putih. Mereka lalu mengucapkan sumpah setiakawan, *sehupfu* (sic), dengan guru mereka. Setelah itu setiap anggota baru itu diberi golok dan keris. Menurut kepercayaan mereka, setelah dibayat orang akan selamat dari malapetaka, terutama pada masa-masa kacau. Perlu ditekankan bahwa berdasarkan sumpah itu sang murid wajib taat secara mutlak kepada guru kebatinannya.[76] Tidak mengherankan jika orang-orang yang diinterogasi oleh pemerintah kolonial tidak mengatakan apa pun tentang rencana Jayakusuma. Ciri "perkumpulan" keagamaan Jayakusuma ini memberikan alasan yang kuat kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk mencapnya sebagai membahayakan ketentraman dan ketertiban. [77]

Pertanyaan yang timbul sekarang adalah, apa sebenarnya tujuan Jayakusuma? Oleh karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang diinterogasi tidak menghasi)kan bukti-bukti yang cukup, maka kesaksian-kesaksian berikut ini tidak menyingkapkan maksud dan arti yang sebenarnya kepada kita. *Pertama*, dikatakan bahwa Jayakusuma telah memerintahkan Durakhim untuk membunuh Residen dan Bupati Serang. *Kedua*, Durakhim dan Abdulkarim ditugaskan untuk mengumpulkan pengikut bagi gerakan itu di Batavia, Tangerang dan Campea, dan juga untuk mengumpulkan senjata di Batavia. *Ketiga*, Jayakusuma telah mengadakan perjanjian dengan demang Tanara, Mas Sadik, di mana yang disebut belakangan itu akan mengumpulkan pengikut di bagian timur dan barat Banten. *Keempat*, informasi yang disampaikan oleh Jayakusuma kepada Alwan menyangkut soal pemberontakan di Tojing yang harus dimulai setelah Jayakusuma mempunyai pengikut yang cukup banyak dan rumahnya di Banten telah dipugar. Dan terakhir, kesaksian yang menyatakan bahwa seorang yang bernama Agus Sabrim telah diperintahkan untuk pergi ke Surabaya dengan dalih akan berdagang; tujuan utamanya adalah mencari informasi mengenai penghasilan tahunan orang-orang Belanda yang menjadi pamongpraja. Sesudah itu ia akan naik haji dan meneruskan perjalanan ke Spanyol untuk minta bantuannya dalam usaha mengusir Belanda.[78] Meskipun Residen Banten dan Jaksa Agung di Batavia telah menguatkan tuduhan-tuduhan itu, Dewan Hindia menolak usul-usul mereka dan memberi saran agar tertuduh dibebaskan karena tidak cukup bukti. [79]

Mungkin persoalannya akan menjadi lebih terang apabila kita lebih mendalami latar belakang kepribadian Jayakusuma dan pengikut-pengikutnya. Tubagus Jayakusuma ketika itu tinggal sebagai seorang pensiunan di Ciruas, di mana ia pernah menjadi demang sebelum diangkat sebagai patih Lebak. Sebagai seorang anggota keluarga sultan ia sangat berpengaruh, dan terkenal sebagai seorang pejabat pamongpraja yang sangat cakap.[80] Mungkin karena itulah pemerintah kolonial selalu memperlakukannya dengan baik meskipun ia telah melakukan penyelewengan-penyelewengan administratif. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa ia pernah dituntut di muka pengadilan karena menyalahgunakan kedudukannya sebagai demang dengan jalan memaksa rakyat untuk menjual atau menggadaikan tanah mereka kepadanya,[81] merampas sawah-sawah rakyat, dan memaksa mereka untuk bekerja di kebunnya.[82] Di samping peristiwa itu, perceraian dengan Ratu Hamsah telah menyebabkan dia dikenal sebagai pembuat onar. Ketika itu ia dicurigai telah meracun Tubagus Mohamad Arif, jaksa Pandeglang, yang kawin dengan Ratu Hamsah setelah perceraian itu. Persoalannya menjadi lebih remit ketika Jayakusuma mengadu kepada Gubernur Jenderal dan menuduh bupati Serang, R.T. Condronegoro, telah melibatkan diri bukan saja dalam peristiwa perceraian itu melainkan juga dalam usaha untuk tidak mengakui Jayakusuma sebagai ayah anak yang dilahirkan oleh Ratu Hamsah. Akan tetapi sang bupati menyangkal telah memainkan peranan dalam perceraian itu dan mengajukan tuduhan terhadap bekas istrinya, Ratu Siti Aminah. Bagaimanapun, peristiwa ini dengan jelas menunjukkan adanya permusuhan antara Bupati Serang dan Jayakusuma dan intrik-intrik ambisius yang dilakukan oleh yang disebut belakangan.[83] Dengan perasaan kecewa ia menerima baik pembebasannya dari jabatan, dan perasaan dendamnya yang sangat mendalam menuntut pembalasan terhadap pemerintah kolonial. Untuk tujuan itu, ia mengumpulkan pengikut yang ia susun sebagai semacam "perkumpulan" keagamaan dan

kepada mereka ia tanamkan gagasan Perang Sabil.

Anggota-anggota "perkumpulan" keagamaan itu berasal dari pelbagai lapisan masyarakat. Seperti telah disebutkan di atas, Mas Sadik -demang Ciruas- mengambil bagian aktif dalam usaha mengumpulkan pengikut, terutama dari Cilegon, Gudang Batu, dan Karengat. Karena melalaikan petugas-petugas administratifnya, atasannya menjadi tidak puas dengannya; namun demikian, ia tidak dipecat, semata-mata oleh karena sulitnya mencari seorang kepala distrik yang cakap dan dapat dipercaya di daerah itu.[84] Sejumlah haji menjadi anggota "perkumpulan" keagamaan itu; yang terkemuka di antara mereka adalah Haji Mursid, panghulu distrik; juga perlu disebutkan Haji Bali dari Citerep, Haji Ikram dan Haji Bufangi dari Majasem dan seorang haji dari Rangkasbitung, yang namanya tidak diketahui.[85] Murid yang paling dekat dengan Jayakusuma tak disangsikan lagi adalah Durakhim yang telah disebutkan di atas. la adalah seorang yang tak mempunyai tempat tinggal tetap tapi dapat dengan mudah berhubungan dengan Jayakusuma. Dari apa yang sudah diketahui mengenai rencana-rencana mereka ternyata bahwa ia memainkan peranan penting, Pembantu-pembantu dekat Jayakusuma lainnya adalah: Mas Ali, tetangga Jayakusuma yang bertugas sebagai kurirnya; Mas Taffar, mertuanya; Mas Kusen, seorang murid yang sudah dibayat; Abdulkarim, yang dijuluki Baba Karim (sic). Di kemudian hari diketahui bahwa ia sebenarnya adalah seorang Indo, dilahirkan di Batavia oleh seorang wanita Indonesia, hanya empat puluh hari setelah ayahnya tewas dalam Perang Jawa.[86] Seperti telah dikemukakan, ia ditugaskan mencari pengikut di Batavia dan Campea, dan membeli senjata-senjata yang berasal dari Banten. Perlu dicatat empat orang berikut ini, yang dicurigai hanya karena mereka penganut Ilmu Tarik; Agus Suta Angunangun, patih Lebak, Agus Mulafar, mantri irigasi, Raden Mesir dan Raden Sriwijaya.[87]

Aliran mistik-keagamaan semacam itu bukan hal yang asing bagi pembaca-pembaca sejarah Indonesia. Terutama di Banten, tarekat-tarekat mistik yang dijadikan kerangka organisasi bagi gerakan-gerakan pemberontakan nampaknya tumbuh subur dalam tahun-tahun 1880-an. Dalam hubungan ini, "perkumpulan" keagamaan yang telah didirikan oleh Jayakusuma itu dapat dipandang sebagai pendahulu tarekat-tarekat tersebut karena adanya persamaan sebagai berikut: sebuah komunitas yang pada dasarnya bersifat keagamaan, baik dalam aspek-aspek ajarannya maupun dalam aspek-aspek ritualnya, dan yang secara berangsur-angsur diisi dengan sentimen-sentimen politik.[88] Kelemahan "perkumpulan" keagamaan Jayakusuma terletak dalam mekanisme bagi pertumbuhan gerakan seperti itu; ia nampaknya tak dapat mengerahkan pengikut yang besar jumlahnya dari penduduk pedesaan.

PERAMPOKAN, BANDITISME DAN KEGIATAN DI LUAR HUKUM

Di dalam bagian terdahulu kita telah membahas pemberontakan-pemberontakan yang merajalela dan ciri-ciri utamanya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis manifestasi lain dari keresahan sosial, seperti perampokan, banditisme dan kegiatan di luar hukum (*brigandage, banditry, outlawry*).[89] Seperti sudah diketahui, Banten tidak hanya telah mengalami pemberontakan-pemberontakan terbuka, tetapi juga perkembangan dunia hitam kaum perusuh di pedesaan. Dalam bagian awal abad XIX, bandit-bandit itu muncul bersamaan dengan pecahnya pemberontakan-pemberontakan, sedangkan di kemudian hari kegiatan-kegiatan mereka mengalami pasang naik dan pasang surut sejalan dengan tingkat keefektifan administrasi. Ketika pemerintah kolonial belum mampu menghadirkan kekuasaannya di semua tempat dan setiap saat, dan ketika tangan alat-alat penegak hukumnya sering terlalu pendek, maka daerah itu merupakan tempat persembunyian bagi segala macam orang yang nekad dan malang: perampok-perampok biasa, disertir, pelarian, orang-orang yang menghindari keadaan atau ketidakadilan, kaum terpandang di pedesaan yang sudah didiskreditkan atau jatuh miskin dalam pergolakan-pergolakan politik yang tiada henti-hentinya, yang menjadi orang-orang yang sangat nekad karena keadaan yang sulit di Banten. Catatan-catatan memuat keterangan tentang "perampok-perampok" dan pemberontak-pemberontak yang tidak dapat ditemukan. Apabila orang-orang pelarian seperti itu tidak dapat ditangkap, maka tidak ada jalan lain kecuali menyatakan mereka di luar hukum atau mengumumkan hadiah atas kepala mereka.[90]

Perlakuan kejam yang diberikan oleh pemerintah kepada "pelanggar-pelanggar hukum" itu membuktikan ketidakmampuannya untuk menegakkan hukum. Oleh karena sistem politik yang berkuasa dan undang-undang yang menopangnya tidak memberi kemungkinan kepada orang-orang yang tersingkir itu untuk mencari keadilan, maka satu-satunya jalan yang terbuka bagi mereka adalah kekuatan dan kekerasan. Mereka terpaksa mengandalkan kekuatan fisik untuk membela diri terhadap kekuasaan yang memaksakan hukumnya kepada mereka. Perampokan-perampokan mereka dengan sendirinya merusak ketentraman di daerah-daerah pedesaan dan apabila dibiarkan dapat merupakan sumber kesulitan yang terus-menerus bagi pemerintah. Ide-ide pemerintah kolonial mengenai fenomena "perampokan" itu terlalu absolut: orang-orang itu bukan sekedar penjahat atau bajingan.[91] Tidaklah tepat untuk mencap setiap perbuatan perampasan sebagai "perampokan" tanpa membeda-bedakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang melakukannya.

Jalan pikiran itu akan menjadi lebih jelas jika kita mempeLihatikan hubungan antara penyamun-penyamun dan penduduk setempat di satu pihak, dan antara penyamun-penyamun dan pemegang-pemegang kekuasaan resmi di lain pihak. Umum mengetahui bahwa "perampok-perampok" itu di mata rakyat memiliki kesaktian dan bahwa perbuatan-perbuatan mereka diselubungi suasana romantik.[92] Meskipun rakyat sering kali menjadi korban perampokan, rakyat tidak hanya menunjukkan sikap hormat terhadap perampok-perampok itu, malahan juga merasa berkewajiban untuk memberikan upeti kepada mereka. Tidak selamanya rasa takut akan pembalasan yang menyebabkan mereka tidak mau menghianati perampok-perampok itu. Tidak mengherankan jika perampok-perampok itu pada umumnya tidak menjumpai perlawanan di desa-desa. Satu keluhan umum di kalangan pejabat-pejabat Banten adalah bahwa penduduk daerah-daerah pedesaan serta pejabat-pejabat setempat tidak mau melaporkan kejahatan-kejahatan dan penjahat-penjahatnya. Sudah barang tentu dapat dipahami bahwa pembalasan perampok-perampok itu tak kenal ampun dan bahwa perlindungan dari pihak pemerintah tidak dapat diandalkan dan tak bisa diperoleh dengan segera. Bagaimanapun tutup mulut tidak begitu riskan dibandingkan dengan melapor. Sesungguhnya, ketidaksediaan untuk melaporkan insiden-insiden merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam usahanya memberantas perampokan. Tanpa perlindungan penduduk setempat, atau kerja lama pejabat-pejabat setempat, perampok-perampok itu hampir tak mungkin bertahan terus. Khususnya di Banten, perusuh-perusuh itu dengan mudah dapat bekerja sama dengan golongan-golongan yang memberontak di kalangan penduduk, sehingga sebagai akibatnya, gerakan perlawanan yang berlangsung terus-menerus dan didasari semangat tradisional, sering kali mempunyai fungsi "kriminil". Hanya apabila mereka mulai melanggar hukum rakyat di samping hukum penguasa kolonial, perampok-perampok itu dikutuk dan dikucilkan. Pemberantasan bandit-bandit freelance merupakan pekerjaan yang jauh lebih mudah bagi pihak berwajib.

Pejabat-pejabat dan pengurus desa biasanya tidak dapat diharapkan akan memperlihatkan antusiasme yang besar - jangankan semangat militan - untuk memberantas perusuh-perusuh itu. Itulah sebabnya mengapa pamongpraja menunjukkan sikap pasif atau malahan masa bodoh dalam usaha memberantas orang-orang yang "tidak tunduk kepada undang-undang" itu. Gerombolan-gerombolan itu sering kali populer di kalangan pegawai-pegawai pamongpraja tingkat rendahan, sehingga sering kali terjadi pejabat-pejabat setempat membohongi pemerintah untuk membantu gerombolan-gerombolan itu. Tekanan dari pejabat-pejabat tingkat atas dihadapi dengan semacam persekongkotan dengan pemimpin gerombolan. Mereka bukannya bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas "kejahatan", akan tetapi malahan mengadakan persekongkotan tutup mulut. Kami tidak menjumpai catatan-catatan yang menyatakan bahwa mereka menutup mata terhadap perbuatan-perbuatan jahat agar memperoleh bagian dari hasilnya.

Beberapa contoh kongkrit dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasinya. Pemandangan yang suram di Banten abad XIX yang dilanda perampokan-perampokan itu dari waktu ke waktu diramaikan oleh perbuatan bandit-bandit yang sudah terkenal seperti Sahab, Conat, Ija, Sakam, dan Kemudin.[93]

Sahab adalah seorang pemimpin gerombolan yang sangat ditakuti di Banten Selatan, di

mana ia menteror penduduk selama bertahun-tahun. la berhasil melarikan diri dari penjara dan kembali melakukan perampokan-perampokan. Kembali ia ditangkap, tapi tidak lama kemudian dibebaskan kembali dan malahan diangkat menjadi demang di Gunung Kencana. Pengangkatan itu sebenarnya sesuai dengan usul yang diajukan oleh patih Lebak, Ngabehi Bahupringga. Dan gagasannya itu ternyata berhasil; sejak itu hukum bisa ditegakkan.[94] Dalam hubungan ini dapat diingatkan kembali ungkapan yang sudah lazim, bahwa dalam masa yang rusuh, pamongpraja tidak akan mampu melawan perampok kecuali dengan jalan bekerjasama dengan mereka. Gerombolan-gerombolan perampok sering kali berfungsi sebagai, semacam badan "pelindung", atau sebagai pemerintahan "bayangan". Kita dengan mudah mengemukakan contoh-contoh di mana keamanan dibeli dengan uang atau barang-barang berharga.[95] Pamongpraja yang lemah dengan mudah akan menempuh cara-cara yang tidak nyaman itu dalam menghadapi kaum perampok. Dalam keadaan seperti itu, tidak menjadi soal bagi petani biasa dari pihak mana datangnya tekanan; bagaimanapun mereka menderita.[96]

Satu contoh lain menunjukkan bagaimana cara bekerjanya suatu persekongkotan antara kaum perampok dan pejabat-pejabat pamongpraja. Di daerah perkebunan Cikandi Ilir, di tepi Sungai Ciujung terdapat sebuah desa kecil di mana pemimpin sebuah gerombolan yang sudah terkenal, Ija, mempunyai markasnya. Perampokan-perampokan tidak pernah terjadi di desa itu, melainkan selalu di wilayah pemerintah di seberang sungai. Sekali waktu seorang Eropa dirampok di daerah itu. Seluruh desa merasa malu atas kejadian itu dan beramai-ramai mencari barang-barang yang telah dicuri itu. Akhirnya barang-barang itu ditemukan di rumah Makmut, seorang anggota gerombolan perampok tersebut yang terkenal. Makmut ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa lima tahun, akan tetapi anehnya satu tahun kemudian ia sudah bebas lagi. Penjelasannya adalah sebagai berikut: kepala distrik merasa sangat berutang budi kepada gerombolan itu dan karenanya bukan merupakan tugas yang mudah baginya untuk menyelidiki peristiwa perampokan itu. Oleh karena korbannya adalah seorang Eropa, perampoknya harus ditemukan. Lalu dicapai persetujuan antara wedana dan Ija bahwa salah seorang anggota gerombolannya akan diserahkan dengan syarat bahwa ia akan dibiarkan melarikan diri. Syarat itu dapat dipenuhi dengan jalan menyuap pengawas penjara. Cara itu dianggap sebagai satu penyelesaian yang baik bagi kedua pihak, oleh karena pejabat-pejabat dapat menyelamatkan nama baik mereka, sementara gerombolan perampok tetap aman. Tidak mengherankan jika polisi desa tidak efektif; keadaan itu menyebabkan terjadinya banyak "kejahatan" dan tindakan-tindakan kekerasan. Banditisme itu benar-benar merupakan tantangan terhadap kekuasaan pemerintah.[97]

Demikian pula telah dijumpai kondisi-kondisi demoralisasi dalam kasus-kasus tanpa ada bukti-buktinya. Lalu para pejabat akan menuduh orang yang dicurigai dan akan menahannya untuk waktu yang lama. Sering kali terbukti di kemudian hari bahwa orang itu tidak beralasan dan telah menjadi korban bujukan pejabat-pejabat. Oleh karena takut terhadap tindakan pembalasan gerombolan, pejabat-pejabat itu menangkap saja sembarang orang dan membujuk orang-orang lain untuk memberikan kesaksian palsu. Juga telah terjadi bahwa pejabat-pejabat, terutama anggota-anggota dinas rahasia, menggunakan kedudukan mereka untuk memperoleh keuntungan-keuntungan secara tidak sah, umpamanya dengan jalan melakukan pungutan liar, menahan orang untuk mendapat uang tebusan, atau memanfaatkan perkara-perkara yang belum diadili sebagai sumber pemerasan setengah resmi yang menguntungkan.[98] Sebagai contoh yang kongkrit akan disajikan kisah tentang apa yang dinamakan peristiwa Sakam.

Cerita tentang perampokan-perampokan di Banten tidak lengkap bila tidak mengisahkan pula riwayat petualangan yang sangat luar biasa dari perampok nomor wahid - yakni Sakam yang sangat terkenal dan yang perbuatan-perbuatannya yang berani dalam tahun-tahun 1880-an telah memaksa pemerintah memeras otak. Sakam adalah seorang petani muda yang secara tiba-tiba saja muncul sebagai orang terkemuka di daerah di mana banditisme selalu merajalela. Rasa takut yang ditimbulkannya bercampur dengan kekaguman yang mirip pemujaan,[99] namun demikian kepribadiannya tidak diselubungi suasana romantik seperti halnya pemimpin pemberontak seperti Mas Jakaria atau Tubagus Urip. Citra mengenai Sakam di kalangan rakyat adalah citra seorang penjahat yang ganas, yang hidup di hutan dan menyerang desa-desa, merampok dan membunuh. Oleh karena ia sangat perkasa, ia tidak bisa dibunuh atau ditawan.

Selain dari itu, keadaan medan yang buas sangat menguntungkannya dan menyebabkan polisi hampir-hampir tak mungkin melakukan pengejaran. Kabar-kabar angin tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa itu akhirnya sampai kepada pemerintah pusat di Batavia. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana mungkin Sakam mampu bertahan begitu lama dan terus melakukan kejahatan dan menteror daerah itu. Hal ini tak mungkin dipahami tanpa mengetahui kondisi-kondisi yang terdapat di Banten dalam tahun-tahun delapan puluhan.[100] Perbuatan-perbuatan yang samasekali tak mengindahkan undang-undang telah memaksa pemerintah untuk bertindak, akan tetapi daya-upayanya nampaknya tidak begitu berhasil. Para penjahat hanya berpindah tempat saja. Apabila pihak berwajib hendak melakukan pengejaran, bandit-bandit itu mendapat peringatan pada waktunya, sehingga dapat meloloskan diri. Pemerintah telah mengumumkan hadiah atas kepala Sakam. akan tetapi sia-sia saja. Sakam masih melakukan kejahatan-kejahatannya dari waktu ke waktu. Segenap pegawai pamongpraja terpaksa mengadakan pengepungan terus-menerus terhadap tempat persembunyiannya. Sekali waktu jaro Kedinding, Alim, berhasil memikat Sakam ke rumah seorang wanita bemama Boyot. Wedana Cikandi dan anak buahnya dengan cepat bertindak dan mengurung rumah itu. Kelihatannya Sakam akan segera dapat dibekuk. Pertarungan sengit pun terjadilah di mana Karidin - salah seorang kakitangan Sakam - tewas. Akan tetapi Sakam sendiri berhasil melarikan diri setelah melukai Raden Tisna, seorang saudara Wedana. Kembali ia berhasil meloloskan diri dari pengejar-pengejarnya.[101] Perkembangan peristiwa sekitar Sakam menjadi sangat merikuhkan, terutama bagi Gubernur Jenderal sendiri. la mengeluarkan perintah yang sangat mendesak dan tidak lama kemudian ada orang yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. la dipaksa untuk mengaku bahwa dialah Sakam yang sedang dikejar terus-menerus oleh pihak berwajib. Ketika pengadilan Batavia memeriksa perkara itu dalam bulan April 1886, vonisnya adalah bahwa orang yang didakwa sebagai Sakam itu ternyata adalah Suhari, jaro Lembur Sawah. Malahan, ia telah ditugaskan oleh patih Serang, Raden Surawinangun, untuk melacak Sakam di Batavia. Setelah skandal itu tersingkap, semua saksi yang dikirimkan ke Batavia untuk mengenali Suhari, dijebloskan ke dalam tahanan, yakni ayahnya, ibunya, dan saudaranya serta jaro Lembur Sawah yang baru.[102] Dapat ditambahkan bahwa seorang yang bernama Neumann, yang termasuk orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga Suhari, dengan cara yang lihay telah menarik keuntungan dari perkara itu dengan jalan menerima uang suap dari orang-orang yang bersimpati pada Suhari, dan bertindak sebagai perantara antara orang-orang Banten dan serdadu-serdadu Indonesia.[103] Sementara itu, Sakam yang sebenarnya masih terus berkeliaran dengan bebas, sampai pada akhirnya ia ditangkap oleh jaksa kepala Serang, Mas Jayaatmaja. Ketika sedang tidur di tempat persembunyiannya di tengah-tengah sebuah ladang tebu, Sakam dikepung oleh Bupati Serang dan anak buahnya. Kali ini ia tewas setelah terjadi pertarungan singkat dengan Mas Jayaatmaja.[104] Demikianlah akhir riwayat hidup seorang perampok yang selama bertahun-tahun telah berhasil melakukan "kejahatan-kejahatan". Ketika menerima kabar tentang kematian Sakam, pejabat-pejabat pemerintah di Banten merasa sangat lega, akan tetapi banyak orang tidak dapat diyakinkan bahwa Sakam benar-benar telah mati, oleh karena selama bertahun-tahun hidup sebagai bandit dan sebagai orang yang dinyatakan di luar hukum, ia dianggap mempunyai kesaktian dan dipercakapkan dengan rasa takjub.[105]

Pembahasan ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kecenderungan untuk memberontak di Banten disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan beraneka macam. Kemelaratan yang umum, administrasi yang buruk, ketimpangan di bidang ekonomi, ambisi pribadi - semua faktor-faktor itu memalnkan peranan penting dalam pemberontakan-pemberontakan yang silih berganti di Banten abad XIX. Saya juga telah mencoba menunjukkan peranan yang dimainkan oleh pelbagai golongan penduduk dalam pembentukan sebuah elite revolusioner yang merupakan inti dari tradisi pemberontakan. Orang dapat mengatakan bahwa dampak kekuasaan Belanda telah membantu menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di Banten abad XIX, akan tetapi sulitlah untuk memastikan dengan tepat perbandingan antara peranan tekanan dari luar dan peranan pembusukan dari dalam untuk melahirkan pergolakan itu. Kiranya tidak keliru untuk mengatakan bahwa dampak Barat telah mempercepat disintegrasi masyarakat tradisional dan telah meningkatkan kerusuhan-kerusuhan umum.

---

[1] Kita dapat membeda-bedakan antara pelbagai macam keresahan sosial, umpamanya keresaham revolusioner, karesahan agraris, keresahan keagamaan dan sebagainya. Istilah "keresahan sosial" ('Sosial unreat') yang dipakai di dalam bagian ini juga menunjuk kepada suatu keadaan tegang dan gelisah di kalangan penduduk sebagai satu gejala kacaunya atau ambruknya tatanan sosio-kultural. Ia dapat dipandang sebagai satu keadaan di mana kegiatan rakyat tidak terorganisasi dan tidak teratur lagi dan juga sebagai satu kancah peleburaa dari mana muncul bentuk-bentuk baru kegiatan yang terorganisasi, seperti gerakan-gerakan sosial, pemberontakan, kebangkitan kembali agama, dan sebagainya. Dilihat dari sudut ini, maka keresahan sosial dapat berkembang menjadi satu gerakan sosial. Sudah barang tentu hubungan antara kedua fonomena sosial itu juga bersifat timbal balik; gerakan-gerakan sosial, pada gilirannya, dapat mempercepat keresahan sosial. Lihat Blumer, dalam McLung, ed. (1963), hal.170-221.

[2] Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi antara 1810 dan 1870, seperti yang dilaporkan oleh de Weal (1876), berjumlah 19; kebanyakan di antaranya drbahas di dalam bab ini. Lihat de Waal, Vol. I (1876), haL 219-222. Mengenai ungkapan "tempat persemaian kerusuhan" (hotbed of disturbances'), lihat de Klerck, Vol. II; (1938-39), hat. 547.

[3] Lihat Appendix I, dalam Benda dan McVey (1960), hat. 67; gambar peta itu hanya menunjukkan tempat-tempat sebagai pusat-pusat pemberontakan dan tidak sebagai daerah yang dicakup oleh gerakan pemberontakan. Malahan titik-titik pusat dari beberapa pemberontakan pun tidak ditunjukkan dengan tepat, umpamanya pemberontakan 1850, yakni Gudang Batu dan Pulau Merak. Tempat-tempat yang terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan 1851, 1862 dan 1870 tidak ditunjukkan.

[4] Dalam laporannya, Residen Buyn menyatakan pendapatnya bahwa kepribadian orang Banten yang individualistis disebabkan oleh adanya lembaga hak milik pnbadi; lihat 77VI (1859), no. I hal.167. Laporan Banten itu menyebut-nyebut tentang adanya "semangat memberontak yang kronis", lihat Benda dan McVey (1960), hat. 20; juga Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV bagian 1 (1924), hat. 255. CL Spaan, dalam Almanak der Indologische Vereenigirsg (1893), hat. 222-223; H. Djajadiningrat, dalam Handelingen (1921), hal. 309, 322-324.

[5] Selama dasawarsa kedua, terdapat semacam absenteeism birokratis di kalangan pejabat-pejabat Eropa; di antara mereka yang tempat tugasnya di Pandeglang ada yang tetap tinggal di Serang. Baru dalam tahun 1819 pejabat-pejabat Eropa ditempatkan di Lebak dan Cilangkahan; lihat laporan Residen Buyn, dalam TNI (1870), no.2, hal. 324-325.

[6] Umpamanya, gerakan-gerakan pemberontakan tahun 1850 dan 1870; di dalam hampir semua pemberontakan terdapat pejabat-pejabat yang masih bertugas, atau yang sudah dipensiun atau dipecat, sebagai partisipan.

[7] Umpamanya, pemberontakan Tumenggung Mohamad dalam 1825, Lihat TNI, S. VII, Vol. 3 (1845), hal. 90; Francis, Vol. II (1856), hal. 54; Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832), hal. 227. Juga pemberontakan Cikandi Udik dalam 1845, lihat TNl (1859), no. 1, hal.142.

[8] Satu pembedaan konseptual harus diadakan antara gerakan sosial modern dan gerakan sosial tradisional, ditinjau dari aspek-aspek orientasi tujuannya. Berbeda dengan yang disebut pertama, yang disebut belakangan tidak bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam sistem sosial. Ciri tradisional pemberontakan-pemberontakan di Banten merupakan hal

yang menonjol; tujuan mereka adalah memulihkan kesultanan. Mengenai pembedaan ini, lihat Heberle (1951), hal. 6-7; cf. pembedaan yang diadakan oleh Hobsbawm (1958) antara agitasi yang kolot (archaic/ den agitasi yang modern. Menurut pengertian Hobsbawm ini, maka pemberontakan-pemberontakan di Banten harus digolongkan sebagai pra-politik dan kolot. Oleh karena orieatasi-tujuan pemberontakan-pemberontakan di Banten biasanya menyangkut baik perubahan penguasa maupun perubahan bentuk pemerintahan seperti yang ditegakkan oleh penguasa kolonial, maka tidak diadakan pembedaan antara pemberontakan (rebellion) dan revolusi (revolution). Beberapa kasus kecil mungkin lebih tepat dinamakan huru-hara (riot). Istilah "insurrection "dapat mencakup semua gerakan pemberontakan itu.

[9] Di samping aspek-aspek idealistis pemberontakan, juga ditekankan aspek-aspek materialistisnya - seperti dalam pemberontakan-pemberontakan tahun 1825, 1839, 1845 - yakni penghapusan kerja atau sewa tanah dan pajak-pajak lainnya. Lihat Laporan Politik, 1839-1849, dalam Exh. 31 Januari,1851 no. 27 bis, terutama mengenai Banten; juga 7NI (1859), no. 1, hal. 140-142, dan TNI (1870), no. 2, hal. 324; Lihat juga Veth, Vol. II (1898), hal. 404-405.

[10] Mengenai esensi milenarianisme, lihat Hobsbawm (1963), hal. 57-58; menurut pengarang ini hal tersebut terdapat di dalam semua gerakan revolusioner. Mengenai pemulihan keselarasan yang sudah hilang, lihat van der Kroef, dalam CSSH, Vol. I, no. 4 (1959), hal. 299-323. Mengenai gerakan-gerakan sosial di Pulau Jawa abad XIX, orientasi tujuannya lebih realistis dan tidak seabstrak pemahaman van der Kroef.

[11] Kelemahan kemampuan strategis pada umumnya tidak hanya menonjol dalam gerakan-gerakan sosial di Pulau Jawa abad XIX, akan tetapi merupakan satu fonemena yang global, lihat Pieris, dalam CJHSS, Vol. V (1962), hal.1828.

[12] Kelas atasan di pedesaan (rural gentry) dapat dibedakan dari kaum bangsawan (nobility); mereka dapat dipandang sebagai satu kategori lapisan sosial yang terletak di antara ariatoktasi (termasuk kaum bangcawan) dan kaum tani (peasantry). Mereka juga dapat didefinisikan sebagai kelas petani atau penduduk pedesaan yang lebih makmur. Mengenai konsepsi rural gentry ini, Lihat Eisenstadt (1963), haL 204-205. Banyak haji di Banten dapat dimasukkan ke dalam kelas ini.

[13] Kelas atasan di pedesaan (rural gentry) dapat dibedakan dari kaum bangsawan (nobility); mereka dapat dipandang sebagai satu kategori lapisan sosial yang terletak di antara ariatoktasi (termasuk kaum bangcawan) dan kaum tani (peasantry). Mereka juga dapat didefinisikan sebagai kelas petani atau penduduk pedesaan yang lebih makmur. Mengenai konsepsi rural gentry ini, Lihat Eisenstadt (1963), haL 204-205. Banyak haji di Banten dapat dimasukkan ke dalam kelas ini.

[14] Istilah "tingkat" ("degree') di sini menunjuk kepada aspek-aspek dimensi ruang dan waktu, dan juga kepada aspek-aspek orientasi-tujuan. Tingkat pemberontakan (rebellion) berkisar antara *outlawry, brigandage* dan *rioting* sampai kepada r*ebellion* dan *revolution*.

[15] Hock (1862), hal. 100.

[16] Laporan Residen Tobias, dalam TNI (1870), no. 2, hal. 321. Lihat juga "Overzicht van de staatkundige betrekkingen met de Inlandsche vorsten op Java, 1596-1830"; yang ditulis dalam tahun 1844, dalam dokumen no. 2962 dari Algemeen Rijksarchiej; bagian dari Kementerian Urusan Jajahan (Selanjutnya disingkat Overzicht).

[17] Mengenai Noriman, lihat TNI (1865), no. 1, hal. 88; juga TNI (1870), no.2, hal. 322.

[18] Nama-nama Mas Tanda dan Mas Jakaria disebut-sebut dalam historiografi Banten yang dikenal sebagai Sejarah Haji Mangsur; lihat manuskrip Jawa dalam koleksi Snouck Hurgronje, no. 10.

[19] TNI (1870), no. 2, hal. 323; untuk Wormasi lebih lanjut mengenai sistem sistem komumlkasi kaum pemberontak, TNI (1859), no. 1 hal. 163. Mereka menggunakan agen-agen khusus, di antaranya kadang-kadan terdapat anggota-anggota dinas rahasia. Begitu pula halnya dengan pemperontakan tahun 1850.

[20] Laporan Residen Tobias, dalam TNI (1870), no. 2, hal. 320-321 lihat juga OIB 18 Januari 1819, no. 19 dan OIH. 30 Jan. 1819, no. 18; Over zicht (1844). Lihat selanjutnya, Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832) hal. 88-89; Hoek (1862), hal.106-107.

[21] Hoek (1862), hal. 106-107; van Deventer, Vol. I (1891), hal. CLXVI.

[22] Laporan Residen Tobias, dalam 77V1 (1870), no. 2, hal. 324; lihat juga OIB. 24 Jan. 1843, no. 6; Overzicht (1844).

[23] OIB. 3 JuB 1819, no.10,11, dan 33; yakni mengenai pengangkatan P. Suramenggala sebagal bupati Kabupaten Utara; pengangkatan. Senajaya sebagai bupati Kabupaten Selatan; pengangkatan R.B. Mulafar sebagai patih di Kabupaten Utara; dan selanjutnya, pengangkatan 7 pemimpin pasukan Jayengsekar. Lihat juga 0verzicht (1844).

[24] Francis, Vol. II (1856), hal. 53-54.

[25] De Waal, Vol. I (1876), hal. 219.

[26] Dalam tahun 1820 Mas Raye memimpin sebuah gerakan menentang vaksinasi cacar; dalam tahun 1822 Anyer diserang oleh 500 pemberontak yang bersenjata; lihat de Weal, Vol. 1 (1876), hal. 219; Laporan Residen Tobias, TNI (1870), no. 2, hal. 326. Dalam laporan itu dikemukakan bahwa laporan-laporan yang terperinci mengenal kerusuhan-kerusuhan sebelumnya sangat jarang di Kantor Arsip Banten.

[27] CC kelima sumber; Roorda van Eysinga, Vol. IV (1832), hal. 227; Roorda van Eysinga, Vol. III, bagian 2 (1842), hal. 313-315; TNI, S. VII, Vol. 3 (1845), hal. 90; Francis, Vo1.II (1856), hal. 54-56; Hageman (1856), hal. 165-166.

[28] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[29] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[30] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[31] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[32] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[33] OIB. 28 Sept. 1827, no. 11, yang menyatakan bahwa Jakaria sudah kehilangan sebagian besar pengikutnya; lihat juga Overzicht (1844); Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, 144; Francis, Vol. II (1856), hal. 66.

[34] Roorda van Eysinga, Vol. N (1832), hal. 227-231.

[35] Gerombolan-gerombolan pemberontak yang berkeliaran dan dipimpin oleh Kiyai Gede, Mas Jebeng, Nyai Gumpara, Mas Lamir, Master Jago, dan Haji Tassin, disebutkan di dalarn OIB. 6 Sept. 1831, no. 16; OIB. 6 Jan. 1833, no. 19; OIB. 14 Apr. 1840, no. 6. Lihat juga Laporan

Politik, 1839-1849, khususnya mengenai Banten, dalam Exh. 31 Jan. 1851, 27 bis. Mengenai tahun pecahnya pemberontakan-pemberontakan, cf. Veth, yang menyebutkan tahun-tahun 1832, 1834, 1836 dan 1839 sebagal tahun pecahnya pemberontakan-pemberontakan itu; lihat Veth, Vol. II (1898), hal. 404-405.

[36] OIH.18 Des. 1840, no. 10.

[37] *Nopal* adalah singkatan *Nopalea Coccineleifera*, sejenis pohon semak yang ditanam untuk makanan ternak, atau untuk memelihara *cochineal*, sejenis serangga yang menghasilkan bahan pewarna merah. Lihat Bruggeman (1939), hal. 252, juga van Hall dan van de Koppel, Vol. IIA (1948), hal. 744.

[38] OIB. 28 Nov. 1842, no. 2.

[39] Menurut OIB. 16 Sept. 1846, no. 18, 26 orang telah dibuang ke Menado, Banka, dan Timor; menurut OIB. 14 Apr. 1840, no. 6, 35 orang dibuang ke Menado dan Banyuwangi; menurut OIB. 24 Jan. 1843, no. 6,12 orang.

[40] *Javasche Courant*, 14 Jan. 1846, Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, hal. 145; lihat juga Surat Resmi Residen Banten, 30 Jan. 1846, no. 130, dalam Vb. 27 Feb. 1846, no. 45.

[41] Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, hal. 153.

[42] Laporan Residen Buyn, dalarn TNI (1859), no. 1, hal.158,161).

[43] Kabar-kabar angin telah tersiar dalarn bulan Puasa tahun 1844 dan 1845. Ketika itu anak-anak Mas Jakaria rupa-rupanya sudah melarikan diri dari tempat pengasingan mereka; lihat OIB. 28 Nov. 1842, no. 2.

[44] Laporan Residen Huyn, dalam TNI (1859), no. 1, hal. 149, 163; lihat juga OIB. 8 Ag. 1846, no. 25.

[45] Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no.l, hal.160.

[46] Lihat OIB. 3 Maret 1846, no. 7; juga OIB. 8 Ag. 1846, no. 25 dan OIB. 28 Ag. 1846, no. 1.

[47] Laporan Residen Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, hal. 149. Menurut rencana, Tanara dan Pardeglang akan diserbu; komunikasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Batavia dan Bogor Selatan, akan diselenggarakan terus. Jika kaum pemberontak menderita kekalahan, mereka akan mundur ke Caringin.

[48] Laporan Politik: 1839-1849, dalam Exh. 31 Jan. 1851, no. 27 bis, terutama yang mengenai Banten. Nyai Perbata beroperasi dari Sawarna di Banten Selatan; tujuannya adalah memulihkan kesultanan.

[49] Laporan Redden Buyn, dalam TNI (1859), no. 1, hal.144.

[50] Disebut-sebut adanya kecenderungan ke arah pemusatan pemilikan tanah di satu pihak dan pemiskinan petani-petani kecil di lain pihak; lihat Laporan Residen Buyn, dalam 77V1 (1859), no.l, hal. 106-107. Proses yang pertama adalah akibat perampasan hak atas tanah atau pemilikan secara tidak sah atas sawah negara sebagai *sawah yasa* Lihat Bab II hal 55ff. Pemeluatan juga disebabkan oleh penggadaian atau penjualan sawah, lihat Resume (1871), hal. 93-94, 119. Sistem sewa tanah selama pemerintahan Raffles juga telah melahirkan sekelompok kecil pemilik tanah yang menguasai tanah yang luas, lihat van Deventer, Vol. I (1891), hal. 147; lihat juga Bastin (1954), hal.107-112, terutama hal.109 di mana dicantumkan nama orang-orang yang memiliki tanah-tanah yang luas.

[51] Pada saat penulisan studi ini, terdapat sebuah laporan mengenai kampanye militer untuk menumpas pemberontakan Wakhia, hftt Vb. 15 Jan. 1851, L' C, no. 23. Mengenai berita tentang meletusnya pemberontakan itu, Lihat Javasche Courant, 6 Maret 1850.

[52] Lihat Bab III, hal. 118 dan 121; juga Laporan Politik mengenai Banten, 1850, dalam Exh. 14

Des. 1852, no. 438.

[53] Pengangkatan Condronegoro sebagai bupati Serang dan Kusumanegara sebagai bupati Caringin; OIB. 10 Maret 1848, no. 23 dan OIB. 21 Okt. 1849,no.17.

[54] Lihat Kielstra (1917), hal. 67-68; juga Multatuli, Volledige Werken, Vol. I (1950), hal. 87; OIB. 30 Sept. 1851.

[55] Lihat Kielstra (1917), hal. 67-68; juga Multatuli, Volledige Werken, Vol. I (1950), hal. 87; OIB. 30 Sept. 1851.

[56] Van Rees (1859), hal. 27.

[57] Laporan mengenai kampanye militer, dalam Vb. 15 Jan. 1851, L^3 C, no. 23; cf. van Rees (1859), hal. 67.

[58] Laporan mengenai kampanye militer, dalam Vb. 15 Jan. 1851, L^3 C, no. 23; cf. van Rees (1859), hal. 86.

[59] Van Rees (1859), hal. 86; Kielstra (1917), hal.170.

[60] Lihat Catalan atas PV 26 Maret 1889, dalam Exh. 14 Mei 1889, no. 202

[61] R.B. Jayakarta ditangkap pada tanggal 15 April 1850, bersamaan waktunya dengan penangkapan atas R.B. Suramarja; lihat Laporan mengenai kampanye militer, dalam V6.15 Jan. 185 1, LO C, no. 23.

[62] Ibidem.

[63] Jayakarta diasingkan ke Menado; Suramarja dan Mustafa, Lurah Nasid, Diad, Derik dan 8 orang lainnya ke Ternate; 12 orang ke Ambon, 130 orang ke Banda. Tiga puluh orang di antara mereka diasingkan selama 10 tahun, 56 orang selama 8 tahun, dan 44 orang selama 5 tahun; di antara mereka terdapat banyak kepala desa; Lihat OIB. 30 Okt.1850, no. 2.

[64] Lima lurah dipaksa untuk menangkap kaum pemberontak dan diancam akan dihukum apabila mereka tidak berhasil. Dilaporkan bahwa pada tahap yang kemudian dalam kampanye itu semua kepala desa dikerahkan untuk mengejar kaum pemberontak; lihat Laporan mengenai kampanye militer, dalam Vb.15 Jan. 1851, L^3C, no. 23.

[65] Desa Tegal Tongling yang makmur dibakar habis, demikian pula semua desa lainnya yang memberikan bantuan kepada kaum pemberontak, lihat van Rees (1859), hal. 58, 66.

[66] Lihat de Waal, Vol. I (1876), hal. 221; juga disebutkan tentang kegiatan kegiatan persiapan untuk menimbulkan kerusuhan-kerusuhan dalam tahun 1855; dalam tahun 1864, 500 orang bersenjata dikerahkan di Bongkok dan siap untuk menyerbu Rangkasbitung, lihat Kolonial Verslag,1864, hal. 4.

[67] Lihat Laporan Politik, 1851, dalam Exh. 27 Mei 1853, no. 225, terutama yang mengenai Banten.

[68] OIB. 2 Des. 1851, no. 12.

[69] Surat resmi dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderat, 22 Sept. 1862, dalam Vb. 18 Nov. 1862, no. 23.

[70] Kawat dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 19 Sept., 1862, dalam Vb.18 Nov. 1862, no. 23.

[71] Surat resmi dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 4 Agustus 1866, dalam Vb. B Okt.1866, C ^{12}.

[72] OIB. 20 April 1866, no. 5, mengenai pemecatan Mas Sutadiwiria; lihat juga surat resmi dari residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 4 Agustus 1866.

[73] Menurut OIB. 10 Maret 1866, no. 13, Natadiningrat dipensiun atas permintaannya sendiri.

Tuduhan terhadap dirinya tidak dapat dibuktikan, oleh karena suatu konfrontasi dengan dua partisipan di dalam komplotan itu tidak menyingkapkan sesuatu. Diputuskan bahwa ia harus tinggal di Serang, sehingga semua kegiatannya dapat diawasi; lihat OIB. 17 Mei 1867, no. 26. Persoalan itu muncul kembali dalam dunia politik Banten dalam kaitannya dengan pencalonan A. Djajadiningrat -cucunya- sebagai bupati Serang, Lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 111-113.

[74] Dari ke-32 tersangka, 9 orang berasal dari distrik Cikande, 13 orang dari Kolelet, 3 orang dari Lebak, 4 orang dari Kramat Watu, dan seorang dari Tangerang. Lihat daftar para tawanan, 3 Agustus 1866, dalam vb. 8 Okt. 1866, $C^{2.}$ Cikande Udik dan Cikande Ilir adalah dua daerah perkebunan yang terletak di bagian timur Keresidenan Banten; oleh karena berada di luar yurisdiksi pejabat-pejabat pemerintah, kedua daerah itu dengan mudah dijadikan tempat persembunyian para pelarian. Selain itu, tuan tanah tidak mempunyai pasukan polisi. Hanya apa yang dinamakan *cungkak* - mandor desa - diangkat untuk menetapkan pajak. Mengenai sejarah perkebunan Cikandi, lihat Faes (1895).

[75] Upacara pembayatan gerakan Ilmu Tarik sangat menyerupai upacara pembayatan kebanyakan tarekat. Karena persamaan-persamaan itu, penulis ini cenderung untuk mengidentifikasikan Ilmu Tarik itu sebagai semacam tarekat Sufi. Dokumen-dokumen tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang kongkrit mengenai soal ini.

[76] Lihat pertimbangan dan advis Mahkamah Agung, 18 November 1869; juga kesaksian Alwan; kedua dokumen itu terdapat dalam Exh. 6 Sept. 1870, Z^{11}.

[77] Surat resmi dari Residen Banten, 19 Okt. 1869, L° DvI; juga surat resmi Residen, 17 Sept. 1869, L° MVI; kedua surat itu terdapat dalam Exh. 6 Sept. 1870, Z^{11}.

[78] Pertimbangan dan saran dari Jaksa Agung, 18 Nov. 1869, dalam Exh. 6 Sept. 1870, Z^{11}.

[79] Berdasarkan advis Dewan Hindia, Gubernur Jenderal memerintahkan pembebasan Jayakusuma, OIB. 24 Mei 18?0, L° X.

[80] Mengenai hubungan-hubungan kekerabatannya, lihat Appendix III, lihat juga Surat resmi Residen Banten, 19 Okt. 1869, L° D

[81] Lihat berita scara penyelidikan yang dilakukan oleh Bupati Serang, Kontrolir Serang dan Jaksa Kepala, lihat PV 16,17,18, dan 21 Nov. 1869, dalam Exh.1870, Z^{11}.

[82] PV. 17 dan 21 Nov. 1869. Mengenai tenaga kerja paksa yang ia gunakan untuk kebun kelapanya di Kadikaran, lihat Bab II, hal. 60.

[83] Surat resmi Residen Banten,19 Okt. 1869, La Div

[84] Ibidem.

[85] Pertimbangan dan advis Jaksa Agung, 18 Nov. 1869 ; Surat dari Ahvan, lihat catatan no. 76. Lihat juga Surat resmi Residen Banten, 19 Okt. 1869, L° DvI.

[86] Abdulkarim juga diidentifikasikan sebagai Louis Meyer; keterangan lebih lanjut mengenai dirinya terdapat dalam pertimbangan dan advis Jaksa Agung, 18 Nov. 1869.

[87] Surat resmi Residen Banten,19 Okt.1869, L° Wv'.

[88] Ibidem.

[89] Mengenai istilah-istilah *brigandage, banditry*, dan *outlawry;* menurut konsepsi Hohsbawm, maka sebagai bentuk-bentuk sikap memberontak individual atau kolektif, fenomen-fenomen itu sendiri adalah netral dari segi sosial; lihat Hobsbawm (1963), hal. 13. Sesuai dengan pandangan politik yang mewarnai sudut pandangan pengamat, maka fenomen-fenomen itu nampak sebagai kriminalitas yang jahat atau sebagai sikap memberontak yang idealistis. Penguasa kolonial menggunakan sudut pandangan yang pertama, dan dalam laporan-laporan

atau tulisan-tulisannya ia selalu menyebutkan "*rooverijen*" (perampokan) tanpa mengakui aspek-aspek pemberontakan atau aspek-aspek protes sosialnya.

[90] Contoh-contoh dari periode awal kekuasaan Belanda di Banten: hadiah telah dijanjikan bagi yang dapat menangkap Mas Jamir, OIB. 18 Des. 1819, no. 10; juga Usin dan Kasin, OIB. 6 Jan. 1833, no. 19; dan mengenai Mas Lamir, OIB.14 April 1840, no. 6.

[91] Umpamanya, Mas Jakaria dan keluarganya dianggap sebagai perampok, lihat Overzicht (1844), Noriman, Mas Bangsa, Haji Tassin, dan sebagainya lihat Hoek (1862), hal. 106; van Deventer, Vol. I (1891), hal. CLXVI, 468-469. Lihat juga OIB. 6 Sept. 1831, no. 16.

[92] Mengenai aspek-aspek magic-religius perampokan, lihat Wulfften-Palthe (1949), juga Meyer, dalam Indanesie; Vol. III (1949-1950), hal. 178189.

[93] Mengenai cerita tentang Conat, lihat Pangemanann (1900). Operasi-operasinya kebanyakan terbatas di Jakarta dan Bogor, akan tetapi ia juga pernah bersembunyi di Cikandi untuk beberapa lama. Mengenai kisah singkat tentang Kemudin, lihat WNI (1888-1889), hal. 989-990.

[94] A. Djajadiningrat (1936), hal. 4-5.

[95] A. Djajadiningrat (1936), haL 112 -173; yang relevan bagi masalah kita adalah praktek-praktek gerombolan pencuri kelapa dan pencuri ikan kolam di Banten, di waktu-waktu yang lebih belakangan, seperti yang dilukiskan oleh Weyer (1946), hat. 19-27, atau di dalam artikelnya dalam Indonesia, Vol. III (1949-1950), hal. 184-187.

[96] Meskipun ditulis dalam bentuk roman, buku karya Boeka mengenai Pah Troena (sic) melukiskan situasi-situasi sosial di Pulau Jawa abad XIX, yang relevan sekali bagi masalah kita tentang hubungan kekuasaan antara pegawai pamongpraja, petani biasa dan perampok biasa; lihat Boeka (1901).

[97] Untuk memberikan sekedar gambaran tentang kekuatan sosial kaum bandit atau kaum penyamun, kami menunjuk kepada daerah-daerah lain di Pulau Jawa abad XIX, seperti di Surakarta dan Yogyakarta, di mana perampokan merajalela dalam tahun-tahun 1870-an dan 1880-an; lihat Vb. 4 Mei 1868, no. 18 dan Vb. 16 Juli 1868, no. S; juga Groneman (1887). Di Banten perampokan masih endemik dalam tahun-tahun 1890-an dan dijuluki "semut gatal" ("itching ants'), lihat A. Djajadiningrat (1936), hal.108.

[98] Lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 172, mengenai penyelewengan-penyelewengan semacam itu di pihak dinas rahasia; Ghat juga van Sandick (1892), hal. 163, mengenai praktek-praktek Neumann. Snouck Hurgronje menunjuk kepada kesaksian-kesaksian palsu yang diberikan terhadap orang-orang yang dicurigai telah turut dalam pemberontakan di Cilegon; lihat Catatannya tertanggal 15 Agustus 1892; juga Snouck Hurgronje, dalam VC, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 427.

[99] Van Sandick (1892), hal. 161: sebuah contoh klasik adalah Ken Arok, pendiri dinasti Singasari pada permulaan abad XIII.

[100] Praktek-praktek korup di Banten telah dilukiskan di dalam Bataviasch Handelsblad, Mail Editie, 1885, hal. 509-511, b20-621.

[101] IWR, Vol. XXIV, no. 1192 (1886), hal. 70.

[102] IWR, Vol. XXIV, no. 1192 (1886), hal. 71.

[103] Van Sandick (1892), hal. 163-164.

[104] Surat resmi Residen Banten, 20 Okt. 1886, no. 2665J18, dalam MR 1886, no. 681; lihat juga Java Bode, 15 Sept. 1886; A. Djajadiningrat (1936), hal. 94-96.

[105] Malahan dalam usaha mencari penghasut-penghasut utama peristiwa Cilegon pun, nama Sakam telah disebut-sebut, lihat De Locomotief, 14 Juli 1888.

Bab V

KEBANGUNAN AGAMA

KECENDERUNGAN-KECENDERUNGAN UMUM

Satu aspek dari masalah yang diketengahkan dalam studi ini berpusat pada latar belakang keagamaan pemberontakan di Banten. Bagian akhir dari abad XIX merupakan satu periode kebangkitan kembali di bidang agama, dan dengan sendirinya menariklah untuk menyelidiki sampai sejauh mana hal itu telah merangsang gerakan pemberontakan di Banten yang merupakan pokok studi ini. Kondisi-kondisi yang terdapat dalam lingkungan sosio-kultural di Banten seperti yang telah dilukiskan dalam bab-bab terdahulu tidak disangsikan lagi telah mempersiapkan tanah yang subur bagi timbulnya gerakan kebangkitan kembali kehidupan beragama. Tidak raja rakyat di sana merupakan penganut-penganut agama Islam yang sudah mendarah-daging; ambruknya tatanan tradisional dan gejala yang menyertainya, yakni keresahan sosial yang terus-menerus, telah mendorong peningkatan kegiatan di bidang agama. Seperti akan ditunjukkan, proses itu sangat membantu mempercepat persiapan pemberontakan. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa gerakan-gerakan protes keagamaan merupakan produk kekuatan-kekuatan sosial yang lama yang menunjang sikap-sikap memberontak. Tahap perkembangan yang telah dicapai dalam tahun-tahun delapan puluhan mengisyaratkan bahwa gerakan keagamaan itu berusaha untuk membenarkan aspirasi-aspirasi politik. Di satu pihak terdapat rasa ketersingkiran politik, dan di lain pihak terdapat reafirmasi tradisi. Mayoritas kaum elite agama, yang sudah kehilangan hak-hak mereka di bidang politik, bertindak sebagai sebuah golongan protes, yang menentang lembaga-lembaga baru. Di lihat dari segi ini, gerakan kebangkitan kembali keagamaan di Banten dapat diidentifikasikan sebagai sebuah gerakan religio-politik, yang menampung pelbagai golongan sosial. Di Banten abad XIX, kebangkitan kehidupan agama dan jenis-jenis gerakan sosial lainnya nampaknya mempunyai banyak persamaan, khususnya dalam hal cita-cita milenarisnya dan landasannya yang terdiri dari kelas bawahan. Pemberontakan-pemberontakan yang telah dibahas hingga kini mempunyai warna agama; namun demikian, pemberontakan-pemberontakan itu bagaimanapun tak dapat dinamakan gerakan keagamaan, oleh karena lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas keagamaan tidak memainkan peranan apa pun dalam gerakan-gerakan itu. Akan ditunjukkan nanti, bahwa dalam gerakan kebangkitan kembali kehidupan agama, badan-badan keagamaan memainkan peranan yang sangat menonjol dan merupakan pusat-pusat protes politik. Meskipun harus diandaikan bahwa pada tahap ini gerakan keagamaan merupakan saluran bagi ketidakpuasan dan frustrasi, yang tanpa saluran itu akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial, gerakan itu kelihatannya menempuh satu jalan revolusioner. Kebencian terhadap dominasi Belanda yang dipaksakan dan rasa permusuhan yang sangat mendalam terhadap segala hal yang berbau asing, yang mendasari keresahan umum, sekarang menemukan jalan keluar baru berupa persekutuan dengan gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim. Sebagai akibatnya, maka gerakan-gerakan itu tidak saja bertambah kuat, melainkan juga memperoleh satu sarana kelembagaan yang lebih efektif, yakni tarekat. Seperti akan kita lihat nanti, kebangkitan kembali kehidupan agama itu menjadi satu alat untuk mengerahkan orang-orang untuk tujuan pemberontakan dan bukan merupakan gerakan keagamaan yang murni.

Selama beberapa dasawarsa, sebagian besar Pulau Jawa dilanda gerakan kebangkitan kembali kehidupan agama, yang memperlihatkan peningkatan yang sangat luar biasa dalam kegiatan agama, seperti melakukan salat, naik haji, memberikan pendidikan Islam tradisional kepada anak-anak muda, mendirikan cabang-cabang tarefrat, penyelenggaraan khotbah yang

meluas, dan sebagainya. Dalam bagian akhir tahun-tahun 1850-an, Holle mencatat bahwa para bupati masih harus mengeluarkan perintah agar rakyat lebih taat dalam menjalankan ibadah mereka.[1] Beberapa tahun kemudian, satu kebangkitan kembali kehidupan agama memanifestasikan dirinya dalam peningkatan jumlah pesantren dan orang-orang yang naik haji.[2] Selain itu, pembangunan sejumlah besar mesjid dan musholla juga dapat dipandang sebagai satu pertanda meningkatnya ketaatan beribadah umat Islam. Khusus mengenai daerah-daerah yang penduduk Muslimnya sangat dominan, informan-informan kami menunjukkan bahwa di waktu itu rakyat sangat menghormati para haji, dan bahwa dengan prestise mereka yang sangat besar, para haji itu dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong rakyat agar lebih mentaati kewajiban-kewajiban agama mereka.[3] Sampai sejauh mana aspek kebangunan agama ini membahayakan rezim kolonial akan menjadi pokok pembahasan yang khusus. Dalam mencari rangsangan dari luar bagi kebangkitan kembali kehidupan agama itu, banyak orang yang sedang mendalami agama Islam di Indonesia tidak mempelihatikan kenyataan bahwa perang Rusia - Turki - yang di Indonesia dikenal sebagai Perang Rus - mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap alam pikiran kaum Muslim yang hidup di "negeri-negeri di bawah angin".[4] Rakyat Indonesia ingin sekali mengetahui perkembangannya, dan setiap kemenangan di pihak Sultan Rum dirayakan secara meriah dengan doa-doa dan sedekah.[5] Di samping bukti tentang adanya benih Pan-Islamisme ini, kita juga harus memperhitungkan sistem komunikasi yang luas di dunia Islam, yang telah dibangun melalui pelaksanaan ibadah naik haji, hal mana berarti bahwa berita-berita tentang komunitas Islam dapat mencapai tempat-tempat yang paling jauh. Dalam hubungan ini harus dikemukakan bahwa di banyak bagian dunia Islam, kebangunan kehidupan agama dimulai hampir bersamaan waktunya dengan perlombaan di antara negara-negara imperialis untuk memperoleh daerah-daerah jajahan dalam pertengahan kedua abad XIX. Pada umumnya diandaikan bahwa ada suatu korelasi antara ekspansi negara-negara kolonial dan Pan-Islamisme atau kebangunan kembali kehidupan agama.[6] Persoalannya adalah, apakah anggapan itu juga berlaku bagi perkembangan Islam di Indonesia pada umumnya dan di Banten pada khususnya.

Suatu penyelidikan mengenai perkembangan umum Pan-Islamisme dan kebangunan kehidupan agama menunjukkan bahwa selama periode itu kedua hal itu secara menyolok ditandai oleh karakterlstik-karakteristik yang, pada dasarnya anti-Barat. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Imperialisme Barat sedang memperoleh kemajuan-kemajuan besar; dalam periode yang gawat itu, pemikiir-pemikir Muslim menyadari sepenuhnya bahwa dunia Islam sedang terancam bahaya yang semakin besar akan jatuh ke bawah dominasi Barat. Menghadapi ancaman dari Barat ini, kaum Muslim di bagian-bagian luas Dunia Bulan Sabit memperlihatkan fanatisme yang militan yang timbul dari perasaan benci terhadap penakluk-penakluk yang kafir itu.[7] Maka tidaklah mengherankan jika fanatisme dan semangat militan yang menggelora di Timur Tengah dan Afrika Utara selama pertengahan kedua abad XIX, bergema pula di kalangan kaum Muslim Indonesia. Kontak yang lebih erat antara daerah-daerah yang sangat berjauhan satu sama lain dalam dunia Islam telah dipermudah oleh ibadah naik haji yang terus meningkat dengan adanya komunikasi dan perjalanan yang lebih baik. Kita akan membatasi diri pada Indonesia dalam mempelajari pelbagai bentuk dan tahap kebangkitan kembali kehidupan agama itu.

Pada umumnya, dalam kebangkitan kembali religiositas itu terdapat suatu reaksi tertentu terhadap westernisasi, akan tetapi jelas ada pelbagai jenis tanggapan dan tingkat kecepatan penyesuaian yang berbeda-beda. Kita tidak boleh lupa bahwa kebijaksanaan Belanda yang bercorak liberalistia mengenai agama, memberikan ruang bergerak kepada pelbagai macam gerakan keagamaan, dari yang bersifat damai dan mau menyesuaikan diri sampai kepada yang radikal dan agresif. Soal mengenai gerakan yang mana yang muncul, untuk sebagian besar tergantung kepada medan sosia-kultural dan posisi kekuasaan kaum elite agama di dalam konteks itu. Dalam hubungan ini, perasaan takut yang dominan di kalangan pejabat-pejabat pamongpraja Eropa terhadap semua gerakan yang dengan jelas mempunyai orientasi keagamaan, dapat ditelusuri kembali kepada suatu *haji-fobi*.[8] Harus diakui bahwa, oleh karena di dalam Islam tidak ada pembedaan antara komunitas agama dan komunitas politik, setiap gerakan protes keagamaan dengan mudah berubah menjadi sebuah gerakan politik. Umum mengetahui bahwa persaudaraan-persaudaraan religius di banyak daerah di dunia Muslim

terseret ke dalam gerakan religio-politik semacam itu. Di dalam hubungan ini, kaum haji dianggap sebagai satu bahaya yang potensial bagi penguasa kolonial, sejauh mereka dapat memimpin suatu gerakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik yang menonjol dari gerakan-gerakan keagamaan yang radikal dalam pertengahan kedua abad XIX adalah pengutukan yang keras terhadap dominasi Barat dan serangan-serangan yang tajam terhadap lembaga--embaga baru yang diberlakukan.[9] Oleh karena golongan-golongan yang memprotes itu merupakan masyarakat-masyarakat yang telah ditaklukkan, yang protes religiusnya berasal dari satu tradisi keagamaan yang berbeda, maka gerakan itu cenderung untuk menuju konflik. Bentuk-bentuk gerakan keagamaan yang ekstrim itu tidak mau menyesuaikan diri,[10] dan menduduki tempat yang penting dalam perjuangan mempertahankan kesadaran akan martabat dan harga diri dalam menghadapi situasi ketersingkiran dan diskriminasi.[11] Seperti dikatakan oleh seorang ahli mengenai Islam, "setiap inferioritas yang ada dirasakan hanya sebagai hal yang lahiriah saja, artinya hanya menyangkut kekuatan fisik, dan bukan kekuatan rohani".[12] Sebaliknya, ada golongan-golongan agama yang menekankan keharusan menerima kekuasaan Belanda secara damai dan mendorong penyesuaian diri dengan sistem politik yang baru. Sebagai akibatnya, maka timbullah perpecahan dan golongan-golongan yang saling bertentangan dalam perkembangan gerakan-gerakan keagamaan itu. Satu pembahasan mengenai gerakan-gerakan khusus di tempat lain dalam bagian ini mungkin bermanfaat bagi analisa mengenai masalah ini.

Mengenai Banten dalam tahun-tahun 1880-an, dapat dikemukakan bahwa tarekat-tarekat telah berkembang menjadi golongan-golongan kebangkitan kembali yang paling dominan. Pada permulaannya tarekat-tarekat itu pada dasarnya merupakan gerakan-gerakan kebangkitan kembali agama, akan tetapi secara berangsur-angsur mereka berkembang menjadi badan-badan politik keagamaan. Mereka membentuk alat-alat kelembagaan untuk kegiatan politik yang ekstrim. Merella menolak keras proses westernisasi dan bertekad untuk mempertahankan lembaga-lembaga tradisional terhadap pengaruh dan campur tangan Belanda. Didorong oleh kebencian terhadap orang asing mereka menggunakan kekerasan terhadap penguasa Belanda dan juga terhadap sesama orang Muslim yang bekerja lama dengan Belanda. Perkembangan protes keras ini dapat ditafsirkan berdasarkan kondisi-kondisi sosial yang bersifat ekstem dan rangsangan spesifik yang terdapat di Banten dalam tahun-tahun delapan puluhan.

Mengenai ajaran-ajaran Sufi, kita mengetahui dengan pasti bahwa ajaran-ajaran itu telah masuk ke Indonesia sejak abad XVI atau awal abad XVII.[13] Tarekat Satariah tadinya disebarkan di Aceh oleh Abdurra'uf darl Singkel.[14] Sejak abad XVII, gerakan Satariah menyebar dari Aceh ke Jawa Barat dan dari sana ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang menyebarkan tarekat Satariah di Jawa Barat adalah Syekh Abdul Muhyi dari Karang, seorang murid Abdurra'uf.[15]

Seorang mistikus Kadiriah yang sangat terkenal adalah Hamzah al-Fansuri, yang telah mengunjungi pelbagai tempat, termasuk Banten, sebagai seorang darwis pengembara.[16] Khususnya Banten telah mengadakan kontak dengan Mekah sejak pertengahan pertama abad XVII, dengan jalan mengirimkan berulang kali misi-misi ke sana untuk mencari informasi mengenai soal-soal keagamaan.[17] Dalam pertengahan kedua abad XIX, Banten terkenal sebagai sebuah pusat Islam ortodoks, di mana pengetahuan tentang agama dan cara hidup yang sesuai dengan ketentuan agama sangat dihargai.[18] Terdapat petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa aliran Kadiriah telah memasuki masyarakat Islam di Banten sebelum abad XIX,[19] akan tetapi ketika itu belum mencapai momentum yang vital. Dilihat dari segi latar belakang historis ini, maka perkembangan aliran Kadiriah di Banten selama bagian akhir abad XIX dengan jelas menandakan suatu kebangkitan kembali dalam arti yang sesungguhnya.

Kembali kepada pembahasan mengenai karakteristik-karakteristik gerakan keagamaan: satu segi yang menarik adalah perkembangan perpecahan yang merupakan perpanjangan dari apa yang terdapat di dalam daerah inti dunia Islam - birokrasi keagamaan berhadapan dengan mereka yang sudah mempunyai kedudukan mapan sebagai guru agama atau pemimpin perkumpulan agama, persaingan di antara tarekat-tatekat, pertentangan antar-kelompok di dalam tarekat itu sendiri. Kegiatan-kegiatan kebangunan yang dipimpin oleh pemuka-pemuka perkumpulan agama diikuti dengan kecurigaan dan permusuhan oleh kaum ulama resmi. Oleh

karena kekuatannya terletak dalam daya tariknya bagi rakyat, perkumpulan-perkumpulan agama cenderung untuk menjadi basis persekutuan untuk melancarkan gerakan-gerakan protes keagamaan. Persaingan di antara pelbagai perkumpulan itu di beberapa daerah sering kali menyebabkan mereka kehilangan banyak enersi dan vitalitas. Di samping itu, munculnya gerakan-gerakan pembaruan yang modernistik di kemudian hari telah menyebabkan semakin mendalamnya perpecahan di antara gerakan-gerakan kebangkitan kembali agama.[20]

Pemerintah kolonial telah menciptakan suatu struktur keagamaan yang institusional yang terdiri dari satu hirarki pejabat-pejabat agama yang profesional, dengan fungsi-fungsi dan kekuasaan-kekuasaan yang diakui secara resmi.[21] Golongan pejabat-pejabat agama resmi ini biasanya membiarkan diri dijadikan alat kebijaksanaan kolonial Belanda untuk menindas manifestasi kegiatan-kegiatan perkumpulan-perkumpulan agama pada khususnya, dan untuk membendung arus kebangkitan kembali agama pada umumnya. Mereka dibujuk untuk mengulangi atau membela ide-ide sekular yang dimasukkan oleh pemerintah kolonial. Dengan adanya sekularisasi, kaum ulama sebagai eksponen-eksponen paling utama dari warisan agama Islam terpecah menjadi golongan "sekularis" dan golongan "kebangunan"; golongan yang pertama diberi status formal di dalam kerangka birokrasi kolonial, sedangkan golongan yang kedua tidak memperoleh status itu dan hanya dapat bertahan terus hampir semata-mata berkat adanya ketaatan dan dukungan penduduk pedesaan. Dalam menghadapi ancaman sekularisasi ini, golongan kedua itu terpaksa mengadakan persekutuan di antara perkumpulan-pekumpulan agama yang, sebagai satu bentuk organisasi yang ketat, menjadi alat gerakan-gerakan protes dan pemberontakan-pemberontakan. Sudah dapat diperkirakan, bahwa golongan kebangunan itu akan terus merupakan satu kekuatan tradisional yang kuat, yang berusaha mengembalikan nilai-nilai kebudayaan zaman kesultanan dan merehabilitasi agama.

Sudah barang tentu akan kelirulah untuk mengandaikan bahwa pertentangan-pertentangan mengenai ajaran merupakan sumber konflik yang utama di antara golongan sekularisasi dan golongan kebangunan. Dari keterangan di atas sudah jelas kiranya bahwa faktor-faktor dasar tertentu telah ikut membantu menimbulkan perpecahan di antara gerakan-gerakan keagamaan itu. Konflik itu erat hubungannya dengan aspek-aspek lain dari perebutan kekuasaan di antara pemuka-pemuka agama di satu pihak, dan antara elite agama dan elite sekular di pihak lain.[22] Kecenderungan-kecenderungan modern merupakan ancaman bagi lembaga-lembaga tradisional, dan golongan-golongan tradisional dengan sendirinya melawan dengan gigih campur tangan yang progresif dari pihak penguasa-penguasa asing. Khususnya di Banten, konflik itu telah dipertajam oleh adanya tradisi pemberontakan yang kadangkala memanaskan pertentangan-pertentangan di bidang agama. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan keagamaan dalam pertengahan kedua abad XIX memperlihatkan tekanan yang kuat kepada konflik golongan. Dilihat dari medan sosio-kultural Banten di masa itu, tekanan yang terus-menerus dan malahan semakin kuat, yang diberikan oleh golongan-golongan kebangunan kepada gerakan-gerakan protes yang gigih dan malahan menggunakan kekerasan tidak mengherankan. Setelah protes-protes yang "sekular" ternyata tidak mempan samasekali, maka penegasan tujuan-tujuan keagamaan yang serentak dengan diadakannya persekutuan dengan gerakan-gerakan perkumpulan agama memberikan kekuatan baru kepada usaha-usaha religio-politik untuk menegakkan kembali tatanan tradisional. Yang sangat penting artinya adalah bahwa perkumpulan-perkumpulan agama itu telah memperkuat kekompakan golongan dan identifikasi golongan, yang dapat mempertajam pertentangan di antara mereka. Tidaklah mengherankan jika anggota-anggota perkumpulan agama itu menjadi sangat terlibat di dalam konflik itu.

Kita akan membahas manifestasi-manifestasi utama dari kebangkitan kembali agama Islam, dengan memberikan perhatian khusus kepada perkembangan di Banten, berdasarkan arah gejala umum yang telah dilukiskan secara singkat di atas. Pertanda pertama tentang adanya semangat kebangunan itu adalah terus bertambahnya jumlah orang yang menunaikan ibadah haji dalam abad XIX. Meningkatnya kegiatan ibadah ini sangat penting artinya, bukan hanya bagi penyebaran pembaruan-pembaruan di seluruh dunia Islam, melainkan juga bagi pertumbuhan suatu golongan elite agama. Oleh sebab itu, maka Mekah dapat dipandang sebagai jantung kehidupan agama di Indonesia.[23] Pertanda kedua yang nampak tentang

adanya semangat kebangunan adalah pertumbuhan yang luar biasa dari pesantren-pesantren, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan peserta-peserta gerakan kebangunan yang militan. Bukti lain tentang kebangkitan kembali semangat Islam adalah banyaknya mesjid baru yang penuh sesak setiap hari Jumat. Jelas ada kebangkitan kembali minat terhadap agama Islam dan ketaatan beribadah yang menyolok. Syekh-syekh atau khatib-khatib yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya mendapat sambutan besar di mana-mana dan permintaan akan khotbah-khotbah yang dicetak dan penerbitan-penerbitan lainnya mengenai agama terus meningkat. Sudah tentu ada pula sementara orang yang memamerkan kesalehannya seperti mengenakan pakaian Arab atau memakai sorban. Selama beberapa tahun, apa yang dinamakan "surat terakhir Nabi" beredar luas; surat itu berseru kepada umat Islam agar lebih taat menunaikan ibadah mereka sebagai persiapan menyongsong "Hari Kiamat". Dan terakhir, aspek yang paling vital dari gerakan keagamaan itu tidak disangsikan lagi adalah bangkitnya kembali mistik Islam, seperti yang menjelma dalam tarekat-tarekat.

Dalam membahas kebangkitan kembali agama Islam, kita tidak boleh lupa bahwa hal itu bisa dipahami di dalam konteks gerakan sosial di Banten. Di dalam tahapnya yang paling akhir sebelum meletusnya pemberontakan tahun 1888, gerakan kebangunan itu telah melahirkan kepemimpinan yang karismatik, pengikut-pengikut yang militan, organisasi pencarian anggota-anggota baru yang efektif dan ideologi yang memikat, yang kesemuanya merupakan unsur-unsur yang esensial dari suatu gerakan revolusioner yang ampuh. Gejolak gerakan sosial harus diukur berdasarkan ekspresi kebangkitan kembali agama yang menggelora yang tak disangsikan lagi mendasarinya. Dalam hubungan ini penetrasi Westernisme secara progresif dapat dipandang sebagai satu faktor yang mempercepat prosesnya, merangsang timbulnya kebangunan kembali agama Islam.

IBADAH HAJI

Pembahasan secara panjang lebar mengenai sejarah ibadah haji akan melampaui lingkup studi ini; cukup kiranya disebutkan di sini tulisan-tulisan Snouck Hurgronje yang otoritatif dan lengkap serta studi-studi lainnya mengenai soal ini.[24] Yang esensial, dari sudut pandangan kita sekarang, adalah untuk menekankan bahwa ibadah haji merupakan satu sumber sosial bagi revitalisasi kehidupan agama. Menurut anggapan populer di kalangan penduduk bangsa Eropa, Mekah hanya merupakan tempat persemaian fanatisme keagamaan, di mana kepada orang-orang yang menunaikan ibadah naik haji ditanamkan perasaan permusuhan terhadap penguasa-penguasa Kristen di tanah air mereka.[25] Kerusuhan-kerusuhan yang terus-menerus terjadi di Indonesia dalam bagian akhir abad XIX telah menyebabkan perhatian penguasa kolonial semakin ditujukan kepada pengaruh yang datang dari Mekah.

Pelbagai langkah telah diambil untuk menempatkan seluruh penyelenggaraan perjalanan naik haji ini di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Pemerintah tidak hanya berusaha keras untuk mengurangi risiko dan bahaya yang dihadapi orang-orang yang naik haji, tetapi juga berusaha mengawasi segala kegiatan dan gerak-gerik mereka di desa-desa mereka, selama dalam perjalanan dan di Kota Suci.[26] Akhimya diketahui bahwa haji-haji yang berbahaya secara potensial itu bukanlah terutama mereka yang mengunjungi Tanah Suci untuk waktu yang singkat, melainkan mereka yang bermukim selama beberapa waktu di Mekah. Golongan yang pertama hampir-hampir tak mempunyai kesempatan untuk bertukar pikiran dengan sesama Muslim dari daerah-daerah lain di Dunia Islam. Golongan yang disebut belakangan, sebagai pemukim-pemukim tetap dan sementara di Kota Suci, mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelbagai macam kegiatan keagamaan. Golongan haji ini, yang berasal dari pelbagai daerah di Nusantara, pada umumnya dikenal dengan sebutan *Jawah*.[27]

Kembali kepada arti Mekah: akan berlebih-lebihanlah untuk memandang setiap orang yang telah naik haji sebagai seorang fanatik dan pemberontak.[28] Tidak benar bahwa kerusuhan-kerusuhan religio-politik itu dihasut oleh orang-orang Mekah, juga tidak tepat untuk memandang para haji sebagai semacam "pendeta" yang telah dikukuhkan. Sebaliknya, tak dapat disangkal

bahwa perjalanan naik haji itu telah melahirkan satu benteng solidaritas yang ampuh di dunia Islam dan bahwa orang-orang yang telah menunaikan ibadah itu pulang ke negeri mereka membawa semangat kebesaran dan keagungan Islam. Sesungguhnya, pengamat-pengamat masa itu berpendapat bahwa arti yang sangat penting dari perjalanan naik haji itu harus dicari pada tingkat ideologis. [29] Perlu dicatat bahwa orang yang tinggal lama di Mekah akan mengalami "arabisasi", yakni mengoper cara dan kebiasaan peradaban Arab-Islam. Yang lebih buruk lagi - dari sudut pandangan kolonial - adalah adanya perubahan yang radikal dalam pandangan haji mengenai bangsa-bangsa Barat. Di satu pihak ia membenci dan memandang rendah orang-orang kafir, dan di lain pihak ia merasa yakin akan kekuatan dan pengaruh Islam yang tak ada bandingannya.[30] Selama bermukim di Mekah orang-orang itu terus berhubungan, tidak saja dengan anggota-anggota kerabat dan orang-orang sekampung di tanah air, melainkan juga dengan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Dengan cara ini diciptakanlah satu saluran untuk menyebarkan perasaan permusuhan terhadap penguasa kolonial. Selain itu, pemerintah kolonial merasa khawatir bahwa dengan adanya sejumlah haji yang sering pulang, "infeksi" di desa asal mereka akan semakin parah. Seperti akan kita lihat nanti, di antara haji-haji dari masyarakat *Jawah* yang pulang ke tanah air ada yang tampil sebagai orang-orang yang dengan gigih mendukung gerakan ke arah regenerasi agama, yang bertujuan memperkuat sendi-sendi moral keagamaan; mereka menentang sikap yang melalaikan ajaran agama dan berusaha memulihkan cita-cita Islam yang murni. Tidaklah mengherankan jika kampanye-kampanye yang gigih ini sering kali diikuti oleh pemberontakan-pemberontakan yang sesungguhnya terhadap penguasa-penguasa kafir.[31]

Ada satu hal lain yang menyebabkan timbulnya sikap anti-Barat yang sengit, yang inheren dalam semangat kalangan-kalangan di Mekah, dan yang menyebar ke Nusantara melalui jemaah haji. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dengan kemajuan yang dicapai oleh Imperialisme Barat di Timur Tengah dan Afrika Utara, maka dalam pertengahan kedua abad XIX bangsa-bangsa yang beragama Islam menjadi lemah dan terpaksa mengambil sikap defensif. [32] Dalam periode ini, Mekah menjadi tempat berlindungnya fundamentalisme Islam yang keras. Konservatisme ini mendapat dukungan dan penganut di kalangan masyarakat *Jawah*.[33] Satu fakta yang relevan dan perlu dikemukakan dalam setiap pembahasan mengenai gerakan-gerakan keagamaan yang dilancarkan dari Mekah adalah bahwa gerakan-gerakan itu terseret ke dalam perpecahan dan menghabiskan energi mereka dalam pertentangan antar-golongan. Golongan-golongan di dalam gerakan itu, yang saling bertentangan, adalah mereka yang berorientasi kepada ajaran Islam yang formalistik, dan pelbagai golongan yang menganut aliran-aliran mistik, seperti tarekat-tarekat Kadiriah, Satariah, Rifaiah dan Naksibandiah.[34] Selain itu, di dalam tarekat Naksibandiah itu sendiri terdapat kelompok-kelompok seperti pengikut-pengikut Sulaiman Effendi dan kelompok yang dipimpin oleh Khalil Pasha.[35] Di sinilah letaknya kelemahan gerakan-gerakan keagamaan itu; terpecahnya masyarakat Islam ke dalam pelbagai gerakan tarekat tidak membantu terwujudnya suatu gerakan masal yang bersatu melawan pemerintah kolonial. Di lain pihak tidak dapat disangkal bahwa lembaga-lembaga Islam yang merakyat itu mempunyai daya tarik yang efektif, terutama di daerah-daerah pedesaan. Adanya pemimpin-pemimpin tarekat yang dianggap keramat nampaknya sangat membantu memperbesar keampuhannya. Dengan sangat meningkatnya jumlah haji, maka lahirlah sekelompok besar unsur-unsur yang vital di dalam gerakan-gerakan itu. Selama ada orang-orang yang naik haji, maka selama itu pula berlangsung terus hubungan-hubungan religio-politik yang esensial antara Mekah dan masyarakat-masyarakat Islam yang paling jauh sekalipun. Oleh karena itu dapat dipahami, mengapa pemerintah kolonial mengawasi dengan seksama perjalanan naik haji itu, pada umumnya dengan menggunakan dalih hendak melindungi para jemaah haji terhadap penyakit, penipuan, pencurian, perbuatan jahat dan sebagainya.

Pemerintah kolonial bagaimanapun tidak akan dapat menghentikan kebiasaan naik haji itu, sebab dalam pertengahan kedua abad XIX kebiasaan itu di banyak daerah sangat kuat berakar di dalam kehidupan agama rakyat yang bersangkutan. Apalagi di Banten, dengan tradisinya yang sangat kuat yang berasal dari awal masa kesultanan.[36] Perjalanan yang berbahaya dan minta biaya yang sangat besar tidak dapat menghalang-halangi calon haji untuk menunaikan ibadah yang sangat penting itu. Segala peringatan hanya menimbulkan efek yang sebaliknya - hasrat untuk naik haji menjadi lebih besar atau rakyat menjadi curiga mengenai maksud

pemerintah.[37] Sekali saluran komunikasi keagamaan dapat diciptakan melalui perjalanan haji, maka tidak menjadi soal lagi berapa banyaknya orang yang tiap tahun pergi ke Mekah.[38]

Sebaliknya, banyaknya jemaah haji itu sangat penting artinya bagi pemahaman yang lebih baik mengenai kebangunan agama Islam yang merupakan pokok pembahasan ini. Meningkatnya jumlah itu secara mantap sejak pertengahan abad XIX jelas menunjukkan adanya ketaatan yang meningkat kepada agama. Tak disangsikan lagi bahwa kondisi pengangkutan yang lebih baik sangat membantu mendorong perwujudan yang nyata dari ketaatan itu di kalangan rakyat. Perlu dicatat bahwa jumlah pukul rata jemaah haji tiap tahunnya adalah sekitar 1600 orang dalam tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan; dalam tahun-tahun tujuh puluhan jumlah itu hampir mencapai 2600, sedangkan dalam tahun-tahun delapan puluhan jumlahnya meningkat lagi menjadi 4600.[39] Mengenai angka yang terakhir, kita harus ingat bahwa tahun-tahun 1880, 1885 dan 1888 merupakan tahun-tahun haji akbar - yang selalu menarik jumlah calon haji yang paling besar.[40] Angka-angka statistik mengenai perjalanan naik haji itu menunjukkan lebih lanjut bahwa dalam jangka waktu tertentu terdapat perbedaan yang menyolok antara jumlah calon haji yang berangkat dan jumlah haji yang kembali ke tanah air. Pelbagai faktor menyebabkan adanya perbedaan itu, di antaranya ada yang meninggal karena pelbagai penyakit, ada yang bermukim di Tanah Suci dan ada yang menjadi budak.[41] Seperti telah dikatakan di atas, masyarakat pemukiman yang berasal dari Nusantara dan negeri-negeri sekitarnya kemudian dikenal sebagai masyarakat *Jawah*. Oleh karena jumlah jemaah dari Indonesia biasanya paling besar,[42] maka J*awah* dengan sendirinya lalu menempati kedudukan yang terkemuka di Kota Suci. Oleh karena Banten sangat terkenal sebagai daerah Islam dengan persentase jumlah haji yang tertinggi di kalangan penduduknya,[43] maka tidaklah mengherankan jika jumlah calon haji dari daerah itu secara proporsional adalah yang paling tinggi.[44] Kedudukan Banten yang terkemuka dalam soal perjalanan naik haji sedikit banyak juga tercermin dalam jumlah orang-orang Banten di kalangan tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat *Jawah*. Peranan penting yang dimainkan oleh sebagian di antara orang-orang Banten itu dalam pemberontakan tahun 1888 akan ditelaah dalam konteks yang lain; untuk sementera waktu kita hanya secara umum saja membahas masyarakat *Jawah* ini, terutama mengenai iklim kerohaniannya dan kegiatan-kegiatannya.

Perlu diulangi bahwa kebangunan kembali agama Islam merupakan satu fenomen yang tersebar luas dalam bagian akhir abad XIX. Di bagian-bagian yang luas dalam Dunia Islam terjadi kelahiran kembali keyakinan umat Islam terhadap agama mereka, yang menampakkan diri bukan raja dalam sikap yang lebih taat dalam menjalankan ibadah dan mematuhi syariat, melainkan juga dalam propaganda yang agesif yang bertujuan memperbesar kekuasaan Islam. Adalah keliru untuk memandang gerakan keagamaan di Indonesia dalam periode itu sebagai satu peristiwa yang hanya bersifat kedaerahan. Tanpa menggunakan sudut pandangan yang Mekah-sentris kita harus mencatat adanya banyak ikatan yang menghubungkan dunia Islam di Indonesia dengan pusat agama Islam itu. Kaum ulama atau haji yang telah mendapat pendidikan di Mekah atau yang diilhami oleh semangat Mekah, baik secara pribadi maupun melalui murid-murid mereka, mendorong dan memelopori gerakan-gerakan kebangunan di pelbagai daerah di Indonesia. Inti sosial dari pendekar-pendekar kebangunan itu terdapat dalam masyarakat Jawah. Golongan itu, karena tidak terikat oleh tradisi daerah dan bebas dari pengawasan kolonial serta hampir terus-menerus berhubungan dengan inti religio-politik dari peradaban Arab Muslim, dapat berasimilasi lebih cepat, secara intelektual maupun secara politis, ke dalam elite yang berkuasa di Mekah. Di dalam situasi Mekah, masyarakat *Jawah* mempunyai keuntungan dapat terus mengadakan hubungan dengan orang-orang setanah air yang datang dan pergi; dengan demikian mereka dapat memainkan peranan sebagai perantara baik di bidang agama maupun di bidang politik. Yang paling berpengaruh dI kalangan kaum Jawah adalah para guru dan mahasiswa yang, dari Mekah, dapat mengendalikan masyarakat Islam di tanah air mereka.[45] Dengan semangat kebangkitan umum dunia Islam, para haji kembali ke negeri mereka dengan membawa tekad untuk memperjuangkan kebangunan di sana. Hubungan antara banyak haji dan guru mereka sesungguhnya merupakan satu ikatan kesetiaan yang bersifat pribadi yang dapat merupakan jembatan antara sang guru di Mekah dan santri biasa di desa.

Konservatisme dan fundamentalisme merupakan ciri khas para guru Jawah dan murid-murid mereka, yang lama-lama diresapi rasa benci terhadap negara-negara Barat yang meliputi pusat Dunia Islam selama bagian akhir abad XIX.[46] SesungguhnYa, dilihat dari segi sentimen anti-Barat, geseran kebangunan di pelbagai negeri dapat dianggap sebagai manifestasi nasionalisme agama atau nasionalisme Islam.[47] Mengenai masyarakat Jawah, dl antara pelbagai unsur nampaknya ada perasaan persatuan yang kuat - meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit – semata-mata sebagai akibat kenyataan bahwa mereka semua telah dapat menembus isolasi kedaerahan tanah air mereka. Satu segi baru dalam perkembangan kebangkitan kembali agama di kalangan kaum Muslim Indonesia adalah adanya perpecahan menjadi golongan-golongan sesuai dengan pengelompokan tarekat dan menembus batas-batas etnik dan loyalitas-loyalitas tradisional lainnya.[48]

Seperti akan kita lihat nanti, dalam perkembangan gerakan keagamaan itu, ada tanda-tanda yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa gerakan itu dapat mengatasi kedaerahan dan sistem-sistem kelembagaan tradisional.[49] Dalam pada itu, perpecahan di antata tarekat-tarekat tersebut, meskipun memegang peranan dalam menembus batas-batas loyalitas tradisional, hendaknya jangan dianggap sebagai bukti bahwa ikatan-ikatan kekerabatan samasekali dikalahkan oleh ikatan tarekat. Dan akhirnya, kebangkitan kembali agama tidak hanya telah mempertajam kepekaan elite agama di Indonesia terhadap penetrasi progresif dari Barat, akan tetapi juga telah menguasai gerakan-gerakan protes agama. Dalam hubungan ini, seperti dikatakan oleh Snouck Hurgronje, Mekah merupakan sumber kerohaniannya.[50]

PESANTREN

Terlepas dari aspek Pan-Islamisme - yang menampakkan diri dalam gelora semangat untuk mencampakkan dominasi Barat - kebangunan agama juga mencakup suatu revitalisasi mendalam kehidupan beragama melalui lembaga-embaga Islam baik setempat maupun kosmopolitan. Menurut hemat penulis, pesantren dan tarekat merupakan pasangan gerakan Pan-Islam di bidang politik, Meskipun revitalisasi Islam merupakan segi konstruktif daripada sasaran mereka bersama, gerakan itu tidak mempunyai arah yang terpusat, tidak pula melahirkan suatu solidaritas Muslim dalam skala yang besar. Kekuatan-kekuatan pemecah-belah nampak pada pelbagai gerakan tarekat, yang menumbuhkan satu sikap eksklusif dan persaingan tak kenal kompromi di antara mereka. Daya tarik beberapa di antara tarekat-tarekat itu berkaitan erat dengan pesatnya ekspansi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tradisional, yang meratakan jalan bagi tarekat-tarekat itu untuk memperoleh anggota-anggota baru. Atas dasar perkembangan ini, kita terlebih dulu membahas pertumbuhan pesantren, sebelum melukiskan perkembangan tarekat-tarekat itu.

Begitu sedikit diketahui tentang perkembangan pesantren di masa yang lampau, sehingga kita hanya dapat berspekulasi tentang pengaruhnya terhadap kehidupan beragama di kalangan rakyat.[51]

Yang pasti adalah bahwa penyebarluasannya tidak terjadi sebelum abad yang lulu, ketika ilmu pengetahuan Islam mendapat dorongan baru dari kaum ulama yang semakin meningkat jumlahnya yang kembali dari menunaikan ibadah haji.[52] Lembaga pesantren yang sudah tua usianya itu tak disangsikan lagi telah memperoleh kekuatan dan daya tarik baru di kalangan rakyat dalam kondisi-kondisi yang diciptakan oleh kebangunan agama; dalam pertengahan kedua abad XIX berlangsunglah suatu proses saling memperkuat di antara pelbagai aspek gerakan keagamaan. Dalam tahun-tahun 1860-an jumlah pesantren di seluruh Pulau Jawa diperkirakan sekitar 300; hanya beberapa saja di antaranya yang mempunyai lebih dari seratus santri.[53] Di antara yang paling terkenal dapat disebutkan pesantren-pesantren Lengkong dan Panjul, keduanya di Cirebon; Daya luhur di Tegal; Brangkal di Bagelen; Tegalsari dan Banjarsari, keduanya di Madiun; dan terakhir Sida Cerma di Surabaya. Di antara pesantren-pesantren itu ada yang didirikan pada pertengahan abad XVIII.[54] Perlu dicatat bahwa pesantren-pesantren yang sangat terkenal menarik murid-murid dari pelbagai daerah di Pulau Jawa; orang-orang dari

Banten, Priangan dan Jakarta terdapat di antara para santri yang menuntut ilmu di pesantren Sida Cerma, yang dianggap sebagai pesantren yang paling terkenal dalam bagian akhir abad XIX.[55] Kemasyhuran sebuah pesantren, dan daya tarik "nasional" yang melekat padanya, sangat tergantung kepada reputasi gurunya. Sebagai pusat-pusat dan sumber-sumber yang sesungguhnya dari kebudayaan Jawa-Islam, pesantren-pesantren itu dipandang sebagai pusat-pusat pendidikan dan pegangan. Itulah yang melahirkan kekuatan Islam yang integratif, yang mendesak batas-batas etnoregional dan mempercepat proses merakyatnya aliran-aliran baru di bidang agama. Tidaklah keliru untuk mengatakan bahwa dalam abad XIX banyak pesantren sudah mempunyai dimensi "nasional".

Sebagai lembaga yang sudah sangat tua usianya, pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar tentang Islam akan tetapi juga memberikan latihan dalam cara hidup dan cara berpikir orang Islam.[56] Ketaatan yang mutlak kepada kiyai, satu disiplin yang keras dalam kehidupan sehari-hari, dan persamaan serta persaudaraan di kalangan para santri merupakan hal-hal yang esensial dalam kehidupan pesantren. Sesungguhnya, selama berlangsungnya pendidikan di pesantren, Sering kali terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam struktur kepribadian mereka.[57] Satu hal yang menonjol adalah bahwa dalam pertengahan kedua abad XIX banyak haji menjadi kiyai dan mendirikan pesantren mereka sendiri.[58] Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa banyak haji telah kembali ke desa asal mereka tanpa memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak tentang Islam daripada ketika mereka berangkat ke Tanah Suci; namun demikian tidak ada yang menghalang-halangi mereka untuk mengajarkan soal-soal agama. Seperti telah dikemukakan sebelumnya di dalam bab ini, juga terdapat banyak haji yang bermukim bertahun-tahun lamanya di Mekah, memperdalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan tentang Islam dan ambil bagian dalam peradaban Arab-Muslim.[59] Mereka berkenalan dengan dogmatisme Islam yang sangat berbeda dengan toleransi keagamaan yang tradisional di tanah air mereka. Oleh karenanya dapat diperkirakan bahwa di antara para haji yang kembali terdapat orang.orang yang, sebagai penganut Islam yang lebih ortodoks dan cita-cita keagamaan dan politik ; menurut Pan-Islamisme, cenderung untuk menempuh jalan yang militan dan tegas-tegas bersikap bermusuhan terhadap penguasa kolonial. Akan sangat kelirulah untuk menganggap setiap haji sebagai orang yang fanatik dan revolusioner.[60] Selama beberapa dasawarsa, di Banten terdapat peningkatan fanatisme di kalangan pesantren, dan satu sikap yang bermusuhan dan agresif ditanarnkan pada diri para santri terhadap orang-orang asing dan kaum priyayi.[61] Mereka memandang rendah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Sebagai dikemukakan oleh seorang penulis tentang Islam di Indonesia, ‘tiap pesantren secara potensial merupakan pusat sentimen anti-Eropa dan anti-priyayi'.[62] Konflik sosial yang terkandung secara inheren di dalam antagonisme religiopolitik ini sering kali terungkap secara terbuka dalam bentuk cemoohan yang terutama ditujukan terhadap pejabat-pejabat Belanda dan kaum prlyayi.[63] Dengan sendirinya pejabat-pejabat menyadari sepenuhnya bagaimana rakyat memusuhi mereka, dan pemerintah kolonial tak bisa tidak akhimya melihat bahwa pesantren merupakan alat pengendalian Ideologis yang berguna dan bahwa pelajaran yang diberikan di sana dijadikan alat kepentingan kaum elite agama. Oleh karena itu, maka segera setelah pemberontakan Cilegon dapat ditumpas, pemerintah mengambll langkah-langkah untuk menempatkan semua pesantren di bawah pengawasan resmi yang ketat.[64] Satu tindakan yang lebih positif adalah mendirikan sekotah-sekolah sekuler jenis baru tertentu, yang dimaksudkan untuk meluaskan pengaruh pemerintah kolonial dan untuk melawan pengaruh pesantren yang sangat besar. Sudah barang tentu kaum elite agama sangat menentang penyebarluasan sistem-sistem pendidikan Barat, yang akan membatasi kemajuan Islam. Meskipun dalam perempat bagian terakhir abad XIX penetrasi kebudayaan Barat itu belum mendalam, namun hal itu sudah sangat dirasakan sebagai satu ancaman langsung terhadap kedudukan para kiyai, dan bagi mereka hal itu sudah merupakan soal "hidup atau mati". Bagaimarrapun, melalui pesantren dan tarekatnya, kiyai dapat menguasai masyarakat desa dan dengan demikian dapat dengan mudah mengerahkan sumber-sumber daya material dan manusia kaum tani.

GERAKAN TAREKAT

Seperti telah disebutkan di atas, tarekat merupakan alat yang baik sekali untuk mengorganisasikan gerakan keagamaan dan menyelenggarakan indoktrinasi tentang cita-cita kebangkitan kembali. Di Pulau Jawa abad XIX hanya ada tiga tarekat yang penting artinya -- Kadiriah, Naksibandiah dan Satariah. Di sana-sini terdapat pula kelompok-kelompok dengan nama Rahmaniah atau Rifaiah, akan tetapi tidak banyak artinya. Di Pulau Jawa secara keseluruhan, Naksibandiah merupakan tarekat yang paling kuat, akan tetapi keadaannya berbeda dari daerah ke daerah: di Banyumas yang dominan adalah tarekat Satariah, dan di Banten tarekat Kadiriah.[65] Seperti telah dikemukakan di atas, kedua tarekat itu sudah sangat tua dan mapan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya. Hal itu dapat pula dikatakan tentang Naksibandiah.[66] Ketiga aliran Sufi itu muncul sebagai mata tombak gerakan kebangunan Islam di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa abad XIX. Penyebar-penyebar utama ajaran mereka adalah para haji yang kembali ke tanah air sebagai penganut salah satu tarekat,[67] dan oleh karena komunikasi langsung dengan Mekah tidak hanya terus dipelihara akan tetapi juga ditingkatkan dalam pertengahan kedua abad XIX, maka propaganda mereka sangat diperkuat. Selain itu, tarekat-tarekat yang dimasukkan langsung dari Mekah memberi dorongan yang sangat besar, bukan hanya kepada praktek-praktek keagamaan yang lebih bersemangat, akan tetapi juga kepada sikap yang tidak toleran dan fanatik. Tarekat Kadiriah dan Naksibandiah menekankan baik pada perintah-perintah yang positif maupun larangan-larangan; kedua tarekat itu lebih keras dari tarekat-tarekat lainnya, dan oleh karena itu pengaruh mereka pun lebih besar. Kepopuleran Satariah menurun dan didesak oleh Naksibandiah, kecuali di Banyumas, sementara Rahmaniah, Rifaiah atau Akmaliah hanya terdapat di daerah-daerah kecil.[68] Cita-cita dan aspirasi tarekat-tarekat itu berbeda satu sama lain, akan tetapi mereka semuanya bekerja dengan semangat yang menggelora dan merentangkan pengaruh mereka ke banyak daerah di Nusantara, yang penduduknya sudah beragama Islam atau yang masih memuja berhala. Pada umumnya mereka tidak berminat pada memberikan pelajaran; tujuan mereka adalah untuk memperbesar pengaruh dengan jalan memperbanyak pengikut dan menyalurkan semua otoritas ke tangan guru-tarekat. Perkembangan ini harus dipandang sebagal bagian dari kebangkitan kembali agama yang berlangsung di Indonesia dalam pertengahan kedua abad XIX. Yang mutlak diperlukan untuk kebangkitan ini adalah pembentukan solidaritas kelompok melalui revitalisasi ritual-ritual dan upacara-upacara religio-mistik.[69] Dan tarekat memang sangat cocok untuk tujuan itu.

Mengingat sangat pentingnya peranan yang dimainkan oleh tarekat dalam gerakan keagamaan, khususnya di Banten, maka kita perlu membahas secara agak panjang lebar aspek-aspek tertentu di bidang pengorganisasiannya. Satu unsur penting dalam organisasi tarekat yang relevan bagi pola kegiatan gerakan itu adalah persekutuan yang kokoh antara guru-tarekat dan murid. Ikatan antara guru-tarekat dan murid dikukuhkan secara resmi dengan *bengat* (janji), di mana murid berjanji akan setia dan patuh secara mutlak kepada gurunya sebagal wakil Allah. Disiplin yang dikenakan kepada anggota-anggota tarekat juga mengajarkan cinta-kasih terhadap orangtua dan setiakawan terhadap sesama penganut tarekat, dan melarang diadakannya hubungan dengan pemuka-pemuka agama di luar tarekat. Kewajiban-kewajiban anggota tercantum di dalam ijazah yang diserahkan kepada anggota baru setelah masa percobaannya berakhir, yakni pada upacara *bengat*.[70]

Perlu ditambahkan bahwa organisasi tarekat dapat dikatakan longgar, tanpa anggaran dasar; kesediaan bersama untuk menyelenggarakan ritual-ritual tertentu dan menunaikan kewajiban-kewajiban khusus yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kehidupan beragama merupakan prinsip dasar yang mengikat para anggota satu sama lain. Ketaatan buta kepada guru - *perinde ac cadaver* yang terkenal itu - merupakan satu keharusan mutlak, dan keakraban merupakan hal yang esensial agar guru dapat menurunkan hakikat pengabdian pada umumnya dan pengetahuan esoterik pada khususnya kepada murid. Peranan guru jelas sangat penting dalam usaha mencari pengikut-pengikut baru. Sesungguhnya, guru-guru yang dianggap sebagal orang suci mempunyai daya tarik yang sangat besar bagi rakyat. Setelah diakui sebagal Wali Allah (suci), seorang guru tarekat dapat mempunyal sejumlah pengikut karena dianggap sakti dan karena karismanya.

Perlu dicatat bahwa tarekat Kadiriah tidak mengenal hirarki yang diatur secara teliti bagi

guru-gurunya; hanya kepala tarekat itu di Mekah yang diakui sebagal pemimpin umum, dan dikenal dengan sebutan *murshid* (pembimbing). la dianggap sebagai ahli waris kerohanian pendiri tarekat itu dan dalam kedudukannya itu ia menerima kekuasaannya dari pemimpin yang digantikannya. Ajaran-ajaran yang diberikan di dalam tarekat dianggap telah diturunkan melalui satu rangkalan yang sedikit banyaknya bersinambung dari satu pemimpin ke penggantinya dan dimulai dari pendiri tarekat. R.angkaian itu dinamakan *silsilah*.[71] Dengan demikian maka semacam *silsilah* kerohanian mendekatkan setiap cabang tarekat yang baru kepada inti agama Islam.

Kembali kepada aspek kekuasaan tarekat: beberapa tarekat nampaknya cenderung untuk berusaha memperoleh kekuasaan politik. Kenyataan bahwa mereka mempunyal pengaruh yang sangat besar atas penganut-penganut mereka di bawah kekuasaan pemerintah kolonial mempunyai arti politik yang sangat penting. Sesungguhnya mereka menjadi bukan hanya pusat-pusat kebangkitan agama melainkan juga pusat-pusat protes politik. Kekuatan-kekuatan perlawanan yang terkandung secara inheren di dalam tarekat-tarekat itu menyebabkan gerakan protes menempuh jalan yang ekstrim. Sebagal akibat perkembangan ini, maka konflik-konflik dengan tatanan sosio-politik yang telah dibangun oleh penguasa kolonial tak dapat dielakkan lagi.[72] Berikut ini beberapa contoh historis mengenai pengaruh tarekat-tarekat itu serta konflik-konflik yang dibangkitkannya.

Kepopuleran pelbagal tarekat itu berbeda-beda: di Bogor, dan Priangan Barat, yang paling kuat adalah tarekat Naksibandiah, di Banyumas tarekat Satariah adalah yang paling populer, sementara di Banten yang dominan adalah tarekat Kadiriah.[73] Perkembangan dan penyebaran mereka di pelbagai daerah ditandai oleh persaingan yang besar dan juga oleh konflik-konflik yang tak dapat dielakkan dengan pemerintahan daerah. Di Batavia, tarekat Naksibandiah dirintangi oleh orang-orang Arab yang memandangnya rendah dan menganggapnya sebagai satu perkumpulan untuk orang-orang kelas rendah.[74] Di Yogyakarta dan Surakarta, tarekat itu mendapat tentangan sengit dari pihak pejabat-pejabat agama setiap ada usaha untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Sebaliknya di keresidenan-keresidenan yang berbatasan dengan kedua daerah itu, yakni Kedu dan Semarang, tarekat tersebut lebih berhasil dalam usaha mendirikan cabang-cabangnya, meskipun bagian terbesar hanya di kalangan penduduk kelas rendah.[75] Keresahan di kalangan rakyat yang timbul setelah guru-guru Naksibandiah berkhotbah mengenai ajaran tarekat itu telah menimbulkan kecurigaan di kalangan pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat pemerintah. Catatan-catatan yang ada menunjukkan bahwa juga di Priangan tarekat Naksibandiah menghadapi tentangan yang serupa dari pihak pejabat-pejabat agama. Dalam tahun 1885 suatu manifestasi kegiatan keagamaan yang luar biasa dapat disaksikan di Cianjur. Kebangkitan keagamaan ini terutama berkat kegiatan tarekat Naksibandiah yang dipimpin oleh R. Hadji Abdulsalam dan wakilnya, Guru Waas. Di antara anggotanya yang terkemuka dapat disebutkan Penghulu Kepala Cianjur, Patih Sukabumi, dan Bupati Cianjur sendiri. Keanggotaan pejabat-pejabat pamongpraja yang terkemuka ini menjadi satu persoalan politik. Tuduhan-tuduhan yang tajam telah dilancarkan oleh penghulu kepala Garut, Haji Mohamad Musa, yang mendapat dukungan dari Syekh Umar dan Holle.[76] Dalam kampanye itu ikut pula Sayid Usman dari Batavia dan Brunner. Yang disebut pertama membagi-bagikan sebuah surat edaran yang isinya menimbulkan kerugian umum terhadap tarekat itu, sedangkan yang disebut belakangan menulis sebuah artikel yang sensasional mengenai Perang Sabil yang katanya tidak lama lagi akan pecah.[77] la memperingatkan orang-orang Eropa terhadap haji-haji yang fanatik yang, dengan mengikuti jejak Mahdi di Sudan, tidak boleh tidak akan mengibarkan bendera pemberontakan dengan memakai kedok Perang Sabil. Sejak awal bulan September 1885 tersiar desas-desus mengenai adanya sebuah komplotan untuk membunuh semua orang Eropa pada kesempatan pacuan kuda di Bandung.[78] Menurut Residen Priangan, seluruh persoalan itu bersifat politik dan bukan keagamaan; menurut pendapatnya, Haji Mohamad Musa ingin sekali agar putranya, yang ketika itu menjabat bupati Lebak, menggantikan Bupati Cianjur, dan putranya yang bungsu menjadi penghulu kepala di sana.[79] Kita tidak akan membicarakan perkembangan selanjutnya dari persoalan itu, ataupun kesudahannya; kami hanya ingin mengemukakan bahwa ini merupakan satu kasus di mana sebuah gerakan tarekat menimbulkan satu pertentangan politik, yang dengan lihaynya diberi kedok motif-motif keagamaan. Dalam hubungan ini mungkin ada baiknya untuk berspekulasi

apa yang akan terjadi seandainya tarekat Kadiriah di Banten mendapat tentangan yang kuat. Perlu ditambahkan bahwa lawan-lawan gerakan tarekat cenderung untuk mencap setiap ledakan antusiasme keagamaan sebagai fanatisme yang merupakan ancaman yang gawat terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu setiap ledakan yang demikian harus ditumpas sejak awalnya.

Salah satu aspek yang menyolok dari gerakan-gerakan tarekat adalah adanya persaingan di antara tarekat-tarekat itu. Persaingan ini tidak disebabkan oleh faktor-faktor keagamaan atau sosial, melainkan oleh kenyataan bahwa tarekat-tarekat itu saling bersaing dalam menyebarkan ajaran mereka atau mencari pengikut-pengikut baru. Di Jawa Barat, yang saling bersaing itu adalah Naksibandiah, Kadiriah dan Satariah. Yang disebut pertama mempunyai kedudukan yang kuat berkat kepemimpinan Raden Haji Abdulsalam yang merakyat. Penggantinya adalah Haji Waas, saudara penghulu kepala di Cianjur, dan berkat pimpinannya, Naksibandiah memperoleh pengikut di kalangan priyayi-priyayi terkemuka tertentu.[80] Juga Keresidenan Banyumas merupakan ajang persaingan yang sengit di antara tarekat-tarekat itu; Satariah merupakan yang paling berpengaruh dan paling tersebar luas; kemudian menyusul Naksibandiah; tarekat-tarekat lainnya adalah Kamaliah dan Halwaliah. Di antara anggota-anggota Satariah terdapat banyak pejabat pamongpraja, termasuk Bupati Banyumas sendiri. Salah satu sebab utama kepopulerannya adalah peraturan-peraturannya yang sangat luwes. Selain itu persyaratan-persyaratannya tidak berat, berbeda sekali dengan Naksibandiah yang terkenal dengan peraturan-peraturannya yang keras.[81] Dua hal lagi perlu disebutkan mengenai persaingan di antara tarekat-tarekat itu. Pertama, karena menghadapi tentangan dari pihak pejabat-pejabat agama dan kecurigaan dari pihak pemerintah kolonial, maka ketegangan di antara tarekat-tarekat itu menjadi agak berkurang. Tidak ada kecaman secara terang-terangan, ataupun bentrokan-bentrokan fisik di antara mereka. Kelihatannya seolah-olah persaingan itu didasarkan atas persoalan-persoalan pribadi di antara para pemimpin tarekat dan bukan faktor-faktor sosial keagamaan. Kedua, menurut catatan-catatan itu, guru-guru cabang setempat mempunyai otonomi, mereka bekerja terlepas satu sama lain, dan tidak ada ikatan organisasi yang mempersatukan mereka dalam satu sintesa solidaritas tunggal. Sekarang marilah kita beralih kepada perkembangan tarekat-tarekat di Banten selama dua dasawarsa sebelum pecahnya pemberontakan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, di Banten-lah timbal gerakan besar kebangunan agama Islam, yang terutama mempunyai kaitan dengan tarekat Kadiriah. Sesungguhnya, tarekat ini menjadi mata tombak protes religio-politik terhadap situasi kolonial.[82] Sebelum didirikannya kembali tarekat Kadiriah pada awal tahun-tahun 1870-an, para kiyai di Banten bekerja tanpa ikatan apa pun satu sama lainnya. Tiap kiyai menyelenggarakan pesantrennya sendiri dengan caranya sendiri dan bersaing dengan kiyai-kiyai lainnya untuk mendapat nama sebagai ulama yang pandai, dukun yang ampuh atau mistikus yang ulung. Dengan kedatangan Haji Abdul Karim di Banten pada awal tahun-tahun tujuh puluhan, tarekat Kadiriah memperoleh momentum. Di bawah pengaruhnya, tarekat itu semakin berakar di kalangan para kiyai dan mempersatukan mereka. Pada waktu yang bersamaan, - pengaruh para kiyai atas pengikut-pengikut mereka bertambah secara luar biasa. Dengan memasuki tarekat Kadiriah, maka kesetiaan para santri kepada kiyai dan persaudaraan di kalangan para santri menjadi lebih kokoh. Selain itu, ilmu dan kesaktian kiyai memperkuat karismanya di mata santri-santrinya.[83] Satu hal yang menyolok adalah bahwa para kiyai pada umumnya sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat yang menganggap mereka sebagai lambang kejujuran dan keluhuran budi. Mereka menerima sumbangan-sumbangan dan dengan mudah dapat mengerahkan penduduk desa.[84] Kesetiaan ini, yang dalam pandangan petani-petani Muslim sudah sewajarnya mereka berikan kepada pemimpin-pemimpin agama mereka, lebih diperkokoh lagi oleh keanggotaan mereka dalam tarekat.

Penyebaran ajaran Kadiriah di Indonesia mencapai puncaknya dalam kegiatan Khatib Akhmad Sambas dan muridnya yang paling terkemuka, Haji Abdul Karim. Khatib Akhmad Sambas adalah seorang ulama besar yang pengetahuannya mencakup semua cabang ilmu, dan di samping itu ia telah mencapai tingkat yang tertinggi di dalam tarekat Kadiriah.[85] Ulama besar ini memperoleh banyak pengikut sehingga penganut-penganut tarekat Kadiriah terdapat di

Bogor, Tangerang, Solok, Sambas, Bali, Madura dan Banten. Semua penganut dari daerah-daerah itu, terkecuali Madura, berada di bawah bimbingan Haji Abdul Karim; yang di Madura dipimpin oleh orang dari daerah itu sendiri, Syekh Abdadmuki.[86] Propaganda untuk tarekat itu telah diperkuat dengan kedatangan Haji Marjuki, seorang murid Haji Abdul Karim yang setia. Seperti akan kita lihat nanti, efek propaganda ini adalah bangkitnya semangat yang sangat militan menentang penguasa asing. Keyakinan umat Islam yang tak pernah padam mengenai Perang Sabil disuarakan tak henti-hentinya.[87]

Pada permulaan kegiatannya, gerakan kebangkitan kembali yang dipimpin oleh Abdul Karim memperlihatkan sikap yang keras dalam soal-soal keagamaan dan bernada puritan yang kuat. Akan tetapi Haji Abdul Karim bukan seorang revolusioner yang radikal; kegiatan-kegiatannya terbatas pada tuntutan agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran ditaati dengan seksama, dengan tekanan khusus kepada ibadah salat, puasa dan mengeluarkart zakat dan fitrah. Sudah tentu, berzikir merupakan hal yang esensial. Setelah Haji Abdul Karim meninggalkan Banten, gerakan itu mulai berpaling dari kegiatarikegiatan yang semata-mata diarahkan kepada kebangunan agama Islam, dan suatu semangat yang sangat anti-asing mulai merembesi praktek-praktek tarekat itu. Dan pada akhirnya haji-haji dan guru-guru tarekat yang berjiwa pemberontak menempatkan ajaran mistik sepenuhnya di bawah tujuan politik.

ASPEK-ASPEK ESKATOLOGIS GERAKAN-GERAKAN KEAGAMAAN

Satu ciri yang cukup lazim dari gerakan-gerakan kebangunan agama adalah munculnya ide-ide milenari, dalam hal ini ide eskatologis Islam, yang mencakup pula harapan akan kedatangan Mahdi. Dalam hubungan ini, kita dapat memandang gerakan pemberontakan di Banten sebagai satu gerakan milenari yang bersifat Islam klasik. Pada tahap kemudian, kata-kata bergelora perang sabil dan jihad mulai tersebar di kalangan anggota-anggota tarekat Kadiriah, kata-kata yang sesungguhnya sudah dikenal oleh kaum Muslim yang sangat taat di Banten. Orang-orang sudah dirasuk oleh semangat Perang Sabil yang berkobar-kobar dan dengan rasa benci yang mendalam terhadap "pemerintah kafir", dan di samping itu, perasaan mereka sudah meluap-luap mengingat prospek akan terbentuknya sebuah negara Islam, dalam hal ini kesultanan. Di sini kita menjumpai sebuah varian *chiliasme* Islam, di mana terjalin satu hasrat yang kuat akan kembalinya Kesultanan Banten.[88]

Kepercayaan tentang akan tibanya seorang Mahdi boleh dikatakan hidup terus dalam sejarah Islam. Nama Mahdi untuk pertama kalinya muncul hanya setengah abad setelah wafatnya Nabi. Kepercayaan mengenai Mahdi tersebar luas sekali dan meliputi daerah-daerah seperti Persia, Afrika Utara, India dan Indonesia. Salah satu gerakannya yang paling besar terjadi di Sudan (1881-1888).[89] Mahdi, yang secara harfiah berarti penunjuk jalan yang benar, adalah nama yang diberikan kepada seorang tokoh mesianik yang akan muncul menjelang hari kiamat dan menghancurkan nabi palsu pada akhir zaman yang disebut *Dedjal*. Kedatangan Mahdi akan didahului oleh satu periode kekacauan besar, ketiadaan iman dan peperangan. Menurut kepercayaan itu, pada saatnya nanti, Mahdi akan muncul untuk memulihkan tradisi dan agama sejati; ia akan memperbarui Islam, menegakkan kembali keagungannya dan memusnahkan orang-orang Katir.[90]

Sebagai satu kepercayaan yang laten di kalangan umat Islam, ide tentang Mahdi itu telah terbukti merupakan satu kekuatan yang memberi semangat di waktu-waktu yang sulit, yang mampu menggerakkan massa rakyat. Dalam suasana revolusioner yang meliputi bagian akhir abad XIX, yang ditandai oleh penetrasi Westernisme, keresahan sosial dan pergolakan agama, kondisinya menguntungkan bagi manifestasi-manifestasi Mahdisme. Sepanjang sejarah agama Islam di Indonesia, hampir tak ada samasekali manifestasi-manifestasi yang aktif, dan selama berlangsungnya pemberontakan tahun 1888 di Banten, manifestasi kepercayaan mengenai Mahdi itu hanpa terbatas saja lingkup dan efeknya.[91] Bersamaan waktunya dengan ide-ide milenari atau keagamaan lainnya, ia menyalakan api revolusioner yang nantinya meledak

menjadi kobaran revolusi dan serangan terhadap kaum penindas asing yang dibenci. Di Banten, ide mengenai Mahdi itu tidak hanya sudah dikenal, melainkan di sana kedatangannya sudah dinanti-nantikan.[92]

Dalam hubungannya dengan pemberontakan Banten, dapat diberikan beberapa contoh mengenai ramalan tentang akan tibanya Mahdi. Sebelum berangkat menuju Mekah, Haji Abdul Karim mengumumkan kepada rakyat bahwa ia akan kembali ke Banten kira-kira pada saat kedatangan Mahdi sedang dinantikan.[93] Dalam satu kesempatan lain ia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali selama Banten masih berada di bawah dominasi asing.[94] Disebutkan pula pertanda-pertanda lainnya mengenai akan segera tibanya hari kiamat, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hujan darah, wabah penyakit ternak, dan sebagainya. Bencana dan malapetaka itu ditafsirkan berdasarkan ramalan-ramalan tersebut dan menimbulkan emosi-emosi yang luar biasa serta kecemasan yang besar di kalangan rakyat.[95] Di dalam periode kesulitan sosial itu, ketika rakyat dilanda frustasi dan perlawanan yang ditekan, kepercayaan tentang Mahdi merupakan alat yang cocok untuk membangkitkan mereka supaya melawan dominasi orang-orang asing, yang menurut kepercayaan rakyat bisa dikalahkan dengan cara-cara mistik-magis.

Di samping unsur-unsur eskatologis ini, gambaran tentang dunia baru yang akan segera lahir mencakup pemulihan Kesultanan Banten, yang berarti kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam hubungan dengan harapan ini sudah diramalkan bahwa apabila pohon johar sudah ditanam di pinggir jalan-jalan di Banten, maka seorang raja kulit hitam akan kembali memerintah.[96] Efek-efek yang langsung dari harapan-harapan itu adalah timbulnya gerakan kebangunan agama dan sangat seringnya orang memakai jimat sebagai cara untuk menjadi kebal dan untuk melindungi diri terhadap Segala macam kejahatan atau kemalangan.

Yang lebih membakar lagi semangat rakyat adalah sepucuk Surat edaran dari Mekah, yang isinya dikenal sebagai "Peringatan terakhir dari Nabi". [97] Raja Mekah (sic), yang katanya telah menerima wahyu dari Nabi, menyebarluaskan propaganda yang berisi ramalan eskatologis. Surat itu memuat gambaran mesianik yang klasik tentang malapetaka dan bencana-bencana yang mengerikan yang akan menimpa dunia menjelang "akhir zaman" [98] Surat itu berisi pesan yang mengandung makna eskatologis, memuat seruan yang keras agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan menghinakan Tuhan, berzinah, bersikap sombong dan hidup mewah serta makan riba. Ia juga berseru agar manusia menyucikan kehidupan rohani mereka dengan jalan bertobat dan dengan cermat menjalankan kewajiban-kewajiban agama. [99] Secara khusus disebutkan kewajiban mengirimkan sumbangan-sumbangan ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Surat itu juga memperingatkan semua orang yang tidak mau menghiraukan pertanda-pertanda eskatologis itu dan tetap bersikap masa bodoh terhadap agama; mereka itu akan dikutuk dan dihukum.

Antara tahun 1880 dan 1885 sejumlah besar Surat selebaran keagamaan semacam itu sudah beredar di Aceh, Lampung, Banten, Jakarta dan Priangan. [100] Pada akhir tahun 1883, polisi Banten dapat menyita Surat selebaran seperti itu dari seorang yang bernama Misru, yang saudaranya, Asta, telah membelinya untuk dia dari Mas Hamim dari Pakojan. Surat itu katanya ditulis oleh Syarif Mekah dalam tahun 1880, meskipun terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa ia ditulis di Jawa. [101] Pejabat-pejabat Belanda memperkirakan bahwa Surat itu dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat mengingat bahwa baru saja rakyat dilanda gelombang kepanikan setelah terjadi wabah-wabah yang hebat dan bencana-bencana alam yang mengerikan antara tahun 1879 dan 1883. [102] Jelaslah bahwa propaganda yang dilancarkan untuk gerakan religio-politik di Banten sangat dibantu oleh wabah-wabah dan bencana-bencana itu. [103] Oleh karena gerakan tarekat berkembang di bawah tanah, penyebarluasan Surat itu untuk Sementara waktu tidak menimbulkan kekhawatiran pada pejabat-pejabat Belanda. Menurut pendapat mereka Surat itu terutama menyangkut uasaha mencari calon-calon jemaah haji dan pertama-tama bersifat komersial. [104]

GERAKAN JIHAD

Gerakan kebangunan agama Islam juga berkaitan dengan kesadaran yang kuat di kalangan rakyat bahwa negeri mereka harus dianggap sebagai *dar al-Islam* yang untuk Sementara waktu diperintah oleh penguasa-penguasa asing. Ada satu keyakinan yang kuat bahwa, begitu keadaannya memungkinkan, negeri mereka akan diubah dengan menggunakan kekuatan dan menjadi wilayah Islam yang sejati. Oleh karena orang-orang yang tidak percaya sudah dikutuk sebagai musuh kerajaan Allah, maka usaha menaklukkan mereka dengan senjata Muslim merupakan satu kewajiban suci yang menuntut pengorbanan. Sikap ini merupakan buah hasil ajaran tentang Perang Sabil, yang menyatakan bahwa umat Islam berkewajiban memerangi orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Tujuan utama Perang Sabil, adalah mendirikan sebuah negara Islam yang merdeka di mana orang dapat mempraktekkan agama Islam yang sejati. Ini berarti bahwa bagi penganut-penganut gerakan kebangunan agama Islam dan anggota-anggota tarekat, jihad atau perang sabil merupakan tindakan pengorbanan yang paling luhur untuk mewujudkan negara yang ideal, puncak segala pengabdian, doa-doa, puasa dan perjalanan naik haji. [105]

Di dalam ide tentang *dar al-Islam* itu terkandung secara inheren perasaan benci yang diperlihatkan secara terang-terangan oleh sikap rakyat tidak hanya terhadap orang-orang Eropa tetapi juga terhadap semua orang yang memandang tinggi orang-orang kafir atau bergaul dengan mereka. Pejabat-pejabat pamongpraja Banten yang dianggap sebagai penyambung tangan Belanda, dipandang sebagai orang-orang yang sangat hina. Di mata rakyat mereka itu mencemarkan agama mereka sendiri, oleh karena seorang Muslim yang baik harus menjauhkan diri dari kontak dengan orang-orang yang tidak percaya. [106]

Selain itu, umat Islam cenderung untuk memandang pamongpraja sebagai orang-orang yang sedikit banyaknya korup dan menindas rakyat. Satu sikap yang karakteristik di kalangan rakyat adalah keengganan untuk berurusan dengan pemerintah Belanda, agen-agennya dan peraturan-peraturannya, dan menganggap mereka semua sebagai orang-orang yang pada dasarnya sudah kotor.[107] Oleh karena itu, maka penetrasi administrasi kolonial ke desa harus ditentang habis-habisan. Dalam hal ini, kiyailah yang tanpa henti-hentinya berusaha menanamkan kecurigaan yang mendalam terhadap pemerintah kolonial dalam hati santri-santrinya, dan yang secara berangsur-angsur membakar semangat pengikut-pengikutnya untuk melancarkan Perang Sabil terhadap penguasa-penguasa kafir. Ini merupakan tahap di mana gerakan kebangkitan kembali agama Islam dijiwai oleh fanatisme yang menggelora,dan menjelma menjadi satu gerakan jihad. Rumusan yang didasarkan atas ajaran Islam itu menggetarkan jiwa penganut-penganut tarekat pada khususnya dan kaum santri pada umumnya. Adalah menarik bahwa waktu dan tempat jihad yang direncanakan itu masih belum jelas ketika Haji Abdul Karim bertolak menuju Mekah pada tahun 1876.[108]

KHATIB-KHATIB KELILING DAN BUKU-BUKU KHOTBAH YANG BEREDAR

Gerakan militan untuk membangunkan Islam di Indonesia itu juga dipercepat oleh pangaruh para syarif, sayid, atau syekh tarekat-tarekat mistik yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Yang disebut pertama adalah agen-agen para syekh di Mekah yang mendatangi setiap pelosok untuk mencari calon jemaah haji. Ahli-ahli mistik atau ulama-ulama berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, mengunjungi pangeran-pangeran dan berkhotbah di mesjid-mesjid sebagai orang-orang suci. Dengan sendirinya mereka menerima sumbangan-sumbangan secara melimpah. Mereka membakar perasaan keagamaan rakyat, yang dengan mudah dapat dibujuk untuk ikut dalam gerakan-gerakan religio-politik. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menjadi khawatir bahwa orang-orang itu mengajarkan permusuhan terhadap kekuasaan orang Eropa dengan maksud menimbulkan kebencian dan semangat memberontak.[109] Dalam pada itu dapat dikemukakan kasus-kasus mengenai khatib-khatib keliling yang ternyata adalah ulama-ulama atau ahli-ahli mistik yang tidak mengganggu ketertiban dan tidak mempunyai kepentingan politik.[110]

Satu hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa buku-buku khotbah salat Jumat di mesjid yang beredar luas diamati dengan cermat oleh pihak berwajib yang merasa curiga. Pada pertengahan tahun-tahun 1880-an pemerintah menerima laporan bahwa ada khatib-khatib yang berkhotbah dengan menggunakan bahan dari buku yang bernama *Majmu 'al Khatab*. Buku itu memuat sejumlah naskah khotbah dan doa yang ditulis oleh orang yang bernama Abdul Rakhman bin Ismail bin Nabatah al Miri, Buku itu diekspor dari Bombay dan banyak yang membelinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buku itu digunakan di Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Ambarawa, Kendal, Demak, dan Surabaya.[111] Di dalam naskah-naskah itu, Sultan Turki disebut-sebut sebagai penguasa yang sah yang dengan gigih memerangi orang-orang kafir, dan umat Islam diserukan untuk berdoa baginya. Pejabat-pejabat Belanda, yang merasa khawatir bahwa buku itu ada sangkut-pautnya dengan gerakan-gerakan Pan-Islam yang subversif, berusaha keras untuk mengawasi pembacaan khotbah dan peredaran buku khotbah itu.

Di antara barang-barang cetakan lainnya yang dimasukkan ke Pulau Jawa terdapat apa yang dinamakan *fatwa* yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka di Mekah, di antaranya terdapat banyak ulama dari masyarakat *jawah*.[112] Kekuatannya yang sesungguhnya untuk membentuk pendapat umum di kalangan umat Islam tidak boleh dianggap sepele. Tidak disangsikan lagi bahwa pembinaan kerohanian itu, yang untuk sebagian besar langsung dari Mekah, sangat meningkatkan kehidupan kerohanian rakyat.

LEDAKAN-LEDAKAN FANATISME AGAMA YANG TERPISAH-PISAH

Selama beberapa tahun sebelum pecahnya pemberontakan, pejabat-pejabat pamongpraja secara berangsur-angsur merasakan adanya satu semangat keagamaan yang menggelora dan mendekati fanatisme, yang meliputi kehidupan sosial di Banten. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan itu terjadi di lingkungan terdekat mereka: pelayan-pelayan mereka yang laki-laki, yang semula tidak begitu taat dalam soal agama, mulai menunaikan ibadah mereka dengan cermat beberapa minggu setelah mereka tiba di Banten. Sebabnya adalah bahwa mereka akan dikucilkan oleh penduduk setempat jika mereka lalai.[113] Mereka sering ikut dalam penyelenggaraan zikir. Seperti telah kita lihat, semangat kebangkitan kembali yang berkobar-kobar itu mendorong penduduk untuk bangkit memberontak terhadap atasan-atasan meieka yang sekular. Bagaimana gawatnya situasi di Banten dalam tahun-tahun 1880-an menjadi jelas ketika sejumlah orang, yang dibakar oleh semangat fanatisme agama, mulai menunjukkan sikap agesif terhadap orang-orang Eropa atau pelayan-pelayan mereka. Malahan pekik perjuangan "Sabil Allah" sudah dikumandangkan. Perasaan takut terhadap fanatisme itu mencekam orang-orang Eropa yang mengetahui bahwa semangat keagamaan yang menggelora biasanya menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang kafir. Keadaan itu menyebabkan timbulnya suasana saling curiga di antara pejabat-pejabat Eropa dan pejabat-pejabat Banten.

Sementara itu, dalam tahun 1881 sejumlah tahanan, di antaranya terdapat seorang haji, melarikan diri dari penjara di Rangkasbitung. Beberapa di antara mereka mencoba memulai suatu Perang Sabil, akan tetapi bagian terbesar dari orang-orang yang melarikan diri itu merasa enggan untuk mengikuti jejak mereka. Penduduk samasekali tidak menanggapi seruan mereka.[114]

Pada tanggal 2 Oktober 1883, seorang serdadu Belanda ketika sedang membeli tembakau di pasar Serang, dengan tiba-tiba saja diserang oleh seorang laki-laki bersenjata yang tidak dikenal. Korban berhasil mencari perlindungan di sebuah toko Cina, sedangkan penyerangnya melarikan diri. Penangkapan-penangkapan pun dilakukan namun orang yang bersalah tidak ditemukan.[115] Satu percobaan pembunuhan lainnya terjadi pada tanggal 19 November. Kali ini, seorang laki-aki berpakaian putih mencoba masuk dengan paksa ke dalam tangsi di Serang. Setelah melukai seorang penjaga yang bernama Umar Jaman, ia ditangkap. Mengenai motif-motifnya, ketika itu diperkirakan bahwa perbuatannya itu terutama didorong oleh semangat

keagamaannya yang ekstrim.[116]

Transformasi gerakan kebangunan agama menjadi gerakan Perang Sabil juga dapat disaksikan di Keresidenan Priangan. Sekitar tahun 1885 tersiar kabar tentang akan dilancarkannya perang sabil sehingga membuat cemas orang-orang Eropa di sana; komplotan itu sebelumnya sudah disebut-sebut.[117] Karena tidak ada bukti-bukti maka disangsikan apakah komplotan itu benar-benar ada. Kita hanya mengetahui bahwa orang-orang pada waktu itu sangat terkesan oleh semangat keagamaan di kalangan rakyat, terutama yang menjadi anggota tarekat Naksibandiah. Keterangan-keterangan singkat ini mengenai beberapa ledakan semangat keagamaan berupa perbuatan-perbuatan kekerasan dapat menunjukkan jalannya peristiwa yang akan memuncak dalam pemberontakan Cllegon dalam tahun 1888. Akan tetapi gerakan-gerakan protes itu masih terpisah-pisah dan bersifat setempat.

UNSUR-UNSUR GERAKAN PROTES YANG SANGAT PENTING

Yang harus disadari adalah bahwa kedua unsur dari gerakan kebangunan agama yang dibahas dalam bab ini merupakan kerangka utama organisasi sosio-politik dari pemberontakan tahun 1888 di Banten. Pemberontakan itu dapat dipandang sebagai satu protes sosial yang dinamis yang memanfaatkan semangat keagamaan. Tekanan harus diberikan kepada unsur-unsur penting gerakan protes tersebut berikut ini: struktur organisasi tarekat-tarekat, dan peranan politik pemimpin-pemimpin agama. Tarekat dan kiyai kedua-duanya merupakan inti kekuatan-kekuatan yang menimbulkan pemberontakan Banten itu. Kohesi gerakan pemberontakan yang mengesankan itu jelas berkat kepemimpinan kiyai dan guru tarekat karismatik. Kekhasan tarekat adalah bahwa organisasinya dibangun sekitar seorang pemimpin yang karismatik, yang menjadi pusat kesetiaan segenap anggotanya. Ikatan yang paling kuat adalah sentimen kolektif pengabdian mistik.

Di dalam konteks ini, tarekat Kadiriah dapat dipandang sebagai sebuah kelompok yang melibatkan komitmen total baik pemimpin maupun anggota-anggotanya. Ciri-ciri lainnya dari tarekat yang relevan bagi gerakan revolusioner adalah, pertama, susunan yang ketat dari kalangan dalamnya yang didasarkan atas prinsip-prinsip keorganisasian tarekat; kedua, pengaturan cara-cara hidup sampai ke soal-soal kecil seperti sikap sosial, cara berpakaian, rekreasi, dan sebagainya; ketiga, sikap permusuhan terhadap orang-orang kafir. Perlu diingat, bahwa gejolak sosial yang timbul setelah terjadinya bencana-bencana dan kerusahan-kerusuhan sosial yang silih berganti, telah meningkatkan tuntutan akan suatu pemecahan yang totalistik. Kondisi mental rakyat dapat dengan mudah menerima kepercayaan mengenai pembebasan dari kekuasaan yang menindas pada umumnya dan kepercayaan umat Islam tentang Mahdi pada khususnya. Di samping eskatologi ini, gagasan tentang Perang Sabil dan pemulihan kesultanan merupakan ekspresi yang menonjol dari orientasi dasar anggota-anggota tarekat yang terlibat dalam gerakan kebangunan.[118]

Di masa-masa kesulitan fisik, psikologis, ekonomi atau politik, pemimpin-pemimpin yang karismatik tampil ke depan. Karena kedudukan dan kewibawaan mereka yang khusus, para kiyai tampil sebagai pemimpin-pemimpin karismatik. Mereka sangat disegani berkat ilmu mereka dan kekuatan magis dan mistik mereka. Sumber lainnya dari otoritas mereka adalah peranan tradisional mereka sebagai penengah dan penasihat istimewa bagi orang-orang lain. Akan tetapi terutama sekali kemampuan mereka untuk melihat hakikat Allah di dalam diri mereka sendirilah yang menjadikan mereka orang-orang yang penuh kharisma di mata murid-murid mereka. Sifat-sifat mereka yang luar biasa, termasuk bakat mereka untuk berkomunikasi dengan rakyat dan mempengaruhi sebagian besar dari mereka untuk menempuh cara hidup yang baru, serta daya tarik magis mereka, biasanya disebut keramat. Beberapa kiyai di Banten Utara terkenal sebagai Wali (orang suci) yang memiliki keramat; mereka membagi-bagikan jimat, menyembuhkan orang sakit dan bisa meramalkan masa depan.[119] Selain itu, mereka dianggap mempunyai kekuatan ilahi, sehingga orang-orang datang kepada mereka untuk minta berkat mereka bagi usaha-usaha tertentu. Dalam keadaan di mana terdapat. ketegangan sosial yang laten, kiyai dapat

memperbesar pengaruhnya atas pengikut-pengikutnya dan kadang-kadang menggerakkan mereka untuk melancarkan pemberontakan bersenjata yang mendadak dan nekad terhadap kekuasaan kolonial [120] ; di mata rakyat, para kiyai mampu merebut kekuasaan politik dan mengadakan perubahan-perubahan yang besar dan mendasar dalam masyarakat, Biasanya perubahan-perubahan yang demikian itu tidak berlangsung tanpa kekerasan. Oleh karena kepemimpinan kiyai yang karismatik menuntut ketaatan yang mutlak, maka ia merupakan ancaman yang potensial bagi pamongpraja, baik Eropa maupun Indonesia, sebagai pemegang otoritas legal-rasionah. Perlu ditambahkan bahwa kegiatan kiyai untuk mendorong kebangkitan kembali agama merintangi usaha-usaha pemerintah kolonial untuk mengubah masyarakat. Sesungguhnya kiyai dapat dianggap sebagai benteng konservatisme.[121] Jelaslah bahwa demi kepentingan mereka sendiri, mereka harus mencegah setiap pembaruan yang mengandung ancaman terhadap prestise dan privilese sosial mereka.

Di dalam hal ketegangan yang terdapat secara inheren dalam hubungan antara pejabat-pejabat kolonial dan para kiyai, maka yang disebut belakangan mempunyai kelebihan karena kedudukan mereka yang strategis. Tempat pekerjaan mereka membuat mereka cocok untuk menjadi penggerak kegiatan-kegiatan pemberontakan. Sebagai pemegang kekuatan karismatik, mereka menerima hadiah-hadiah kehormatan, sokongan-sokongan dan segala macam sumbangan sukarela. Yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa rakyat sangat mematuhi dan mencintai kiyai yang berjuang untuk tujuan yang suci. Sesungguhnya, kaum kiyai merupakan pemimpin-pemimpin alami dalam masyarakat Banten; legitimasi kepemimpinan mereka bersumber pada kewibawaan pribadi mereka. Sebaliknya, pejabat-pejabat pamongpraja tidak memiliki karisma, dan oleh karena itu mereka tidak dapat memiliki kewibawaan yang sama seperti yang dimiliki kiyai. [122]

RANGKUMAN

Kita telah melukiskan pelbagai manifestasi kebangunan agama: terutama meningkatnya jumlah orang yang naik haji, pertumbuhan pesat pesantren dan tarekat-tarekat Sufi, dan beredarnya secara luas ramalan-ramalan eskatologis. Sebab-sebab timbulnya gerakan kebangunan itu untuk sebagian bersifat keagamaan yang lahir dari keprihatinan terhadap kemerosotan iman di kalangan rakyat; dan untuk sebagian bersifat politik yang lahir dari kekhawatiran dan kebencian terhadap ancaman pengaruh Barat yang terus mendesak. Sebagai akibatnya, maka gerakan kebangunan itu sangat diwarnai oleh gerakan anti-Barat. Sering kali ia memperlihatkan semangat yang menggelora untuk mematahkan dominasi Barat dan kembali ke zaman keemasan cara hidup Islam yang benar. Dengan demikian maka semangat Islam dan konservatisme politik bergandengan tangan. Di dalam kampanye yang sengit itu gerakan tersebut mengalami hambatan oleh karena terlalu banyak percabangannya. Usaha-usahanya untuk mengusir Belanda dari Indonesia menimbulkan ledakan-ledakan pemberontakan yang hebat; akan tetapi pemberontakan-pemberontakan itu tidak berlangsung lama dan lingkupnya pun terbatas. Sebaliknya, dampak kebangkitan agama terhadap reorientasi keyakinan dan praktek beragama lebih kekal. Dalam bab-bab berikutnya akan ditelaah perkembangan kebangunan agama dalam tahap revolusionernya sebagaimana yang terjadi di Banten, di mana ia dengan cepat memperoleh momentum setelah tahun 1886.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Lihat surat resmi dari Holle kepada Gubernur Jenderal tgl. 12 Agustus 1873, no. 125, dalam Vb. 3 Juni 1874, no. 31; Holle juga menunjuk kepada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan oleh bupati sebagai kepala umat di daerahnya, umpamanya, berkhotbah,

mengawasi kas mesjid-mesjid, membahas masalah-masalah dogma, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu dianggap melampaui wewenang mereka. Menurut fasal 17 dari Instruksi kepada para bupati di wilayah-wilayah pemerintah (Staatsblad 1867, no. 114), para bupati berhak untuk mengawasi pejabat-pejabat agama dan menyusun daftar para haji, kiyai dan guru, yang pada waktu itu digolongkan sebagai "pendeta" (sic).

[2] Lihat daftar jemaah haji yang mencakup periode antara 1852 dan 1875, dalam de Waal, Vol. I (1876), hal. 245. Lihat juga daftar untuk periode 1879-1889, dalam Laporan mengenai perjalanan naik haji tahun 1889, dalam Vb. 14 Jan. 1890, no. 53. Cf. Vredenbregt dalam BKI, Vol. CXVIII (1962), hal. 91-154. Lihat daftar jumlah murid pesantren-pesantren, dalam de Waal, Vol. I (1876), no. 252.

[3] Lihat surat resmi dari Holle kepada Gubernur Jenderal tgl 20 Agustus 1873 no. 126, dalam Vb. 3 Juni 1874, no. 31. Secara khusus di sana disebut-sebut tentang kaum haji di Priangan, di mana gerakan keagamaan mencapai momentum pada awal tahun-tahun 1870-an. Mengenai prestise dan kedudukan haji di Indonesia ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya; lihat Ikhtisar laporan para residen, dalam Vb. 3 Juni 1874, no. 31.

[4] Perang Rusia-Turki, juga dikenal sebagai Perang Krim, tahun 1856. Dampaknya juga tercermin dalam kepustakaan Melayu dan Sunda; apa yang dinamakan "carita Perang Rus" melukiskan perang tersebut. Lihat surat resmi dari Holle, tgl. 20 Agustus 1873, no. 126.

[5] Yang dimaksudkan dengan "Sultan Rum" di sini adalah Sultan Turki; bukti tentang pengertian populer itu juga dberikan oleh sebuah versi Indonesia mengenai hagiografi pendiri tarekat Kadiriah, Abdulkadir Jaelani; lihat Drewes dan Poerbatjaraka (1938), hal. 55.

[6] Lihat van dan Berg, "Pan-Islamisme", dalam de Gids (1900), no. 4; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 363-380; juga dalam bukunya *Mekka* (1931), hal. 244-245. Mengenai Pan-Islamisme dalam tahun-tahun 1890-an, lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1615-1717. Khusus mengenai korelasi antara Pan-Islamisme dan tarekat-tatekat Sufi, lihat Snouck Hurgronje, VG, Vol. 111(1923), hal. 189-207.

[7] Mengenai perkembangan umum kebangkitan dunia Islam dan watak anti Baratnya yang menonjol, lihat Stoddard (1921).

[8] *Haji-fobi* itu dengan jelas tercermin dalam pelbagai laporan, umpamanya Surat resmi dari Holle tgl. 20 Agustus 1873, no. 126; Surat resmi Asisten Residen Pandeglang tgl. 29 Juni 1876 no. 864/8, dalam V6.10 Feb. 1877, $K^{2'}$ Surat Resmi dari Residen Priangan tgl. 31 Matet 1886, no. 3030, MR 1886, no. 262, dan pasangannya, artikel Brunner, dalam *Java Bode*, 4 Sept. dan 7 Sept. 1885. Mengenai *haji-fobi* dalam periode sesudah pembetontakan, lihat Snouck Hurgronje, VG, Vol. II (1924), hal. 424-425; lihat juga suratnya kepada Sekretaris I Pemerintah, bulan Agustus 1890, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal.1919-1923.

[9] Mengenai laporan-laporan umum tentang reaksi-reaksi Dunia Islam terhadap penetrasi Barat, lihat von Grunebaum (1962), hal.128-179; juga Wer net Casket, dalam von Grunebaum, ed. (1955), hal. 335-360. Khusus mengenai Indonesia dalam abad XIX, lihat Benda (1957), hal. 9-31; Wertheim (1959), hal.195-235.

[10] Von Grunebaum (1962), hal. 128-179; Werner Casket, dalam von Grunebaum, ed. (1955), hal. 335-360.

[11] Kepekaan mereka mengenai martabat mereka pemah diungkapkan dalam bahasa Melayu sebagai "tanda diaku" (sic); lihat pernyataan Penghulu Kepala Bandung, yang dikuttip oleh Holle dalam surat resminya tgl. 12 Agustus 1873, no. 125.

[12] Werner Casket, dalam von Grunebaum, ed. (1955), hal. 340.

[13] Mengenai laporan umum tentang kehidupan agama dan sufisme di Indonesia dalam abad XVI dan XVII, lihat Rinkes (1909), Kraemer (192j), Drewes dan Poerbatjaraka (1938), van

Nieuwenhuijze (1945), Schrieke (1956); lihat juga Johns, dalam JSAH, Vol. II (1961), hal.10-23.

[14] Rinkes (1909).

[15] Mengenai riwayat hidup Syekh Abdul Muhyi, lihat Rinkes, dalam TBG, Vol. LII (1910), hal. 556-589.

[16] Kraemer, dalam Djawv, Vol. IV (1924), hal. 29; Drewes dan Poerbatjaraka (1938), hal. 10-11.

[17] Djajadiningrat (1913), hal. 50-52, 126, 187. Juga disebut-sebut tentang pemberian gelat sultan kepada kepala Kerajaan Banten untuk pertama kalinya dalam tahun 1638.

[18] Drewes, dalam Djowa, Vol. VI (1926), hal. 83.

[19] Bukti itu terdiri dari fakta-fakta berikut: sultan Banten yang pertama bernama Sultan Abuhnafakhir Mahmud Abdulkadir; nama paling akhir menunjuk kepada pendiri tarekat Kadiriah; lihat Drewes dan Poerbatjaraka (1938), hal. 11, juga H. Djajadiningrat (1913), hal. 51; penulis yang disebut belakangan juga menyebutkan nama seorang pedagang, Haji Dulkadir, yang di Banten juga dikenal sebagai "juragan Kadiriah", artinya seorang pedagang Kadiriah; lihat H. Djajadiningrat (1913), hal. 263. Selanjutnya: mistikus pengembara Hamzah al-Fansuti pasti telah berkunjung ke Banten dalam perjalanan-perjalanannya, bagaimanapun ajaran mistiknya, *Wujudiah*, sangat tetkenal di Banten, lihat Drewes dan Poerbatjaraka (1938), hal. 12.

[20] Mengenai laporan yang lebih lengkap tentang sikap golongan-golongan modernistik, yang lebih akrab dengan kebudayaan Barat dan betsikap terbuka bagi kemajuan Barat, lihat Hourani (1962), khususnya mengenai ide-ide yang dikemukakan oleh Jamal ad-Din al-Afghani dan Muhamad Abduh.

[21] Van den Berg, dalam TBG, Vol. XXVII (1882), hal.1-47.

[22] Konflik di antara pelbagai golongan elite dalam masyarakat Muslim yang tradisional tidak terutama menyangkut soal-soal doktrin melainkan merupakan perebutan kekuasaan; lihat Pigeaud (MS,1943-1945), hal.126.

[23] Snouck Hurgronje (1931), hal. 291.

[24] Snouck Hutgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 1-125; VG, Vol. III (1923), hal. 45-64, 137-149, 299-311; VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 173-199, 307-317. Lihat juga kumpulan advis-advisnya, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1307-1466. Juga bukunya *Mekka* (1931) terutama mengenai masyatakat *Jawah*. Sumber-sumber lain untuk perbandingan, Laporan mengenai perjalanan naik haji dalam tahun-tahun 1888 dan 1889, dalam Vb. 29 Jan. 1889, no. 46, dan Vb. 24 Jan. 1890, no. 53. Lihat juga Eisenberg (1928); Vredenbregt, dalam BKI, Vol. CXVIII (1962), hal. 91-154.

[25] Snouck Hurgronje (1931), hal. 248-249; lihat juga Laporan mengenai perjalanan naik haji,1888.

[26] Mengenai kebijaksanaan Belanda dalam urusan haji, lihat Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV. bagian 2 (1924), hal. 175-198. Mengenai laporan terperinci tentang pelbagai masalah dan kesulitan yang dialami para jemaah haji, umpamanya dalam hal pengangkutan, sanitasi, penunjuk jalan, dan keuangan, lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. 11 (1959), hal.1307-1466.

[27] Mengenai deskripsi lengkap tentang Jawah, (liat Snouck Hutgronje (1931), hal. 215-292.

[28] Lihat Brooshooft seperti yang dikutip oleh Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 1(1924), hal. 356.

[29] Van den Berg, dalam De Gids (1900), no. 4, hal. 228-269, 392-431; Snouck Hurgronje (1931), hal. 244, 245, 248-249; lihat juga Laporan mengenai perjalanan naik haji,1888.

[30] Snouck Hurgronje (1931), hal. 244.

[31] Sampai tingkat tettentu, pemberontakan Cilegon itu merupakan buah hasil propaganda yang gigih yang dilakukan oleh Haji Abdul Karim, Haji Ismail, dan Haji Marjuki. Lihat Surat resmi Konsul Jeddah, mengenai kegiatan-kegiatan H. Abdul Karim dan H. Marjuki, tgl. 26 Nov. 1888, no. 797(19, dalam Vb. 11 Jan. 1889, no. 9; dan tgl. 25 Des. 1888, no. 809/24, dalam Vb. 25 Jan. 1889, no. 19. Cf. Surat resmi dari Sparkler, 25 Nov. 1891, no. 700, dalam Vb. 9. Mei 1892, no. 40.

[32] Lihat van den Berg, dalam De Gids (1900), no. 4, hal. 407-410; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, Bagian 2 (1924), hal. 193-194; juga bukunya Mekka (1931), hal. 244.

[33] Anggota-anggotanya yang paling terkemuka adalah: Juneid dari Batavia, seorang guru yang berilmu; Khatib Akhmad Sambas murid-penggantinya, H. Abdul Karim, keduanya anggota tarekat Kadiriah; Mohamad Nawawi dari Banten, seorang ahli hukum; dan Zainudin dari Sumbawa, seorang guru yang berilmu; lihat Snouck Hurgrorlie (1931), hal. 262-281.

[34] Mengenai Laporan tentang tarekat Kadiriah dan tarekat Naksibandiah, lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1203-1207, 1218; mengenai tarekat Satariah, op. cit. hal. 1193 -1200; cf. Lapotan Residen Banyumas, 12 Jan. 1889, dalam MR. 1889, no: 41; mengenai tatekat Rifaiah, op. cit. hal. 1197-1199; mengenai tarekat Rahmaniah, lihat Laporan mengenai perjalanan naik haji, 1888.

[35] Mengenai deskripsi tentang perselisihan antara Khalil Pasha dan Sulaiman Effendi, lihat Snouck Hurgronje (1931), hal. 176-179; ajaran Sulaiman Effendi telah dikutuk, lihat surat edaran tentang kutukan itu, dalam MR 1886,na.356.

[36] H. Djajadiningrat (1913), hal. 50-52,187.

[37] Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1318-1323, 1332-1335.

[38] Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. fl (1959), hal. 1334.

[39] Lihat de Waal, Vol. I (1876), hal. 245-246; Laporan mengenai perjalanan naik haji, 1889; mengenai angka-angka tentang perjalanan naik haji antara 1891 dan 1911, lihat Snouck Hurgtonje, dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 314-315. Lihat juga Vredenbregt, dalam BKI, Vol. CXVIII (1962), hal.140-149.

[40] Yang dimaksudkan dengan Haji akbar, adalah apabila upacara di Padang-Arafat, yang diadakan pada tanggal 9 Zulhijah, jatuh pada hari Jumat. Hal. 246 itu terjadi dalam tahun-tahun 1880, 1885, dan 1888; dalam tahun-tahun itu jumlah jemaah haji adalah berturut-turut 9544, 4492, dan 4328; lihat Laporan mengenai perjalanan naik haji, 1888; lihat juga advis Snouck Hurgronje, 7 Sept. 1888, dalam Vb. 11 Sept. 1888, no. 44; Vredenbregt, dalam BXI, Vol. CVIII (1962), hal. 147.

[41] Dalam Laporan mengenai perjalanan naik haji tahun 1889 dikatakan bahwa sejumlah besar orang Indonesia yang menjadi budak dijumpai di Mekah dan sekitarnya. Juga terdapat orang-orang yang naik haji yang jadi budak dan dipaksa untuk bekerja di kebun-kebun kelapa di Pulau Cocob, dekat Singapura, milik As-Saggaf; Lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1445-1447; mengenai laporan-laporan yang lengkap mengenai As-Saggaf, lihat MR 1885, no. 67, 144, 130, 173; juga Vb.18 Agustus 1888. no. 10.

[42] Selama dasawarsa 1879-1888, jumlah tahunan minimum jemaah haji dari Indonesia adalah 4968 (dalam 1887), sedangkan jumlah maksimum adalah 13594 (dalam 1880) dari jumlah seluruhnya yang berkisar antara 25.580 dan 59.659; Lihat Laporan mengenai perjalanan naik haji,1888.

[43] Dalam tahun 1888 jumlah calon haji dari Banten adalah 160 dari jumlah 2869 dari Jawa dan Madura, dalam tahun 1889 angkanya adalah 132 dari 1337; lihat Laporan mengenai perjalanan naik haji tahun 1889. Menurut angka-angka statistic tahun 1887, di Banten terdapat 4073 haji, yang meliputi 0,72 persen dari jumlah penduduknya; ini merupakan persentase

tertinggi untuk seluruh Jawa; lihat juga Appendix IV.

[44] Lihat Appendix IV.

[45] Snouck Hurgronje (1931), hal. 254; mengenai deskripsi tentang *Jawah* sekitar tiga dasawarsa kemudian, lihat IG (1915), no. 1, hal. 538-540.

[46] Snouck Hutgtonje (1931), hal. 257.

[47] Istilah "Nasionalisme Islam" kelihatannya paradoksal, oleh karena kata sifat "Islam" menunjuk kepada sesuatu yang bersifat kosmopolitan; dilihat dari segi ini, maka gerakan keagamaan yang dibahas di sini dapat dianggap sebagai semacam tahap pertengahan jalan antara nasionalisme dan kosmopolitanisme

[48] Tarekat Naksibandiah mempunyai penganut-penganut di Minangkabau, Langkat, Cianjur dan Banyumas; H. Abdul Karim dari Banten mempunyai murid-murid dari Bogor, Sambas, Solok, Bali, Madura, dan sebagainya. Lihat surat resmi dari Konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797J19.

[49] Mengenai contoh-contoh afiliasi kelompok di dalam rangka tarekat-tarekat Sufi, yang menembus batas-batas lokal, lihat di bawah, Bab VI, *passim*.

[50] Snouck Hurgronje (1931), hal. 258.

[51] Deskripsi-deskripsi tentang kehidupan santri di pesantren di abad-abad sebelumnya terdapat dalam *Serat Tjentini* (1912-1915).

[52] Lihat angka-angka yang diberikan oleh de Waal, Vol. I (1876), hal. 245, mengenai haji-haji yang kembali ke tanah air antara 1852 dan 1875. Nampak satu peningkatan yang mantap dalam jumlah mereka, dari 438 dalam 1852 menjadi 2078 dalam 1875, sedangkan dalam 1873 jumlah nya adalah 3242.

[53] Lihat Brumund (1857), hal. 27; cf. Van den Berg, dalam TBG, Vol. XXVII (1882), hal. 22.

[54] Pesantren Tegalsari didirikan di masa pemerintahan Paku Buwono III, sekitar pertengahan abad XVIII; lihat Brumund (1857), hal. 19; juga Pokkens, dalam TBG, Vol. XXIV (1878), hal. 318-336.

[55] Van den Berg, dalam TBG, Vol. (1882), hal. 22.

[56] Keempat cabang iLnu agama yang diajarkan di pesantren, seperti yang dilaporkan oleh Bupati Pandeglang, adalah IImu Usul, Ilmu Fikih, Ilmu Tasauf, dan Ilmu Nahu; lihat Appendix U dari Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri; mengenai daftar kepustakaan yang dipakai di sana, lihat Van den Berg, dalam TBG, Vol. XXVII (1882), hal. 25.Cf. Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adtiaanse, Vol III (1965), hal.1936.

[57] Untuk suatu deskripsi yang baik mengenai kehidupan di pesantren, lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 20-24; Lihat juga Brumund (1857), hal. 17-29.

[58] Di di distrik Anyer, Cilegon, dan Kramat Watu, di antata 164 guru terdapat 67 haji; lihat selanjutnya Appendix V. Perlu dicatat bahwa terdapat pelbagai macam guru agama, di antaranya guru mengaji; lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol.II (1959), hal. 1162-1170.

[59] Umpamanya, H. Abdul Karim, H. Marjuki, Syekh Mohamad Nawawi, Khatib Ahmad Sambas, dan sebagainya, dan semua orang yang disebutkan dalam catatan no. 33. Selain deskripsi yang diberikan oleh Snouck Hurgronje, lihat juga surat resmi dari Konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797/19; 25 Des. 1888, no. 809/24; dan 25 Nov. 1891, no. 700.

[60] Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 1(1924), hal. 360.

[61] Kaum santri selalu memperolokkan tingkah laku, sikap dan gaya pejabat-pejabat pamongpraja. Satu contoh mengenai hal itu telah dilukiskan dengan baik sekali oleh A. Djajadiningrat (1936), hal. 21.

[62] Benda (1957), hal. 18.

[63] A. Djajadiningrat (1936), hal. 23.

[64] Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam periode sesudah pemberontakan berbeda dari daerah ke daerah; pengawasan itu dilakukan dengan jalan menguji calon-calon guru, mengeluarkan lisensi atau izin untuk mengajar, atau mewajibkan pendaftaran murid-murid, dan sebagainya. Sebelum pemberontakan, terdapat daftar-daftar haji, guru dan murid-murid mereka, atau setidak-tidaknya jumlah-jumlah mereka, di tiap daerah; lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. If (1959), hal. 1149-1172. Mengenai pengawasan pemerintah di Banten dalam periode setelah pemberontakan, lihat K7; VI (1917), hal. 736.

[65] Oleh konsul di Jeddah juga telah disebut-sebut nama Kadiriah-Naksibandiah, dan yang dimaksudkannya adalah bentuk tarekat Kadiriah yang telah mengoper praktek-praktek tertentu dari Naksbandiah. Lihat Surat resmi dari konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797/19. Diketahui adanya kasus-kasus tentang orang-orang yang sekaligus menjadi anggota dua tarekat atau syekh-syekh dari dua tarekat, umpamanya tarekat Kadiriah dan Naksibandiah. Mengenai contoh-contohnya, lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1193,1205,1210, 1218; Naguib al-Attar (1963), hal. 33-35, 53.

[66] Lihat di atas, catatan no.13-19.

[67] Mengenai laporan tentang proses untuk menjadi penganut sebuah tarekat pada waktu sedang berada di Mekah, lihat Laporan Residen Banyumas, 12 Jan. 1889; di sana disebut-sebut tentang Mohamad Ilyas dari Sukaraja, dan Mohamad Habib dari Kebanrongan. Lihat juga Snouck Hurgronje (1931), hal. 273, 276.

[68] Tarekat Rifaiah mempunyai penganut-penganut di Bogor, di mana ia disebarkan oleh Raden Mohamad Sapi'i pada awal abad XIX; lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1197; Akmaliah atau Kamaliah mempunyai penganut-penganut di Banjarnegara, sedangkan penganut-penganut tarekat Halwaliah hanya disebut-sebut dalam laporan mengenai perjalanan naik haji tahun 1888, tidak ada keterangan tentang tempat cabang-cabangnya; lihat Laporan mengenai perjalanan naik haji, 1888. Cf. advis Snouck Hurgronje 10 Maret 1891, di mana ia menyebutkan tarekat Halawiah area Alawiah; Gobee dan Adtiaanse, Vol. II (1959), hal.1375-1377. Mengenai laporan tentang tarekat Satariah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama dasawarsa pertama abad XX, lihat Henny, dalam IG (1921), no. 2, hal. 809-830, 895-919; cf. Snouck Hutgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal. 1964-1973.

[69] Peningkatan sentimen keagamaan dan solidatitas dicapai melalui salah satu ritual, yakni zikir, Mengenai deskripsi yang lengkap tentang penyelenggaraan zikir, lihat van den Berg, dalam TBG, Vol. XXVIII (1883), hal. 159-160; lihat juga Araher, dalam JMBRAS, Vol. XV, bagian 2 (1937), hal. 105-107.

[70] Untuk suatu laporan tentang upacara *bengat*, lihat Snouck Hurgtonje, dalam VG, Vol. IV, bagian 1 (1924), hal. 189; cf. Subhan (1960), hal. 88-91.

[71] Lihat Subhan (1960), hal. 161; mengenai contoh tentang silsilah Satariah, yang menunjukkan hubungan antara Abdurra'uf dari Singkel dan orang yang bernama Amad Saliha dari Pati, Lihat Rinkes (1909), hal. 94-97.

[72] Ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa tarekat-tarekat Sufi di Malaya tidak melibatkan diri dalam perjuangan politik dan tidak begitu militan, lihat Naguib al-Atlas (1963), *passim*.

[73] Mengenai perkembangan tarekat di Priangan Barat, lihat Surat resmi Residen Priangan, 31 Maret 1886, no. 3030 dalam MR 1886, no. 262; mengenai perkembangannya di Banyumas, lihat laporan Residen Banyumas, 12 Jan. 1889, dalam MR 1889, no. 41; mengenai

perkembangannya di Bogor, lihat Van den Berg, dalam TBG, Vol. XVIII (1883), hal. 162.

[74] Lihat van den Berg, dalam TBG, Vol. XVIII (1883), hal. 161; soal keanggotaan kelas-kelas rendahan di Mekah disebut-sebut dalam Laporan tentang perjalanan naik haji 1888. Sebuah karangan mengenai sifat tarekat telah ditulis oleh Sayid Usman, Penasihat Kehormatan Urusan Arab, di mana ia memberikan peringatan mengenal guru-guru palsu, van de Waal, dalam TBG, Vol. XXXV (1893), hal. 223-227.

[75] Lihat van den Berg, dalam TBG, Vol. XXVIII (1883), hal. 163-164. Propaganda di daerah itu dimulai oleh H. Abd. Al-Kadir dari Semarang. Dalam tahun-tahun delapan puluhan di sana terdapat 13 sekotah dan 15 guru, di antaranya 12 orang di Semarang, 2 di Kendal dan seorang di Salatiga. Perlu dicatat, bahwa H. Abd al-Kadir adalah seorang murid Syekh Sulaiman Effendi yang sangat terkenal itu, yang disebutkan dalam catatan no. 35.

[76] Surat resmi dari Residen Priangan, 31 Maret 1886, no. 3030. H. Musa adalah ayah bupati Lebak, R.T. Suria Nataningrat (1880-1908); menurut Surat itu, ia termasuk golongan ortodoks. Syekh Umar adalah seorang ulama yang mendapat dukungan kuat dari Holle, Penasihat Kehormatan Urusan Ptibumi, lihat juga *Java Bode*, 23 Sept. 1885.

[77] *Java Bode*; 28 Sept. 1885.

[78] Mengenai kabar-kabar angin, banyak artikel dalam Java Bode membicarakan manifestasi-manifestasi dari apa yang dinamakan fanatisme; lihat Java Bode, 4,7, 12 dan 22 Sept. 1885; 10 Nov. 1885. Mengenai komplotan di Bandung, lihat Java Bode, 2 Okt. 1885; juga Surat resmi Residen Priangan, 29 Sept. 1885, dalam MR 1885, no. 647a.

[79] Anak laki-laki H. Musa yang bungsu ketika itu adalah seorang naib di Wanaraja; lihat Surat resmi Residen Priangan, 31 Maret 1886, no. 3030.

[80] Selain ketiga orang yang disebutkan itu, juga Wedana Sukabumi adalah penganut tarekat itu. Malahan dikabarkan bahwa juga Bupati Bandung telah dibujuk untuk menjadi pengikutnya. Surat resmi Residen Priangan, 31 Maret 1886, no. 3030.

[81] Di antara ciri-ciri utamanya adalah: menunaikan kewajiban-kewajiban agama dengan ketat dan mematuhi guru secara membuta; zikir merupakan ibadah yang paling penting. Lihat Surat resmi Residen Priangan, 26 Jan. 1886, no. 930, dalam MR 1886, no. 90°; juga Laporan Residen Banyumas, 12 Jan. 1889, dalam MR 1889, no. 41.

[82] Contoh-contoh lainnya tentang peranan penting guru tatekat dalam kerusuhan-kerusuhan politik adalah: peristiwa Gedangan dalam 1904; peristiwa Bendungan-Barong dalam 1907; huru-hara Pariaman dalam 1908; lihat van der Lith, dalam K7; Vol. VI, bagian I (1917), hal. 735; Henny, dalam IG (1921), no. 2, hal. 899-908.

[83] Keadaan itu masih berlaku dalam kurun waktu setengah abad berikutnya; lihat Laporan Penasihat Urusan Pribumi, 21 Agustus 1921; juga Pijper (1934), hal. 99,139.

[84] Pada umumnya diakui bahwa seotang kiyai mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang haji secara pukul rata, lihat kesaksian Raden Penna, 6 Des. 1888, dalam Exh. 28 Jan. 1889, no. 74. Mengenai H. Makid, ia mengatakan bahwa haji tersebut sudah dianggap sebagal seorang kiyai oleh penduduk desanya, meskipun hal itu belum diakui di afdeling.

[85] Surat resmi dari konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797/19; Lihat juga Snouck Hurgronje (1931), hal. 276, dan dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal. 1863. Syekh Khatib Akhmad al-Sambasi adalah seorang syekh baik dati tarekat Kadiriah maupun dari tarekat Naksbandiah, lihat Naguib al-Atlas (1963), hal. 33. Kombinasi atau sinkretisme unsur-unsur dari dua tarekat yang berlainan sudah dikenal sejak lama dan dalam bahasa Jawa disebut *daup*, yang secara harfiah berarti perkawinan, lihat Zoetmulder (1935), hal. 147-148.

[86] Surat resmi konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797J19. Pengrkut-pengikut Khatib Sambas

dan H. Abdul Karim juga terdapat di Malaya; lihat Naquib al-Atlas (1963), hal. 35, 53.

[87] Ibidem;juga Surat resmi konsul di Jeddah, 25 Des. 1888, no. 809/24.

[88] Laporan kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16, dalam MR 1889, no. 376; lihat juga IG (1891), no. 2, hal. 1149. Mengenai gagasan tentang pemulihan kesultanan, lihat di atas, Bab 1V, *passim*; lihat juga Laporan DDI, Appendix D.

[89] Darmesteter memberikan satu deskripsi yang lengkap tentang gerakan Mahdi di Sudan, lihat Darmesteter (1885); cf. sebuah karya yang lebih baru, Halt (1958). Dampak gerakan ini di Indonesia telah disebutkan di dalam Java Bode, 7 Sept. 1885; 8 Feb. 1886; juga Indische Mail, 2 Maret 1886. Van den Berg juga menyebut-nyebut tentang penyebaran sutatkabar-suratkabar Arab sebagai sumber informasi mengenai peristiwa-peristiwa di Dunia Muslim, lihat van den Berg, dalam De Gids (1900), no. 4, hal. 228-269,392-431.

[90] Snouck Hurgronje menyajikan perkembangan ide tentang Mahdi itu dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 221-307; lihat juga Darmesteter (1885). Soal kedatangan Mahdi itu juga disebut-sebut di dalam salah satu versi surat edaran dari Mekah; lihat van Sandick (1892). Cf. salinan surat edaran itu dalam MR 1883, no. 10; lihat juga Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal.134 - 139.

[91] Pembetontak-pemberontak yang ditawan mengemukakan pelbagai motif untuk ikut dalam pemberontakan, umpamanya, pajak yang berat, sikap pemerintah yang tidak menghargai para kiyai, melancarkan Perang Sabil terhadap penguasa yang kafir, dan sebagainya; akan tetapi mereka tidak menyebut-nyebut soal akan tibanya Mahdi. Lihat Laporan DDI, Appendix D dan 1; Appendix VIII. Tidak ada sumber-sumber yang menerangkan bahwa gerakan-gerakan sebelumnya telah dipengaruhi oleh ramalan tentang kedatangan Mahdi.

[92] Mengenai tradisi kebudayaan Jawa dapat dikemukakan bahwa ide tentang Mahdi itu dimasukkan ke dalam apa yang dinamakan ramalan Jayabaya; lihat de Hollander (1848), hal. 173-183; Wiselius, dalam BKI, Seri III, bagian 7 (1872), hal. 172-217; lihat juga Schrieke (1959), hal. 81-95.

[93] Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; lihat juga IG (1891), no. 2, hal. 1141.

[94] Ibidem.

[95] Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 424-425; van Sandick (1892), hal. 151; wabah penyakit ternak disebut-sebut sebagai salah satu pertanda itu yang nampaknya sangat mempengaruhi orang-orang yang mempercayainya. Letusan Gunung Krakatau yang dahsyat dalam bulan Agustus 1883 sudah barang tentu memperkuat kepercayaan tentang akan tibanya hari kiamat.

[96] IG (1891), no. 2, hal. 1149. Adalah menarik bahwa di sini tidak terlihat samasekali bentuk tipikal dari kepercayaan Jawa tentang milinari – yakni kepercayaan tentang akan datangnya Ratu Adil. Dua versi dapat dikemukakan:

(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[97] Dua versi dapat dikemukakan:

(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje,

dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[98] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[99] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[100] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[101] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[102] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[103] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd Al-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[104] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd AI-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[105] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd AI-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[106] Dua versi dapat dikemukakan:
(1) versi seperti yang dikemukakan dalam buku-buku van Sandick dan Snouck Hurgronje;
(2) versi seperti yang disalin dalam Laporan Mail tahun 1883.

Yang pertama ditandatangani oleh Mohamad Ja'far bin Abd AI-Khaliq, yang kedua oleh Abdus Sarip, raja Mekah. Lihat MR 1883 no. 10; van Sandick (1892), hal. 143-151; Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. I (1923), hal. 134-139. Mengenai lapotan-laporan kontemporer tentang aspek gerakan keagamaan itu, lihat De Locomotief 1 luli 1884; juga IG (1884), no. 2, hal. 739-744.

[107] Ibidem; kaum santri tidak saja menuduh kaum priyayi memperlakukan mereka dengan buruk, akan tetapi juga mendakwa bahwa mereka pada umumnya tidak bermoral. Kaum priyayi dicap sebagai *kafir indanas*, artinya hanya namanya saja Muslim, meskipun jika dibandingkan dengan kaum priyayi di Jawa Tengah, kaum priyayi di Banten lebih taat dan lebih cermat dalam melakukan ibadah mereka.

[108] Surat resmi dari konsul di Jeddah, 25 Des. 1888, no. 809/24; IG (1891), no. 2, hal.1139.

[109] Khatib-khatib keliling ini mempunyai prestise yang besar, bukan hanya karena nama Mekah adalah suci di mata orang-orang Muslim, tetapi juga karena mereka adalah anggota-anggota Ordo Satria Turki atau terkenal sebagai orang-orang yang sangat berilmu. Kadangkala mereka menjual jimat, air suci dari Mekah, dan sebagainya. Kunjungan mereka kepada sultan-sultan, pangeran-pangeran dan pemuka-pemuka pnbumi lainnya telah melahirkan hubungan-hubungan daerah Mekah, sehingga mengancam prestise pemerintahan Belanda. Surat resmi dari Residen Surabaya, 31 Juli 1885, dalam MR 1885, no. 148; Surat resmi dari Residen Banyumas, 18 Jan. 1886, no. l/4 dalam MR 1886, no. 41; Surat resmi Residen Batavia, 28 Feb. 1886, dalam MR 1886, no. 148.

[110] Umpamanya, Sayid Abdallah, yang berturut-turut mengunjungi Singapore, Pontianak, Riau, Kutai, Batavia, dan Surabaya; lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal.1600-1608.

[111] Surat resmi dari Residen Semarang, 7 Juli 1885, dalam MR 1885, no. 148, dan Surat resmi dari Residen Surabaya, 31 Jul! 1885.

[112] Snouck Hurgronje (1931), hal. 258; sebuah fatwa yang terkenal adalah yang mengutuk ajaran-ajaran Sulaiman Effendi; lihat Surat resmi dari Holle, 19 Mei 1886, dalam MR 1886, no. 356. Mengenai naskah fatwa itu, lihat selanjutnya MR 1886, no. 356.

[113] Surat resmi dari Residen Banten, 2 Maret 1889, no. 443, dalam MR 1889, no. 183.

[114] Van Sandick (1892), hal.126-129.

[115] Surat tesmi dari Komandan Militer divisi pertama kepada Panglima Tentara, 27 Nov. 1883, no. 958J764, dalam MR 1883, no. 1113.

[116] Surat resmi Residen Banten kepada Komandan Militer di Serang, 26 Nov. 1883, no. 8857/18, dalam MR 1883, no. 1113.

[117] Informasi itu terdapat dalam artikel sensasional yang ditulis oleh Brunner, dalam Java Bode, 28 Sept. 1885; lihat di atas dalam catatan no. 78.

[118] Lihat di atas, dalam catatan no. 88, 91.

[119] Di antara kesaktian-kesaktian seorang Wali disebutkan antara lain kemampuan untuk menempuh jarak-jarak yang jauh dalam sekejap mata saja, berjalan di permukaan air, terbang di udara, dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Untuk suatu deskripsi tentang karakteristik-karakteristik orang-orang suci itu, lihat Subhan (1960), hal. 111-112. Tiap daerah di Jawa mempunyai orang-orang sucinya; di Banten orang suci itu adalah Haji Mangsur, Lihat Sejarah Haji Mangsur (Ms). Mengenai hagiografi orang-orang suci lainnya di Pulau Jawa, lihat Rinkes, dalam TBG, Vol. LII (1910), hal. 556-589; Vol. LIII (1911), hal. 17-55, 269300, 435-581; Vol. LIV (1912), hal. 13-206; Vol. LV (1913), hal. 1-200.

[120] Lihat di atas dalam catatan no. 82.

[121] A. Djajadiningrat (1936), hal.19.

[122] Mengenai pembedaan antara otoritas karismatik, tradisional dan legal rasional, lihat teori Max Weber dalam Bendix (1962), hal. 298-416.

Bab VI

GERAKAN PEMBERONTAKAN

Kita sekarang sedang mendekati salah satu tahap yang paling penting dalam sejarah gerakan-gerakan sosial di Banten, tahap komplotan-komplotan dan tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam eksistensi rezim kolonial itu sendiri, dan boleh jadi akan mencapai dimensi-dimensi yang luas andaikata pemberontakan itu tidak jelek pengorganisasiannya. Bagi banyak pengamat di masa itu, pemberontakan tahun 1888 itu kelihatannya seperti suatu fonemen yang berdiri sendiri.[1] Akan tetapi peristiwa itu bukan merupakan suatu tindakan yang tiba-tiba di pihak petani-petani yang tidak tahu apa-apa, yang mengamuk karena fanatik agama, seperti yang hendak dikesankan oleh beberapa laporan.[2] Sejak hari pertama sudah jelas bahwa ini merupakan suatu pemberontakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan dan mempunyai lingkup yang jauh melampaui Batas-batas kota kecil Cilegon.[3] Seperti akan ditunjukkan nanti, peristiwa itu merupakan kulminasi suatu gerakan pemberontakan yang selama bertahun-tahun bergiat secara terang-terangan atau secara rahasia. Peristiwa.peristiwa yang telah terjadi menunjukkan bahwa tarekat - perkumpulan tertutup yang merupakan sarana untuk menyebarkan informasi-informasi rahasia dan komunikasi di antara anggota-anggota komplotan - telah memainkan peranan yang penting. Informasi disalurkan melalui tarekat secara rahasia, sedemikian rupa sehingga pejabat-pejabat pemerintah tidak menduga sedikit pun apa yang sedang terjadi. Ledakan di Cilegon pada tanggal 9 Juli 1888 benar-benar membuat mereka terperanjat. Penyelidikan-penyelidikan yang diadakan di kemudian hari menyingkapkan bagaimana anggota-anggota komplotan telah mengadakan pertemuan di pelbagai tempat; untuk keperluan itu mereka menggunakan tarekat sebagai tempat berkumpul untuk bersama-sama melakukan sembahyang dan berzikir. Dalam pertemuan-pertemuan itulah gerakan tersebut mempersatukan para kiyai sebagai pemimpin komplotan di daerah masing-masing. Dengan menggunakan agama sebagai kedok, mereka tukar-menukar pengalaman dan membicarakan strategi kampanye. Sayang sekali tidak ada catatan-catatan mengenai pertemuan-pertemuan itu, namun demikian orang tak memerlukan daya imajinasi yang besar untuk memperkirakan apa yang dibahas pada kesempatan-kesempatan itu. Selain itu, ada sejumlah catatan tentang sidang-sidang pengadilan yang memuat data yang cukup mengenai apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan tersebut.[4]

Kalau dikatakan bahwa tidak banyak diketahui tentang tarekat, maka demikian pula halnya dengan para pemimpin gerakan revolusioner itu. Hanya tentang beberapa orang saja di antara mereka terdapat sejumlah data yang pasti, yakni Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail dan Haji Wasid. Mengingat peranan mereka yang sangat penting dalam pemberontakan, maka untuk mudahnya kita akan memusatkan uraian kita tentang gerakan pemberontakan itu terutama pada kegiatan pemimpin-pemimpin itu. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa pelaku-pelaku lainnya dalam drama revolusioner itu akan dilupakan. Seperti ditunjukkan oleh catatan-catatan yang ada, beberapa anggota biasa dari gerakan itu memainkan peranan yang samasekali tak boleh diabaikan dalam pemberontakan itu sendiri.

HAJI ABDUL KARIM

Haji Abdul Karim, ulama besar dan orang suci di mata rakyat, adalah yang paling menonjol di antara pemimpin-pemimpin gerakan itu. Dari keterangan yang diberikan dalam bab yang terdahulu sudah jelas bahwa awal perkembangan gerakan tarekat di Banten berkaitan dengan

karier Haji Abdul Karim sebagai seorang pemimpin agama pada umumnya dan sebagai guru tarekat Kadiriah pada khususnya. Sejak masa mudanya ia mendalami ajaran-ajaran Khatib Sambas, pemimpin tarekat Kadiriah, dan kemudian menjadi seorang ulama besar yang sangat terkenal. Ia memperlihatkan hasrat yang sangat mendalam untuk menimba ilmu dan perhatian yang besar terhadap ajaran-ajaran Islam. Karena sifat-sifatnya yang luar biasa, ia dianggap cocok sekali untuk berdakwah bagi tarekat Kadiriah. [5] Tugas pertama yang diberikan kepadanya adalah sebagai guru tarekat di Singapura, dan tugas itu ia lakukan selama beberapa tahun.[6] Tahun 1872 ia kembali ke desa asalnya, Lampuyang, dan tinggal di sana selama lebih kurang tiga tahun. Ia mendirikan sebuah pesantren, dan oleh karena ia sudah terkenal, maka dalam waktu singkat ia sudah mempunyai murid-murid yang sangat setia, mengabdi dan patuh kepadanya. Sulit untuk memperkitakan jumlah pengikutnya: bagaimanapun, ia dengan cepat tampil sebagai tokoh yang dominan di kalangan elite agama. Tidak saja prestise dan pengaruhnya bertambah besar secara menyolok, tapi ia pun memperoleh keuntungan-keuntungan materi yang besar dari pengikut-pengikutnya, yang berlomba-lomba membeli tasbih, kitab suci dan benda-benda keagamaan lainnya yang berasal dari Kota Suci. Kekayaannya memungkinkan ia mengunjungi daerah-daerah di Banten sambil tak henti-hentinya mempropagandakan tarekatnya. Di samping massa rakyat yang antusias yang dengan mudah ia pengaruhi, ia juga berhasil meyakinkan banyak pejabat pamongpraja untuk mendukung misinya. pada satu ketika kiyai besar itu mempunyai prestise yang luar biasa besarnya dan mendapat dukungan dari Bupati Serang sendiri. Sejumlah tokoh terkemuka, termasuk penghulu kepala di Serang dan seorang pensiunan patih, Haji R.A. Prawiranegara, adalah sahabat-sahabatnya dan mereka sangat terkesan oleh ide-idenya. Karena ia sangat popular dan sangat dihormati oleh rakyat, pejabat-pejabat pemerintah marasa takut terhadapnya. Bupati Serang sendiri pergi ke distrik Tanara dan berkunjung kepada kiyai Haji Abdul Karim. Malahan dikatakan orang bahwa ia menyertai residen dan bupati kembali dalam kareta yang sama, dan bahwa ia menjadi tamu bupati selama beberapa hari. [7] Kenyataan itu saja, yakni bahwa kedua pejabat tertinggi di Banten telah berkunjung kepadanya, menyebabkan prestisenya membubung tinggi. Ia benar-benar merupakan orang yang paling dihormati di Banten.

Berkat kedudukannya yang luar biasa, khotbah-khotbah Haji Abdul Karim mempunyai pengaruh yang besar terhadap penduduk. Dalam kunjungan-kunjungannya ke seluruh pelosok di daerah itu, ia tak henti-hentinya berseru kepada rakyat supaya memperbarui kehidupan agama mereka dengan jalan lebih taat menunaikan ibadah mereka. Dijelaskannya bahwa keyakinan dan praktek agama harus menjalani proses pemurnian yang intensif. Dalam hubungan ini, zikir menjadi fokus kebangkitan kembali. Di banyak tempat zikir diselenggarakan di mesjid dan di langgar, dan pada kesempatan-kesempatan khusus diselenggarakan malam zikiran. Zikir, salawat, takbiran dan arak-arakan menjadi bagian penting dari kehidupan agama, yang menggelorakan semangat keagamaan rakyat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jumlah jemaah di mesjid-mesjid meningkat dengan sangat. Sesungguhnya, dalam waktu singkat setelah Haji Abdul Karim memulai kunjungannya dari satu tempat ke tempat lain untuk berkhotbah, kebangkitan kembali agama sudah berlangsung dengan penuh semangat di Banten.

Di dalam iklim kerohanian seperti itu, maka sangat wajarlah apabila orang seperti Haji Abdul Karim sangat dihormati. Menurut anggapan umum, ia adalah seorang *Wali Allah* yang telah dianugerahi *barakat* dan oleh karena itu seorang keramat. Di kemudian hari ia lebih dikenal sebagai Kiyai Agung. [8] Di antara murid-muridnya yang terkemuka dapat disebutkan Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, Haji Abubakar dari Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir dan Haji Marjuki dari Tanara; mereka semua memainkan peranan panting dalam pemberontakan yang tidak lama lagi akan meletus. Mereka merupakan pribadi-pribadi yang berkarisma, oleh karena mereka dekat kepada sumber yang memancarkan karisma, yakni *Wali Allah*. Sebagai orang-orang yang memiliki karisma, mereka menerima hadiah-hadiah kehormatan, sokongan dan pelbagai macam sumbangan sukarela.[9]

Yang jauh lebih penting dari keuntungan materi yang mengalir terus adalah rasa hormat dan kecintaan rakyat yang mendalam terhadap pemimpin-pemimpin itu. Sebagai akibatnya, maka kaum elite agama, para haji dan kiyai mempunyai prestise sosial yang sangat besar, terutama di

daerah-daerah pedesaan. Di sana ukuran prestise yang berdasarkan agama sangat berbeda dengan yang berlaku di Barat dan di kalangan priyayi. Konsekuensi politik dari ketimpangan itu adalah bahwa di mata rakyat, kiyai atau haji lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pamongpraja pribumi, sehingga menurut pendapat mereka yang disebut pertama tidak saja harus lebih dihormati akan tetapi juga merupakan orang-orang yang harus ditaati lebih dulu. Tidak mengherankan bahwa kiyai atau haji dapat dengan mudah mengerahkan orang untuk segala macam tujuan. Pengaruh para guru menjadi demikian dominan sehingga pamongpraja pribumi harus mengandalkan kepada perantaraan mereka dalam soal-soal seperti memungut pajak atau mengerahkan tenaga kerja untuk pekerjaan umum.[10]

Keadaan itu menjadi satu ancaman yang cukup mencemaskan bagi pemerintah kolonial ketika rasa hormat yang semakin besar terhadap kiyai atau haji dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat keagamaan rakyat. Sanksi-sanksi dikenakan terhadap orang-orang yang menunjukkan sikap masa bodoh dalam soal-soal agama. Suatu hal yang inheren dalam semangat keagamaan yang berkobar-kobar itu adalah bertambah besarnya kebencian terhadap orang-orang Eropa yang dianggap sebagai orang-orang kafir. Malahan, pemusnahan kekuasaan asing menjadi tujuan pokok gerakan keagamaan itu.[11] Sementara itu, khotbah-khotbah, janji-janji dan ramalan-ramalan Haji Abdul Karim terus membakar semangat rakyat. Jelaslah bahwa ramalan-ramalannya tentang "Hari Kiamat", kedatangan Mahdi, dan tentang jihad menimbulkan gelora keagamaan yang umum; semangat jihad dihidupkan oleh kesadaran yang kuat bahwa negeri mereka harus dianggap sebagai sebuah dar al-Islam yang untuk sementara diperintah oleh orang-orang asing, dan yang pada satu ketika kelak harus direbut kembali. Tujuan akhir yang hendak dicapai oleh Kiyai Agung adalah mendirikan sebuah negara Islam.[12] Sementara kepopulerannya meningkat terus, murid-muridnya dengan tak sabar lagi menantikan seruannya untuk berontak. Rakyat seolah-olah dilanda rasa rindu kepadanya dan ingin bertemu dengannya. Seperti diceritakan oleh Snouck Hurgronje

> . . . setiap malam beratus-ratus orang yang ingin diselamatkan, berduyun-duyun ke tempat tinggalnya, untuk belajar zikir dari dia, untuk mencium tangannya dan untuk menanyakan apakah saatnya sudah hampir tiba, dan untuk berapa lama lagi pemerintah Kafir masih akan berkuasa?"[13]

Akan tetapi apabila persoalannya sudah sampai kepada tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan ramalan-ramalannya itu, Haji Abdul Karim selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang samar-samar kepada pengikut-pengikutnya yang setia, tentang soal-soal yang sangat penting seperti pemulihan kesultanan atau saat dimulainya jihad. Ia tidak mau memberi jawaban-jawaban yang pasti dan hanya mengemukakan bahwa menurut pendapatnya saatnya belum tiba untuk melancarkan Perang Sabil. Janji khidmat yang ia berikan dekat sebelum keberangkatannya ke Mekah telah menghidupkan harapan pengikut-pengikutnya bahwa tujuan mereka akhirnya akan dapat tercapai. Seperti yang akan kita lihat nanti, dampak harapan itu terhadap murid-murid Haji Abdul Karim nampak dengan nyata dalam kegiatan-kegiatan para pemimpin pemberontak.[14] Tidaklah berlebih-lebihan untuk mengatakan bahwa bagi pemimpin-pemimpin gerakan yang menggantikan Haji Abdul Karim, jalan sudah diratakan bagi pelaksanaan tugas mereka menebarkan benih-benih pemberontakan di kalangan penduduk.

Kepopuleran Haji Abdul Karim memanifestasikan dirinya berulang kali. Bagaimana mendalamnya rasa hormat rakyat terhadap dirinya ditunjukkan dengan jelas ketika dilangsungkan pesta pernikahan anaknya yang perempuan. Kiyai-kiyai terkemuka dari mana-mana - bukan hanya dari Banten, akan tetapi juga dari Batavia dan Priangan - berdatangan untuk menghadiri pesta yang melimpah ruah itu. Seluruh desa Lampuyang dihiasi dengan megah sekali; dua rombongan musik dari Batavia ikut memeriahkan pesta pernikahan itu, yang berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Haji Abdul Karim sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya oleh karena pengikut-pengikutnya merasa mendapat kehormatan yang besar apabila mereka diperkenankan menyediakan segala sesuatunya yang diperlukan.[15]

Saat keberangkatan Kiyai Agung pada permulaan tahun 1876 merupakan manifestasi lainnya dari kepopulerannya di daerah itu. Oleh karena ia telah diangkat untuk menggantikan

Khatib Sambas - pemimpin tarekat Kadiriah - ia terpaksa meninggalkan Banten. Sebelum berangkat, ia sekali lagi berkunjung ke daerah-daerah di Banten, dan di mana-mana ia berseru kepada rakyat agar memegang teguh ketentuan-ketentuan agama dan menjauhkan diri dari sikap teledor dalam ibadah. Beberapa kiyai dan haji terkemuka dipilih untuk memperhatikan kesejahteraan tarekat Kadiriah. Haji Abdul Karim juga minta diri dari pejabat-pejabat pamongpraja yang terkemuka, dan minta bantuan mereka bagi tujuan suci yang sedang diperjuangkan oleh para kiyai di Banten, yakni regenerasi kehidupan keagamaan rakyat. la juga berseru kepada mereka agar selalu minta nasihat para kiyai mengenai soal-soal keagamaan. Kepada murid-muridnya yang paling dekat ia memberitahukan bahwa ia tidak bermaksud kembali ke Banten selama daerah itu masih terbelenggu di bawah dominasi asing. Hanya di atas bumi Islam yang murni ia akan menginjakkan kakinya lagi.[16]

Kabar besar tentang akan berangkatnya Kiyai Agung telah menimbulkan kegemparan yang luarbiasa di kalangan penduduk, terutama di kalangan marid-muridnya. Mereka berduyun-duyun menuju desa tempat tinggalnya untuk melihatnya untuk kali terakhir. Mereka sibuk mempersiapkan acara selamat jalan yang khidmat di sepanjang jalan yang akan dilaluinya menuju Batavia. Keberangkatan Haji Abdul Karim sungguh-sungguh merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Sebagian besar rakyat Banten Utara bergerak; sejumlah besar kiyai, murid-murid mereka dan pengikut-pengikut mereka, semuanya ingin sekali mengucapkan selamat jalan kepada "orang suci" mereka. Kegemparan itu menunjukkan bagaimana keramatnya ia di mata rakyat. Tumpleknya rakyat secara besar-besaran itu telah menimbulkan rasa takut di kalangan pemerintah, yang memperkirakan bahwa gerakan semacam ini hanya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan saja. Untuk mencegah kemsuhan-kerusuhan, Residen Banten minta kepada Kiyai Agung untuk mengubah rute perjalanannya ke Batavia. Tadinya direncanakan bahwa ia akan singgah sebentar di beberapa tempat di distrik Tangerang, namun sekarang diputuskan bahwa ia akan menumpang kapal langsung menuju Batavia.[17]

Pada hari keberangkatannya, hari Senin tanggal 13 Februari 1876, Haji Abdul Karim meninggalkan Tanara, disertai oleh sepuluh orang anggota keluarganya, enam orang yang bertindak sebagai pengawal selama perjalanan, dan tiga puluh atau empat puluh orang yang akan menyertai kiyai itu sampai ke Batavia. Menurut perkiraan pejabat-pejabat setempat, sekitar tiga ratus orang telah datang untuk melepas keberangkatan kiyai itu di Tanara.[18] Menurut laporan, mereka berlaku tertib dan menunjukkan sikap yang baik. Sementara itu tersiar desas-desus bahwa sekitar 1500 atau 2000 orang haji dan santri dari Banten dan Batavia telah berkumpul di Tanara.[19] Banyak haji dari distrik Tangerang dan dari Bogor telah berangkat menuju Karawaci -1,5 *paal* dari Tangerang - yang merupakan tempat berkumpul utama bagi mereka yang ingin menyampaikan selamat jalan kepada Haji Abdul Karim. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh terkemuka seperti para kiyai dari Ciasa dan Pontang, Kiyai Munira dari Campea, dan Kiyai Haji Imbron (sic) dari Tigaraksa.[20] Selain itu, suatu pertemuan besar akan diadakan di rumah Raden Kencana, janda Tumenggung Karawaci dan ahli waris perkebunan swasta Kali Pasir. Selain sejumlah anggota kerabatnya, seperti Raden Gajali dan Raden Hamja, akan hadir pula banyak orang yang fanatik dalam soal agama dan sejumlah orang yang di kalangan pemerintah dikenal sebagai pembangkang. Di antara yang disebut belakangan terdapat Raden Mega yang telah dipecat sebagai juru sita pada pengadilan negeri di Tangerang, Idris, dan K. Endan seorang mantri cacar yang mengaku sebagai keturunan sultan Banten. Penahanan atas diri Raden Mega dimaksudkan sebagai tindakan preventif, yang menyebabkan orang-orang lainnya tidak muncul.[21] Sesungguhnya pejabat-pejabat sudah siap siaga dan memperkirakan bahwa orang-orang pembangkang mungkin akan memanfaatkan gerakan ini dengan jalan menghasut rakyat agar memberontak terhadap pemerintah. Akan tetapi tindakan-tindakan pengamanan yang telah diambil oleh pihak berwajib tidak dapat mencegah Haji Abdul Karim mendapat penghormatan yang sangat meriah, oleh karena murid-muridnya berduyun-duyun bertolak dari desa-desa pantai seperti Pasilian dan Mauk, dengan menggunakan perahu untuk menyatakan selamat jalan kepadanya.[22]

KIYAI HAJI TUBAGUS ISMAIL

Beberapa tahun berlalu sebelum tampil seorang pemimpin baru. Baru tahun 1883 kaum pemberontak gesit kembali. Dengan kedatangan Kiyai Haji Tubagus Ismail, seorang anggota tarekat Kadiriah dan murid Haji Abdul Karim, gerakan pemberontakan memperoleh kembali sebagian dari kekuatannya yang lama. Seperti terlihat dari namanya, ia termasuk kaum bangsawan Banten, yang telah kehilangan semua pengaruh politiknya namun masih mempunyai prestise sosial di kalangan penduduk. la telah beberapa kali naik haji, dan perjalanan-perjalanannya ke Mekah itu telah menambah rasa permusuhannya terhadap penguasa-penguasa kafir sementara gagasan untuk menghasut rakyat agar memberontak melawan mereka telah menjadi matang. pada perjalanan naik hajinya yang paling akhir ia menerangkan kepada rekan-rekan seperjalanannya bahwa menurut para ulama di Mekah, Banten akan mempunyai rajanya sendiri tidak lama setelah pohon-pohon johar ditanam di pinggir-pinggir jalan.[23] Sekembalinya di desa asalnya, Gulacir, ia mendirikan sebuah pesantren dan sebuah cabang tarekat Kadiriah. Dengan demikian ia dapat menaikkan prestisenya dan mempunyai pengikut yang banyak. Ada beberapa hal lain mengapa kepemimpinannya semakin diakui oleh orang-orang Banten; selain berasal dari keturunan bangsawan, ia juga dikenal sebagai cucu Tubagus Urip, yang telah dianggap sebagai Wali Allah.[24] Kiyai Haji Tubagus Ismail sendiri dianggap sebagai seorang calon Wali Allah. Pertanda-pertanda bahwa ia akan menjadi orang suci sudah kelihatan: ia tidak mencukur rambutnya seperti lazimnya seorang haji; dalam jamuan-jamuan ia hampir tak mau makan apa-apa. Dengan cara itu ia menarik perhatian umum. Baik pemujaan terhadap Wali Allah maupun hubungan antara guru dan murid cenderung untuk memungkinkan seseorang memperoleh pengikut-pengikut yang setia di kalangan rakyat. Setelah menarik perhatian terhadap kepribadiannya, Kiyai Haji Tubagus Ismail mulai berpropaganda untuk gerakan pemberontakan melawan kekuasaan orang-orang kafir. Sejak permulaan kampanyenya, banyak kiyai yang terkenal sudah menyetujui gagasan-gagasannya dan menyatakan bersedia mendukung tugas sucinya : Haji Wasid dari Beji, Haji Abubakar dari Pontang, Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Iskak dari Saneja, Haji Usman dari Tunggak, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, dan Haji Mohamad Asik dari Bendung, semuanya adalah kiyai-kiyai terkemuka yang menyatakan dukungan kepada gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Kiyai Haji Tubagus Ismail.[25] Sesungguhnya, masyarakat Banten sudah menjadi tempat persemaian benih pemberontakan, akan tetapi masih diperlukan waktu beberapa tahun lagi sebelum api pemberontakan dapat dinyalakan.

PEMATANGAN GAGASAN PEMBERONTAKAN

Sudah sejak tahun 1884 gagasan mengenai pemberontakan sudah menjadi matang, dan pemimpin-pemimpinnya sudah tidak sabar lagi untuk mulai bertindak. Dalam satu pertemuan di rumah Haji Wasid di Beji diputuskan untuk mencari pengikut di kalangan para murid.[26]

Kurun waktu antara pertemuan itu dan saat meletusnya pemberontakan pastilah penuh dengan kegiatan yang tak henti-hentinya, khususnya bagi tarekat. Bagi setiap orang yang membaca catatan-catatannya sekarang pasti akan cukup jelas bahwa tahun-tahun itu telah digunakan tidak hanya untuk membangun organisasi komplotan, akan tetapi juga untuk menyusun rencana-rencana pemberontakan. Pertemuan-pertemuan diadakan di pelbagai tempat yang dihadiri oleh bagian terbesar pemimpin-pemimpin pemberontakan setempat. Guru-guru tarekat ditugaskan untuk menyebarkan gagasan itu dan mencari pengikut. Komplotan itu dilakukan pada saat yang oleh beberapa orang di antara mereka dianggap paling baik untuk berhasil. Pejabat-pejabat Eropa merasa cemas melihat kegiatan yang sangat meningkat dalam kehidupan agama rakyat, akan tetapi mereka ditenangkan oleh pejabat-pejabat Banten yang tidak melihat hal-hal yang membahayakan dalam manifestasi-manifestasi keagamaan itu.[27] Yang nampaknya aneh dan luar biasa bagi pejabat-pejabat Eropah itu dianggap sebagai hal yang wajar oleh pejabat-pejabat Banten. Umpamanya, menurut pejabat-pejabat Banten, adalah wajar sekali jika rakyat dengan penuh semangat menggunakan mesjid-mesjid yang telah dipugar atau baru selesai dibangun. Di kemudian hari diketahui bahwa pertemuan-pertemuan

yang paling penting di antara anggota-anggota komplotan menggunakan kedok pesta, umpamanya pesta perkawinan, atau pesta sunatan. Pertemuan-pertemuan yang lebih kecil menggunakan kedok pertemuan zikir. Pemberontak-pemberontak begitu pandai merahasiakan rencana-rencana komplotan mereka sehingga selama bertahun-tahun pemerintah kolonial tidak dapat menemukan fakta-fakta yang bisa dijadikan alasan untuk menangkap mereka. Sementata itu semangat pemberontakan sudah meliputi masyarakat Banten.

HAJI MARJUKI

Dengan kedatangan Haji Marjuki dalam bulan Februari tahun 1887, gerakan itu mencapai satu tahap baru. Oleh karena ia telah memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan itu, maka ada baiknya untuk mengemukakan beberapa aspek penting dari riwayat hidupnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komplotan pemberontakan di Banten. Seperti dikatakan oleh Snouck Hurgronje, Haji Marjuki merupakan orang yang paling sering pulang ke tanah air di antara para alim ulama di Mekah.[28] Dalam tahun 1858 ia untuk pertama kalinya pergi ke Mekah. Menurut daftar-daftar jemaah haji, ia kembali ke Mekah dalam tahun-tahun 1867, 1871, 1876 dan 1888.[29] Juga diketahui bahwa Haji Marjuki tinggal di Banten, di desa asalnya Tanara, antara tahun 1874 dan 1876, dan dari bulan Maret 1887 sampai bulan Juni 1888. Di dalam periode yang disebut belakangan, ia sudah mempunyai reputasi yang mapan sebagai guru agama, dan kemasyhuran yang sangat menambah prestise dan pengaruhnya di mata rekan-rekannya sesama haji di Banten. Selain itu, ia diangkat ke dalam kedudukan yang didambakan orang, yakni sebagai salah seorang pengikut Haji Abdul Karim yang paling setia dan paling disenangi. Tidak mengherankan jika Haji Wasid dan Kiyai Haji Tubagus Ismail menganggapnya sebagai seorang sekutu yang sangat kuat dan mereka memintanya dengan sangat agar ikut dalam gerakan pemberontakan. Para pendukung menduga bahwa kedatangannya yang paling akhir mungkin berhubungan langsung dengan pemberontakan yang akan segera dilancarkan. Menurut dugaan mereka, kedatangannya itu mungkin atas permintaan Kiyai Haji Tubagus Ismail, sahabat karibnya.[30]

Suatu ketika dalam bulan Februari 1887 Haji Marjuki tiba di Batavia. Oleh karena ia tidak memiliki paspor ia didenda dua puluh lima gulden.[31] la lalu menetap di desa kelahirannya, Tanara, dan bekerja sebagai guru agama. la juga menjual tasbih, kitab Al-Quran, jimat, dan benda-benda keagamaan lainnya yang ia bawa dari Mekah. Tidak lama kemudian ia mulai mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah di Banten, Tangerang, Batavia dan Bogor, dan di tempat-tempat itu ia mempropagandakan gagasan tentang jihad. Oleh karena ia bertindak atas perintah Haji Abdul Karim, propagandanya dengan cepat diterima oleh umum. Tidak lama setelah kunjungan-kunjungannya itu, nampak adanya semangat keagamaan yang meningkat. Mesjid-mesjid penuh dengan orang-orang yang melakukan ibadah, jumlah jemaah pada hari-hari Jumat meningkat dengan tajam, pendek kata, ketaatan dan kesalehan diperlihatkan secara menyolok, tidak hanya oleh kaum laki-laki, akan tetapi juga oleh kaum wanita dan anak-anak. Dilaporkan bahwa di Tanara, pejabat-pejabat distrik, atas permintaan para kiyai, ikut menyerukan - jika tidak memaksa - kepada rakyat agar menunaikan ibadah mereka di mesjid dan menghadiri upacara-upacara khataman.[32] Seperti telah dikemukakan di atas, antusiasme rakyat menggelora dan semangat keagamaan dibakar oleh ramalan-ramalan. Menjual jimat menjadi satu usaha besar dan sangat menguntungkan.[33] Dengan cara ini, penduduk secara berangsur.angsur dipersiapkan untuk Perang Suci.

Haji Marjuki melanjutkan propagandanya tentang jihad dengan jalan mengunjungi para kiyai tarekat Kadiriah di Tangerang dan Batavia, termasuk Haji Kasiman dari Tegalkunir dan Haji Camang dari Pakojan. Karena mereka menaruh simpati mereka menjanjikan dukungan yang kuat; mereka siap mengirimkan murid-murid mereka sebagai sukarelawan ke Banten. Dalam usaha mempropagandakan Perang Suci di luar Banten, Haji Marjuki dibantu oleh Haji Wasid, yang juga sangat berhasil meyakinkan para kiyai di pelbagai daerah di Jawa Barat. Kedua haji itu sesungguhnya merupakan jiwa gerakan itu. Pertanyaan yang timbal adalah, siapa di antara mereka yang merupakan pemimpin utama? Atas dasar penyelidikan-penyelidikan mereka,

pejabat-pejabat tertentu di Banten cenderung menganggap Haji Marjuki sebagai orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas gerakan pemberontakan itu. Akan tetapi, keberangkatannya yang mendadak dekat sebelum pemberontakan meletus, kelihatannya tidak sesuai dengan fungsi pemimpin utama. Dalam hubungan ini, pendapat Konsul Belanda di Jeddah sangat membantu untuk menjernihkan persoalannya.[34] Haji Marjuki kembali di Mekah dalam bulan Agustus 1888, dan segera melanjutkan pekerjaannya yang lama sebagai guru nahu (*nahw*) atau tata bahasa Arab, saraf (sarf) atau sintaksis bahasa Arab dan fikih (fiqh). Oleh karena ia terkenal sebagai orang yang pandai, maka murid-murid yang mengikuti kuliah-kuliahnya selalu banyak. la tidak pernah merahasiakan prinsip-prinsip politiknya. Dalam pembicaraan-pembicaraannya dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya seusai memberikan kuliah, tidak ada indikasi sedikit pun bahwa ia seorang penganjur gerakan revolusioner di kalangan umat Islam di Indonesia. Begitu pula ia tidak menghasut murid-muridnya agar memberontak dan mematahkan belenggu penguasa-penguasa Kristen. Ia mengecam keras pemberontakan yang dipimpin oleh Haji Wasid sebagai terlalu pagi dan menimbulkan korban jiwa yang sia-sia saja. Menurut pendapatnya, setiap pemberontakan, untuk dapat berhasil, harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga ia pecah serentak di pelbagai daerah Nusantara; selain itu, kaum pemberontak harus mempunyai uang dan senjata yang cukup. Atas dasar pendapat yang dikemukakan oleh Haji Marjuki ini, menjadi jelaslah mengapa telah timbul perselisihan yang tak dapat diperdamaikan antara dia dan Haji Wasid ketika diputuskan untuk memulai pemberontakan dalam bulan Juli 1888. Untuk melengkapi penjelasan tentang keberangkatannya yang mendadak itu, perlu disebutkan alasan yang telah ia berikan kepada sahabat-sahabatnya : Kepada mereka ia menjelaskan bahwa tangan kanannya yang berpuru tidak memungkinkannya untuk ikut secara aktif dalam perjuangan. Andaikata ia tetap di Banten, ia pasti akan menghadapi dilema : dibunuh oleh serdadu-serdadu Belanda atau tidak berbuat apa-apa dan menghadapi risiko tindakan pembalasan dari Haji Wasid. Hanya ada satu alternatif lagi - kembali ke Mekah. Kenyataan bahwa istri dan anak-anaknya ada di sana merupakan satu alasan kuat lainnya untuk meninggalkan Banten. Akan melampaui lingkup studi ini kiranya, untuk membicarakan soal apakah alasan-alasan itu hanya merupakan dalih yang dibuat-buat untuk meninggalkan medan perjuangan menjelang saat meletusnya pemberontakan, yang tentunya akan merupakan bukti bahwa pada saat-saat terakhir ia hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Juga telah dipertanyakan, apakah seringnya ia pulang ke tanah air didorong oleh perasaan patriotik atau oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan materi dengan menjual benda-benda keagamaan kepada orang-orang di negerinya. Demikianlah tentang kepemimpinan Haji Marjuki dalam gerakan pemberontakan.

HAJI WASID

Haji Marjuki telah gagal menyelesaikan rencana pemberontakannya terhadap penguasa-penguasa kafir, oleh karena ia sangat berbeda pendapat dengan mayoritas pemimpin-pemimpin pemberontak mengenai tanggal dimulainya pemberontakan itu; Haji Wasid mengabdikan dirinya kepada perjuangan untuk tujuan suci itu sampai ia menemui ajalnya yang tragis dalam suatu pertarungan dengan pengejar-pengejarnya. la baru tampil sebagai pemimpin pemberontak beberapa tahun sebelum pemberontakan itu pecah. la cukup lihay untuk menarik keuntungan dari suasana kebangunan agama yang sedang meliputi lingkungannya, dengan jalan mengidentifikasikan urusan-urusan pribadinya dengan kepentingan bersama masyarakatnya. la sangat berpengaruh, tidak hanya dalam kedudukannya sebagai guru agama, tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat. Selain itu, ia dikenal sebagai orang yang suka bertengkar dan gampang marah dengan kecenderungan kepada mistik.[35] Tidaklah mungkin untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kepribadian Haji Wasid oleh karena - seperti sudah dapat diperkirakan - hampir tidak ada hal yang diketahui mengenai riwayat hidupnya sebelum ia melibatkan diri dalam gerakan itu. Yang mempunyai arti khusus adalah kenyataan bahwa ia berasal dari keluarga pemberontak. Ayahnya, Abas, turut dalam pemberontakan Wakhia tahun 1850; bersama-sama dengan Iurah Nasid dari Citangkil ia melarikan diri ke Medang Batu, di mana kedua orang itu minta bantuan Haji Wakhia sendiri.[36] Dapat ditambahkan bahwa ibu Haji

Wasid adalah kemanakan ayah Iurah Nasid, Jin.[37] Satu aspek lainnya dari kepribadiannya dikemukakan oleh penulis laporan tentang pemberontakan itu, yang menyatakan bahwa Kiyai Haji Wasid ketika itu berusia sekitar 45 tahun dan dilahirkan di Grogol; bahwa ia kelihatannya orang yang berada, yang - menurut penulis itu - dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa istrinya tiga.[38] Sampai di mana bakat kepemimpinannya akan jelas dari deskripsi mengenai kegiatan-kegiatan sebagai penggerak dan pengatur pemberontakan.

Catatan-catatan itu menyingkapkan bahwa Haji Wasid dengan penuh semangat ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan propaganda, terutama yang ditujukan kepada para kiyai di luar daerah Banten sendiri. la meluaskan kegiatan-kegiatannya sampai ke Batavia, Bogor, Ciandjur, Bandung dan Cirebon, di mana kiyai-kiyai tarekat Kadiriah sangat terbuka bagi gagasan tentang jihad dan dengan antusias menggabungkan diri ke dalam gerakan itu. Mereka akan mengerahkan sukarelawan dan mengirimkan mereka ke Banten; Kiyai apa dari Dayeuh Kolot berjanji akan pergi ke Banten. Di Cirebon, Haji Wasid berziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang keramat; dengan berbuat demikian, ia melakukan satu tradisi yang sudah tua dan merupakan bagian yang sangat penting dari ritual-ritual yang ada kaitan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan penting yang hendak dilakukan. Setelah bepergian selama kurang lebih dua bulan, ia kembali ke Beji, di mana ia mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Haji Marjuki dan Haji Tubagus Ismail dan memberikan laporan tentang hasil perjalanannya. Mereka memutuskan untuk memberi tahu para kiyai tentang pertemuan yang direncanakan akan diadakan dalam salah satu maleman dalam bulan Puasa (Juni 1887), di mana akan dilaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh orang-orang yang telah mempropagandakan gagasan tentang jihad itu, khususnya Haji Wasid dan Haji Marjuki.[39] Pemimpin-pemimpin pemberontak mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan berkedok maleman, yang pertama kali di rumah Haji Marjuki, yang kedua di rumah Haji Akhmad, sedangkan yang ketiga diadakan di Bendung Lampuyang dengan Haji Asnawi sebagai tuan rumah. Pertemuan-pertemuan dalam bulan Juni 1887 itu terutama membicarakan tentang soal mempropagandakan gagasan tentang jihad dan usaha-usaha yang menyertainya, yakni merekrut pengikut, oleh karena para pemimpin pemberontak tahu benar bahwa pemberontakan hanya akan berhasil apabila mengikut sertakan sebagian besar penduduk yang tersebar di daerah yang luas. Sebaliknya, mereka menghendaki kepastian bahwa semua bawahan mereka akan melaksanakan perintah-perintah mereka. Hasil yang telah dicapai oleh para propagandia sejak pertemuan terakhir pada pertengahan tahun 1886, adalah bahwa propaganda tentang rencana pemberontakan itu telah dapat diperluas sampai kepada kiyai-kiyai tertentu di luar Banten. Ini berarti bahwa gerakan revolusioner itu tidak lagi hanya terbatas pada kalangan kecil murid-murid para pemimpin pemberontak di Banten Utara; satu langkah besar ke arah terlaksananya gagasan mengenai suatu pemberontakan yang umum seperti yang telah dikemukakan oleh Haji Marjuki.[40] Akan tetapi dalam pertemuan itu belum dapat diambil keputusan tentang tanggal dimulainya pemberontakan. Semua orang yang hadir - jumlah mereka lebih besar dari yang sudah-sudah - menyadari bahwa persiapan-persiapan untuk suatu pemberontakan yang terbuka masih jauh dari selesai. Kurun waktu selama kurang lebih satu tahun sebelum pecahnya pemberontakan ditandai oleh kegiatan propaganda yang sangat sibuk, peningkatan kegiatan-kegiatan persiapan dan usaha-usaha memperkokoh barisan. Peranan Haji Wasid semakin menonjol. Dalam hubungan ini, kami akan melanjutkan uraian kami tentang kegiatan-kegiatan Haji Wasid, sebelum memasuki pembahasan yang lebih terperinci tentang persiapan-persiapan umum.

Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa keadaan seperti yang telah dilukiskan di atas mempunyai efek moral terhadap mentalitas dan sikap Haji Wasid. Dalam periode yang lama Haji Wasid terlibat dalam persoalan-persoalan, tertentu yang menghebohkan. Persoalan-persoalan itu menguntungkan baginya oleh karena menyebabkan dia menjadi semakin populer, dan kepribadiannya secara berangsur-angsur menjadi titik pusat gerakan. Sebagai akibatnya, pusat agitasi bergeser dari timur ke barat, artinya, dari Tanara dan sekitamya ke Beji dan sekitarnya. Dalam bulan September 1887 Haji Wasid dipanggil oleh Wedana Kramat Watu untuk diminta keterangannya mengapa ia tidak merawat kebun istrinya yang ketiga di Bojonegoro. Begitu murid-muridnya mengetahui tentang adanya panggilan itu, mereka menyatakan bersedia mengawalnya ke Kramat Watu. Haji Mohamad Anwar, sahabat karib dan orang kepercayaan Haji Wasid, diutus duluan untuk menghadap Wedana.[41] Wedana berjanji tidak akan memanggil

Haji Wasid untuk diperiksa, asal saja kebun yang dimaksud dirawat untuk selanjutnya. Haji Wasid mematuhi persyaratan itu, akan tetapi ia tidak dapat melupakan atau memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Wedana terhadap dirinya itu. Peristiwa ini, dalam kenyataannya telah sangat menaikkan prestisenya di mata pengikut-pengikutnya.[42]

Beberapa bulan setelah peristiwa itu, timbul satu persoalan lain di mana Haji Wasid terlibat secara langsung. Menurut vonis pengadilan negeri pada tariggal 16 November 1887, orang yang bernama Abas terbukti bersalah telah menebang sebatang pohon yang ia ketahui sebagai kepunyaan orang lain. la dihukum 14 hari kerja paksa. Pada tanggal 18 Mei 1888, keputusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena tidak ada bukti. Tidak ada yang merasa lebih senang dengan kejadian itu daripada Haji Wasid. Mengapa? Peristiwa itu tak disangsikan lagi mempunyai arti yang penting, oleh karena seluk-beluknya sangat mempengaruhi jalannya gerakan pemberontakan. Ada hal-hal yang merupakan teka-teki bagi pejabat-pejabat pemerintah pusat. Yang mengherankan adalah bahwa penyelidikan hanya terbatas kepada soal siapa pemilik pohon itu, Abas atau tetangganya, Nyi Armah. Disangsikan apakah Abas benar-benar telah menebang pohon itu. Mengapa Haji Wasid tidak dipanggil untuk memberikan kesaksiannya terhadap pernyataan Abas, dan untuk menyingkapkan bahwa Abas telah menjual pohon itu tidak kepada Samidin melainkan kepada Haji Wasid? Menurut keterangan yang diberikan oleh beberapa saksi, termasuk Riman dan Jamil, Haji Wasid terdapat di antara sejumlah orang - sekitar 25 orang - yang pada hari Senin tanggal 6 bulan Muharam, menebang pohon kepuh kepunyaan Nyi Armah.[43] Bertentangan dengan keterangan itu, Abas mengatakan dalam sidang pengadilan, di hadapan asisten wedana, bahwa ia telah menjual pohon itu kepada Samidin dengan harga empat gulden. Dalam laporannya, Direktur Departemen Dalam Negeri mengemukakan suatu rekonstruksi tentang perkara itu, yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut: pohon kepuh yang dimaksud berada di atas tanah Nyi Armah, akan tetapi di tempat yang berbatasan dengan ladang kepunyaan Abas. Pohon itu dianggap keramat, dan orang-orang datang ke sana untuk memberi sesajen dan memujanya. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Muslim yang ortodoks merasa tersinggung oleh perbuatan syirik itu, dan pada satu hari Haji Wasid dan murid-muridnya, di antaranya terdapat Samidin, menebang pohon tersebut. Asisten Wedana Krapyak telah diberi tahu tentang hal itu oleh Kepala Desa. Satu bulan kemudian Nyi Armah menyampaikan pengaduan kepada Jaksa, yang mempunyai hubungan kerabat dengan Asisten Wedana Krapyak, dan merupakan musuh bebuyutan Haji Wasid. Mudah dimengerti bahwa Haji Wasid menganggap hal itu sebagai satu usaha dari pihak Jaksa agar ia dihukum. la berusaha menghindarinya dengan jalan menyuruh Samidin dan Abas memberikan keterangan bahwa yang disebut belakangan telah menjual pohon itu kepada yang disebut pertama dan tidak kepada Haji Wasid. Haji Wasid malahan tidak mau jadi saksi dalam perkara itu. Ketika dipanggil oleh Jaksa, ia dengan keras menolak untuk memberikan kesaksian. Hal itu memancing ucapan yang menghina dari mulut Jaksa : "Haji macam apa dia?"[44] Adalah wajar sekali bahwa perlakuan kasar itu menimbulkan rasa benci dan dendam kesumat pada diri Haji Wasid. Di samping itu, apa yang dianggap sebagai campur tangan yang kasar oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam urusan agama telah menimbulkan kemarahan yang besar. Keadaan itu dapat dimanfaatkan untuk propaganda anti-pemerintah.

Pemimpin-pemimpin pemberontak jelas mempunyai cara-cara lain yang efektif untuk merusak prestise pejabat-pejabat pemerintah. Dalam hubungan ini, keberhasilan usaha melakukan intimidasi seperti yang disebutkan di atas, dapat dikemukakan sebagai satu contoh yang jelas tentang kekuasaan yang tak tersaingi yang dipunyai para kiyai terhadap rakyat di satu pihak, dan ketidakmampuan pejabat-pejabat pemerintah untuk menguasai situasi di lain pihak. Dilihat dari sudut ini, maka kedua peristiwa di atas mempunyai arti yang sangat penting; peristiwa-peristiwa itu mencerminkan perebutan kekuasaan antara elite agama dan elite sekular, atau antara para kiyai dan/atau haji di satu pihak dan kaum priyayi di lain pihak. Selain itu, peristiwa Abas itu mempunyai pengaiuh yang langsung terhadap waktu dimulainya pemberontakan dan, sampai tingkat tertentu, juga terhadap kesudahannya. Tanggal dimulainya pemberontakan telah dipercepat atas permintaan mendesak dari Haji Wasid, yang merasa takut akan dipanggil lagi untuk menghadap pengadilan dalam hubungannya dengan pemeriksaan yang kedua atas perkara Abas yang menurut rencana akan dilangsungkan dalam permulaan bulan Juli 1888. Haji Wasid mengusulkan agar pemberontakan dimulai pada permulaan bulan

itu. Bagaimana konsekuensi-konsekuensinya akan dibahas nanti. Untuk sementara waktu, pokok pembahasan kita terutama menyangkut kegiatan-kegiatan persiapan para anggota komplotan.

MELUASNYA SEMANGAT REVOLUSIONER DAN BEBERAPA KEGIATAN PERSIAPAN

Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa menurut asumsi penulis ini, memang telah diadakan persiapan-persiapan untuk melakukan pemberontakan itu; bahwa pemimpin-pemimpin pemberontak mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan bahwa persiapan-persiapan itu berlangsung berbulan-bulan lamanya. Pendapat-pendapat mengenai soal kegiatan-kegiatan persiapan itu dengan sendirinya harus tetap berhati-hati. Kami berpegang kepada keterangan-keterangan mengenai persiapan-persiapan rahasia itu seperti yang dikemukakan dalam laporan-laporan resmi - terutama laporan kontrolir di Serang, de Chauvigny de Blot - dan dalam berita-berita acara sidang pengadilan,

Namun demikian perlu diingat bahwa laporan-laporan itu didasarkan atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, yang mungkin memihak dengan pelbagai cara. Kita mengetahui bahwa tak pernah diadakan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tertentu - umpamanya mata-mata pemerintah yang bertindak sebagai saksi - dan bahwa ada yang melakukan sumpah palsu.[45] Penelaahan terhadap keterangan yang diberikan oleh salah seorang saksi - istri salah seorang korban - menyingkapkan bahwa ingatannya keliru dan bahwa kesaksiannya harus dianggap tidak ditopang oleh bukti-bukti.[46] Snouck Hurgronje sangat menyangsikan nilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang tidak bisa dipercaya itu, dan oleh karena itu ia meragukan kebenaran laporan kontrolir tentang perkembangan tahap komplotan yang terakhir, suatu laporan yang rupa-rupanya hanya didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang tidak dapat diandalkan.[47] Selain itu, Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan kontrolir itu mengenai gerakan keagamaan di Banten, meskipun ia mengakui bahwa kontrolir tersebut telah menyingkapkan beberapa fakta yang penting.[48]

Memang sangat sukar untuk memastikan bobot yang harus diberikan kepada penilaian yang tidak baik yang diberikan kepada laporan kontrolir itu, yang merupakan sebuah catatan yang, sepanjang menyangkut data-data faktual yang ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa itu, kami gunakan sebagai bahan utama bagi penuturan kami tentang kegiatan-kegiatan persiapan pemberontakan itu. Oleh karena kaum pemberontak tidak meninggalkan catatan, sedangkan praktis tak seorang pun di antara pemberontak-pemberontak yang dijatuhi hukuman telah memberikan keterangan tentang keadaan yang sebenarnya, maka hampir tak mungkin bagi kami untuk meneliti kebenaran kesaksian-kesaksian yang dikemukakan di dalam catatan-catatan pemerintah.[49] Oleh sebab itu, maka kita harus waspada terhadap pemyataan-pernyataan yang tergesa-gesa bahwa semua orang yang namanya tercantum dalam laporan-laporan resmi atau berita-berita acara pengadilan adalah pelaku-pelaku aktif dalam pemberontakan. Selain itu, oleh karena kasus sumpah palsu telah terjadi lebih dari satu kali, maka tidak semua keterangan dapat dipercaya; namun demikian, meskipun ada kesaksian-kesaksian yang tidak benar, dapat diandaikan bahwa para pemimpin pemberontak telah sering mengadakan pertemuan. Mengenai peristiwa-peristiwa dalam periode persiapan, laporan kontrolir itu tetap menarik oleh karena fakta-fakta yang dikemukakannya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu, cocok satu sama lainnya, dan tidak bertentangan dengan keterangan-keterangan lain yang sudah kami peroleh dari informan-informan lain, umpamanya pejabat-pejabat pamongpraja, orang-orang yang diinterogasi, dan sebagainya.[50] Selain itu, tidak ada bantahan-bantahan yang didasarkan atas data-data yang lebih dapat diandalkan. Tanpa menganggap laporan kontrolir itu sebagai tak dapat dibantah lagi, kami dapat menerima urutan peristiwa yang disajikannya, sebagai kerangka untuk merekonstruksikan kegiatan-kegiatan persiapan para anggota komplotan.

Setelah memberikan penjelasan ini, kami mulai dengan kisah tentang komplotan itu. Dalam

empat bulan terakhir tahun 1887 kegiatan anggota-anggota komplotan sangat meningkat : mereka mengadakan pertemuan-pertemuan, melakukan perjalanan dan mempropagandakan perjuangan mereka di satu pihak, dan melatih murid-murid mereka dalam cara-cara bertempur di lain pihak. Menjelang waktu itu, semangat pemberontakan sudah mencekam anggota-anggota tarekat.

Dari tanggal 2 sampai 5 September 1887 berlangsung pesta perkawinan besar yang diselenggarakan oleh Haji Tubagus Umar, mertua panghulu kepala di Serang, Haji Mohamad Arsad.[51] Yang disebut pertama adalah anak Tubagus Baujaya, mendiang patih Caringin.[52] Ia juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan istri Haji R.A. Prawiranegara, mertua Bupati Serang. Karena hubungannya dengan orang-orang terkemuka itu, maka tidak mengherankan jika Haji Tubagus Umar mempunyai pengaruh yang besar dan sangat terpandang. Selain semua kiyai terkenal di Banten, hadir banyak undangan lainnya dari tempat-tempat yang jauh, seperti dari Tangerang, Batavia, Bogor, Priangan dan malahan dari Ponorogo.[53] Sudah barang tentu gembong-gembong utama dalam komplotan - Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki, dan Haji Wasid - terdapat di antara mereka. Selama pesta yang berlangsung tiga hari itu, mereka mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk membicarakan rencana mereka. Mereka sependapat bahwa gerakan mereka sudah mencapai banyak kemajuan, dan mereka memutuskan untuk memperluas persiapan-persiapan pemberontakan dan mengikutsertakan orang-orang di luar tarekat. Tempat dan tanggal dimulainya pemberontakan harus tetap kabur. Perlu dicatat bahwa rentetan pertemuan yang diadakan selama berlangsungnya pesta perkawinan itu dipimpin oleh Haji Marjuki. Ia tidak lupa menandaskan bahwa sebegitu jauh propaganda mereka di luar Banten belum mencapai hasil yang besar. Oleh karena ia penganjur pemberontakan umum yang meliputi sebagian besar Nusantara, ia menyatakan bersedia untuk mengunjungi daerah-daerah lain di Pulau Jawa untuk mempropagandakan rencana mereka. pada kesempatan itu ia juga menunjuk Haji Mohamad Arsad Tawil sebagai wakilnya. Kiyai-kiyai terkemuka lainnya dari Banten Utara menyatakan persetujuan penuh dengan rencananya dan memberikan dukungan yang hangat kepadanya. Besar sekali kemungkinan bahwa pembicaraan-pembicaraan belum rampung seluruhnya ketika para tamu meninggalkan rumah Haji Tubagus Umar.

Pada tanggal 29 September 1887, kiyai-kiyai Banten mengadakan pertemuan yang kedua dalam tempo kurang dari sebulan di Beji, sebagai tamu Haji Wasid.[54] Kali ini yang pertama-tama dibicarakan adalah masalah mengumpulkan senjata. Para pemimpin itu berpendapat bahwa sebaiknya mereka tidak berusaha mencari senjata api, dengan alasan-alasan sebagai berikut : pertama, mayoritas penduduk belum bisa mempergunakan senjata itu; kedua, mendatangkan senjata api dari luar sukar dilakukan tanpa diketahui oleh pejabat-pejabat pemerintah; ketiga, mereka berpendapat bahwa mereka dapat mengandalkan pada kelewang saja, karena mereka yakin bahwa kemenangan akhir dalam Perang Suci itu ada di pihak mereka.[55]

Kegiatan-kegiatan persiapan pemberontakan selama tiga bulan terakhir tahun 1887 dan pertengahan pertama tahun 1888, ditandai oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) latihan pencak dipergiat; (2) pengumpulan dan pembuatan senjata; (3) propaganda di luar Banten dilanjutkan. Kegiatan-kegiatan lain diteruskan, seperti menghasut rakyat dengan jalan membakar semangat mereka dengan khotbah-khotbah tentang ramalan-ramalan dan ajaran tentang Perang Sabil, dan mendorong mereka untuk memakai jimat dan ikut dalam pertemuan-pertemuan keagamaan. Kegiatan-kegiatan gerakan benar-benar ditingkatkan, dan salah satu buktinya yang nyata adalah seringnya diadakan pertemuan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak : hampir setiap minggu. Sebelum membahas pertemuan-pertemuan itu, kita terlebih dulu akan membicarakan ketiga faktor tersebut di atas.

Pencak merupakan bagian yang penting dari pendidikan di pesantren di masa itu. Sejak bertahun-tahun ia merupakan cabang olahraga yang populer di desa-desa, di mana orang biasanya menyelenggarakan pertandingan-pertandingan pencak di bawah terang bulan. Jenis hiburan rakyat yang kelihatannya tak membahayakan ini tak pernah dan tak akan dicurigai oleh pejabat-pejabat pemerintah. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan orang-orang berlatih dengan kelewang di rumah mereka. Dalam periode itu orang dengan mudah dapat melihat bagaimana pencak dengan cepat menjadi semakin populer. Rupa-rupanya olahraga yang

populer ini digunakan sebagai kedok untuk menutupi kegiatan yang sebenarnya yakni melatih para pengikut dalam ilmu perang.[56]

Mengenai usaha mengumpulkan senjata, dapat dikemukakan bahwa senjata-senjata itu untuk sebagian dibuat oleh para pandai besi setempat, sedangkan sebagian lagi dari persediaan senjata gelap itu diperoleh dari tempat lain, terutama dari Batavia. Seorang yang bernama Haji Abdulsalam dari Bojonegoro ditugaskan untuk membeli senjata di Batavia. Hal itu telah diputuskan dalam sebuah pertemuan para kiyai di rumah Haji Abdulsalam pada suatu hari Senin dalam bulan Oktober 1887.[57] Dalam bulan-bulan berikutnya, Haji Abdulsalam mondar-mandir antara Bojonegoro dan Batavia atau lampung. Sayangnya, informasi mengenai hasil perjalanan-perjalanan itu sedikit sekali, akan tetapi mengenai kegiatan-kegiatannya selama minggu-minggu terakhir sebelum pecahnya pemberontakan terdapat keterangan-keterangan yang lebih jelas. Seperti ternyata dari kesaksian yang diberikan oleh Sangid, Kamim dan Japan, [58] pengangkutan senjata-senjata gelap itu berlangsung terus sampai beberapa hari sebelum dimulainya pemberontakan. Pada tanggal 18 Juni 1888, Haji Abdulsalam pulang dari Batavia; dua hari kemudian ia mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Haji Wasid, Haji Usman, dan Haji Sapiudin, dan ia diberi tahu bahwa Haji Wasid akan memulai pemberontakan itu setelah Lebaran Haji, yakni dalam bulan September 1888.[59] Sekali lagi ia diperintahkan untuk membeli senjata di Batavia, bersama-lama dengan Haji Dulgani. Oleh karena itu, maka pada tanggal 22 Juni ia berangkat ke Batavia, dan sekitar delapan hari kemudian ia kembali ke Bojonegoro dengan membawa sekitar 75 golok. Jumlah sebenarnya semua senjata gelap yang telah ia angkut dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya tidak disingkapkan.

Menurut kesaksian-kesaksian itu, Haji Abdulsalam ditugaskan untuk menyediakan senjata-senjata gelap; ia dibantu oleh Haji Dulgani dan Haji Usman. Mereka mengadakan kontak dengan Haji Camang dari Pakojan, Batavia, yang dengan senang hati menyediakan tempat menginap bagi kiyai-kiyai dari luar Batavia.[60] Haji Abdulsalam sebenarnya bukan orang Banten; ia berasal dari Demak dan sejak bertahun-tahun menetap di Bojonegoro. la dianggap sebagai salah seorang haji yang paling berpengaruh di Bojonegoro dan daerah sekitarnya, antara lain karena ia lebih terpelajar dari kebanyakan orang sedesanya, dan juga karena ia dapat digolongkan sebagai salah seorang kepercayaan Haji Wasid yang terkemuka - jika bukan yang paling terkemuka.[61] Ada dugaan bahwa ia sendiri telah terlibat secara langsung dalam demonstrasi di Kramat Watu seperti yang telah disebutkan di atas, yakni dengan jalan mengumpulkan murid-murid Haji Wasid dan menghasut mereka untuk memberontak.[62]

Kita tidak memperoleh kepastian apakah telah diadakan pertemuan-pertemuan dalam periode antara pertemuan pada hari Senin dalam bulan Oktober 1887 dan pertengahan bulan Februari 1888. Akan tetapi ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dalam periode itu beberapa di antara para pemimpin itu melakukan kegiatan yang cukup sibuk di luar Banten. Dalam bagian akhir tahun 1887 dan pertengahan pertama tahun 1888, Haji Marjuki telah beberapa kali mengunjungi kiyai-kiyai di Tangerang, Bogor, Priangan dan malahan di Ponorogo, [63] sendirian atau disertai kiyai-kiyai lain. Sayang sekali, kita boleh dikatakan tak dapat mengetahui sedikit pun tentang pokok pembicaraan mereka. Pertemuan-pertemuan itu sendiri biasanya diadakan bertepatan dengan acara sedekah, sehingga mereka tidak menarik perhatian pejabat-pejabat yang melakukan pengawasan yang ketat. Perang Sabil yang sedang direncanakan jelas merupakan pokok utama pembicaraan-pembicaraan itu. Salah satu contoh yang baik adalah sedekah yang diselenggarakan di Pasilian (Tangerang), pada suatu hari dalam bulan Mei 1888. Selain Haji Marjuki, hadir pula Haji Wasid, Haji Iskak dan Haji Usman.[64] Ketika kepada Haji Wasid ditanyakan perintah Tuhan yang mana yang paling penting, ia mengatakan kepada hadirin bahwa yang paling penting adalah - menurut kata-katanya sendiri - "Sabil hati atawa Sabil perang".[65] Lalu seorang yang bernama Baung mengemukakan pendapatnya bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan oleh karena rakyat tidak memiliki senjata yang cukup. Dalam bulan itu juga diadakan lagi pertemuan para kiyai di Lontar, di distrik yang sama. Menurut desas-desus, jumlah kiyai yang sudah terdaftar sebagai pengikut pemberontakan yang sedang direncanakan itu ada 19 di Tangerang dan 15 di Bogor.[66] Meskipun di Batavia terdapat anggota-anggota tarekat, gerakan itu tidak mendapat pasaran di sana.[67] Orang-orang seperti Haji Camang dan Haji Abdulmajid dari Kebonjeruk (Manggabesar) diperkirakan bersimpati

dengan banyak pemimpin gerakan itu secara pribadi, akan tetapi tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka terlibat di dalam komplotan itu. Seperti telah dikemukakan, Haji Marjuki juga telah berkunjung ke Ponorogo, di mana atas dorongannya telah diadakan pertemuan-pertemuan di antara para kiyai. Dalam hubungan ini perlu juga diingat bahwa salah seorang istri Haji Marjuki tinggal di daerah itu.[68] Kita tidak perlu berspekulasi tentang motivasi utamanya untuk pergi ke Ponogoro. Bagaimanapun, pengaruh-pengaruh gerakan pemberontakan sudah terasa di sana, sebagaimana dibuktikan oleh kenyataan bahwa kiyai-kiyai dari daerah itu pernah menghadiri salah satu pertemuan di Banten.[69]

ENAM BULAN TERAKHIR TAHAP PERSIAPAN

Mari kita sekarang kembali kepada perkembangan di pusat gerakan itu, di mana kegiatan-kegiatan meningkat dengan sangat selama enam bulan berikutnya. Semangat revolusioner semakin menggelora dari hari ke hari, para kiyai dan murid-murid mereka sudah tidak sabar lagi : mereka berpendapat bahwa saat yang paling baik sudah tiba untuk melancarkan pemberontakan yang pasti akan berhasil. Strategi, taktik dan penentuan waktu pemberontakan harus segera direncanakan. Dengan pertimbangan itu, maka pemimpin-pemimpin gerakan sering mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana aksi yang akan dilancarkan bersama-sama dan secara terkoordinasi. Menurut catatan-catatan, mereka bertemu sekurang-kurangnya tiga kali sebulan sejak pertengahan bulan Februari 1888. Mereka bertemu di rumah kiyai-kiyai terkemuka di Banten Utara; kadang-kadang mereka juga bertemu di Tangerang. Dengan sendirinya, Haji Marjuki dan Haji Wasid, scbagai pcmimpin-pemimpin utama, selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan itu.[70]

Yang sangat penting artinya adalah pertemuan pada tanggal 12 bulan Ruwah, atau 22 April 1888, yang diadakan di rumah Haji Wasid di Beji.[71] Pada kesempatan itu para pemberontak dijamu dengan jamuan yang melimpah. Pada akhir jamuan, ketiga ratus orang tamu berkumpul di mesjid, di mana para kiyai dan murid-murid mereka bersumpah : pertama, bahwa mereka akan ambil bagian dalam Perang Sabil; kedua, bahwa mereka yang melanggar janji akan dianggap sebagai kafir, ketiga, bahwa mereka tidak akan membocorkan rencana mereka kepada pihak luar.[72]

Tidak lama sesudah itu, pada akhir bulan April 1888, para kiyai berkumpul lagi di Kaloran, di mana diputuskan bahwa pemberontakan akan dimulai pada suatu hari dalam bulan Sura (September 1888). Juga diputuskan bahwa Haji Wasid, Haji Iskak, Haji Tubagus Ismail dan kiyai-kiyai lainnya dari distrik Cilegon dan Kramat Watu akan memimpin serangan terhadap Cilegon; Haji Mohamad Asik dan kiyai-kiyai dari Trumbu, bersama-sama dengan Haji Muhidin, Haji Abubakar dan kiyai-kiyai lainnya dari distrik Serang, Ciruas dan Ondar-andir akan menyerang Serang dan menduduki tangsi. Haji Marjuki dan Haji Asnawi akan menyerang distrik Tanara dan Cikandi, sedangkan Haji Sapiudin dan Haji Kasiman akan menduduki Anyer. Setelah setiap kelompok menyelesaikan tugas di daerah yang telah ditetapkan baginya, mereka semua akan terus bergerak ke Serang di mana akan berlangsung pertempuran yang menentukan. Mereka dengan khidmat berjanji akan membunuh semua orang Eropa dan semua pejabat pemerintah. Keputusan-keputusan lain yang telah diambil adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: untuk setiap empat puluh orang akan diangkat seorang pemimpin kelompok; pakaian-pakaian akan dikumpulkan dan dipakai dalam pertempuran; setiap orang yang telah mengucapkan sumpah akan menandatangani pengukuhannya secara tertulis.[73]

Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana gerakan itu dapat dirahasiakan terhadap penduduk Banten dan pejabat-pejabat pemerintah selama berlangsungnya persiapan-persiapan tersebut di atas. Sudah sejak awal tahun 1888 tersiar desas-desus di kalangan penganut-penganut tarekat Kadiriah bahwa sebentar lagi akan pecah Perang Sabil, akan tetapi tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana serta terhadap siapa perang itu akan dilancarkan.[74] Pada akhir bulan Maret 1888, setelah berlangsung pertemuan di Beji dan kurang lebih seratus hari sebelum pecahnya pemberontakan, desas-desus itu semakin gencar di kalangan luas.[75] Yang

mengherankan adalah tidak adanya tanda-tanda bahwa rencana komplotan itu telah bocor dan sampai kepada pejabat-pejabat pemerintah atau mata-mata mereka. Sesudah pemberontakan, didesas-desuskan bahwa banyak pejabat Banten yang terkemuka pasti telah mengetahui apa yang sedang terjadi dan bahwa mereka malahan telah membantu komplotan itu.[76] Akan tetapi kita sudah mendahului jalannya cerita. Dalam pada itu agitasi semakin meningkat dari hari ke hari, dan kepada rakyat diserukan agar mereka mengasah kelewang-kelewang mereka oleh karena sebentar lagi akan terjadi pemberontakan besar, di mana semua pejabat pemerintah harus dibunuh.[77] Para kiyai terus mengadakan pertemuan-pertemuan dan perjalanan-perjalanan selama dua bulan berikutnya, yakni bulan Puasa dan bulan Sawal - atau dari tanggal 11 Mei sampai 9 Juli 1888 - dan kegiatan-kegiatan mereka mencapai puncaknya antara pertengahan bulan Juni dan hari dimulainya pemberontakan. Dilaporkan bahwa pada suatu hari dalam bulan Mei 1888, yakni dalam bulan Puasa, sebuah pertemuan besar diadakan di Kaloran, yang dipimpin oleh Haji Marjuki.[78] Dalam bulan itu juga ia berangkat ke arah timur bersama-sama dengan Haji Tubagus Ismail, dan selama dua minggu mengunjungi pelbagai tempat, di antaranya Bandung.[79] Kira-kira pada waktu orang sedang sibuk mempersiapkan perayaan hari Lebaran, Haji Wasid diberi tahu bahwa ia mungkin akan harus menghadap pengadilan pada permulaan bulan Juli 1888 dalam hubungannya dengan pemeriksaan kedua perkara Abas. Haji Wasid yang menjadi panik ketika mendapat kabar ini, menghendaki agar pemberontakan dimulai lebih cepat dari rencana semula, apa pun yang akan terjadi. Perlu diingat kembali, bahwa sebegitu jauh belum ditetapkan tanggal yang pasti bagi permulaan pemberontakan itu; mengenai hal itu belum dicapai kata sepakat. Haji Marjuki telah mendesak agar pemberontakan tidak dimulai sebelum bulan Sura (September 1888), sementara Haji Wasid berusaha keras untuk membujuk sahabat-sahabatnya supaya mendukung usulnya agar pemberontakan dimulai lebih dini, yakni pertengahan bulan Haji (*Besar*), yakni tanggal 23 Agustus 1888.[80] Penyidangan perkara Abas seolah-olah merupakan sebuah bom politik, yang mendorong Haji Wasid dan kawan-kawannya untuk mengajukan tanggal dimulainya pemberontakan. Mereka merasa takut jangan-jangan pejabat-pejabat pemerintah sudah mengetahui tentang komplotan mereka. Perkembangan ini tidak diduga sebelumnya oleh para pemimpin pemberontak, sehingga mereka harus mengadakan pertemuan lagi untuk mengambil keputusan-keputusan yang menentukan.

Pada tanggal 15 Juni 1888; atau hari kelima bulan Sawal, beberapa pemimpin terkemuka bertemu di rumah Haji Wasid di Beji, di mana mereka terutama membicarakan soal tanggal dimulainya pemberontakan. Selain tuan rumah, hadir pula Haji Tubagus Ismail, Haji Abubakar, Haji Iskak, Haji Usmar dan Haji Marjuki.[81] Mereka mencapai kata sepakat bahwa pemberontakan dimulai pada tanggal 12 Juli, atau hari ketiga Zulkaidah. Semua kiyai yang akan ikut serta akan diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan besar yang menurut rencana akan diadakan pada tanggal 22 Juni atau hari kedua belas bulan Sawal. Pada kesempatan itu, para kiyai akan diyakinkan bahwa keadaan memaksa mereka untuk mengibarkan panji pemberontakan pada hari ketiga bulan Zulkaidah.[82] Haji Marjuki menjelaskan bahwa ia akan terpaksa menentang penetapan tanggal ini, yang dianggapnya terlalu pagi, dan ia menerangkan kepada pemimpin-pemimpin lainnya bahwa ia akan meninggalkan Banten sebelum pecahnya pemberontakan, untuk kembali ke Mekah. Apabila pemberontakan berhasil, maka ia mungkin akan mengundang Syekh (Shaik) Abdul Karim dan Syekh Nawawi untuk datang di Banten dan ikut serta Perang Sabil.[83] Beberapa hari kemudian, ia meninggalkan Banten, disertai oleh istri dan anak-anaknya, dan membawa serta sejumlah besar uang tunai, yang menurut kabar-kabar angin berjumlah sekitar dua puluh ribu gulden.[84] Haji Usman dari Tunggak, mertuanya, dan sekitar lima puluh orang dari Tanara menyertainya ke Batavia.[85] Salah satu perbuatan amalnya yang terakhir sebelum ia bertolak adalah memberkahi pakaian-pakaian putih yang akan dikenakan oleh kaum pemberontak dalam pertempuran. Upacara itu berlangsung di mesjid Tanara.[86]

Sementara itu undangan untuk menghadiri pertemuan besar tersebut telah dikirimkan kepada semua kiyai di Banten; Haji Erab dan Haji Dullah menyampaikan pesan itu kepada kiyai-kiyai di Trumbu, Bendung dan Serang; Haji Saban ditugaskan untuk menyampaikan pesan itu kepada para kiyai di Kapuren, Cigohong, Bunar, Palembangan, Pamarayan, Kolelet dan Baros. Sementara itu, Bahok dari Wanasaba menyampaikan undangan itu kepada kiyai-kiyai di

Bendung, Lampuyang, Tanara, Mandaya, Tegalkunir, Banyawahan dan Kemanisan. Haji Halim diutus ke Cimanuk, sementara Haji Kasiman menuju Anyer. Haji Tubagus Ismail mendapat tugas untuk mengumumkan rencana itu kepada kaum sentana.[87] Semua kiyai itu tidak hanya diberi tahu tentang tanggal dimulainya pemberontakan; mereka juga diminta pendapatnya.

Pada tanggal 12 bulan Sawal, atau 22 Juni 1888 berlangsunglah pertemuan besar itu di Beji. Pertemuan itu dihadiri oleh sekitar enam puluh kiyai dan pengikut-pengikut mereka yang paling dekat; kebanyakan dari mereka berasal dari afdeling Anyer dan afdeling Serang. Tanggal ini sebenarnya telah dipilih karena merupakan hari lahir pendiri tarekat Kadiriah, dan hari itu biasanya dirayakan secara meriah oleh anggota-anggota tarekat itu dengan arak-arakan khusus, takbiran dan zikir. Kali ini perayaan dimulai dengan sebuah slametan besar dan untuk keperluan itu telah disembelih sembilan ekor kambing.[88] Sesudah slametan, para kiyai menuju mesjid raya Beji di mana pertemuan dilangsungkan dan sumpah kesetiaan diucapkan.[89] Tidak bisa diharapkan bahwa tanggal dimulainya pemberontakan seperti yang telah diusulkan dalam pertemuan tanggal 15 Juni akan disetujui dengan suara bulat. oleh karena beberapa orang di antara hadirin tidak setuju jika pemberontakan itu dimulai lebih cepat dari rencana semula. Akan tetapi Haji Wasid dan Haji Iskak berseru dengan sangat agar pemberontakan dimulai dengan segera : setiap penundaan, kata mereka, hanya akan merugikan perjuangan suci itu dan membahayakan anggota-anggota komplotan itu sendiri. Pada akhirnya persoalan itu diputuskan sesuai dengan keinginan Haji Wasid. Perlu ditambahkan bahwa mereka yang tidak setuju hampir semuanya kiyai-kiyai dari afdeling Serang, dan penolakan mereka terhadap usul Haji Wasid itu rupa-rupanya diakibatkan oleh keberangkatan Haji Marjuki yang tiba-tiba. Seperti sudah kita ketahui, Haji Marjuki, sebagai utusan khusus Syekh Abdul Karim, sangat berpengaruh di kalangan pemimpin-pemimpin agama, terutama di bagian timur laut Banten. Akan tetapi Haji Wasid bukan Haji Wasid apabila ia berkecil hati karena adanya perpecahan ini; ia segera sibuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan setiap orang mengenai rencananya. Kemudian dicapailah kata sepakat dengan orang-orang yang menentangnya itu, yang berarti bahwa mereka menyerah kepada bujukan Haji Wasid.

Meskipun Haji Wasid berhasil meyakinkan kawan-kawannya yang ragu-ragu, pikirannya belum tentram. Menurut pendapatnya, tanggal 12 Juli masih terlalu lambat, oleh karena ia sendiri merasa bahwa pemberontakan harus dimulai sesegera mungkin. Sementara itu hari penyidangan perkara Abas semakin dekat; Haji Wasid menantikannya dengan penuh ketegangan. Dengan segala daya upayanya ia mendesak agar pemberontakan cepat-cepat dimulai. Sekembalinya dari afdeling Serang, ia mengadakan pertemuan dengan Haji Abubakar, Haji Sangadeli, dan Haji Mohamad Arsad - panghulu kepala di Serang - untuk membicarakan lagi soal tanggal dimulainya pemberontakan. Haji Wasid dan Haji Abubakar berpendapat bahwa menjelang akhir bulan Sawal semangat pemberontakan akan sudah membakar murid-murid mereka, sehingga ada kemungkinan pejabat-pejabat pemerintah akan mencium baunya dan menggagalkan seluruh rencana pemberontakan. Mereka berdua sebelumnya telah menghitung tanggal yang tepat untuk mempermaklumkan pemberontakan itu menurut ilmu ramal tradisional.[90]

Tanggal yang mereka pilih sebagai tanggal yang tepat adalah hari Senin tanggal 29 bulan Sawal, atau 9 Juli 1888.[91]

Secara kebetulan, tepat pada waktu itu tersiar desas-desus, khususnya di Beji dan daerah sekitarnya, yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat pemerintah telah mengeluarkan larangan berazan dan menyelenggarakan zikir. Dalam sidang pengadilan yang diadakan sekitar setengah tahun kemudian,[92] seorang yang bernama Haji Makid didakwa telah menyiarkan kabar angin yang provokatif itu. Adalah menarik untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Kebun Haji Makid berbatasan dengan kebun asisten residen Cilegon, Gubbels. Ia mempunyai sebuah langgar di mana tetangga-tetangga dan kawan-kawannya biasa melakukan salat dan zikir. Dari menara yang dibuat dari bambu yang tingginya sekitar 10 meter, seorang di antara mereka menyerukan azan lima kali sehari. Perlu diingat kembali, bahwa pada waktu itu istri Gubbels menderita sakit kepala yang kronis, sehingga azan dan salat itu terasa mengganggunya.[93] Suaminya telah minta kepada Haji Makid agar mereka tidak menggunakan suara yang begitu keras dalam melakukan ibadah mereka. Ia juga menyatakan keberatannya terhadap acara-

acara zikir yang biasanya berlangsung sampai larut malam. Patih Raden Penna, yang menyampaikan pecan Asisten Residen itu kepada Haji Makid kabarnya telah mengeluarkan kata-kata menghina "bahwa tidaklah perlu bersembahyang dengan suara yang keras, bukan hanya karena hal itu mengganggu tetangga-tetangga mereka, akan tetapi juga karena Tuhan tidak tuli".[94] Hal-hal lainnya yang menyakitkan hati rakyat, khususnya yang menyangkut agama adalah sebagai berikut : mereka tidak diperbolehkan merayakan perkawinan dan khitanan dengan arak-arakan yang mewah, takbiran, musik gamelan dan pertunjukan tari-tarian.[95] Dengan sendirinya persoalan-persoalan itu sangat menyakitkan hati rakyat di kala semangat keagamaan sedang menggelora; setiap saat orang dapat membakar perasaan benci terhadap orang-orang kafir.

Sementara itu, banyak pejabat tinggi pemerintahan di Banten, baik orang Eropa maupun orang Banten sendiri, sedang tidak berada di tempat tugas mereka, oleh karena mereka sedang menghadiri pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh Bupati Pandeglang dari tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 1888.[96] Anak bupati itu, Raden Padmadiningrat, dinikahkan dengan anak Bupati Serang.[97] Acara-acaranya diatur sampai hal-hal yang sekecil mungkin. Yang menarik perhatian adalah bahwa di antara orang-orang yang menonton permainan-permainan yang diselenggarakan untuk umum selama berlangsungnya pesta itu, terdapat banyak kiyai, seorang di antaranya adalah Haji Sahib, seorang pemuka agama yang terkenal di daerah itu.[98] Orang bertanya-tanya, apakah pesta perkawinan di Pandeglang yang sangat meriah itu tidak membantu mengalihkan perhatian para pejabat dari gejala-gejala kerusuhan yang sebentar lagi akan pecah di daerah mereka masing-masing. Pada waktu itu memang sudah terdapat kegelisahan yang meluas di kalangan penduduk Kabupaten Pandeglang, akibat tersiarnya desas-desus yang menyatakan bahwa seekor naga sedang berkeliaran di daerah itu dan mendatangkan penyakit dan musibah kepada penduduk.[99] Memang tidak mudah untuk memahami arti yang sebenarnya dari desas-desus itu, akan tetapi kiranya sudah cukup jelas bahwa kegelisahan di kalangan penduduk itu sangat membantu usaha mempersiapkan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi pemberontakan di daerah itu.

MENJELANG PEMBERONTAKAN

Minggu yang mendahului pecahnya pemberontakan merupakan minggu yang diliputi kesibukan yang luar biasa, di mana dilangsungkan pertemuan-pertemuan terakhir dan diambil keputusan-keputusan serta persiapan-persiapan terakhir. Laporan tentang kegiatan-kegiatan rahasia kaum pemberontak itu dengan sendirinya tidak mungkin lengkap, oleh karena sebagian besar dari kegiatan-kegiatan itu tidak dicatat. Yang dapat diketahui dari catatan-catatan yang ada hanyalah bahwa persiapan-persiapan yang diperlukan telah dipercepat di bawah tekanan suasana tegang menantikan apa yang bakal terjadi dalam minggu itu. Pada tanggal 30 Juni, Haji Muhidin dari Cipeucang berangkat ke Beji, disertai oleh Mohamad Sadik dan Haji Dullatip dari Daragen, atas permintaan Haji Wasid. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 1 Juli, ia tiba di Beji di mana ia mengadakan pertemuan dengan Haji Wasid, dan pada kesempatan itu ia diangkat sebagai panglima perang.[100] Dalam perjalanan pulang ia mengunjungi Haji Mohamad di Baros lalu menuju Trumbu, di mana pada malam hari Senin tanggal 2 Juli ia mengadakan pembicaraan dengan kiyai-kiyai lain, dan membahas langkah-langkah yang akan diambil sebelum pemberontakan dimulai. Seperti disingkapkan di kemudian hari, dalam pertemuan itu juga telah diputuskan bahwa kiyai-kiyai di Trumbu, bersama-sama dengan Haji Mohamad Sadik dari Bendung dan Haji Muhidin dari Cipeucang akan menyerang Serang.[101]

Salah seorang kiyai yang hadir dalam pertemuan di Trumbu itu adalah Haji Abdurrakhman dari Kapuren (Ciruas). Keesokan harinya, tanggal 3 Juli, ia mengadakan pertemuan di rumahnya di Kapuran, di mana hadir antara lain Tanasi, Madin, Mudaram, Sarip, Ramidin, Muslim, Sahib, Dassim, Haji Lasmana, Jalil, Maung, dan Ming Mulafar, semuanya dari Kapuran; Salli dari Pangalawar, Musa dari Kiawar; Deassen, Radi, Topong dan Ramai dari Ciruas; dan Haji Samud, Haji Saleh dan Samud dari Karantunan.[102] Haji Abdurrakhman memberikan laporan mengenai pertemuan di Trumbu dan menambahkan bahwa ia telah ditugaskan untuk

membunuh wedana Ciruas, asisten residen Kalodran, dan panghulu sub-distrik (kecamatan), setelah ia selesai dengan tugasnya di Serang. la lalu memerintahkan hadirin untuk mengasah golok mereka dan membagi-bagikan jimat dan pakaian putih. Dua hari setelah pertemuan itu, yakni pada tanggal 5 Juli, Haji Abdurrakhman menerima surat dari Haji Wasid, yang isinya diduga ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan persiapan dan tanggal permulaan pemberontakan. Mungkin sekali isi surat itu mempunyai hubungan langsung dengan keberangkatan Haji Abdurrakhman keesokan harinya, hari Jumat tanggal 6 Juli. Kali ini ia melakukan ziarah ke makam keramat di Cigohong.[103] la disertai oleh panghulu desa, Sani. Sekembalinya di Kapuren ia mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa pemberontakan akan dimulai pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888.[104] Kami sengaja menyimpang sedikit dari alur induk ceritanya, untuk sekedar memberikan ilustrasi tentang bagaimana caranya keputusan-keputusan diteruskan kepada pemimpin-pemimpin bawahan dan bagaimana caranya anak buah mereka diberi indoktrinasi dan diperlengkapi agar siap sedia bertindak pada saatnya nanti.

Menjelang akhir minggu, pada malam hari tanggal 5 Juli, sekitar sepuluh orang yang berasal dari Arjawinangun, menemui Haji Tubagus Ismail membawa informasi bahwa pejabat-pejabat Eropa dan pribumi ditunggu kedatangannya di Balagendung pada hari Sabtu tanggal 7 Juli. Dalam perjalanannya ke Anyer, Residen Banten akan singgah di Balagendung dan di Cilegon. Mereka juga melaporkan bahwa Asisten Residen Cilegon, Asisten Kontrolir dan Patih, akan bertemu dengan Residen di Sayag dan menyertainya dalam perjalanan keliling di afdeling Anyer.[105] Orang-orang dari Arjawinangun itu minta dengan sangat kepada Haji Tubagus Ismail agar mengizinkan mereka membunuh pejabat-pejabat tersebut, akan tetapi permintaan mereka itu ditolak dengan alasan bahwa saatnya belum tiba untuk memulai pemberontakan. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli, ketika sedang mengajar murid-muridnya di langgar, Haji Wasid didatangi oleh Hamim dari Arjawinangun yang menyampaikan kabar bahwa pejabat-pejabat Eropa dan pribumi pada saat itu sedang berada di Balagendung. Menurut kata-katanya sendiri, Hamim melihat dalam kenyataan itu "takdir Tuhan bahwa pemberontakan tidak akan dimulai di Cilegon melainkan di Medang Batu", [106] Haji Wasid menjawab bahwa ia tidak dapat memutuskan apa-apa tanpa terlebih lulu mengadakan konsultasi dengan Haji Tubagus Ismail. Rupa-rupanya ia tidak menghendaki pemberontakan dimulai di Medang Batu, sebab ia tidak segera menemui Haji Tubagus Ismail.

Pada hari Sabtu itu juga, kiyai-kiyai terkemuka diundang ke pesta yang diadakan oleh Haji Akhiya di Jombang Wetan. Ini benar-benar merupakan undangan yang sangat dinanti-nantikan, oleh karena dengan kedok pesta mereka akan mendapat kesempatan yang cukup untuk mengadakan pembicaraan terakhir. Hadir dalam musyawarah itu Haji Sangid dari Jaha, Haji Sapiudin dari Leuwibeureum, Haji Madani dari Ciora, Haji Halim dari Cibeber, Haji Mahmud dari Terate Udik, Haji Iskak dari Saneja, Haji Mohamad Arsad - panghulu kepala di Serang - dan Haji Tubagus Kusen - panghulu di Cilegon.[107] Sekitar pukul 11 malam hari Sabtu itu, tanggal 7 Juli, datang seorang kurir dari Nyi Kamsidah -- istri Haji Iskak - untuk memberitahukan bahwa Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ingin bertemu dengan para kiyai yang sedang berpesta itu. Beberapa saat lewat tengah malam, kiyai-kiyai itu meninggalkan rumah Haji Akhiya menuju Saneja, di mana pertemuan dengan kedua pemimpin tertinggi pemberontakan dilangsungkan di rumah Haji Iskak. Selain kiyai-kiyai tersebut di atas, hadir pula banyak pemimpin pemberontak lainnya, seperti Haji Abubakar, Haji Muhidin, Haji Asnawi, Haji Sarman dari Bengkung, dan Haji Akhmad, panghulu Tanara.[108] Yang menarik perhatian adalah tidak hadirnya Haji Mohamad Asik dari Bendung, dan kiyai-kiyai dari Trumbu, yang harus memulai pemberontakan pada hari Senin tanggal 29 bulan Sawal, atau 9 Juli 1888. Keputusan itu akan disampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak hadir dalam pertemuan itu.

Pagi-pagi keesokan hatinya, Haji Wasid dan Haji Ismail menuju Wanasaba, di mana mereka mengadakan pembicaraan dengan sejumlah kiyai dan murid-murid mereka, di antaranya Haji Sangadeli dari Kaloran. Tidak diketahui dengan pasti berapa lama pertemuan itu berlangsung, akan tetapi pada hari itu kedua pemimpin tersebut sudah berada di Gulacir, di rumah Haji Tubagus Ismail. Setelah salat magrib mereka berangkat ke Cibeber, dengan kawalan sejumlah pengikut mereka. Sebuah pertemuan dilangsungkan di mesjid, yang juga dihadiri oleh Haji

Burak, seorang saudara Haji Tubagus Ismail, Haji Abdulgani dari Beji, Kiyai Haji Abdulhalim dari Cibeber dan Noh dari Tubuy.[109] Mereka membicarakan langkah-langkah final yang akan diambil dengan segera.

Sementara itu kerumunan orang di muka mesjid terus bertambah besar; mereka terutama terdiri dari orang-orang yang berasal dari Arjawinangun dan Gulacir.

Pada hari itu juga, kurir-kurir diutus ke pelbagai jurusan. Sesuai dengan keputusan yang telah diambil dalam pertemuan di rumah Haji Iskak, maka Haji Erab diutus ke Haji Mohamad Asik di Bendung, akan tetapi yang disebut belakangan itu mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada pesan yang disampaikan secara lisan itu dan karenanya ia mengutus salah seorang pengikutnya, Haji Elias, ke Haji Wasid untuk mendapat informasi lebih lanjut.[110] Haji Mohamad Arsad dan Haji Abubakar diberi kuasa oleh Haji Wasid untuk menghubungi Haji Mohamad Asik dan menguatkan instruksi-instruksi yang telah disampaikan itu.[111] Setelah menerima pesan tertulis, Haji Mohamad Asik segera memerintahkan kurir-kurirnya untuk mengumpulkan murid-muridnya yang bersenjata dan berpakaian putih.

Dari Beji juga diutus kurir-kurir ke Tanara; Haji Mahmud dan Haji Alpian membawa pesan dari Haji Wasid yang memerintahkan kepada Haji Abdulrajak agar memulai pemberontakan. Akan tetapi yang disebut belakangan itu tidak dapat memanggil orang-orang agar berkumpul dengan membawa senjata, oleh karena tidak seorang pun di sana mau ambil bagian dalam pemberontakan. Kurir-kurir itu mendapat sambutan yang lebih antusias di Tirtayasa, di mana Kiyai Murangi menyatakan siap ikut dalam pemberontakan. Di Bantarjati (Bogor), sebuah pasukan kecil yang terdiri dari empat batas orang sedang menantikan seruan dari Haji Wasid untuk memulai pemberontakan.[112]

Pemimpin-pemimpin tertinggi pemberontakan juga berusaha mengadakan kontak dengan Kiyai Haji Sahib di Cipeundeuy (Pandeglang); Nasaman dan Somali dari Sendanglor diutus untuk menghubunginya, akan tetapi ia sedang tidak ada di rumahnya dan pesan disampaikan kepada menantunya.[113]

Minggu malam itu, Haji Abdulhalim dan Haji Abdulgani berangkat ke Beji lalu ke Tunggak, di mana Haji Abdulgani akan menemui Haji Usman. Haji Abdulgani dan Haji Usman telah diperintahkan untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari bagian timur laut afdeling Anyer pada malam hari itu juga, kemudian bergerak ke Cilegon pagi-pagi sekali keesokan harinya.[114] Perintah serupa dikirimkan kepada Haji Kasiman di Citangkil dan Haji Mahmud di Terate Udik; mereka harus mengerahkan orang-orang dari bagian barat afdeling Anyer.

Sementara itu, sehabis pertemuan di tumah Haji Iskak, banyak kiyai yang kembali ke pesta di rumah Haji Akhiya. Pada hari Minggu itu juga, tanggal 8 Juli, Cilegon menyaksikan sebuah arak-arakan berpakaian putih melalui jalan-jalannya; arak-arakan itu dimulai dari rumah Haji Akhiya dan berakhir di rumah Haji Tubagus Kusen, panghulu Cilegon.[115] Para kiyai dan murid-murid mereka yang ambil bagian dalam arak-arakan itu semuanya mengenakan pakaian putih dan sepotong kain putih diikat di kepala mereka. Takbir dan kasidah dengan iringan rebana menambah semaraknya suasana. Dua kereta penuh dengan pakaian putih merupakan bagian dari arak-arakan itu. Segala sesuatunya kelihatan khidmat.

Kemudian, pada malam harinya, barisan orang-orang yang terus bertambah besar, bersenjata golok dan tombak, dan dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail, bergerak dari Cibeber ke arah Saneja, salah satu tempat pemusatan yang penting, di mana mereka menantikan tanda yang segera akan diberikan untuk menyerang.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Menurut pendapat mereka, pemberontakan itu bukan disebabkan oleh ketidakpuasan yang

umum melainkan oleh soal kecil, lihat Java Bode, 16 Juli 1888; sebuah artikel dalam Soerabaiasch Handelsblad menyebut-nyebut adanya hubungan dengan kegiatan Sakam yang terkenal karena kejahatan-kejahatannya, Lihat De Locomotief, 14 Juli1888; sebuah artikel lainnya menyebut-nyebut sebuah "affaire de femme", lihat De Locomotief, 18 Juli 1888; asumsi bahwa pemberontakan itu ada kaltannya dengan Lampung telah disangkal, lihat *De Loeomotief*, 10, 11 dan 18 Juli 1888; Lihat juga kawat yang dikirimkan oleh komandan tentara di Banten, no. 791, tertanggal 10 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 484.

[2] Seorang penulis anonim dalam Java Bode, 4 Agustus 1888, menganggap pemberontakan itu sebagal perbuatan pembunuh-pembunuh dan brandal-brandal, dan menyatakan pendapatnya bahwa peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan sebab-sebab yang dalam; lihat juga Java Bode, 16 Juli 1888.

[3] Persiapan-persiapan dan rencana-rencana pemberontakan jangan dilihat dengan menggunakan ukuran strategi dan organisasi modern gerakan-gerakan modern, akan tetapi hendaknya dilihat dari segi perencanaan secara terperinci pelbagai langkah dan tindakan yang akan diambil; satu aspek penting dari persiapan-persiapan itu adalah pengkoordinasian pelbagai cabang tarekat Kadiriah di Banten.

[4] Lihat berita acara (Proces Verbaal) perkara terdakwa H. Abdulsalam, PV 9 April 1889, dalam Exh. 7 Juni 1889, no. S 1; juga berita acara perkara terdakwa H. Abdurrakhman dari Kapuren, H. Mohamad Asnawi dari Bendung Lampuyang, H. Muhidin dari Cipeucang, PV 1 Mei 1889, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76; berita acara perkara terdakwa H. Mohamad Arsad Tawil, PV 3 Juni 1889, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 74.

[5] Lihat Snouck Hurgronje, dalam bukunya Mekka (1931), hal. 276; cf surat resmi dari konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797119, dalam Vb. 11 Jan. 1889, no. 9.

[6] Lihat Snouck Hurgronje (1931), hal. 277; cf. surat resmi konsul di Jeddah 26 Nov.1888,no.797/19.

[7] Lihat IG (1891), no. 2, hal. 1771 - 1774. Dalam artikel itu yang ditulis oleh pensiunan Residen van den Bossche, terdapat bantahan bahwa Haji Abdul Karim sekereta dengan residen. Besar kemungkinan bahwa barita itu berasal dari kabar-kabar angin yang beredar di kalangan pengikut-pengikutnya; cf. IG (1891), no. 2, hal. 1139 - 1140.

[8] Selain peristiwa yang disebutkan dalam catatan no. 2, dua fakta lainnya biasanya disebut-sebut sebagai petunjuk tentang kekeramatannya, yakni (1) ia selamat ketika seluruh daerah dilanda banjir air Sungai Cidurian; (2) Setelah H. Abdul Karim dijatuhi hukum denda, residen diganti dan bupati dipensiun; lihat IG (1891), no. 2, hal.1138. Mengenal contoh lain tentang kekeramatan H. Abdul Karim, lihat Snouck Hurgronje (1931), hal. 277

[9] IG (1891), no. 2, hal. 1143. Ditinjau dari sudut pandangan tradisional, sudah sewajarnyalah bila orang-orang tetkemuka menerima hadiah-hadiah pada waktu mereka merayakan perkawinan, khitanan, pemakaman,dan sebagainya; hadiah-hadiah itu dinamakan sumbangan.

[10] IG (1891), no. 2, hal. 1144; dengan minta bantuan para kiyai, pejabat-pejabat pemerintah memberikan pengakuan mereka kepada "imperium in imperio" ini; hal itu menyebabkan orang-orang dari kalangan agama ini mempunyal pandangan yang rendah sekali terhadap otoritas undang-undang. Mengenai bantuan para haji dalam hal pelaksanaan pencacaran, lihat Roorda van Eysinga (1856), hal. 66.

[11] Mengenal pernyataan H. Abdul Karim tentang hal itu, lihat Laporan Kontrolir Serang,19 Mei 1889, no. 16, dalam MR 1889, no. 316.

[12] Ibidem; lihat juga Bab V, hal. 219ff.

[13] Snouck Hurgronje (1931), hal. 277.

[14] Setelah dihalau dari Cilegon, Haji Wasid memutuskan untuk bersembunyi di pegunungan

Banten Selatan, menantikan kembalinya H. Abdul Karim, lihat laporan Kontrolir, 19 Mei 1889, no. 16.

[15] IG (1891), no. 2, hal. 1140; cf. Snouck Hurgronje (1931), hal. 278.

[16] Lihat Surat resmi dari Residen Banten, 15 Okt. 1889, no. 320, dalam MR 1889, no. 743, mengenal pemerintahan "raja ireng" (Raja Hitam); lihat juga Laporan Konuofv Serang, 19 Mei 1889, no. 16, mengenal periode di masa orang-orang Belanda akan diusir dari negeri ini, dan sebuah negara Islam akan didirikan.

[17] Surat resmi dari Residen Batavia, 7 Feb. 1876, L^a E^{II}, dalam MR 1816, no. 112.

[18] Surat resmi dari Residen Batavia, 12 Feb. 1876, L^aE^{VIII} dalam MR 2876, no. 141.

[19] Surat resmi dari Residen Batavia, 9 Feb. 1876, L^a E^{IV}, dalam MR 1876, no. 112.

[20] Surat resni dari Residen Batavia, 7 Feb. 1889, L^a E^{II}.

[21] Surat resmi dari Residen Batavia, 12 Feb. 1889, L^a E^{VII}.

[22] Mengenai pekerjaan H. Abdul Karim di Mekah sesudah perjalanan itu, lihat Snouck Hurgrouje (1931), hal. 278 - 281; lihat juga Surat resmi dari konsul di Jeddah, 26 Nov. 1888, no. 797/19.

[23] Lihat di alas, Bab V, hal. 221.

[24] Lihat P V 3 Jan. 1889, dalam Exh. 23 Feb. 1889, no. 68; Tubagus Urip adalah seorang pemberontak yang sangat dihormati, seorang pahlawan rakyat dan kawan seperjuangan Tubagus Buang, yang melancarkan pemberontakan pada permulaan abad XIX.

[25] IG (1891), no. 2, hal. 1150; cf. Surat resmi dari Residen Banten, 15 Okt. 1889, no. 320. Dari perbandingan antara artikel dalam IG (1891), no.2 hal. 1137 - 1206, dan catatan-catatan pemerintah yang relevan, dapat diambil kesimpulan bahwa penulis artikel tersebut pasti telah menggunakan sumber-sumber yang berasal dari pemerintah. Menurut Snouck Hurgronje, penulis itu bukan orang lain melainkan kontrolir Serang sendiri, de Chauvigny de Blot; lihat catatan Snouck Hurgronje 15 Agustus 1892, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal. 1986 - 1999. Tentang kritiknya terhadap artikel itu, lihat di bawah, hal. 260.

[26] IG (1891), no. 2, hal. 1150. Tahun yang paling tua yang ditemukan di dalam catatan-catatan yang ada, dalam hubungannya dengan petencanaan komplotan itu, adalah tahun 1886, lihat Surat resmi dati Residen Banten 15 Okt.1889,no.320.

[27] Dalam tahun 1886, Jaksa Agung telah mengeluarkan peringatan dalam hubungannya dengan dihasutnya penduduk Banten oleh pemimpin-pemimpin agama, lihat WNI (1888 - 89), hal. 111. Lihat juga artikel-artikel yang terkenal yang ditulis oleh Brunner dalam Java Bode, 4 dan 7 Sept. 1885, mengenai "perang sabil".

[28] Lihat Snouck Hutgtonje (1931), hal. 273, yang juga dikutip oleh konsul di Jeddah dalam surat resminya 4 Sept. 1889, no. 1079, dalam Vb. 8 Okt. 1889,no.48.

[29] Lihat Surat resmi dari Residen Banten, 15 Okt. 1889, no. 320; tidak diketahui dalam tahun betapa Haji Marjuki meninggalkan Mekah. Di dalam daftar jemaah haji tahun 188 ia sudah tercatat dengan nama Haji Marjuki.

[30] Ibidem; lihat juga Surat resmi dari konsul di Jeddah, 4 Sept. 1889, no. 1079, dan Laporan Kontrolir Serang,19 Mei 1889, no. 16, khususnya yang mengenai peranan Haji Marjuki dalam komplotan itu.

[31] Surat resmi dari Residen Banten, 15 Okt.1889, no. 320: ia mestinya telah tiba pada permulaan Februari 1887, oleh karena tiket perjalanannya bernomor 200 dan bertanggal 9 Februari 1887.

[32] Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; khataman berasal dari ata khatam atau katam, yang betarti telah tamat membaca Quran : yang dimaksudkan dengan khataman adalah selamatan yang diadakan apabila seorang murid telah tamat mengaji; lihat Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 1(1924), hal.164, 265.

[33] Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; di dalam laporan ini disebutkan bahwa harga jimat berkisar antara 50 sen dan dua golden 50 sen.

[34] Surat resmi dari konsul di Jeddah, 4 Sept. 1889, no. 1079, yang khusus mengenai H. Marjuki, terutama tentang pandangan-pandangannya mengenai pemberontakan bulan Juli 1888. Tentang sikap H. Marjuki, lihat juga Snouck Hurgronje dalam surat resminya kepada Gubemur Jenderal, 7 Juni 1889, juga dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. 111 (1965), hal. 1080 -1086.

[35] Laporan DDI, hal. 217; mengenai suatu deskripsi tentang penampilan H. Wasid, lihat Extract MJ,19 Juli 1888, dalam MR. 1888, no. 496.

[36] Laporan DDI, hal. 317; mengenai pemberontakan Wakhia, lihat di atas, Bab IV, hal 166 - 171.

[37] Ibidem.

[38] Ibidem.

[39] Lihat IG (1891), no. 2, hal. 1192; yang dimaksudkan dengan maleman adalah perayaan yang diadakan pada tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 bulan Puasa (Ramadan); lihat juga Geertz (1960), hal. 78.

[40] Surat resmi dari konsul di Jeddah, 4 Sept. 1889, no. 1079. Tentang gagasan mengenai suatu pemberontakan umum, lihat di alas, hal. 255.

[41] Mengenai peranan yang dimainkan oleh H. Abdulsalam dari Beji dalam mengerahkan sekitar 300 orang murid untuk mengawal H. Wasid, lihat PV 1 Mei 1889, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76.

[42] Laporan DDI, hal. 204 - 205.

[43] Laporan DDI, hal. 205 - 207.

[44] Laporan DDI, hal. 211.

[45] Catatan Snouck Hurgronje 15 Agustus 1892; lihat juga A. Djajadiningrat (1936), hal. 234.

[46] Snouck Hurgronje dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 426.

[47] Surat resmi dariSnouck Hurgronje kepada GubernurJenderal,7 Juni1889; passim; lihat juga catatannya 15 Agustus 1892, *passim*.

[48] Ibidem; juga dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal. 1993.

[49] Lihat berita acara sidang pengadilan, yang disebutkan dalam Bab VIII di bawah catatan no. 96; mata-mata pemerintah yang membetikan kesaksian tidak diumumkan namanya; lihat keterangan-keterangan mereka dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76. Tentang sulitnya memperoleh informasi dari rakyat, lihat Snouck Hurgronje dalam surat resminya kepada Gubernur Jenderal, 6 Juni 1904, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. Ill (1965), hal. 1959 - 1960.

[50] Lihat Laporan DDI, Appendix D dan H; Appendix H dimasukkan dalam karya itu, lihat Appendix VIII. Mengenai pengakuan yang diberikan oleh para tawanan, Lihat Bab VIII, di bawah catatan no. 120 dan 125.

[51] Tentang peranan H. Mohamad Arsad dalam gerakan pemberontakan tahun 1888 dan bulan Mei 1889 terdapat perbedaan pendapat yang besar; lihat Surat resmi dari Residen Banten, 21 Mei 1889, no. 152, dalam MR 1889, no. 368; lihat juga Surat resmi dari bupati Serang, 15 Mei 1889 no. 7, dalam MR 1889, no. 368. Mengenai tuduhan yang dilancarkan terhadap H. Mohamad Arsad, Chat PV 3 Juru, 1889, dalam Exh. 24 JuB 1889, no. 77. Orang yang

menyerukan agar ia direhabilitasi adalah Snouck Hurgronje sendiri; lihat artikelnya dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 417 - 436. Mengenai pengangkatan Mohamad Arsad sebagai panghulu kepala pada pengadilan di Serang, lihat OIB 25 Agustus 1887, no. 21.

[52] OIB. 5 Maret 1860, no. 12.

[53] IG (1891), no. 2, hal. 1154; cf. Surat resmi dari Kontroler Serang,19 Mei 1889, no. 16. Kawan-kawan terdekat H. Marjuki dan H. Wasid adalah H. Abubakar dari Kaganteran, H. Asnawi dari Bendung Lampuyang, H. Iskak dari Saneja, H. Tubagus Ismail dari Gulacir, H. Mohamad Arsad, panghulu kepala di Serang, H. Mohamad Arsad Tawil dari Tanara, dan H. Akhmad, panghulu Tanara. Kebijaksanaan untuk membuang semua orang yang telah menghadiri pesta itu dengan alasan bahwa kehadiran mereka itu menunjukkan bahwa mereka pasti anggota komplotan, telah dikecam oleh Snouck Hurgronje, Lihat surat resminya kepada Gubernur Jenderal, 7 Juni 1889.

[54] Surat resmi dari Snouck Hurgtonje kepada Gubernur Jendetal, 7 Juni 1889.

[55] IG (1891), no. 2, hal. 1154 - 1155. Keputusan itu tidak perlu bertentangan dengan pernyataan H. Marjuki yang telah disinggung di atas, oleh karena ia hanya menyebutkan seal mengumpulkan senjata - bukan senjata api - sebagai bagian yang esensial dari persiapan pemberontakan; lihat Surat resmi dari konsul di Jeddah, 4 Sept. 1889, no. 1079.

[56] IG (1891), no. 2, hal. 1155; Lihat juga A.Djajadiningrat (1936), hal. 24, di mana ia juga menyebut-nyebut tentang apa yang dinamakan *ujungan*, yakni permainan perkelahian dengan menggunakan tongkat.

[57] Lihat PV 9 Apr. 1889; lihat juga PV 1 Mei 1889; yang hadit adalah H. Wasid, H. Usman, H. Sapiudin dati Leuwibeureum, H. Nasiman dari Kaligandu, H. Alpian dari Dukuhmalang, H. Mohamad Arip dari Bojonegoto dan H. Dulgani dari Beji.

[58] Lihat PV 9 Apt. 1889. Dalam sepucuk surat kepada Residen Banten, H. Abdulsalam menyangkal tuduhan terhadap dirinya dengan memberikan alibi selama periode pemberontakan; lihat surat H. Abdulsalam, tanpa tanggal, dalam Exh. 7 Juni 1889, no. 51.

[59] PV 1 Mei 1888; tentang arti istimewa Lebaran Haji dalam tahun 1888, yang dirayakan sebagai haji akbar, lihat advis Snouck Hurgronje, 7 Sept. 1888, dalam Vb. 11 Sept. 1888, no. 44; cf. Groneman (1891), hal. 68 -69;juga Vtedenbregt, dalam BKI, Vol. CXVIII (1962), hal.147.

[60] PV 1 Mei 1889. Di dalam bagian ini dari berita acara tentang penyidangan perkara tersebut disebut-sebut tentang H. Sapir dari Beji dan H. Jupti dari Cekek (Pandeglang), yang juga menginap di rumah H. Camang

[61] . Lihat catatan kaki pada Proces Verbaal 9 April 1889.

[62] PV 1 Mei 1889; lihat di alas, catatan no. 41

[63] Lihat Lapotan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; surat edaran dari Sektetaris Jenderal, 4 Juni 1889; Surat resmi dari Residen Batavia, 24 Juli 1889, La T4, dalam MR 1889, no. 515; Surat resmi dari Residen Madiun, 20 Sept. 1889, La UI; dalam MR 1889, no. 768. Yang disebut terakhir menyebut-nyebut tentang seorang guna agama bernama Sungeb, yang kemudian juga dikenal sebagai H. Marjuki. la berasal dari Banten, menetap di Blimbing (Blitar)dan setelah pindah dua kali ia kembali ke Banten dalam tahun 1888. Identiftkasi haji ini dengan Haji Marjuki tidak cocok dengan laporan Kontrolir Serang dan laporan konsul di Jeddah. Mengenai teori lain tentang di mana beradanya H. Marjuki setelah pemberontakan di Cilegon, Lihat catatan Henny tentang tarekat Satariah, dalam IG (1921), no. 2, hal. 808 - 830.

[64] Surat resmi Residen Batavia, 24 Juli 1889, La T4; satu pertemuan lainnya dikabarkan telah diadakan dalam bulan itu juga, di dusun Lontar (Serang Dalem), di distrik Blaraja (Tangerang).

[65] Ibidem; Jawaban H. Wasid artinya : "Perang hati atau Petang Sabil".

[66] Ibidem.

[67] Ibidem; lihat juga Bab V, hal. 161; pada waktu itu di Batavia tidak ada kiyai; satu-satunya kiyai, Kiyai Mansur dari Pademangan, di Senen, telah meninggal dunia belum lama berselang. Pemimpin tarekat Naksibandiah adalah H. Abdulmajit, panghulu-kepala pada pengadilan di Batavia, yang tinggal di Kebonjeruk, distrik Manggabesar; seorang anggotanya yang tinggal di Kebonjeruk, distrik Manggabesar; seorang anggotanya yang terkemuka adalah R.M. Prawiradiningrat, jaksa kepala di Batavia. H. Camang berasal dari Banten, tapi sudah bertahun-tahun tinggal di Batavia. Tarekat itu sangat ditentang oleh Sayid Usman dari Jati Petamburan, yang disebut dalam Bab V; lihat Snouck Hurgronje dalam VG, Vol. IV, bagian 1(1924), hal. 71 - 85.

[68] Surat resmi dari Residen Madiun, 20 Sept. 1889, Lihat; cf. Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16. Dalam hal ini kedua dokumen bersesuaian.

[69] Lihat di atas, khususnya tentang pertemuan di rumah H. Umar, hal. 261 -263; akan tetapi tak satu pun nama kiyai atau haji dari Ponorogo tercantum pada daftat haji dalam IG (1891), no. 2, hal. 1156 - 1157.

[70] Ibidem; bandingkan dengan nama-nama yang tercantum dalam Appendix V171.

[71] PV 1 Mei 1889; lihat juga Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16 89. Ibidem. dan IG (1891), no. 2, ha1.1157.

[72] Ibidem; lihat juga PV 3 Juni 1889

[73] PV 1 Mei 1889; Laporan Bupati Serang, tanpa tanggal, dalam Exh. 24 Juli1889,no.77

[74] Laporan Kontrolir Serang,19 Mei 1889, no. 16.

[75] PV 1 Mei 1889.

[76] Catatan-catatan berikut ini menunjukkan sikap ambivalen bupati Serang, Gondokusumo. Laporan Kontrolir Serang, 19, Mei 1889, no. 16; Surat resmi Direktur Departemen Dalam Negeri, 20 Juli 1889, no. 3895, dalam MR 1889, no. 597; cf. catatan Snouck Hurgronje, 15 Agustus 1892. Lihat jugs WNI (1888 - 1889), hal. 110; A. Djajadiningrat (1936), hal. 232 -235; Insulinde, 7 Jan. 1896

[77] Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; Laporan DDI, Appendix H

[78] PV 1 Mei 1889

[79] Ibidem; dengan disertai oleh H. Mohamad Sangadeli, H. Tubagus Ismail rupa-rupanya telah mengunjungi sejumlah kiyai di Tangerang, di daerah sekitar Jakarta, di Bandung dan di Ciandjur

[80] PV 1 Mei 1889; Laporan Kontrolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; juga IG (1891), no. 2, hal. 1158.

[81] lihat juga IG (1891), no. 2, hal. 1159.

[82] Ibidem.

[83] Surat uesmi dari konsul di Jeddah, 4 Sept. 1889, no. 1079; cf. IG (1891), no. 2, hal. 1159.

[84] IG (1891), no. 2, hal. 1159.

[85] Surat dari H. Abdulsalam kepada Residen Banten, tanpa tanggal, dalam Exh. 7 Juni 1889, no. S 1.

[86] IG (1891), no. 2, hal. 1159; mengenai laporan tentang masyarakat Jawah, di mana H. Marjuki mempunyai kedudukan terkemuka, lihat IG (1915), no. 1, hal. 538 - 540.

[87] IG (1891), no. 2, hal. 1159 - 1160.

[88] PV 1 Mei 1889.

[89] Ibidem.

[90] Lihat Geertz (1960), hal. 30 - 35, di mana ia membahas sistem prognostik Jawa; juga van Hien, Vol. I (1935), hat .110 - 118.

[91] Laporan DDI, Appendix D; Laporan Kontrolir Serang,19 Mei 1889, no.16.

[92] PV 6 Des. 1888, dalam Exh. 28 Jan 1889, no. 74; mengenai lokasi rumah H. Makid dan rumah Asisten Residen, lihat gambar peta Cilegon.

[93] Lihat sebuah catatan dari Raden Penna, 6 Des. 1888, dalam Exh. 18 Jan. 1889, no. 74.

[94] Laporan DDI, hal. 202.

[95] Laporan DDI, hal. 161.

[96] Java Bode, 11 luli 1888; WNI (1888 - 1889), hal. 700 - 702; lihat juga A, Dajadiningrat (1936), hal. 33 - 36.

[97] Lihat Appendix III.

[98] WNI (1888 -1889), hal. 700 - 712.

[99] A. Djajadiningrat (1936), hal. 33 - 36.

[100] PV 1 Mei 1889.

[101] Ibidem.

[102] Ibidem.

[103] Lihat kesaksian yang diberikan oleh mata-mata D, dalam Exh. 24 Juni 1889. Makam keramat itu tidak tercantum dalam daftar tempat-tempat keramat di distrik-distrik Kramat Watu, Cilegon dan Anyer; lihat Appendix C dari Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri. Satu tradisi yang sudah tua usianya adalah berziarah ke makam-makam keramat nenek-moyang atau orang-orang keramat atau pahlawan-pahlawan setempat, untuk minta berkah sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. Dalam hal ini, makam itu tidak perlu makam seorang keramat Muslim.

[104] PV 1 Mei 1889; catatan itu juga menyebutkan fakta bahwa H. Mohamad Sangadeli telah menyuruh pulang murid-muridnya pada tanggal 7 Juli, oleh karena akan terjadi kerusuhan hari Senin berikutnya; lihat Surat resmi dari Residen Banten, 2 Mei 1889, no. 124, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76; juga IG (1891), no. 2, hal. 1162.

[105] Laporan DDI, hal. 3 - 4.

[106] laporan DDI, hal. 5

[107] Surat resmi dari Bupati Serang, 6 Mei 1889, dalam MR 1889, no. 368; lihat juga PV 3 Juni 1889.

[108] IG (1891), no. 2, hal. 1161.

[109] Laporan DDI, hal. 7; PV 1 Mei 1889.

[110] Surat resmi dari Residen Banten, 21 Mei 1889, no. 152, dalam MR 1889, no. 368; lihat juga PV I Mei 1889

[111] Surat resmi dari Residen Banten, 21 Mei 1889, no. 152; PV 1 Mei 1889; lihat juga IG (1891), no. 2, hal. 1161 - 1162.

[112] PV 9 April 1889.

[113] Ibidem.

[114] Laporan DDI, hal. 8 - 9.

[115] Surat resmi dari Bupati Serang, 6 Mei 1889; juga Surat resmi dari Residen Banten, 21 Mei 1889, no. 152.

Bab VII

PEMBERONTAKAN DIMULAI

Kita telah melihat bahwa dekat sebelum pemberontakan meletus di Cilegon, Haji Wasid mengadakan kontak yang erat dengan Haji Tubagus Ismail dan pemimpin-pemimpin pemberontak terkemuka lainnya. Mereka pada akhirnya memutuskan bahwa saat untuk bertindak telah tiba, dan bahwa pemberontakan harus dimulai di Cilegon pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888, disusul dengan serangan terhadap Serang. Setelah mengadakan rembukan terakhir dengan Haji Tubagus Ismail dan Haji Iskak di Saneja pada malam hari Minggu menjelang dimulainya pemberontakan itu, Haji Wasid segera berangkat ke arah utara untuk memimpin persiapan-persiapan terakhir di distrik Bojonegoro.

Adegan pembuka tragedi berdarah yang berlangsung selama bulan Juli itu telah direncanakan di desa Saneja tersebut yang berbatasan dengan Cilegon. Sebagai ibukota afdeiing Anyer, Cilegon merupakan tempat tinggal pejabat-pejabat pamongpraja, Eropa dan pribumi, yakni asisten residen, kontrolir muda, patih, wedana, jaksa, asisten wedana, ajun kolektor, kepala penjualan garam dan pejabat-pejabat lainnya dari tingkat bawah birokrasi kolonial.[1]

SERANGAN PERTAMA

Ke desa Saneja itulah Haji Tubagus Ismail memimpin pasukannya pada malam hari Minggu itu, tanggal 8 Juli. la memimpin sejumlah besar partisan, yang terutama berasal dari Arjawinangun, Gulacir - desa kelahiran Haji Tubagus Ismail - dan Cibeber.[2] Diperkuat dengan bala-bantuan dari Saneja dan desa-desa sekitarnya, kaum pemberontak bergerak menuju daerah tempat tinggal pejabat-pejabat di Cilegon. Lalu terjadilah peristiwa pertama yang tercatat dalam pemberontakan itu. Rumah Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen, merupakan sasaran serangan yang pertama. Tidak diketahui dengan pasti, apakah serangan terhadap Dumas itu dilakukan sesuai dengan rencana sebagai permulaan pemberontakan, ataukah merupakan tindakan yang didorong oleh suasana saat itu. Yang jelas saat itu merupakan kesempatan yang paling baik untuk menunjukkan kebencian rakyat dalam satu tindakan bersama. Hal itu akan menjadi lebih jelas jika diingat bahwa Dumas juga bekerja sebagai juru tulis pada pengadilan distrik, satu jabatan yang tidak disenangi dan dibenci di kalangan rakyat. Suatu kebetulan di dalam peristiwa tragis ini adalah bahwa rumah Dumas merupakan rumah pertama yang dilewati kaum pemberontak ketika mereka bergerak dari Saneja menuju Cilegon. Kaum pemberontak tiba di rumah Dumas sekitar pukul 2 dinihari Senin, tanggal 9 Juli [3] mereka membangunkan Dumas sekeluarga dan minta agar ia membuka pintu. Karena ingin mengetahui apa yang terjadi, Dumas membuka pintu; empat orang menyerbu ke dalam sambil berteriak, "Sabil Allah", dan menyerang Dumas dengan kelewang. Di dalam kekacauan yang timbul dan di dalam kegelapan, Dumas berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya, jaksa. Sementara itu, istrinya dan dua anaknya yang paling tua berusaha menyelamatkan diri ke rumah ajun kolektor, Raden Purwadiningrat, dengan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Oleh karena rumah mereka sudah dikepung, mereka tidak dapat lolos tanpa diketahui. Istri Dumas diserang dan mendapat luka pada bahu kanannya, akan tetapi karena ia dikira babu, ia tidak diapa-apakan lagi. Sementara itu, babu yang sebenarnya, Minah, yang menggendang anak Dumas yang paling kecil, dikira istri Dumas. la diperintahkan untuk menyerahkan anak itu; ia tidak saja menolak akan tetapi malahan berusaha sebisa-bisanya untuk melindungi anak itu dengan badannya sendiri terhadap bacokan-bacokan

penyerang-penyerangnya. Namun demikian, anak itu tak urung mendapat luka yang sangat parah, sementara Minah sendiri kena bacokan di beberapa bagian badannya.[4] Sementara itu, kaum pemberontak mengobrak-abrik rumah tersebut dan menghancurkan perabotannya.[5]

Jaksa dan Ajun Kolektor, yang terbangun oleh teriakan minta tolong dari istri Dumas, lari ke luar rumah sambil membawa pedang. Jaksa melihat Dumas, membawanya ke rumahnya, dan menyuruhnya berbaring. Istri Dumas dan anak-anaknya berlindung di rumah Ajun Kolektor. Sementara itu, kaum pemberontak masih terus mencari Dumas; sambil berteriak-teriak mereka menuju rumah Jaksa setelah diberi tahu bahwa ia ada di sana. Tidak lama kemudian rumah Jaksa pun dikepung oleh kaum pemberontak, yang berteriak-teriak memerintahkannya agar menyerahkan Dumas. Oleh karena tidak mendapat jawaban, mereka mulai tidak sabar; mereka memukul-mukul pintu dan menusuk-nusuk dinding bambu dengan tombak. Kelihatannya seolah-olah mereka akan masuk secara paksa, akan tetapi teriakan-teriakan dan seruan-seruan berangsur-angsur menghilang - ternyata gerombolan sedang meninggalkan tempat itu.

Sementara peristiwa itu berlangsung di bagian tenggara Cilegon, sepasukan pemberontak diperintahkan untuk menuju Kepatihan. Sejak semula sudah jelas, bahwa Patih termasuk di antara orang-orang yang hendak dibunuh oleh kaum pemberontak. Bukti nyata mengenai ketidak-populeran Patih di kalangan rakyat pada umumnya dan para kiyai pada khususnya diberikan oleh dua pernyataan anonim mengenai sikapnya yang sinis terhadap soal-soal agama dan mengenai kebijaksanaannya yang keras dalam memberlakukan peraturan-peraturan pemerintah.[6] Setibanya di Kepatihan, kaum pemberontak diberi tahu bahwa Patih tidak ada di rumah karena sedang ke Serang. Kaum pemberontak lalu meninggalkan tempat itu. Di kemudian hari didesas-desuskan bahwa kenyataan Patih tidak berada di kota itu pada saat pemberontakan dimulai nampaknya memberikan petunjuk bahwa ia sudah tahu rakyat membencinya dan bahwa ia menyadari benar-benar ketidaksenangan mereka yang semakin besar.[7]

Kabar tentang serangan itu disampaikan kepada Wedana oleh Johar, seorang opas Jaksa, melalui Nuriman, opas wedana itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Johar, ada rampok yang menyerang rumah Dumas. Karena tidak ada tanggapan samasekali dari Wedana, Nuriman pergi ke penjara untuk minta bantuan penjaga penjara. Dengan disertai oleh dua orang penjaga penjara, ia menuju rumah Dumas; mereka berhadapan dengan gerombolan pemberontak yang mengancam mereka dengan tombak. Ketiga orang merasa bahwa perlawanan akan sia-sia saja dan mereka lari untuk menyelamatkan diri. Dalam keadaan putus asa Nuriman lari menuju rumah jaro Jombang Wetan. Jaro tidak ada di rumah, maka Nuriman cepat-cepat menuju gardu di Pasar Jombang untuk memukul tong-tong sebagai tanda bahaya, namun sia-sia karena tak seorang pun muncul.

Ajun Kolektor membawa istri dan anak-anak Dumas ke Kepatihan, begitu kaum pemberontak meninggalkan tempat mereka sekitar pukul 3 dinihari.[8] Atas permintaan istri Dumas, dikerahkanlah orang-orang untuk mencari anak yang paling kecil; anak itu dan Babu Minah, ditemukan di tengah sawah, dalam keadaan masih hidup akan tetapi dengan luka-luka yang parah. Anak diserahkan kepada ibunya, dan Minah dibawa ke rumahnya. [9]

Menjelang fajar, hari Senin tanggal 9 Juli, Wedana memrakarsai tindakan dan berunding dengan Ajun Kolektor. Mereka memutuskan untuk mengutus kurir ke Anyer dan Serang; kurir yang pertama diperintahkan menghadap Residen untuk melaporkan apa yang telah terjadi malam itu, sedangkan kurir yang kedua diperintahkan mencari dokter. Akan tetapi tidak lama kemudian, kurir yang kedua kembali dan mengatakan kepada Wedana bahwa ia terpaksa kembali karena kuda gerobaknya mogok. Kira-kira pada waktu yang sama, kurir ketiga, yang diutus oleh istri Patih, sudah dalam perjalanan menuju Serang untuk menyampaikan kabar tentang apa yang telah terjadi pada malam hari itu di Cilegon kepada Patih. Sementara itu, Wedana dan Ajun Kolektor tiba di rumah Jaksa untuk mencari Dumas; ketika mendengar suara mereka, Jaksa dan istrinya keluar dari persembunyian mereka. Setelah menceritakan musibah yang telah menimpa dirinya, Dumas menyarankan agar Kamid, seorang pelayannya yang telah dipecat, ditangkap, oleh karena ia mencurigainya telah ikut dalam serangan itu.[10] Kemudian, sementara Wedana dari anak buahnya pergi ke Kampung Baru untuk menangkap Kamid, Jaksa

dan seorang opas, Abusamad, pergi ke rumah Asisten Residen untuk mencari istri Gubbels yang bantuannya diperlukan dengan segera untuk membalut luka-luka Dumas. Ajun Kolektor pulang ke rumahnya untuk salat subuh. Menjelang matahari terbit, istri Gubbels sudah berada di rumah Jaksa, membalut luka-luka Dumas. Pada waktu yang bersamaan, Kamid ditangkap dan dibawa ke rumah Jaksa, di mana ia diminta keterangannya mengenai serangan terhadap rumah Dumas itu.

Ketika Grondhout, kepala pemboran, mendengar kabar tentang peristiwa malam hari itu dari Karman, seorang opas Patih, ia menyuruh babunya, Saunah, mencari dokar agar ia dapat pergi ke Serang. Akan tetapi, Saunah diberi tahu oleh pemilik dokar, bahwa tidak mungkin orang pergi ke Serang, karena jalannya sudah dirintangi dengan kawat-kawat telegrap. Saunah lalu pergi ke Jombang Masjid, di mana ia dapat menyewa sebuah dokar, akan tetapi ketika ia mendengar bahwa kaum pemberontak sedang mendekati Cilegon, ia lari kembali ke majikannya.

SERANGAN UMUM

Memang pada saat itu sepasukan pemberontak di bawah pimpinan Kiyai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Arjawinangun sedang menuju gardu di Pasar Jombang Wetan. Muka mereka untuk sebagian ditutupi kain putih. Dari segala jurusan kaum pemberontak, baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata, berdatangan menuju gardu tersebut.[11] Tidak lama kemudian, sepasukan pemberontak yang besar sekali jumlahnya muncul di jalan dari arah Bojonegoro, dan mereka juga bergerak menuju gardu itu. Sambil menyerukan pekik Sabil Allah mereka bergabung dengan orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Kiyai Haji Tubagus Ismail. Gerombolan yang dari utara dipimpin oleh Haji Wasid, Kiyai Haji Usman dari Tunggak, Haji Abdulgani dari Beji dan Haji Nasiman dari Kaligundu. Orang-orang terus berdatangan sehingga pada akhirnya mencapai jumlah yang besar sekali.

Pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid. Atas perintahnya, sebagian dari kaum pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan semua tahanan, sebagian lagi akan menyerang Kepatihan, dan sebagian lainnya lagi akan bergerak menuju rumah Asisten Residen. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Lurah Jasim, jaro Kajuruan;[12] pasukan kedua dipimpin oleh Haji Abdulgani dari Beji dan Haji Usman dari Arjawinangun, dan pasukan yang terakhir dipimpin oleh Kiyai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Tunggak. Perintah untuk memulai serangan disambut oleh kaum pemberontak yang sudah berkobar-kobar semangatnya dengan teriakan-teriakan Sabil Allah. Pekik perang ini bergemuruh dan bergema dan terdengar jelas di semua kampung di Cilegon dan sekitarnya. Tempat berkumpul pasukan dalam sekejap mata menjadi sepi; hanya Haji Wasid dan sejumlah kecil anak buahnya yang masih tinggal di sana.

Sementara kaum pemberontak berkumpul, pejabat-pejabat pamongpraja dan keluarga mereka berusaha menyelamatkan diri dalam suasana ketakutan. Jaksa dan istrinya bersembunyi di rumah Ajun Kolektor, sementara istri Gubbels, Wedana, dua orang opas - Sadik dan Mian – bersama-sama dengan orang-orang lain berlindung di penjara. Istri-istri Wedana dan anak-anak mereka sudah ada di sana. Sebelum masuk ke dalam penjara, istri Gubbels minta kepada Sadik untuk mern cari anak-anaknya. Oleh karena jalan yang menuju rumah Asisten Residen sudah ditutup oleh kaum pemberontak, maka tidak ada jalan lain bagi Sadik kecuali melarikan diri ke sawah di belakang Kepatihan dan menjauhi Cilegon, kota kecil yang pada hari Senin tanggal 9 Juli menjadi ajang kekerasan berdarah. Kekerasan dan kekacauan berkecamuk sepanjang hari dan dalam waktu yang mengerikan itu hampir semua pejabat terkemuka di Cilegon jatuh sebagai korban senjata kaum pemberontak yang haus darah. Di sini kekuasaan asing benar-benar berhadapan dengan kekuatan pemberontak,

Dalam pertumpahan darah dan penghancuran yang berlangsung, Dumas merupakan korban yang pertama. la jatuh ke tangan Kiyai Haji Tubagus Ismail, Kamidin dan lain-lainnya, di rumah seorang Cina, Tan Keng Hok, dan dibunuh di tempat persembunyiannya.[13] Rupa-rupanya seseorang telah melihat Dumas melarikan diri dari rumah Jaksa dan memasuki rumah orang Cina tersebut. Tidak lama kemudian, sejumlah pemberontak di bawah pimpinan Kiyai Haji

Tubagus Ismail memasuki rumah itu. Tan Keng Hok diancam akan dibunuh, akan tetapi ia berhasil melarikan diri ketika kaum pemberontak sedang menggeledah rumahnya. Ketika ia sedang melarikan diri, ia masih sempat mendengar Dumas melolong kesakitan dan minta ampun. Beberapa tembakan mengakhiri hidupnya; mayatnya diseret keluar dan kemudian ditemukan di pinggir jalan yang menuju Bojonegoro.[14]

Pemberontak di bawah pimpinan Lurah Jasim bergerak menuju rumah Jaksa dan Ajun Kolektor. Mendengar pasukan pemberontak itu mendekat, kaum wanita lari dari persembunyian mereka di rumah Ajun Kolektor; istri Jaksa bersembunyi di sebuah rumah kosong di Kampung Baru, sedangkan istri Ajun Kolektor bersama-sama dengan panghulu pada pengadilan distrik, Mas Haji Kusen, bersembunyi di rumah orang yang bernama Iyas di desa itu juga. Menurut kesaksian istri Jaksa, Nyai Mas Ayu Kamsiah, rumahnya telah dirusak dan sejumlah barang yang sangat berharga telah diangkat.[15] Mas Ayu Rapiah; istri Ajun Kolektor, melaporkan bahwa kaum pemberontak telah menggedor rumahnya dan menghancurkan perabotan; mereka telah mencuri barang-barang seharga kurang-lebih dua ribu lima ratus gulden.[16] Nasib serupa dialami oleh rumah pejabat-pejabat pamongpraja lainnya.

Dari informasi yang diberikan di dalam laporan, Jaksa dan Ajun Kolektor rupa-rupanya telah jatuh ke tangan kaum pemberontak. Oleh karena mereka sangat tidak disenangi oleh rakyat, mereka pun dibunuh. Perlu dikemukakan bahwa di rumah Ajun Kolektor, para penyerang harus berhadapan dengan keberanian anaknya yang laki-laki, Kartadiningrat. Ia tidak mengindahkan perintah kaum pemberontak dan mempertaruhkan jiwanya untuk menyelamatkan rumah orangtuanya. Meskipun dengan kemahirannya dalam ilmu pencak ia berhasil melumpuhkan sejumlah orang yang menyerangnya, lawan yang dihadapinya terlalu banyak dan pada akhirnya ia pun jatuh dikeroyok oleh penyerang-penyerangnya.[17]

Tempat lainnya yang menjadi ajang amukan rakyat pada hari Senin yang bersejarah itu adalah rumah Asisten Residen. Seperti telah dikemukakan di atas, sepasukan pemberontak di bawah pimpinan Kiyai Haji Tubagus Ismail bergerak menuju rumah itu. Begitu Abusamad, seorang opas, melihat kedatangan mereka, ia menyuruh pelayan-pelayan lainnya bersembunyi di salah sebuah kamar di bagian belakang rumah. Ia sendiri berhasil meloloskan diri dengan jalan melompati tembok halaman belakang rumah. Semua personll lainnya di rumah Asisten Residen, yakni dua babu, seorang jongos, istri tukang masak dan istri penjaga kandang kuda, juga dua anak perempuan Gubbels, Elly dan Dora, bersembunyi di sebuah kamar di samping istal. Salah seorang anak mulai menangis, dan suaranya terdengar oleh salah seorang pemberontak yang segera memberitahukan kepada rekan-rekannya. Dalam sekejap mata, jendela dan pintu didobrak. Elly lari ke kebun tapi gadia malang itu segera ditangkap oleh kaum pemberontak dan dibunuh tanpa ampun lagi. Mayatnya kemudian ditemukan dalam keadaan rusak; kepalanya dipecahkan dengan sebuah batu besar. Nasib serupa menimpa saudaranya, Dora. Ia berusaha mengikuti babu-babunya, tapi mendapat bacokan di kakinya dan jatuh. Penyerang-penyerangnya mencincangnya sampai ia mati. Salah seorang yang menyaksikan pembantaian itu adalah Kalpiah, istri juru masak, yang tidak sempat melarikan diri.[18] Kaum pemberontak masih mempunyai rasa kasihan terhadap diriya, dan ia diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri asal mau bersumpah bahwa ia seorang Muslim dan mengucapkan kalimat syahadat.[19] Ia dibebaskan dan melarikan diri ke rumah Juru Tulis Patih, tempat tinggal saudaranya, Kecil, dari Caringin. Bersama-sama mereka melarikan diri ke jurusan Anyer. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Asisten Residen dan kepadanya mereka menceritakan apa yang telah terjadi dengan anak-anak perempuannya.

Satu kekejaman lainnya terjadi pada hari Senin itu, kali ini di rumah di sebelah barat alun-alun, yang didiami oleh Sachet, kepala penjualan di gudang garam. Terlepas dari jabatan yang dipegangnya, kenyataan bahwa ia seorang pejabat Eropa tak disangsikan lagi telah ikut menimbulkan kebencian yang mendorong kaum pemberontak untuk menyerangnya. Dari rumahnya, Bachet dapat melihat kawanan besar pemberontak menyebar ke pelbagal jurusan. Di samping anaknya yang perempuan, Mary, pada saat itu terdapat dua anak kecil lainnya di rumah itu, yakni August Sachet, seorang kemenakan, dan Anna Canter Visscher.[20] Mula-mula ia memutuskan untuk membela diri dengan senjata apinya. Akan tetapi setelah ia melihat bahwa yang dihadapinya adalah sepasukan pemberontak dan menyadari bahwa tidak ada

kemungkinan baginya untuk memberikan perlawanan yang efektif, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu bersama-sama penghuni lainnya. Mereka berhasil bersembunyi di rumah Ramidin di kampung yang terletak di belakang rumah Bachet. Bachet bersembunyi di kolong tempat tidur Ramidin, sementara anak-anak bersembunyi di belakang gorden. Setelah menemukan rumah Bachet dalam keadaan kosong. Kaum pemberontak yang dipimpin oleh Kiyai Haji Usman dari Tunggak melakukan penggeledahan di daerah sekitarnya dan segera mengetahui bahwa orang-orang yang mereka cari sedang bersembunyi di rumah Ramidin. Mereka mendobtak pintu memasuki kamar; Bachet melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan mengacungkan pistolnya ke arah penyerang-penyerangnya. Mereka mundur dan Sachet melepaskan tembakan dua kali; satu tembakan menewaskan Sadik dari Pencek dan tembakan lainnya mengenai kedua mata Kimbu dari Beji. Meskipun dengan pistolnya ia dapat merobohkan beberapa orang penyerangnya, ia pada akhirnya dapat dikalahkan dan dibunuh. Akan tetapi ketiga anak kecil selamat dan untuk beberapa waktu meteka tinggal di rumah Ramidin.[21]

Pada pagi hari itu juga, sebagian dari pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim, bergerak menuju penjara, yang mereka serang dan dobrak pintu-pintunya. Sebelum pintu penjara dapat didobrak, istri Gubbels, Wedana dan Kepala Penjara berhasil meloloskan diri melalui bagian belakang bangunan itu. Dengan menggunakan tangga bambu mereka memanjat tembok dan setelah berada di luar penjara mereka lari menuju Kepatihan dengan menggunakan jalan pintas melalui halaman belakang. Pada waktu yang bersamaan, kaum pemberontak berhasil memasuki penjara dengan paksa dan segera membebaskan semua tahanan. Ketika itu tahanan berjumlah sekitar dua puluh orang; yang paling terkenal di antara mereka adalah orang yang bernama Agus Suradikaria. la rupa-rupanya dihukum penjara karena pelbagai kejahatan, di antaranya melakukan perkosaan dan korupsi. Perlu dicatat bahwa ia telah dipecat dari jabatannya yang terakhir sebagal asisten wedana Merak. Sayang kita tidak dapat menemukan berita acara mengenai pemeriksaan di pengadilan, oleh karena akan menariklah untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran berita-berita - seperti yang dimuat oleh beberapa surat-kabar di masa itu - yang menyatakan bahwa persoalannya bukan sekedar apa yang nampak di permukaan, melainkan menyangkut persaingan antara Agus Suradikaria dan seorang pejabat terkemuka di Banten.[22] Bagaimanapun, tidak disangsikan lagi bahwa Agus Suradikaria tanpa pikir panjang lagi bergabung dengan kaum pemberontak agar ia dapat membalas dendam. Seperti akan kita lihat nanti, setelah dibebaskan ia tidak hanya memainkan peranan yang aktif dalam kerusuhan-kerusuhan, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin dalam pelbagai kesempatan. Meskipun demikian, akan kelirulah untuk memandang dia sebagai penghasut utama pemberontakan, apalagi menganggap pemberontakan itu sebagai ekor pemeriksaan perkaranya di pengadilan.[23] Dua orang, Ardaman dan Mian, jatuh ke tangan pemberontak; yang pertama telah menyertai istri Gubbels dan Wedana ke penjara, dan yang kedua adalah opas Wedana. Mereka diseret dari persembunyian mereka di dalam penjara; mereka tidak dibunuh akan tetapi harus ikut dalam pemberontakan. Kedua orang dibawa ke gardu di Jombang Wetan untuk menghadap Haji Wasid yang di sana telah dinobatkan sebagai "raja".[24] Mereka merasa takut bahwa pada satu ketika mereka akan dibunuh juga, dan tidak lama kemudian mereka berhasil melarikan diri.

Seperti telah dikemukakan di atas, Patih Raden Penna sangat dibenci oleh para haji; dengan sendirinya tempat kediamannya - Kepatihan - menjadi salah satu sasaran utama serangan kaum pemberontak. Yang mengherankan adalah bahwa pada pagi hari Senin itu, Kepatihan itu justru menjadi tempat berlindung utama korban-korban yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan pertama kaum pemberontak. Selain anggota-anggota kerabat dan pelayan-pelayan Patih hadir pula di sana, beberapa saat sebelum tibanya kaum pemberontak : istri Patih, Raden Kenoh; anak perempuannya yang sudah dewasa, Raden Nuni; beberapa anak yang masih muda; ibunya, Nyai Raden Arsian; istri Gubbels, istri Dumas dengan ketiga anaknya, Wedana dan Kepala Penjara. Ketika tiba di Kepatihan, istri Gubbels begitu gugup sehingga ia hampir tak dapat berbicara sepatah kata pun; ia hanya minta dengan sangat agar orang mencari anak-anaknya dan agar diminta bantuan dari Serang. Akan tetapi sudah terlambat; sebelum orang dapat keluar rumah untuk mencari anak-anak itu, Kepatihan sudah dikepung kaum pemberontak. Meskipun semua pelayan Patih bersenjata, para penyerang tidak

mendapat perlawanan. Mereka menyerang sambil berteriak-teriak "Bunuh patih" dan "Biarkan istri dan anak-anaknya".[25] Salah seorang pelayan, Sadiman, tertangkap dan dibunuh. Wedana dan Kepala Penjara juga tertangkap dan diminta mengucapkan syahadat; mereka juga harus bersumpah bahwa mereka akan ikut dalam pemberomtakan. Rumah digeledah, dan pemberontak mengetuk pintu kamar tempat kaum wanita mengunci diri. Istri Patih mengatakan kepada kaum pemberontak bahwa di kamar itu hanya ada wanita dan anak-anak. Kaum pemberontak tidak percaya; mereka memaksa agar pintu dibuka dan mengatakan bahwa wanita dan anak-anak tidak akan diapa-apakan. Raden Kenoh bersumpah bahwa suaminya sedang berobat di Serang. Pintu kemudian dibuka, akan tetapi kaum pemberontak tidak masuk, setelah mereka yakin bahwa di kamar itu tidak ada laki-laki. Setelah itu, kamar yang berhadapan dengan kamar yang pertama diperiksa dengan cara yang serupa. Sebelum penggeledahan dilanjutkan, wanita dan anak-anak diperintahkan untuk meninggalkan gedung itu; kepada mereka dikatakan bahwa tempat itu akan digunakan oleh para kiyai. Mereka melarikan diri dari Kepatihan ke pelbagai jurusan; bagaimana nasib mereka selama hari-hari yang penuh bahaya itu?

Ibu Patih ditangkap oleh seorang haji yang mengancam akan membunuhnya kecuali jika ia mau mengatakan di mana anaknya bersembunyi, la masih mujur, oleh karena tidak lama kemudian ia dibebaskan lagi. la melanjutkan perjalanan menuju Serang, akan tetapi terpaksa berhenti di rumah seorang pandai besi, tidak jauh dari gardu Jombang Wetan, oleh karena sudah kehabisan tenaga. la bersembunyi di sana sampai tibanya pasukan tentara dari Serang.

Sementara itu, Raden Kenoh dan anak-anaknya melarikan diri ke sawah di belakang Kepatihan dan berhasil sampai di Temuputih - sebuah desa di jalan yang menuju Mancak - dan tinggal di rumah orang yang bernama Kasan sampai kurang-lebih pukul 4 sore. Kasan, yang merasa gelisah karena menyembunyikan pelarian-pelarian itu, menyarankan bahwa sebaiknya mereka bersembunyi di tempat yang lebih jauh dari Cilegon. Mereka meneruskan perjalanan sampai di Kubanglesung, tapi *jaro* di situ menolak menerima mereka di rumahnya, oleh karena sudah ada larangan menyediakan tempat bagi kaum pelarian dari Kiyai Mahmud dari Trate Udik. Oleh karena itu mereka lalu tinggal di rumah seorang penduduk biasa.

Mengenai istri Dumas dilaporkan bahwa ia dan anak-anaknya lari ke dapur sebuah rumah kosong di Kampung Baru, dan bersembunyi di situ untuk beberapa lamanya. Istri Gubbels tidak mau ikut dengan mereka dan rupa-rupanya melarikan diri ke arah Serang. la bermaksud mencari dokar; akan tetapi setibanya di Saneja, yang diharapkannya akan dapat menyewa dokar, ia berhadapan dengan Nyai Kamsidah, istri Haji Iskak, yang tidak saja menolak membantunya mencarikan dokar, akan tetapi malahan menyerangnya. Perkelahian sengit berlangsung di antara kedua wanita itu. Ketika Nyai Kamsidah berteriak minta bantuan, dua orang laki-laki muncirl dan menyerang istri Gubbels dengan menyemprotkan sejenis cairan ke matanya. Catatan-catatan yang ada tidak memuat petunjuk tentang apa yang terjadi atas dirinya setelah itu. Hanya dikatakan bahwa mayatnya ditemukan kemudian oleh orang yang bernama Kamad. Mayat itu ditemukan di sebuah tempat di sebelah selatan jalan ke Serang, pada jarak sekitar seperempat paal dari Cilegon.[26] Dalam kesaksiannya, Kamad juga menerangkan bahwa ia telah melihat lima orang berdiri di dekat mayat itu, seorang di antaranya ia kenali sehagai Nyai Kamsidah.

Dalam satu hal tinjauan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam pemberontakan ini mungkin mengecewakan para pembacanya; sedikit sekali, jika ada, dikisahkan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang mempunyai skala "nasional"; yang disajikan hanyalah keterangan-keterangan terperinci tentang kegiatan kaum pemberontak, yang biasanya tidak menjadi perhatian ahli sejarah. Akan tetapi, untuk tujuan kita dan dari sudut pandangan kita, perincian-perincian itu sangat penting artinya karena memperlihatkan cara bekerja organisasi pemberontak. Orang akan keliru jika ia berandai bahwa tinjauan ini hanya akan menghasilkan sebuah daftar panjang yang memuat informasi terperinci dan yang akan membuat pembaca mengangkat bahunya sambil bertanya; "Lalu apa?" Yang penting adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang telah dilukiskan itu akan membantu usaha kita untuk memahami sifat-sifat yang esensial dari gerakan pemberontakan.

PENGEJARAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG MELARIKAN DIRI

Kembali kepada tema pokok cerita ini : pemburuan terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang berlangsung pada tanggal 9 Juli tidak mengendur. Setelah Cilegon diduduki oleh kaum pemberontak, dilancarkan usaha besar-besaran untuk mencari pejabat-pejabat yang berhasil meloloskan diri. Dikabarkan bahwa, setelah mengetahui kaum pemberontak sedang mendekat dari arah utara, Grondhout cepat-cepat meninggalkan rumahnya dan bersama-sama dengan istrinya bersembunyi di Kepatihan untuk sementara waktu. Oleh karena ia menganggap situasinya sudah sangat berbahaya, ia memutuskan untuk meloloskan diri dari Cilegon bersama istrinya dan seorang babu. Ia mendapat sepucuk senjata api, dan mereka berangkat ke barat ke jurusan Mancak. Ketika mereka tiba di Temuputih, seorang anak perempuan Ajun Kolektor, Nyai Mas Nganten, bergabung dengan mereka; beberapa jarak kemudian mereka berjumpa dengan Sadi, opas Asisten Residen, yang menolak menyertai mereka sebagai penunjuk jalan; ia hanya menunjukkan kepada mereka jalan setapak yang menuju sebuah kebun tebu. Akan tetapi mereka memutuskan untuk mengikuti jalan besar saja. Di Ciwaduk mereka bertemu dengan mantri cacar, Mas Ranggawinata, istrinya dan mertuanya yang perempuan, dan mereka sepakat untuk meneruskan perjalanan ke Anyer, di mana mereka mengharapkan akan bertemu dengan Asisten Residen. Ketika melewati gardu di Kusambi Buyut, pada jarak sekitar empat paal dari Cilegon, mereka ditanya oleh penjaga gardu - Oyang - tentang tempat yang mereka tuju. Kira-kira seper empat paal lewat gardu itu, mereka mendengar seseorang berseru kepada Mantri Cacar, bahwa mereka tidak usah melarikan diri karena Wedana, Ajun Kolektor dan Jaksa berada di desa Ciwedus yang tidak jauh dari sana. Mas Ranggawinata mengenali suara Dengi, jaro Bagendung. Karena percaya kepada kata-katanya, mereka kembali. Ketika mereka tiba kembali di gardu Kusambi Buyut, mereka berhadapan dengan sepasukan pemberontak. Kaum pemberontak memisahkan Grondhout, istrinya dan babunya dari yang lain-lainnya tanpa menggunakan kekerasan, lalu membentuk lingkaran di sekitar mereka. Tiba-tiba saja, Grondhout dihantam dari belakang; istrinya dan babunya berusaha melarikan diri, dan yang disebut belakangan bersembunyi di bawah rumput yang tinggi. Ia mendengar majikannya berteriak-teriak minta tolong; rupa-rupanya ia dibunuh di tempat itu juga, sama seperti suaminya. Sesudah itu, gerombolan mencari Saunah, babu tersebut, yang dalam waktu yang singkat dapat mereka tangkap. Ia diinterogasi, apakah ia babu Crondhout atau istri pejabat pribumi. Ia menjawab bukan, lalu dibebaskan. Menurut laporan, Mantri Cacar, istrinya dan mertuanya yang perempuan, disuruh menemui Lurah Kasar, jaro Pecek. Setelah mereka dibebaskan oleh yang disebut belakangan itu, mereka menuju Ciomas dan keesokan harinya meneruskan perjalanan ke Serang.[27]

Pemburu-pemburu utama Grondhout adalah Lurah Kasar sendiri, Haji Masna dari Pecek, Sarip dari Kubangkepuh, Haji Hamim dari Temuputih, dan Haji Kamad dari Pecek.[28] Dalam melakukan pengejaran terhadap Grondhout dan istrinya, sepasukan pemberontak menuju Mancak. Dekat Temuputih mereka dapat mengejar Sadi yang dipaksa memberi tahu mereka ke arah mana Grondhout pergi. Sadi selanjutnya bergabung dengan pemberontak itu, oleh karena ia takut akan dibunuh jika ia tidak berbuat demikian. Yang menarik adalah bahwa di antara orang-orang yang melakukan pengejaran itu terdapat Sarip, seorang di antara tahanan-tahanan yang dibebaskan ketika para pemberontak mendobrak penjara.[29] Kita akan melihat nanti, bahwa tahanan-tahanan lainnya yang telah dibebaskan itu berpihak kepada kaum pemberontak.

Sementara itu banyak satuan pemberontak masih berkeliaran di kampung-kampung dan desa-desa, memburu korban-korban mereka. Oleh karena mereka merasa takut untuk tinggal lebih lama lagi di rumah Ramidin, Mary Bachet, August Bachet dan Anna Canter Visscher berangkat ke arah utara.

Mereka tidak diperbolehkan tinggal di desa-desa yang mereka lalui, oleh karena mereka kafir. Di Trate Udik mereka mendapat perlakuan yang serupa; akan tetapi di sana Jaro menasihatkan agar mereka menyatakan bersedia masuk Islam, jika mereka berjumpa dengan kaum pemberontak.[30] Mereka meninggalkan Trate Udik dan bersembunyi di sebuah kebun

tebu, namun mereka segera ditemukan. Di dalam kepungan pengejar-pengejar mereka, dan dalam ketakutan yang sangat ketika mendengar ancaman-ancaman, mereka minta ampun. Mary Bachet mengatakan bersedia masuk Islam, sementara August mulai mengucapkan syahadat dengan suara yang keras sekali. Rupa-rupanya pemimpin satuan pemberontak, Kiyai Usman dari Tunggak, menjadi lunak hatinya dan memerintahkan anak-anak itu untuk mengikutinya. Mereka kembali ke Cilegon, melalui jalan yang menuju Bojonegoro. Ketika sampai di gardu Jombang Wetan, mereka harus menghadap Haji Wasid. Setelah memberi hormat kepadanya dan mengulangi kesediaan untuk memeluk agama Islam, mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. Mereka malahan mendapat perlindungan khusus dan, dengan disertai seorang pengawal, mereka pergi ke rumah mereka untuk ganti pakaian. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk pergi ke rumah Asisten Residen. Di perjalanan mereka melihat empat mayat tergeletak di alun-alun.

Bagi kita tidaklah mengherankan bahwa pegawai-pegawai pamongpraja tingkat rendah, baik orang Eropa maupun orang Banten, mengalami nasib yang sama dengan yang dialami oleh atasan-atasan mereka, oleh karena kita tahu bahwa semua pegawai pemerintah kolonial jelas-jelas membuat diri mereka jadi sasaran kemarahan dan kebencian para kiyai dan murid-muridnya.[31] Kira-kira pada saat satuan-satuan pemberontak bergerak memasuki Cilegon, Raden Awimba - seorang juru tulis di Kantor Distrik - keluar dari rumahnya bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya melalui pintu belakang dan berusaha bersembunyi di rumah Haji Abu. Akan tetapi usahanya itu gagal oleh karena kaum pemberontak segera mengejar dan menangkapnya. Di saat itu ia pasti berpikir bahwa ajalnya akan segera tiba. Namun mujur baginya, pada saat itu juga terdengar teriakan orang yang mengumumkan bahwa Bachet telah ditemukan. Untuk beberapa saat perhatian para penyerang dialihkan, dan Raden Awimba mendapat peluang untuk melarikan diri. la lari ke arah Trate Udik, di mana ia bermaksud untuk bersembunyi di rumah Mabengid. Akan tetapi kebebasannya tidak berlangsung lama, oleh karena ia jatuh ke tangan satuan pemberontak lain, yang ketika itu sedang mengumpulkan penduduk di dalam mesjid dan di dekatnya. la menyembah di hadapan Haji Mahmud dari Trate Udik dan minta ampun, akan tetapi salah seorang penasihat Haji Mahmud, Agus Suradikaria, menjawab bahwa ia tak mungkin diampuni oleh karena semua pejabat telah memberikan kesaksian palsu ketika ia sendiri sedang diadili. Satu hal lainnya yang menyebabkan penderitaan rakyat, seperti yang disebut-sebut oleh Agus Suradikaria, adalah pajak yang sangat berat yang tanpa belas kasihan dikenakan kepada rakyat. pada saat kaum pemberontak hendak menyerang Raden Awimba, mereka dipanggil oleh Haji Wasid, dan sekali lagi Raden Awimba mendapat peluang untuk melarikan diri; ia bersembunyi di sebuah kebun tebu tidak jauh dari tempat itu. la terus diuber oleh kaum pemberontak dan tidak lama kemudian ditangkap kembali. Kali ini ia dihadapkan kepada Haji Wasid dan kelihatannya ajalnya sudah dapat dipastikan. Ketika sedang mendekati alun-alun Cilegon, Raden Awimba mendengar sorak-sorai yang gempita - mungkin karena Gubbels telah dapat dirobohkan - dan tiba-tiba saja sejumlah pemberontak menyerbu untuk membunuhnya. pada saat itu juga ia berlutut di hadapan salah seorang pemimpin mereka dan minta ampun; ia tidak jadi dibunuh untuk sementara waktu. Tidak lama setelah ia tiba di rumah Asisten Residen, istri Dumas dan anak-anaknya dibawa masuk dan massa rakyat berdesak-desakan untuk melihat mereka. pada saat itu Raden Awimba dilupakan samasekali dan ketiga kalinya ia berhasil meloloskan diri dari tangan kaum pemberontak.[32]

PUSAT PERISTIWA

Dan sekarang, setelah kita mendapat gambaran secara ringkas tentang jalannya peristiwa di Cilegon dan sekitarnya, dengan tekanan khusus kepada usaha pengejaran yang dilakukan oleh kaum pemberontak terhadap pejabat-pejabat dan anggota-anggota kerabat mereka yang melarikan diri, kita horus memberikan perhatian kepada apa yang sementara itu sedang terjadi di tempat yang menjadi pusat peristiwa. Jaksa dan Ajun Kolektor telah ditawan, bersama-sama dengan Opas Mian. Pemberontak membawa mereka, bersama-sama dengan Wedana dan

Kepala Penjara, ke gardu Jombang Wetan, yang merupakan markas Haji Wasid dan Haji Iskak. Para tawanan diperintahkan duduk di tanah di hadapan kiyai-kiyai itu, untuk menyembah kepada mereka dan mengucapkan sumpah bahwa mereka akan ikut dalam pemberontakan. Menurut kesaksian Mian, yang berhasil melarikan diri, rupa-rupanya setiap orang horus memberi hormat kepada Haji Wasid yang telah dinobatkan sebagai raja di gardu tersebut.[33] Wedana, Jaksa, Ajun Kolektor dan Kepala Penjara dibawa ke alun-alun dan dibunuh. kita tidak menemukan petunjuk tentang motif untuk membunuh mereka. Menurut sebuah laporan, mereka menjadi korban balas dendam Agus Suradikaria, akan tetapi menurut laporan-laporan lain, mereka dibunuh oleh karena Wedana dan Ajun Kolektor telah mengutuk perbuatan membongkar peti uang di kantor Ajun Kolektor.[34] Jaksa dan Kepala Penjara, menurut dugaan, dibunuh oleh karena mereka menolak bersumpah setia kepada kaum pemberontak. Di dalam peristiwa pembunuhan yang kejam itu, serangan pertama terhadap Wedana dilakukan oleh orang yang bernama Misal dan Kamidin dari Kubangkepuh. Di sini kita melihat bukti adanya kebencian rakyat yang mendalam terhadap pamongpraja dan perlawanan sengit yang telah direncanakan terhadap mereka.

Dengan mengisahkan nasib pejabat-pejabat dan anggota-anggota kerabat mereka, ketika mereka dikejar tanpa ampun oleh kaum pemberontak, kita telah menyimpang dari alur urutan peristiwa-peristiwanya. Sementara serangan umum berlangsung dengan sengitnya, satuan-satuan pemberontak dari segala jurusan, terutama dari utara, terus mengalir berdatangan untuk bergabung dengan pasukan induk. Dan pada pagi hari Senin itu, kaum pemberontak berhasil mengumpulkan satu pasukan yang terdiri dari beratus-ratus orang, baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata. Haji Wasid rupa-rupanya terus berada di Cilegon sepanjang pagi hari itu, hari kekuasaannya yang singkat. Seperti telah diceritakan di atas, ia telah mengutus pembantu-pembantunya untuk menyebarluaskan pemberontakan. Sekitar pukul tujuh pagi. Haji Wasid memerintahkan sebuah detasemen untuk menuju Serang. atas desakan Haji Akhiya dari Jombang wetan, ketompok pertama berangkat ke arah itu. Tidak lama kemudian, kelompok kedua di bawah pimpinan Kiyai Usman dari Tunggak, Haji Usman dari Arjawinangun, dan Haji Abdulgani dari Beji berangkat pula. Sekitar pukul sepuluh, kelompok ketiga bertolak menuju Serang di bawah pimpinan Haji Iskak. Dalam perjalanan menuju ibukota karesidenan itu, pasukan-pasukan itu berhenti di beberapa tempat, mungkin untuk menantikan kedatangan Haji Wasid dan Haji Ismail. Tertundanya keberangkatan mereka rupa-rupanya ada hubungannya dengan pengejaran terhadap Asisten Residen, yang sementara itu sudah tiba di Cilegon. Dalam pada itu lebih banyak pasukan diberangkatkan duluan, setelah mereka menerima uang yang berasal dari kantor-kantor yang telah digedor.

Dari pelbagai sumber kita mengetahui bahwa Haji Wasid bermarkas di gardu Jombang Wetan dan dari sana ia memimpin pemberontakan. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa kaum pemberontak memberi hormat kepada Haji Wasid sebagal "*raja*" atau *Raja Islam*,[35] sebuah gelar yang dalam periode yang kacau itu juga diberikan kepada Agus Suradikaria dan Haji Tubagus Ismail. Dalam kenyataannya, yang disebut terakhir itu tidak pernah tampil sbbagai pemimpin utama pemberontakan, melainkan sudah merasa puas bertindak sebagai tangan kanan dan penasihat Haji Wasid. Bagaimana bisa terjadi bahwa Haji Wasid memegang pimpinan sedangkan orang yang berdarah bangsawan dan bakal Wali itu mengikuti perintahnya, sulit dijelaskan, akan tetapi semua bukti menunjukkan bahwa Haji Tubagus Ismail, walaupun statusnya lebih tinggi, tidak lebih dari salah seorang pembantu utama Haji Wasid. Selama kekuasaannya yang berlangsung singkat itu, Haji Wasid mempunyai otoritas tertinggi dan memutuskan soal hidup dan mati. Meskipun pengikut-pengikutnya yang setia memanggilnya sebagai pemimpin tertinggi, ia rupa-rupanya menolak gelar raja dan mengakui Haji Tubagus Ismail sebagai atasannya dan bakal raja.[36] Sekarang, mari kita sambung-sambungkan kembali benang-benang kisah mengenai ledakan amarah rakyat yang berdarah itu.

PENGEJARAN TERHADAP GUBBELS

Peristiwa yang sangat penting adalah pengejaran terhadap Asisten Residen. Secara

kebetulan Gubbels sedang tidak berada di tempat tugasnya -- Cilegon - ketika pemberontakan pecah. Dua hari sebelum pemberontakan itu dimulai, ia meninggalkan Cilegon untuk menyertai Residen dalam perjalanan inspeksinya di afdeling Anyer, bersama-sama dengan Kontrolir Muda. Ketika pemberontakan sudah berkobar, Residen dan rombongannya berada di Anyer tanpa mengetahui sedikit pun tentang adanya bahaya yang mengancam. Memang ada informasi yang sampai kepada Gubbels pada sekitar pukul setengah delapan pagi hari Senin itu, yang disampaikan oleh Enggus, opas Wedana Cilegon, akan tetapi informasi itu samasekali tidak dihiraukan oleh Gubbels dan rekan-rekannya; surat yang disampalkan oleh Enggus hanya menyebutkan adanya suatu percobaan perampokan di mana Dumas mendapat luka-luka.[37] Atas pertanyaan Kontrolir Muda, Enggus menambahkan bahwa sebelum menggedor rumah Dumas, ada orang-orang yang mengetuk pintu Kepatihan. Kejadian itu dianggap tidak penting, dan beberapa saat kemudian Gubbels mengambil keputusan untuk kembali ke Cilegon. Tidak lama setelah Residen dan Kontrolir Muda meneruskan perjalanan ke Caringin, Gubbels - dengan dikawal oleh Jamil, seorang opas senior, dan beberapa orang lainnya - berangkat dengan dokar. Rupa-rupanya ia tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam, oleh karena itu tidak terpikir olehnya untuk membawa senjata. la berhenti di Cigading untuk mengganti kuda, dan mendengar kabar bahwa rakyat telah angkat senjata dan sudah menduduki Cilegon. Dari Kromo - kokinya - yang ia jumpai di sana, ia mendengar bahwa anak-anaknya telah dibunuh. Kromo menasihatinya agar ia jangan pergi ke Cilegon, akan tetapi Gubbels memerintahkan orang-orangnya agar cepat-cepat mengganti kuda. la bersikeras untuk pergi ke Cilegon, maka berangkatlah ia tanpa ragu-ragu dan tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Dokarnya melesat menuju Cilegon. Rupa-rupanya ia telah mengatakan kepada orang-orang, bahwa ia lebih baik mati saja apabila anak-anaknya sudah dibunuh. Di dekat Kalentemu ia berjumpa dengan sekelompok pemberontak yang terdiri dari sekitar tiga puluh orang, yang menutup jalan. Kusir dokar bukannya berhenti melainkan langsung menerobos barisan pemberontak. Kaum pemberontak mula-mula minggir, akan tetapi segera setelah itu mereka melompat maju dan menyerang Asisten Residen, pengawal-pengawalnya dan dokarnya. Salah seekor kudanya ditusuk di perut, sementara Gubbels sendiri mendapat tusukan tombak di dada. Penyerangnya diketahui bernama Samidin,[38] sedangkan kelompok itu dipimpin oleh Haji Kalipudin. Meskipun telah mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari pemberontak dan meskipun ia sudah terluka parah, Gubbels memerintahkan kusir - Jas - agar secepat mungkin meneruskan perjalanan ke Cilegon. Kaum pemberontak tidak mengejar mereka, dan Jas berusaha sekuat tenaga agar mereka sampai di Cilegon; ia terus memacu kuda-kudanya dan dengan selamat mereka tiba di Cilegon. Babak terakhir tragedi mereka dimulai segera setelah mereka tiba di sana. Gubbels yang malang itu benar-benar telah menempuh satu perjalanan yang panjang dan penuh siksaan. Sekitar pukul sepuluh pagi dokar memasuki alun-alun, dan oleh karena jalan yang menuju rumah Asisten Residen terhalang oleh mayat-mayat, Jas menghentikan kendaraannya. Halaman muka rumah Asisten Residen penuh dengan kerumunan pemberontak yang besar sekali jumlahnya. Gubbels segera melihat bahwa tak mungkin baginya untuk memasuki rumahnya dan oleh karena itu ia turun dari dokar dan lari menuju Kepatihan. Kerumunan pemberontak melihatnya dan segera menyerbu sambil berteriak-teriak dan memekik-mekik; ada yang berseru agar ia dibunuh saja. Sebelum ia dapat mencapai Kepatihan, terdengar tembakan. la tidak terkena dan lari memasuki kamar depan Kepatihan di sebelah kanan. Pengejar-pengejar terus memburunya, di bawah pimpinan Haji Jahli yang memegang pistol yang sudah diisi peluru. Ketika H. Jahli mendekat, Gubbels melompat dari kamar dan merebut pistol itu. Kaum pemberontak segera berpencaran. Kabar tentang apa yang telah terjadi dengan keluarganya dan nasibnya sendiri yang malang telah membuat Gubbels kalap, dan ia bertekad untuk melawan kaum pemberontak, dan ia pun berteriak-teriak menantang mereka. Kerumunan pemberontak lalu mundur.

Sementara sekelompok pemberontak sedang mengejar Gubbels, satu kelompok lainnya mengejar Jamil, opas yang telah mengawal Asisten Residen dalam perjalanannya dari Anyer. Jamil ditangkap dekat rumah Ajun Kolektor dan dibawa ke gardu Jombang Wetan di mana, menurut laporan, ia dibunuh oleh Samidin yang telah disebutkan di atas.[39] Mengenai nasib Jas, sang kusir, dan anggota-anggota rombongan lainnya yang mengawal Asisten Residen, mereka semuanya dapat melarikan diri dalam ketakutan yang amat sangat. Dokar dan kuda-

kudanya dirampas lalu dipakai untuk mengambil senjata api dari Bojonegoro yang akan digunakan untuk melancarkan serangan yang kedua terhadap Gubbels.[40] Seperi telah dikemukakan di atas, keberangkatan ke Serang terpaksa diundurkan untuk waktu yang cukup lama, akibat kehadiran Asisten Residen di Cilegon. Gubbels sudah pasti akan dibunuh begitu ia jatuh ke tangan pemberontak. Sementara itu persiapan-persiapan keberangkatan ke Serang sudah hampir selesai; pasukan-pasukan pemberontak satu demi satu berangkat, semuanya menuju ibukota, yang merupakan sasaran serangan umum yang final. Sepasukan pemberontak di bawah pimpinan bersama Haji Kasiman, Haji Mahmud, Agus Suradikaria, Kiyai Haji Madani dari Ciawi, Haji Koja dari Jombang Wetan, Haji Kalipudin, dan Haji Akhiya ditugaskan untuk mempertahankan Cilegon.

Pada saat pasukan pemberontak berangkat dari Kepatihan, Gubbels berada di serambi depan, duduk di sebuah kursi sambil memegang pistol. Saat-saat ini pasti merupakan saat-saat yang paling menakutkan bagi manusia yang malang itu. Sekitar tengah hari, istri Dumas tidak melihat lagi seorang pemberontak pun dan, karena ia mengira bahwa "segala sesuatunya sudah lewat", ia keluar dari persembunyiannya di Kampung Baru bersama-sama dengan anak-anaknya dan kembali ke Kepatihan untuk mencari anaknya yang bungsu.[41] Ia memasuki rumah itu dari pintu belakang, dan beberapa saat kemudian ia melihat Gubbels duduk di serambi depan. Atas permintaannya, istri Dumas mengambil air minum untuknya, dan setelah itu membawanya ke salah sebuah kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Ia masih menggenggam pistol, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oleh karena takut kaum pemberontak akan kembali dan membunuh anak-anaknya apabila mereka kedapatan sekamar dengan Gubbels, istri Dumas dan anak-anaknya bersembunyi di kamar lain, walaupun Gubbels menyatakan keberatannya, karena ia tidak ingin ditinggalkan sendirian. Mereka mengunci diri di dalam kamar dan daun pintunya mereka palangi dengan beberapa meja. Seperti sudah dapat diperkirakan, sekitar pukul setengah tiga petang hari itu, sejumlah pemberontak menuju Kepatihan. Setibanya di sana, sebagian kecil dari mereka, di bawah pimpinan Rapenye, jaro Ciora, menyerang rumah itu dari sebelah timur, Sekelompok lainnya berusaha mendobrak pintu depan; beberapa saat kemudian pintu pun terbuka dan mereka menyerbu menuju kamar tempat Gubbels bersembunyi. Kembali mereka berhadapan dengan pintu tertutup, dan rupa-rupanya mereka memerlukan perkakas untuk dapat membukanya. Sementara kelompok ini berusaha memasuki rumah, kelompok lainnya melepaskan tembakan-tembakan yang menghancurkan kaca jendela. Gubbels benar-benar tak berdaya menghadapi kaum pemberontak itu, dan tak ayal lagi ia akan dibunuh di tempat itu juga oleh penyerang-penyerangnya. Akhirnya pintu dapat didobrak; kaum pemberontak menyerbu ke dalam kamar dan menyergap korban mereka yang sudah tidak berdaya itu. Dari kamarnya, istri Dumas mendengar kaum pemberontak bergerak kian kemari dan Gubbels merintih kesakitan. Lalu keadaan menjadi sunyi. Itulah akhir hayat Gubbels yang mengerikan. Mayatnya kemudian diseret ke luar rumah dan disambut dengan pekik kemenangan yang gemuruh; Asisten Residen, yang dianggap sebagai alat utama pemerintah kolonial, sudah mati.

DI MARKAS PEMBERONTAK

Tidak lama setelah Gubbels dibunuh, kaum pemberontak memukul-mukul pintu kamar tempat istri Dumas dan anak-anaknya bersembunyi. Kaum pemberontak menjadi marah dan mengancam istri Dumas dengan siksaan apabila ia tidak mau membuka pintu. Ia minta ampun dan mengatakan bahwa ia bersedia masuk Islam. Kaum pemberontak merasa puas dengan pernyataannya itu dan tidak membunuh wanita dan anak-anaknya itu; mereka dibawa ke rumah Asisten Residen dan di situ mereka harus menghadap tuan raja. Di sana mereka bertemu dengan Mary Sachet, August Sachet dan Anna Canter Visscher yang sudah tiba di sana duluan.

Seperti telah disebutkan di muka, sebagian dari pasukan pemberontak ditempatkan di Cilegon, sedangkan sebagian besar lainnya diperiritahkan menuju Serang. Tidak lama setelah Asisten Residen dibunuh, Haji Wasid dan Kiyai Haji Tubagus Ismail berangkat dengan dokar menyusul pasukan untuk merampungkan pemberontakan. Mereka yang tinggal dikumpulkan di

rumah Asisten Residen. Menurut kisah Mary Bachet, rumah itu sudah diranjah dan isinya diangkut; uang yang terdapat di rumah itu diambil dan dibagi-bagikan kepada kaum pemberontak. Di serambi depan, pemimpin-pemimpin mereka, di antaranya Agus Suradikaria, berembuk. Mary Bachet yang diberi kebebasan bergerak, dapat dengan leluasa melihat ke sana ke mari dan mengobrol dengan beberapa pemberontak. Ia menjumpai mayat anak-anak Gubbels, yang bungsu tergeletak di ambang pintu kamar pelayan dan yang paling tua di kebun. Dari kejauhan ia juga dapat menyaksikan peristiwa serangan berdarah terhadap Asisten Residen di alun-alun. Ia mendapat perlakuan yang baik, oleh karena ia sudah terpilih untuk menjadi istri *tuan raja*.[42]

Rupa-rupanya detasemen yang ditempatkan di Cilegon berada di bawah pimpinan Agus Suradikaria. Bekas pejabat yang telah membelot dan bergabung dengan kaum pemberontak itu mengetuai rapat haji-haji terkemuka di serambi depan. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjaga jalan-jalan keluar dari Cilegon. Ia juga mengadakan semacam sidang pengadilan dan memutuskan nasib istri Dumas, setelah wanita itu berjanji akan memeluk agama Islam. Agus Suradikaria kemudian mengucapkan ayat-ayat tertentu yang harus diulangi oleh istri Dumas. Wanita itu lalu diizinkan untuk duduk di sebuah kursi di pojok serambi depan. Tidak lama kemudian beberapa orang disuruh ke rumah Bachet untuk memotong seekor sapi. pada sore hari itu juga dilangsungkan sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh orang-orang yang tinggal di dalam rumah Asisten Residen dan sekitarnya. Menurut laporan, pada jamuan itu August Sachet harus bertindak sebagai pelayan *tali api*.[43] Sesudah itu, orang-orang sibuk menghancurkan arsip-arsip, membakar sejumlah besar dokumen yang diambil dari kantor Ajun Kolektor, Jaksa, dan Asisten Residen.[44] Rupa-rupanya pembakaran arsip-arsip itu dilakukan atas perintah Haji Wasid sendiri. Menjelang senja lebih banyak pasukan pemberontak diberangkatkan; satu pasukan menuju Anyer, satu pasukan lainnya diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan yang sedang bergerak menuju Serang, dan pasukan yang ketiga ditugaskan untuk memperkuat penjagaan di jalan jalan masuk Cilegon.[45]

RADEN PENNA BERTINDAK

Ketika pemberontakan mulai berkobar di Cilegon, patih Anyer, Raden Penna, secara kebetulan sedang berada di Serang pada pagi hari tanggal sembilan Juli, Saca - seorang opas yang diutus oleh istri Patih - menyampaikan berita kepadanya bahwa rumah Dumas telah digedor pada malam hari sebelumnya dan bahwa Dumas sendiri telah terluka parah. Setelah menerima kabar itu, ia segera memanggil dokar dan cepat-cepat berangkat ke Cilegon. Rupa-rupanya Raden Penna tidak kehilangan akal dan bertekad untuk menghadapi perusuh-perusuh itu. Sebelum meninggalkan Serang, ia minta kepada Dokter Jacobs, dokter keresidenan, untuk menyertainya agar ia dapat memberikan pertolongan medis kepada Dumas. Perjalanan ke Cilegon penuh dengan bahaya setiap saat Raden Penna dapat berjumpa dengan satuan-satuan pemberontak yang berkeliaran. Sebelum sampai di Kramat Watu, ia berjumpa dengan Sedut, yang mengabarkan kepadanya bahwa Cilegon sudah diduduki oleh sejumlah besar pemberontak. Setibanya di Kramat Watu ia mendapat keterangan-keterangan yang lebih terperinci tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh kaum pemberontak pada permulaan pemberontakan mereka. Patih lalu mengutus Sadik - yang telah menyampaikan kabar itu kepadanya di Kramat Watu - ke Serang untuk minta bantuan militer. Ia sendiri mempersenjatai diri dengan sebilah kelewang dan, dengan disertai pula oleh Juru Tulis Wedana, ia meneruskan perjalanan dengan menunggang kuda ke Serdang. Di ujung timur Serdang ia berjumpa dengan wedana Kramat Watu dan asisten wedana Serdang. Mereka bersama-sama meninggalkan Serdang. Mereka sedang mendekati Cilegon, ketika mereka berjumpa dengan sejumlah orang bersenjata dan sebuah dokar dengan dua atau tiga orang di dalamnya. Tiba-tiba seorang di antara penumpang dokar itu melompat ke luar dan membidikkan pistolnya ke arah Patih. Oleh karena mereka menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang terlalu banyak sehingga mereka akan sangat membahayakan diri mereka sendiri apabila mereka melawan, mereka cepat-cepat kembali. Akan tetapi tidak jauh dari sana, di sebelah timur dekat Cibeber, mereka

melihat sejumlah besar pemberontak, dan mereka cepat-cepat kembali ke arah Serdang. Setelah melewati Serdang, Patih dan Wedana menaiki kuda mereka, sementara Asisten Wedana diperintahkan untuk bersembunyi dan Saca disuruh kembali ke Serang dengan dokar untuk minta bantuan. Kita mengetahui dengan pasti bahwa Patih yang tabah dan berani itu menunjukkan sikap yang tegas dalam menghadapi pemberontakan. Patih memutuskan untuk dengan cara apa pun berusaha mencapai Cilegon; ia bermaksud untuk tidak menempuh jalan yang langsung, lewat Serdang dan Cibeber, melainkan mengambil jalan memutar melalui Pagebangan. Patih dan Wedana berangkat menuju Temuputih dengan harapan akan dapat memasuki Cilegon dari sana, namun di sana pun mereka melihat kerumunan orang yang besar jumlahnya dan mereka tidak berani mendekati tempat itu. Mereka menghindari Temuputih dan melanjutkan perjalanan ke arah Jombang Kulon, akan tetapi kembali mereka berhadapan dengan sekelompok pemberontak - yang terdiri dari sekitar dua puluh orang -- yang menutup jalan. Patih menyapa mereka dan memperingatkan bahwa pasukan tentara sedang dalam perjalanan dan akan menembaki orang-orang yang berkumpul. Orang-orang itu lalu bubar dan kembali ke desa mereka. Dengan demikian, jalan terbuka bagi Patih dan Wedana untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Cilegon, akan tetapi ketika mereka memacu kuda mereka, kuda yang ditunggangi Patih menjadi gelisah. Raden Penna memperhatikan keadaan di sekeliling mereka dan melihat tiga orang sedang mendekat, menyelinap melalui rumpun bambu. Tiba-tiba mereka melompat ke arah Patih, dan hanya karena Wedana masih sempat memberikan peringatan dan Raden Penna secepat itu pula mengelak ke samping, ia terhindar dari sabetan kelewang. Setelah terhindar dari bahaya itu, mereka membatalkan maksud mereka untuk pergi ke Cilegon, lalu menuju Anyer dengan harapan dapat bertemu dengan Asisten Residen di sana. Sekitar pukul tiga petang mereka tiba di rumah Wedana Anyer Lor.[46] Di sini Raden Penna berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan orang-orang yang bersedia berangkat ke Cilegon untuk melawan kaum pemberontak. Oleh karena penduduk Anyer Kidul belum pulih dari panik mereka, maka agaknya diperlukan waktu lama untuk mengerahkan sukarelawan dalam jumlah yang cukup banyak untuk disusun menjadi sebuah regu penolong. Seperti akan kita lihat nanti, pasukan penolong di bawah pimpinan Raden Penna itu baru bisa berangkat keesokan harinya.

PEMBERONTAKAN DI KECAMATAN-KECAMATAN

Untuk melengkapi gambaran tentang situasi di Banten Utara selama periode yang rusuh itu, perlu dilukiskan secara singkat keadaan di tempat-tempat lainnya di daerah itu. Pada hari Senin itu, sementara pemberontakan sudah berkobar di Cilegon, huru-hara pecah di tempat-tempat lain, seperti Bojonegoro, Balagendung, Krapyak, Grogol dan Mancak.

Di Bojonegoro pemberontakan meletus Minggu malam, malam yang mendahului hari pecahnya pemberontakan di Cilegon. Ketika tiba di Beji dari Saneja, Haji Wasid melihat orang-orang sudah berkumpul menunggu kedatangannya. Ia segera memerintahkan sebagian dari pasukannya untuk pergi ke Bojonegoro dan mencari asisten wedana setempat untuk dibunuh. Rumah Asisten Wedana digeledah dan diranjah, arsip-arsip dibakar, akan tetapi pemiliknya tidak ditemukan. Ia sedang dalam perjalanan inspeksi ke desa-desa di wilayah wewenangnya. Akan tetapi kaum pemberontak dapat melampiaskan kemarahan dengan membunuh Juru Tulis Asisten Wedana, Asikin, yang ditemukan sedang tidur di rumah atasannya.[47] Keesokan harinya, kaum pemberontak menggeledah seluruh daerah di sekitar Gunung Awuran untuk mencari Asisten Wedana, namun sia-sia. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa salah seorang pemimpin pemberontak telah merampas dokar Asisten Wedana yang kemudian digunakan untuk mengangkut kaum pemberontak ke Cilegon pada hari Senin itu juga.[48]

Salah satu tindakan kekerasan yang terjadi di Balagendung pada tanggal 9 Juli adalah serangan terhadap rumah Asisten Wedana, yang seperti semua rekan-rekan sejawatnya merupakan sasaran utama kaum pemberontak. Ia masih mujur karena mendapat peringatan pada waktunya dan melarikan diri ke Serang. Juga rumahnya dihancurkan; isinya diangkut dan arsip-arsip dibakar. Rupa-rupanya seorang yang bernama Arsudin dipaksa oleh kaum

pemberontak untuk ikut dengan mereka mengejar Kepala Desa Balagendung, yang hendak mereka bunuh.[49]

Dilaporkan bahwa sejumlah orang telah berusaha menangkap Asisten Wedana Krapyak, akan tetapi ia masih sempat melarikan diri ke Serang, sehingga mereka dengan sia-sia mencarinya di rumahnya. Di wilayah ini, seperti di tempat-tempat lainnya, penghancuran isi rumah Asisten Wedana dan pembakaran dokumen-dokumen resmi nampaknya merupakan salah satu ciri utama kegiatan kaum pemberontak. Demikian pula rumah Asisten Wedana Grogol dihancurkan pada hari Senin itu dan arsip-arsipnya dibakar. Ketika mendengar bahwa telah terjadi huru-hara di Cilegon, Asisten Wedana Grogol segera berangkat ke sana, akan tetapi di tengah jalan ia berhadapan dengan sepasukan pemberontak yang menyerangnya dan setelah membunuhnya, melemparkan mayatnya ke dalam sungai.[50]

Keesokan harinya, tanggal 10 Juli, kaum pemberontak di bawah pimpinan Haji Sapiudin dari Leuwibeureum, setelah bersalat subuh di langgar haji tersebut, berangkat ke Mancak dan meranjah rumah Asisten Wedana. Mereka merampas sepucuk pistol dan membakar arsip. Setelah itu mereka mengundurkan diri ke Cipeucang, di mana mereka dijamu makan oleh kepala desa, Moiji.[51] Menurut laporan, Asisten Wedana Mancak telah pergi ke Anyer Kidul untuk menyertai Residen ke Caringin.

PEMUSATAN PASUKAN PEMBERONTAK SEKITAR SERANG

Beralih dari afdeling Anyer ke afdeling Serang, kita menyaksikan pemandangan yang lain. Pada tanggal 9 Juli satuan-satuan pemberontak dari distrik Serang dan daerah-daerah sekitarnya semuanya berkumpul di Bendung, Trumbu, Kubang, Kaloran dan Kaganteran; pasukan pertama dipimpin oleh Haji Mohamad Asik; pasukan kedua dipimpin bersama oleh Haji Mohamad Kanapiah dan Haji Muhidin; pasukan ketiga dipimpin oleh Katab, seorang pedagang tembakau, dan pasukan keempat dipimpin oleh Raim, seorang bekas kepala desa Kaujon, sedangkan pasukan ketiga dan keempat itu berada di bawah pengawasan Mas Haji Mohamad Sangadeli; pasukan terakhir dipimpin oleh Haji Abubakar.[52] Perlu diingatkan kembali, bahwa setelah menerima pesan tertulis dari Haji Wasid yang menyatakan bahwa pemberontakan akan dimulai Minggu malam itu juga, Haji Mohamad Asik mengutus pembantu-pembantunya, terutama ke Kubang, Kaloran dan Kaujon, untuk mengumumkan kabar itu dan menyerukan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya agar bersiap-siap untuk berontak.[53] Seruan untuk berontak sampai kepada Haji Mohamad Kanapiah melalui Haji Muhidin, yang pada Minggu malam tanggal 8 Juli mengadakan rapat di rumah Haji Mohamad Kanapiah untuk membicarakan pelbagai soal yang berhubungan dengan pemberontakan itu.[54]

Keesokan harinya orang-orang datang berduyun-duyun di Bendung dan setelah mendapat pengikut yang besar jumlahnya, Haji Mohamad Asik menyatakan siap untuk memulai perjalanan menuju jantung Banten. Semua pejuang diperintahkan minum air suci agar mereka kebal dalam pertempuran, dan Haji Mohamad Asik sendiri memberkahi mereka.[55] Sementara itu, sebuah satuan pemberontak lainnya berkumpul di Trumbu, di bawah pimpinan Haji Mohamad Kanapiah, yang dibantu oleh Haji Akhmad, Haji Baiki, dan Dirham. Juga di sini dilangsungkan acara menyucikan diri di bawah pimpinan Haji Mohamad Kanapiah sendiri.[56] Sementara itu, Haji Abubakar telah mengumpulkan pengikut-pengikutnya di Kaganteran dan menempuh jalan yang menuju Karangantu dengan dalih hendak bekerja di kebunnya.[57] Menurut rencana yang telah ditetapkan, satuan-satuan itu akan mulai beroperasi setelah menerima perintah dari Haji Wasid. Serang akan diserang dari pelbagai jurusan; pasukan di bawah pimpinan Kiyai apa dari Dayeuh Kolot akan mendekati tangsi militer dari sebelah selatan, sementara pasukan-pasukan lain yang dipimpin oleh Haji Mohamad Asik dan Haji Mohamad Sangadeli akan memasuki kota dari pelbagai tempat dan jurusan. Sepanjang hari Senin tanggal 9 Juli, kaum pemberontak terlihat berkumpul di Mesjid Agung Serang dan di sekitarnya serta di kampung-kampung Kaloran dan Kaujon. Mata-mata dikirimkan ke dalam kota untuk melakukan pengintaian, dan setelah mereka mengetahui bahwa alun-alun dijaga oleh tentara, pemimpin-pemimpin pemberontak tidak berani

memberikan perintah untuk menyerang.[58] Setelah menanti sepanjang hari dalam suasana tegang tidak menentu, maka Senin malam mereka akhirnya menerima kabar dari Haji Wasid tentang apa yang telah terjadi di Cilegon. Dalam suasana muram pasukan-pasukan pemberontak kembali ke Bendung dan Trumbu. Mereka terus disiagakan di sana sampai hari Rabu tanggal 11 Juli, lalu dibubarkan.[59]

HAL-HAL YANG MENARIK MENGENAI PEMBERONTAKAN

Sebelum kita meneruskan kisah tentang kegiatan-kegiatan pemberontak, ada beberapa hal yang menarik mengenai pemberontakan itu yang perlu ditelaah. Apabila kita meninjau kembali jalannya pemberontakan pada umumnya, maka kelihatannya ada alasan yang kuat untuk beranggapan bahwa pemberontakan itu merupakan buah hasil satu rencana yang menyeluruh. Organisasi yang digunakan untuk melaksanakan pemberontakan itu meliputi seluruh afdeling Anyer dan distrik-distrik bagian barat Kabupaten Serang. Rupa-rupanya distrik-distrik di bagian timur kabupaten itu dan bagian utara Kabupaten Pandeglang tidak termasuk dalam daerah utama pemberontakan.[60] Di daerah-daerah itu tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dianggap cukup penting untuk disinggung dalam catatan-catatan di masa itu.

Tidaklah mungkin untuk memperkirakan dengan tepat jumlah anggota pasukan-pasukan pemberontak selama huru-hara itu. Dalam serangan malam hari terhadap rumah Dumas, pihak penyerang diduga berjumlah sekitar seratus orang.[61] Ketika terjadi serangan terhadap Cilegon pada pagi hari Senin, pasukan pemberontak dari arah utara yang dipimpin oleh Haji Wasid diperkirakan berkekuatan sekitar empat atau lima ratus orang.[62] Menurut berita acara sidang-sidang pengadilan, jumlah pemberontak yang dipusatkan di Bendung diperkirakan sekitar empat ratus orang,[63] dan menurut laporan Residen, yang dikerahkan di Trumbu berjumlah sekitar enam ratus orang.[64] Untuk menyerang rumah Asisten Wedana di Krapyak dikerahkan sekitar 60 orang.[65] Di Jombang Kulon, orang-orang yang menjaga jalan keluar Cilegon di sebelah barat hanya berjumlah dua puluh orang.[66] Dan akhirnya, di Toyomerto, pasukan pemberontak yang berhadapan dengan tentara dari Serang berjumlah sekitar dua ratus orang.[67] Saya tidak hendak mengatakan bahwa angka-angka itu dapat diandalkan ketepatannya, akan tetapi saya menyajikannya sekedar untuk memberikan gambaran mengenai kekuatan pasukan pemberontak dari segi jumlah anggotanya.

Dalam kaitannya dengan penyajian angka-angka itu, timbul satu pertanyaan yang penting. Sampai sejauh mana kaum pemberontak mendapat dukungan aktif dari rakyat biasa? Di samping pengikut-pengikut para kiyai yang fanatik, terdapat banyak orang yang ikut dalam pemberontakan hanya karena mereka menghormati kiyai-kiyai itu atau karena menaruh rasa dendam terhadap para pejabat. Sudah barang tentu ada juga orang-orang yang bertindak karena dipaksa dan malahan diancam akan dibunuh.[68] Sebaliknya, tidak mengherankan samasekali bahwa daerah-daerah tertentu - di mana terdapat inti elite revolusioner - telah menyumbangkan sejumlah besar peserta pemberontakan, umpamanya Arjawinangun dan Beji.[69] Seperti akan ditunjukkan nanti, pemberontakan itu samasekali tak mendapat dukungan rakyat di luar afdeling Anyer dan distrik-distrik bagian barat Kabupaten Serang. Juga perlu dicatat bahwa kepala-kepala desa memang hadir di tempat-tempat pemusatan pemberontak; rupa-rupanya di antara mereka ada yang ikut dengan penuh gairah dalam pemberontakan, sementara ada pula kepala-kepala desa yang membantu aktif hanya karena dipaksa oleh kaum pemberontak.[70] Sedikit sekali bekas pegawai pamongpraja tingkat rendahan yang secara aktif ikut dalam tindakan-tindakan kekerasan.[71] Akhirnya, tentu tidak mengherankan bahwa tahanan-tahanan yang telah dibebaskan memihak kaum pemberontak.

Cukup jelas kiranya bahwa pejabat-pejabat pamongpraja telah menjadikan diri mereka sasaran kebencian kaum pemberontak dan bahwa mereka terus menjadi sasaran serangan selama berlangsungnya kerusuhan-kerusuhan itu. Tidak disangsikan lagi bahwa tindakan-tindakan kaum pemberontak sangat dipengaruhi oleh sikap permusuhan mereka terhadap setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah, memungut

pajak dan menegakkan hukum. Mungkin kebencian rakyat terhadap pamongpraja itulah yang telah dimanifestasikan dalam perbuatan menghancurkan arsip-arsip pemerintah dan rumah-rumah pejabat. Di sini kita rupa-rupanya berhadapan dengan ciri-ciri yang sangat menonjol dari pemberontakan itu. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa tidak nampak adanya sikap permusuhan terhadap orang-orang asing bukan Eropa, seperti orang-orang Cina atau Arab. Rupa-rupanya hanya beberapa orang Cina saja yang diganggu,[72] sementara seorang Arab kelihatan di antara kerumunan orang di rumah Asisten Resoden.[73]

Sebuah pertanyaan penting dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan penghancuran itu adalah, apakah yang kita hadapi di sini hanya kejahatan semata-mata ataukah tindakan-tindakan sosial atau politik tertentu. Dalam banyak hal kita melihat bahwa mereka mencari dokumen-dokumen yang kemudian mereka bakar. Dalam dua peristiwa kaum pemberontak mencuri uang dalam jumlah yang besar[74] - yakni uang dari kantor Ajun Kolektor dan dari kantor Kepala Penjualan Garam. Juga ada berita acara mengenai dua sidang pengadilan di mana kaum pemberontak dituduh telah mencuri untuk kepentingan pribadi.[75] Kesaksian yang diberikari oleh seorang Cina adalah mengenai peristiwa-peristiwa di mana toko-toko digedor dan barang-barang dagangannya dirampok.[76] Kita tentunya dapat berasumsi bahwa kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh anggota-anggota bawahan pasukan pemberontak, oleh karena menurut apa yang dapat diketahui dari catatan-catatan, pemimpin-pemimpin mereka tetap berpegang pada motif-motif yang tidak mementingkan diri sendiri. Rupa-rupanya uang dan pistol kepunyaan Asisten Wedana Mancak tidak dicuri untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan pemberontakan pada umumnya.[77] Selain itu, kenyataan bahwa tidak satu pun rumah yang dibakar setelah diserang atau isinya dihancurkan, menunjukkan adanya semacam sikap menahan diri di kalangan pemberontak dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah mereka pilih.

Sebelum beralih ke kesudahan pemberontakan itu, kita harus menelaah situasi yang dihadapi kaum pemberontak sebagai hasil perbuatan mereka. Mereka telah menduduki ibukota afdeling Cilegon, dan pemberontakan menjalar ke segala jurusan di daerah itu. Akan tetapi kemenangan itu tidak berlangsung lama. Pasukan-pasukan pemberontak terdiri bukan dari prajurit-prajurit reguler melainkan dari petani-petani biasa, yang tidak siap untuk mengambil bagian dalam sebuah kampanye yang berlangsung lama. Selain dari itu, pemimpin-pemimpin mereka, mungkin karena terlalu yakin dan terlalu percaya pada orang lain, tidak mempersiapkan rencana yang mencakup jangka waktu yang panjang. Hanya selama tidak menghadapi pasukan bersenjata yang efektif sajalah kaum pemberontak dapat mempertahankan posisi mereka.

Pertanyaan yang masih harus dikemukakan adalah usaha-usaha apa yang telah dilakukan untuk mengerahkan pasukan guna menghadapi kaum pemberontak itu. Kita telah melihat bahwa kaum pemberontak hanya menghadapi perlawanan dari orang perorangan saja. Dalam tahap berikutnya dalam pemberontakan itu, kekalahan kaum pemberontak nampaknya disebabkan karena tidak adanya rencana pertahanan di pihak mereka dan bukan karena adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak pejabat-pejabat setempat. Pemimpin-pemimpin pemberontak dan pengikut-pengikut mereka, yang disilaukan oleh keyakinan bahwa mereka tak dapat dikalahkan dalam Perang Sabil ini, tidak menyadari bahwa organisasi dan strategi militer yang lebih efektif mutlak diperlukan. Ketiadaan strategi yang demikian tak boleh tidak membawa mereka kepada bencana.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Ketika pemberontakan pecah, yang menjabat asisten residen adalah J.H.H. Gubbels, patih Raden Penna, jaksa Mas Sastradiwirja, wedana Raden Cakradiningrat, ajun kolektor Raden Purwadiningrat, penghulu Haji Tubagus Kusen. Selanjutnya kontrolir muda C.W.A, van Rinsum, kepala penjualan garam U. Bachet, juru tulis kantor asisten residen H.F. Dumas, dan

kepala pemboran J. Grondhout; Lihat Javansche Almanak (1888), hal. 18; Djajadiningrat (1936), hal. 39; juga Appendix VII.

[2] Pada malam hari Minggu, tanggal 8 Juli, sekitar 50 orang dari Gulacir bergerak menuju Cilegon, lihat PV 9 Apr. 1889.

[3] MR, No. 1336 (1889), hal. 17; menurut IG (1891), no. 2, hal. 1164, serangan terhadap rumah Dumas itu dilakukan pada pukul 3 dinihari; cf. Laporan DDI, hal. 9.

[4] MR, No. 1336 (1889), hal. 17; lihat juga OIB 1 Ag. 1888, no. 2, yang menyatakan bahwa Minah telah dianugerahi medali perunggu.

[5] MR, No. 1336 (1889), hal. 17; Laporan DDI, hal. 10 - 17. Lihat juga PV 3 Jan. 1889; PV 26 Maret 1889, dalam Exh. 14 Mei 1889, no. 121.

[6] Sebab-sebab ketidakpuasan di kalangan rakyat, dengan tekanan khusus pada kekurangan-kekurangan Raden Penna, dikemukakan dalam tiga surat kaleng dan surat yang dikirimkan oleh H. Mohamad; lihat di alas, Bab III, di bawah catatan no. 61.

[7] Menurut salah satu surat kaleng itu, rapa-rupanya pada tanggal 15 Juni 1888, asisten wedana Grogol, Mas Salim, telah minta perhatian Patih terhadap desas-desus yang tersiar di kalangan takyat mengenai akan terjadinya huru-hara itu; lihat Renvooi Pemerintah tanggal 26 luli 1888, no. 13079, dalam Laporan DDI, Appendix 1.

[8] MR, No. 1336 (1889), hal. 19; Laporan DDI, hal.14.

[9] Minah dibawa pulang oleh suaminya, Kamid, dan kemudian, pada tanggal 13 Juli dibawa ke rumah sakit di Serang, di mana ia dirawat sampai tanggal 17 September; bayi meninggal dunia pada tanggal 24 Juli; lihat IWR, No. 1337 (1889), hal. 21; juga Surat resmi dari Direktur Departemen Dalam Negeri, 1 Juli 1888, L^{a}L., dalam Vb. 7 Feb. 1889, no. 4. Menurut apa yang dikisahkan oleh paman Djajadiningrat, maka Minah, meskipun sudah luka-luka di banyak bagian tubuhnya, masih dapat sampai di Serang, lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 41. Mengingat akuratnya data-data lain di dalam surat resmi tersebut di atas, dan bukti-bukti yang diberikan oleh informan-informan lainnya, di antaranya Raden Saca dan Minah sendiri, maka rekonstruksi yang pertama tentang peristiwa itu lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan yang kedua.

[10] Orang yang dicurigai itu, Kamid, adalah orang yang lama dengan yang disebut-sebut di bawah catatan no. 9, yakni suami Minah; lihat Laporan DDI, hal.19.

[11] Gardu tersebut berdiri di persilangan antara jalan raya pos dari Anyer ke Serang dan jalan dari Balagendung ke Bojonegoro; sebuah gambar mengenai gardu itu dapat dilihat dalam A. Djajadiningrat (1936), menghadap halaman 113; lihat juga gambar peta Cilegon.

[12] Mengenai Lurah Jasim, lihat PV 15 Jan. 1889, dalam Exh. 6 Mater 1889, no. 85.

[13] IWR, No. 1336 (1889), hal.18.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem; lihat juga A. Djajadiningrat (1936), hal. 42 - 43.

[18] IWR, No. 1336 (1889), hal.19.

[19] Lihat EI, IV (1934), hal. 25; lihat juga komentar Snouck Hurgtonje mengenai syahadat, dalam VG, Vol. IV, bagian I (1924), hal. 11-16.

[20] Mary Bachet berusia sekitar 16 tahun, dan Anna Canter Visscher sekitar 13; lihat A. D]ajadiningrat (1936), hal. 44.

[21] IWR, No. 1336 (1889), hal. 20; lihat juga Laporan DDI, hal. 49.

[22] Lihat De Locomotief, 18-20 dan 23 Juli 1888; laporan tentang peranan Asisten Wedana agak disangsikan, baik data-data maupun interpretasinya sesungguhnya tidak tepat. Ia adalah bekas asisten wedana Merak, bukan Banjarnegara (sic).

[23] Edisi-edisi berikutnya dari surat-kabar itu membantah interpretasi tersebut, lihat De Locomotief, 21 dan 23 Juli;10 Ag., I Okt. 1888.

[24] Informasi mengenai siapa yang akan menjadi raja simpang siur; H. Wasid sering kali disebut-sebut, lihat IWR, No. 1336 (1889), hal. 20; juga IWR No. 1337 (1889), hal. 22 Kiyai Haji Tubagus Ismail disebut-sebut dalam Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, lihat Laporan DDI, hal. 9; Agus Swadikaria dalam Laporan DDI, hal. 69.

[25] Laporan DDI, hal. 39 - 40; juga IWR, No. 1336 (1889), hal. 19. Sejak semula sudah diputuskan bahwa wanita dan anak-anak tidak akan diganggu. Rupa-rupanya, dalam perkembangan selanjutnya kaum pemberontak tingkat bawahan tidak dapat dikendalikan lagi, maka dari itu terjadi serangan terhadap wanita dan anak-anak.

[26] Bandingkan kesaksian Kamad dengan kesaksian Mohamad Said, lihat IWR, No. 1336 (1889), hal. 19. Apakah Nyai Kamsidah bersalah telah membunuh istri Gubbels atau tidak menjadi satu persoalan besar; lihat Surat resmi dari Gubernur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan, 15 Juni 1889, dalam Vb. 22 JuG 1889, no. 87;lihat juga artikel dalam Bataviaasch Handelsblad, 14 Juni 1889.

[27] Sumber-sumber yang ada tidak memberikan petunjuk mengenai nasib anak perempuan Ajun Kolektor.

[28] Lihat PV 3 Jan. 1889; juga PV 23 Jan. 1889, dalam Exh. 11 Feb. 1889, no. 77.

[29] Lihat PV 3 Jan. 1889; Tahanan yang dibebaskan seluruhnya berjumlah 20 orang, lihat Laporan DDI, hal. 36.

[30] IWR, No. 1336 (1889), hal. 20; Laporan DDI, hal. 49.

[31] Menutut kesaksian Usup dari Jombang Wetan, H. Wasid telah mengatakan bahwa semua orang yang hidup dari gaji pemerintah harus dibunuh, lihat Appendix VIII.

[32] Karena suasana menjadi gaduh disebabkan oleh kedatangan istri Dumas, lihat IWR, No. 1336 (1889), hal. 20.

[33] IWR, No. 1336 (1889), hal. 19 - 20; Shat juga PV 23 dan 1889 dan PV 30Jan.1889, dalam Exh.19 Maret 1889, no. 53.

[34] Laporan DDI, hal. 43 - 44; IWR, No. 1337 (1889), hal. 21.

[35] Kesaksian-kesaksian lain menyebut-nyebut K.H.T. Ismail sebagai calon raja dan H. Wasid sebagai patihnya, lihat Appendix VIII.

[36] Ibidem.

[37] Surat dari Wedana kepada Gubbels hilang sebelum diadakan penyelidikan, lihat Laporan DDI, hal. 54.

[38] IWR, No. 1336 (1889), hal. 20;juga Laporan DDI, hal. 53.

[39] Laporan DDI, hal. 59.

[40] PV 30 Jan. 1889.

[41] Istri Dumas baru ditangkap ketika ia ditemukan sedang bersembunyi di sebuah kamar di Kepatihan, dan tidak - sebagaimana diceritakan oleh paman Djajadiningrat - ketika ia sedang melarikan diri dari rumahnya tidak lama setelah terjadi serangan di malam hari itu, lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 41; cf. IWR, No. 1336 (1889), hal. 18 dan Laporan DDI, hal. 61.

[42] Menurut kesaksian Mary Bachet sendiri, lihat IWR, No. 1336 (1889), hal. 20; lihat juga A. Djajadiningrat (1936), hal. 43.

[43] Seorang anak *tali-api* bertugas memberi api kepada orang-orang yang merokok dalam jamuan. Lihat Laporan DDI, hal. 69.

[44] Laporan DDI, hal. 69-72; menurut laporan itu, juga bebetapa arsip desa telah dibakat.

[45] IWR, No. 1336 (1889), hal. 18.

[46] Mengenai seluruh "petualangan" Raden Penna, lihatIWR, No. 1337 (1889), hal. 21, dan Laporan DDI, hal. 69 - 72.

[47] Laporan DDI, hal. 70; lihat IWR, No. 1337 (1889), hal. 22; PV 30 Jan 1889 dan juga PV 26 Maret 1889, dalam Exh.14 Mei 1889, no. 121.

[48] PV 30 Jan. 1889; PV 26 Maret 1889.

[49] PV 15 Jan. 1889, dalam Exh. 6 Maret 1889, no. 85; Laporan DDI, hal. 70.

[50] PV 30 Jan. 1889;IG (1891), no. 2, hal.1180.

[51] PV 3 Jan. 1889; PV 23 Jan. 1889; PV 30 Jan. 1889; PV 26 Maiet 1889.

[52] Surat resmi dari Residen Banten, 2 Mei 1889, no. 124, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. ?6; mengenai H. Abubakat, lihat Surat resmi dari Residen Banten, 3 Apr. 1889, no. 96, dalam Exh. 20 Mei 1889, no. 76.

[53] Surat resmi dari Residen Banten, 2 Mei 1889, no. 124.

[54] Ibidem.

[55] PV 18 Maret 1889, dalam Exh. 2 Mei 1889, no. 63.

[56] PV 23 Sept. 1889, dalam Exh. 23 Nov. 1889, no. 65.

[57] Surat resmi dari Residen Banten, 3 Apr. 1889, no. 96.

[58] IG (1891), no, 2, hal. 1184; mengenai kegiatan-kegiatan persiapan di Trumbu, Bendung, Kaujon, Kaloran, Lihat PV 18 Maret 1889; PV 3 Juni 1889, dalam Exh. 24 Juli 1889, no. 77; juga Surat resmi dari Residen Banten,2 Mei1889,no.124.

[59] PV 18 Maret 1889.

[60] Satu-satunya pasukan pemberontak dari luar daerah tersebut adalah pasukan di bawah pimpinan H. Muhidin dari Cipeucang, sebuah desa di Kabupaten Pandeglang; tidak ada tanda-tanda kegiatan pemberontakan di bagian timur Kabupaten Serang. Kenyataan itu mungkin ada kaitannya dengan kebetangkatan H. Marjuki tidak lama sebelum pemberontakan dimulai; lihat di atas, Bab VI hal. 253. Mengenai Pandeglang. Penduduk di sana mengikuti jejak H. Sahib yang kelihatan merasa segan untuk ikut dalam pemberontakan; lihat Snouck Hurgronje dalam Gobee dan Adriaanse Vol. 111 (1965), hal.1966.

[61] IG (1891), no. 2, hal. 1164; laporan Ditektut Departemen Dalam Negeri hanya menyebutkan sejumlah orang; lihat Laporan DDI, hal. 11

[62] IB (1891), no. 2, hal.1167.

[63] PV 23 Sept. 1889.

[64] Surat resmi dari Residen Banten, 2 Mei 1889, no. 124.

[65] Laporan DDI, hal. 52.

[66] Laporan DDI, hal. 77.

[67] IG (1891), no.2, hal. 1176

[68] Umpamanya Samad dan Agung, yang menerangkan bahwa mereka dipaksa oleh Lurah Kasar untuk ikut dalam pemberontakan, lihat PV 3 Jan. 1889.

[69] Yang disebut pertama adalah nama baru untuk Medang Batu, yang sudah sangat terkenal sebagai pusat gerakan-gerakan pemberontakan; banyak keturunan H. Wakhia dari pemberontakan tahun 1850 ikut dalam pemberontakan tahun 1888, umpamanya kedua

anaknya yang perempuan, Nyi Aminah dan Nyi Rainah; anaknya yang laki-laki, Mesir; menantunya, Sakib, dan cucunya Abdurrakhman, anak Nyi Rainah. Lihat catatan dalam PV 26 Maret 1889.

[70] Beberapa contoh : Kamud dari Beji, Nuri)a dari Citangkil, Jasim dari Dukuhmalang; lihat PV 15 Jan. 1889; jaro.jaro dari Masjid, Priyaji, dan Kusambi Saba; lihat PV 18 Maret 1889; Saleh dari Trumbu, Chat PV 23 Sept. 1889.

[71] Mas Mohamad Kasim, seorang bekas juru tulis jaksa, ikut dalam pembunuhan terhadap Gubbels, menutut kesaksian istri Dumas; dalam sidang-sidang pengadilan berikutnya ia menyangkal kesaksiannya sendiri; lihat PV 2Jan.1889.

[72] Lim Kim Soei dari Serang, yang kebetulan sedang berada di Bojonegoro diganggu dan rambutnya dipotong; lihat PV 15 Jan. 1889. Menurut kesaksian Tan Keng Hok, toko-toko Cina di pasar telah diranjah, lihat IWR, No. 1336 (1889), hal 18. Juga ada laporan yang menyatakan bahwa orang-orang Cina dipaksa untuk masuk Islam lihat A. Djajadiningrat (1936), hal.42.

[73] Namanya adalah Syekh Said bin Salim Madshi, dan ia datang dari Batavia; lihat Laporan DDI, hal. 68.

[74] Dari uang di kantor Ajun Kolektor, sekurang-kurangnya f 734,34 dan dari uang Kepala Penjualan Garam, F?35,35: lihatIWR, No. 1337 (1889), hal. 22. Kerugian yang diderita istri Dumas ditaksir berharga sekitar f. 1.400, kerugian istri Ajun Kolektor sekitar f 2.500 : lihat IWR, No.1336 (1889), hal.18; No' 1447 (1889), hal. 21.

[75] Sepucuk pistol telah dicuri ketika sedang dilancarkan serangan terhadap rumah Asisten Wedana Mancak; lihat PV 23 Jan. 1889. Kasus mengenai kaus kaki sutra kepunyaan Patih yang ditemukan di rumah Kamidin tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan; lihat PV 3 Jan. 1889.

[76] Uang itu dibagi-bagikan di antata kaum pemberontak sebelum mereka berangkat menuju Serang, lihat Lapotan DDI, hal. 60.

[77] IWR, No. 1336 (1889) Hal. 18. Pelbagai peristiwa kejahatan yang terjadi selama pemberontakan mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa di antara kaum pemberontak terdapat perampok, penjudi dan penjahat-penjahat lain, lihat A. Djajadiningtat (1936), hal 42.

Bab VIII

PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DAN KELANJUTANNYA

Distrik-distrik di bagian barat afdeling Serang dapat dianggap merupakan bagian dari daerah utama pemberontakan bulan Juli 1888. Sebelum gelombang pemberontakan dapat mencapai ibukota Keresidenan Banten, reaksi dari pihak pemerintah sudah berjalan. Seperti telah dikisahkan dalam Bab terdahulu, pada saat daerah di sekitar Serang hendak meledak menjadi suatu pemberontakan umum, kaum pemberontak menerima kabar buruk bahwa pasukan induk mereka telah dibubarkan. Tanda-tanda akan terjadinya huru-hara segera mereda dan pemberontakan tidak terjadi di Serang.

Setelah Cilegon diduduki dan diranjah, kaum pemberontak bergerak menuju Serang. Seperti telah kita ketahui, Haji Wasid memimpin anak-buahnya menuju kota itu pada sore hari itu juga, tanggal 9 Juli. Sejak sernula pemimpin pemberontak itu, tak disangsikan lagi telah merencanakan hendak merebut ibukota keresidenan itu dan membantai pamongprajanya, baik yang Eropa maupun yang pribumi. Sementara kaum pemberontak sedang merajalela di Cilegon, semua pasukan pemberontak dari Trumbu dan Bendung dipusatkan di Kaloran dan Kaujon - di pinggir kota Serang - dan bersiap-siap hendak menyerbu kota itu. Tidaklah mungkin untuk memastikan bagaimana kesudahan pemberontakan itu andaikata pasukan-pasukan tersebut diperintahkan memasuki kota. Mengingat hal itu, menjadi jelaslah bahwa pertempuran antara kaum pemberontak dan pasukan tentara di Toyomerto merupakan peristiwa yang sangat penting yang menentukan jalannya pemberontakan. Seandainya pertempuran di Toyomerto berkesudahan lain, maka kaum pemberontak tentunya akan berusaha menduduki Serang sesuai dengan rencana mereka dan membantai pamongpraja yang begitu mereka benci. Dalam kenyataannya, rencana-rencana kaum pemberontak seperti yang diungkapkan dalam sidang-sidang pengadilan di kemudian hari sedikit pun tak memberikan informasi tentang kekejaman-kekejaman yang dimaksudkan itu, yang akan dilakukan apabila mereka berhasil menduduki Serang.[1]

PERTEMPURAN DI TOYOMERTO

Bagaimanapun, pada petang hari tanggal 9 Juli kaum pemberontak diliputi semangat yang tinggi dan merasa yakin bahwa tidak lama lagi mereka akan berada di Serang. Sepanjang pagi hari itu, seperti telah kita lihat, pasukan pemberontak satu demi satu berangkat menuju ibukota; mereka membentuk satu barisan dan, di bawah pimpinan Haji Wasid dan kawan-kawannya, maju terus. Di pagi hari itu juga, setelah mereka menyadari bahwa apa yang mereka sedang hadapi itu bukan sekedar soal perampokan, pejabat-pejabat di Serang memutuskan untuk mengirimkan sepasukan tentara dengan 28 senjata api untuk memulihkan ketertiban di Cilegon. Ke sanalah Bupati dan Kontrolir Serang, bersama-sama dengan Letnan van der Star - komandan pasukan - memimpin pasukan tentara itu.[2] Pada saat pemerintah sudah memulai tindakan-tindakan penumpasannya itu, pasukan-pasukan pemberontak baru saja mulai bergerak ke arah Kramat Watu. Dalam perjalanan dari Serang itu, Bupati dan Kontrolir duduk bersama dalam salah satu dokar. Mereka berangkat dari Serang sekitar pukul satu tengah hari, dan beberapa mil jauhnya melalui jalan yang rata dan lurus yang menuju kaki pegunungan Cilegon. Iring-iringan dokar militer itu baru diganggu setelah mereka melalui Pelabuhan. Mereka sedang mendekati tempat mereka harus melewati jalan yang lekung, ketika dengan tiba-tiba mereka

diserang oleh kaum pemberontak yang menghujani mereka dengan batu dari atas lereng-lereng bukit. Serdadu-serdadu membalas dengan beberapa tembakan, dan itu sudah cukup untuk menghalau kaum pemberontak dari jalan. Beberapa tembakan lagi dilepaskan ke arah pemberontak-pemberontak yang sedang melarikan diri, yang lalu menghilang di batik pepohonan.[3] Setelah terhindar dari penghadangan itu, konvoi meneruskan perjalanan menuju Cilegon dalam keadaan siap siaga dan siap tempur. Ketika mereka mendekati Toyomerto, mereka melihat kerumunan orang-orang bersenjata yang menutup jalan. Sementara pasukan tentara mendekat, kaum pemberontak mendapat balabantuan dari pelbagai jurusan. Menurut perkiraan semuanya berjumlah dua atau tiga ratus orang. Pada jarak sekitar dua ratus meter dari kerumunan orang itu, Bupati dan Kontrolir turun dari dokar dan menghampiri mereka. Bupati berusaha membujuk mereka agar tidak meneruskan rencana mereka, akan tetapi sia-sia; kaum pemberontak menjawab dengan teriakan-teriakan "Sabil Allah" yang berapi-api. Bupati memperingatkan bahwa tentara akan melepaskan tembakan jika mereka tidak bubar, dan memerintahkan kepada mereka supaya meletakkan senjata. Akan tetapi peringatannya itu tidak diindahkan dan sebagai tantangan sebuah tembakan dilepaskan ke arah Bupati dan Kontrolir. Oleh karena kedua orang itu takut dikepung oleh kerumunan pemberontak, pimpinan diambil alih oleh van der Star, yang tiga kali memerintahkan kaum pemberontak supaya bubar. Lalu tentara melepaskan tembakan; mereka menewaskan sembilan pemberontak dan melukai banyak lainnya. Sisanya melarikan diri sambil berlindung di belakang pepohonan.[4] Ketika patroli menghampiri tempat pemberontak-pemberontak yang kena tembakan menggeletak, salah seorang di antara korban-korban itu melompat dan menerjang barisan depan tentara dengan kelewangnya. Pergulatan singkat berlangsung antara penyerang itu dan seorang kopral bernama Daams. Beberapa detik kemudian serentetan tembakan dilepaskan ke arah pemberontak itu yang tewas seketika.[5] Setelah insiden ini, tentara dapat maju langsung ke Cilegon.

Kaum pemberontak mengalami satu pukulan yang hebat ketika mereka menyadari bahwa, walaupun mereka yakin akan kekebalan mereka terhadap peluru musuh, tak urung bentrokan dengan tentara pemerintah di Toyomerto berakhir dengan tewasnya sejumlah kawan seperjuangan mereka di samping banyak lainnya yang luka-luka. Selain dari itu, mereka sangat terkejut ketika untuk pertama kalinya melihat senapan jenis baru - yakni senapan repetir - yang digunakan oleh tentara pemerintah, dan bukan lagi senapan *achterladar* yang digunakan oleh tentara pemerintah pada waktu terjadinya pemberontakan Wakhia dalam tahun 1850.[6] Efeknya adalah suatu psikosis yang meluas di kalangan pemberontak yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap kecewa; dan sebagai akibatnya, mereka kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangan guna mencapai cita-cita pemberontakan.

Sesungguhnya moril kaum pemberontak dapat dikatakan sudah dipatahkan dan dengan bercerai-berainya pasukan induk mereka setelah bentrokan di Toyomerto itu, pemberontakan mulai surut. Oleh karena itu kekalahan di Toyomerto dapat dianggap sebagai titik batik dalam jalannya pemberontakan itu.

OPERASI PERTOLONGAN

Sekitar pukul empat sore, patroli memasuki pusat kekacauan, Cilegon. Begitu mendengar kabar tentang kedatangan mereka, para tawanan yang ditinggalkan oleh kaum pemberontak yang melarikan diri, bergegas menyongsong mereka. Penduduk setempat, yang tetap tinggal di kota, mundur ketika pasukan tentara mendekat, tanpa menunjukkan sikap melawan sedikit pun. Induk pasukan pemberontak yang bertugas menjaga Cilegon malahan sudah melarikan diri ke luar kota. Tentara berbaris menuju penjara, membuat pertahanan dan menyiapkan persediaan bahan makanan untuk beberapa hari dengan jalan mengambil kambing, ayam dan batas dari kampung-kampung yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Sepanjang malam hari dari tanggal 9 sampai 10 Juli segala sesuatunya nampak tenang di Cilegon, hanya terdengar beberapa tembakan yang dilepaskan oleh penjaga ke arah segerombolan pemberontak yang terlihat di dekat penjara.[7] Oleh karena pasukan tentara itu tidak besar, maka banyak

pemberontak menjadi berani lagi dan mereka membuat rencana untuk melakukan serangan mendadak terhadap pasukan itu pada malam hari. Sekitar tengah malam sejumlah besar pemberontak di bawah pimpinan Haji Wasid dan Kiyai Haji Tubagus Ismail berkumpul di alun-alun. Dua kali mereka mencoba mendekati penjara, akan tetapi tiap kali beberapa tembakan sudah cukup untuk menghalau penyerang-penyerang itu. Sekitar pukul tiga dinihari kaum pemberontak menembaki penjaga; akan tetapi serangan yang diperkirakan akan segera terjadi, tak kunjung datang. Kaum pemberontak menghilang dalam gelap malam. Tak disangsikan lagi bahwa tak seorang pun di dalam penjara dapat tidur nyenyak pada malam itu.[8] Keesokan harinya datang seorang kurir dari Serang membawa kabar bahwa balabantuan dari Batavia sudah dalam perjalanan. Perlu dicatat bahwa baru sekitar pukul 10.30 pagi hari dan itu pun setelah ditawarkan hadiah sebesar lima puluh gulden, ada orang yang bersedia membawa sebuah pesan tertulis ke Serang. Hal itu tidak mengherankan, oleh karena mereka mengetahui bahwa masih banyak pemberontak yang berkeliaran. Sementara itu, istri-istri dan anak-anak para pejabat yang telah dibunuh keluar dari persembunyian mereka dan mencari perlindungan di penjara. Berangsur-angsur rakyat berdatangan untuk minta perlindungan tentara. Kepala Desa Jombang Wetan, atas nama penduduk desanya, minta agar mereka diizinkan kembali ke rumah mereka masing-masing. Perlu diketahui, bahwa selama terjadi huru-hara bagian terbesar dari mereka telah melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain. Permintaan itu diluluskan dengan syarat bahwa penduduk desa itu harus menyumbangkan tenaga kerja untuk keperluan operasi pertolongan - seperti mengubur mayat - dan bahwa kepala desa itu sendiri akan dijadikan sandera untuk menjamin kelakuan baik penduduk desanya.[9]

Di sini kita akan beralih ke kisah mengenai sebuah tim pertolongan lainnya yang tiba di Cilegon pada hari yang sama, tanggal 10 Juli. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, setibanya di Anyer Lor pada hari Senin tanggal 9 Juli, Raden Penna dengan terburu-buru mengumpulkan orang-orang yang bersedia menyertainya untuk segera berangkat menuju Serang. Dalam keadaan ketakutan setelah mendengar cerita tentang peristiwa yang menyeramkan di Cilegon, kebanyakan orang Eropa di Anyer Lor tidak hanya menolak untuk ikut malahan mencari perlindungan di kapal Jerman "Elisabeth" yang sedang bersauh di pelabuhan.[10] Keesokan harinya Raden Penna. dan van Rinsum berhasil mengumpulkan sekitar tiga belas orang; mereka berangkat menuju Cilegon, dengan hanya bersenjatakan 2 senapan *Beaumont*, 2 senapan berburu, 2 senapan lantakan dan beberapa tombak. Mereka menggunakan dokar sampai Cigading; selanjutnya mereka berjalan kaki. Antara Anyer Lor dan Cigading mereka tak melihat manusia seorang pun, akan tetapi ketika mereka sudah sampai di dekat Cilegon mereka melihat di kejauhan kerumunan orang yang kemudian bubar ketika detasemen dari Anyer Lor itu mendekat. Mereka juga mendengar dua tembakan meriam, akan tetapi baru setelah mereka sampai di Cilegon mereka mengetahui bahwa sebuah patroli militer dari Serang sudah tiba duluan di sana.[11] Tidak lama setelah Raden Penna dan pasukannya sampai di Cilegon, satu pasukan besar kaum pemberontak di bawah pimpinan Haji Sapiudin dari Leuwibeureum melintasi jalan raya antara Anyer dan Cilegon, dan bergerak ke utara. Ketika mendengar kabar itu, Raden Penna dan pasukannya menyadari bahwa mereka telah lolos dari satu bahaya yang besar.[12]

Pada pagi hari itu juga sepasukan tentara dari Batavia, yang berkekuatan satu batalyon, mendarat di pelabuhan Karangantu. Kedua tembakan meriam tersebut di atas sebenarnya dimaksudkan sebagai tanda kedatangan mereka. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah skadron kavaleri juga sudah dalam perjalanan menuju Serang.[13] Pengiriman detasemen-detasemen tentara yang kuat itu disebabkan oleh tersiarnya desas-desus yang sampai di Batavia yang menyatakan bahwa pemberontakan sudah berkobar di seluruh Banten dan bahwa Serang sedang dikepung oleh lima ribu orang pemberontak.[14] Pengiriman balabantuan yang begitu kuat itu untuk sebagian juga disebabkan karena pemerintah pusat telah menerima informasi yang samar-samar dari pejabat-pejabat di Banten selama hari-hari pertama pemberontakan.[15] Setelah turun dari kapal, kompi pertama diperintahkan menuju Serang dan dari sana melanjutkan perjalanan ke Cilegon. Ketika detasemen itu bergerak menuju Serang, banyak orang berdiri di sepanjang jalan. Baru kemudian diketahui bahwa mereka bukan sekedar penonton, melainkan partisan-partisan dari Trumbu dan Kaganteran yang bermaksud menyerang pasukan tentara itu dalam perjalanan mereka. Bahwasanya hal itu tidak sampai

terjadi mungkin disebabkan besarnya pasukan itu yang membuat kaum pemberontak membatalkan niat mereka.[16]

Mengenai nasib kaum pemberontak setelah terjadi bentrokan di Toyomerto, hanya sedikit saja yang dapat kita ketahui. Rupa-rupanya bagian terbesar dari mereka bubar setelah bentrokan yang celaka itu. Dengan larinya banyak pemimpin mereka, induk pasukan pemberontak dibubarkan. Akan tetapi pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka masih mempunyai sejumlah besar anak buah. Mereka membentuk pasukan yang rupa-rupanya telah mencoba menyerang penjara Cilegon pada malam hari Senin. Mereka nampaknya tetap berada di pinggir kota Cilegon selama sebagian dari hari berikutnya. Menurut laporan, pada hari itu kaum pemberontak mulai memusatkan kekuatan mereka dengan maksud menyerang Cilegon untuk kedua kalinya. Kedua tembakan meriam tersebut di atas telah menimbulkan kebingungan yang besar di kalangan pemimpin-pemimpin pemberontak. Haji Wasid dan banyak haji lainnya berpendapat bahwa kedua tembakan meriam itu merupakan isyarat kedatangan Kiyai Agung, Haji Marjuki, dan syekh-syekh lainnya yang akan bergabung dengan mereka. Akan tetapi Agus Suradikaria tetap bersikeras bahwa tentara pemerintah kolonial sedang bergerak menuju Cilegon. Ia mengingatkan kembali bahwa dalam pemberontakan tahun 1850, pasukan tentara di bawah pimpinan Letnan Kolonel de Brauw telah mendarat di Bojonegoro; tindakan serupa mungkin telah diambil pula kali ini. Setelah mendengar penjelasan ini, banyak pemberontak dari distrik itu, yang lebih cenderung untuk mempercayai Suradikaria daripada Haji Wasid, cepat-cepat kembali ke desa mereka untuk menyelamatkan keluarga mereka.[17] Jelaslah bahwa dalam keadaan seperti itu, Haji Wasid terpaksa membatalkan samasekali rencana untuk melancarkan serangan yang kedua. Sesungguhnya inisiatif telah terlepas dari tangan kaum pemberontak dan sekarang beralih ke pihak pejabat-pejabat pemerintah, militer dan sipil. Dengan tibanya balabantuan dari Batavia, pejabat-pejabat pemerintah akhirnya merasa aman dan mulai merencanakan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk menawan pemimpin-pemimpin pemberontak yang masih berkeliaran dan untuk menindas kerusuhan-kerusuhan yang masih berkobar di beberapa tempat.

TINDAKAN EKSPEDISI MILITER

Untuk menumpas pemberontakan yang sudah hampir padam itu, dikirimkan pasukan-pasukan ekspedisi ke pelbagai jurusan. Pasukan-pasukan militer yang mengadakan patroli pada umumnya dimaksudkan untuk memamerkan kekuatan; selain itu mereka ditugaskan untuk melakukan penangkapan-penangkapan dan mengambil tindakan-tindakan terhadap kaum pemberontak. Meskipun tidak terlihat tanda-tanda adanya huru-hara setempat di daerah sekitar Serang, desa-desa di daerah itu setiap hari dilalui patroli-patroli militer, oleh karena dikhawatirkan bahwa kaum pemberontak akan menyerbu kota.[18] Patroli-patroli itu rupa-rupanya juga dimaksudkan untuk menenangkan banyak penduduk ibukota itu yang masih belum pulih dari kepanikan mereka. Pejabat-pejabat pemerintah, bersama-sama dengan satuan-satuan militer, benar-benar sibuk dengan usaha untuk memulihkan ketentraman di afdeling Cilegon, mengingat bahwa pemberontakan yang telah melanda daerah itu sangat hebat. Sasaran pertama operasi pasukan-pasukan ekspedisi itu adalah desa-desa asal pemimpin-pemimpin terkemuka pemberontak, oleh karena pasukan yang melakukan pengejaran nampaknya telah kehilangan jejak mereka, sedangkan informasi yang diberikan oleh penduduk sering kali sangat menyesatkan.[19] Usaha pencarian yang dilancarkan di daerah sekitar desa-desa asal pemimpin-pemimpin pemberontak itu lebih berhasil oleh karena daerah-daerah itu telah dijadikan pangkalan operasi pemberontak. Untuk tujuan kita, kita tidak perlu mengikuti semua gerakan ekspedisi militer itu; cukup jika kita mengemukakan beberapa saja di antaranya.

Tidak lama setelah tiba di Cilegon, Residen Banten dan pejabat-pejabat lainnya mengadakan pembicaraan mengenai situasi dan tindakan penumpasan yang akan diambil. Oleh karena menurut informasi yang mereka terima, banyak pemberontak, termasuk pemimpin-pemimpin mereka yang terkemuka, telah mengundurkan diri ke Beji, mereka memutuskan untuk mengirimkan sebuah detasemen penghukum ke sana dengan perintah untuk menangkap

pelarian-pelarian itu. Sesuai dengan keputusan itu, maka beberapa saatt lewat tengah malam pasukan pertama di bawah pimpinan Kapten de Brauw [20] bergerak ke utara melalui desa-desa : Kapendilan, Beberan, Tangkurak, Kubanglaban Lor, lalu membelok ke timur melalui Kajuruan dan Kubangwatu sampai di Gunungsantri Kulon, di mana mereka berhenti sampai fajar. Pasukan harus bergerak maju dengan hati-hati sekali oleh karena banyak di antara penduduk desa-desa itu telah ikut aktif dalam pemberontakan. Ketika mereka melewati desa Kajuruan mereka melihat lampu masih menyala di rumah-rumah dan penduduk masih belum tidur. Nampaknya banyak penduduk sedang berkumpul, termasuk orang-orang dari desa-desa lain. Tiba-tiba dua orang yang bersenjata kelewang tampil ke depan. Kontrolir minta agar mereka menyerah dan meletakkan senjata. Mendengar seruan itu, kedua orang melompat maju sambil mengayunkan kelewang. Tentara melepaskan tembakan ke arah mereka. Kontrolir lalu memerintahkan penduduk agar tinggal di rumah masing-masing, dan siapa yang membangkang akan ditembak mati. Peringatan itu berhasil dan orang-orang cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing. Terkecuali insiden ini, tidak nampak adanya perlawanan; penduduk desa hanya mundur.[21] Jalan besar ke Beji melalui Gunungsantri Kidul, akan tetapi pasukan itu tidak menempuh jalan ini, melainkan memilih jalan yang mengitar dan lebih berat. Hal itu dilakukan karena dikhawatirkan penduduk Gunungsantri Kulon akan dikagetkan oleh kedatangan mereka. Kira-kira pada saat fajar menyingsing mereka sudah sampai di pinggir persawahan yang mengelilingi Beji.

Sementara itu ada usaha lain untuk sampai di Beji melalui jalan lain. Usaha itu dilakukan oleh pasukan tentara di bawah pimpinan Kapten Hojel, Raden Penna dan van Rinsum, yang mengambil jalan pintas melalui Pecek, Tunggak, Wadas dan Gunungsantri. Mereka tiba di sebelah selatan Beji kira-kira pada waktu yang bersamaan dengan kedatangan pasukan di bawah pimpinan de Brauw. Sebuah satuan kavaleri ditempatkan di sebelah selatan desa itu.[22] Beji dikepung menurut rencana yang sudah dibuat, dan akan diserang pada saat matahari terbit. Persiapan-persiapan dilakukan secara rahasia agar tidak diketahui oleh penduduk Beji. Namun demikian, entah bagaimana, rupa-rupanya mereka telah mendapat peringatan tentang akan datangnya pasukan militer itu, oleh karena ketika pasukan memasuki Beji, mereka mendapatkan desa itu hampir kosong samasekali; yang mereka jumpai hanyalah orang-orang yang sudah tua atau yang sedang sakit. Melihat lampu-lampu yang masih menyala di rumah-rumah, besar kemungkinan penduduk telah meninggalkan rumah mereka secara tergesa-gesa. Ekspedisi telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Ketika serdadu-serdadu sedang menggeledah rumah-rumah, timbul kebakaran di salah sebuah rumah dan dalam waktu singkat seluruh desa terbakar habis. Menurut laporan, sebuah lampu telah jatuh tersenggol ketika sedang dilakukan penggeledahan.[23]

Setelah menerima laporan bahwa pemimpin-pemimpin pemberontak sedang bersembunyi di Ciora Kulon, pasukan bergerak ke barat, akan tetapi dalam perjalanan menuju desa itu diputuskan bahwa mereka terlebih dulu akan menuju Kedung dan Trate Udik. Kedua desa itu sangat terkenal karena di sana terdapat banyak pemberontak. Penduduk beberapa desa yang dilalui pasukan ketakutan ketika melihat tentara itu; mereka takut bahwa juga desa mereka akan dibakar. Oleh karena itu mereka berusaha keras untuk bersikap ramah dan menawarkan makanan dan minuman kepada anggota-anggota tentara itu. Akan tetapi di Kedung tak seorang pun nampak kecuali dua orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di pintu masuk desa. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah terlihat, mereka mencoba melarikan diri; seorang di antara mereka dapat ditangkap sedangkan yang lainnya menghilang di balik rumah-rumah. Desa itu lalu dikepung dan rumah-rumah digeledah, namun tanpa hasil apa-apa; orang yang melarikan diri itu tidak ditemukan. Pengurus desa lalu dipanggil dan diberi tahu bahwa desa akan dibakar habis apabila dalam tempo seperempat jam mereka tidak mengatakan di mana adanya orang yang melarikan diri itu. Batas waktu yang diberikan telah lewat dan mereka tidak mau memberitahukan tempat orang yang melarikan diri itu, maka desa itu dibakar. Beberapa saat kemudian orang tersebut dan banyak pemberontak lainnya keluar dari persembunyian mereka dan ditawan.[24]

Sasaran berikutnya adalah Trate Udik. Desa itu dikepung dan digeledah dengan seksama. Seorang bekas juru tulis desa memberitahukan tempat persembunyian Haji Mahmud, dan

serdadu-serdadu segera menuju tempat itu. Ia ditemukan sedang minum teh di rumahnya, dan di luar dugaan pengejar-pengejarnya, ia menyerah tanpa melawan sedikit pun. Pemburuan terhadap kaum pemberontak dilanjutkan akan tetapi tanpa hasil. Menghadapi "komplotan tutup mulut" dari pihak penduduk, pihak berwajib terpaksa mengambil tindakan-tindakan drastis. Di Trate Udik, seperti di tempat-tempat lainnya, rumah-rumah dibakar, dan semua penduduknya yang laki-laki ditawan. Setelah selesai melakukan tugas mereka, pasukan ekspedisi menuju Cilegon dengan membawa sekitar lima puluh orang tawanan.[25]

Pada tanggal 13 Juli, sebuah detasemen di bawah Letnan van Winning dikirimkan ke bagian barat daya Distrik Cilegon, oleh karena pemerintah telah menerima laporan bahwa suami-istri Grondhout telah dibunuh di dekat Kusambi Buyut. Pasukan itu melakukan penggeledahan namun tak berhasil, oleh karena penduduk setempat tidak mau memberitahukan di mana mayat kedua orang itu disembunyikan. Oleh karena itu, penduduk desa, termasuk pemuka-pemuka mereka, dicurigai bersekutu dengan kaum pemberontak. Dalam perjalanan ke dan dari Kusambi Buyut, pasukan menangkap dua orang haji dari Bangu, yang berpakaian seperti penduduk biasa; sesudah itu, dua pemberontak ditawan di Tegalwangi.[26] Wedana Kramat Watu memberitahukan kepada komandan pasukan bahwa baik Haji Wasid maupun Haji Kasiman tidak berada di sana. Seorang kemenakan Haji Kasiman mencoba melarikan diri ke sawah dan tidak mengindahkan perintah pasukan kavaleri untuk menyerah. Ketika ia merebut kendali salah seekor kuda untuk menjatuhkan penunggangnya, ia dirobohkan dengan sabetan kelewang dan ditawan. Rumah Haji Kasiman dibakar.[27] Perlu dikemukakan bahwa pada hari itu juga, sebuah detasemen lainnya dikirimkan ke Saneja dengan perintah untuk mengepung desa itu dan menawan Haji Iskak. Sudah tentu ia sudah melarikan diri.[28]

Operasi menegakkan hukum benar-benar berjalan lancar setelah tibanya pasukan ekspedisi di daerah itu. Selama tiga minggu mereka sibuk melakukan pengejaran di pelbagai distrik afdeling Cilegon. Baru pada minggu ketiga operasi pengejaran diperluas ke bagian barat Kabupaten Caringin dan Lebak. Boleh dikatakan tiap tempat yang dapat dijadikan tempat persembunyian pemimpin-pemimpin pemberontak digeledah. Para tawanan dan penduduk desa dipaksa untuk memberikan keterangan-keterangan yang memungkinkan dilakukannya penangkapan-penangkapan lebih lanjut. Akan tetapi pejabat-pejabat pemerintah segera berkesimpulan bahwa cara-cara itu tidak ada gunanya, oleh karena dalam kenyataannya mereka sering kali disesatkan oleh informasi-informasi palsu.[29]

Mari kita kembali ke operasi sehari-hari detasemen-detasemen tentara itu. Pada tanggal 14 Juli tentara diperintahkan bergerak ke tiga arah yang berlainan. Pasukan pertama di bawah komando Kapten Hojel bergerak ke arah Cibeber untuk mencari pemberontak-pemberontak yang luka dalam bentrokan di Toyomerto. Pagi hari itu juga pasukan itu kembali dengan membawa seorang laki-laki yang terluka dan sekitar 25 orang yang dicurigai. Sementara itu, sebuah detasemen lainnya bergerak ke arah Bagendung untuk meneruskan usaha mencari suami-istri Grondhout. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh dua orang tawanan yang hadir dalam peristiwa pembunuhan itu, pasukan ketiga ditugaskan menggeledah desa Tunggak, tempat Kiyai Tunggak yang luka-luka dan banyak partisan pemberontakan bersembunyi: Kiyai yang terkenal itu telah menghilang; hanya penduduk balk-baik saja yang masih tinggal. Dalam perjalanan kembali ke Cilegon, pasukan menggeledah dua desa lainnya, Mamengger dan Pecek, namun sia-sia. Hanya tiga orang yang dicurigai ditawan.[30]

Pengejaran dilakukan dengan gesit sekali, namun hasilnya rupa-rupanya cukup mengecewakan, karena mereka tidak berhasil menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak yang, sesudah selama satu minggu dikejar-kejar tanpa henti-hentinya, masih berkeliaran dengan bebas. Kisahnya, seperti yang dicatat dalam laporan harian tentara, cenderung membosankan oleh karena hanya menceritakan kegiatan patroli dan penggeledahan di desa-desa yang merupakan pekerjaan rutin. Sementara itu orang-orang yang ditawan sudah mencapai jumlah sekitar 150, akan tetapi, seperti telah dikemukakan di atas, tentara nampaknya telah kehilangan semua jejak pemimpin-pemimpin pemberontak yang terkemuka. Rumah mereka dan rumah anggota-anggota kerabat mereka yang dekat sudah kosong,[31] dan rupa-rupanya mereka selalu berhasil meloloskan diri setiap kali tentara mengepung desa mereka. Soal bagaimana caranya untuk dapat menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak itu benar-

benar memusingkan pejabat-pejabat pemerintah. Setelah pengejaran berlangsung selama satu minggu tanpa berhasil, semua kepala desa afdeling Cilegon dikumpulkan oleh Residen pada tanggal 17 Juli. Bupati Serang angkat bicara dan menjelaskan pandangan dan keputusan-keputusan pemerintah mengenai situasi. Dalam pidatonya itu ia menandaskan kewajiban mereka untuk membantu pemerintah dalam usaha mengejar dan menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak dan pengikut-pengikut mereka. Pemerintah menawarkan hadiah sebesar lima ratus gulden kepada barangsiapa dapat menyerahkan Haji Wasid, Kiyai Haji Tubagus Ismail dan tokoh-tokoh terkemuka tertentu dalam pemberontakan itu, dalam keadaan hidup atau mati. Kepala-kepala desa itu lalu menjanjikan bantuan mereka dengan menjawab serentak "inggih", tanpa menunjukkan sikap bersungguh-sungguh.[32]

PEMBERONTAK BERJUANG TERUS

Sebagai akibat dibakarnya desa-desa, kaum pemberontak terpaksa beralih ke strategi yang bersifat defensif semata-mata. Rencana Haji Wasid untuk bertahan di daerahnya sendiri - daerah sekitar Beji dan Gunung Gede - mendapat pukulan hebat, oleh karena ia kehilangan basis operasinya yang utama. la tidak mungkin mengerahkan kembali pasukan pemberontak dalam jumlah yang besar dan satu-satunya alternatif adalah melanjutkan perjuangan selama mungkin dengan menggunakan taktik kejar-lari. Setelah pasukan pemerintah menyerang daerah yang mempunyai arti paling penting bagi kaum pemberontak, mereka tanpa henti-hentinya mengejar pemimpin-pemimpin pemberontak yang masih berkeliaran dengan anak-buah mereka yang sedikit jumlahnya. Meskipun kampanye penumpasan yang pertama tidak begitu berhasil, namun pasukan-pasukan pemberontak yang paling besar sudah bercerai-berai. Pembakaran desa-desa yang dramatis benar-benar telah menyebabkan merosotnya moril penduduk setempat di satu pihak, dan memperkuat posisi pasukan-pasukan pemerintah dalam usaha menumpas pemberontakan di lain pihak. Selama berlangsungnya penumpasan pemberontakan, rakyat tetap bersikap pasif, meskipun mereka masih menunjukkan sikap baik yang hati-hati terhadap kaum pemberontak.

Sebelum kita melanjutkan kisah tentang nasib pemimpin-pemimpin pemberontak dan anak-buah mereka, perlu disebutkan adanya beberapa kerusuhan yang pecah secara terpisah satu sama lain setelah Cilegon diduduki oleh tentara. Meskipun berukuran sangat kecil, namun kerusuhan-kerusuhan itu perlu diperhatikan. Kerusuhan-kerusuhan itu membantu melengkapi gambaran mengenai situasi umum selama hari-hari yang bergolak itu. Jelaslah bahwa setelah terjadinya pemberontakan itu, timbul suatu kekosongan politik di seluruh afdeling Cilegon. Ada beberapa lamanya pejabat-pejabat pamongpraja tidak berani kembali ke pos mereka karena takut menjadi korban pembunuhan kaum pemberontak yang masih berkeliaran di daerah itu. Beberapa contoh menunjukkan bahwa ketakutan mereka memang berdasar. Perlu di ingatkan kembali bahwa para asisten wedana tegas-tegas telah menjadi sasaran pengejaran kaum pemberontak dan rumah mereka telah diranjah.[33] Meskipun kerusuhan-kerusuhan di Cilegon telah reda, seorang kepala sub-distrik di tempat yang terpencil, Gudang Batu, dikejar-kejar oleh gerombolan pemberontak yang bersembunyi di sana. Pihak berwajib menerima peringatan pada waktunya sehingga orang tersebut masih dapat diselamatkan oleh sebuah detasemen yang dipimpin oleh kepala desa Palamunan.[34] Kaum pemberontak yang mengundurkan diri juga beralih ke tindakan-tindakan sabotase, seperti membakar jembatan-jembatan di selatan Pecek.[35] Satu peristiwa kekerasan lainnya terjadi di Pasar Pulokali, di mana rumah mandor gardu dibakar. Tidak seorang pun dapat menjelaskan dengan pasti motif tindakan kekerasan itu. Mungkin ada sangkut-pautnya dengan permusuhan pribadi atau balas dendam.[36] Bagaimanapun, bagi pejabat-pejabat pemerintah menjadi jelas bahwa mereka tidak akan dapat memulihkan ketentraman dan ketertiban selama pengaruh setiap pemimpin pemberontak belum dihancurkan. Oleh karena itu, pengejaran terhadap mereka harus digiatkan. Dan itulah yang terjadi selama dua minggu terakhir bulan Juli.

Sekarang mari kita kembali ke kisah pemimpin-pemimpin pemberontak yang sedang diburu itu. Seperti telah dikemukakan di atas, induk pasukan pemberontak telah cepat-cepat

meninggalkan Cilegon, dalam ketakutan setelah mendengar kabar tentang akan datangnya tentara dari Batavia. Haji Wasid dan anak-buahnya pergi ke utara. Rupa-rupanya pada tanggal 11 Juli Haji Wasid berada di Kaligandu, sebelah barat Beji, di mana ia singgah sebentar di rumah Haji Nasiman. Keesokan harinya ia menuju rumah Haji Madam di Ciora Kulon. Dengan tergesa-gesa ia mengumpulkan kembali pasukannya yang berjumlah seratus lima puluh orang. pada tanggal 13 Juli pasukan Haji Wasid bergerak ke Gunung Gede, yang merupakan tempat yang baik sekali untuk bertahan.[37] Sementara itu mereka terus-menerus menghadapi kesulitan dan rintangan yang semakin besar. Dua contoh dapat disebutkan di sini tentara pemerintah telah membakar desa-desa tertentu di utara, sehingga kaum pemberontak kehilangan basis operasi mereka; selain dari itu dukungan dari pihak penduduk mulai berkurang, oleh karena mereka takut kepada tindakan-tindakan keras yang diambil oleh pemerintah.

Sesungguhnya, setelah dikejar terus-menerus sehingga mereka terpaksa bersembunyi di hutan-hutan, banyak di antara kaum pemberontak yang tidak saja kehilangan semangat untuk berjuang terus, akan tetapi malahan meninggalkan induk pasukan mereka. Meskipun demikian, dalam keadaan yang serba sulit itu, di mana semangat sudah merosot, masih ada pemimpin-pemimpin sejati yang mendorong pengikut-pengikut mereka agar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memulihkan kekuatan mereka, Soal yang paling penting yang dihadapi pemimpin-pemimpin pemberontak adalah cara apa yang paling baik untuk keluar dari keadaan pasif itu dan merebut kembali inisiatif. Mereka menyadari sedalam-dalamnya bahwa bagaimanapun mereka harus mencari pangkalan baru, oleh karena tetap tinggal di semenanjung kecil Gunung Gede berarti dikepung oleh pasukan pemerintah yang tak boleh tidak akan memusnahkan mereka. Daerah di mana kaum pemberontak akan dapat beroperasi dan mendapat dukungan kuat dari penduduk kiranya tak perlu dicari-cari lagi. Tidak ada daerah yang lebih cocok bagi stra.tegi mereka daripada daerah Balagendung. Dalam sejarah Banten daerah itu sudah terkenal sebagai pusat sekian banyaknya pemberontakan, dan pada waktu itu di sana terdapat sejumlah keluarga yang dengan bangga dapat menyebutkan tokoh-tokoh pemberontak yang terkenal di antara leluhur mereka.[38] Satu hal penting lainnya adalah bahwa daerah itu merupakan tempat asal Kiyai Haji Tubagus Ismail dan oleh karena itu dapat diharapkan bahwa ia akan bisa mengumpulkan pengikut yang banyak. Pendek kata, daerah itu memberikan kemungkinan yang cerah untuk menyusun sebuah pasukan revolusioner baru dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Berdasarkan pertimbangan.pertimbangan itu, pemimpin-pemimpin pemberontak memutuskan untuk meninggalkan daerah asal Haji Wasid - Semenanjung Gunung Gede - dan memindahkan pasukan mereka ke daerah Balagendung dengan melintasi jalan raya antara Anyer dan Serang, di satu tempat di sebelah barat. Ini berarti bahwa mereka harus dapat melintasi pinggiran daerah yang dikuasai oleh pasukan pemerintah. Satu rencana lainnya yang mempunyai arti strategis yang penting adalah usaha untuk membingungkan pengejar-pengejar mereka dengan jalan menyiarkan kabar angin dan informasi-informasi palsu mengenai di mana mereka berada. Pada tanggal 14 Juli, pasukan pemberontak menuruni lereng Gunung Gede dan berjalan ke arah pantai barat. Rupa-rupanya pada malam hari itu mereka berkemah di hutan dekat pantai, dekat muara Sungai Krenceng.[39] Baru dua hari kemudian pejabat-pejabat pemerintah menerima laporan bahwa Haji Wasid dan anak buahnya sedang berkemah di tempat itu. Akan tetapi pada tanggal 17 Juli, ketika pasukan ekspedisi tiba di sana, tempat perkemahan sudah kosong dan tentara hanya menemukan sejumlah makanan yang ditinggalkan oleh kaum pemberontak.[40] Dari jejak-jejak mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasukan pemberontak itu berkekuatan sekitar empat puluh sampai lima puluh orang. Sementara itu gerombolan tersebut sudah sampai di Ciasahan. Dalam perjalanan ke sana mereka melalui Kepuhdenok, Blokan dan Luwuk; pada saat itu Haji Kasiman sudah memisahkan diri dari pasukan untuk mencari Haji Kola. Oleh karena catatan-catatan yang ada tidak menyebut-nyebut soal ini, maka sulitlah diketahui apa yang mendorong Haji Wasid memberi tugas itu kepada saudaranya. Sesampainya di Ciasahan, kaum pemberontak berhenti di sebuah kebun pisang untuk bermalam.[41] Pada malam hari keesokannya mereka melanjutkan perjalanan menuju hutan-hutan Medang Batu. Sementara itu pasukan pemerintah cepat-cepat menuju Mancak setelah menerima laporan dari penduduk desa Citangkil. Ketika mereka sedang melakukan pencarian di tempat itu, mereka diberi tahu oleh patih Cilegon dan Pandeglang bahwa mereka telah mendapat laporan palsu dan bahwa pencarian selanjutnya

harus dilakukan di Ciora tempat tinggal banyak anggota kerabat Haji Wasid. Tentara lalu melancarkan pencarian yang seksama di Ciora dan Ciora Kulon, namun seperti telah diperkirakan semula mereka tak memperoleh hasil apa-apa.[42] Padahal patih Pandeglang, Raden Surawinangun, telah melalui daerah Medang Batu dalam perjalanannya ke Cilegon dan tentunya telah mendapat laporan mengenai Haji Wasid yang sedang bergerak di daerah itu. Dan memang penduduk setempat telah memberitahukan kepada Patih bahwa Haji Wasid telah berangkat menuju Gunung Gede dan pada saat itu mungkin berada di Ciora.[43] Kira-kira pada waktu itu tersiar desas-desus yang menyatakan bahwa Haji Wasid telah pergi ke Batavia dan bermaksud menuju Mekah dengan menumpang sebuah kapal Perancis.[44] Kedua kabar itu tidak perlu bertentangan satu sama lain oleh karena mungkin saja Haji Wasid telah berlayar ke Batavia dengan menumpang perahu dari salah satu desa pesisir di daerah Gunung Gede.

Setelah menerima laporan-laporan itu, pihak berwajib semakin bulat tekadnya untuk menangkap pemberontak-pemberontak tersebut. Pada tanggal 18 Juli dikirimkan dua detasemen dengan tugas memburu dan menangkap kaum pemberontak. Mereka menurut rencana akan mengepung Bojonegoro; patroli yang dipimpin oleh van Rinsum menghampiri desa itu dari sebelah barat, sementara patroli yang dipimpin oleh Hermens mendekat dari sebelah timur. Kedua detasemen memasuki desa, yang kelihatannya tentram dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehadiran kaum pemberontak.[45] Keesokan harinya, tanggal 19 Juli, kedua patroli bergerak ke Ciora, di mana detasemen yang ketiga akan bergabung dengan mereka dalam operasi pencarian di dalam desa. Selama dua hari berturut-turut Ciora merupakan gelanggang pemburuan terhadap kaum pemberontak. Juga pencarian yang seksama itu tidak menghasilkan apa-apa.[46] Pemerintah lalu menaikkan hadiah yang dijanjikan kepada orang yang dapat menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak menjadi seribu golden untuk tiap orang.[47]

Sementara pasukan-pasukan tentara sibuk mengejar kaum pemberontak, Haji Wasid dan anak buahnya rupa-rupanya telah sampai di hutan-hutan Medang Batu. Induk pasukannya telah susut menjadi 27 orang, dan mereka tahu benar bahwa mereka akan harus berjuang mati-matian untuk dapat mempertahankan diri terhadap tentara.[48] Sementara pasukan pemberontak itu harus mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, rupa-rupanya telah timbal perselisihan di antara pemimpin-pemimpinnya. Perselisihan intern itu menampakkan diri dalam suatu rapat yang diadakan untuk mengambil keputusan mengenai strategi baru. Rapat itu dapat dianggap sebagai satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah pemberontakan itu, oleh karena kesudahannya jelas menentukan jalannya pemberontakan itu untuk selanjutnya. Satu di antara masalah-masalah utama yang harus dipecahkan adalah soal memilih tempat baru untuk dijadikan pangkalan operasi. Ketika mereka tiba di daerah Medang Batu mereka mendapat laporan bahwa penduduk setempat sudah tidak setia lagi kepada cita-cita pemberontakan dan sudah merasa enggan untuk memberi dukungan, apalagi ikut dalam pasukan sebagai pejuang.[49] Bentrokan di Toyomerto yang merupakan pukulan besar bagi kaum pemberontak telah membuat penduduk Medang Batu tidak bernafsu lagi untuk kembali mengangkat senjata. Mengenai strategi, pendapat-pendapat yang berbeda telah dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak tentang cara melanjutkan perjuangan. Kiyai Haji Madani dan Haji Jahli lalu mengumumkan akan meninggalkan pasukan tanpa memberi alasan.[50] Agus Suradikaria membuat rencana untuk mundur ke Cikandi, yang sudah sejak dulu terkenal sebagai tempat persembunyian yang disukai oleh kaum pemberontak dan penyamun.[51] Kiyai Haji Tubagus Ismail mengusulkan agar mereka melancarkan pertempuran yang menentukan dan gugur sebagai pahlawan. Oleh karena sudah merasa jemu masuk-keluar hutan dan naik-turun gunung, ia bertekad untuk mengumpulkan murid-muridnya di daerah itu dan melancarkan serangan akhir terhadap orang-orang kafir; jika tidak bertindak demikian, mereka akan terus dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan yang lebih kuat. Pada akhirnya Haji .Wasid berusaha membujuk rekan-rekannya agar mereka mundur saja ke daerah belantara di Banten Selatan, melalui rute sepanjang pantai barat. Rencana itu didasarkan atas janji yang telah diberikan oleh Haji Marjuki bahwa ia akan kembali dengan disertai oleh Kiyai Agung dan syekh-syekh terkemuka lainnya dari Mekah untuk menggabungkan diri dalam perjuangan, apabila mereka dapat melanjutkan jihad selama satu tahun lagi.[52] Satu pertimbangan lain yang sangat kuat adalah bahwa di daerah di sebelah selatan Caringin - di sekitar Camara dan Karangbolong - banyak penduduk

yang berasal dari Cilegon akan bersimpati dengan perjuangan mereka dan memberi dukungan. Rencana Haji Wasid disetujui oleh mayoritas kaum pemberontak; sebagian dari mereka yang berbeda pendapat, seperti Haji Madam, Haji Jahli dan Agus Suradikaria, lalu memisahkan diri dari rombongan.

Setelah beberapa hari lamanya mereka berjalan ke arah selatan, beberapa partisan tingkat bawahan meninggalkan pasukan, sehingga kekuatannya tinggal 21 orang. Sepengetahuan kita, mereka tidak mungkin meninggalkan barisan dalam perjalanan ke Medang Batu oleh karena mereka diawasi dengan keras oleh para kiyai.[53]

Rupa-rupanya yang membuat perjalanan mundur berlangsung begitu lama adalah harapan mereka yang menyala-nyala akan kembalinya Kiyai Agung dan bukan karena telah direncanakan sejak semula. Dapat juga dikatakan bahwa pejuang-pejuang terakhir itu sedang berusaha menyelamatkan diri. Jelaslah bahwa langkah yang penting itu diambil karena kaum pemberontak menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan di daerah mereka sendiri.[54] Sebelum kita mengisahkan perjalanan yang jauh ke Banten Selatan itu sebagai episode terakhir pemberontakan, kita terlebih dulu harus menyoroti peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan beberapa pemimpin pemberontak yang telah memisahkan diri dari induk pasukan. Untuk mengisahkan tindakan-tindakan mereka, kita terpaksa menyimpang dari urutan peristiwa yang sebenarnya.

PERLAWANAN PEMIMPIN-PEMIMPIN PEMBERONTAK YANG MEMISAHKAN DIRI

Pada pagi hari tanggal 17 Juli, seorang laki-laki tak dikenal yang berpakaian orang pribumi biasa menghampiri serdadu yang sedang bertugas sebagai penjaga di gardu Benggala. Tiba-tiba ia melompat ke arah penjaga itu dan menyerangnya dengan senjata yang dibawanya, tanpa menghiraukan perintah untuk berhenti. Penyerang menghalang-halangi penjaga untuk menembak dengan jalan merebut senapannya. Ketika komandan jaga melihat bahwa si penyerang bermaksud membunuh penjaga itu, ia segera membidikkan senjatanya dan melepaskan tembakan yang menewaskan penyerang itu dengan seketika. Ketika mayat itu diperiksa ternyata orang tersebut memakai serban di bawah ikat kepala yang biasa dipakai oleh orang-orang pribumi biasa dan mengenakan selembar selendang di bawah sarungnya; di dalam kantong jasnya terdapat sebuah tasbih. Setelah itu mayat diperiksa oleh Panghulu Kepala Serang; ternyata orang itu adalah Haji Iskak dari Saneja, salah seorang pemimpin pemberontak.[55] Rupa-rupanya, tidak lama setelah terjadi pertempuran di Toyomerto, Haji Iskak melarikan diri ke Palembangan di distrik Ondar-Andir, di mana ia disembunyikan oleh anggota-anggota kerabatnya selama beberapa hari. Dengan demikian ia mempunyai alibi kuat. Peristiwa singkat dengan penjaga militer yang ditempatkan di sebelah selatan Serang itu terjadi ketika Haji Iskak sedang dalam perjalanan pulang ke desanya, pada saat ia hendak memasuki ibukota.

Tidak lama setelah peristiwa itu, yakni pada tanggal 21 Juli, dua orang pemimpin pemberontak, yakni Haji Madani dan Haji Jahli, menemui ajal mereka dengan cara sebagai berikut. Setelah memisahkan diri dari induk pasukan, kedua haji itu menuju Cipinang, lalu bersembunyi di mesjid desa itu. Mereka rupa-rupanya berharap dapat terus bersembunyi di sana dan mengandalkan dukungan penduduk desa. Di sana mereka tinggal beberapa hari dan malam dalam suasana cemas dan tegang yang mencekam. Kerikuhan panghulu desa itu ketika mengetahui bahwa dua orang pelarian sedang bersembunyi di dalam mesjid mudah dipahami. Daripada harus menyeret mereka dari persembunyian mereka, ia memutuskan untuk menyerahkan kedua pelarian itu kepada pemerintah. Maka dilaporkannya mereka kepada pihak berwajib, yang segera mengirimkan dua detasemen ke Cipinang, sebuah skadron kavaleri dan sepasukan infanteri, dengan Kontrolir Herkens dan Patih sebagai penunjuk jalan. Mereka memasuki desa dan mengepung mesjid sambil mendekat. Perlu diketahui bahwa mesjid itu terbuat dari batu satu dan hanya mempunyai dua pintu pada kedua sisinya yang saling berhadapan. Ketika tentara mendekati tempat itu mereka melihat kedua pintu tertutup. Tanpa ragu-ragu dua serdadu infanteri mendobrak salah satu pintu dan menyerbu ke dalam, dan

menemukan tempat itu sunyi dan rupanya sudah kosong. Akan tetapi tiba-tiba saja salah seorang serdadu diserang dari belakang. Serdadu itu berbalik dan menubruk si penyerang itu; lalu berlangsung pertarungan sengit di mana serdadu itu mendapat luka-luka dan di antaranya ada yang cukup parah. Sementara itu serdadu-serdadu lainnya datang membantu. Serentetan tembakan dilepaskan ke arah kedua pemberontak yang tewas seketika. [56]

Beberapa hari kemudian, pejabat-pejabat setempat di Kabupaten Serang menemukan jejak pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya, yakni Agus Suradikaria dan dua orang pengikutnya. Begitu menerima laporan, komandan militer segera mengirimkan sebuah patroli yang terdiri dari empat orang ke Kusambisaba dengan Patih Serang sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di rumah tempat ketiga pemberontak bersembunyi, mereka menempatkan penjaga di semua pintunya, lalu Patih memerintahkan pemberontak-pemberontak itu agar menyerah. Dua pemberontak menjawab dengan menyerang Patih. Sebelum mereka sempat melukai Patih, mereka dibinasakan. Sementara itu pemberontak yang ketiga berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan ditusuk dengan sangkur oleh seorang serdadu; orang itu roboh dan mati. Kedua pengikut Agus Suradikaria itu kemudian dikenali sebagai Haji Nasiman dan seorang agen polisi yang diperbantukan kepada jaksa di Cilegon.[57]

Kira-kira pada waktu yang bersamaan tersiar desas-desus yang menyatakan bahwa Haji Kasiman sedang bersembunyi di dekat Cigading, di sebuah kebun tebu tidak jauh dari pantai barat. Oleh karena ia mengenal baik keadaan medan di daerah itu ia dengan mudah dapat meloloskan diri dari pengejar-pengejarnya, sehingga ia berpikir bahwa ia dapat beristirahat untuk beberapa waktu. Akan tetapi pengejaran terus berlangsung tanpa mengendur dan, seperti telah kita ketahui, hadiah-hadiah yang besar telah dijanjikan bagi mereka yang dapat menangkap pemberontak, sementara tentara reguler dikerahkan dalam perburuan itu. Tidak ada seorang pun di antara pemimpin-pemimpin pemberontak dapat menemukan tempat persembunyian yang aman; begitu pula halnya dengan Haji Kasiman. Meskipun banyak desas-desus tersiar mengenai dirinya selama beberapa waktu, namun persembunyiannya baru diketahui pada tanggal 27 Juli. Pada hari itu mata-mata berhasil menemukan jejaknya dan begitu pihak berwajib menerima laporan, sepasukan tentara segera dikirimkan ke Citangkil. Rumah tempat Haji Kasiman dan Haji Arbi diduga sedang bersembunyi dikepung rapat dan serdadu-serdadu siap dengan senapan mereka masing-masing. Ketika kedua haji mendengar derap kaki kuda mendekat - derap kaki kuda pasukan kavaleri - mereka menyadari bahwa ada tentara sedang datang. Haji Kasiman tak menunggu lebih lama lagi dan berusaha melarikan diri. la lari ke luar rumah diikuti oleh Haji Arbi. Haji Kasiman yang masih cekatan itu berhasil melompati pagar dan menghilang di balik pepohonan. Akan tetapi Haji Arbi tidak sempat lagi meloloskan diri dan setelah melihat bahwa baginya sekarang adalah soal hidup atau mati, ia dengan nekad mencoba membunuh salah seorang serdadu kavaleri. Dengan kelewangnya Haji Arbi membacok orang itu beberapa kali, namun sesaat kemudian serentetan tembakan dan sabetan pedang menamatkan riwayatnya. Sementara itu Haji Kasiman lari dengan cepatnya meninggalkan pengejar-pengejarnya di belakang. Pencarian segera dilancarkan, namun sia-sia. Oleh karena itu, penduduk desa lalu dipaksa untuk ikut dalam penguberan itu. Tak lama kemudian mereka dapat menemukan jejaknya, dan pasukan kavaleri cepat-cepat menuju tempat persembunyian Haji Kasiman. Dalam waktu singkat ia dikepung oleh pengejar-pengejarnya. Jaro memerintahkannya agar keluar dari persembunyiannya. Meskipun Haji Kasiman menyadari bahwa tak ada kemungkinan lagi baginya untuk meloloskan diri ia menolak untuk menyerah. la sudah nekat untuk melawan sampai mati dan berdiri tegak di tengah sawah sambil mengacungkan kerisnya. Menghadapi keberanian yang tak kenal menyerah itu, komandan pasukan dengan berat hari memerintahkan anak-anaknya untuk menembak. Mayat kedua haji kemudian diangkat ke Cilegon.[58]

Perlawanan gagah berani yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak yang telah memisahkan diri ini bagi kita nampaknya mungkin seperti perbuatan sia-sia saja, yang lebih memudahkan pekerjaan pihak penumpas pemberontakan daripada pelaku-pelakunya sendiri, namun demikian, kita harus ingat bahwa tindakan-tindakan perorangan kaum pemberontak di pelbagai tempat di daerah itu mungkin dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian pihak berwajib dari induk pasukan pemberontak dan dengan demikian memberikan kesempatan

kepada Haji Wasid dan anak buahnya untuk menerobos kepungan. Apakah itu memang sudah direncanakan atau tidak, namun satu hal yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa usaha mengejar pemberontak-pemberontak yang telah memisahkan diri itu, telah mengalihkan perhatian pasukan pemerintah dari operasi pemburuan terhadap induk pasukan pemberontak. Penyebaran kabar-kabar bohong mengenai pemimpin-pemimpin pemberontak yang sedang melarikan diri, terutama Haji Wasid, juga dimaksudkan untuk membingungkan pihak berwajib.

Keberhasilan penyebar-penyebar kabar bohong itu nampak dalam arus informasi yang membingungkan dan saling bertentangan mengenai tempat Haji Wasid berada. Di samping desas-desus tentang akan berangkatnya Haji Wasid dengan menumpang sebuah kapal Perancis, Residen Priangan menyampaikan kabar kepada pemerintah, bahwa Haji Wasid dan anak buahnya pasti berada di Cianjur.[59] Tidak lama kemudian seorang tawanan menerangkan bahwa Haji Wasid dan anak buahnya sedang bergerak ke arah timur dan bahwa Pamarayan - di bagian selatan Cikandi - merupakan tempat tujuan mereka.[60] Pejabat-pejabat pamongpraja, yang sedikit-banyak diliputi suasana panik, bukannya menghentikan penyebaran kabar-kabar bohong itu, akan tetapi malahan ikut menyebarluaskannya. Pemburuan terhadap kaum pemberontak itu nampaknya telah meluas sampai ke luar perbatasan Banten dan di mana-mana pamongpraja mencari pemberontak-pemberontak yang sedang diuber-uber itu. Orang-orang yang dicurigai ditangkap di Batavia, Purwakarta dan di tempat-tempat lainnya.[61] Sebagai akibat masuknya informasi-informasi yang membingungkan, maka di satu pihak pejabat-pejabat tidak dapat melacak tempat persembunyian pemimpin-pemimpin pemberontak yang sebenarnya, dan di lain pihak mereka mencurigai kebenaran setiap informasi yang berasal dari rakyat. Kira-kira pada waktu pasukan Haji Wasid memulai "long march" mereka ke selatan, pihak berwajib masih percaya bahwa ada dua pasukan pemberontak, satu di bawah pimpinan Haji Wasid yang sedang menuju Pamarayan dan yang lainnya di bawah pimpinan Haji Sapiudin dari Leuwibeureum yang sedang bergerak di daerah Mancak.[62] Setelah kita menyimpang dari urutan peristiwanya, mari kita sekarang beralih ke kisah "long march" induk pasukan pemberontak.

"LONG MARCH" KE SELATAN

Induk pasukan pemberontak memulai perjalanan mereka ke selatan tidak lama setelah keputusan penting itu diambil dalam rapat yang diadakan di hutan Medang Batu. Seperti diketahui, mereka yang tidak setuju dengan rencana Haji Wasid - yang mereka anggap sebagai tidak realistis - memisahkan diri dari kelompok, sementara Haji Wasid dan mayoritas pasukan berangkat ke arah selatan. Rute yang diambil oleh Haji Wasid adalah yang paling langsung yang, meskipun melalui medan yang sangat berat dan ditutupi hutan-hutan lebat yang terkenal banyak macannya,[63] memungkinkan pasukan itu untuk menerobos daerah Caringin sampai ke ujung Banten di barat daya. Mereka berangkat pada tanggal 20 Juli dan memerlukan waktu sekitar sepuluh hari untuk mencapai Camara. Mengingat primitifnya sarana-sarana yang digunakan oleh pasukan itu, maka perjalanan tersebut merupakan peristiwa yang patut dicatat dalam sejarah logistik. Bagaimanapun, mereka bergerak dengan kecepatan yang tinggi, namun tidak cukup cepat untuk melepaskan diri dari kejaran pasukan pemerintah. Pihak berwajib, yang sudah bertekad untuk tidak memberikan kesempatan beristirahat kepada kaum pemberontak, memerintahkan agar diadakan blokade dan agar tempat-tempat yang diduga merupakan persembunyian mereka, dikepung. Tidak lama setelah kaum pemberontak menyeberangi Sungai Cidanu pada tanggal 21 Juli, pihak berwajib menerima laporan tentang hal itu dan tentang rencana perjalanan kaum pemberontak.[64] Mereka mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk menutup semua jalan yang menuju selatan dan timur. Tindakan ini diambil untuk mencegah lolosnya kaum pemberontak seandainya mereka melarikan diri ke Cikandi. Selain dari itu sebagian besar tentara pemerintah ditempatkan di sepanjang perbatasan sebelah barat antara Caringin dan Anyer. Kali ini pemerintah sudah bertekad untuk tidak membiarkan kaum pemberontak lolos dari kepungan tentara. Untuk menutup kemungkinan bahwa kaum pemberontak akan berusaha menerobos perbatasan itu, pihak berwajib menganggap perlu

untuk melipatduakan penjagaan di semua tempat yang strategis dan meningkatkan patroli antara pelbagai pos. Sebuah detasemen infanteri di bawah komando de Chauvigny de Blot ditempatkan di Brengas dan mendapat tugas untuk menjaga garis antara Brengas dan Cinoyong.[65] Dalam kampanye mengepung kaum pemberontak itu juga dianggap perlu untuk menempatkan sebuah detasemen lainnya di Cimanuk, di Kabupaten Pandeglang, untuk mencegah lolosnya kaum pemberontak melalui Gunung Aseupan dan Gunung Pulosari.[66] Jalan keluar di sebelah utara dijaga oleh sebuah pasukan yang ditempatkan di Cinangka. Demikianlah keadaan persiapan militer pada tanggal 25 Juli.

Sementara itu pasukan Haji Wasid sedang menerobos jalan melalui daerah yang belum mereka kenal, yang bergunung-gunung dan ditutupi hutan belantara. Rupa-rupanya mereka terhambat di hutan-hutan Malangnengah, Kubangkidul dan Putri. Selama empat hari mereka hanya dapat maju beberapa mil saja ke arah selatan. Kita tidak dapat mengetahui apakah perjalanan mereka yang memutar ke Cinangka dimaksudkan sebagai taktik untuk mengelabui pengejar-pengejar mereka, ataukah ada pertimbangan lain. Yang kita ketahui dari catatan-catatan adalah bahwa mereka agaknya merasa segan untuk bergerak lebih jauh lagi ke selatan lewat afdeling Caringin, di mana sedikit saja orang yang mereka kenal.[67] Perlu ditambahkan bahwa rintangan-rintangan alam di daerah yang mereka lalui rupa-rupanya telah menghambat perjalanan mereka. Bagaimanapun, pada malam hari tanggal 25 Juli mereka hanya dapat maju sampai Putri, dan menghadapi pos depan tentara yang disebutkan di atas. Dengan satu gerak siasat yang brilyan, kaum pemberontak berhasil melewati gardu di Putri dan perbatasan antara Anyer dan Caringin dengan selamat.[68] Mereka lalu bersembunyi di hutan Cinoyong di mana mereka melewatkan malam antara tanggal 25 dan 26 Juli. Pada malam hari tanggal 26 Juli, ketika bulan sedang muncul di langit - begitulah dikatakan secara romantis dalam laporan [69] - mereka menyeberangi jalan antara Brengas dan Cinoyong di satu tempat dekat Batiku. Ketika diketahui bahwa kaum pemberontak telah melintasi perbatasan Anyer - Caringin pada tanggal 25 Juli, komandan tentara memerintahkan agar ditempatkan penjagaan yang kuat di Brengas, Lampir dan Cinoyong. Juga di Pandat ditempatkan tentara untuk menutup jalan ke selatan antara Gunung Aseupan dan Gunung Pulosari. Meskipun demikian, kaum pemberontak berhasil menembus blokade yang hampir tak dapat ditembus itu di jalan antara Brengas dan Cinoyong. Penerobosan yang kedua kalinya itu baru diketahui pada tanggal 28 Juli. [70] Sementara itu orang-orang sipil dan tentara dikerahkan di daerah antara Caringin dan Anyer dan melancarkan pencarian yang seksama di pegunungan dan hutan-hutan. Penjagaan yang kuat ditempatkan di semua jalan keluar yang penting yang menuju selatan. Operasi pengejaran itu tak pernah mengendur sesaat pun. Oleh karena itu maka mudah dibayangkan bagaimana terperanjatnya pihak berwajib ketika mereka mendapat laporan bahwa empat pemberontak telah terlihat di dekat Caringin Lor pada malam hari tanggal 28 Juli. [71] Situasinya membingungkan sehingga pejabat-pejabat sipil dan militer perlu segera bertindak untuk memperbaiki strategi blokade mereka. Pos-pos militer yang menurut perhitungan mereka semula telah mengepung kaum pemberontak harus dipindahkan lebih ke selatan. Sebuah detasemen yang dipimpin oleh Patih Pandeglang ditempatkan di Tajur, sebuah lagi ditempatkan di suatu tempat antara Pandat dan Tanjilahang, sementara sejumlah anggota polisi di bawah pimpinan Jaksa Caringin ditugaskan untuk mengawasi jalan yang menuju ke selatan.[72] Strategi mengepung kaum pemberontak diteruskan, namun dengan ruang lingkup yang lebih luas sehingga mencakup seluruh daerah yang dibatasi oleh garis yang menghubungkan Brengas, Cinoyong, Cirogol, Barengkok, Gasoli, Cikembeureum, Pandat dan Tanjilahang.[73] Kali ini strateginya adalah mengepung daerah Gunung Aseupan, di mana kaum pemberontak diduga sedang berkeliaran. Dengan cara ini, pihak pengejar juga mengharapkan akan dapat mencegah kaum pemberontak menuju lereng-lereng Gunung Pulosari.[74] Akan tetapi entah bagaimana, kaum pemberontak berhasil menerobos kepungan itu.

Strategi yang baru direncanakan itu baru saja dilaksanakan ketika diterima laporan bahwa kaum pemberontak telah menyeberangi Sungai Cibungur pada malam hari tanggal 28 - 29 Juli. Tukang tambang telah dipaksa untuk menyeberangkan gerombolan itu yang terdiri dari sembilan belas orang. Mereka bersenjata dua pucuk senapan, beberapa pucuk tombak dan selebihnya golok. Mereka kelihatan letih sekali dan bermuka suram. Tiga orang di antara mereka rupa-rupanya haji. [75] Setelah untuk sementara waktu dapat meloloskan diri dari pasukan tentara

yang mengejar, gerombolan itu cepat-cepat berjalan menyusur pantai. Mereka dikabarkan sedang menuju Ciseukeut, sebuah desa yang sudah ditinggalkan penduduknya, di dekat Ciseureuheun. Di kalangan pasukan pemerintah yang melakukan pengejaran terdapat dugaan bahwa kaum pemberontak itu mungkin akan melanjutkan perjalanan mereka ke Jungkulon - semenanjung di ujung barat daya Banten - "untuk menjadi pertapa", seperti yang dikatakan oleh sebuah berita surat kabar.[76]

KEKALAHAN TERAKHIR

Untuk mempersiapkan kampanye terhadap sisa-sisa pemberontak, pejabat-pejabat pemerintah dan militer mengadakan rapat di Labuan pada malam hari tanggal 29 Juli. Hadir dalam rapat itu asisten residen Caringin, van der Meulen; patih Pandeglang, Raden Surawinangun; kontrolir Caringin, Maas; jaksa Caringin, Tubagus Anglingkusuma; Kapten Veenhuyzen, Letnan Visser dan sersan Wedel. [77] Rapat memutuskan untuk mengirimkan sebuah pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kapten Veenhuyzen ke Citeureup untuk memotong jalan pemberontak. Setibanya di Citeureup, pasukan itu menerima laporan bahwa kaum pemberontak telah melalui Citeureup pada pagi hari tanggal 29 Juli dan melanjutkan perjalanan menuju Ciseureuheun.[78] Laporan itu juga menyatakan bahwa Wedana Panimbang, Asisten Wedana Katumbiri dan beberapa opas sudah berangkat untuk mengejar mereka.[79] Setelah pasukan itu menerima laporan dan mempelajari situasi, sebuah detasemen di bawah pimpinan Letnan Visser segera diperintahkan untuk menuju Sumur melalui daratan, sementara sebuah detasemen lainnya di bawah pimpinan Kapten Veenhuyzen sendiri akan menuju tempat yang sama melalui laut. Menurut rencana, kedua detasemen akan bertemu di sana untuk menghadang kaum pemberontak.[80] Akan tetapi pertemuan itu tak pernah terjadi, oleh karena pasukan Visser, yang sudah sangat letih, berhenti di Camara dan menunggu di sana untuk diangkut dengan perahu ke Sumur. Akan tetapi dalam perjalanan ke Sumur, mereka dipaksa oleh angin kencang untuk kembali ke Citeureup.[81] Tadinya direncanakan sebagian dari pasukan itu akan melakukan penghadangan di Sumur. Ketika mereka sedang sibuk melakukan persiapan, Jaksa melaporkan bahwa di sebuah tikungan jalan dekat Camara telah terlihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang tidak lazim terlihat di daerah itu.[82] Kapten Veenhuyzen segera memerintahkan seorang serdadu, Neuman, untuk menemui kelompok orang itu, sementara rekan-rekannya akan melindunginya dari belakang. Anggota-anggota pasukan lainnya bersembunyi di dalam sebuah rumah yang dianggap sangat cocok untuk digunakan sebagai kubu. Ketika Neuman berseru kepada kaum pemberontak agar menyerah, mereka menjawab dengan tembakan-tembakan. Veenhuyzen dan anak buahnya segera melancarkan serangan; pada saat itu juga, lima orang yang bersenjata kelewang, melompat dari persembunyian mereka dan menyerang pasukan. Empat atau lima tukang pikul melarikan diri dan bersembunyi di bawah rumput yang tinggi, sementara yang lainnya berlindung di belakarig perahu-perahu. Lalu berkobarlah pertempuran kecil yang sengit. Kaum pemberontak yang mempertahankan diri sekuat tenaga berulang-ulang menyerang akan tetapi situasinya nampaknya sudah tak memberi harapan : Kaum pemberontak sudah nekat untuk berjuang sampai akhir. Ketika pertempuran berakhir, gerombolan pemberontak itu sudah dimusnahkan, terkecuali beberapa orang yang berhasil menyelamatkan diri. Maka berakhirlah tragedi yang mengerikan itu. Di pihak pasukan pemerintah jatuh beberapa korban; empat orang mendapat luka-luka, seorang di antaranya dalam keadaan cukup parah.[83] Pada pukul sepuluh pagi hari tanggal 30 Juli pasukan itu meninggalkan Sumur dengan membawa kesebelas mayat pemberontak yang tewas. Kemudian di Cilegon, mayat-mayat itu diidentifikasikan sebagai pemberontak-pemberontak yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah, termasuk Haji Wasid, Kiyai Haji Tubagus Ismail, Haji Abdulgani dan Haji Usman.[84] Perlu ditambahkan bahwa dua mayat telah jatuh ke dalam sungai dan karenanya dianggap hilang, sementara di kemudian hari ditemukan lagi satu mayat. Selanjutnya diperkirakan bahwa enam pemberontak telah berhasil meloloskan diri : mereka adalah Haji Jafar, Haji Ala, Haji Saban, Akhmad, Yahya dan Saliman.[85] Mereka dapat bergerak bebas untuk beberapa waktu, namun pada akhirnya dapat ditangkap juga. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pasukan pemerintah berhasil

merampas tiga senapan, 11 golok, 6 pedang, 3 badik dan 1 kujang.[86] Dengan selesainya kampanye itu pemberontakan telah dapat ditumpas dalam waktu kurang dari satu bulan. Akan tetapi, meskipun induk pasukan pemberontak telah dihancurkan, sisa-sisa gerombolannya masih terus berkeliaran.

KELANJUTANNYA

Seperti dapat diperkirakan semula, berhasilnya pengejaran yang berakhir dengan ditewaskannya pemimpin-pemimpin pemberontak dan pengikut-pengikut mereka di dekat Sumur pada tanggal 30 Juli, telah mendorong pemerintah untuk melancarkan pencarian terhadap pemimpin-pemimpin pemberontak yang belum tertangkap. Yang sangat menarik adalah kasus-kasus Haji Sapiudin, Haji Kalipudin dan Haji Abdulhalim. Rupa-rupanya orang tak dapat menemukan jejak haji-haji itu di Banten dan usaha-usaha pencarian tak menghasilkan apa-apa. Dikabarkan bahwa Haji Sapiudin telah menemukan tempat persembunyian yang aman di Pasang Tenang, dan di Cilurah dan kemudian malahan di dekat desa asalnya, Leuwibeureum. Karena merasa takut akan jatuh ke tangan pengejar-pengejarnya, ia rupa-rupanya terpaksa melarikan diri ke Batavia dan di situ ia menggunakan nama baru, yakni Haji Mohamad Rais. Setelah tinggal beberapa lama di sana, ia berturut-turut pergi ke Deli dan Singapura dan setelah itu ke Mekah. Diperlukan waktu sekitar dua tahun sebelum orang dapat melacak tempat persembunyiannya, dan setelah itu pun ia masih dapat mengelakkan diri dari pejabat-pejabat Belanda di Tanah Suci. [87] Mengenai Haji Kalipudin, desas-desus yang tersiar di kalangan orang-orang Banten di Mekah menyatakan bahwa ia masih bersembunyi di suatu tempat di Lampung.[88] Tentang nasib Haji Abdulhalim kita hanya mengetahui bahwa menurut laporan yang diterima oleh Konsulat Belanda, ia diperkirakan juga telah melarikan diri ke Kota Suci, di mana ia meninggal dunia dalam tahun 1890.[89] Demikianlah kita meLihat bahwa operasi pengejaran dilancarkan sampai ke Jedah dan Mekah, di mana kiyai-kiyai Banten yang terkemuka, seperti Kiyai Haji Abdul Karim dan Haji Marjuki terus-menerus dimata-matai oleh agen-agen Belanda. Sesungguhnya, pihak berwajib Belanda menganggap kedua haji itu sebagai dalang-dalang terkemuka gerakan pemberontakan. Sebagai pemimpin-pemimpin tarekat Kadiriah mereka tentunya sering berhubungan dengan penganut-penganut tarekat itu yang boleh dikatakan meliputi hampir semua pemimpin pemberontak.[90] Akan tetapi oleh karena mereka berada di luar jangkauan kekuasaan pihak berwajib Belanda, mereka tidak dapat dituntut. Sementara itu, selama operasi pengejaran yang berlangsung tiga minggu banyak pemberontak dan pembantu-pembantu mereka dapat ditangkap. Sayang catatan-catatan yang tersedia tidak menyebutkan jumlah yang pasti orang-orang yang ditangkap itu. Akan tetapi di dalam salah satu laporan disebutkan bahwa pada akhir minggu yang pertama jumlah mereka sudah mencapai lebih dari seratus lima puluh orang.[91] Di kemudian hari lebih banyak lagi pemberontak dan penduduk desa yang dicurigai terjaring dalam operasi penumpasan. Agen - agen pemerintah dengan tekun mencari anak-buah Haji Wasid yang belum tertangkap, dan dalam waktu yang singkat praktek-praktek mereka memburuk menjadi semacam terorisme. Kita mempunyai alasan untuk menduga bahwa setiap informasi yang diberikan oleh seorang agen pemerintah sudah cukup untuk melakukan penangkapan.[92] Selain dari itu, ada petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa orang-orang tertentu yang telah selamat dari pembantaian pada tanggal 9 Juli, seperti istri Dumas dan Mary Bachet, telah memberikan kesaksian palsu yang memberatkan banyak penduduk desa yang ditangkap karena dicurigai telah ikut dalam pemberontakan.[93] Jumlah orang yang dapat mereka kenali hampir-hampir tak dapat dipercaya; besar sekali kemungkinan bahwa banyak di antara orang-orang itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam tulisannya untuk memperingati pecahnya pemberontakan itu kira-kira seperempat abad kemudian, Snouck Hurgronje menyebutkan satu kasus yang menarik dalam kaitannya dengan kesaksian tanpa bukti yang telah diberikan oleh salah seorang dari kedua wanita tersebut. Oleh karena kemampuan wanita itu untuk mengenali penduduk desa yang dicurigai luar biasa, maka pengamat-pengamat pribumi mulai menyangsikan apakah kesaksiannya dapat dipercaya. Beberapa pejabat pribumi lalu mencoba mengujinya dan menghadapkannya dengan salah seorang di antara mereka yang menyamar sebagai seorang

kuli, tanpa ragu-ragu lagi ia mengenalinya sebagai salah seorang brandal (pemberontak) dan bercerita panjang-lebar tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Kisah yang boleh dikatakan menggelikan itu menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak dapat dipercaya.[94]

Satu aspek lain dari terorisme yudisial itu adalah digunakannya mata-mata, di antaranya ada yang ternyata merupakan agen-agen yang *mala fide*, yang hanya berusaha mencari keuntungan dari kedudukan mereka dengan jalan memberikan sumpah palsu dan melakukan pemerasan. Dalam melakukan kejahatan itu mereka bekerja sama dan membentuk sebuah kongsi.[95] Penuntutan yang dilakukan melalui cara itu tak boleh tidak menimbulkan rasa dendam yang mendalam di kalangan penduduk. Tidaklah mengherankan bahwa penyelidikan-penyelidikan selanjutnya telah dihambat oleh kenyataan bahwa pengakuan-pengakuan yang dapat dipercaya samasekali tak bisa diperoleh dari orang-orang yang telah ditahan itu [96] Satu petunjuk jelas lainnya mengenai sikap penduduk di masa sesudah pemberontakan itu adalah kenyataan bahwa sangatlah sulit untuk mencari informan dan saksi-saksi, dan menurut sementara kalangan, hal itu disebabkan oleh perasaan takut di kalangan penduduk terhadap pembalasan dari pihak murid-murid para pemimpin pemberontak.[97] Sebagai akibatnya, maka ada beberapa hal yang tidak lazim dalam cara penuntut umum menggarap kasus-kasus orang yang dicurigai. Karena sulitnya mencari saksi-saksi yang bersedia memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan, maka banyak tersangka terpaksa dibebaskan lagi karena tidak ada bukti.[98] Akan tetapi, biasanya tidak lama kemudian dikeluarkan perintah untuk membuang orang-orang itu yang dianggap sebagai perusuh dan merupakan ancaman yang potensial terhadap lingkungan mereka. Demi ketentraman dan ketertiban, pemerintah menganggap lebih bijaksana untuk membuang mereka ke luar Pulau Jawa.[99] Menurut laporan-laporan resmi, sebanyak 204 orang telah ditangkap, di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan lagi; 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 dan 20 tahun, dan 11 orang dihukum mati.[100]

Hukuman mati terhadap kesebelas orang itu baru dilaksanakan hampir satu tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantungan pada tanggal 15 Juni, 1889, dan terdiri dari lima pemberontak sebagai berikut : Samidin, Taslin, Kamidin, Haji Mohamad Akhiya dan Haji Mahmud.[101] Pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar empat minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Keenam orang yang berdiri di panggung penggantungan adalah Dulmanan, Sakimin, Haji Hamim, Dengi, Oyang dan Kasar.[102] Mereka digantung di muka umum di sebuah lapangan terbuka kira-kira dua kilometer sebelah utara Cilegon. Akan tetapi hampir tak ada orang yang datang menyaksikannya, oleh karena adanya kepercayaan di kalangan rakyat bahwa pada peristiwa seperti itu orang mudah terkena braja, [103] suatu kekuatan jahat yang terutama menyerang anak-anak, orang-orang yang sudah tua dan yang sedang sakit. Satu hal yang menarik adalah bahwa pada hari pertama pelaksanaan hukuman gantung itu penduduk berpuasa, mungkin atas perintah pemuka-pemuka agama, sebagai tanda simpati kepada orang-orang yang dihukum mati itu.[104] Mengenai orang-orang yang hendak menjalani hukuman itu, beberapa orang di antara mereka kelihatannya tenang-tenang saja. Yang lainnya berada dalam keadaan pingsan ketika mereka dibawa ke tiang gantungan; hal itu untuk sebagian mungkin disebabkan oleh buruknya kondisi di tempat mereka ditahan, sehingga keadaan jasmani mereka menjadi sangat menyedihkan.[105] Sangat disayangkan bahwa tak mungkin bagi kita untuk memastikan apakah penduduk telah terkesan oleh pelaksanaan hukuman mati itu. Selama beberapa waktu soal hukuman mati itu ramai diperdebatkan di kalangan pejabat-pejabat pemerintah dan pers. Ada yang menginginkan agar sebanyak mungkin pemberontak dihukum mati. Semangat balas-dendam itu sudah barang tentu disuarakan oleh orang-orang yang panik di kalangan masyarakat Eropa, yang dihinggapi semacam *haji-fobi*.[106] Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa hukuman yang bagaimanapun beratnya tidak akan dapat membendung gerakan pemberontakan. Mereka juga berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman gantung itu sangat menjijikkan dan bahwa hukuman semacam itu harus dihapuskan.[107] Catatan-catatan yang ada menyingkapkan sikap pemerintah Belanda, yang memerintahkan pemerintah pusat di Indonesia agar melunakkan penuntutan terhadap semua orang yang telah ikut dalam pemberontakan, dan agar mengurangi jumlah hukuman mati.[108]

Satu persoalan kontroversial lainnya adalah mengenai kasus Nyai Kamsidah, istri Haji

Iskak. Karena dipersalahkan telah membunuh istri Gubbels, ia dijatuhi hukuman mati, akan tetapi kemudian diampuni dan hanya mendapat hukuman kerja paksa 15 tahun. Keputusan itu menimbulkan protes dari kalangan pers, yang menganggap Nyai Kamsidah sebagai pembunuh berdarah dingin, yang lebih berbahaya dari beberapa pemberontak yang sudah digantung.[109]

TANDA-TANDA PEMBERONTAKAN BARU

Meskipun Banten kelihatannya kembali tenang setelah pemimpin-pemimpin pemberontak ditangkap, semangat keagamaan belum berkurang dan jiwa pemberontak di kalangan penduduk belum dapat dipatahkan sepenuhriya. Pada suatu hari dalam pertengahan kedua bulan September 1888, seorang haji berkata di hadapan kerumunan orang di pasar Cilegon bahwa segera setelah kaum pemberontak yang dipenjarakan dibebaskan, pemberontakan baru akan dimulai.[110] Kira-kira pada waktu yang sama, pihak berwajib juga menerima laporan tentang adanya percobaan memberontak di kalangan penduduk Bojonegoro dan Balagendung, yang ingin melakukan pembalasan atas kematian Haji Wasid; mereka tidak dapat memaafkan orang-orang yang telah melakukan pengejaran, yang bagaimanapun horus dihukum.[111] Sebuah desas-desus lainnya mengenai akan terjadinya pemberontakan di Banten telah membuat pejabat-pejabat pemerintah terkejut ketika seorang yang bernama Sadam, yang dikenal sebagai orang gila, bergembar-gembor ke sana kemari bahwa ia adalah salah seorang pemimpin pemberontak.[112]

Meskipun pihak berwajib telah melancarkan operasi pembersihan dan pemusnahan secara intensif dan ekstensif, Banten Utara tidak berhasil dibersihkan sepenuhnya dalam pertengahan pertama tahun 1889. Sepanjang bulan-bulan April dan Mei tahun itu, pemerintah terus-menerus diganggu oleh desas-desus yang menyatakan bahwa sebentar lagi pemberontakan baru akan pecah. Kenyataan bahwa kaum pemberontak di Kabupaten Serang tidak pernah mencoba kekuatan senjata mereka terhadap pasukan pemerintah rupa-rupanya telah membuat mereka merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kegagalan pemberontakan bulan Juli 1888. Para peserta dalam komplotan itu mulai saling menuduh telah melanggar sumpah dan meninggalkan pemimpin-pemimpin mereka, yang telah mati atau hidup dalam pembuangan demi perjuangan mereka. Mereka tidak hanya merasa bahwa sikap mereka yang setengah-setengah selama pemberontakan itu memalukan, akan tetapi juga bahwa mereka horus memulihkan kembali kehormatan mereka.[113] Karena pihak berwajib terus melancarkan pengejaran-pengejaran yang tak kenal ampun, penduduk dicekam suasana tidak menentu dan rasa takut, sehingga pemuka-pemuka agama dengan mudah dapat menghasut mereka. Selama masa pengejaran-pengejaran itu, banyak haji terkemuka dari Kabupaten Serang dipenjarakan dan kemudian dibuang, seperti Haji Mohamad Asik dari Bendung, Haji Abubakar dari Kaganteran, Haji Mohamad Sangadeli dari Kaloran, Haji Mohamad Asnawi dari Bendung, Haji Muhidin dan Haji Mohamad Kanapiah dari Trumbu, Haji Mohamad Arsad Tawil dari Tanara, Kiyai Mohamad Ali dari Mendaya, Haji Akhmad, panghulu Tanara, Haji Tubagus Kusen, panghulu pengadilan distrik di Cilegon, dan Haji Mohamad Arsad, panghulu kepala di Serang.[114] Pengejaran-pengejaran itu tak disangsikan lagi telah menimbulkan rasa dendam di kalangan para murid terhadap pemerintah. Semangat pemberontakan benar-benar telah menjadi matang di kalangan mereka. Ada sekitar setengah lusin kasus tentang adanya gerombolan-gerombolan yang berkumpul kembali di Priyayi, desa asal Haji Akhmad, dan tentang pengomplot-pengomplot yang berusaha mengobarkan kembali api pemberontakan pada akhir bulan Mei 1889.[115] Sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar empat puluh orang, yang merencanakan pemberontakan baru pada akhir bulan Puasa, memberikan dukungan penuh kepada usul Haji Akhmad untuk membunuh semua pegawai pamongpraja, baik yang Eropa maupun yang pribumi, sebagai pembalasan terhadap tindakan pemerintah yang membuang Kiyai Mohamad Asik dan haji-haji terkemuka lainnya. Menurut rencana, pembantaian itu akan dilaksanakan di saat semua pejabat terkemuka di Banten sedang merayakan hari Lebaran di Kabupaten Serang.[116] Pertemuan yang menghasilkan keputusan itu diadakan di rumah Haji Akhmad dalam bulan April.[117] Selama bulan-bulan berikutnya, anggota-anggota komplotan rupa-rupanya sibuk mengadakan rapat-

rapat, yakni pada tanggal 1 Mei di rumah Dirham, pada tanggal 3 Mei di rumah Haji Murabi dan pada tanggal 14 Mei di rumah Haji Akhmad.[118] Rencana untuk melancarkan pemberontakan baru itu, yang menurut pengakuan mereka sendiri dimaksudkan untuk membalas dendam karena pemimpin-pemimpin mereka dalam pemberontakan tahun 1888 telah dibuang, dapat diketahui pada waktunya oleh pihak berwajib; pemimpin-pemimpinnya ditangkap, dan gerakan itu dapat ditumpas sebelum mencapai tahap pelaksanaannya.[119]

Beberapa anggota komplotan tahun 1888 berbalik menjadi informan pemerintah ketika perkara mereka diadili. Salah seorang yang paling terkemuka di antara mereka tak pelak lagi adalah Haji Abdulsalam, yang namanya pernah disebut-sebut di muka. la telah menyusun sebuah daftar yang memuat nama semua orang yang ia ketahui telah memainkan peranan aktif selama kerusuhan-kerusuhan, dan yang ia anggap bertanggung jawab atas terjadinya pemberontakan itu.[120] Meskipun demikian hal itu tak banyak menolong, oleh karena setelah ia memberikan apa yang dinamakan jasa-jasa itu, tak urung ia dibuang.[121] Ketika beberapa orang tawanan diinterogasi tidak lama setelah pecahnya pemberontakan, ada di antara mereka yang memberikan informasi, akan tetapi terutama mengenai pemimpin-pemimpin pemberontak dan motivasi mereka untuk melancarkan pemberontakan itu.[122] Dari pengakuan yang diberikan oleh salah seorang pemimpin pemberontak, yakni Haji Mahmud, diketahui bahwa rupa-rupanya tidak ada kerja sama yang erat di antara para pemimpin pemberontak dalam hari-hari yang kritis ketika mereka menderita kekalahan besar yang pertama.[123] Pengakuan yang didapat secara paksa dari Nyai Kamsidah tidak saja meliputi informasi mengenai suaminya, Haji Iskak, akan tetapi juga mengandung tuduhan terhadap Panghulu Cilegon yang menurut pengakuannya itu telah memberitahukan rencana Haji Wasid kepada suaminya.[124] Sudah barang tentu ada juga pemberontak-pemberontak yang tidak tahan uji ketika mereka diadili dan memberikan pengakuan-pengakuan penting.[125] Namun demikian disayangkan bahwa tak ada bukti-bukti samasekali mengenai latar belakang hubungan antara orang-orang yang memberikan informasi itu dan orang-orang yang mereka dakwa, sehingga kita tidak menemukan petunjuk tentang bagaimana bisa terjadi gerakan seperti itu telah menghasilkan orang-orang seperti Haji Abdulsalam, Haji Mahmud, Nyai Kamsidah dan lain-lainnya. Kita tidak mempunyai cara untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda *faksionalisme incidental* di daerah itu, yang mencerminkan persaingan antar-golongan, perselisihan setempat atau permusuhan antar-perorangan.

Satu hal lain yang tidak boleh kita abaikan adalah peranan yang dimainkan oleh pegawai-pegawai pemerintah, pribumi dan Eropa, dalam menumpas pemberontakan. Pemusnahan kaum pemberontak pasti mendatangkan kehormatan, penghargaan dan ganjaran bagi sejumlah pejabat. Seperti telah kita lihat sepintas lulu, pejabat-pejabat tertentu telah sangat berjasa dalam operasi mengejar kaum pemberontak. Yang paling menonjol di antara mereka adalah R.T. Sutadiningrat; R.T. Kusumaningrat, bupati Caringin; Haji Jamaludin, kepala kampung Kalianda (Lampung); Raden Surawinangun, patih Pandeglang; Pangeran Minah Putra, kepala Rajabasa (Lampung); Haji Mohamad Said dari Kalianda, dan Akilali, lurah Anyer Lor; di antara pejabat-pejabat Eropa, van der Meulen, asisten residen Caringin; de Chauvigny de Blot, kontrolir Serang; Hermens, kontrolir Pandeglang, dan van Rinsum, kontrolir muda Cilegon.[126] Sebaliknya dengan Bupati Serang, yang sikapnya sebelum dan selama huru-hara telah menimbulkan kecurigaan besar di kalangan pejabat-pejabat Eropa. Bagaimana nasibnya sesudah pemberontakan, akan dibicarakan dalam bab berikutnya.

Setelah bahaya pemberontakan dapat dihindarkan, pihak berwajib menganggap perlu segera diadakan penyelidikan yang seksama mengenai motif-motif kaum pemberontak pada khususnya dan sebab-sebab pemberontakan pada umumnya, sebelum diambil langkah-langkah, bukan hanya untuk memulihkan ketentraman dan ketertiban akan tetapi juga untuk menghapuskan kesewenang-wenangan dalam administrasi daerah. Dalam bab berikut ini, kita akan membahas perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan macam apakah yang telah diadakan oleh pihak berwajib setelah pemberontakan itu dapat ditumpas.

CATATAN TENTANG GERAKAN-GERAKAN MILENARI DI JAWA TENGAH DAN JAWA

TIMUR

Dalam pertengahan kedua tahun 1888, sejumlah keresidenan di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan gelanggang pengejaran terhadap gerakan-gerakan milenari. Dalam kawatnya tanggal 11 Agustus 1888, Residen Kediri melaporkan kepada Gubemur Jenderal bahwa ia telah menangkap seorang yang bernama Jasmani dan pengikutnya sebanyak 15 orang, karena memiliki senjata, jimat-jimat dan dokumen-dokumen yang berbau pemberontakan.[127] Penyelidikan yang dilakukan menyingkapkan bahwa Jasmani telah berhasil mengumpulkan pengikut di daerah yang sangat luas; di antara kelima puluh orang yang ditangkap terdapat pengikut-pengikut yang berasal dari Banyumas, Cilacap, Bagelen, Kedu, Ponorogo, Bangil dan Malang, sedangkan mayoritas yang besar dari mereka berasal dari Surakarta dan Yogyakarta.[128] Sudah jelas bahwa gerakan Jasmani itu telah menyebar luas dengan pesatnya ke seluruh bagian selatan Jawa Tengah dan Timur. Selama pertengahan kedua bulan Agustus 1888, masyarakat Eropa di Jawa Timur, terutama yang tinggal di perkebunan-perkebunan, secara tiba-tiba saja menjadi panik dan secara tergesa-gesa berusaha untuk memiliki senapan dan peluru.[129] Desas-desus tersiar di kalangan penduduk mengenai kemungkinan akan pecahnya kerusuhan-kerusuhan. Kabar tentang pemberontakan di Banten yang telah terjadi dalam bulan sebelumnya tentu ikut menimbulkan suasana ketakutan yang mencekam penduduk bangsa Eropa di Jawa Timur.

Siapa Jasmani itu dan apa tujuannya? Menurut catatan-catatan pemerintah, Jasmani adalah penduduk desa Sengkrong, yang terletak di afdeling Blitar (Kediri). Rupa-rupanya, di dalam pertemuan-pertemuan dengan pengikut-pengikutnya ia telah mengumumkan maksudnya untuk mendirikan sebuah kerajaan baru pada akhir tahun Jawa *Wawu*.[130] Kemudian ia akan diproklamasikan sebagai sultan dan akan menggunakan nama *Sunan Herucokro* [131] atau *Sultan Adil*. [132] Pada hari yang sudah ditentukan, ia dan pengikut-pengikutnya akan menuju desa Birowo di Lodoyo, [133] dan dari sana akan terus ke barat menyusuri pantai selatan menuju Surakarta dan Yogyakarta. Di Cemenung, (distrik Ngunut, afdeling Ngrowo, Madiun), mertuanya, Amat Mukiar,[134] dan pengikut-pengikutnya akan bergabung dengannya. Perlu dicatat, bahwa Amat Mukiar bermaksud melancarkan suatu gerakan pemberontakan untuk mendukung Gusti Mohamad, seorang yang mengaku berhak atas takhta Kesultanan Yogyakarta.[135] Rupa-rupanya satu aspek yang esensial dari strategi mereka adalah pembagian tugas : Jasmani ditugaskan untuk menyerang Surakarta, sementara Amat Mukiar akan memimpin serangan terhadap Yogyakarta.[136]

Dalam menelusuri kembali perkembangan gerakan milenari ini, perlu dikemukakan bahwa Jasmani, yang berasal dari Solo, telah merantau ke Kediri sekitar 16 tahun yang lalu, dan setelah berpindah-pindah tempat untuk beberapa waktu menetap di Sengkrong.[137] Rupa-rupanya di sana ia diilhami oleh gagasan milenari untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Baru dalam tahun 1886 rencananya mulai menjelma, ketika ia berhasil mengumpulkan murid-murid dan mendapat pengikut-pengikut di Surakarta dan Yogyakarta.[138] Satu hal yang menarik adalah bahwa Jasmani sendiri bukan haji dan tidak melakukan ibadah menurut agama Islam. Pembantu-pembantu dekatnya adalah Amat Mukiar, mertuanya; Mertojudo dari Jambean; Dulrasit, menantu Mertoyudo; dan Amat Sarpan.[139] Satu hal yang mempunyai arti yang penting adalah nama-nama yang hendak dipakai oleh Jasmani begitu ia sudah diproklamasikan sebagai sultan. Nama-nama *Herucokro* dan *Sultan Adil* (sic) tegas-tegas mengingatkan kita kepada tokoh mesianik Jawa, Ratu Adil.[140] Boleh dikatakan bahwa penggunaan nama-nama itu merupakan manifestasi dari suatu harapan mesianik Jawa - seperti selalu halnya di masa yang lampau.[141] Gerakan mesianik di bawah pimpinan Jasmani itu dapat ditumpas sejak awalnya, oleh karena pejabat-pejabat pemerintah, yang masih dihantui oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan di Cilegon telah melancarkan satu kampanye yang tegas terhadap semua penganut-penganutnya. Residen Kediri dengan penuh semangat menunaikan tugasnya untuk menangkapi semua pengikut Jasmani. Sebagai bukti tentang tindakan-tindakan yang telah diambilnya, ia melaporkan kepada Gubernur Jenderal bahwa lima puluh orang telah ditangkap pada tanggal 15 Agustus dan tiga puluh orang lagi tiga hari kemudian, sementara untuk menangkap 26 murid Jasmani yang tinggal di pelbagai tempat di luar Kediri terpaksa diminta bantuan pihak berwajib di tempat-tempat yang bersangkutan.[142] Penangkapan dilakukan

terhadap semua orang yang menunjukkan semangat yang luar biasa dalam melakukan ibadah mereka, sehingga dalam kenyataannya operasi itu merupakan pengejaran terhadap orang-orang yang fanatik dalam hal agama. Tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan yang diambil oleh pejabat-pejabat daerah menimbulkan kecemasan di kalangan pemerintah pusat, yang menyadari sepenuhnya bahwa pengejaran yang dilakukan terus-menerus hanya akan menimbulkan keresahan dan ketegangan di kalangan penduduk. Kenyataan bahwa tidak setiap orang yang fanatik dalam hal agama harus dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah harus diperhitungkan.[143]

Tidaklah mengherankan bahwa gerakan mesianik itu telah gagal samasekali dan bahwa peristiwa itu rupa-rupanya hanya merupakan perbuatan yang membabi buta. Segala sesuatu yang kita ketahui mengenai pengikut-pengikutnya yang tersebar luas menunjukkan bahwa "organisasinya" sangat luas. Diketahui bahwa Amat Mukiar berasal dari Banten, satu hal yang cukup mencemaskan untuk menimbulkan kecurigaan di kalangan pejabat-pejabat pemerintah, yang langsung saja menduga bahwa ia pasti memihak kaum pemberontak di Banten.[144]

Satu contoh menarik lainnya mengenai kecurigaan pejabat-pejabat pemerintah mengenai adanya komplotan-komplotan para haji dan guru di seluruh negeri adalah peristiwa Lobaningrat. Pemimpin utama komplotan itu adalah Raden Lobaningrat, seorang bupati muda di Yogyakarta yang telah dipecat. Suatu penyelidikan menyingkapkan bahwa ia memiliki jimat-jimat dan dokumen-dokumen yang dianggap keramat kepunyaan seorang Arab. Melihat korespondensinya orang dapat menyimpulkan bahwa Raden Lobaningrat pasti mempunyai koneksi-koneksi di Tulungagung (Kediri). Beberapa laporan memuat petunjuk bahwa seorang saudara sepupu Lobaningrat, Pangeran Mangku Bumi telah mondar-mandir antara Klaten dan Tulungagung. Di rumah seorang guru di Tulungagung ditemukan sejumlah bendera, panji dengan tulisan Arab, jimat, kain putih dan senjata.[145] Selain dari itu, pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Tulungagung mempunyai banyak santri yang berasal dari daerah-daerah Yogyakarta - Surakarta, terutama Yogyakarta. Oleh karena itu, maka pejabat-pejabat yang sudah dirasuk oleh *haji-fobi* itu, lalu menarik kesimpulan bahwa peristiwa Lobaningrat mempunyai hubungan langsung dengan gerakan yang dipimpin oleh Jasmani.[146] Demikian pula gerakan Jasmani diduga mempunyai hubungan langsung dengan pemberontakan di Banten, terutama jika dilihat adanya hubungan - mungkin hubungan berdasarkan perkawinan - antara Haji Marjuki dan orang-orang tertentu di Ponorogo.[147] Dugaan itu agaknya diperkuat oleh informasi yang menyatakan bahwa para haji dan kiyai dari Ponorogo telah diundang untuk menghadiri pesta-pesta tertentu di Banten.[148] Mengingat jenis-jenis organisasi yang terdapat di daerah-daerah di mana telah terjadi pemberontakan-pemberontakan dan komplotan-komplotan, serta mengingat pula hubungan-hubungan yang diperkirakan ada di antara organisasi-organisasi itu, maka banyak orang beranggapan bahwa anggota komplotan-komplotan itu terlibat dalam satu rencana yang menyeluruh, yang sedikit banyaknya dikoordinasikan dan meliputi seluruh Pulau Jawa.[149] Tanpa menarik kesimpulan sejauh yang dilakukan oleh orang-orang yang memandang kerusuhan-kerusuhan yang mewabah di Jawa dalam tahun 1888 sebagai permulaan suatu pemberontakan yang mencakup seluruh negeri, kami menganggap penjelasan berikut ini sebagai yang paling mendekati kebenaran : pertama, gerakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin saja ada kaitannya dengan suatu ramalan yang beredar di kalangan rakyat di waktu itu, mengenai akan lahirnya kerajaan baru dalam tahun Jawa, *Wawu*, mungkin sekali dalam bulan terakhir, yakni Dulhidjah atau Besar.[150] Kedua, agitasi yang semakin meningkat di mana-mana ada hubungannya dengan gejolak perubahan yang penuh dengan kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dan yang mengacaukan cara hidup rakyat yang tradisional.

Kita juga harus memperhatikan apa yang terjadi di Srikaton (Surakarta), sekitar dua bulan kemudian. Segerombolan pemberontak, yang terdiri dari lima puluh orang guru dan santri, dan beberapa wanita dan anak-anak, menduduki pasanggrahan di Srikaton, yang terletak di lereng barat Gunung Lawu, dekat pemakaman dinasti Mangkunegoro. Mereka mengenakan pakaian putih, yakni pakaian yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang melakukan Perang Sabil, dan dipimpin oleh Imam Rejo, seorang penduduk desa Girilayu. Setelah orang itu selesai bertapa di Ngawi, ia mengumpulkan sejumlah besar pengikut. Dalam pesannya ia berseru kepada rakyat

agar menganut ajaran Islam yang murni, dan berzikir, sedangkan tujuan akhir gerakannya adalah mendirikan sebuah kerajaan Islam. Ia nantinya akan dinobatkan sebagai raja kerajaan itu dan akan memakai nama *Jinal Ngabidin*, sedangkan saudaranya, Minto Menggolo, akan diangkat sebagai patih. Menurut rencana Imam Rejo, kaum pemberontak itu akan bergerak dari Srikaton menuju Ketanga (Ngawi) yang akan dijadikan ibukota negara baru itu.[151] Pada tanggal 12 Oktober, sepasukan tentara yang terdiri dari 30 orang infanteri, 30 orang kavaleri, dan 10 orang dragonder, di bawah pimpinan Residen Surakarta, sekretarisnya, Pangeran Orang Wadano, dan komandan dragonder, bergerak ke arah Srikaton untuk mengepung pasanggrahan tersebut. Setelah beberapa kali diperintahkan agar menyerah, kaum pemberontak yang bertahan di dalam bangunan itu diserang dan dikalahkan; sembilan orang tewas, di antaranya Imam Rejo sendiri; tiga orang luka--uka dan yang lainnya menyerah.[152] Yang menarik adalah bahwa ajaran Imam Rejo kelihatannya merupakan satu ungkapan dari gerakan kebangkitan kembali agama yang dicampur dengan milenarianisme Jawa yang tradisional.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] PV 18 Maret 1889 dan Surat resmi Residen Banten tertanggal 18 Maret 1889, no. 82, dalam Exh. Mei 1889, no. 63; juga PV 1 Mei 1889 dan Surat resmi Residen Banten tertanggal 2 Mei 1889, no. 124, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76.

[2] Kawat dari Residen Banten kepada Gubernur Jendetal tanggal 9 Juli 1888, no. 68, dalam MR 1888, no. 484; juga Laporan Komandan Pattoli,14 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496. Lihat juga Java Bode, 10 Juli 1888

[3] Laporan Komandan Patroli,14 Juli 1888; juga Java Bode, 1 Juli 1888.

[4] Mengenai daftar pemberontak yang tewas dan luka-luka, lihat Appendix VII.

[5] Penyerang itu diidentifikasikan sebagai Mesir dari Arjawinangun. Ia adalah anak H. Wakhia, tokoh pemberontakan tahun 1850; saudata-saudaranya yang perempuan, Nyi Aminah dan Nyi Rainah, dan kemenakannya,seorang anak laki-laki Nyi Rainah, ikut aktif dalam pemberontakan itu; lihat catatan dalam PV, 26 Maret 1889.

[6] IG (1891), no. 2, hal.1176.

[7] Laporan DDI, hal. 86, juga Laporan Komandan Patroli,14 lull 1888.

[8] IG (1891), no. 2, hal. 1185; cf. Laporan Komandan Patroli,14 Juli 1888.

[9] IG (1891), no. 2, hal.1185.

[10] Kawat dari Komandan Angkatan Laut kepada Gubernur Jenderal, 12 Juli 1888, no. 812, dalam MR 1888, no. 484; Laporan DDI; hal. 91- 92.

[11] Laporan Komandan Patroli,14 Juli 1888; Laporan DDI, hal 87 - 95.

[12] IG (1891),no.2,hal.1187.

[13] Ringkasan Buku Harian Militer (disingkat MJ) dari komandan pasukan di Banten, 10 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 484; juga Kawat dari Komandan Tentara kepada Gubernur lenderal, 16 Juli 1888, no. 799, dalam MR 1888,no.484.

[14] IG (1891), no. 2, hal.1188. Mengenai sikap bermusuhan penduduk di sekitar Serang, lihat Kawat dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 10 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 484.

[15] Lihat kawat-kawat dari Sekretaris Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 9 Juli 1888, no. 68, 69, 778; juga 10 Juli 1888, no. 81, dalam MR 1888,no.484.

[16] IG (1891), no. 2, hal. 1189; Surat resmi Residen Banten, 3 April 1889, no. 96, dalam Exh. 20 Mei 1889, no. 76; juga Surat resmi Residen Banten, 2 Mei 1889, no. 124.

[17] IG (1891), no. 2, hal.1189.

[18] MJ dari komandan militer di Serang,16 dan 17 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496.

[19] Laporan DDI, hal.97.

[20] Kapten A.T.R. de Brauw ini, yang memimpin Kompi 2 dari Batalyon 9 jelas bukan Letnan Kolonel C.A. de Brauw dari tahun 1850 tersebut di atas.

[21] IG (1891), no. 2, hal. 1191; MJ, 11 dan 12 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 484.

[22] IG (1891), no. 2, hal.1191; MJ, 11 dan 12 Juli 1888.

[23] Ringkasan MJ, 11 dan 12 Juli 1888. Rumah H. Abdulkarim tidak ikut terbakar, meskipun letaknya di tengah-tengah rumah-rumah yang terbakar habis, lihat PV 23 Jan. 1889.

[24] IG (1891), no. 2, hal. 1193; MJ, 12 dan 13 Juli 1888, dalam MR 888, no. 484.

[25] Laporan DDI, hal. 99; menurut penulis artikel dalam IG itu, orang-orang yang ditawan berjumlah 400; IG (1891), no. 2, hal. 1194. Kedung dan Trate Udik dibakar habis atas perintah kontrolir, de Chauvigny de Blot, lihat MJ, 12 dan 13 Juli 1888; Kawat dari Panglima Tentara kepada Gubernur Jenderal,14 Juli 1888, no. 118, dalam MR 1888, no. 484.

[26] Kawat dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 14 Juli 1888, no.115, dalam MR 1888, no. 484.

[27] Ringkasan MJ,12,13 dan 14 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496.

[28] Ringkasan MJ,12 dan 13 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 484.

[29] Ringkasan MJ, 11 dan 12 Juli 1888; juga Ringtcasan MJ, 12, 13 dan 14 Juli1888.

[30] Ringkasan MJ,14 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496.

[31] Ringkasan MJ, 12, 13 dan 14 Juli 1888;juga Laporan DDI, haL 100.

[32] Ringkasan MJ,17 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496.

[33] Lihat di alas, Bab VII, hal. 309 - 310.

[34] Panglima Tentara kepada Gubernur Jenderal, 12 Juli 1888, no, 457, dalam MR 1888, no. 484.

[35] Ringkasan MJ,12,13 dan 14 Juli 1888.

[36] Kawat dari Residen Banten kepada Gubemur Jenderal, 19 Juli 1888, no. 169, dalam MR 1888, no. 496; lihat juga Ringkasan MJ,19 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506.

[37] Mengenai gerakan mundur H. Wasid ke Gunung Gede, lihat PV 6 Des. 1888; juga Laporan DDI, hal.104.

[38] Banyak keturunan H. Wakhia dari pemberontakan tahun 1850 berdiam di Arjawinangun, yang tadinya bernama Medang Batu; selain yang telah disebutkan di bawah catatan no. S, juga Sakib (menantu H. Wakhia yang kawin dengan Nyi Rainah) dan Abdurrakhman (anak Sakib); lihat PV 26 Maret 1889.

[39] Ringkasan MJ,18 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506; Laporan DDI, hal. 104 -105.

[40] Ringkasan MJ,18 Juli 1888; jumlah pemberontak diperkirakan antata 30 dan 40 orang; menurut Laporan DDI, sekitar 40 sampai 50 orang; lihat Laporan DDI, hal.109.

[41] Ringkasan MJ,18 Juli 1888; Laporan DDI, hal.105.

[42] Ringkasan MJ,18 Juli,1888.

[43] Ringkasan MJ,18 Juli 1888; Laporan DDI, hal. 110.

[44] Ringkasan MJ, 20 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506; Laporan DDI, hal. 112.

[45] Ringkasan MJ,18 Juli 1888.

[46] Ringkasan MJ,19 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506.

[47] Ringkasan Ml, 18 Juli 1888.

[48] Laporan DDI, hal. 111-112.

[49] Lihat di alas, catatan no. 4 dan 5; juga catatan no. 38.

[50] Laporan DDI,hal.105.

[51] Lihat di atas, Bab IV, khususnya yang mengenai pemberontakan tahun 1845.

[52] Laporan Kontrolir Serang,19 Mei 1889, no. 16.

[53] PV 6 Des. 1889.

[54] Soal persediaan bahan makanan diurus oleh H. Rapali, panghulu Balagendung, lihat PV 3 Jan. 1889.

[55] Ringkasan MJ, 17 Juli 1888; juga PV 17 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 496.

[56] Ringkasan MJ, 22 dan 23 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506: lihat juga Java Bade, 23 dan 26 Juli 1888.

[57] Ringkasan MJ, 26 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506; juga Kawat dari Residen Banten kepada Gubernur Jenderal, 26 Juli 1888, no. 221, dalam MR 1888, no. 506.

[58] Ringkasan MJ, 27 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 523; Laporan DDI, hal. 122 -124. Lihat juga Java Bode, 3 Agustus 1888.

[59] Ringkasan MJ, 21 luG 1888, dalam MR 1888, no. 506.

[60] Ringkasan MJ, 23 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506.

[61] Java Bode, 20 dan 26 Juli 1888; juga 3 Agustus 1888.

[62] Ringkasan MJ, 23 Juli 1888; Laporan DIX, hal. 115 - 116.

[63] Lihat WNI (1889 - 1890), hal. 1201 - 1202; Caringin juga dinamakan kebon maung, artinya daerah macan. Lihat Pleyte, dalam TBG, Vol. LII (1910),haL 138.

[64] Laporan DDI, haL 115; tentang tujuan perjalanan, lihat Ringkasan MJ 25 Juli 1888 (dalam MR 1888, no. 506), di mana disebutkan bahwa tujuan itu adalah Jungkulon.

[65] Ringkasan MJ, 2 dan 24 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 506

[66] Ringkasan MJ,25 Juli 1888.

[67] Ibidem

[68] Ringkasan MJ, 26 Juli 1888; Laporan DDI, hal.124.

[69] Laporan DDI, hal. 106; lihat juga Ringkasan MJ, 29 Juli 1888, dalam MR 1888,no.523.

[70] Ringkasan MJ, 29 Juli 1888.

[71] Ringkasan MJ, 30 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 523; Laporan DDI, hal. 125.

[72] Ringkasan MJ, 28 Juli 1888, dalam MR 1888, no. 523.

[73] Ringkasan MJ, 28 dan 29 Juli 1888.

[74] Ringkasan MJ, 29 Juli 1888.

[75] Ringkasan MJ, 30 Juli 1888.

[76] Java Bode, 3 Agustus 1888.

[77] Laporan DDI, hal.127 - 128.

[78] Ringkasan MJ,1 Agustus 1888, dalam MR 1888, no. 556.

[79] Laporan DDI, hal. 129 - 130.

[80] Ringkasan MJ,1 Agustus 1888; Java Bode, 3 Agustus 1888.

[81] Ringkasan MJ,1 Agustus 1888.

[82] Ibidem; juga Laporan DDI` hal.130.

[83] Ibidem.

[84] Ibidem.

[85] Laporan DDI, haL 131.

[86] Ringkasan MJ, 1 Agustus1888.

[87] Surat resmi konsul di Jedah, 25 November 1891, no. 700, dalam Vb. 9 Mei 1892,no.40

[88] Ibidem.

[89] Ibidem.

[90] Surat resmi dari konsul di Jedah, 26 November 1888, no. 797/19.

[91] Laporan DDI, hal.100.

[92] Untuk menghindari pembalasan, para saksi dirahasiakan namanya dan tidak memberikan kesaksian dalam sidang yang terbuka untuk umum; lihat informasi yang diberikan oleh mata-mata A dan D yang menyangkut 19 orang tersangka, dalam Exh. 24 Juni 1889, no. 76; lihat juga Surat resmi dari Residen Banten, 24 Sept. 1889, no. 297. dalam Exh. 23 Nov. 1889, no. 65.

[93] Mary Bachet memberikan kesaksian yang memberatkan H. Rapali, H. Isra, Ikan dan Samad; lihat PV 3 Jan. 1889; yang memberatkan H. Ramidin, H. Mulidin, H. Endung, H. Halari, H. Deli dan H. Marjaya, lihat PV 23 Jan. 1880; yang memberatkan H. Asim dan H. Munib, lihat PV 30 Jan. 1889. Istri Dumas memberikan kesaksian terhadap Otong dan Ence Mohamad Said, lihat PV 15 Jan. 1889; terhadap H. Muhidin, H. Endung, H. Halati dan H. Marjaya, PV 23 Jan. 1889; terhadap H. Japi dan H. Ali, lihat PV 30 Jan. 1889; terhadap Pakur, lihat PV 26 Maret 1889. Lihat juga kesaksian mereka terhadap Samidin, dalam IWR, No. 1336 (1889); juga No. 1337 (1889).

[94] Snouck Hurgronje, dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 4266.

[95] Lihat catatan Snouck Hurgronje mengenai kondisi-kondisi di Banten, 15 Agustus 1892.

[96] Bagian terbesar dari berita-berita acara sidang pengadilan menunjukkan langkanya pengakuan yang diberikan oleh para tawanan yang sedang diadili; Lihat PV 6 Des. 1889; 3 Jan. 1889; 15 Jan. 1889; 23 Jan. 1889; 30 Jan. 1889; 8 Maret 1889; 26 Maret 1889; 3 April 1889; 9 April 1889; 1 Mei 1889;16 Mei 1889; 3 luni 1889;11 Juni 1889 dan 23 Sept. 1889.

[97] Juga ada kepercayaan yang kuat bahwa para murid, yang tidak melakukan pembalasan untuk kiyai mereka, bisa kuwalat. Lihat JG (1891), no. 2, hal. 1202. Wabah penyakit ternak yang menyerang sesudah terjadinya pemberontakan itu dianggap sebagai kutukan Allah atas penduduk Banten karena mereka belum memusnahkan orang-orang kafir; lihat WNI (1889 -1890), hal.1534.

[98] Lihat OIB, 27 Des. 1888, no. 1; OIB 21 Jan. 1889, no. 2; OIB 31 Jan. 1889, no. 1; OIB 5 Feb. 1889, no. 1; OIB 13 Feb. 1889, no. 1; OIB. 24 Maret 1889, no. 4; OIB 10 April. 1889, no. 20; OIB 15 April, 1889, no. 10; OIB 1 Mei 1889, no. 1; OIB 8 Mei 1889, no. 5; OIB 27 Mei 1889, no. 12; OIB 18 Juni 1889, no. 1; OIB 8 Juli 1889, no. 80; OIB 11 Okt.1889, no. 8.

[99] Ibidem; lihat juga Appendix IX.

[100] Kolonioal Verslag, 1889, Bab C, hal. 4; tidak disebut-sebut tentang "pemberontak-pemberontak" lainnya yang ditangkap.

[101] Java Bode, 22 Juni 1889; De Locomotief, 17 Juni dan 21 Juni 1889. Lihat juga WNI (1888 - 1889), hal. 1532 - 1533,1747 - 1750.

[102] De Locomotiej, 18 Juil 1889; WNI (1888 -1889), hal. 1887 -1888.

[103] Surat resmi Residen Banten, 26 Juni 1889, no. 227, dalam MR 1889, no. 437. A. Djajadiningrat (1936), hal. 54.

[104] Java Bode, 22 Juni 1889.

[105] WNI (1888 -1889), hal. 1887 -1888.

[106] WNI (1888 -1889), hal. 1749

[107] WNI (1888 - 1889), hal. 1749 - 1750; tentang perdebatan yang sengit di dalam pers mengenai hukuman mati, lihat TNI (1889), no. 1, hal. 217 -224.

[108] Menteri Urusan Jajahan kepada Gubernur Jenderal, 28 Feb. 1889, F3/no. 12. Lihat juga Surat resmi Gubernur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan, 7 Mei 1889, M7.

[109] Bataviaosch Handelsblad, 14 luni 1889; WNI (1888 - 1889), hal. 1532 -1533; 1642 - 1643; 1771. Lihat juga Surat resmi dari Gubernur Jenderal kepada Menteri Utusan Jajahan, 15 Juni 1889, no. 1079, dalam Exh. 22 Juli 1889, no. 87.

[110] Surat resmi Residen Banten, 19 Sept. 1888, no. 69, dalam MR 1888, no. 641. Lihat juga Java Bode, " Okt. 1888.

[111] Surat resmi Residen Banten, 19 Sept. 1888, no. 69.

[112] Surat resmi Residen Banten, 26 Nov. 1888, no. 13124, dalam MR 1888, no. 802.

[113] IG (1891), no. 2, hal. 1203.

[114] OIB, 24 Maret 1889, no. 4 dan OIB,18 Juni 1889, no. 1; lihat juga PV 18 Maret 1889; PV 3 Juni 1889, dalam Exh. 24 Juil 1889, no. 77.

[115] OIB,11 Okt.1889, no. 8; PV 23 Sept. 1889.

[116] Nota dari Pengadilan Keliling kepada Residen Banten, 13 Sept. 1889, dalam Exh. 23 Nov. 1889, no. 65;juga OIB,11 Okt.1889, no. 8.

[117] Nota dari Pengadilan Keliling kepada Residen Banten, 13 Sept. 1889.

[118] Ibidem.

[119] OIB ,11 Okt. 1889, no. 8.

[120] Dalam pengakuannya, H. Abdulsalam menyebutkan orang-orang sebagai berikut : H. Abdulgani, H. Kailpudin, dan Mohamad Arip, semuanya dari Beji; H. Dung, Arja, Jafar; ilhat surat H. Abdulsalam kepada Residen Banten (tanpa tanggal) dalam Exh. 7 Juni 1889, no. 51.

[121] OIB,1 Mei, 1889, no. 1.

[122] Lihat Appendix D dari Laporan DDI.

[123] Ibidem.

[124] Ibidem.

[125] PV 6 Des. 1889; PV 3 Jan. 1889; PV 15 Jan. 1889; PV 30 Jan. 1889; PV 26 Maret 1889.

[126] OIB 9 Nov. 1888, no. 36.

[127] Kawat dari Residen Kediri kepada Gubernur Jenderal, 11 Agustus 1888, no. 333, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no. 10.

[128] Kawat dari Residen Kediri kepada Gubernur Jenderal, 15 Agustus 1888, no. 492 dan 18 Agustus 1888, no. 503, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no. 10.

[129] Laporan Panglima Tentara kepada Gubernur Jenderal, 15 Agustus 1888, no. 614, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no. 10. Lihat juga Java Bode, 8 dan 15 Sept. 1888; cf. IG (1889), no. 2, hal. 1783 - 1785.

[130] Surat resmi dari Residen Surakarta, 16 Agustus 1888, no. 42, dalam MR 1888, no. 578; Kawat dari Panglima Tentara, 17 Agustus 1888, no. 234, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no. 10,

mengenai desas-desus tentang akan terjadinya huru-hara di kalangan penduduk di Semarang. Lihatjuga Groneman1891), hal. 69.

[131] Surat resmi dari Residen Kediri, 16 Agustus 1888, no. 38, dalam MR 1888, no. 578; nama Herucokro menurut tradisi dipakai oleh orang yang bakal menjadi Ratu Adil; lihat Wiselius, dalam BKI,9 Vol. XIX (1872), hal. 172 - 217; Brandes, dalam TBG, Vol. XXXII (1889), hat. 368 - 430.

[132] Tokoh mesianik itu biasanya dinamakan Ratu Adil; tentang nama Sultan Adil, lihat Surat Resmi dari Residen Kediri, 16 Agustus 1888, no. 38.

[133] Lodoyo terkenal sebagai tempat pengasingan di zaman kerajaan Mataram; letaknya sebelah selatan Blitar (Kediri); lihat ENI, II /191 B).

[134] Nama itu rupa-rupanya merupakan singkatan dari Kiyai Mohamad Muktar; lihat Groneman (1891), hal. 67.

[135] Mengenai kisah tentang intrik-intrik keraton sekitar Gusti Muhamad, lihat Groneman (1891), hal. 220 - 222.

[136] Kawat dari Residen Kediri,15 Agustus 1888, no. 492.

[137] Surat resmi dari Residen Kediri,16 Agustus 1888, no. 38.

[138] Ibidem.

[139] Ibidem.

[140] Mengenai studi-studi yang ekstensif tentang tokoh Ratu Adil, lihat Wiselius, dalam BKI, Vol. XIX (1872), hal. 172 - 217; Brandes, dalam TBG, Vol. XXXII (1889), hal. 368 - 430; Drewes (1925), hal. 130 - 137; Schtieke (1959), hal. 76 - 95. Lihat juga Pigeaud (MS, 1943 - 1945), hal. 146 ff.

[141] Ibidem.

[142] Kawat dari Residen Kediri kepada Gubernur Jenderal, 15 Agustus 1888, no. 492; 18 Agustus 1888, no. 503; di Pasuruan telah ditangkap Kasanamat, lihat Kawat dari Residen Pasuruan, 16 Agustus 1888, no. 238, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no. 10; di Banjumas telah ditangkap 5 orang, lihat Kawat dan Residen Banyumas, 18 Agustus 1888, no. 103, dalam MR 1888, no. 578. Lihat juga Laporan Residen Kediri, 18 Okt. 1888, no. 52, dalam MR 1888, no. 740.

[143] Surat edaran Sekretaria Jenderal, 21 Agustus 1888, no. 135, dalam Vb. 21 Nov. 1888, no.10.

[144] Groneman (1891), hal. 67.

[145] Groneman (1891), hal. 71.

[146] Ibidem.

[147] Laporan KonUolir Serang, 19 Mei 1889, no. 16; lihat juga Surat resmi Residen Madiun, 20 Sept. 1889, La UI; cf. artikel Henny dalam IG (1921), no. 2, hal. 825 - 826. Dalam tahun 1905, Henny, konsul di Jedah, menyebutkan bahwa tidak lama setelah pemberontakan Banten pecah, seorang yang bernama H. Marjuki menetap di Warungjayeng (Kediri) untuk beberapa lama Asumsi Henny adalah bahwa orang itu H. Marjuki yang disebut-sebut oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya, Mekka, yakni salah seorang pemimpin utama pemberontakan Banten. Cf. Bab VI, catatan no. 63.

[148] Lihat di atas, Bab VI, hal. 261.

[149] WNI (1889 - 1890), hal. 1311.

[150] Groneman (1891), hal. 69; Surat resmi dari Residen Surakarta, 16 Agustus 1888, no. 42. Tadinya pengomplot-pengomplot di Banten itu juga merencanakan untuk melancarkan pemberontakan kita-kira pada waktu tersebut; lihat Laporan Kontrolir Serang, 15 Mei 1889, no. 16. Snouck Hurgronje yang menyebut ramalan Jayabaya dalam advisnya tertanggal 14 Jan. 1889, dalam Vb. 25 dan 1889, no. 19. Cf. Kawat dari ResidenYogyakarta, 1 Juli 1878, no. 68, dalam MR 1878, no. 452.

[151] Laporan Residen Surakarta, 12 Okt. 1888, dalam MR 1888, no. 776; De Locomotief, 15 Oktober 1888; Java Bode, 18 Okt. dan 1 Nov. 1888; IG (1889), no. 1, hal. 216; no. 2, hal. 1776;Koloniaa! Vers7ag,1889, kolom 5-6.

[152] Ibidem.

Bab IX

KELANJUTAN PEMBERONTAKAN

Setelah kita membahas secara terperinci semua peristiwa yang menggoncangkan Banten Utara dalam bulan Juli 1888, kita sekarang tinggal menelaah bekas-bekas yang ditinggalkannya dalam masyarakat Banten dan pengaruhnya terhadap pemerintahan Belanda dalam tahun-tahun berikutnya. Setelah api pemberontakan dapat dipadamkan, pemerintah Belanda dihadapkan kepada masalah mengadakan perubahan-perubahan di bidang administrasi, bukan saja yang menyangkut operasi sehari-hari aparat administrasi yang sederhana, akan tetapi juga untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam jangka panjang. Peristiwa-peristiwa bulan Juli 1888 benar-benar telah memaksa Belanda meninjau kembali politik kolonialnya. Politik kolonial yang baru yang mengandung banyak perubahan sebagai akibat pemberontakan itu, tak disangsikan lagi mempunyai korelasi dengan pandangan mengenai pemberontakan tersebut yang terdapat di kalangan-kalangan pemerintah. Di dalam bagian ini akan dibahas secara terperinci pengaruh pemberontakan terhadap pembaruan birokrasi, kebijaksanaan perpajakan, pendidikan agama, kedudukan pemimpin-pemimpin agama dan tindakan-tindakan pencegahan di bidang militer.

1 MENCARI PENJELASAN

Seperti telah disinggung sepintas lalu, pejabat-pejabat pemerintah di Banten selama hari-hari pertama pemberontakan kebingungan karena tidak mengetahui apa yang menyebabkan kerusuhan-kerusuhan itu. Mereka benar-benar dikejutkan oleh peristiwa itu, dan dalam usaha mencari penjelasannya, mereka mengemukakan berbagai pendapat yang saling bertentangan dan membingungkan. Para wartawan yang haus akan informasi mengenai pemberontakan itu telah mendapat penjelasan dari para komandan militer, pejabat-pejabat pemerintah dan korban-korban yang selamat, masing-masing dengan rekan-rekan atau teori-teori piciknya sendiri, mulai dari orang yang mengemukakan ide tentang pemberontakan yang meliputi seluruh negeri sampai kepada orang yang menganggap persoalannya sebagai peristiwa setempat saja. Mula-mula *Java Bode* mengemukakan pendapat bahwa pemberontakan itu dilancarkan oleh orang-orang dari Lampung.[1] Beberapa hari kemudian, *Bataviaasch Handelsblad* menyatakan bahwa "perampok" Sakam yang sudah terkenal itulah yang bertanggung jawab atas pemberontakan tersebut;[2] *Soerabaiasch Handelsblad* mengemukakan pendapat yang kira-kira sama, dan menganggapnya sebagai peristiwa yang terjadi secara kebetulan saja, malahan sebagai akibat suatu *affaire de femme*.[3] Penjelasan itu erat kaitannya dengan peranan yang dimainkan oleh Agus Suradikaria, yang telah memanfaatkan kerusuhan-kerusuhan itu untuk melampiaskan dendamnya dalam suatu persoalan pribadi. *Bataviaasch Handelsblad* malahan percaya bahwa dialah dalang utama pemberontakan itu.[4]

Dengan mulai menjadi jelasnya ruang lingkup pemberontakan itu, penjelasan-penjelasan tersebut dirasakan tidak memadai lagi, jika tidak dikatakan ngawur. Jalannya peristiwa-peristiwa di seluruh wilayah Banten Utara tidak dapat dicocokkan dengan teori yang menyatakan bahwa pemberontakan itu hanya bersifat lokal dan kebetulan. Orang sekarang memberikan tekanan yang lebih besar kepada sifat kompleks gerakan pemberontakan itu. Suratkabar-suratkabar menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : mengapa kebencian rakyat ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, baik Eropa maupun pribumi? Mengapa pemimpin-pemimpin terkemukanya terutama terdiri dari para kiyai atau haji? Apa yang menimbulkan rasa tidak senang di kalangan penduduk sehingga mereka ikut dalam

pemberontakan? Apa yang mereka tuntut dan macam pembaruan yang bagaimana yang mereka inginkan? Apakah pemberontakan itu secara keseluruhan bersifat politik, ataukah harus dianggap sebagai satu pergolakan sosial yang digerakkan oleh kalangan agama yang fanatik? Apakah ia mempunyai sebab-sebab keagamaan, dan apakah lembaga-lembaga Islam ikut menyebabkan kerusuhan-kerusuhan itu? Apakah ada sebab-sebab yang bersifat umum yang terdapat di daerah itu secara keseluruhan? Memang benar bahwa pada permulaan pemberontakan itu ada kecenderungan untuk menekankan segi-segi tertentu dan mengabaikan atau menganggap remeh segi-segi lainnya. Tidaklah mengherankan bahwa orang sudah berprasangka ketika mereka mencari sebab-sebab pemberontakan itu, oleh karena sedikit-banyaknya emosi mereka sudah terlibat di dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa pemberontakan itu secara keseluruhan bersifat politik, sementara adapula yang bersikeras bahwa peristiwa itu mempunyai dasar fanatisme agama.[5] Pendapat lain mengenai krisis itu menekankan bahwa sebab utamanya adalah pajak yang terlalu berat yang harus dipikul oleh penduduk.[6] Sejalan dengan pandangan itu dikemukakan pendapat bahwa kerusuhan-kerusuhan itu merupakan akibat langsung dari administrasi yang buruk.[7] Dalam pendapat itu tersirat kecaman terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang merupakan tanggung jawab pamongpraja. Orang sependapat bahwa keteledoran pamongpraja di Banten pada umumnya pasti telah membantu meratakan jalan bagi pemberontakan itu; seperti dikemukakan orang, "Banyak hal yang busuk di Banten".[8] Pendek kata, perdebatan mengenai sebab-sebab pemberontakan, yang berlangsung cukup lama, berkisar sekitar masalah menentukan satu faktor penyebab yang dianggap memainkan peranan yang menentukan dalam mencetuskan pemberontakan itu. Kebanyakan di antara orang-orang yang ikut dalam perdebatan itu sudah sependapat bahwa banyak faktor terlibat dalam gerakan itu, terutama dengan semakin lengkapnya pengetahuan mereka mengenai gerakan itu.

2 PANDANGAN-PANDANGAN KONTEMPORER

Di sini kita fidak perlu mempersoalkan kerumitan seluk-beluk serta ketidak-jelasan pendapat di masa itu tentang sebab-sebab pemberontakan. Kita hanya akan menunjukkan konsepsi-konsepsi di masa itu tentang sebab-sebab tersebut, yang membantu mereka untuk memahami dan menanggulangi situasi kritis yang mereka hadapi. Dalam kenyataannya, penyelidikan-penyelidikan teoretis mereka biasanya membuahkan cara-cara pengendalian yang praktis dan memungkinkan mereka untuk mengajukan rekomendasi-rekomendasi untuk masa-masa mendatang dan untuk menganjurkan diambilnya tindakan-tindakan dan diadakannya pembaruan-pembaruan. Seperti sudah dapat diperkirakan sebelumnya, orang-orang Belanda di negeri mereka sendiri ikut dalam usaha mencari sebab-sebab pemberontakan dan perdebatan seperti yang disebutkan di atas bergema pula dalam pers Belanda. Sebaliknya, orang-orang Indonesia sendiri jauh kurang artikulat dalam hal ini.

Selain pendapat umum terdapat pula pandangan anggota-anggota pemerintah kolonial, yang sejak semula sangat sibuk dengan penyelidikan praktis mengenai sebab-sebab pemberontakan itu. Rupa-rupanya, mereka tidak hanya berusaha untuk memahami, akan tetapi juga - jika tidak terutama - untuk memanipulasikan dan mengarahkan situasinya. Bagaimanapun mereka bukannya tidak bersalah dan seperti telah dikemukakan di atas, mereka telah menjadi sasaran utama kemarahan rakyat. Mari kita sekarang menyoroti beberapa sumbangan penting kepada perdebatan mengenai pemberontakan itu, termasuk sebab-sebabnya dan tindakan-tindakan yang telah diambil untuk mengatasinya,

Mula-mula *Java Bode* hanya berpendapat bahwa peristiwa Cilegon itu merupakan satu pemberontakan lokal, dengan landasan fanatisme agama yang dikobarkan oleh pemuka-pemuka tarekat Sufi.[9] Menurut surat kabar ini, apa yang dianggap sebagai serangan pemerintah kolonial terhadap agama Islam dan sikapnya yang mengabaikan pemuka-pemuka agama merupakan penyebab pokok dan alasan utama untuk melakukan pemberontakan itu. Dikemukakan selanjutnya, bahwa pemberontakan itu tidak ada sangkutpautnya dengan penarikan pajak yang terlalu berat, meskipun di kemudian hari diakui bahwa pelbagai tindakan

yang ada kaitannya dengan penarikan pajak telah menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan rakyat,[10] dan tidak disangsikan lagi telah membuat petugas-petugas pemerintah di daerah itu semakin tidak disukai. Pada akhir rangkaian artikel-artikel itu dikemukakan peringatan kepada pemerintah kolonial agar waspada terhadap suatu komplotan umum orang-orang Muslim.[11] Artikel Groneman dalam *De Gocomotief* dan *Nieuws van den Dag* juga mengemukakan bahwa ada satu kecenderungan di kalangan luas untuk memberontak, yang menurut pendapatnya disebabkan oleh ketidakpuasan yang umum.[12] Malahan ia berpendapat bahwa kerusuhan-kemsuhan yang terjadi di pelbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pertengahan kedua tahun 1888 mungkin telah melahirkan teori yang dianut oleh kalangan-kalangan luas tentang adanya suatu komplotan Muslim.[13] Tanpa menyebutkan penyebab-penyebab utama dari ketidakpuasan rakyat itu, Gioneman menganjurkan diadakannya pembaruan-pembaruan dalam kebijaksanaan kolonial untuk menghilangkan ketidaksenangan rakyat di bidang sosial dan ekonomi.[14]

Pandangan *Standaard* mengenai pemberontakan Cilegon boleh dikatakan sama dengan pandangan Groneman. Artikel dalam surat kabar itu menyatakan persetujuannya dengan pendapat Groneman; penulis artikel itu - Ottolander dari Pancur (Situbondo) - melangkah lebih jauh dari Groneman dalam mengecam pemerintah. Seperti dikatakannya, "semangat VOC masih menjiwai kalangan pemerintah".[15] Ia menyusun sebuah daftar sebab-sebab yang telah mencetuskan kerusuhan-kerusuhan itu, lalu menganjurkan pembaruan-pembaruan seperti penurunan pajak, penghapusan wajib tanam, perbaikan sarana-sarana komunikasi, perbaikan pendidikan pejabat pamongpraja, dan yang tidak kurang pentingnya, kristenisasi seluruh Nusantara.[16] Usul yang terakhir itu adalah sesuai dengan politik kristenisasi yang dijalankan oleh partai yang suaranya dibawakan oleh Standaard.[17] Dari sudut lain kalangan agama, kecaman terhadap pemerintah kolonial disuarakan oleh *De Tijd*. Surat kabar itu mencoba menganalisa sebab-sebab atau hakikat pemberontakan, dengan memberikan perhatian khusus kepada apa yang dinamakan masalah haji. Dalam analisa itu juga dikemukakan sejumlah besar penyebab penderitaan di bidang sosial dan ekonomi, seperti semakin miskinnya rakyat dan beban pajak yang berat; pendek kata, artikel itu bersimpati dengan pribumi, yang mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk merasa tidak puas.[18] Selain dari itu, *De Tijd* menyarankan agar pemerintah mencari pemecahan yang permanen mengenai masalah haji itu. Beberapa waktu kemudian, *Nieuwe Rotterdamsche Courant* memuat serangkaian artikel untuk menjelaskan sebab-sebab pemberontakan itu. Meskipun surat kabar itu tidak percaya akan adanya suatu komplotan "yang mencakup seluruh negeri", ia berpendapat bahwa tiga unsur harus dianggap sebagai musuh-musuh potensial bagi ketentraman dan ketertiban, yakni orang-orang Arab yang berkeliling, kaum haji dan anggota-anggota tarekat Sufi. Kesimpulannya adalah bahwa suatu kerjasama yang erat antara pejabat-pejabat Eropa dan pribumi merupakan satu keharusan dalam mengambil tindakan-tindakan administratif yang berhubungan dengan agama. Bagaimanapun, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan prasangka di kalangan penduduk bahwa pejabat-pejabat Eropa memusuhi Islam.[19] Surat kabar itu juga menolak tuntutan dijalankannya politik kristenisasi, dan menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan perasaan-perasaan penduduk yang beragama Islam.[20] Jelaslah bahwa pers, yang mencerminkan semangat pembaruan pada akhir abad XIX, berpendapat bahwa ada kaitan antara kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan pemerintah kolonial di satu pihak dan pemberontakan di pihak lain. Orang bertanya-tanya apakah antusiasme pembaruan itu meluas sampai ke praktek sehari-hari administrasi daerah atau setempat.[21]

Kembali kepada *De Locomotief*, perlu dikemukakan bahwa selama berlangsungnya perdebatan mengenai sebab-sebab pemberontakan, surat kabar ini memuat banyak tulisan, tidak hanya mengenai fakta-fakta tetapi juga mengenai penjelasan-penjelasan serta pendapat-pendapat tentang pemberontakan itu. Sejak semula redaksi surat kabar itu kelihatannya dapat memahami sifat kompleks pemberontakan itu, seperti terbukti dari pelbagai teori yang dikemukakan dalam sekian banyaknya artikel mengenai peristiwa Cilegon itu.[22] Dalam edisinya tanggal 1 Oktober 1888, surat kabar itu memuat sebuah daftar sebab-sebab yang telah mencetuskan pemberontakan tersebut. Yang terpenting adalah terlampau beratnya beban pajak, bencana-bencana alam, fanatisme agama, komplotan tarekat Sufi, dan kekurangan-kekurangan di pihak pejabat-pejabat pemerintah kolonial.[23] Daftar itu tidak memuat beberapa

sebab kurang penting ketidaksenangan di kalangan penduduk, yang sudah dibahas dalam artikel-artikel terdahulu di dalam surat kabar itu, seperti pengangkatan "orang-orang asing" sebagai pejabat pamongpraja di Banten,[24] intrik-intrik golongan pendukung sultan,[25] sikap kasar dan menghina yang diperlihatkan oleh pejabat-pejabat terhadap beberapa orang haji,[26] dan pencacaran kembali secara masaal.[27] Diantara tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh *De Locomotief* dapat dikemukakan berikut ini : penurunan sewa tanah, pembersihan di kalangan pamongpraja pribumi, pembuangan semua anggota keluarga sultan, dan penempatan detasemen-detasemen tentara di kota-kota tertentu di Banten.[28] Rangkuman opini pers itu sangat membantu usaha memahami sebab-sebab pemberontakan, namun tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai latar belakang peristiwa itu yang kompleks. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap itu, kita harus mengemukakan satu per satu apa yang dikatakan sebagai motif-motif kaum pemberontak sendiri.

Sebuah daftar yang panjang mengenai unek-unek yang dikemukakan oleh pemberontak-pemberontak yang ditawan untuk membenarkan tindakan mereka telah disusun selama berlangsungnya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktur Departemen Dalam Negeri. Satu di antara sumber-sumber ketidakpuasan yang utama adalah sistem perpajakan yang dibenci, termasuk sewa tanah yang sangat berat, pajak kepala dan pajak usaha. Orang-orang yang tidak membayar pajak-pajak itu diseret ke pengadilan dan didenda. Apabila kerajaan Islam sudah berdiri nanti, rakyat tidak akan diharuskan lagi membayar sekian banyaknya pajak dan denda. Kaum pemberontak juga yakin bahwa pemerintah nanti-nantinya akan menghapuskan agama mereka. Terlepas dari campur tangan dalam agama mereka, penduduk juga merasa sangat tersinggung oleh tindak-tanduk pejabat-pejabat yang memperlakukan mereka dengan sikap menghina. Kaum pemberontak ingin melampiaskan rasa dendam dan kebencian mereka terutama terhadap Patih dan Jaksa. Malahan mereka bermaksud melancarkan perang sabil di mana semua pejabat pemerintah akan dibunuh. Selanjutnya, penduduk sangat tersinggung perasaannya, oleh karena ketika diadakan pencacaran kembali, kehormatan kaum wanita tidak dihiraukan.[29] Mereka menyusun satu daftar mengenai tindak-tanduk Patih, tindakan-tindakan tidak adil yang menyolok, yang menimbulkan kemarahan dan ketidaksenangan di kalangan penduduk. Diberlakukannya peraturan-peraturan yang ketat mengenai praktek-praktek keagamaan di satu pihak, dan pengutipan pajak yang tak kenal ampun di lain pihak, telah menyebabkan penduduk kehilangan lembaga-lembaga dan cara hidup tradisional mereka sendiri. Beberapa contoh di antaranya adalah : larangan berzikir dengan suara keras, membunyikan gamelan pada perayaan perkawinan dan khitanan, mengadakan pertunjukan ronggeng, dan menyelenggarakan arak-arakan sebagai bagian dari upacara perkawinan dan khitanan.[30] Juga perlu dikemukakan sumber-sumber ketidakpuasan di kalangan pegawai rendahan sebagai akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh Patih, seperti terus-menerus memata-matai kegiatan mereka, mengawasi kontak mereka dengan rakyat, dan melarang mereka menerima hadiah-hadiah dari rakyat.[31] Pendek kata, semua keluhan tentang Patih dengan jelas menunjukkan bagaimana tindakan-tindakannya yang mungkin saja beritikad baik, sangat merugikan semata-mata oleh karena ia tidak mengindahkan pendapat rakyat dan tradisi daerah.

3 LAPORAN KOMISARIS PEMERINTAH

Tidak dapat disangkal bahwa pecahnya pemberontakan itu disebabkan oleh sudah menumpuknya perasaan tidak senang di kalangan penduduk. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi-kondisi yang buruk yang terdapat di Banten sebelum pemberontakan, kita harus menelaah fakta-fakta dari dalam dan tidak hanya mengandalkan pada deduksi atau spekulasi. Yang kiranya cocok untuk tujuan ini adalah laporan yang telah disebutkan di atas, yang disampaikan oleh Direktur Departemen Dalam Negeri, J.M. van Vleuten. Sementara pihak militer sedang sibuk mengejar dan menumpas pemberontak, aparat pemerintahan juga digerakkan dan dimulailah suatu penyelidikan, umum mengenai situasi umum di Banten dan asal mula serta sebabsebab pemberontakan. Van Vleuten diangkat

sebagai Komisaris Pemerintah,[32] dan tepat delapan hari setelah pecahnya pemberontakan ia sudah berada di tempat untuk melakukan penyelidikan di seluruh daerah itu. Ketika pada akhirnya - sekitar dua bulan kemudian - laporannya dikeluarkan, ia ternyata merupakan sebuah dokumen yang tebal yang terdiri dari sekitar 200 halaman tertulis, tidak termasuk sekian banyaknya dokumen yang menyertai laporan itu.[33] Harus diakui bahwa laporan itu tak disangsikan lagi memuat banyak sekali informasi, namun demikian membacanya harus secara kritis, oleh karena, seperti telah dikemukakan di atas, laporan itu dibiaskan oleh asumsi-asumsi yang arbitrer dan oleh sudut pandangan yang subyektif.[34] Situasi seperti yang dikemukakan dalam laporan itu nampaknya hampir-hampir mencemaskan. Laporan itu sangat merugikan reputasi pamongpraja pada umumnya, dan pejabat-pejabat Banten pada khususnya. Rupa-rupanya laporan itu juga telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pemerintah pusat. Apabila fakta yang sekian banyaknya yang tak dapat dipungkiri lagi itu diumumkan, maka hal itu dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial.[35] Bagian pertama laporan itu, yang memuat fakta-fakta dasar dan deskripsi mengenai perkembangan pemberontakan, tidak dapat diperdebatkan lagi, namun bagian yang kedua, yang mencoba memberikan penjelasan dan penerangan mengenai hubungan sebab-akibat dari pelbagai faktor, menjadi sasaran serangan dari pihak pejabat-pejabat puncak dalam pemerintah pusat. Meskipun laporan itu telah mendapat kecaman-kecaman keras, namun bagian terbesar usul-usulnya mengenai pembaruan-pembaruan untuk masa mendatang di kemudian hari disetujui oleh pemerintah. Oleh karena itu maka banyak tindakan dan pembaruan administratif yang dilakukan sesudah pemberontakan itu sedikit-banyaknya dapat dipandang sebagai buah hasil kerja Komisaris. Oleh karena laporan itu cukup relevan dengan masalah yang merupakan pokok pembahasan dalam bab ini, kita perlu menelaahnya secara lebih terperinci.

Dalam laporannya yang pertama, yang ditulis tidak lama setelah ia tiba di Banten, van Vleuten mengemukakan pendapat bahwa fanatisme agama merupakan penyebab utama pemberontakan.[36] Akan tetapi ditambahkannya, bahwa "khotbah tentang kebencian terhadap orang-orang kafir hanya merupakan bahan bakar yang tidak dapat dibakar tanpa api". Dikatakan selanjutnya bahwa api itu diberikan oleh pelbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah.[37] Dalam laporan finalnya ia memberikan tekanan yang lebih besar kepada keanekaragaman sebab-sebabnya; beban pajak dan kekurangan-kekurangan yang serius di pihak sementara pejabat di daerah itu dianggap sebagai dua di antara sebab-sebabnya yang paling berpengaruh. Sudah tentu ia tidak membantah sejumlah penjelasan yang berdasarkan motif-motif keagamaan. Sebaliknya, bagian kedua laporannya dimulai dengan deskripsi mengenai seluruh latar belakang pemimpin-pemimpin pemberontak, Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Lalu dikemukakannya sikap rakyat yang sangat taat kepada agama dan peranan menonjol para guru dan haji dalam masyarakat Banten. Selanjutnya ia mengadakan perbandingan antara jumlah haji di Banten dan di keresidenan-keresidenan lainnya.[38] Dalam bagian lainnya dari laporan itu, ia menyebutkan satu per satu kejengkelan-kejengkelan yang disebabkan oleh campur tangan para pejabat dalam urusan agama.[39] Van Vleuten telah memperoleh banyak manfaat dari karya-karya van den Berg dan Holle mengenai tarekat Naksibandiah yang ia pelajari, khususnya mengenai soal-soal yang berkenaan dengan pimpinan, organisasi dan ritual tarekat Kadiriah di Banten.[40] Di dalam laporan itu pula ia mengecam keras Gubbels dan Raden Penna, dan ia berpendapat bahwa sikap mereka yang angkuh dan menjauhkan diri dari rakyat merupakan salah satu sumber utama ketidaksenangan di kalangan penduduk.[41] Selanjutnya ada pernyataan mengenai kepribadian Gubbels dan Raden Penna serta mengenai kehidupan mereka sebagai pejabat dan sebagai perorangan.[42] lalu ditarik kesimpulan bahwa kedua pejabat itu samasekali tidak cocok untuk masyarakat Banten. Van Vleuten tidak lupa untuk menyebutkan kecenderungan penduduk Banten untuk memberontak, seperti yang dibuktikan oleh silih bergantinya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sana dalam abad itu.[43] Selain menjelaskan akar yang lebih dalam dari sikap penduduk yang bermusuhan itu, laporan itu juga memuat keterangan tentang hal-hal yang tidak menyenangkan Haji Wasid secara pribadi, yang dianggap sebagai salah satu penyebab langsung pecahnya pemberontakan itu. laporan itu mencoba untuk menyingkapkan motif-motif Haji Wasid, dan mengemukakan pendapat bahwa ia telah mengidentifikasikan dirinya dengan perjuangan suci dan di dalam keadaan nekad telah berhasil mempercepat gerakan pemberontakan.[44] Dikatakan lebih lanjut bahwa Haji Wasid

telah memainkan peranan penyebab yang penting, semata-mata karena ia memberikan pimpinan kepada mereka yang tidak puas.[45] Mengenai soal ini, van Vleuten mencetuskan suatu perdebatan yang hangat dengan *Java Bode*, yang berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin pemberontaklah yang telah membangkitkan rasa tidak puas di kalangan penduduk dan menghasut mereka agar berjuang bersama-sama melawan kaum kafir yang mereka benci, jadi bukan beban pajak yang terlalu berat yang telah menyebabkan mereka ikut dalam pemberontakan.[46] Kita jangan lupa bahwa menurut pendapat *Java Bode*, fanatisme agamalah yang merupakan penyebab utama pemberontakan.[47] Oleh karena itu, surat kabar itu tidak percaya kesalahan ada di pihak pamongpraja.

Laporan itu memuat keterangan yang sangat terperinci dan dilengkapi dengan banyak dokumen mengenai beberapa persoalan administratif yang menyangkut pemungutan pajak, yang dalam tahun-tahun sebelumnya telah menimbulkan banyak perselisihan antara para pejabat dan penduduk. Dari uraian itu orang dapat mengetahui kebijaksanaan yang dilakukan oleh petugas-petugas pemerintah dalam menarik pajak - sewa tanah, pajak usaha, pajak kepala - dalam tahun-tahun sebelumnya. Dikemukakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah tidak menghiraukan keinginan-keinginan dan perasaan-perasaan rakyat, dan dengan demikian ikut menumbuhkan suasana resah yang merupakan sumber kekuatan bagi gerakan pemberontakan. Secara terang-terangan van Vleuten melukiskan bagaimana caranya peraturan-peraturan dilaksanakan dan bagaimana rakyat menanggapi peraturan-peraturan itu. Untuk tidak mengulang, pembaca dipersilahkan melihat kembali uraian yang diberikan dalam Bab II:[48] perlu diingatkan kembali bahwa yang paling tidak puas adalah mereka yang menuntut penurunan pajak perahu, pembebasan dari pajak kepala, dan pemungutan sewa tanah secara perseorangan. Dalam usaha mencari pemecahan, van Vleuten mendekati masalah-masalah itu dengan suatu pemahaman yang jelas mengenai adat-istiadat daerah dan tidak dengan jalan berpegang ketat pada peraturan-peraturan pemerintah. Sesungguhnya, laporannya itu menunjukkan dengan jelas bagaimana pemberontakan telah memaksa pemerintah kolonial meninjau kembali banyak di antara pembaruan-pembaruan administratif yang telah diadakannya. Van Vleuten mengakui sepenuhnya bahwa, khususnya yang menyangkut kewajiban melakukan kerja bakti dan dengan demikian kewajiban membayar pajak kepala, seluruh sistem hak milik perorangan, adat-istiadat dan sistem perpajakan yang tradisional di Banten bertentangan dengan pembaruan-pembaruan itu.[49] Ia juga mengakui bahwa penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh petugas-petugas pemerintah dan kesewenang-wenangan mereka dalam melaksanakan peraturan-peraturan di desa telah sangat memperbesar perasaan tidak senang di kalangan penduduk. Ia selanjutnya menganjurkan peninjauan kembali daftar penetapan pajak usaha sebagai salah satu langkah perbaikan. Selain itu, ia menganjurkan agar penetapan sewa tanah secara komunal diganti dengan penetapan secara perorangan; dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah, ia menasihatkan agar dicegah terjadinya manipulasi oleh golongan-golongan yang berpengaruh di desa. Peraturan tentang pajak kepala hendaknya diubah untuk memenuhi tuntutan rakyat. Peraturan yang baru hendaknya dapat menjamin bahwa yang harus membayar pajak kepala itu hanyalah mereka yang terkena wajib kerja bakti sesuai dengan tradisi di Banten.[50] Demikianlah rekomendasi-rekomendasinya yang menyangkut pemungutan pajak.

Van Vleuten menganggap pemberontakan itu sebagai huru-hara di mana agama tidak memainkan peranan penting; namun demikian, ia menyadari bahwa pemuka-pemuka agama memang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada pejabat-pejabat pemerintah dan bahwa ekspansi agama - yakni Islam mempermudah timbulnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban.[51] Meskipun ia rupa-rupanya penganut politik netral yang liberal dan cita-cita tentang toleransi dan kebebasan agama, peristiwa-peristiwa mengerikan di Cilegon telah meyakinkannya bahwa pemerintah harus melipatgandakan usaha-usahanya untuk mengontrol praktek-praktek keagamaan. Di dalam laporannya itu, ia menjelaskan pandangannya mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka "kebijaksanaan mengontrol agama" itu. Hingga saat itu pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menghalang-halangi pertumbuhan apa yang dinamakan sekolah-sekotah agama, tidak pula menyel'idiki watak guru-gurunya. Van Vleuten mengemukakan bahwa boleh dikatakan setiap orang dapat mengangkat dirinya sebagai guru, tak peduli apakah ia memenuhi syarat atau tidak;[52] dan bahwa orang harus waspada terhadap

bahaya yang terdapat di dalam kebebasan yang besar yang diberikan kepada orang-orang itu oleh pemerintah, oleh karena kebebasan itu dapat digunakan untuk membangkitkan rasa permusuhan terhadap penguasa yang kafir. Oleh karena itu ia menganjurkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang orang menjadi guru tanpa memperoleh izin terlebih dulu dari pemerintah. Bupati, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan agama di daerahnya, harus ditugaskan untuk mengawasi para guru itu.[53] Yang menarik adalah bahwa bagian terbesar pejabat Banten dan pemimpin-pemimpin agama yang terkemuka menyambut baik usul itu, akan tetapi sulitlah untuk memastikan apa yang mendorong mereka untuk bersikap demikian.[54] Mungkin mereka merasa jijik terhadap keprimitifan kaum pemberontak dan kekejaman-kekejaman yang telah mereka lakukan, atau mungkin pula mereka ingin sekali menunjukkan kesediaan mereka untuk mendukung pemerintah. Sudah barang tentu, di dalam masa krisis seperti itu, pejabat-pejabat Banten dari semua tingkatan berusaha untuk dengan cara apa saja menunjukkan loyalitas dan kesetiaan mereka kepada pemerintah.[55] Dengan mengecualikan rencananya mengenai pengawasan terhadap guru-guru agama, usul-usul yang dikemukakan oleh Komisaris Pemerintah itu sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah - yakni untuk menghindari kesan adanya campur tangan dalam praktek-praktek keagamaan. Sebelum peraturan tentang pengawasan terhadap guru-guru agama dapat diberlakukan, dampaknya terhadap pendapat orang-orang pribumi harus diteliti secara terperinci. Mengenai tarekat, van Vleuten hanya menggunakan beberapa kata saja tentang penempatan mereka di bawah pengawasan pemerintah.[56] Van Vleuten merasa yakin bahwa peraturan seperti itu tidak akan merupakan ancaman bagi agama Islam dan karenanya tidak akan menimbulkan kegemparan di kalangan penduduk, berlainan dengan apabila dikeluarkan peraturan-peraturan mengenai perjalanan naik haji.[57] Ia juga mengemukakan masalah sekitar gelar-gelar dan kedudukan apa yang dinamakan "pendeta-pendeta" Muslim (sic) dan kaum haji; ia minta agar pemerintah memrakarsai penyelidikan mengenai soal ini.[58] Pandangan-pandangan van Vleuten mengenai soal-soal agama memancing banyak komentar dari rekan-rekan sejawatnya dan suatu penyelidikan yang lebih seksama mengenai kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan rakyat dianggap sangat perlu. Akan tetapi hal itu hanya dapat dilakukan secara sungguh-sungguh sesudah tibanya Snouck Hurgronje, yang oleh pemerintah dianggap orang yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan itu.[59]

Van Vleuten mengakhiri laporannya yang panjang lebar itu dengan delapan usul. Empat usul yang pertama menyangkut pengangkatan van Hasselt sebagai asisten residen Anyer dan pemecatan Raden Penna sebagai patih di daerah itu. Usul kelima memuat rekomendasi agar diadakan penyelidikan mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar wajib kerja bakti di daerah itu, dan agar dipersiapkan langkah-langkah untuk memberlakukan kembali penetapan sewa tanah secara perorangan. Usul keenam menyarankan agar van Lawick van Pabst diangkat sebagai pembantu Residen Banten dengan tugas melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di dalam usul kelima. Usul ketujuh merekomendasikan agar Direktur Departemen Dalam Negeri diberi wewenang untuk melaksanakan usul kelima dan usul keenam. Usul terakhir menyarankan agar Direktur Departemen Pendidikan Agama dan Perindustrian diminta merancang sebuah peraturan yang akan menempatkan pendidikan agama di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pihak pemerintah.[60] Dari rekomendasi-rekomendasi mengenai cara-cara untuk mencegah terulangnya kerusuhan-kerusuhan itu dapat dilihat kesimpulan yang telah ditarik oleh van Vleuten. Orang dengan mudah dapat melihat bahwa menurut kesimpulannya pemberontakan mempunyai sebab-sebab yang beraneka ragam.

Usul-usul itu mendapat sambutan yang baik dari Dewan Hindia, meskipun dewan itu mempunyai keberatan terhadap hal-hal tertentu. Orang yang paling terang-terangan menentang Komisaris Pemerintah itu adalah Wakil Presiden Dewan itu sendiri; ia berpendapat bahwa setiap usaha untuk mencampuri urusan keagamaan kiranya akan sangat menyinggung perasaan keagamaan bagian terbesar penduduk dan dapat dengan mudah membangkitkan semangat jihad dan perlawanan dari pihak rakyat. Rakyat akan bersedia tunduk kepada kekuasaan penjajah apabila "mereka diizinkan mempertahankan warisan suci dari leluhur mereka".[61] Ia menganjurkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan preventif dan bukan tindakan-tindakan represif.

Pendirian *Java Bode* - yakni bahwa pejabat-pejabat pemerintah tidak dapat dipersalahkan - didukung oleh seorang penulis anonim dalam *Indische Gids* dan oleh beberapa anggota Dewan Hindia.[62] Meskipun mereka mengakui bahwa Gubbels mempunyai kekurangan-kekurangan, anggota-anggota Dewan Hindia itu berpendapat bahwa Gubbels secara jujur telah berusaha agar penetapan pajak dilakukan secara bijaksana. Selain dari itu, mereka menganggap kecaman keras van Vleuten terhadap Asisten Residen dan Patih sebagai sangat berprasangka dan memihak, terutama oleh karena ia tidak mengemukakan sepatah kata pun untuk menyalahkan residen Banten, Engelbrecht.[63] Dalam kenyataannya, masalah ini telah memancing lebih banyak komentar lagi dalam beberapa tahun berikutriya. Van Sandick boleh dikatakan mempunyai pandangan yang sama dengan van Vleuten mengenai pemberontakan itu, akan tetapi ia memberikan tekanan yang lebih besar kepada ketidakpuasan umum di kalangan rakyat daripada kepada fanatisme agama. Van Sandick melangkah lebih jauh lagi dalam analisanya dengan menunjuk kepada ketidakpuasan di bidang sosial dan ekonomi selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan itu.[64] Satu sumbangan yang penting kepada perdebatan mengenai sebab-sebab pemberontakan adalah esey yang ditulis oleh Nederburgh, yang didasarkan pada angka-angka dari laporan-laporan kolonial, dan mencoba menunjukkan bahwa beban pajak di Banten dan di seluruh Pulau Jawa sangat berat dalam bagian akhir tahun-tahun delapan puluhan.[65] Nederburgh berpendapat bahwa tekanan-tekanan ekonomi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, sehingga penduduk mempunyai kecenderungan untuk memberontak. Esey itu dapat dipandang sebagai sanggahan terhadap artikel dalam *Java Bode*, yang didasarkan kepada sumber-sumber yang sama dan berpendapat bahwa di Banten tidak ada pemungutan pajak yang melampaui batas.[66]

4 PENGATURAN-PENGATURAN ADMINISTRATIF

Sekarang kita akan menelaah pengaturan-pengaturan administratif yang harus diadakan selama bulan yang vital sesudah situasi dapat dikendalikan. Pengaturan yang paling mendesak adalah mengenai pengangkatan seorang asisten residen di afdeling Anyer untuk mengisi lowongan yang disebabkan oleh kematian Gubbels. Menurut van Vleuten, orang yang paling cocok untuk jabatan itu adalah van Hasselt, yang saat itu masih menjabat sebagai asisten residen di Sumedang. Van Hasselt pernah bertugas di Banten sebagai asisten residen Caringin selama kurang-lebih tujuh tahun, dan telah berpengalaman dalam hal bekerja sama dengan pejabat-pejabat Banten, baik tinggi maupun rendah. Ia tidak saja mempunyai hubungan baik dengan beberapa bupati di Banten, tetapi juga dapat bergaul dengan rakyat.[67] Tidak lama setelah pecahnya pemberontakan, ia sudah berada di tempat untuk menggantikan Gubbels untuk sementara waktu. Ia kelihatannya akan mampu untuk memulihkan hubungan baik antara pejabat-pejabat Eropa dan pribumi di Caringin. Oleh seorang koresponden *Weekblad van NederlandsehIndie* ia dilukiskan sebagai "seorang gentleman sejati" atau, menurut istilah pejabat-pejabat Banten, seorang menak, dan ia mempunyai reputasi yang tak diragukan lagi sebagai seorang pajabat pemerintah. Akan tetapi penulis buku ini menyangsikan apakah ketentraman di daerah itu memang berkat administrasinya.[68]

Langkah berikutnya adalah membebaskan Raden Penna dari tugasnya. Kedudukannya sebagai patih afdeling Anyer tidak dapat dipertahankan lagi setelah terjadinya peristiwa-peristiwa terakhir itu, dan dengan cara apa pun ia harus dipindahkan dari sana. Seperti sudah kita lihat, ada petisi-petisi tertentu yang mengeluh tentang cara yang digunakan oleh Raden Penna untuk menunaikan tugas-tugas administratifnya.[69] Mungkin tuduhan yang telah dikemukakan terhadap dirinya, yakni bahwa ia sudah mengetahui sebelumnya tentang komplotan itu, dimaksudkan untuk mencapnya sebagai seorang *persona non grata*. Menurut pandangan Komisaria Pemerintah, Raden Penna bagaimanapun tak bisa diberi kedudukan di Banten atau di tempat lain. Nampaknya tak ada cara pemecahan lain mengenai persoalan itu kecuali memensiunkannya.[70] Rupa-rupanya desas-desus jahat yang tersiar dimaksudkan tidak saja untuk mendiskreditkan patih itu di mata pemerintah, melainkan juga untuk membangkitkan kembali masalah lama yang merikuhkan yang berhubungan dengan penempatan "orang-orang

asing" di Banten. Ketika Komisaris Pemerintah memerintahkan penyusunan sebuah daftar pejabat-pejabat bukan orang Banten di daerah itu, tersiar desas-desus bahwa pejabat-pejabat itu akan dipindahkan dari sana.[71] Akan tetapi sejauh yang dapat kita ketahui, tidak pernah diambil tindakan seperti itu. Mengenai nasib Raden Penna, ia tidak lama kemudian diangkat sebagai anggota pengadilan yang akan memeriksa perkara Cilegon.[72]

Meskipun van Vleuten telah membahas secara panjang lebar sebab-sebab pemberontakan itu sejauh yang menyangkut pamongpraja, masih ada satu soal yang, anehnya, tak pernah is singgung. Ia tak pernah menyebut-nyebut nama Engelbrecht, yang menjabat sebagai residen Banten pada saat pecahnya pemberontakan, dan kealpaannya itu oleh sementara pengecamnya dicap sebagai satu usaha untuk melindungi residen tersebut.[73] Kenyataan bahwa Engelbrecht dan seluruh stafnya tak menduga samasekali akan terjadinya pemberontakan itu masih tetap merupakan sumber ketidakpuasan bagi pemerintah pusat dan pers, yang terus mendesak minta penjelasan mengenai tindak-tanduk Engelbrecht. Seperti telah dikemukakan di atas, *Java Bode* tidak dapat menemukan penjelasan lain mengenai pecahnya pemberontakan yang sangat mengherankan itu, kecuali bahwa emosi rakyat telah dibakar oleh beberapa orang yang fanatik. Kampanye yang dilancarkan oleh surat kabar ini, jika berhasil, akan membantu menangkis semua kecaman dan tuduhan terhadap Residen.[74] Akan tetapi Engelbrecht sendiri menyadari bahwa keadaannya sudah tidak menguntungkan baginya dan bahwa oleh karenanya ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengajukan permintaan berhenti. Administrasinya telah ditandai oleh keteledoran, dan orang bagaimanapun tidak dapat mengatakan bahwa ia telah bertindak cepat dalam hari-hari pertama kerusuhan untuk memulihkan ketertiban.[75] Agar situasi di Banten dapat dikendalikan, perlu diangkat residen baru. Pengangkatan Velders sebagai residen Banten mungkin sekali dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa ia pernah bertugas di sana sebelumnya dan bahwa ia mempunyai reputasi yang baik sebagai seorang administrator. Bagaimanapun, Komisaris Pemerintah menganggapnya sebagai orang yang paling cocok untuk jabatan itu. Dalam bulan yang sangat penting sesudah pemberontakan dapat ditumpas, ketika harus dilakukan segala usaha untuk menguasai situasi dan menghilangkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, maka orang seperti Velders sangat dibutuhkan. Sebelumnya ia pernah bertugas sebagai asisten residen di Caringin dan setelah itu sebagai residen Lampung; ia sudah hafal semua peraturan tanpa harus tenggelam di dalamnya; ia dikenal sebagai seorang yang berani, jujur dan biasa bertindak tegas.[76] Tindakan drastis yang segera diambil oleh Velders begitu berbeda dengan sikap bimbang yang diperlihatkan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya sehingga banyak orang merasa sangat lega, terutama di kalangan orang-orang Eropa. "Surat-surat dari Bantam" yang banyak dimuat dalam *Weekblad van Nederlandsch*-Indie memuat deskripsi yang lengkap tentang keadaan yang menjadi lebih baik berkat tindakan-tindakan yang diambil oleh Velders.[77] Beberapa di antara tindakan-tindakan itu akan dibahas pada waktunya nanti. Kecepatan bertindaknya itu tidak selalu mendapat persetujuan pemerintah pusat, semata-mata karena hal itu hanya akan memperburuk dan bukan memperbaiki situasinya. Persoalan tentang kedudukan bupati Serang merupakan satu contoh yang menarik.

Satu di antara persoalan-persoalan yang paling penting dan jauh jangkauannya yang diajukan setelah pemberontakan itu adalah sampai sejauh mana bupati Serang, R.A.P. Gondokusumo, bertanggung jawab atas pecahnya pemberontakan itu. Tidak lama setelah pemberontakan itu ditumpas tersiar desas-desus yang menyatakan bahwa ia akan segera mengundurkan diri. Tentang alasan-alasannya terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia dicurigai mempunyai sangkut paut dengan pemberontakan itu; ada yang berpendapat bahwa sudah waktunya bagi pemerintah untuk memensiunkannya setelah ia mencapai masa kerja selama lebih kurang tiga puluh tahun.[78] Alasan yang sebenarnya mungkin tidak akan diketahui. Kita tidak boleh lupa bahwa di saat-saat yang penuh dengan perselisihan dan intrik itu, sering kali terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan sikap mereka mengenai pemberontakan. Beberapa tahun kemudian, Mas Jayaatmaja mengisahkan satu contoh tentang tindak-tanduk Gondokusumo pada saat pecahnya pemberontakan yang sudah ia ketahui secara pribadi. Pengungkapan Jayaatmaja tentang keadaan yang sebenarnya pada saat itu dengan sendirinya hampir-hampir menimbulkan skandal. Menurut kisahnya itu, sang Bupati pasti telah diberitahu

tentang bakal terjadinya kerusuhan itu oleh sekurang-kurangnya tiga orang : Padmadirja, asisten wedana Balagendung; Raden Haji Ahlil, pensiunan patih Serang; dan Mas Haji Mohamad Arsad, panghulu-kepala di Serang.[79] Pertanyaannya adalah, mengapa ia tidak memperingatkan pemerintah. Dikatakan oleh Condoseputro, seorang anak Bupati Serang, bahwa ayahnya telah menyampaikan sebuah laporan kepada pemerintah mengenai akan segera terjadinya kerusuhan-kerusuhan.[80] Bagaimanapun keadaan yang sebenarnya, kita mengetahui dengan pasti bahwa Gondokusumo mempunyai perigaruh yang besar karena ia seorang anggota keluarga Sultan dan juga mempunyai banyak pengikut.[81] Oleh karena itu dikhawatirkan bahwa pengunduran dirinya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan baru. Dilihat dari segi ini, maka pengangkatan penggantinya mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintahan di Banten. Sebelum kita memasuki persoalan ini, terlebih dulu perlu dikemukakan dua hal lain mengenai sikap Gondokusumo terhadap pemberontakan. Pertama, peranannya yang tidak jelas dalam percaturan politik di Banten harus dijelaskan dari segi hubungannya yang sangat erat dengan pemimpin-pemimpin agama. Perlu diingat kembali, bahwa prestise pemimpin-pemimpin agama telah sangat bertambah besar selama masa jabatannya, oleh karena ia menunjukkan sikap yang sangat hormat terhadap mereka.[82] Malahan didesas-desuskan bahwa ia menjadi anggota tarekat Kadiriah. Oleh karena itu pejabat-pejabat Eropa menaruh kecurigaan yang besar bahwa Gondokusumo hampir pasti telah mengetahui sesuatu mengenai akan terjadinya pemberontakan itu dan bahwa ia telah lalai untuk melaporkan apa yang ia ketahui itu. Sesungguhnya, banyak pejabat pribumi dicurigai oleh pejabat-pejabat Eropa, dan oleh karenanya, kenyataan bahwa tidak dilakukan pengusutan setelah pemberontakan itu ditumpas, menyebabkan pejabat-pejabat itu merasa sangat rikuh. Di mata pejabat-pejabat itu, sikap pemerintah dalam hal ini terlalu bermurah hati, atau menurut istilah mereka, "gupernemen terlalu adil".[83] Soal kedua yang menyangkut sikap Gondokusumo terhadap pemberontakan itu adalah hubungan yang antagonistik, jika tidak bermusuhan, antara Gondokusumo dan Raden Penna. Sesungguhnya, sejak saat Raden Penna ditugaskan sebagai patih Anyer, Gondokusumo tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan-kerusuhan di daerah itu, oleh karena dengan diangkatnya Raden Penna berakhirlah fungsi pengawasan Bupati Serang atas daerah itu.[84] Sampai sejauh mana intrik-intrik yang sudah terkenal di kalangan priyayi Banten itu dapat dianggap sebagai salah satu penyebab kerusuhan mungkin tidak akan pernah terungkap. Kita mengetahui terlalu sedikit mengenai kegiatan golongan-golongan lain dari kalangan pamongpraja yang dapat menarik banyak keuntungan dari usaha mendiskreditkan kedua pejabat tinggi itu. Bahwasanya sedang berlangsung suatu pertarungan politik di antara kelompok-kelompok tertentu yang dipimpin oleh priyayi-priyayi terkemuka di masa sesudah pemberontakan itu, telah diungkapkan oleh persoalan yang berkaitan dengan pengangkatan bupati baru untuk Serang.

Di antara rekomendasi-rekomendasi mengenai calon untuk mengisi jabatan tersebut, pendapat Residen Banten tentunya paling menentukan. Velders menyadari sepenuhnya bahwa dalam keadaan seperti itu pemilihan bupati Serang harus dilakukan dengan teliti. Menurut dia, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) ia harus mempunyai martabat yang tinggi dan mau bekerja keras; (2) setia kepada pemerintah Hindia Belanda; (3) dapat dipercaya dan diandalkan; (4) jujur dan taat kepada agama akan tetapi tidak terpengaruh oleh pemimpin-pemimpin agama. Dengan ukuran syarat-syarat itu, maka baik anak maupun menantu Gondokusumo tidak bisa diangkat sebagai penggantinya. Yang disebut pertama dianggap mentalnya tidak cocok untuk pekerjaan itu, sedangkan yang disebut belakangan, yang tidak mempunyai pengalaman, bisa terlalu dipengaruhi oleh ayahnya, R.T. Sutadiningrat, yang pada waktu itu menjadi bupati Pandeglang.[85] Mengenai Sutadiningrat, Residen menamakannya orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi menunjukkan inisiatif. Selain dari itu, Residen beranggapan bahwa Sutadiningrat didominasi oleh istrinya yang kedua, anak Ratu Siti Aminah, yang kefanatikannya juga tidak disenangi oleh pemerintah.[86] Orang melihat kemungkinari bahwa Residen dengan demikian akan terpaksa menyimpang dari tradisi, di mana bupati Pandeglang biasanya dipromosikan menjadi bupati Serang. [87]

Velders menyebutkan empat pejabat senior di Banten yang dapat dianggap sebagai calon-calon potensial untuk mengisi jabatan bupati Serang - Mas Jayaatmaja, Raden Bagus layawinata, Raden Surawinangun dan Raden Tumenggung Suria Nataningrat.[88] Yang pertama

adalah jaksa kepala di Serang; kariernya sebagai orang bukan asal Banten adalah berkat kecakapannya dan pengabdiannya kepada tugasnya. Residen merekomendasikan agar ia tetap di Serang pada kedudukannya itu.[89] Tentang Jayawinata, yang telah kita sebut-rebut sebelumnya, ia adalah adik Sutadiningrat dan ayah Jayadiningrat bersaudara.[90] Ia baru saja dinaikkan pangkatnya menjadi wedana Menes, dan pengangkatannya sebagai bupati Serang dapat menyinggung perasaan Raden Surawinangun, patih Serang. Dengan pertimbangan bahwa yang disebut belakangan itu berasal dari Banten Selatan, maka Residen menyarankan bahwa akan lebih baik kiranya jika ia diangkat menjadi bupati Lebak.[91] Akan tetapi hal itu tidak mungkin, selama Suria Nataningrat tidak dipindahkan ke Priangan atau tempat lain. Oleh karena di Priangan tidak ada lowongan, maka suatu pemecahan yang baik kiranya adalah memindahkan Suria Nataningrat ke Serang. Oleh karena itu, maka dalam surat rahasianya tertanggal 9 Juli 1889, Velders mengusulkan Suria Nataningrat sebagai bupati Serang dan Surawinangun sebagai bupati Lebak. Pokok pertama dari usulnya itu tidak konsisten dengan pendiriannya bahwa pengangkatan pejabat-pejabat yang berasal dari luar Banten merupakan satu kesalahan politik.[92] Pilihan Residen sudah cukup jelas; akan tetapi pemerintah pusat menyangsikan apakah usulnya itu, jika disetujui, akan menguntungkan baik bagi administrasi di Banten maupun bagi usaha menstabilkan situasi politik di sana. Usul Residen itu ditentang oleh Direktur Departemen Dalam Negeri sendiri. Mengenai dua di antara calon-calon yang disebutkan di atas, yakni Sutadiningrat dan Surawinangun, timbal suatu perdebatan yang cukup ramai. Direktur Departemen Dalam Negeri berpendapat bahwa mengenai pemindahan Sutadiningrat ke Serang, pemerintah pusat tidak akan begitu berkeberatan seperti yang hendak dikesankan oleh Residen. Tentang tuduhan Residen mengenai kefanatikan dan pengaruh istri kedua Sutadiningrat, ia menganggapnya sebagai tidak benar; menurut pengamatan, ia tidak menunjukkan sikap fanatik lagi sejak ibunya meninggal dunia. Selain dari itu, ia takut istri pertama akan kembali dan karenanya tidak ingin menyusahkan suaminya; oleh karena itu ia tidak akan menimbulkan kesulitan. Pengangkatan Sutadiningrat juga mempunyai keuntungan bahwa pengaruh para pemuka agama akan sangat dibatasi, oleh karena sepengetahuan pemerintah ia bukan orang yang ortodoks.[93] Ketika diwawancarai oleh Residen, Sutadiningrat menyatakan bahwa ia akan tunduk sepenuhnya kepada pemerintah, meskipun ia bukarmya tidak merasa berat untuk meninggalkan Pandeglang, oleh karena ia merasa senang dengan iklim yang sehat dan kehidupan yang tenang di sana. Ia lalu mengemukakan bahwa ia adalah bupati yang paling tua dengan mesa jabatan yang paling lama di Banten dan mendapal kepercayaan dari pemerintah. Jika ia tidak mendapat pengangkatan itu, maka dapat timbul kesan bahwa pemerintah tidak percaya lagi kepadanya. Ia mengingatkan Residen bahwa menurut kebiasaan birokrasi di Banten, bupati Pandeglang selalu menggantikan rekannya di Serang.[94]

Mengenai pencalonan Surawinangun sebagai bupati Lebak, Direktur Departemen Dalam Negeri tidak setuju samasekali dengan pandangan Residen yang semula. Dalam hubungan ini ia menyinggung soal yang peka, yakni kesulitan keuangan yang menjerat Surawinangun. Umum sudah mengetahui, bahwa ia hidup mewah sekali ketika ia ditugaskan di Pandeglang. Oleh karena itu, ketika ia dipindahkan ke Serang sebagai patih, ia diperlakukan dengan penuh kecurigaan oleh Bupati. Orang mengetahui bahwa di kemudian hari Bupati memberikan pinjaman uang tanpa bunga kepadanya. Surawinangun telah mengatakan bahwa adalah lebih aman untuk meminjam dari atasannya daripada dari bawahannya atau dari orang Cina. Perbuatan Bupati itu dengan sendirinya menimbulkan kecurigaan di kalangan umum mengenai maksudnya yang sebenarnya dengan meminjamkan uang kepada Patih itu. Mungkin, demikian dugaan orang, Patih mengetahui terlalu banyak mengenai hal ihwal Bupati.[95] Satu hal lainnya yang menimbulkan kecurigaan orang mengenai Patih dan Bupati itu adalah bahwa setelah Bupati memberikan pinjaman itu, mata-mata yang dipakai oleh Patih menjadi bungkam samasekali. Karena tidak adanya bukti-bukti, maka tidak mungkin untuk memastikan sampai sejauh mana tuduhan itu merupakan fitnah yang bertujuan untuk mendiskreditkan kedua pembesar itu. Menurut pandangan Residen, informan-informan Direktur Departemen Dalam Negeri sedang berusaha untuk menimbulkan kesan yang jelek mengenai Patih, sehingga ia tidak akan masuk hitungan apabila pemerintah hendak mengangkat bupati-bupati baru di Banten.[96]

Bupati Lebak, Suria Nataningrat, dilukiskan sebagai seorang pejabat yang rajin, sopan-santun dan berperikemanusiaan; ia juga taat beragama namun tidak fanatik. la bukan putra daerah tempat ia ditugaskan, dan selama delapan tahun masa tugasnya di sana ia belum berhasil sedikit pun merebut kepercayaan penduduk.[97] Sampai tingkat tertentu Velders benar apabila ia menganggap penugasan Suria Nataningrat yang Sunda itu di Lebak sebagai satu kesalahan politik. Penempatannya di Serang mungkin akan menimbulkan bencana. Suria Nataningrat sendiri menyadari sepenuhnya bahwa di Serang ia tidak akan mampu memperoleh dukungan, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan pemuka agama. Selain itu, ia telah mengecam keras kegiatan-kegiatan bupati Serang, Gondokusumo, dan ia takut bahwa, apabila ia berada di Serang, Gondokusumo akan berusaha membalas dendam dan mengusahakan kejatuhannya. Sesungguhnya, ia ingin sekali dipindahkan ke Priangan.[98] Akan tetapi oleh karena di sana belum ada lowongan, ia terpaksa bertahan terus dalam kedudukannya yang sekarang di Lebak.

Dalam perlombaan memperebutkan kedudukan nomor satu di Banten itu, Sutadiningrat nampaknya menang. Pada akhir perdebatan birokratis itu, Residen berhasil diyakinkan untuk menerima usul Direktur Departemen Dalam Negeri yang lebih menguntungkan daripada usulnya sendiri. Suatu penyelesaian yang memuaskan dicapai mengenai calon-calon lainnya. Surawinangun diangkat menjadi bupati Pandeglang menggantikan Sutadiningrat yang menjadi bupati Serang.[99] Kedua pengangkatan penting ini segera disusul dengan pengangkatan para patih, wedana, dan sebagainya, di antaranya yang terpenting adalah pengangkatan Jayawinata sebagai patih Caringin.[100]

5 PENEMPATAN DETASEMEN-DETASEMEN TENTARA

Sementara itu, sepanjang pertengahan kedua tahun 1888, masyarakat Belanda di Banten dan di luarnya, yang ditimpa suasana terkejut dan bingung akibat kekejaman-kekejaman yang terjadi di Cilegon, dibakar oleh rasa benci dan dendam kesumat yang sangat mendalam. Hasrat yang berkobar-kobar untuk melakukan pembalasan, sering kali dilampiaskan terhadap haji yang pertama-tama dijumpai Belanda.[101] Oleh karena sudah tidak merasa aman lagi, sementara orang Belanda mempersenjatai diri dan yang lain-lainnya pindah ke kota-kota. Setiap kabar, bagaimanapun kecilnya, yang menyangkut kerusuhan di sembarang tempat di Pulau Jawa, sudah cukup untuk menimbulkan suasana teror dan panik.[102] Suasana *haji-fobi* benar-benar mencekam orang-orang Belanda di seluruh Pulau Jawa. Mereka tidak melihat alasan untuk menunjukkan sikap belas kasihan terhadap kaum pemberontak dan mereka menghendaki dijalankannya kebijaksanaan penumpasan dan penghukuman yang keras.[103]

Tidaklah mengherankan bahwa di dalam suasana seperti itu kekuatan militer dianggap sangat penting. Khususnya mengenai Banten, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak boleh terpedaya oleh perasaan aman yang palsu hanya karena permusuhan-permusuhan sudah berhenti. Meskipun tidak lagi terlihat adanya pelampiasan dendam kesumat secara terang-terangan, kedudukan pejabat-pejabat pemerintah masih dianggap rawan. Pada akhir tahun itu masih terdapat detasemen-detasemen tentara di tempat-tempat di mana telah dikerahkan kontingen-kontingen pemberontak yang besar selama pemberontakan, seperti Cilegon, Bojonegoro dan Balagendung. Di kedua tempat terakhir, detasemen-detasemen itu yang masing-masing berkekuatan 17 orang, hanya akan ditarik setelah hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap kaum pemberontak dilaksanakan. Residen Banten menganggap perlu untuk mempertahankan tangsi di Cilegon untuk sementara waktu; kekuatannya dapat dikurangi secara berangsur-angsur sampai tinggal 25 atau 30 orang di bawah pimpinan seorang opsir. Sementara itu dirasa perlu untuk segera menempatkan sebuah detasemen prajurit [104] di Caringin dan Lebak. Residen harus mengakui bahwa meskipun iklim politik di kedua daerah itu cukup baik, tindakan berjaga-jaga perlu diambil agar pemerintah sudah siap seandainya timbul lagi huru-hara. Oleh karena Caringin dan Lebak letaknya jauh dari ibukota, maka pemerintah tidak dapat bertindak cepat.[105] Tiap detasemen hendaknya berkekuatan sekurang-kurangnya dua puluh orang dan akan diambil dari luar Banten. Residen

selanjutnya menyarankan bahwa sebaiknya orang-orang itu diambil dari Ambon, Menado atau Timor. Yang ia maksudkan adalah sebuah korps militer yang begitu asing, begitu berbeda perasaan dan prasangka-prasangkanya, sehingga mereka tidak akan bersekutu dengan orang-orang Banten dan akan bertindak cepat dalam keadaan darurat. Usulnya itu tidak mendapat tentangan yang berarti dan dengan mudah disetujui oleh badan-badan pemerintah pusat yang bersangkutan. Menurut keputusan itu, detasemen-detasemen polisi akan ditempatkan di afdeling-afdeling Caringin dan Lebak, masing-masing terdiri dari 24 orang di bawah pimpinan 2 kopral, 1 sersan dan seorang instruktur Eropa. Orang-orang itu akan direkrut dari Ambon, Menado dan Timor.[106] Dalam usahanya mencapai efisiensi dalam administrasinya, pemerintah kolonial berpegang kepada kebijaksanaan Romawi yang sudah tua : *divide et impera*.

6 MASALAH KEDUDUKAN KEPALA DESA

Jelaslah bahwa satu di antara masalah-masalah yang paling penting dan jauh jangkauannya yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mengkonsolidasikan kedudukan kepala desa, yang di tempat-tempat lainnya di Pulau Jawa merupakan *"palladium*" ketentraman dan ketertiban. Sifat kerusuhan-kerusuhan selama pemberontakan tak disangsikan lagi telah ikut menyingkapkan ketidakberdayaan kepala desa. Yang membuat masalah itu lebih serius lagi adalah bahwa berdasarkan pengusutan-pengusutan yang dilakukan ternyata sejumlah jaro atau lurah telah bergabung dengan kaum pemberontak atau bekerja sama dengan mereka.[107] Situasi umum mengenai ketidakberdayaan kepala desa itu juga telah dibuktikan dengan jelas dalam usaha melaksanakan pelbagai peraturan agraria yang diberlakukan tidak lama sebelum pemberontakan.[108] Di dalam situasi yang terdapat ketika itu, peraturan-peraturan itu samasekali tak dapat dilaksanakan pada tingkat desa. Oleh karena itu, langkah-langkah harus diambil untuk memperkuat kedudukan kepala desa dan membuatnya lebih menarik. Sering sekali terjadi ada kepala desa yang minta berhenti, sementara banyak kepala desa lainnya dengan tak sabar lagi menantikan saatnya mereka dibebaskan dari jabatan mereka.[109] Semua itu disebabkan karena beban dan risiko yang melekat pada jabatan mereka tidak mendapat imbalan yang secukupnya. Menurut pendapat Residen, sebaiknya dibuat satu rencana untuk mengganjar kepala desa. la menyarankan agar kepala desa diberi imbalan dalam bentuk pembebasan dari sewa tanah sampai sejumlah 25 gulden; anggota-anggota pamong desa lainnya agar dibebaskan dari sewa tanah sampai sejumlah 15 gulden.[110] Oleh karena ada keberatan-keberatan terhadap usul Residen itu, Direktur Departemen Dalam Negeri menganjurkan agar kepala desa dan anggota-anggota pamong desa lainnya diberi tanah jabatan.[111] Namun pejabat-pejabat yang lebih tinggi menyatakan keberatan terhadap usul itu dengan alasan bahwa desa tidak dapat menyediakan tanah untuk dibagi-bagikan sebagai tanah jabatan. Lalu disarankan agar diadakan penyelidikan yang seksama untuk memutuskan sampai sejauh mana tanah-tanah negara dapat digunakan untuk tujuan itu. Jika hal itu tidak mungkin, akan dicoba menjajaki kemungkinan lain, yakni membeli tanah dari desa yang bersangkutan. Untuk membeli tanah itu pemerintah barangkali dapat memberikan pinjaman uang.[112] Direktur Departemen Dalam Negeri telah menghitung berapa banyaknya uang yang akan diperlukan untuk membeli tanah-tanah jabatan itu. la sampai kepada jumlah 75.000 golden untuk Banten saja; ada 1256 desa yang tidak mempunyai tanah jabatan.[113] Dari sumber-sumber yang ada, kita tidak dapat memastikan apakah pemerintah benar-benar telah memberikan uang sebanyak itu; besar sekali kemungkinannya tidak, oleh karena masalah memperkuat kedudukan jaro telah muncul kembali dalam tahun-tahun 1920-an.[114]

7 MASALAH PAJAK

Satu masalah penting lainnya yang dihadapi pemerintah di Banten adalah beban pajak. Beban pajak ini sangat dirasakan oleh penduduk desa dan sangat merepotkan baik penduduk desa maupun para pejabat. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk membuat satu sistem

perpajakan yang dapat dilaksanakan dan, tetutama setelah pemberontakan, perhatian pihak berwajib ditujukan terhadap persoalan itu. Seperti telah disebutkan di atas, Komisaris Pemerintah di dalam laporannya menganggap pemungutan sewa tanah secara komunal sebagai salah satu sumber ketidakpuasan di kalangan penduduk dan mengusulkan agar orang kembali kepada pemungutan secara perorangan. Akan tetapi Residen Banten berpendapat bahwa pemerintah tak mungkin kembali kepada sistem pernungutan sewa tanah secara perorangan tahun itu dan kiranya tidak akan menguntungkan untuk mengambil langkah itu dalam masa depan yang dekat. la berpendapat bahwa untuk sementara waktu akan cukup kiranya untuk meluruskan pemungutan sewa tanah itu, terutama di afdeling-afdeling Anyer dan Serang, di mana sering kali dicatat adanya ketidakpuasan di kalangan pembayar pajak. Untuk tujuan itu hendaknya dibentuk komite-komite yang akan melakukan survey-survey untuk memastikan apakah sewa tanah telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan luas tanah yang bersangkutan. Komite-komite itu juga harus memastikan apakah penduduk diperlakukan secara adil oleh pamong desa pada saat pembagian beban pajak itu (repartitie). Dalam waktu yang bersamaan, hendaknya dikumpulkan data-data mengenai harga padi, produktivitas lahan, dan dengan sendirinya ukuran yang tepat dari lahan-lahan itu. Selain ketiga faktor itu, keadaan tanaman lahan yang bersangkutan juga harus diperhitungkan dalam menetapkan besarnya pajak.[115]. Mengingat sangat sulitnya mengklasifikasikan lahan-lahan itu di satu pihak, dan keresahan serta gejolak yang dapat timbul di kalangan penduduk sebagai akibat tidak adanya kepastian mengenai penetapan pajak baru selama masa peralihan di lain pihak, maka Residen sangat menentang diberlakukannya kembali penetapan pajak secara perorangan. Tanpa membahas argumen-argumennya secara terperinci, sudah cukup jelas kiranya bahwa ia menyangsikan apakah pemerintah, dengan bantuan tenaga-tenaga ahli sekalipun, akan berhasil merancang satu sistem pajak tanah yang sempurna. Residen mengemukakan usul-usul balasan sebagai berikut : untuk mengatasi keberatan-keberatan terhadap pembagian beban pajak menurut sistem "repartitie", hendaknya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar peta mengenai lahan-lahan yang juga menunjukkan batas-batas setiap lahan, sementara taksiran mengenai beban pajak yang harus dipikul oleh setiap lahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Satu penyelidikan yang lebih terperinci hendaknya dilakukan mengenai harga padi, oleh karena hal itu merupakan satu faktor penting dalam menentukan besarnya pajak yang dapat dikenakan. Dalam hubungan ini, Residen mengemukakan bahwa, sebagai akibat tidak adanya jaringan komunikasi yang baik, perbedaan harga dari tempat ke tempat cukup menyolok. Malahan ada tempat-tempat di mana hampir tidak ada jual-beli padi.[116] Direktur Departemen Dalam Negeri dengan tegas menolak argumen-argumen Residen itu dengan mengatakan bahwa dalam banyak hal argumen-argumen itu terlalu dilebih-lebihkan. Menurut pendapatnya, untuk mengklasifikasikan lahan-lahan untuk keperluan penetapan pajaknya tidak memerlukan waktu sebanyak yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh Residen, apabila pemerintah di Banten menempuh prosedur yang sama seperti di Priangan. Direktur mengetahui benar bahwa dalam banyak hal pendapat Residen bertentangan dengan pendapatnya sendiri; oleh karena itu ia menyangsikan apakah pemerintah pusat benar-benar dapat mengandalkan kepada kerja sama Residen dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mengembalikan sistem pemungutan pajak secara perorangan. la menyarankan agar pemerintah pusat mengangkat seorang pejabat yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan seluruh pembaruan itu.[117]

Sementara itu Residen sudah mulai menugaskan komite-komite ke desa-desa, untuk meniadakan segala ketidakadilan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan membantu penduduk dalam membagi-bagi beban pajak lahan masing-masing. Menurut keterangan Inspektur Kepala Tanaman Budi Daya, mereka bekerja dengan baik sekali. Dari notanya kepada Direktur Departemen Dalam Negeri, orang dengan mudah menarik kesimpulan bahwa ia mendukung sepenuhnya gagasan dan buah pikiran Residen. la juga mengemukakan bahwa menurut hasil penyelidikan, besarnya pajak yang ditetapkan jauh di bawah beban pajak yang mampu dipikul oleh rakyat di afdeltng-afdeling Anyer dan Serang. Menurut pendapatnya tidak akan menguntungkan untuk mengadakan penurunan pajak yang besar di daerah-daerah itu. Sebaliknya ia berpendapat bahwa sebaiknya dilihat dulu hasil-hasil eksperimen mengenai sistem perpajakan di Priangan sebelum pemerintah memberlakukan sistem yang baru di

Banten.[118]

Akan tetapi Dewan Hindia tidak setuju dengan rencana Residen dan Inspektur Kepala untuk mempertahankan sistem penetapan pajak secara komunal, juga apabila penetapannya didasarkan pada data-data yang lebih akurat mengenai luasnya lahan, produktivitas lahan dan harga-harga padi. Dewan menekankan perlunya pemerintah segera kembali kepada sistem penetapan sewa tanah secara individual di Banten, meskipun Dewan juga berpendapat agar sebaiknya dilihat dulu hasil eksperimen di Priangan seperti yang disebutkan di atas.[119] Sementara itu van Vleuten, yang telah mendesak pemerintah pusat agar kembali kepada penetapan pajak secara individual, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Departemen Dalam Negeri. Ia digantikan oleh Inspektur Kepala Tanaman Budi Daya tersebut di atas, Kuneman. Sudah jelas bahwa ia dan Residen Banten bukan merupakan orang-orang yang dengan gigih menuntut dilaksanakannya pembaruan-pembaruan yang diusulkan itu.

Seperti telah disebutkan di atas, keluhan-keluhan mengenai beban pajak juga menyangkut pajak kepala dan pajak usaha. Mengenai pajak yang pertama, Residen dengan cepat mengambil langkah-langkah administratif untuk mempercepat dipulihkannya cara pemungutan pajak kepala menurut kebiasaan setempat.[120] Pemerintah selanjutnya mengadakan penyelidikan-penyelidikan, tidak hanya di Banten, melainkan di seluruh Pulau Jawa, yang hasilnya akan digunakan untuk mengubah pajak perdagangan. Survey itu, yang diprakarsai oleh Residen Banten, menunjukkan bahwa di daerahnya, sekitar 4300 orang yang bekerja sebagai pedagang kecil, mempunyai penghasilan kurang dari 50 gulden sebulan. Mayoritas besar pedagang-pedagang kecil itu melakukan pekerjaan mereka hanya pada hari-hari tertentu saja dalam satu minggu; mereka berdagang hanya untuk mendapat penghasilan tambahan.[121] Residen Banten mengusulkan agar golongan pedagang kecil ini dibebaskan dari pajak usaha.[122] Kita mengetahui dengan pasti bahwa di kemudian hari diadakan perubahan dalam peraturan mengenai pajak usaha itu, sehingga pedagang-pedagang kecil yang berpenghasilan kurang dari 25 gulden satuhun dibebaskan dari pajak usaha.[123]

8 MASALAH PENCACARAN KEMBALI

Oleh karena telah disuarakan keluhan-keluhan mengenai pencacaran kembali, kita juga harus mencurahkan perhatian kita kepada langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kesehatan rakyat, tanpa menimbulkan ketakutan pada mereka dan dengan jalan mengatasi prasangka-prasangka mereka. Menurut desas-desus yang tersiar, Kepala Dinas Kesehatan Umum, yang sedang melakukan perjalanan inspeksi ketika terjadi pemberontakan, akan terbunuh andaikata ia tidak mengubah rencana perjalanannya pada saat-saat terakhir. Menurut desas-desus itu, orang-orang yang telah membunuh Gubbels telah mencari informasi mengenai di mana beradanya Kepala Dinas Kesehatan Umum itu. Mudah dipahami mengapa kebencian ditujukan terhadap orang yang harus melaksanakan peraturan-peraturan yang tidak populer. Umum mengetahui bahwa rakyat Banten sangat lambat mengerti bahwa vaksinasi merupakan satu keharusan untuk memerangi penyakit dan dengan demikian memajukan kesejahteraan rakyat. Di beberapa distrik, kampanye vaksinasi terhambat oleh ketidakmampuan jaro membujuk penduduk agar bersedia dicacar; pada kesempatan lain rakyat muncul secara serentak, sehingga menimbulkan kerikuhan. Seperti diketahui, protes-protes yang menentang vaksinasi terhadap wanita dan gadis melibatkan manifestasi perasaan rakyat yang sangat keras.[124] Oleh karena ada tentangan dari pihak penduduk itu, maka pencacaran dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat pamongpraja yang pengaruhnya diperlukan agar kampanye itu bisa efektif. Menurut laporan Kepala Dinas Kesehatan Umum, dalam tahun 1889 pencacaran dapat dilaksanakan di Banten tanpa campur tangan atau keluhan dari kalangan rakyat.[125] Di samping itu perlu ditambahkan bahwa orang yang mencap sikap rakyat Banten sebagai "ogah-ogahan" atau "masa bodoh", tidak dapat memahami pandangan hidup orang Banten yang mempunyai dasar yang berbeda, yang menganggap pencacaran sebagai tidak sesuai dengan keyakinan moral dan agama mereka.

Masih ada dua masalah penting yang dihadapi pemerintah yang akan kita bahas : (1) masalah lama yang sekarang jadi mendesak mengenai soal-soal keagamaan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan haji dan pendidikan agama; (2) administrasi yang buruk, penyelewengan-penyelewengan yang jahat dan menyolok, yang membuat Banten begitu terkenal karenanya.

9 MASALAH-MASALAH URUSAN AGAMA

Menghadapi persoalan-persoalan yang sulit yang menyangkut urusan agama, pemerintah kolonial dalam masa sebelum pemberontakan senantiasa berusaha untuk menghindari kedua sikap yang ekstrim, yakni campur tangan sepenuhnya atau tidak campur tangan samasekali. Dengan demikian, maka sikap netral terhadap agama tetap merupakan dasar yang sudah digariskan bagi kebijaksanaan kolonial Belanda. Namun demikin, memang ada beberapa pembatasari yang dikenakan terhadap perjalanan naik haji dalam abad itu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pelbagai penyalahgunaan dan keburukan-keburukan yang menyangkut perjalanan naik haji telah menimbulkan desakan agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki keadaannya.[126] Pertambahan yang sangat menyolok dalam jumlah jemaah haji serta silih bergantinya pergolakan-pergolakan yang dihasut oleh para haji telah menumbuhkan rasa takut terhadap kaum haji di kalangan orang-orang Belanda, yang di antaranya ada yang menuntut agar pemerintah melarang samasekali perjalanan naik haji dan membatasi kegiatan para haji. Akan tetapi dalam pelbagai kesempatan, kebijaksanaan yang tradisional yakni untuk bersikap netral terhadap agama telah ditegaskan kembali : pemerintah pusat tidak bersedia untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Satu contoh yang menarik dari awal tahun-tahun tujuh puluhan dapat dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijaksanaan itu. Setelah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang meluas pada akhir tahun-tahun enam puluhan dan awal tahun-tahun tujuh puluhan,[127], diajukan sebuah rekomendasi agar diadakan larangan mengenakan pakaian haji, agar haji-haji dilarang menjadi pejabat pemerintah dan agar perjalanan naik haji diawasi dengan ketat.[128] Dewan Hindia menolak untuk mengalah terhadap orang-orang yang berteriak-teriak agar pemerintah menempuh garis kebijaksanaan yang keras dan sebaliknya menekankan perlunya diambil tindakan-tindakan yang hati-hati dan konstruktif untuk melawan gerakan-gerakan keagamaan yang fanatik.[129] Sekitar dua dasawarsa kemudian persoalan-persoalan itu kembali dibicarakan, akan tetapi di dalam suasana yang lebih panas. Setelah terjadi peristiwa berdarah di Cilegon, orang dicekam oleh perasaan ngeri dan kampanye yang menghendaki agar kaum pemberontak ditumpas tanpa ampun mendapat sambutan hangat dan dukungan yang luas di sebagian besar masyarakat Belanda; kampanye itu menuntut agar orang dilarang mengenakan pakaian haji, agar peserta-peserta dalam pemberontakan dihukum keras dan agar guru-guru agama diawasi secara ketat.[130] Akan tetapi sebagai tanggapan atas rekomendasi-rekomendasi yang lantang itu, pemerintah pusat menolak setiap tindakan yang melibatkan pengejaran terhadap kaum haji hanya karena mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka. Lebih dari yang sudah-sudah disadari benar-benar bahwa suatu "politik Islam" yang lebih menyeluruh dan jelas definisinya merupakan satu keharusan. Sementara itu, pemerintah juga harus menanggulangi *haji-fobi* yang sudah kronis yang menjadi lebih parah setelah terjadinya peristiwa Cilegon dan kerusuhan-kerusuhan selanjutnya, yang mencekam kalangan-kalangan luas dalam masyarakat Belanda dalam tahun-tahun sesudah pemberontakan itu. Akan tetapi, tindakan-tindakan yang menentukan dalam soal-soal itu dan dalam sekian banyak soal-soal lainnya yang menyangkut agama, harus menunggu kedatangan Snouck Hurgronje, yang telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan mengenai hakikat agama Islam di Indonesia dan memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai soal-soal agama Islam. Sesudah Snouck Hurgronje bertindak sebagai penasihat, pemerintah mulai dengan tindakan pembaruan dalam urusan agama, dan yang dijadikan pegangan adalah pandangan Snouck Hurgronje.

Sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membahas tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje dalam kaitannya dengan pemberontakan di Cilegon, terlebih dulu perlu

dikemukakan tindakan-tindakan yang diusulkan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh Residen Banten sendiri. Nampaknya sejak semula ia lebih cenderung untuk menempuh garis kebijaksanaan yang keras dan untuk bertindak tegas terhadap kaum pemberontak. Dalam salah satu surat resminya ia mengemukakan pendapat bahwa seharusnya hukum militer segera diberlakukan setelah pecahnya pemberontakan itu dan bahwa lebih banyak lagi desa yang harus dibakar habis agar kaum pemberontak cepat-cepat menyerah.[131] Menurut pendapatnya, menuntut kaum pemberontak melalui proses hukum yang biasa tidak akan menimbulkan kesan yang sama kuatnya terhadap rakyat dibandingkan dengan penumpasan tanpa ampun yang ia sendiri inginkan. Dikatakan selanjutnya bahwa memperlakukan rakyat secara peri kemanusiaan pada waktu diperlukan tindakan-tindakan yang tegas dapat ditafsirkan oleh rakyat sebagai tanda kelemahan.[132]

Kita mulai dengan beberapa masalah kecil yang harus ditanggulangi oleh Residen : larangan yang telah dikeluarkan oleh Asisten Residen Anyer untuk mengadakan arak-arakan dan hiburan musik dalam pesta-pesta segera dihapuskari dan untuk masa-masa selanjutnya orang hanya diharuskan memberi tahu pihak berwajib setempat terlebih dulu. Mengenai penyelenggaraan zikir, tidak dikeluarkan peraturan-peraturan khusus, terserah kepada pejabat-pejabat setempat untuk mengatur persoalan ini secara bijaksana; dalam keadaan bagaimanapun penyelenggaraan zikir tidak boleh mengganggu lingkungan.[133]

Meskipun mengenai pelbagai masalah Residen tidak sependapat dengan van Vleuten, ia dapat menyetujui usul-usulnya mengenai pendidikan keagamaan. Kedua orang itu berpendapat bahwa sekolah-sekolah agama telah menimbulkan banyak keresahan. Terutama guru-guru agama yang wataknya diragukan telah menyebarkan ketidakpuasan dan semangat keagamaan yang mendekati fanatisme. Van Vleutert dan Residen merasa bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan itu sudah bisa diperkirakan akan timbul dari bertambah banyaknya sekolah-sekolah agama. Akan tetapi sebelum diambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan, tokoh-tokoh terkemuka tertentu di kalangan pribumi perlu diminta pendapatnya. Residen mengetahui bahwa tokoh-tokoh yang terkemuka dan berpengaruh di Banten dapat menyetujui diadakannya pembatasan-pembatasan terhadap praktek-praktek yang mereka anggap tidak baik dan merendahkan itu yang dikaitkan dengan pendidikan agama.[134] Dianjurkan agar tidak saja guru-guru agama diklasifikasikan dalam pelbagai kategori, melainkan juga agar diadakan ujian untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai guru agama. Bupati Pandeglang, Sutadiningrat, menyarankan serangkaian tindakan di dalam satu pernyataan yang ia sampaikan kepada Komisaris.[135] Residen menganjurkan agar tindakan-tindakan itu diambil di seluruh Pulau Jawa. Akan tetapi sebelum tindakan-tindakan itu dapat diambil, pembatasan terhadap pendidikan agama harus dipertimbangkan dulu secara seksama dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim diamati dengan cermat. Selain dari itu, semenjak Snouck Hurgronje telah diangkat sebagai penasihat, ia selalu diminta pendapatnya setiap kali diusulkan peraturan-peraturan mengenai soal-soal agama. Di bawah nanti akan kita bahas pendapatnya.

Masalah pakaian haji, yang telah sering kali disampaikan kepada pemerintah agar diperhatikan, juga telah dikemukakan oleh Residen di dalam surat resminya tersebut di atas. Ia berpendapat bahwa kebiasaan mengenakan pakaian haji sudah tersebar luas di Banten dan bahwa meskipun kelihatannya tidak apa-apa, kebiasaan itu secara potensial berbahaya, oleh karena orang yang berpakaian seperti itu sangat dihormati oleh penduduk desa biasa. Akibatnya, hal itu menimbulkan satu dorongan yang sangat ampuh untuk memperalat rakyat biasa yang ingin sekali memberikan jasa-jasa mereka kepada para haji. Larangan untuk mengenakan pakaian haji akan meniadakan eksploatasi ekonomis dan politis yang lahir dari tata hubungan itu. Namun demikian, oleh karena tindakan yang sedrastis itu besar kemungkinannya akan menghadapi perlawanan yang kuat, maka pelaksanaannya diserahkan kepada akal sehat dan kebijaksanaan pejabat-pejabat setempat.[136] Dengan usul-usulnya itu, Residen sebenarnya melancarkan satu serangan yang langsung terhadap kebijaksanaan *laissez faire* yang tradisional yang selama ini ditempuh oleh pemerintah. Sudah tentu, program Residen itu untuk sebagian besar merupakan jawaban atas peristiwa berdarah dalam bulan Juli 1888, akan tetapi program itu juga mencerminkan mentalitas *haji-fobi* yang sangat menonjol dalam tahun-tahun

sesudah pemberontakan itu. Di kalangan pemerintah pusat program itu tidak mendapat dukungan yang besar; ia menimbulkan perdebatan karena secara terang-terangan menentang kebijaksanaan yang ditempuh sejak dulu untuk bersikap netral terhadap soal-soal agama.

Holle, Penasihat Kehormatan mengenai Urusan Pribumi, mengemukakan pandangannya mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka apa yang ia namakan "kebijaksanaan jalan tengah".[137] Setelah apa yang terjadi sejak tahun 1873, kebijaksanaan untuk tidak campur tangan samasekali tidak dapat dipertahankan lagi. Sebaliknya, kebijaksanaan untuk menindas tanpa ampun setiap ekspresi keagamaan yang bagaimanapun akan sangat merugikan pemerintah. Menurut pendapatnya, tindakan-tindakan keras yang telah diambil di Banten telah menimbulkan dendam kesumat di kalangan penduduk. Cara yang paling aman adalah mengambil langkah-langkah preventif dan memberikan reaksi terhadap inovasi-inovasi tanpa ribut-ribut. Pemerintah hendaknya jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kesan paksaan atau pengejaran. Tidak akan ada bahaya politik apabila soal-soal agama dipercayakan kepada seorang bupati yang dapat menanganinya secara bijaksana. Rencana Holle bukan sekedar rancangan di atas kertas, melainkan mencerminkan pengalaman yang tejah diperolehnya ketika ia tinggal di Priangan selama lebih dari 25 tahun. Mengenai pakaian haji, ia menganjurkan suatu kebijaksanaan yang moderat. Di satu pihak ia berpendapat bahwa larangan itu akan memberikan alasan kepada penduduk untuk bersikap bermusuhan; seperti telah ia kemukakan sekitar dua dasawarsa sebelumnya, larangan itu bisa membangkitkan kecurigaan di kalangan kaum Muslim, bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menindas agama mereka, dan sementara itu besar kemungkinannya bahwa larangan itu akan membuat kaum haji menjadi pahlawan, sehingga prestise mereka akan bertambah besar.[138] Di lain pihak, kebijaksanaan untuk tidak campur tangan dalam soal ini akan menyinggung perasaan kaum haji, yang menganggap pakaian mereka sebagai tanda prestise dan sebagai privilese yang hanya diberikan kepada orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji.[139] Holle berpendapat bahwa suatu peraturan yang teiperinci tidak diinginkan. Akan tetapi pemerintah hendaknya waspada terhadap orang-orang yang menyalahgunakan pakaian haji, yang menganggap diri mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Muslim lainnya yang tidak mengenakan pakaian itu, atau yang membangkit-bangkitkan perasaan benci terhadap orang-orang kafir. Meskipun pakaian haji itu kelihatannya tidak apa-apa, namun ia dapat merupakan satu sumber kefanatikan, yang merupakan musuh utama pemerintah kolonial.[140] Baik rasa takut yang berlebih-lebihan terhadap haji, maupun politik burung unta tidak akan menimbulkan efek yang diinginkan dalam usaha melawan fanatisme. Dengan menggunakan kata-kata Holle sendiri, maka perasaan *haji-fobi* itu merupakan penasihat yang buruk; ia hanya mengakibatkan kaum haji memperoleh kedudukan yang terhormat di mata rakyat dan dapat menyebabkan semua orang yang menghargai para haji menjadi terasing dari pemerintah. Seandainya pemerintah selalu waspada, maka apa yang telah terjadi di Cilegon akan dapat dicegah; tindakan-tindakan keras yang diambil oleh pejabat-pejabat yang panik dan menuntut dilakukannya pembalasan tanpa pilih bulu akan dapat dihindarkan.[141] Holle mencatat bahwa setelah peristiwa-peristiwa yang mengerikan di Cilegon itu, pejabat-pejabat pemerintah pada umumnya sepakat untuk mengambil sikap terhadap propaganda *Pan-Islamisme*. Dalam hubungan ini ia juga mengemukakan soal pendidikan agama yang menurut pendapatnya harus diamati dengan cermat. Menurut pendapatnya, orang yang paling cocok untuk melakukan pekerjaan itu adalah panghulu, asal saja mereka dipilih dengan teliti. Dengan sendirinya timbul masalah pengangkatan para panghulu. Di masa lampau mereka itu tidak mempunyai pengaruh atau bobot yang cukup untuk memberikan dukungan yang berarti. Di masa dekat mendatang ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang besar kepada soal pengangkatan para panghulu, dan memilih mereka dari pemuka-pemuka agama yang paling cakap dan paling berpengaruh di daerah mereka masing-masing. Dengan bantuan mereka, dan dengan memanfaatkan pengaruh mereka atas penduduk, maka gerakan-gerakan dan fanatisme agama akan dapat dilawan secara efektif. Kebijaksanaan menentramkan rakyat dengan bantuan para panghulu itu telah dipraktekkan dengan sukses di Limbangan (Priangan).[142] Mengenai tarekat-tarekat, Holle berpendapat bahwa ekspansi mereka akan dapat dibendung dengan jalan menyebarluaskan risalah yang ditulis oleh Sayid Usman.[143] Keberhasilan cara itu nampak dalam berkurangnya secara berangsur-angsur tarekat-tarekat serta penganut-penganut mereka baik di Priangan

maupun di Banten.[144] Pendek kata, Holle menjelaskan pendiriannya dengan mengemukakan bahwa suatu kebijaksanaan yang sehat dan progresif mengenai soal-soal keagamaan sangat diperlukan; kebijaksanaan "lepas tangan" harus dibuang dan diganti dengan kebijaksanaan yang didasarkan tidak atas rasa takut atau semangat balas dendam, melainkan atas pengertian dan pandangan yang jauh.[145] Sesungguhnya Holle mengambil sikap yang boleh dikatakan sama dengan sikap Snouck Hurgronje dan sependapat dengannya mengenai banyak hal.

Dengan tibanya Snouck Hurgronje sebagai Penasihat mengenai soal-soal Arab dan Pribumi dalam bulan Mei 1889, masalah agama mulai ditangani secara sungguh-sungguh dan oleh tenaga ahli. Pendidikan dan pengalaman Snouck Hurgronje memungkinkannya untuk dengan segera merancangkan satu kebijaksanaan yang komprehensif dan tidak berprasangka mengenai Islam bagi pemerintah Belanda, yang sangat mempengaruhi perkembangan selanjutnya di Indonesia. Setelah peristiwa pemberontakan di Cilegon, pemerintah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai Penasihat mengenai Soal-soal Arab dan Pribumi dan untuk menantikan kedatangannya sebelum diambil langkah-langkah yang menentukan di bidang agama.[146] Dalam tempo kurang dari satu bulan setelah ia tiba, Snouck Hurgronje menyampaikan nasihatnya mengenai pemberontakan Cilegon itu. Untuk dapat lebih memahami kebijaksanaan pemerintah mengenai peristiwa Cilegon itu, kita perlu membahas saran-saran yang dikemukakan dalam nasihatnya itu.[147]

Snouck Hurgronje telah menyoroti dengan kritik yang skeptis tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Residen Banten; ia menganggap tidak ada gunanya untuk membuang sekian banyaknya orang yang dicurigai sebagai pemberontak, yang tidak dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena tidak ada bukti. Ia memperingatkan Residen agar jangan bertindak keras tanpa alasan yang cukup dan menyerukan agar jumlah orang-orang yang dibuang dikurangi sampai sekecil mungkin. Kebanyakan di antara orang-orang yang dicurigai itu dibuang semata-mata karena mereka dianggap membahayakan ketentraman dan ketertiban di keresidenan itu. Rupa-rupanya, setiap orang yang pernah menghadiri pertemuan atau perayaan yang diselenggarakan oleh salah seorang pemimpin pemberontak didakwa sebagai pemberontak dan dinyatakan bersalah. Snouck Hurgronje mengemukakan bahwa pembuangan politik secara besar-besaran hanya akan membuat rakyat menjadi nekad dan membangkitkan rasa dendam dan bermusuhan. Tindakan seperti itu hanya akan membantu tumbuhnya fanatisme dan rasa tidak puas. Satu soal penting lainnya adalah apakah hukuman-hukuman tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup atau atas pengertian yang keliru; prosedur pemeriksaan di pengadilan dan sumber-sumber pengusutan perlu diteliti kembali. Menurut pendapatnya, banyak di antara orang-orang yang telah dibuang itu merupakan korban kesaksian palsu yang diberikan oleh orang-orang Banten dengan motif kepentingan diri sendiri atau karena takut tidak disenangi lagi oleh pemerintah. Pendirian mereka sejalan dengan paham yang menyatakan bahwa - dengan meminjam kata-kata Snouck Hurgronje sendiri - "lebih baik membuang sepuluh orang terlalu banyak daripada satu orang terlalu sedikit". Dikatakan selanjutnya bahwa tindakan membuang begitu banyak orang oleh penduduk akan dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah lemah dan merasa takut. Ia lalu menyarankan bahwa akan cukup kiranya untuk menempatkan orang-orang yang dicurigai di bawah pengawasan polisi. Pengawasan itu akan berlangsung sampai tuduhan terbukti tidak berdasar atau memang berdasar, sehingga dapat diadakan pemeriksaan lagi oleh pengadilan.[148] Seperti dapat diduga sebelumnya, Residen Banten dengan tegas menolak teori Snouck Hurgronje mengenai kebijaksanaan "memberikan peringatan yang keras dan mengadakan pengawasan" terhadap orang-orang yang dicurigai telah ambil bagian dalam pemberontakan. Menurut Residen, tidaklah masuk akal bahwa prestise pemerintah akan dirugikan oleh suatu kebijaksanaan yang ditentukan oleh keharusan menggunakan cara-cara yang tegas untuk memulihkan ketentraman dan ketertiban. Ia sebaliknya berpendapat bahwa tindakan membuang orang-orang yang berbahaya akan menimbulkan rasa hormat di kalangan rakyat. Ia menolak teori mengenai pengawasan oleh polisi dengan menegaskan bahwa pejabat-pejabat pribumi di Banten, termasuk polisi, sangat dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama. Menurut pendapatnya, hampir semua pemuka agama, apakah mereka haji atau kiyai, menjadi anggota sebuah tarekat Sufi yang terkenal dan oleh karena itu mempunyai status yang lebih tinggi daripada pejabat yang mana pun. Mengingat situasi itu, sistem pengawasan oleh polisi bagaimanapun tak akan dapat dilaksanakan. Selain

dari itu, Residen juga membantah pendapat bahwa pembuangan secara besar-besaran akan menyebabkan bertambahnya ketidakpuasan dan fanatisme di kalangan penduduk. la percaya bahwa apabila tindakan itu tidak diambil, ketentraman dan ketertiban di daerah itu tldak akan dapat dipulihkan selama bertahun-tahun mendatang. Dan akhirnya ia menyatakan tidak sependapat dengan Snouck Hurgronje bahwa peranan Haji Marjuki dalam pemberontakan telah terlalu dibesar-besarkan. la tetap pada pendiriannya bahwa Haji Marjuki merupakan salah seorang pemimpin terkemuka, jika bukan pemimpin tertinggi, dari pemberontakan itu, dengan mengemukakan alasan bahwa ia telah memimpin atau ikut dalam banyak rapat penting selama periode persiapan pemberontakan. Selain itu, tanda tangannya tercantum di bagian bawah sepucuk surat yang jatuh ke tangan pihak berwajib dan yang ditandatangani oleh haji-haji yang diketahui sebagai pemimpin-pemimpin utama pemberontakan; yang lainnya adalah Haji Wasid, Haji Abubakar, Haji Iskak, dan Haji Ismail. Dengan memperhatikan fakta-fakta itu, maka Residen menentang setiap saran agar Haji Marjuki diperbolehkan kembali ke Banten. Seperti dikatakannya, hal itu akan berarti tidak lain daripada "menyeret kuda Troya ke dalam kubu sendiri".[149]

Adalah menarik untuk mencatat secara sepintas lalu bahwa kebijaksanaan Residen untuk melakukan pembuangan secara *en masae* itu mendapat tanggapan yang dingin di kalangan pemerintah pusat. Oleh karena usul-usul untuk melakukan pembuangan nampaknya terus mengalir tak henti-hentinya selama pertengahan pertama tahun 1889, maka dari pihak Dewan Hindia timbul perlawanan yang semakin kuat. Ada beberapa alasan untuk mencela keras kebijaksanaan itu; pengusutan yang menyerupai inkuisisi, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dapat menumbuhkan keresahan di kalangan penduduk dan menciptakan satu suasana yang pasti tidak akan membantu mendorong sikap loyal terhadap pemerintah di pihak rakyat; dari keluarga dan anggota-anggota kerabat mereka yang dibuang tidak dapat diharapkan lain kecuali dendam kesumat terhadap pemerintah; dan dikhawatirkan bahwa orang-orang yang dibuang itu akan dapat membakar semangat penduduk di tempat pembuangan dan menghasut mereka untuk memberontak terhadap pemerintah. Dewan Hindia setuju dengan jalan pikiran Snouck Hurgronje dan menganjurkan agar pembuangan-pembuangan dihentikan dan agar orang-orang yang dicurigai dan belum dibuang ditempatkan di bawah pengawasan kepala desa atau kepala distrik.[150]

Setelah kita menyimpang sejenak dari alur cerita, mari kita sekarang kembali kepada apa yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje mengenai beberapa masalah mendesak yang sedang dihadapi pada waktu itu, khususnya mengenai Banten. Ketika ia diminta pendapatnya mengenai masalah pakaian haji, ia sangat mencela usul untuk melarangnya, dengan alasan bahwa campur tangan seperti itu tidak akan berguna samasekali dan hanya akan membangkitkan rasa tidak senang. Di waktu yang sudah-sudah ada alasan-alasan yang kuat untuk tidak menghilangkan kebiasaan yang sudah lama itu, dan alasan-alasan yang sama menjadi semakin kuat di saat kehidupan beragama di dunia Islam sedang semakin gesit. Menurut Snouck Hurgronje, pemerintah dapat menggunakan cara-cara lain untuk memberantas keburukan fanatisme, dan setiap tindakan harus diambil secara bijaksana dan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan di pihak kaum Muslim bahwa pemerintah Belanda memusuhi Islam dan berusaha untuk menghina penganut-penganutnya.[151] Satu ungkapan lainnya mengenai sikapnya yang menahan diri dalam hubungannya dengan masalah-masalah keagamaan terdapat dalam rekomendasinya mengenai usul agar pendidikan agama diawasi. la sangat menyesalkan bahwa tidak lama setelah pemberontakan Cilegon, emosi yang terpendam di kalangan pejabat-pejabat Eropa meledak menjadi tindakan pengejaran yang membabi buta; di seluruh Pulau Jawa mereka sibuk melancarkan pemburuan yang tak kenal ampun terhadap guru-guru agama. Guru dan santri ditangkapi, diperiksa dan kadangkala dibuang. Bupati-bupati tertentu mengeluarkan larangan mengajarkan kitab-kitab atau mendirikan tarekat di daerah mereka.[152] Dalam perjalanan kelilingnya di Pulau Jawa,[153] Snouck Hurgronje sangat terkesan oleh agitasi yang sedang dikobarkan terhadap apa saja yang berbau manifestasi kegairahan beribadah. la menentang setiap tindakan untuk melarang atau mengatur dengan ketat pendidikan agama, oleh karena ia berpendapat bahwa hal itu hanya akan membuat rakyat menjadi putus asa. la sebaliknya menandaskan bahwa guru-guru agama harus diyakinkan mengenai maksud pemerintah yang sebenarnya. Pemerintah bukannya harus

merintangi kegiatan mereka, malahan sebaliknya harus mengetahui apa yang diajarkan oleh para guru kepada murid mereka; guru-guru itu harus mengetahui bahwa segala apa yang mereka lakukan diamati oleh pemerintah; mereka juga harus menyadari bahwa pemerintah, tanpa mencampuri praktek-praktek keagamaan mereka, tidak bisa bersikap masa bodoh samasekali terhadap agama mereka dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Pemerintah hanya akan berpegang kepada prinsip netralitas mengenai soal-soal agama selama agama tidak disalahgunakan sebagai senjata untuk melawannya, atau sebagai selimut untuk menutupi maksud-maksud jahat yang juga akan mendatangnya bencana bagi penduduk yang ingin hidup tentram.[154]

Sekarang kita sampai pada satu titik di mana Snouck Hurgronje berbeda pendapat dengan rekan-rekan semasanya yang lebih bersikap *laissez faire*. Inti argumennya adalah bahwa perintah utama yang terkandung dalam prinsip untuk bersikap netral terhadap agama adalah bahwa praktek-praktek keagamaan yang beraneka ragam itu harus dibiarkan, akan tetapi penyalahgunaan agama untuk tujuan-tujuan politik tidak boleh dibiarkan. Menurut pendapatnya, pemerintah harus mengambil lebih banyak tindakan administratif untuk memperbaiki administrasi soal-soal keagamaan. Dalam hubungan ini, salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah adalah pengangkatan para panghulu. Snouck Hurgronje beranggapan bahwa pemerintah harus hati-hati sekali dalam mengangkat para panghulu; orang macam bagaimana yang memegang jabatan itu merupakan soal yang akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang sangat besar di masa dekat mendatang apabila para panghulu itu diberi tugas untuk mengawasi pendidikan agama.[155]

Dengan mengacu ke Banten, dalam pandangan Snouck Hurgronje, Islam telah menjelma dalam bentuknya yang paling tidak menarik selama berabad-abad di wilayah ini.[156] Karena perkembangan historisnya yang unik, maka ia telah menjelma menjadi satu agama yang sangat tinggi semangatnya, jika tidak hendak dikatakan fanatik, dan oleh sebab itu mudah melahirkan rasa benci terhadap orang-orang kafir. Para kiyai, yang sangat dihormati oleh rakyat, pada umumnya dianggap sebagai penghasut-penghasut pemberontakan. Mereka yang dapat menggunakan pelbagai keluhan sebagai batu loncatan untuk meraih kekuasaan politik dapat mengobarkan api ketidakpuasan, dan tampil sebagai pemimpin gerakan pemberontakan. Di Banten, setiap gerakan kerakyatan dengan sendirinya berwatak religio-politis. Snouck Hurgronje juga melihat bahwa penduduk Banten menunjukkan satu kecenderungan yang kronis untuk memberontak,[157] yang dapat disulut dengan bunga api pelbagai macam ketidaksenangan. Mengenai peristiwa Cilegon, juga Snouck Hurgonje menyebutkan keanekaragaman sebab-sebabnya, akan tetapi selain watak Islam yang khas di Banten serta kecenderungan untuk memberontak, ia juga menandaskan salah urus sebagai salah satu penyebabnya yang utama.[158]

10 KONDISI ADMINISTRASI

Salah urus sesungguhnya merupakan salah satu masalah yang paling memusingkan kepala di Banten; peristiwa-peristiwa berdarah selama pemberontakan untuk kesekian kalinya memaksa orang untuk memusatkan perhatian kepada kondisi adininistrasi yang buruk di Banten pada waktu itu. Snouck Hurgronje menyadari bahwa kondisi-kondisi yang buruk, penyelewengan-penyelewengan administratif serta administrasi yang tidak efektif merupakan satu lingkaran setan. Menurut pendapatnya, kesalahan utama terletak pada kecenderungan untuk membiarkan pejabat-pejabat Eropa menyelenggarakan sendiri seluruh administrasi menurut ide-ide mereka sendiri.[159] Pejabat pribumi tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dari atas, dan mengambil sikap - menurut istilah mereka sendiri - "turut angin".[160] Sesungguhnya, korps pejabat pribumi telah diturunkan derajatnya menjadi sekedar alat administrasi Eropa. Selain itu, pejabat-pejabat administratif Banten, dengan beberapa pengecualian, samasekali tidak mempunyai pandangan yang luas, satu keadaan intelektual yang dalam bahasa Banten dinamakan *dusun*.[161] Snouck Hurgronje berpendapat bahwa keterbatasan cakrawala intelektual mereka itu untuk sebagian

besar disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah telah sangat mengabaikan soal pendidikan modern bagi priyayi Banten. Dalam hubungan ini, pengiriman anak-anak priyayi Banten ke Sekolah *Menak* Di Bandung - apa yang dinamakan "*Hoofdenschool*", sekolah tempat anak-anak priyayi dididik untuk menjadi pamong praja - dapat dianggap sebagai satu langkah yang penting untuk mengisi kekosongan pendidikan modern itu. Namun demikian, baru dalam tahun 1910 sekolah seperti itu dibuka di Serang.[162] Satu masalah lain yang berhubungan dengan usaha mengeluarkan priyayi Banten dari isolasi mereka - yang oleh Snouck Hurgronje tidak disinggung dalam notanya [163] - telah menyibukkan kalangan-kalangan pemerintah dalam tahun-tahun berikutnya; Sering kali dianjurkan bahwa untuk memperluas pandangan pejabat-pejabat Banten diperlukan satu kebijaksanaan untuk memindahkan mereka untuk sementara waktu ke daerah lain, umpamanya ke Priangan atau Karawang, dan sebaliknya, memindahkan pejabat-pejabat pribumi dari daerah-daerah itu ke Banten – juga untuk sementara waktu. Aspek terakhir dari kebijaksanaan itu kiranya baik sekali untuk memperbaiki kondisi administrasi di Banten. [164] Di samping itu perlu dikemukakan bahwa telah diajukan usul-usul yang melangkah lebih jauh lagi dibandingkan dengan kebijaksanaan tersebut di atas; disarankan agar Keresidenan Banten dihapuskan saja dan dimasukkan ke dalam keresidenan-keresidenan tetangganya, Batavia dan Karawang, untuk memudahkan pemindahan pejabat-pejabat Banten ke tempat-tempat lain di keresidenan baru itu.[165] Di lain pihak masih terdapat pejabat-pejabat yang terus berpegang pada anggapan bahwa "orang-orang asing" sangat tidak disenangi di Banten dan bahwa penempatan mereka di sana pasti akan ditentang. Oleh karena itu mereka menganjurkan agar orang-orang dari luar Banten tidak diangkat sebagai pejabat di daerah itu.[166]

Tidak berlebih-lebihan kiranya untuk mengatakan bahwa suasana di Banten tahun-tahun 1880-an penuh dengan prasangka, kecurigaan, dendam dan intrik-intrik. Berkat pecahnya pemberontakan Cilegon, banyak di antara hal-hal yang tidak baik itu dapat disingkapkan. Salah satu segi utama dari kondisi yang menyedihkan itu berkaitan dengan persengketaan intern di antara anggota-anggota priyayi Banten, yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang melawan hukum atau tidak terhormat dalam perlombaan memperebutkan jabatan-jabatan administratif di daerah itu. Menurut pendapat Snouck Hurgronje, yang terutama harus dipersalahkan dalam situasi itu adalah administrator-administrator Eropa di Banten, oleh karena penilaian mereka mengenai pejabat-pejabat pribumi tidak didasarkan atas "kriteria tanpa pamrih".[167] Oleh sebab itu, maka sikap membudak, favoritisme, kecurigaan dan intrik tumbuh subur, dan ketiadaan kerjasama di kalangan pejabat-pejabat pribumi menimbulkan hambatan sehingga administrasi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Di samping itu, perlu juga disebutkan efek yang sangat merugikan dari sikap pejabat-pejabat Eropa terhadap pejabat-pejabat pribumi dalam hal yang khusus, yakni bahwa pejabat-pejabat Eropa dirasuki oleh kriteria fanatisme dalam menilai pejabat-pejabat pribumi. Bagi pejabat-pejabat pribumi tidak ada nasib yang lebih sial daripada dicap sebagai orang fanatik, atau menurut lafal Bantennya, orang *panatik*.[168] Oleh karena itu mereka berusaha keras agar tidak kelihatan terlalu taat kepada agama; pemburuan terhadap orang-orang fanatik di masa sesudah pemberontakan membantu tumbuhnya sikap membudak, menjilat dan kecurigaan dalam hubungan antara pejabat-pejabat Eropa dan pejabat-pejabat Banten. Demikianlah diagnosis yang dibuat oleh Snouck Hurgronje. Dan diagnosisnya itu jelas mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah mengenai Islam dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, tidak hanya di Banten, tetapi juga di Indonesia pada umumnya.

Akan melampaui lingkup studi ini kiranya untuk menelaah sampai sejauh mana dan dengan cara bagaimana pemberontakan tahun 1888 telah mengakibatkan perbaikan yang permanen dalam kondisi penduduk Banten. Namun demikian, mungkin menarik untuk dikemukakan bahwa setelah pemberontakan itu, usaha-usaha dilakukan tidak hanya untuk mengurangi hal-hal yang tidak menyenangkan penduduk, akan tetapi juga untuk memperbaiki taraf hidup di daerah itu. Satu di antara usaha-usaha itu adalah membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan dan jalan jalan yang diperlukan mutlak untuk pengangkutan.[169] Dari kegiatan-kegiatan Residen Banten orang kiranya dengan mudah dapat menarik kesimpulan mengenai tujuannya: yakni bahwa peristiwa-peristiwa selama pemberontakan telah menunjukkan bahwa demi kepentingan politik dan administratif, maka di satu pihak Banten harus mempunyai satu pemerintahan yang kuat yang otoritasnya tidak diragukan lagi, dan di lain pihak pemerintah pusat harus didesak

agar memberikan dukungan yang besar. Yang paling dipikirkannya rupa-rupanya adalah soal memulihkan ketentraman dan ketertiban; perbaikan kehidupan rakyat di bidang materi baginya merupakan soal kedua. Namun demikian, sulitlah untuk memperkirakan perbaikan-perbaikan apa saja yang terjadi sesudah itu dalam taraf hidup penduduk Banten. Warisan yang paling meresap yang ditinggalkan oleh pemberontakan mungkin terdapat dalam bidang yang tidak dapat diraba, yakni yang menyangkut hubungan sosial dan politik antara orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia. Sesungguhnya, hari-hari yang panjang dalam bulan Juli 1888 telah memaksa pemerintah kolonial Belanda untuk mawas diri dan merenungi kembali sifat hubungannya dengan penduduk Muslim. Sebuah monumen yang didirikan untuk memperingati korban-korban pemberontakan mengingatkan kita terus-menerus mengenai salah satu lembaran hitam dalam sejarah pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.[170]

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] *Java Bode*, 11 Juli 1888.

[2] *Batavtaasch Nandelsblad*,14 Juli 1888.

[3] *Soerabaiasch Handelsblad*, 18 Juli 1888.

[4] *Bataviaasch Handelsblad*, 14 Juli 1888.

[5] Mengenai pendapat yang pertama, lihat De Locomotief, 18 Juli 1888; mengenai pendapat yang kedua, lihat Java Bode, 16 Juli 1888, yang menunjuk kepada satu pendapat bahwa pemberontakan itu mungkin ada kaitannya dengan "*zendingscirculaire*' (surat edaran mengenai missi agama Kristen) dari Menteri Urusan Jajahan.

[6] *De Locomotief*, 13 dan 26 Juli 1888; lihat juga Nederburgh (1888), hal. 14 - 29; van Sandick (1891), hal. 153 - 158.

[7] *Bataviaasch Handelsblad*, 21 Juli 1888; *De Locomotief*, 28 luli 1888; WNI (1888 - 1889), hal. 9 -11, 42 - 44.

[8] WNI (1888 - 1889), hal. 990.

[9] *Java Bode*, 21, 22 dan 23 Ag.1888, Surat kabar ini bersifat setengah resmi; ia mempunyai "monopoli" atas berita-berita resmi, dan menyokong penuh kebijaksanaan pemerintah, Mengenai penilaian Koch atas sifat surat kabar itu dalam tahun-tahun 1880-an, lihat Koch (1956), hal. 40; mengenai sejarah perkembangannya, lihat von Faber (tanpa tahun), hal. 58 - 63. De Locomotief tegas-tegas menganut paham "kolonial-liberal", dan merupakan terompet dari apa yang di kemudian hari dikenal sebagai golongan 'Ethische Politiek';; lihat Muhlenfeld, dalam K7; Vol. IV (1916), hal. 37 -39; juga von Faber (tanpa tahun), hal. 65 - 68. De Locomotief dapat dipandang sebagai sarana "oposisi kolonial". *Bataviaasch Handelsblad* didasarkan atas paham yang moderat dan humaniter; TNJ (1858), no. 1, hal. 276 - 292; lihat juga von Faber (tanpa tahun), hal. 50 - 51. *Soerabaiasch Handelsblad*, di bawah pemimpin redaksinya, Uikens, selama bagian yang besar dari tahun-tahun delapan puluhan mengecam masyarakat bisnis dan pejabat-pejabat pemerintah di Surabaya, dan di kemudian hari mendukung pendirian bahwa kepentingan Surabaya dan daerah pedalamannya harus dibela; lihat von Faber (tanpa tahun), hal. 75 - 82; juga Koch (1956), hal. 49.

[10] Java Bode, 22 Ag.1888; mengenai tindakan-tindakan tersebut, lihat Bab II, hal . 80 - 84, tindakan-tindakan itu juga dibahas panjang-lebar dalam laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, lihat Laporan DDI, hal. 161- 198; 240 -246.

[11] *Java Bode*, 23 Ag.1888.

[12] *De Locomotief,* 25 Ag. 1888;Nieuws van dan Dag, 5 Feb. 1889.

[13] Nieuws van den Dag, 5 Nov. 1888; 5 Feb. 1889; lihat juga WNI (1888 -1889), hal. 1311. Groneman menunjukkan bahwa pemberontakan Banten dapat merupakan prolog bagi suatu pemberontakan umum, apabila pemerintah tidak menghilangkan pelbagai penyelewengan.

[14] Nieuws van den Dag, 7 Sep., 6 Okt.1889.

[15] De Standaard, 26 Sep. 1888; lihat juga Koch (1960), hal. 70 - 80. Surat kabar ini menyuarakan prinsip-prinsip Anti-Revolutionaire Partij (Partai Anti Revolusi, salah satu partai orang-orang Protestan terbesar); De Tijd merupakan surat kabar Katotik Roma; Nieuwe Rotterdamsche Courant beraliran liberal. Lihat Schneider (1943). Nieuws van den Dag lebih merupakan surat kabar informasi daripada surat kabar opini; lihat Schneider (1951), hal. 22.

[16] De Standaard, 26 Sep. 1888.

[17] Lihat di alas, di bawah catatan no. 15.

[18] *De Tijd*, 29 Ag. 1888

[19] *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 19 Juni 1889, juga dikutip di dalam IG (1889), no. 2, haL 1427.

[20] Ibidem.

[21] *De Standaard* dan *De Tijd* sejalan dengan politik kolonial partai-partai keagamaan di Negeri Belanda, yang pada akhir abad itu menandaskan ktistenisasi, sementara *Nieuwe Rotterdamsche Courant* yang lebih berwarna "liberal" menentang politik yang demikian.

[22] *De Locomotief*, 26 JuB; 9,11,17 dan 20 Ag. 1888.

[23] *De Locomotief*, 1 Okt. 1888.

[24] *De Locomotief*, 26 dan 30 Juli 1888.

[25] *De Locomotief*, 24 Juli 1888.

[26] *De Locomotief*, 16 Ag. 1888.

[27] *De Locomotief*, 20 Ag. 1888; pelaksanaan vaksinasi telah menimbulkan huru-hara dalam tahun 1820, lihat di atas, Bab IV, hal.115; pada waktu yang kira-kira bersamaan bantuan pemuka-pemuka telah diminta untuk melaksanakan vaksinasi di Priangan, lihat Olivier, Vol. I (1827), hal. 301-302. Cf. Roorda van Eysinga (1856), hal. 66.

[28] *De Locomotief*, 26 Juli 1888.

[29] Appendix VIII.

[30] Laporan DDI, Appendix I, terutama yang mengenai pengaduan-pengaduan terhadap Raden Penna.

[31] Ibidem.

[32] OIB, .,15 Juli 1888, no. 4.

[33] Laporan Direktur Departemen Dalam Negeri, 18 Sept. 1888, no. 5162, dalam Vb. 7 Feb. 1888, no. 4.

[34] Lihat di alas, Bab I, hal. 22 - 25.

[35] Groneman (1891) hal. 102 - 103. Publikasinya dinantikan dengan tidak sabar lagi, terutama oleh pers, lihat WNI (1888 - 1889), hal. 252.

[36] Direktur Departemen Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal, 19 Juli 1888, Lihat, dalam MR 1888, no. 506.

[37] Ibidem.

[38] Laporan DDI, hal. 133 - 150.

[39] Laporan DDI, hal. 221.

[40] Laporan DDI, hal. 228 - 233; cf. van dan Berg, dalam TBG, Vol. XXVIII (1883), hal. 158 - 175; Holle, dalam TBG, Vol. XXXI (1886), hal. 67 -81.

[41] Laporan DDf, hal. 221.

[42] Laporan DDI, hal. 150 - 159.

[43] Laporan DDI, hal. 149.

[44] Laporan DDI, hal. 203 - 215.

[45] Laporan DDI, hal. 214.

[46] *Java Bode*, 22 Ag. 1888; Laporan DDf, hal. 214, 216, 226.

[47] *Java Bode*, 22 Ag. 1888.

[48] Lihat di alas, Bab II, hal. 80 - 84.

[49] Laporan DDI, hal. 240.

[50] Laporan DDI, hal. 244.

[51] Laporan DDI, hal. 246.

[52] Laporan DDI, hal. 249.

[53] Laporan DDI, hal. 249 - 257; lihat *Staatsblad*, 1867, no. 114.

[54] Laporan DDI, hal. 259; lihat nota yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang,14 Sept. 1888, dalam Laporan DDI, Appendix U.

[55] Dalam periode sesudah pemberontakan, pejabat-pejabat pribumi cenderung untuk tidak menunjukkan kegairahan yang besar dalam soal-soal agama, lihat nota Snouck Hurgronje mengenai Banten, 15 Ag. 1892; lihat juga di bawah, hal. 400.

[56] Laporan DDT, hal. 258; van den Berg, dalam TBG, Vol. XXXI (1882), hal. 553.

[57] Laporan DDT, hal. 258; lihat di atas, Bab V, hal. 203 ff.

[58] Laporan DDT, hal. 250 - 254.

[59] Surat dari Menteri Urusan Jajahan, kepada Gubernur Jenderal, 27 Sept. 1889, no. 12, dalam Vb. 27 Sept. 1889, no. 12.

[60] Laporan DDT, hal. 260 - 263.

[61] Advis Wakil Presiden Dewan Hindia, 5 Okt. 1888, dalam MR 1888, no. 1652

[62] IG (1891), no. 2, hal. 1206; Advis Dewan Hindia, 5 Okt. 1888, *Kommis soriaal* No. 16547, dalam MR 1888, no. 1652.

[63] Ibidem.

[64] Van Sandick menelusuri asal-mula ketidakpuasan rakyat sampai kepada beberapa kesulitan yang telah menimpa mereka dalam dasawarsa sebelumnya : wabah penyakit ternak (1879), wabah demam (1880), kelaparan (1881 - 1882), letusan Gunung Krakatau (1883); dan juga beban pajak yang terlalu berat, lihat di atas, Bab II, hal. 80 - 84.

[65] Nederburgh (1888), dalam bukunya "Tjilegon-Bantam-Java".

[66] *Java Bode*, 22 Ag. 1888.

[67] Laporan DDT, hal. 233 - 234; lihat juga WNI (1888 - 1889), hal. 113 -114.

[68] Ibidem.

[69] Laporan DDT, Appendix 1; lihat di atas, Bab 111, di bawah catatan no. 61.

[70] Laporan DDT, hal. 236 - 240; tihat juga Java Bode, 23 Ag. 1888.

[71] WNI (1888 - 1889), hal. 165,1521.

[72] Ibidem; dengan pengadilan dimaksudkan apa yang dinamakan "Rechtbank van 0mgong" (Pengadilan Keliling). Yang menggantikan Raden Penna adalah M.Ng. Wiryadijaya, lihat OIB 21 Jan. 1889, no. 3.

[73] WNI (1888 - 1889), hal. 76.

[74] *Java Bode*, 23 Ag. 1888; lihat Advis Dewan Hindia, 5 Okt. 1888, Kommis soriaal, No. 16547.

[75] WNI (1888 - 1889), hal. 77.

[76] WNI (1888 - 1889), hal. 1257 - 1257; lihat juga Weekblad voor Indie, Vol.111(1906 - 1907), hal. 894 - 895.

[77] *WNI* (1888 - 1889), hal. 794 f., 895 f., 946, 989 f., 1191 f., 1470 f., 1520 f., 1642 f., 1699 L,1815 f.,1887 f., 2181 f., 2251, 2438 L, 2602 f.; juga WNT (1889 - 1890), hal. 72 f., 194 f., 459 ff., 564 ff., 681 f.,1032, 1085,1441 f.

[78] A. Djajadiningrat (1936), hal. 233 - 234; WNI (1888 - 1889), hal. 1815 f. Lihat juga nota Snouck Hurgronje,15 Ag. 1892.

[79] A. Djajadiningrat (1936), hal. 234.

[80] A. Djajadiningrat (1936), hal. 235.

[81] WNI (1888 - 1889), hal. 1815.

[82] IG (1891), no. 2, hal. 1815.

[83] IG (1891), no. 2, hal. 1142 - 1144.

[84] OIB 14 April 1884, no. 10.

[85] Surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 249, dalam MR 1889, no. 597. Lihat juga OIB 28 Ag.1889, no. 14.

[86] Surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 249; lihat di atas, Bab III, hal. 110.

[87] Umpamanya di masa yang lalu : Condronegoro, Gondokusumo; lihat di atas, Bab III, hal. 117 - 118.

[88] Surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 249.

[89] A. Djajadiningrat (1936), hal. 94. Residen rupa-rupanya bermaksud agar dia menjadi patih Anyer yang akan datang; WNI (1888 - 1889), hal. 2602.

[90] Mengenai silsilah Djajadiningrat bersaudara, lihat Appendix III.

[91] Surawinangun adalah seorang anak R.T. Suta Angunangun, lihat di atas, Bab III, hal. 118; lihat WNI (1888 - 1889), hal. 2438, khususnya mengenai pelantikannya.

[92] Surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 249.

[93] Nota Direktur Departemen Dalam Negeri, 20 Juli 1889, no. 3895, dalam MR 1889, no. 597.

[94] Kommissoriaal, 22 Juli 1889, no. 703, dalam MR 1889, no. 597.

[95] Nota Direktur Departemen Dalam Negeri, 20 Juli 1889, no. 3895.

[96] Surat resmi Residen Banten, 11 Ag. 1889, no. 279, dalam MR 1889, no. 597.

[97] Surat resmi Residen Banten, 7 Juli 1889, no. 279; Kommissoriaal, 22 Juli 1889, no. 703, dalam MR 1889, no. 597; juga Surat resmi Residen Banten 11 Ag.1889, no. 279.

[98] Surat resmi Residen Banten, l l Ag.1889, no. 279.

[99] OIB 28 Ag. 1889, no. 14; mengenai pelantikannya, Lihat WNI (1888 -1889), hal. 2438. Mengenai kegiatan-kegiatannya selama masa jabatannya, lihat otobiografmya, MS dalam koleksi Bataviaasch Genootschap, MS Holle, no. 266.

[100] OIB, 16 Okt. 1889, no. 27; lihat juga *Regeeringsalmanak*, 1890, 1891; *Javaansche Almanak*, 1889,1890,1891.

[101] Java Bode, 21 Ag. 1888; Nieuws van den Dag, 17 Sept., 6 Okt. 1888.

[102] *Java Bode*, 8 dan 15 Sept. 1888; juga IG (1889), no. 2, hal. 1783 - 1785; lihat juga Bab VIII, hal. 345ff.

[103] *Nieuws van den Dag*, 11 Sept. dan 6 Okt. 1888; *WNI* (1888 - 1889), hal. 946. *De Locomotief*, 11 Ag.1888, menunjuk kepada suatu "mitos-pemberontakan" yang beredar di pelbagai tempat; Lihat Snouck Hurgronje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal. 1157.

[104] Surat resmi Residen Banten, 15 luni 1889, no. 207, dalam Vb 6 Feb. 1890, no. 14. Para prajurit itu dapat dianggap sebagai satu pasukan bersenjata pribumi yang fungsinya berada di antara tentara reguler dan polisi; mereka menyerupai korps jayengsekar di masa lampau. Lapangan tugas mereka terbatas di daerah mereka sendiri, lihat Vb. 23 Jan. 1890, khususnya nota-nota dari Biro A3 dari Kementerian Urusan Jajahan.

[105] Surat resmi Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58, dalam MR 1889, no. 154 atau dalam Vb. 28 Jan. 1890, no. 8.

[106] OIB 31 Okt. 1889, no. S; lihat juga WNI (1889 - 1890), hal. 194 - 195.

[107] Appendix IX.

[108] Laporan DDI, hal. 161 -198; 240 - 246; lihat di atas Bab 11, hat 80 - 82.

[109] Surat resmi Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58.

[110] Ibidem.

[111] Nota Direktur Departemen Dalam Negeri, 8 April 1889, no. 1957, dalam MR 1889, no. 377 also Laporan Direktur Departemen Keuangan, S April 1890, no. 4988, dalam Vb. 28 Jan. 1890, no. 8.

[112] Surat Sekertatia I Pemerintah, 27 Mei 1889, no. 163, dalam MR 1889, no. 377 also dalam Vb. 28 Jam. 1890, no. 8.

[113] Nota Direktur Departemen Dalam Negeri, 8 April 1889, no. 1957.

[114] Benda dan McVey (1960), hal. S2 - 53; Penasihat untuk Urusan Pribumi kepada Gubernur Jenderal, 24 Ag. 1921, no. 560, dalam Koleksi Koninklijk Instituut voor Tall-, Land-en Volkenkunde, MS, no. H797.

[115] Surat resmi Residen Banten, 7 Jan. 1889, no. 92, dalam Vb. 23 Jan. 1890, no. 22.

[116] Ibidem.

[117] Nota Direktur Departemen Dalam Negeri,15 Maret 1889, no. 1414, dalam Vb. 23 Jan. 1890, no. 22. Di sans disebut-sebut tentang H.J.W, van Lawick van Pabst, yang ia rekomendasikan sebagai orang yang paling tepat untuk melakukan penyelidikan.

[118] Nota dari Inspektur Kepala Tanaman Budidaya kepada Direktur Departemen Dalam Negeri, 8 April 1889, no. 1958, dalam Vb. 23 tan. 1890, no. 22.

[119] Advis Dewan Hindia, 31 Mei 1889, Kommissariaal, No. 8522, dalam Vb. 23 Jan. 1890, no. 22.

[120] Surat resmi Residen Banten, 27 Feb. 1889, no. 58.

[121] Gubernur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan, 17 Juli 1890, no. 11, dalam Exh. 28 Ag. 1890, no. 29. Lihat selanjutnya tentang peraturan 1878 mengenai pajak usaha dan kritik Brooshooft, Brooshooft (tanpa tahun), hal. 175 - 178.

[122] Gubernur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan, 17 Juli 1890, no. I1.

[123] Staatsblad, 1892, no. 275.

[124] Lihat kesaksian Asisten Wedana Balagendung, dalam Appendix VIII. Lihat selanjutnya

nota Kepala Dinas Kesehatan Umum,16 Jan. 1889, no. 34, dalam MR 1890, no. 468 also dalam Exh. 21 April 1890, no. 97. Mengertai contoh tentang kesulitan untuk melaksanakan vaksinasi sesudah peristiwa pemberontakan, lihat A. Djajadiningrat (1936), hal. 150 - 154. Mengenai bagaimana caranya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan vaksinasi di Priangan dapat diatasi, lihat Olivier, Vol. 1 (1827), hal. 301302; juga Roorda van Eysinga (1856), hal. 66.

[125] Nota Kepala Dinas Kesehatan Umum, 16 Jan. 1889, no. 34; lihat juga laporan Dokter Keresidenan Banten, 17 Mei 1889, no. 56, dalam Exh. 21 April 1890, no. 97.

[126] Mengenai pelbagai penyelewengan dan keburukan, lihat Advis Snouck Hurgronje, 20 Juni 1889, no. 11, dalam Vb. 18 Okt. 1889, no. 54. Lihatjuga advis-advisnya dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. 1 (1959), hal. 1306 -1465.

[127] Bekasi (1869), Madiun (1869), Pekalongan (1872), Priangan (1872); lihat de Waal, VOL I (1876), hal. 236 - 237.

[128] Nota Holle, 20 Ag. 1873, no. 126, chum Vb. 3 Juni,1874, no. 31.

[129] Advis Dewan Hindia, 31 Okt.1873, dalam Vb. 3 Juni 1874, no. 31.

[130] Nieuws van den Dag, 6 Okt.1888; WNI (1888 - 1889), hal. 946.

[131] Surat resmi Residen Banten, 22 Des. 1888, no. 175, dalam MR 1888, no. 863 atau dalam Vb. 7 Feb. 1889, no. 4.

[132] Ibidem.

[133] Ibidem.

[134] Ibidem; Lihat juga Laporan DDI, Appendix U. Salah satu tindakan Yang diambil oleh pemerintah untuk mengawasi pendidikan Agama adalah membuat catatan mengenai guru-guru agama, yang disebut regesiter guru. Di Banten pengisian daftar itu lebih baik daripada di daerah-daerah lain; lihat KT, Vol. VI (1917), hal. 736.

[135] Laporan DDI,Appendix U.

[136] Surat resmi Residen Banten, 22 Des. 1888, no. 175.

[137] Nota Holle, 20 Sept. 1890, no. 104, dalam Vb. 2 Des. 1890, C15.

[138] Ibidem.

[139] Ibidem; dalam tahun-tahun 1870-an ada kecenderungan pakaian Arab menjadi populer; pakaian itu juga dikenakan oleh orang-orang yang belum naik haji.

[140] Ibidem.

[141] Ibidem.

[142] Ibidem.

[143] Ibidem; lihat juga Nota Holle, 27 Nov. 1888, no. 50, chum Vb. 8 Feb. 1889, no. 31;juga Snouck Hurgonje, dalam VG, Vol. IV, begian 1 (1924), hal. 71- 85.

[144] Laporan-laporan mengenai Banten di masa sesudah pemberontakan lebih sering lagi menyebut-nyebut tentang para kiyai di Banten, yang sangat berpengatuh dan mempunyal prestise yang tinggi di kalangan penduduk. Lihat Penasihat mengenai Urusan Pribumi kepada Gubernur Jenderal, 24 Ag. 1921, no. 560. Lihat juga Benda dan Mc Vey (1960), hal. 2 - 22.

[145] Nota Holle, 20 Sept. 1890, no. 104.

[146] Surat resmi dari Gubetnur Jenderal kepada Menteri Urusan Jajahan, 19 Nov. 1888, no. 1652, dalam Exh. 27 Des. 1888, no. 117, area dalam Vb. 7 Peb.1889, no. 4.

[147] Nota Snouck Hurgonje, 7 Juni 1889, no. 7, dalam Koleksi Koninkli/k Instituat voor Taal-, land- en Volkenkunde, MS, no. H 797; juga dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965),

haL 1980 - 1986.

[148] Ibidem.

[149] Surat resmi Residen Banten, 24 Juni 1889, no. 217 dalam Exh. 20 Ag. 1889,no.59.

[150] Advis beberapa anggota Dewan Hindu, 21 Juni 1889, dalam Exh. 20 Ag. 1889, no. 59. Mengenai pengaruh orang-orang buangan terhadap lingkungan mereka, lihat Surat resmi Assisten Residen Gorontalo, 16 April 1889, no. 48, dan Surat resmi Residen Menado, 2 Juni 1889, La U, dalam MR 1889,no.483.

[151] Nota Snouck Hurgonje, 7 Juni 1889, no. 7.

[152] Snouck Hurgonje, dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. II (1959), hal.1157.

[153] Sebuah laporan singkat mengenal petjaunan itu diberikan oleh van Ronkel, dalam BKI, Vol. CI (1942), hal. 311- 339.

[154] Dikutip oleh Holle dalam notanya, 20 Sept. 1890, no. 104.

[155] Ibidem.

[156] Nota Snouck Hurgronje, 15 Ag. 1892, juga dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. Ill (1965), hal. 1986 - 1999, khususnya hal. 1991. Lihat juga VG, Vol. IV, bagian 1 (1924), hal. 254.

[157] Snouck Hurgonje, chum VG, Vol. IV, bagian 1 (1924), hal. 255; juga notanya,15 Ag. 1892.

[158] Nota Snouck Hurgonje, 15 Ag. 1892; lihat juga VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 421.

[159] Snouck Hurgonje, dalam VG, Vol. IV, bagian 2 (1924), hal. 422.

[160] Nota Snouck Hurgonje, 15 Ag. 1892; khususnya Lihat dalam Gobee dan Adriaansc, Vol. fll (1965), hal.1989 -1990.

[161] Ibidem.

[162] Ibidem; lihat juga 0pleidingsschool voor Inlandsche Amtenaren to Serang, n.p. (1918).

[163] Nota Snouck Hurgonje,15 Ag. 1892.

[164] Sayangnya, beberapa pejabat bukan asal Banten telah naik pangkat ketika bertugas di Banten, bukan karena kecakapan atas kemampuan mereka sebagai pejabat, melainkan karena pandai mencari muka terhadap pejabat-pejabat Eropa; hal itu telah menimbulkan banyak dendam di kalangan orang-orang Banten terhadap pejabat-pejabat bukan asal Banten; lihat nota Snouck Hurgronje, 15 Ag. 1892; juga dalam Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1962), hal.1990.

[165] Penasihat mengenai Urusan Pribumi kepada Gubernur Jenderal, 24 Ag. 192r,no.560.

[166] Ibidem; lihat juga : Penasihat mengenai Urusan Pnbumi kepada Gubernur Jendetal, 20 Okt. 1921, no. 11336, dalam Koleksi Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, MS, no. H 797.

[167] Nota Snouck Hurgronje, 15 Ag. 1892; juga dalam Gobee dan Adtiaanse, Vol. III (1965), hal. 1990. Istilah "zakelijke motieven" dapat mempunyai anti yang sama seperti istilah Weber "*legal-rational norma*".

[168] Nota Snouck Hurgronje,15 Ag.1892; lihat juga Gobee dan Adriaanse, Vol. III (1965), hal.1992.

[169] WNI (1888 - 1889), hal.1520 - 1522.

[170] WNI (1889 - 1890), hal. 681; monumen itu diresmikan pada tanggal 22 Des. 1889.

Bab X

AKHIR KATA

Di dalam bab-bab terdahulu telah dicoba memberikan penjelasan mengenai seluruh latar belakang dan semua tahap-tahap perkembangan pemberontakan Banten dalam tahun 1888. Penjelasan itu menunjukkan bahwa, ditinjau sebagai satu gerakan sosial, pemberontakan Banten itu ditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya semua fenomen sosial. Peristiwa itu dapat ditempatkan di dalam konteks perkembangan-perkembangan kelembagaan ekonomi, sosial, politik dan agama. Untuk memperoleh suatu pemahaman yang jelas mengenai pemberontakan itu, kita harus memperhitungkan keanekaragaman faktor-faktor yang terlibat dan variabel-variabel yang saling tergantung satu lama lain. Akan kelirulah apabila menganggap bahwa satu variabel saja yang relevan. Analisa mengenai keseluruhan faktor yang bekerja di dalam situasi sosial di Banten abad XIX dilakukan untuk dapat memahami secara lebih memadai kondisi-kondisi yang telah melahirkan gerakan pemberontakan itu. Seperti telah ditunjukkan, interaksi di antara faktor-faktor itu telah mempercepat tumbuhnya semacam dorongan struktural bagi pecahnya pemberontakan itu.[1] Penggunaan pendekatan seperti ini terhadap sejarah pemberontakan Banten semata-mata merupakan konsekuensi logis dari banyaknya dimensi gerakan pemberontakan sebagai satu konstruksi konsepsial.[2]

SKALA GERAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG RELEVAN

Suatu penjelasan mengenai skala gerakan pemberontakan dan operasi-operasinya harus mencakup beberapa faktor yang dapat disusun sebagai berikut : (1) di Banten terdapat satu tradisi untuk memberontak; (2) di daerah itu terdapat satu aspek ketegangan yang berlangsung terus-menerus, yang bersumber pada keadaan di mana satu lapisan besar penduduk mengalami ketersingkiran politik dan kehilangan privilese mereka; (3) dampak penetrasi dominasi kolonial secara berangsur-angsur mengacaukan bagian-bagian kehidupan agama; (4) ada satu pimpinan revolusioner, yang memberikan landasan rasional kepada gerakan pemberontakan itu; (5) satu alat keorganisasian telah diciptakan untuk mengarahkan operasi-operasi dan memobllisasi sumber-sumber daya manusia dan material menurut ruang dan waktu.

Seperti telah ditunjukkan, berusaha meniadakan hal-hal yang dirasakan tidak adil, yang menyakitkan hati atau yang dianggap sebagai penindasan melalui pemberontakan bersenjata sudah merupakan tradisi di Banten. Abad XIX menyaksikan bangkitnya revolusionisme tradisional dan terutama antara tahun 1800 dan tahun 1850 huru-hara yang bersifat pemberontakan susul-menyusul secara teratur, dan mencapai puncak intensitasnya dalam tahun 1850. Kerusuhan-kerusuhan itu masih merupakan hal yang endemik selama dua dasawarsa berikutnya. Kemudian menyusul periode gerakan-gerakan lebih lanjut yang memuncak dalam ledakan besar tahun 1888. Kebangkitan revolusionisme petani bukan hanya mencerminkan kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh dominasi kolonial, oleh karena di masa pra-kolonial pun gerakan-gerakan protes sudah dikenal, meskipun mungkin tidak sesering di zaman kolonial. Berulangnya peristiwa-peristiwa pemberontakan secara berkala telah mendorong munculnya satu elite revolusioner yang anggota-anggotanya dari generasi ke generasi memainkan peranan yang sedikit bariyaknya menonjol dalam pemberontakan-pemberontakan berikutnya. Mereka tidak hanya merupakan satu sumber yang potensial dari leader-leader revolusioner, melainkan juga dapat merupakan titik pemusatan utama semua kekuatan sosial yang tidak puas. Mereka adalah keluarga-keluarga terkemuka yang melahirkan tokoh-tokoh revolusioner, seperti keluarga-keluarga Jakaria, Urip dan Wakhia, yang secara

tradisional merupakan titik-titik pusat pemberontakan di Banten. Sesungguhnya, idealisasi tokoh-tokoh revolusioner sudah merupakan satu tradisi yang merakyat.[3]

Oleh karena masyarakat Banten dalam abad XIX berada pada tahap peralihan, maka ketegangan-ketegangan lama menggejolak kembali, terutama di antara golongan-golongan yang telah kehilangan kedudukan mereka yang tradisional. Fakta-fakta yang menyakitkan, yakni hilangnya privilese dan penghinaan kolektif yang tak bisa dielakkan lagi di zaman pemerintahan kolonial, telah menimbulkan rasa dendam dan frustrasi yang mendalam di kalangan golongan-golongan itu.[4] Pendek kata, kondisi ketidakpuasan yang mengakar dan kecurigaan yang mendalam dengan sendirinya merupakan tanah yang subur bagi kekacauan.

Di dalam alam masyarakat kolonial, terdapat ketidakcocokan tajam antara aspek-aspek tertentu dari praktek-praktek keagamaan tradisional dan lembaga-lembaga kolonial, yang menimbulkan perasaan getir di kalangan pribumi, yang rnerasa bahwa kebudayaan mereka sendiri akan mengalami kemunduran. Pembela-pembela tradisi, yang dirasuki paham-paham mengenai perang sabil melawan kekuasaan orang-orang kafir, menginginkan dipulihkannya tatanan tradisional dan mereka mengobarkan rasa permusuhan terhadap kaum penjajah. Orang-orang itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan organisasi baru masyarakat Banten, yang menurut pendapat mereka telah dipaksakan kepada mereka melalui otoritas pemerintah. Sebagai akibatnya, maka cara mereka menilai situasi kolonial itu melahirkan satu tradisi perlawanan psiko-kultural terhadap setiap golongan yang mewakili kekuasaan kolonial.[5]

Elite agama telah mendapat peranan untuk memimpin gerakan pemberontakan tahun 1888 dan otoritas mereka yang karismatik dengan sendirinya merupakan satu unsur penting dalam usaha membina pertumbuhan gerakan itu.[6] Kepemimpinan karismatik yang diperlukan dalam gerakan pemberontakan itu merupakan konsekuensi dari satu kombinasi pelbagai kondisi yang kompleks. Di samping tingkat keresahan sosial yang tinggi dan tidak adanya cara-cara yang sah untuk menyatakan protes atau perasaan tidak senang di dalam masyarakat Banten, maka pandangan keagamaan penduduk Banten yang belum mengalami diferensiasi, cenderung untuk memahami protes-protes politik terhadap penguasa kolonial dari segi agama.[7] Oleh karena itu, maka pemimpin-pemimpin mereka mengobar-ngobarkan kemungkinan dipulihkannya kesultanan sebagai sebuah negara Islam dan menekankan tema Perang Sabil. Sesungguhnya, peristiwa Cilegon dengan jelas mengilustrasikan bagaimana guru-guru tarekat telah tampil sebagai pemimpin politik dan menggunakan tarekat untuk menciptakan sebuah organisasi politik-keagamaan.

Salah satu kekuatan utama gerakan pemberontakan terletak dalam kenyataan bahwa gerakan itu dapat menggunakan tarekat Sufi sebagai landasan organisasinya. Hal itu menambahkan satu dimensi baru kepada pola pemberontakan di Banten.[8] la memungkinkan diperkokohnya kohesi interen menurut disiplin tarekat. Disiplin itu tidak saja mempunyai efek mengikat terhadap pengikut-pengikutnya, melainkan juga menanamkan semangat revolusioner dalam diri mereka. Selain itu, struktur organisasi gerakan itu memungkinkan dilancarkannya operasi-operasi yang meliputi daerah-daerah yang luas, yang melampaui lingkungan desa, dan mencakup jangka waktu yang lama, oleh karena operasi-operasi itu dapat dikoordinasikan dan dikontrol. Hal itu memungkinkan diumumkannya suatu "*perjuangan suci*" dan dikembangkannya suatu rasa kehendak terpenuhi di kalangan lapisan penduduk yang lebih militan. Dari uraian mengenai tahap persiapan pemberontakan menjadi jelas, bahwa meskipun sudah tersedia sarana-sarana organisasi, mobilisasi kekuatan-kekuatan gerakan itu masih memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping ada faktor-faktor taktis dan struktural yang menghambat kohesi, perbedaan-perbedaan pendapat mengenai soal-soal strategi selama tahap terakhir persiapan telah sangat mengurangi skala pemberontakan, baik dalam aspek ruang maupun aspek waktunya.[9]

BEBERAPA ASPEK PROSES MODERNISASI

Yang sangat menarik mengenai gerakan-gerakan revolusioner yang tradisional adalah

transformasi dari tradisionalitas ke modernitas, yang juga disebut modernisasi. Sesungguhnya, pemberontakan tahun 1888 di Banten dapat dipandang sebagai satu ekspresi protes sosial terhadap, atau suatu penyesuaian negatif kepada, perubahan sosial yang dipaksakan dari luar oleh dominasi Barat.[10] Konsekuensi-konsekuensi modernisasi yang nampak dalam masyarakat tradisional meliputi, antara lain, terganggunya lembaga-lembaga tradisional, ketidakserasian sosial, dan perasaan tidak aman dan frustrasi di kalangan-kalangan luas. Kacaunya cara hidup tradisional melahirkan semangat kebangkitan kembali di kalangan petani-petani Muslim, yang secara kolektif berusaha mempertahankan nilai-nilai dan cita-cita tradisional dan keagamaan serta pelbagai aspek pola hidup tradisional. Perhatian mereka kembali dipusatkan kepada lambang-lambang suci yang ada kaitannya dengan Islam dan masa lampau, dan kepada cita-cita mendirikan sebuah negara Islam dan memulihkan kesultanan. Yang merupakan satu keharusan bagi gerakan kebangkitan kembali itu adalah penggalangan solidaritas kelompok melalui revitalisasi ritual-ritual dan upacara-upacara religio-magis. Perasaan benci terhadap penguasa asing dan semangat agresif dikobarkan melalui indoktrinasi keagamaan, praktek-praktek magis dan latihan-latihan mistik. Di dalam alam sosiokultural Banten abad XIX, gerakan nativistik ini tak disangsikan lagi telah memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan perlawanan terhadap modernisasi.[11] Dilihat dari segi perubahan sosio-kultural, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Muslim di Banten, yang dipimpin oleh kaum elite agama, berusaha untuk mengebalkan diri terhadap penetrasi kekuatan-kekuatan baru yang menyertai proses modernisasi; mereka mendapatkan diri mereka ketinggalan oleh kaum elite kota yang sekular, yang berhasil mempertahankan status sosial dengan jalan menyesuaikan diri sebagaimana mestinya kepada medan alam kelembagaan yang modern. Proses modernisasi dan gejala yang menyertainya, yakni sekularisasi dan akulturasi, dengan sendirinya menimbulkan perpecahan sosial, mulai dari sikap menyesuaikan diri sampai kepada sikap menolak.[12] Pengelompokan-pengeompokan solidaritas yang mewakili pelbagai kekuatan kultural, menimbulkan pergesekan-pergesekan yang potensial dan bersama-sama dengan faktor-faktor lainnya menggerogoti jaringan masyarakat tradisional. Suatu penelaahan mengenai dimensi politik dari perubahan sosio-kultural akan menghasilkan pemahaman yang lebih besar mengenai konflik yang ditimbulkan oleh perlawanan yang diberikan oleh elite agama terhadap proses modernisasi.[13]

Seperti telah dikemukakan, dalam abad XIX administrasi kolonial secara berangsur-angsur diorganisasikan menurut paham Barat tentang pemerintahan, yang berarti diberlakukannya lembaga-lembaga Barat dan norma-norma menurut ukuran-ukuran yang ditentukan oleh orang-orang Belanda bagi diri mereka sendiri. Transformasi itu terdiri dari pembentukan administrasi birokrasi, satu hirarki pegawai negeri, cara-cara pengisian jabatan yang lebih rasional, dan sebagainya. Inovasi-inovasi itu dengan sendirinya mengakibatkan menjadi lemahnya ikatan-ikatan tatanan tradisional, Otoritas tradisional terancam oleh masuknya birokrasi modern yang sekular, yang berpusat pada otoritas kolonial.[14] Efek yang paling menyolok dari birokrasi baru itu adalah bahwa pusat otoritas dan tanggung jawab bergeser dari para bupati kepada administrator-administrator Belanda. Para bupati menjadi sekedar semacam boneka yang otoritasnya tergantung kepada kekuasaan kolonial.[15] Pendek kata, pemerintah kolonial telah mengubah mekanisme politik supaya dapat mengontrol kegiatan-kegiatan bupati dan mencegah jangan sampai saluran-saluran kepemimpinan tradisional dijadikan mekanisme untuk mengorganisasikan perlawanan terhadap rezim. Pejabat-pejabat pribumi dibiarkan untuk secara nominal terus memiliki fungsi-fungsi dan prerogatif-prerogatif mereka, hanya apabila mereka menggunakan kekuasaan mereka sesuai dengan kehendak penguasa kolonial. Terus berlangsungnya kekuasaan mereka merupakan satu sumber ketidaksenangan bagi penduduk Muslim yang ortodoks. Sesungguhnya, kalangan penduduk Muslim yang luas merasa tidak senang kepada penguasa-penguasa mereka yang hanya mementingkan keduniaan, atau merasa frustrasi karena cepatnya laju modernisasi dan proses sekularisasi yang menyertainya. Dengan berkembangnya sekularisme dalam pemerintahan dan masyarakat, maka semakin banyak anggota elite agama kehilangan saluran-saluran mereka yang sudah dikuatkan oleh tradisi untuk memperoleh atau mempertahankan status serta sarana-sarana untuk mengontrol tatanan sosial masyarakat. Hal itu dengan sendirinya melahirkan suatu kecenderungan di kalangan mayoritas elite agama untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk menentang

penguasa kolonial dan kolaborator-kotaboratornya. Mereka cenderung untuk mengembangkan orientasi-orientasi politik yang ekstrim dan untuk memimpin gerakan-gerakan politik yang radikal. Antagonisme mereka terhadap penguasa yang kafir jelas berbeda dengan oposisi mereka terhadap penguasa Muslim yang tradisional.[16] Menurut hakikatnya sendiri, pimpinan elite agama yang karismatik bersikap radikal dan selalu merupakan ancaman yang potensial terhadap otoritas yang tradisional di masa orde lama; sekarang ia menentang praktek-praktek kepamongprajaan yang sudah mapan serta tatanan pernerintah kolonial yang legal-rasional.[17] Semangat revolusioner mereka didukung oleh sifat otoritas mereka yang karismatik. Dilihat dalam perspektif ini, maka konflik sosial di dalam konteks situasi kolonial menampilkan diri dalam bentuk konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain dan yang menganut nilai-nilai dan norma-norma yang saling berlawanan. Lebih jelas lagi, di bawah kekuasaan asing, masyarakat Banten terpecah-pecah menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan atas dasar ketaatan mereka kepada lembaga-lembaga tradisional-keagamaan atau lembaga-lembaga modern yang sekular; golongan-golongan sosial yang berbeda-beda itu menduduki tempat-tempat yang berbeda dalam hirarki politik modern. Dorongan-dorongan yang berturut-turut ke arah modernisasi berjalin dengan struktur-struktur sosial yang sudah ada dan melahirkan pola-pola perilaku politik yang berbeda-beda, mulal dari penyesuaian diri atau inovasi sampai kepada pemberontakan, dan masing-masing berpegang kepada otoritas yang rasional-legal, yang tradisional dan yang karismatik.[18]

ASPEK NATIVISM

Satu masalah lain dalam gerakan pemberontakan itu adalah segi nativistiknya.[19] Menurut hemat kami, perhatian yang semestinya harus diberikan kepada daya tarik gagasan pemulihan kesultanan di satu pihak, dan daya tarik gagasan eskatologis Islam di lain pihak. Pengagungan masa lampau sebagal bagian dari gagasan tentang Mahdi memberikan satu mekanisme kompensasi yang serasi dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, seperti penderitaan fisik, frustrasi yang diakibatkan oleh kehadiran penguasa-penguasa asing atau dekadensi moral. Usaha-usaha dilakukan untuk menghidupkan kembali aspek-aspek tertentu dari kebudayaan masa lampau yang digunakan sebagai lambang-lambang kejayaan yang sudah lampau untuk menandaskan nilai-nilai bersama dan loyalitas-loyalitas dasar; aspek-aspek itu juga memperlihatkan unsur-unsur utama dari regenerasi atau revitalisasi, seperti penambangan kekuasaan asing dan pemulihan tatanan tradisional, yang dipahami sebagai suatu dunia baru, di mana bangsa yang berkeadilan akan hidup dalam keserasian dan kesejahteraan.[20] Dilihat dalam perspektif ini, gerakan pemberontakan di Banten dapat digolongkan sebagai satu fenomen nativistik, yang mengandung aspek-aspek kebangkitan kembali dan milenarianisme.[21] Di dalamnya juga dapat dikenali unsur-unsur eskatologis. Oleh karena rakyat tidak dapat melihat jalan lain untuk minta keadilan, mereka cenderung untuk menggabungkan diri ke dalam gerakan nativistik ini, yang menjanjikan penghapusan kekuasaan asing dan pemulihan kondisi-kondisi dari masa sebelum penjajahan. Gerakan yang keras dan eksplosif itu dapat dipandang sebagai satu pelarian irasional dari realitas - semacam *escapism* - dan sudah dapat dipastikan akan menemui kegagalan oleh karena gerakan itu sepenuhnya mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan adi-kodrati dan beroperasi dengan cara-cara mistik-magis yang samasekali tidak memadai untuk menghadapi kekuatan-kekuatan kolonial yang menggunakan teknik-teknik dan organisasi modern.[22]

ASPEK KETERSINGKIRAN

Satu masalah lain yang berkaitan langsung dengan fenomen nativistik itu dan menyangkut aspek sosio-psikologis gerakan itu, adalah dapat tidaknya gerakan itu dijelaskan dari segi "keadaan ketersingkiran" (“*a state of deprivation*”).[23] Pada umumnya diandaikan - orang sering kali menunjuk kepada pengandaian itu - bahwa perasaan dihalang-halangi merupakan salah

satu penyebab timbulnya gerakan milenari nativistik. Kita harus mengakui bahwa bukan hanya keburukan-keburukan ekonomis seperti adanya orang-orang yang lapar, yang melarat atau yang tidak mempunyai tanah, akan tetapi juga ketersingkiran-ketersingkiran yang disebabkan karena kehilangan kedudukan sosial, kehilangan hak-hak politik atau kehilangan warisan kultural, bisa menimbulkan frustrasi yang tajam. Kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa perasaan dihalang-halangi (*"sense of blockage"*) di bidang politik atau kultural kadang-kadang lebih penting daripada perasaan menderita di bidang ekonomi. Dalam periode bencana-bencana fisik - wabah penyakit ternak, wabah demam, kelaparan dan meletusnya Gunung Krakatau - tidak tercatat adanya kerusuhan-kerusuhan sosial yang besar, sedangkan dalam tahun meletusnya pemberontakan tidak ada kesulitan ekonomi yang parah.[24] Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemberontak-pemberontak yang ditawan dengan jelas menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin gerakan itu sedang berusaha mencari martabat dan harga diri dalam konteks situasi kolonial. Hasrat akan kembalinya kesultanan dan lahirnya negara Islam telah memungkinkan mereka untuk mempertahankan keutuhan kesadaran akan identitas mereka, sedangkan gerakan itu telah memberikan kepada mereka perasaan sedang menunaikan suatu tugas suci.[25] Meskipun dari segi ekonomis, elite agama di Banten tergolong kelas kaum tani yang lebih berada, mereka tetap menyadari kenyataan yang menyakitkan bahwa ada ketimpangan antara kedudukan ekonomis dan prestise sosial mereka di satu pihak, dan status politik mereka di lain pihak. Di dalam kerangka organisasi politik masyarakat kolonial mereka tidak dapat memegang fungsi-fungsi politik. Berkat politik liberal yang dianut oleh pemerintah kolonial di bidang keagamaan, maka di Banten masih terdapat pengaturan-pengaturan sosial yang memudahkan penggalangan kekuasaan politik melalui lembaga-lembaga keagamaan, sehingga elite agama dapat tampil sebagai sebuah "golongan kepentingan" yang sangat berpengaruh.[26] Mereka menderita tidak pertama-tama karena mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, melainkan karena perasaan dihalang-halangi di bidang politik. Gerakan kebangunan agama dapat memuaskan kebutuhan mereka akan reorientasi kultural dan penemuan kembali tradisi mereka. Sesungguhnya, dalam periode tegang yang disebabkan oleh perubahan sosio-kultural, gerakan sosial Sering kali cenderung untuk menganut nilai-nilai tradisional.[27] Dalam kasus gerakan-gerakan di Banten, nilai-nilai keagamaan merupakan satu unsur yang penting, yang bercampur baur dengan nilai-nilai tradisional.

ASPEK AGAMA

Tidaklah mengherankan bahwa gerakan-gerakan sosial di Banten dengan mudah mengambil bentuk keagamaan, oleh karena pandangan dunia orang Banten didasarkan pada agama dan sebagai akibatnya maka protes-protes sosial selalu dipahami menurut pengertian-pengertian agama.[28] Seperti telah dikemukakan sebelumnya; komponen-komponen agama dalam gagasan milenari yang terkandung dalam gerakan itu sangat menonjol; rakyat dapat dikerahkan dengan menggunakan himbauan keagamaan. Oleh karena itu, maka protes-protes politik mengambil bentuk keagamaan, dan batas-batas persoalan politik dan persoalan agama sedikit-banyak menjadi saling melimpahi. Dapat juga dikatakan bahwa gerakan-gerakan politik dan keagamaan dijumpai bersamaan. Oleh karena masyarakat Muslim tidak mengadakan pembedaan antara persoalan politik dan persoalan agama, jadi berbeda sekali dengan dunia Barat yang modern, maka gerakan-gerakan protes cenderung untuk melibatkan suatu komitmen yang total kepada nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, gerakan-gerakan pemberontakan dalam banyak hal dapat dipandang sebagai ungkapan-ungkapan keagamaan dari konflik-konflik sekular, apakah itu ekonomis, sosial atau politik. Juga jelas, bahwa komponen permusuhan di dalam orientasi keagamaan gerakan itu meningkatkan kekerasan-kekerasan yang menyertai ledakan-ledakannya.[29] Oleh karena itu, maka ledakan-ledakan permusuhan yang terjadi selama pemberontakan harus dipandang sebagai serangan religio-politis terhadap penguasa-penguasa kolonial dan bukan sebagai ledakan kekerasan rasial. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ungkapan-ungkapan permusuhan ditujukan terhadap penguasa-penguasa kolonial sebagai orang-orang kafir dan bukan sebagai orang-orang Eropa. Selain dari itu, juga orang-orang Muslim yang telah memperoleh status pegawai negeri, menjadi korban serangan mereka;

sentimen-sentimen anti-pegawai negeri dibenarkan oleh paham bahwa golongan pegawai negeri harus dianggap sebagai *kafir indanas*, atau *setengah kafir*, dan karenanya kotor, sebab mereka berhubungan dengan orang-orang kafir. Selain itu perlu diingat kembali bahwa sejumlah anggota keluarga Belanda di Cilegon tidak dibunuh oleh karena mereka telah menyatakan bersedia masuk Islam.[30]

PROSES INTEGRASI

Perhatian juga harus diberikan kepada peranan integratif agama dalam perkembangan gerakan sosial itu. Sesungguhnya gerakan itu memperlihatkan kecenderungan yang menonjol ke arah perkembangan modern, setidak-tidaknya dalam aspek strukturalnya. Golongan-golongan solidaritas yang mencakup pemimpin-pemimpin komplotan itu telah mengembangkan sebuah sistem komunikasi yang mengatasi lingkungan desa dan dengan skala antar-daerah. Selain itu, kesetiaan politik mereka mengatasi loyalitas kekerabatan dan loyalitas mereka kepada masyarakat setempat. Dan akhirnya, perjalanan naik haji dan struktur organisasi tarekat-tarekat Sufi telah memungkinkan diadakannya kontak di seluruh "negeri" di antara sesama Muslim. Sebagai akibatnya, maka Islam menjadi titik pemusatan kekuatan-kekuatan sosial yang menentang dominasi kolonial. Dalam hal ini, maka gerakan pemberontakan yang menjadi pokok bahasan studi ini, seperti gerakan-gerakan sosial yang serupa yang terjadi di tempat-tempat lain di Pulau Jawa dalam periode yang sama, dapat dipandang sebagai suatu gerakan proto-nasionalis atau pra-nasionalis, yang mendahului perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan.[31] Akan tetapi perkembangan itu sudah barang tentu merupakan satu kecenderungan yang modern, jika dihubungkan dengan peranan integratifnya dan bukan dengan orientasi tujuan dan aspek-aspek organisasinya. Sesungguhnya, jika dibandingkan dengan gerakan-gerakan nasionalis modern, orang dengan mudah dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mendasar : pada waktu itu belum dikenal doktrin-doktrin, program-program dan cita-cita politik yang modern.[32] Demikian pula kita tidak melihat adanya organisasi, taktik dan strategi modern dalam gerakan-gerakan sosial abad XIX. Oleh karena itu, maka gerakan-gerakan itu pada pokoknya dapat diidentifikasikan sebagai gerakan-gerakan tradisional, keagamaan dan milenari.

CIRI-CIRI KHAS GERAKAN PEMBERONTAKAN DI BANTEN

Setelah kita mengemukakan aspek-aspek utama gerakan pemberontakan tahun 1888 di Banten, kita sekarang akan membicarakan secara singkat sekali ciri-ciri umum pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah yang lama sebelum dan sesudah pemberontakan tahun 1888. Dengan cara ini kita akan dapat menyoroti sifat khusus pemberontakan Cilegon sebagai titik pertemuan pelbagai karakteristik yang terdapat dalam gerakan-gerakan sebelumnya di satu pihak, dan sebagai satu situasi-pertengahan jalan antara gerakan-gerakan sebelumnya dan pemberontakan tahun 1926 di lain pihak.

Pertama-tama, ciri yang paling menonjol dari gerakan-gerakan sebelumnya adalah penolakan dan perlawanan aktif terhadap dominasi asing serta lembaga-lembaga yang menyertainya. Keanekaragaman manifestasi-manifestasi karakteristik itu berkisar mulai dari perlawanan dengan kekerasan terhadap perpajakan atau kerja paksa sampai kepada propaganda terang-terangan untuk mengusir kekuasaan Belanda.[33] Satu unsur yang fundamental dari banyak gerakan yang berkaitan dengan penolakan terhadap dominasi asing, adalah gagasan untuk memulihkan tatanan lama, yakni kesultanan. Malahan promotor-promotor PKI pun dalam tahun 1926 masih mengisyaratkan kemungkinan diwujudkannya sebuah negara Islam.[34] Seperti telah ditunjukkan di muka, dalam pemberontakan-pemberontakan tahun 1888 dan 1926 sifat nativistik dikaitkan dengan satu ciri lainnya yang sangat menonjol, yakni tema Perang Sabll yang dengan sendirinya mempunyai efek yang besar terhadap penduduk Banten.

Di sini kita hendaknya jangan lupa bahwa dalam kedua pemberontakan yang berlainan itu terdapat dua jenis hubungan yang berlainan antara agama dan politik. Dalam peristiwa Cilegon, ideologi-ideologi Islam merupakan tujuan-tujuan yang sebenarnya yang direncanakan oleh pemimpin-pemimpin pemberontak, sedangkan dalam pemberontakan tahun 1926 ajaran komunis dikhotbahkan dengan gaya yang lama dengan gaya yang dipakai oleh guru-guru agama, dan tujuan-tujuan PKI disuguhkan kepada pelbagai lapisan penduduk dengan menggunakan ide-ide mereka sendiri yang khas.[35] Hal ini berarti bahwa dalam kasus yang belakangan itu, konsep-konsep keagamaan digunakan hanya sebagai kedok dan sebagai alat yang berguna oleh sebuah gerakan yang pada dasarnya sekular. Mengingat situasi yang sebenarnya dan kondisi-kondisi yang berlaku di Banten ketika itu, maka tidaklah mengherankan bahwa gerakan-gerakan sosial di Banten mempunyai ciri-ciri keagamaan yang jelas. Satu ciri umum lainnya yang terdapat pada gerakan-gerakan itu adalah kepercayaan akan kekebalan,[36] yang di dalam masyarakat yang tradisional mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat berfungsi sebagai satu alat yang ampuh untuk membangkitkan semangat agresif.

Gerakan-gerakan pemberontakan di Banten kebanyakan berlandasan penduduk pedesaan, tak peduli kelompok pimpinan yang mana yang menguasai mereka dalam pelbagai kesempatan. Anggota-anggota biasa gerakan-gerakan itu tak pelak lagi terutama terdiri dari kaum tani dan golongan-golongan lain dari penduduk pedesaan.

Satu tinjauan umum mengenai *avant garde* pelbagai gerakan di Banten dengan jelas menunjukkan bahwa dalam abad XIX berlangsung satu pergeseran pimpinan secara konstan, atau satu perputaran peranan elite revolusioner. Pada bagian awal abad XIX unsur-unsur yang menonjol dalam pergolakan-pergolakan sosial terdiri dari kaum bangsawan dan anggota-anggota kelas terhormat pedesaan yang telah kehilangan kekayaan mereka, serta gerombolan-gerombolan bersenjata yang mengembara, yang terdiri dari orang-orang yang sudah dinyatakan di luar hukum, orang-orang buangan dan penyamun-penyamun. Anggota-anggota tertentu kaum elite revolusioner yang tradisional, seperti keluarga Jakaria, memainkan peranan yang sangat menonjol. Setelah pemimpin-pemimpin pemberontak itu dibuang *en masae*, barisan elite revolusioner diisi lagi dengan tampilnya ke muka pemuka-pemuka agama, yakni para kiyai dan haji, dalam gerakan-gerakan pemberontakan. Peranan pemuka-pemuka agama semakin meningkat dan mencapai puncaknya dalam gerakan pemberontakan tahun 1888.[37] Satu hal yang sangat menarik adalah bahwa banyak sekali pemimpin dalam pemberontakan komunis tahun 1926 yang juga bergelar haji.[38]

Pemberontakan tahun 1926 di Banten memperlihatkan ciri-ciri yang baru yang membedakannya dari gerakan-gerakan pemberontakan yang terdahulu: tipe pemimpin-pemimpinnya, organisasinya dan strateginya. Ciri-ciri itu jelas menunjukkan pola-pola modern, yang merupakan ciri umum gerakan-gerakan yang modern.[39] Akan tetapi dalam hal-hal lainnya, pemberontakan ini dapat dipandang sebagai sebuah versi baru pergolakan pedesaan yang tradisional yang terjadi di daerah itu.

Jika kita memperbandingkan ciri-ciri umum gerakan-gerakan itu dengan ciri-ciri umum gerakan-gerakan di daerah-daerah lain di Pulau Jawa, maka bolehlah kita menarik kesimpulan bahwa dalam masyarakat Banten tidak terdapat tradisi yang berusia tua, yang dapat dipersamakan dengan harapan-harapan mesianik yang tradisional, yang terdapat dalam kebudayaan Jawa. Seperti telah dikemukakan di atas, gerakan di Banten memperoleh warnanya dari suatu versi eskatologi Islam dan dari Mahdisme, yang dicampur dengan unsur-unsur nativistik kebudayaan Banten. Tokoh Masalah, Ratu Adil, yang merupakan pusat gerakan-gerakan mesianik Jawa yang endemik dalam abad XIX, samasekali tak dikenal di Banten. Keterbatasan lingkup studi ini tidak mengizinkan kami untuk mengadakan penelaahan lebih lanjut mengenai fenomen historis ini. Pengetahuan kita mengenai gerakan-gerakan sosial di Pulau Jawa abad XIX tidak akan lengkap dan akan merupakan pecahan-pecahan belaka selama kategori gerakan-gerakan milenari ini belum diselidiki. Seperti telah dinyatakan pada awal-mula studi ini, kelalaian terhadap gerakan-gerakan itu sejak dulu merupakan satu ciri yang tipikal dari historiografi Indonesia.[40] Melihat melimpahnya catatan-catatan sejarah mengenai pokok yang khusus ini, maka akan diperlukan banyak kerja untuk mempelajari sekian banyaknya gerakan milenari yang telah tumbuh subur di Indonesia, khususnya di Jawa, dalam

abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh, sebelum dapat dilakukan suatu studi perbandingan mengenai gerakan-gerakan sosial.

Sebagai penutup, kami ingin mengemukakan bahwa studi historis mengenai gerakan-gerakan sosial pasti akan menambahkan satu dimensi baru kepada historiografi Indonesia di satu pihak, dan mendorong pergeseran minat ke arah Indonesia-sentrisme di lain pihak.

e-books a.mudjahid chudari 2006

---

[1] Dengan "dorongan struktural" (*structural conduciveness*) dimaksudkan pengaturan-pengaturan struktural yang memungkinkan suatu tipe gerakan protes tertentu dan bukan jenis-jenis ledakan lainnya; lihat Smelser (1962), hal. 319 - 338. Dalam masyarakat Banten, cara-cara yang tersedia untuk mencari keadilan atau menyatakan ketidaksenangan terbatas; satu di antata cara-cara yang sedikit jumlahnya untuk menyalurkan nafsu agresi adalah protes keagamaan, yakni gerakan protes yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

[2] Suatu analisa yang baik mengenai cara-cara pendekatan yang didasarkan atas keanekaragaman dimensi gerakan-gerakan sosial, terdapat dalam Yonina Talmon, dalam *AES*, Vol. 111 (1962), hal. 15 - 148; juga Meadows, dalam SSR, Vol. XXVII (1943), hal. 223 -228; dan dalam SF, Vol. XXIV (1945 - 1946), hal. 408 - 412.

[3] Lihat di atas, Bab IV, *passim*; lihat Sejarah Haji Mangsur (MS), khususnya yang mengenai Tubagus Buang dan Mas Jakaria.

[4] Mengenai penjelasan-penjelasan dari segi keadaan-keadaan jiwa, lihat Aberle, dalam CSSR, Suplemen II (1962), hal. 208 - 214, di mana ia memberikan tinjauan mengenai apa yang dinamakan *'Relative Deprivation Theory'*:

[5] Tradisi perlawanan psiko-kultutal menunjuk kepada penanaman perasaan benci yang terus-menerus terhadap penguasa-penguasa yang kafir, lihat di atas, Bab V.

[6] Mengenai konsep otoritas yang karismatik, lihat Max Weber, *The Theory of Sosial and Economic Organization*, (1964), hal. 359 - 392; cf. ktitik yang dilakukan oleh Wotsley (1957), hal. 266 - 272. Pendapat penulis buku iru adalah bahwa tipe ideal otoritas yang karismatik, yang tradisional dan yang rasional-legal dapat menjelaskan situasi konflik dalam masyarakat Banten abad XIX, meskipun otoritas yang dimiliki oleh pelbagai golongan elite harus ditempatkan di sepanjang satu continuum, mulai dari otoritas karismatik sampai kepada otoritas rasional-legal. Tidak akan relevan untuk mencari tipe-tipe otoritas yang murni.

[7] Suatu uraian mengenai protes politik dan jenis-jenis protes lainnya yang dinyatakan dengan pengettian-pengertian keagamaan, terdapat dalam Engels (1927), Bodrogi (1950 - 1951), Balandier (1953), Worsley (1957), Kobben (1959), Cohn (1961), Lanternari (1963).

[8] Dengan pengecualian kasus Jayakusuma dalam tahun 1869, tidak terdapat petunjuk-petuttjuk yang menyatakan bahwa gerakan-gerakan pemberontakan yang terdahulu diorganisasikan dengan menggunakan lembaga-lembaga keagamaan seperti tarekat.

[9] Di samping pimpinan dan kohesi intern, maka komponen-komponen lainnya dari gerakan-gerakan sosial adalah ideologi, tujuan, strategi dan taktik. Untuk dapat memastikan, sampai sejauh mana pelbagai unsur itu berkaitan langsung dengan perkembangan yang sebenarnya, kita harus menilai situasi khusus di mana gerakan itu terdapat; mengenai suatu analisa tentang faktor-faktor intern gerakan sosial, lihat King (1961), hal. 66 - 84.

[10] Mengenai uraian-uraian tentang pelbagai reaksi terhadap perubahan sosial, lihat Wilson

(1945); Hagen (1962); khusus mengenai analisa tentang reaksi-reaksi terhadap dominasi Barat, lihat Malinowski (1945), Burger (1949 -1950); Bodrogi (1950 - 1951); Frazier (1957); Balandier (1959); Wertheim (1959);van Baal (1960).

[11] Mengenai suatu klasifikasi tentang gerakan-gerakan nativistik, lihat Lipton (1943); cf. Kobben (1959), Smith (1959), Voget (1959). Menurut kriteria Lipton, pemberontakan Banten tahun 1888 dapat dianggap sebagai satu gerakan magis, revivalistik nativistik; menurut pembedaan-pembedaan Kobben, ia dapat diidentifikasikan sebagai gerakan eskatologis-nativistik melawan dominasi asing.

[12] Mengenai tipologi adaptasi yang mencakup konformitas, inovasi, ritualisme, retreatism dan pemberontakan, lihat Merton (1957), hal. 140 - 155.

[13] Perlawanan terhadap modernisasi sebenarnya dilakukan oleh sebagian besar kaum elite agama, sementara sebagian kecil dari golongan ini, yang biasanya terdiri dari unsur-unsur resmi, lebih dapat menyesuaikan diri. Meskipun gerakan perlawanan itu terutama bersifat tradisional, ia juga memperlihatkan sebagai satu produk sampingan, satu ciri pre-modern, yakni peranan integratifnya, lihat di bawah hal. 420 f.

[14] Mengenai uraian tentang aspek birokratis modernisasi politik, lihat Eisenstadt (1961); juga Hoselitz, dalam *La Palombara* (1963), hal. 168 -169.

[15] Lihat nota Snouck Hurgronje mengenai situasi di Banten,15 Agustus 1892; nota itu menunjuk kepada degradasi kedudukan pejabat-pejabat pribumi di Banten.

[16] Dalam periode pre-kolonial dapat dicatat adanya suatu antagonisme yang mendalam antara golongan yang resmi dan golongan yang tidak resmi dari kaum elite agama; golongan yang terakhir biasanya merupakan satu ancaman yang potensial terhadap otoritas penguasa tradisional; Lihat di alas, Bab III. Lihat juga Pigeaud (M5,1943 - 1945), hal.125 - 126.

[17] Mengenai penjelasan tentang sifat otoritas yang karismatik, tetutama sifatnya yang radikal dan revolusioner, lihat Bendix tentang Max Weber (1962), hal. 300 - 301.

[18] Lihat Max Weber (1964), hal. 328 ff.

[19] Mengenai satu deskripsi tentang ciri-ciri tipikal gerakan nativistik, lihat Lepton (1943), Balandier (1953), Herskovits (1958), Kobben (1959).

[20] Satu aspek nativisme ditunjukkan oleh naiknya seorang atau lebih di antara kaum pemberontak ke kedudukan *raja*; Lihat Bab VII, *passim*.

[21] Apabila kita menggunakan pendekatan fungsional-komparatif dari Kobben, maka gerakan pemberontakan tahun 1888 itu dapat diklasifikasikan sebagai gerakan eskatologis-nativistik melawan dominasi asing; aspek eskatologisnya nampak dari apa yang dinamakan "Surat Terakhir Nabi"; lihat di atas, Bab V, hal. 221 f, meskipun ketika pemberontakan itu pecah tidak ada petunjuk-petunjuk tentang adanya ungkapan-ungkapan yang bersifat eskatologis. Mengenai bentuknya (Kobben membedakan 4 tipe bentuk, di samping 5 tipe isi), maka ia dapat diidentifikasikan sebagai gerakan yang dipimpin oleh seorang "nabi" - dalam hal ini, seorang *wali* atau orang keramat - dan untuk sebagian terorganisasi.

[22] Kepercayaan akan kekebalan merupakan satu ciri gerakan milenari semacam ini yang menonjol; lihat Bab IV, *passim.*

[23] Mengenai penjelasan tentang "Relative Deprivation Theory", lihat Aberle, dalam CSSH, Supplement II (1962), hal. 208 - 228.

[24] Lihat di atas, Bab II, *passim*.

[25] Kesadaran akan tugas yang suci merupakan hal yang inheren dalam kepemimpinan yang karismatik, lihat Max Weber (1964), hal. 360 - 361; lihat juga Bendix (1962), hal. 301 f.

[26] Istilah "interest group" di sini tidak menunjuk kepada golongan-golongan tekanan yang

terorganisasi baik dan sudah dibirokrasikan yang dikenal di masyarakat-masyarakat industri modern, akan tetapi hanya menunjuk kepada golongan sosial yang mencerminkan kecenderungan-kecenderungan kepentingan dari satu bagian penduduk. Mengenai urutan tentang golongan-golongan kepentingan, lihat Almond (1961), hal. 85 - 101.

[27] Kesadaran akan perubahan di kalangan rakyat tercemin dalam ramalan-ramalan, lihat Hoezoo, dalam *MNZG*, Vol. X111 (1869), hal. 307 - 356; Vol. XXVII (1883), hal. I - 42.

[28] Mengenai penjelasan tentang sifat keagamaan perjuangan kaum tani, lihat juga Engels (1927), dan Bodrogi (1950 - 1951); penulis-penulis ini sudah mengakui bahwa memang ada kepentingan-kepentingan kelas yang bersifat material akan tetapi gerakan itu tidak menempuh garis perjuangan kelas yang lebih realistis. Di dalam kasus Afrika, Balandier mengidentifikasikan gerakan-gerakan pada tingkatan ini sebagai reaksi-reaksi total, lihat Balandier (1953); Kobben lebih menyukai istilah "*prophetic movement* "; lihat Kobben (1959).

[29] Komponen permusuhan menunjuk kepada ide jihad atau perang sabil; mengenai studi tentang Perang Sabil, lihat Obbink (1901).

[30] Perlu juga disebutkan seorang Belanda keturunan Jerman yang masuk Islam, Handle, yang berada di daerah itu ketika terjadi pemberontakan, dan disembunyikan terhadap kaum pemberontak oleh seorang haji yang telah menjadi kawannya; jiwanya dapat diselamatkan akan tetapi kemudian hari ia dicurigai oleh pemerintah dan diusir dari negeri ini; lihat MS yang memuat otobiogtafinya.

[31] Suatu penjelasan yang lebih ekstensif mengenai gerakan-gerakan pada tingkatan ini sebagai gerakan pra-nasiollalis, terdapat dalam Wertheim (1964), hal. 85 - 101.

[32] Mengenai studi-studi tentang karakteristik-karakteristik gerakan sosial modern, lihat Heberle (1951); juga King (1962).

[33] Mengenai penilaian tentang janji-janji yang diberikan oleh kaum pemberontak Banten dalam tahun 1926, lihat Benda dan McVey (1960), hal. 42; cf. pernyataan Tan Malaka, hal.14 - 16.

[34] Benda dan McVey (1960), hal. 42; kepada anggota-anggota bangsawan Banten dijanjikan pembentukan sebuah kesultanan baru.

[35] Benda dan McVey (1960), hal.17; selanjutnya juga hal. 43 - 47.

[36] Di dalam pemberontakan Banten tahun 1926 pun doktrin tentang kekebalan masih memainkan peranan yang penting, Benda dan McVey (1960), hal. 44.

[37] Mengenai pemberontakan tahun 1888, perlu diberi tekanan pertumbuhan perguruan-perguruan mistik; inilah perbedaan dasarnya dengan gerakan-getakan yang terdahulu, yang bukan pra-nasionalis. Lihat di atas, hal. 420-421.

[38] Benda dan McVey (1960), hal. 88 - 89. Sebanyak 145 haji tercatat sebagai anggota-anggota eksekutif dan promotor PKI, dari jumlah seluruhnya 341 orang. Selain itu, guru-guru agama dalam PKI berjumlah 23 orang, sedangkan petaninya berjumlah 184 orang; lihat Benda dan McVey (1960), hal.60 - 61.

[39] Benda dan McVey (1960), *passim*.

[40] Karya Dingley terutama membahas gerakan-gerakan dalam abad XX dan tidak didasarkan atas sumber-sumber primer; perlu disebutkan karya-karya yang lebih baru yang membahas milenafianisme, yakni karya Sartono Kartoditdjo (1959), Harjaka Hardjamandjaja (1962), dan Dahm (1963).

BIBLIOGRAFI

SUMBER-SUMBER MANUSKRIP

I. Algemeen Rijksarchief, Den Haag ;

Keputusan-keputusan(0IB),1819 - 1850.

Notulen Kementerian Urusan Jajahan (Vb),1846,1848

Statistik Jawa dan Madura, khususnya Keresidenan Banten (Dok, no. 3044),1836.

Satu tinjauan mengenai Hubungan-hubungan Politik dengan Pangeran-pangeran Pribumi di Jawa,1596 - 1830 (Dok. no. 2962),1844.

2. Hulp-depot van her Algemeen Rijksarchief, Schaarsbergen (Arnhem)

Surat-surat masuk, Kementerian Urusan Jajahan (Exh.), 1850 - 1900. Notulen rahasia dan notulen Kabinet (Geheimen Kabinets Verbaal), 1850 - 1900.

Mail Reports (MR),1872 - 1900.

Keputusan-keputusan (OIB), 1850 - 1900; Daftar Keputusan-keputusan Rahasia,1850 -1875.

Notulen Kementerian Urusan Jajahan (Vb.),1850 - 1900.

(Catatan : Sumber-sumber arsip yang benar-benar digunakan, disebutkan di dalam naskah).

3. Naskah-naskah prive

Otobiografi Handle, MS.

Naskah-naskah Holle, MS no, 266 Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (VBG, Vol, LVII, 1859, hal. 468) : Otobiografi R.A. Sutadiningrat.

Naskah-naskah Kern, MS H 797 Koninklilk Instituut voor Taal-, Land- en

Volkenkunde : Advis C. Snouck Hurgrorge,1889,1892; RA. Kom, 1921. Naskah-naskah Pigeaud, MS H 717 a-c Koninklqk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde : Javaansche Besehavingsgesehiedenis, Yogyakarta, 1943 - 1945. Naskah-naskah Snouck Hurgonje, MS no. 10 (Snouck Hurgonje Huis, Leiden), Sejarah Haji Maagsur,

SUMBER-SUMBER RESMI YANG DICETAK

Bantam Rapport. Rapport van de commissie voor her onderzoek naar de oorzaken van de zich in de maand November 1926 in verscheidene gedeelten van de residentie Bantam voorgedaan hebbende ongeregeldheden, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van Januad 1927, Nr 1, Weltevreden, 1928, (Lihat terjemahan laporan ini ke dalam bahasa Inggris, Harry J. Benda dan Ruth McVey, eds.,1960).

Eindresume Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grand op Java en Madoera, 3 vol., Batavia, 1876 - 1896. (Lihat juga Bergsma, 1876 -1896).

Eindresume van het bij besluit van den Gouv. - Generaal van Ned. - IndiF van 24 Juli 1888, no.

8 bevolen Onderzoek naar de Ferplichte Diensten tier inlandsche bevolking op Java en Madoera, (Gouvernmentslanden), 5 vol., Batavia, 1901-1903. (Lihat juga Fokkens,1901-1903).

Gegevens voor een nieuwe landrente-regeling. Eindresume tier onderzoekingen bevolen bij Gouvernementsbesluit van 23 Oct. 1879, no. 3, Batavia, 1885. (Lihat juga Sollewgn Gelpke,1885).

Koloniaal Verslag, 1864,1888,1889.

Onderzoek naar de Mindere Welvaart tier Inlandsche Bevolking op Java en Ma. doera : Economic van de Dessa, Vol. III, Batavia, 1911-1912. (Lihat juga Adatrechtbundels, Vol. N (1911).

Resume van het by Gouvernementsbesluit van 10 Juli 1867 No. 2 bevolen Onder. zoek naar de Regten van den grand in de Residentie Bantam, Batavia, 1871. (Lihat jugs TNI, 1872, no, 1 dan 2).

Staatsblad van Nederlandsch-IndIC, 1859,1866,1867,1882,1892.

SURAT KABAR

Bataviaasch Handelsblad, Batavia, Rotterdam dan Amsterdam, 1888,1889.

Bataviaasch Handelsblad, Mail Editie, Batavia, Rotterdam dan Amsterdam, 1885. De Indische Mail, n.p.1886. '

Java Bode, Batavia, 1885 -1889.

Javasche Courant, Batavia, 1846,1850,1883.

De Loeomotief, Semarang, 1884 -1889.

Nieuws van de Dag, Amsterdam, 1888,1889.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam, 1889.

Soerabaiasch Handelsblad, Surabaya, 1888.

De Standaard, Amsterdam, 1888.

De Tied, Amsterdam, 1888.

KARYA LEKSIKOGRAFIS DAN LAIN-LAIN

The Encyclopaedia of Islam, ed. M, Th. Houtsma, A.J. Wensinek, H.A.R. Grab, W. Heffening, dan E. Levi-Provencal, 4 vol., Leiden dan London, 1927 -1934.

Encyclopaedie van Nederlandach-Indie, ed. S. de Graaf dan D.G. Stibbe, 8 vol., 's.Gravenhage,1918 -1938.

Javaansche Almanak, Semarang, 1888 - 1891.

Opleidingsschool voor inlandsche ambterwren to Serang, n.p.1918,

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indiri, 1821-1925.

Shorter Encyclopaedia of Islam, ed. H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, London, 1953.

BUKU

Abegg, E., Der Messioiglauben in Indien and Iran, Berlin-Leipzig, 1928.

Adatrechtbundels, 'sGravenhage, Vol. IV, 1911; Vol. XXXIV,1931.

al-Attas, Syed Naguib, Some aspects of Sufism as understood and practiced among Malays, Singapore, 1963.

Almond, Gabriel A., dan James S. Coleman, eds., The Politics of the Developing Areas, Princeton, 1960.

Almond, Gabriel A., "Interest Groups and the Political Process", dalam : Comparative Politics, Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, eds., Homewood, 111.,1961.

Andersson, E., Messianic Popular Movements in the Gower Congo, Uppsala, 1958. Aron. Raymond, Introduction to the Philosophy of History; An Essay on the Limits of Historical Objectivity, Boston, 1962.

Baleodier, G., Soeiologie de I cfrique Noire, Paris, 1955.

Barnett, Homer G., Innovation : the Basis of Cultural Change, New York Toronto-London, 1953.

Barnett, Homer G., Indian Shakers : a Messianic Cult of the Pacific Northwest, Carbondale, 1957.

Bastin, John, The Development of Raffles' Ideas on the Land Rent System in Java and the Work of the Mackenzie Land Tenure Commission, 's-Gravenhage;1954.

Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun : Indonesian Islam under the Japanese Occupation*, *1942 - 1945*, The Hague-Bandung, 1958.

Benda, Harry J., and Ruth T. McVey, eds., *The Communist Uprisings of 1926 -1927 in Indonesia* : Key Documents, Ithaca, 1960.

Bendix, Reinhard, M,ax Weber : *An Intellectual Portrait*, New York, 1962.

Bentley, A.F., The Process of Government : A Study of Social Pressures, Chicago 1908.

Berg, L.W.C. van den, *De Inlandsche Rangen en T7tels op Java en Madoera*, 's-Gravenhage,1902.

Bergs ma, W.B., *Eindresume Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den GrondopJava en Madoera*, 3 vol., Batavia, 1876 -1896.

Blumer, Herbet, "Collective Behavior", dalam : *Principles of Sociology,* Alfred McClung Lee, ed., New York, 1963.

Boeka (ps.P.C.C. Hansen Jr.), Uit Java's binnenland. Pah Troeno, Amsterdam, 1901.

Brooshooft, P., Memorie over de toestand in Indie ter begeleiding van de open brief, op 7 Maart 1888 door 1255 ingezetenen van Nederlandsch.Indie gezonden aan 12 Nederlandsche Heeren, Semarang. 1888.

Braggeman, L., Indisch Tuinboek, Amsterdam, 1939.

Brumund, J F.G., Het Volksonderwijs onder de Javanen, Batavia, 1857.

Burger, D.H., De Ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer, Wageningen,1939.

Burger, D.H., "Het B.B. op lava", dalam : Gedenkboek van de Indologen Vereniging van Ambtenaren bij her Binnenlandsch Bestuur in NederlandschIndie, Utrecht, 1956.

Cahen, Claude, "The Body Politic", dalam : Unity and Variety in Muslim Civilization, Gustave E. von Grunebaum, ed., Chicago, 1955.

Caskel Werner, "Western Impact and Islamic Civilization", dalam : Unity and Variety in Muslim Civilization, Gustave E. von Grunebaum, ed., Chicago, 1955.

Cohen, Morris R., The Meaning of Human History, La Salle, 1961.

Cohn, Norman, The Pursuit of the Millennium : Revolutionary messianism in medieval and Reformation Europe and its bearing on modern totalitarian movements, New York, 1961.

Colenbrander, H.T., Koloniale Geschiedenis, 3 vol.,'s-Gravenhage,1925 - 1926.

Cortesao, Armando, The Suma Oriental of TomMres and the book of Francisco Rodrigues, 2 vol., WHS, second series, LXXXIX, XC, London, 1944.

Coser, Lewis A., The Functions of Social Conflict, London, 1965.

Daendels, H.W., Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het Bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels, Ridder, Luitenant-General, &c. in de jaren 1808 - 1811, 's-Gravenhage,1814.

Dahm, Bernhard, Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhangigkeit : Werdegang and Ideen eines asiatischen Nationalisten, SIAH, Vol. XVIII, Frankfurt am Main - Berlin, 1966.

Darmesteter, J., *The Mahdi*, New York, 1885.

Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, New York, 1904.

Delden, H.R. van, *Over de Erfelijkheid der Regenten op Java*, Leiden, 1862.

Deventer, M.L. van, *Geschiedenis der Nederlanders op Java*, 2 vol., Haarlem, 1886 -1887.

Deventer, M.L. van, *Het Nederlandsch Gezag over Java en.Onderhoorigheden*, sedert 1811, Vol. I,'sGravenhage,1891.

Dingley, S., *The Peasants' Movement in Indonesia*, Berlin, 1928.

Djajadiningrat, A., *Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*, Amsterdam - Batavia, 1936.

Djajadiningrat, H., *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*; Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche geschiedschrijving, Haarlem, 1913.

Dovring, Folke, *History as a Social Science: An Essay on the Nature and Purpose of Historical Studies*, The Hague, 1960.

Drewes, G.W.J., *Drie Javaansche Goeroes*. Hun Leven, Onderricht en Messiasprediking, Leiden, 1925.

Drewes, G.W.J., and Poerbatjaraka, eds., *De Mirakelen van Abdoelkadir Djaelani*, BJ, VIII, Batavia, 1938.

Drewes, G.W.J., "Indonesia, Mysticism and Activism", dalam : *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Gustave L. von Grunebaum, ed., Chicago, 1955.

Du Perron, E., *Verzameld Werk,* Vol. IV, Amsterdam, 1956.

Dyke, Vernon van, *Political Science* : A Philosophical Analysis, Stanford, 1960.

Easton, David, *The Political System. An inquiry into the state of Political Science*, New York, 1953.

Eisenberger, J., Indtten de bedevoart naar Mekka, Leiden, 1928.

Eisenstadt, S.N., *Essays on Sociological Aspects o f Political and Economic Development*, The Hague, 1961.

Eisenstadt, S.N., *The Political Systems of Empires*, London, 1963.

Engels, Friedrich, *The Peasant War in Germany*, London, 1927.

Evans-Pritchard, E.E., *Social Anthropology*, Oxford, 1948.

Evans-Iritchard, EX., Anthropology and History, Manchester, 1961.

Faber, G.H, van, *A Short History of Journalism in the Dutch East Indies*, Soerabaja, tanpa tahun.

Faes, J., Geschiedenis der Mkandi-landen. Naar de authentieke stukken bewerkt, Batavia, 1895.

Firth, R„ Essays on Social Organization and Values, London, 1964.

Fokkens, F., Eindresumd'van her by besluit van den Gouv.-Generaal van Ned. -Indie van 24 Juli 1888 no. 8 bevolen Onderzoek naar de Verplichte Diensten der inlandsche bevolking op Java en Madoera, /GouvernementslandenJ, 5 vol,, Batavia, 1901-1903.

Francis, E., Herinneringen uit de /evensloop van een Indisch ambtenaar van 1815 tot 1851, 3 vol., Batavia, 1856 -1860.

Frazier, E. Franklin, Race and Culture Contacts in the Modern World, New York, 1975.

Furnivall, J.S., Netherlands India : A Study ofPlural Economy, Cambridge, 1944.

Geertz, Clifford, The Impact of Capital-intensive Agriculture on Peasant Social Structure: A Case Study, Cambridge, 1956.

Geertz, Clifford, The Religion of Java, Glencoe, 1H.,1960,

Gerth, H.H. and C.W. Mills, From Max Weber : Essays in Sociology, New York, 1958.

Gibb, H.A.R., Studies on the Civilization of Islam, London, 1962.

Gluckman, Max, Order and Rebellion in Tribal Africa, London, 1963.

Gobee, E., and C. Adriaanse (eds.), Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje,1889-1936, 3 vol.,'s-Gravenhage,1957 -1965.

Graaf, H.J. de, De Geschiedenis van IndonestT, 'sCravenhage,1949.

Groenhof, G.P., Enkele geschiedkundige plaatsen in Bantam, Batavia, 1920.

Groneman, J., Een ketioe geschiedenis : Vorstenlandsche Toestanden 11, Dordrecht,1887.

Groneman, J., Uit en over Midden Java : Schetsen over opiumpacht, Chineezenwoeker, en andere Javaansche belangen, Zutphen, 1891.

Grunebaum, Gustave E. van, Modern Islam : The Search for CYiltural Identity, Berkeley, 1962.

Guariglia, G., Prophetismus and Heilserwartupgs-Bewpgungen als volkerkundliches and religionsgeschichtliches Problem, Horn - Wien, 1959.

Haar, B. ter, Adat Law in Indonesia, New York, 1948.

Hageman, JCz., J., Geschiedenis van den oorlog op Java, van 1825 tot 1830, Batavia, 1856.

Hagen, E.E., On the Theory of Social Change. How economic growth begins, Illinois, 1962.

Hall, C.J.J. van, and C. van de Koppel, De landbouw in de Indische Archipel, 3 voL,'s-Gravenhage,1946 - 1949.

Harjaka Hardjamandjaja, Javanese popular belief in the coming of Ratu-Adil, a righteous prince. Excerpta ex dissertatione ad lauream in Facultate Theologica, Rome, 1962.

Heberle, Rudolf, Social Movements : An introduction to Political Sociology, New York, 1951.

Herskovits, Melville l., Acculturation : The Study o f Culture Contact, Gloucester, Mass., 1958.

Hien, H.A. van, De Petangans of tefingen der Javanen, Batavia-Amsterdam, 1897.

Hobsbawm, EJ., Primitive Rebels : Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries, Manchester, 1963.

Hoek, H.J., Het Herstel van her Nederlandsch Gezag over Java en Onderhoorigheden in de jaren 1816 tot 1819, 's-Gravenhage,1862.

Holt, P.M., The Mahdist State in the Sudan, 1881 -1898, Oxford, 1958.

Hoselitz, Bert F., "Levels of economic performance and bureaucratic Structure", dalam : Bureaucracy and Political Development, La Palombara, ed., Princeton, 1963.

Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798 - 1939, LondonNew York - Toronto, 1962.

Hugenholtz, F.W., Het overstemd geluid : over de moeflijkheid van het onderzoek in her orthodoxe en oppositionele in de Middeleeuwen, Haarlem, 1959.

Jacobi, E.H., Agrarian Unrest in Southeast Asia, New York, 1949.

Jonge, J.KJ. de, De Opkomst van her Nederlandsch Gezag in Oost-Indie, Vol. VII, .s-Gravenhage,1873.

Juynboll, Th. W., Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet, Leiden, 1925.

Kamma, F.C., De messiaanse Koreri-bewegingen in her Biaks-Noemfoorse cultuurgebied,'s-Gravenhage,1954.

Kartodirdjo, Sartono, Tjatatan tentang Segi-segi Messianistis dalam Sedjarah Indonesia, Jogjakarta, 1959.

Kat Angelino, A,D.A. de, Staatkundig beleid en bestuurszorg in NederlandschIndie, 2 vol., 's-Gravenhage,1929 -1930.

Kaufman, Robert, Mi/Mnarism et acculturation, Bruxelles, 1964.

Kautsky, John H., (ed.), Political Change in Underdeveloped Countries : Nationalism and Communism, New York - London, 1962.

Kielstta, E.B., De Indische Archipel, Haarlem, 1916.

King, C. Wendell, Social Movements in the United States, New York, 1962.

Klerck, E.S. de, History of the Netherlands East Indies, 2 vol, Rotterdam, 1938.

Koch, D.M.G., Batig Slot: Figuren uit her oude Indie, Amsterdam, 1950.

Koentjaraningrat, R.M., "The Javanese in South Central Java", dalam : Social Structure in Southeast Asia, G.P. Murdock, ed., Chicago, 1960.

Kraemer, H., Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw, Leiden, 1921.

Lanternati, Vittorio, The Religions of the Oppressed : A Study of Modern Messianic Cults, New York, 1963.

Lasker, Bruno, Human Bondage in Southeast Asia, Chapel Hill, 1950.

Leach, E.R., Political Systems of Highland Burma : A Study of Kachin Social Structure, London, 1954.

Lekkerkerker, C., Land en Volk van Java, Vol. 1, Groningen, 1938.

Leur, J.C. van, Indonesian Trade and Society : Essays in Asian Social and Economic History, The Hague-Bandung, 1955.

Lugard, Sir Frederick, The Dual Mandate in British Tropical Africa, Edinburg -London,1922.

Malinowski, B., The Dynamics of Culture Change : An Inquiry into Race Relation in Africa, New Haven, 1945.

Meinsma, J.J., Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen, 3 vol., Delft, 1872 - 1875.

Merton, R.K., Social Theory and Social Structure, Glencoe, Ill., 1957.

Meyer, D.H., Japan wint den Oorlog! Documenten over Java, Maastricht, 1946.

Millikan, M.F. and D. Blackmer, The Emerging Nations: their growth and U.S. policy, Boston - Toronto, 1961.

McIver, R.M., Social Causation, New York, Evanston, and London, 1954.

Muhhnan, W.E. (ed.), Chiliasmus and Nativismus. Studien zurPsyehologie, Soziologie and historischen Kasuistik der Urnsturzbewegungen, Berlin, 1961.

Multatuli (ps. F. Douwes Dekker), Volledige Werken, Vol. IX, Brieven en Dokumenten uit de jaren 1846 -1857, Amsterdam, 1956.

Nederburgh, S.C.H., TjilegonL Bantam. Java. lets over des Javaans lasten en over zi#ne draagkracht,'s-Gravenhage,1888.

Niebuhr, R.H., The Social Sources of Denominationalism, New York, 1929.

Niel, Robert van, The Emergence of the Modern Indonesian Elite, The Hague and Bandung, 1960.

Nieuwenhuijze, C.A.0. van, SamsuTdin van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek, Leiden, 1945.

Nieuwenhuys, R., Tussen twee Vaderlanden, Amsterdam, 1959.

Obbink, H. Th., De heilige oorlog volgens den Koran, Leiden, 1901.

Olivier Jz., J., Land- en zeetogten in Nederland's Indie en eenige Britsche etablisementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826, 3 vol., Amsterdam, 1827 -1830.

Palmier, Leslie H., Social Status and Power in Java, London, 1960.

Pangemanan, Si Tjonat, Batavia, 1900.

Parsons, Talcott, The Social System, Glencoe, Ill., 1951.

Pieren, A.C.N., De Diensten aan de Hoofden op Java en Madoera; Leiden, 1884.

Pijper, G.F., Fragmenta Islamica, Leiden, 1934.

Redfiels, R., Peasant Society and Culture, Chicago, 1956.

Rees, W.A. van, Wachia, Taykong en Amir, of het Nederlandsch Indische Leger, Amsterdam, 1859.

Rinkes, D.A., Abdoerraoef van Singkel. Bijdrage tot de kennis van de mystiek op Java en Sumatra, Heerenveen,1909.

Roorda van Eysinga, P.P., Verschillende reizen en lotgevallen van P.P. Roorda van Eysinga, Vol. III dan IV, Amsterdam, 1832.

Roorda van Eysinga, P.P., Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-,

aardri#ks- en staatkunde van Nederlandsch India, Vol. III, bagian 2, Amsterdam, 1842.

Roorda van Eysinga, P.P., Voorlezingen over Kolonisatie door Nederlanders in

Neder(andsch India, Haarlem, 1856.

Rutgers, S.J., and A. Huber, Indonesia, Amsterdam, 1936.

Rutgers, S.J., Indonesia. Her koloniale systeem in de periode tusschen de eerste en tweede wereldoorlog, Amsterdam, 1947.

Sandick, R.A. van, Leed en Lief uit Bantam, Zutphen, 1892.

Sandick, R.A. van, In her Rtjk van Vulcaan, Zutphen, tanpa tahun.

Schlosser, K., Propheten in Afrika, Braunschweig, 1949.

Schneider, Maarten, De Nederlandse Krant. Van 'Wieuwstydinghe tot Dagblad ", Amsterdam, 1943.

Schneider, Maarten, The Netherlands Press Today, Leiden, 1951.

Schoch, Ch. F., De Heerendiensten op Java en Madoera volgens hat Regeerings Reglement van 1854, 's-Gravenhage,1891.

Schrieke, B., Indonesian Sociological Studies : Selected Writings of B. Schrieke, Part I, The

Hague and Bandung, 1955.

Schrieke. B., Indonesian Sociological Studies : Selected Writings of B. Schrieke,

Part 11, Ruler and Realm in Early Java, The Hague and Bandung, 1957. Seminar Sed/arah : Laporan Lengkap Atjara I dan 11 tentang konsepsi Filsafar

Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia, Jogjakarta, tanpa tahun.

Serat Tjentini, 8 vol., Batavia, 1912 -1915.

Smelser, Neil J., Theory of Collective Behavior, London, 1962.

Snouck Hurgronje, C., Verspreide Geschriften, Vol. I-IV, Bonn and Leipzig, 1923 -1924.

Snouck Hurgronje, C., Mekka in the latter part of the 19th century : Daily life, customs and learning. The Moslims of the East-Indian Archipelago, Leiden and London, 1931.

Soebroto, Indonesische Sawahverpanding, n.p.1925.

Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, and George McTuman Kahin, (ads.), An Introduction to Indonesian Historiography, Ithaca, 1964.

Sollewijn Gelpke, J.HF., Gegevens Poor een nieuwe landrente.regeling. Eind-resum"der onderzoekingen bevolen bil Gouverrrements besluit van 23 Oct. 1879No. 3, Batavia, 1885.

Stapel, F.W., (ed.), Geschiedenis van Nederlandsch India, Vol. V, Amsterdam, 1939.

Stoddard, L., The new world oflslam, London, 1921.

Stokvis, J.E., Van Wingewest naar Zelfbestuur in Nederlandsch lndrld, Amsterdam, 1922.

Subban, John A., Sufism : Its Saints and Shrines. An Introduction to the Study of Sufism with special reference to India and Pakistan, Lucknow,1960.

Thrvpp, Sylvia L., ed., Millennial Dreams in Action : Essays in Comparative Study, CSSH, Supplement 11, The Hague, 1962.

Truman, D.B.,PoliticalInterestandPublic Opinion, New York, 1951.

Veth, PJ., Java, historisch, geographisch en ethnographisch, 4 vol., Haarlem, 1896 -1912.

Vlekke, B.H.M., Nusantara : A History of Indonesia, The Hague, 1960.

VoBenhoven, C. ran, Her Adatrecht van Nederlandsch.IndiB, Vol. I, Leiden, 1918.

Waal, E. de, Onze Indische Financien, Nieuwe reeks aanteekeningen, Vol. I, 's-Gravenhage,1876.

Wach, Joachim, Sociology of Religion, Chicago, 1962.

Wal, S.L. wen de, (ed.), Het Onderwiyfsbeleid in Nederlandsch India 1900 -1940 : Een bronnenpublicatie, Groningen, 1963.

Walks, Wilson D., Messiahs, Their Role to Civilization, Washington D.C.1943.

Weber, Max, The Sociology of Religion, Boston, 1963.

Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, London, 1961.

Welderen Rengers, D.W. van, The Failure of a Liberal Colonial Policy Netherlands East Indies, 1816 -1830, The Hague, 1947.

Wertheim, W.F., Indonesian Society in 7Yansition : A Study of Social Change, The Hague and Bandung, 1959.

'Wertheim, W.F., East-West Parallels : Sociological Approaches to Modern Asia, The Hague, 1964.

Wilson, Bryan R., Sects and Society : A Sociological Study of Three Religious Groups in Britain, London, Melbourne and Toronto, 1961.

Silson, G. and Monica H. Wilson, The Analysis of Social Change : based on observations in Central Africa, Cambridge, 1945.

Worsley, Peter, The Trumpet Shall Sound : A Study of "Cargo Cults in Melanesia, London, 1957.

Wulfften Palthe, P.M. van, Over het bendexrzen op Java, Amsterdam, 1949.

Wulfften Palthe, P.M. van, Psychological aspects of the Indonesian problem, Leiden, 1949.

Yinger, J. Milton, (ed.), Religion, Society and the Individual, New York, 1957.

Yinger, J. Mllton, Sociology Looks at Religion, New York, 1963.

Zoetmulder, P.J., Pantheisme en Monisme in de Javaansche Literatuur, Nijmegen,1935.

ARTIKEL-ARTIKEL

Aberle, David F., "A Note on Relative Deprivation Theory as applied to Millenarian and other Cuff Movements", dalam : Millennial Dreams in Action, Sylvia Thrupp, ed., CSSH, Supplement 11,1962.

Anon., "Familie regeering van islanders", dalam IG, no. 2 (1881), hal. 625 - 626.

Anon., "Een officieele getuigenis omtrent de Toestand van Bantam", dalam IG, no. 2, (1881), hal. 790 - 791.

Anon., "Een officieel bericht over Bantam", IG, no. 2 (1881), hal. 963 - 964.

Anon., "De godsdienstige beweging op Java", IG, no. 2 (1884), hal. 739 - 741.

Anon., "De Poeloong-zaak (rustverstoring in Madioen in 1886), een,ernstige vingerwijzing",IG, no. 1(1886),hal. 231 - 238,

Anon., "Onlusten op het particuliere land Tjiomas (Buitenzorg) in 1886", IG, no. 2 (1886), hal. 941- 942.

Anon., "Het officieele relaas betreffende de onlusten in Bantam", IG, no. 2 (1888), hal.1488 -1491.

Anon., "Officieel relaas van de ongeregeldheden in Solo", IG, no. 1 (1889), hal. 216 - 221; no. 2, hal.1768 - 1776.

Anon., "Fragment uit een brief uit Indi6", IG, no. 2 (1889), hal. 1783 - 17$5.

Anon., "De wording en het verloop van de Tjilegonsche troebelen in 1888", IG, no. 2 (1891), hal.1137 -1207.

Anon., "De Heer van den Bossche, Oud-resident van Bantam, over Abdoel Karim in 1875",IG, no. 2 (1891), hal.1771-1774.

Anon., "De ongeregeldheden op het particuliere land Tjampea (Buitenzorg) in Juni 1892. Rapport van den Assistent-Resident", IG, no. 2 (1892). hal. 1920 -1926.

Anon., "De Djawa kolonie en de mystieke broederschappen in Mekka", IG, no. 1 (1915), hal. 538 - 540.

Anon., "Ter herinnering aan AJ. Spaan", Insulinde, Vol. I, no. 1 (1896), hal. 1-2.

Anon., IWR, Vol. XXIV, no. 1192 (1886), hal. 69 - 71.

Anon., IWR, Vol. XXVII, no. 1336 (1889), hal.17 - 20; no. 1337, hal. 21- 23.

Anon., "Een Mohammedaansch tractaatje", MNZG, Vol. XXXII (1888), hal. 1-14.

Anon., "Names der Residenten enz. op Java en Madoera sinds 1816", TBB, Vol. 11 (1888), hal.

270 - 289.

Anon., "Kronijk van Nederlandsch Indie, loopende van of het jaar 1816 : de jaren 1824 en 1825", TNI, Vol. VII, bagian 3 (1845), hal. 43 - 109.

Anon., "Bladvufng", TNI, Vol. VII, bagian 3 (1845), hal. 484.

Anon., "De laatste Sultan, als balling to Soerabqja", TNI, no. 1 (1859), hal. 29 - 30.

Anon., "De Opstand en Moord van Tjikandie Oediek in 1845", TNI, no.1(1859), hal.139 -168.

Anon., "Het Landelpk Stelsel in de residentie Bantam, tot ultimo Mei 1821", TNI, no.1(1865), hal. 87 -101.

Anon., "Varia", TNI, no. 2 (1869), hal. 494 - 497; (Mengenai pelbagai kategori pekerja di lawa).

Anon., "Bantam vgftig jaren geleden", TNI, no. 2 (1870), hal. 317 - 342.

Anon., "Het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den grond in de residentie Bantam", TNI, no. 1 (1872), hal. 24 - 283; 364 - 391; 460 -485; no. 2, hal. 97 -121; 350 - 374.

Anon., "Raden Saleh en de Bekassische onlusten (Zelfverdediging tegen zgne beweerde medepGchtigheid)", TNI, no. 2 (1873), hal. 305 ff.

Anon., "Genade", TNI, no. 1 (1889), hal. 217 - 227; (pembelaan atas nama partisipan-partisipan pemberontakan).

Anon., "J.A. Velders", Weekblad voor Indie, Vol. 111(1905 - 1907), hal. 894.

Archer, R.I., "Muhammadan Mysticism in Sumatra", JRASMB, Vol. XV, part 2 (1937), hal. l -126.

Baal, J. van, "Erring Acculturation", AA, Vol. LXII (1960), hal.108 -121.

Balandier, G., "Messianisme et nationalisme en Afrique Noire", CIS, Vol. XIV, (1953), hal. 41- 65.

Barber, B., "Acculturation and Messianic Movements", ASR, Vol. VI (1941), hal. 663 - 669; juga dalam : Collective Behavior, Ralph H, Turner and Lewis M. Killian, eds., (Englewood Cliffs, NJ., 1957), hal. 410 - 415.

Benda, Harry J„ "The Structure of Southeast Asian History : Some Preliminary Observations", JSAH, Vol. III, no.1(1962), hal.106 -138.

Berg, L.W.C. van den, "De Mohammedaansche geestelykheid en de geestelpke goederen op Java en Madoera", TBG, Vol. XXVII (1882), hal. 1 - 47.

Berg, L.W.C. van den, "Over de devotie der Naqojibendpah in de Indische Archipel", TBG, Vol. XXVIII (1883), hal.158 - 175,

Berg, L.W.C. van den, "Her Mohammedaansche godsdienstonderwijs op Java en Madoera, en de daarbig gebruikte Arabische boeken", TBG, Vol. XXXI (1886), hal. 518 - 555.

Berg, L.W.C. van den, "Her Panislamisme", De Gids, Seri IV, Vol. LXIV (1900), hal. 228 - 269, 392 - 431.

Berg, L.W.C. van den, "De Mohammedaanache vorsten in Nederlandsch IndA", BKI, Vol. LIII (1901), hal. 41- 80.

Bergsma, W.B., "Verklaring van de tegenwoordige Lebaksche toestanden" IG, (1882), no. 1, hal. 559 - 562.

Bodrogi, T., "Colonization and Religious Movements in Melanesia", Acta Ethnographica Academia Sciendarum Hungaricae, Vol. II (1951), hal. 259 -292.

Brandes, 1., "lets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorspellingen van Jayabaya", TBG, Vol. XXXII (1889), hal. 268 -430.

Breugel, J. de Rovere van, "Bantam in 1786", BKI, New Series, Vol. I (1856), hal.107 -170.

Breugel, J. de Rovere van, "Beschrijving van Bantam en de Lampongs", BKI, New Series, Vol. (1856), lad. 309 - 362.

Broek, J.H. van den, "Arm Bantam! Arm Indie! (Toestand van West lava en speciaal Bantam gedurende de laatste jaren)", TNI (1882), no. 1, hal. 207 -234, 253 - 272.

Burger, D.H., "Structuur-veranderingen in de Javaansche samenleving", Indonesie, Vol. II (1948 -1949), hal. 381- 348; 521- 537;Vo1. Ill (1949 -1950), hal. 1 - 18; 101 - 123; 225 - 250; 247 - 350; 381 - 389; 512 -534.

Hurgess, J. Steward, "The Study of Modem Social Movements and of Social Action", SF, Vol. XXII (1944), hal. 269 - 275.

Cohen Stuart, A.B., "Eroe Tjakra",BKI, IIIrd Series, Vol. VII (1872), hal. 285 -288.

Chijs, J.A. van der, "Oud-Bantam", TBG, Vol. XXVI (1881), hal.1- 62.

Djajadiningrat, A., "Her leven in een pesantren", TBB, Vol. XXXIV (1908), hal.1- 23.

Djajadiningrat, H., "lets over Banten en de Banteners", Handelingen van het Eerste Congres voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java, 1919, (Weltevreden,1921), hal. 309 - 324. -

Drewes, G.W.J., "Sech Joesoep Makasar (van Banten, later aan de kaap)," DJawa, Vol. VI (1926), hal. 83.

Emmet, D., "Prophets and Their Societies", JRAI, Vol. LXXXVI (1956), hal. 13 - 24.

Fokkens, F., "De priesterschool to Tegalsari", TBG, Vol. XXIV (1878), hal. 318 - 336.

Geertz, Clifford, "The Javanese Kjaji : The changing role of a cultural broker", CSSH, Vol. II (1959 -1960), hal. 228 - 249.

Gelder, W. van, "De Residentie Bantam", TNAG, IInd Series, Vol. XVII (1900), hal. 765 - 785.

Gerdessen, L.E., "De samenzwering van Mangkoe Widjgja c.s. in de Vorstenlanden in 1865", TNI, (1871), no. 2, hal. 206 - 210.

Gillin, John L., "A Contribution to the Sociology of Sects", AJS, Vol. XVI (1910), hal. 236 - 252.

Groot, H.A. de, "Bedrijfsbelasting",IG (1894), no. 1, hal. 25 - 65.

Guiart,.J., "Forerunners of Melanesian nationalism", Oceania, Vol. XXIX, 2, (1951), hal. 81- 90.

Heberle, Rudolf, "Observations on the Sociology of Social Movements", ASR, Vol. XIV (1949), hal. 346 - 357.

Heisdingen, J.J. van, "De inrichting van her inlandsch Bestuur, de opleiding en positie der inlandsche bestuursambtenaren op Java en Madoera," KT, Vol. I (1912), hal.182 - 203.

Henny, C., "Stille Kracht",IG (1921), no. 2, hal. 808 - 830; 895 - 919.

Hoezoo, W., "Fragment van her Javaansch geschrift Achiring Djaman", MNZG, Vol. XIII (1869), hal. 307 - 356.

Hoezoo, W., "Her Javaansch geschrift 'Achiring Djaman'", MNZG, Vol. XXVII (1883), hal. I - 42.

Holle, K.F., "Mededeelingen over de devotie der Naqsjibendijah in de Nederland sch-Indische Archipel", TBC, Vol. XXXI (1886), hal. 67 - 81.

Hove, K.F., "De Dessabesturen op Java en Madoera", TBB, Vol. VI (1891 -1892), hal. 275 - 289.

Hopper, Rex D., "The Revolutionary Process: A Frame of Reference for the Study of Revolutionary Movements", SF, Vol. XXVIII (1949 - 1950), hal. 270 - 279.

Johns, A.H., "Sufism as a category in Indonesian Literature and History", JSAH, Vol. II, no. 2 (1961), hal.10 - 23.

Kartodirdjo, Sartono, "Some Problems on the Genesis of Nationalism in Indonesia", JSAH, Vol. 111, no.1(1962), hal. 67 - 94.

Kern, R.A., "Het Landelijk Stelsel in het Bantensche Rpk", IG, (1906), No. 1, hal. 685 - 710.

Kesteren, C.E. van, "De nood in Bantam", IG (1881), no. 1, hal. 679 - 704.

Kroef, Justus M. van der, "Javanese Messianic Expectationg : Their Origin and Cultural Context", CSSH, Vol. I, no. 4 (1959), hal. 299 - 323.

Kobben, A.J.F., "Profetische bewegingen als uiting van sociaal protest", Sociologisch Jaarboek, Vol. XIII (1959), hal. 5 - 73.

Kraemer, H., "Noord-Sumatraansche invloeden op de Javaansche mystiek", Djawa, Vol. IV (1924), hal. 29 - 33.

Kreemer, J., "Onze heerschappij over Java en de aloudeJavaanscheprofetieen", MNZG, Vol. XXXV (1891), hal.101 -108.

Leur, J.C. van, "Java, vreemd en vertrouwd (fragmenten uit brieven van J.G. van Leur)", De Nieuwe Stem, Vol. XII (1957), hal. 276 - 293.

Linton, Ralph, "Nativistic Movements", AA, Vol. XLV (1943), hal. 230 - 240; juga dalam : Collective Behavior, Ralph H, Turner and Lewis M. Killian, eds., (Englewood, N.J.,1957), hal. 387 - 395.

Lion, H.J., "Onderzoek naar den vrpen arbeid, in verband met een onderzoek naar de mogelijkheid, om het dwangstelsel op Java door vrijen arbeid to verwangen", TNI (1854), no. 2, hal. 81-123.

Lith, P.C.A. van, "De tarekat's in Nederlandsch Indi8", KT, Vol. VI, no.1(1917), hal. 721- 743.

Loze, T.H.m', "lets over enige typische Bantamsche instituten", KT, Vol. XXIII (1934), hal.171-173.

Mair, L.P., "Independent Religious Movements in Three Continents", CSSH, Vol. 1(1959), hal.113 - 136.

Meadows, Paul, "An Analysis of Social Movements", SSR, Vol. XXVII (1943), hal. 223 - 228.

Meyer, D.H., "Over het bendewezen op Java", Indonesie, Vol.111(1949 - 1950), hal.178 - 189.

Muhlenfeld, A., "De Pers in Indie", KT, Vol. V, no.1(1916), hal. 37 - 39.

Norman, H.D. Levyssohn, "Ter Herinnering",Eigen Haard, (1888), hal. 93 - 100.

Pieris, Ralph, "The Cultural Matrix of Development", CJHSS, Vol. V, no. 1, 2 (1962), hal.18 - 28.

Pleyte, C.M., "Bantensche Folklore", TBG, Vol. LII (1910), hal. 131 - 152.

Purnadi Purbatjaraka, "Shahbandars in the Archipelago", JSAH, Vol. II, no. 2 (1961), hal.1 - 9.

Resink, G.J., "De rechtshistorische ontwikkeling van het zelfbestuur op Madoera",ITR, Vol. CXLIX (1939), hal. 732 - 775.

Resink, G.J., "lets over europacentrische, regiocentrische en indocentrische geschiedschrijving", Orientotie, No. 37 (1950), hal. 22 - 30.

Rinkes, D.A., "De maqam van Sjech 'Abdoelmoehji" , TBG, Vol. LII (1910), hal. 556 - 589.

Robidee van der Aa, P.J.B.C., "De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw", BKI, IVth Series, Vol. V (1881), hal.1- 128.

Ronkel, Ph. S, van, "Aanteekening over Islam en Folklorisme in West- en MiddenJava uit het Rei0ournaal van Dr. C. Snouck Hurgronje", BKI, Vol. CI (1942), hal. 311- 339.

Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden", Adatrechbundels, Vol. XXXIV (1931), hal. 233 - 378.

Schuurmans, N.D., "De Tariqah Naqsjibendijah op Java", NZT, Vol. 11 (1890), hal. 265 - 277.

Simmel, George, "The Sociology of Secret Societies", AJS, Vol. XI (1906), hal. 441- 498.

Smail, John, "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia", JSAH, Vol. 11, no. 2 (1961), hal. 72 -102.

Smith, M.W., "Towards a Classification of Cult Movements", Man, Vol. LIX (1929), hal. 2.

Spaan, A.J., Schetsen uit Banten", Almanak Indologische Yereeniging, (1893), hal. 222 - 285.

Sprenkel, O.B. van der, "Max Weber on China", History and 73zeory, Vol. III, (1964), hal. 348 - 370.

Talmon, Yonina, "Pursuit of the Millennium, The Relation between religion and social change",AES, Vol. III (1962), hal.125 -148.

Veth, P.J., "De heilige oorlog in den Indischen Archipel", TNI (1870), no. 1, hal. 167 -177.

Voget, Fred W., "Towards a Classification of Cult Movements : Some Further Contdbutiona", Man, Vol. LIX (1959), hat. 26 - 28.

Vredenbregt, J., "The Haddj : Some of its features and functions in Indonesia", BKI, Vol. CXVIII (1962), hal. 91-154.

Wall, A.F. van de, "Kort begrip der beteekenis van de tarekat near het Maleisch van Sajid Oesman ibn Abdoe&ah bn Akil ibn Jahja, Adviseur voor Arabiache Zaken", TBC, Vol. XXXV (1893), hal. 223 - 227.

Wallace, A.F.C., "Revitalization Movements", AA, Vol. LVIII (1956), hal. 264 -281; juga dalam : Sociology : The Progress of a decade, A Collection of articles, Seymour Martin Upset and Neil J. Smelser, eds, Englewood Cliffs, N.J.,1961.

Wilson, Bryan R., "An Analysis of Sect Development", ASR, Vol. XXIV (1959), hal. 3 - 15, juga dalam : Religion, Culture and Society, Louis Schneider, ed., New York, London and Sydney, 1964.

Wiselius, J.A.B., "Djaja Baja, zjjn leven en profetieen", BKI, XIX (1872), hal. 172 - 217.

Worsley, P.M., "The Analysis of Rebellion and Revolution in Modem British Social Anthropology", Science and Society, Vol. XXI (1961), hal. 26 - 27.

Catatan : *Artikel-artikel anonim dikutip di bawah nama majalah yang memuatn*ya.

e-books a.mudjahid chudari 2006

Pemberontakan Petani di Banten 1888

Oleh: Sartono Kartodirdjo

PRAKATA

BAB I. PENGANTAR

Pokok Pembahasan

Orientasi-orientasi Historis Yang Ada

Tinjauan Mengenai Beberapa Studi

Lingkup dan Tujuan Studi

Orientasi dan Pendekatan Teoretis

Bahan Sumber

Rangkuman Masalah

Catatan Metodologis

BAB II. LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMIS

Daerah Peristiwa dan Faktor-faktor Ekologis Yang Relevan

Struktur Sosial dan Ekonomi Agraria

Konflik Mengenai Hak Tanah

Wajib Kerja Bakti

Pembaruan-pembaruan Pemerintah

Kerja Wajib Berkelanjutan

Sistem Status

Elite Pedesaan

Rasa Tidak Puas Yang Dirangsang Oleh Pembaruan

Kesulitan Ekonomi Yang Disebabkan Oleh Bencana-bencana

Pemberontakan Peta di Banten 1888

Oleh

Sartono Kartodirdjo

PRAKATA

Tujuan pertama studi ini adalah membahas aspek-aspek dari gerakan-gerakan sosial yang melibatkan lapisan-lapis rakyat biasa di Indonesia. Di dalam historiografi In pembahasan pokok persoalan seperti ini memang masih jaran dan satu-satunya contoh yang menonjol adalah analisa S mengenai komunisme di pantai barat Sumatera (Schrieke, 19 85-166). Seperti Schrieke, saya membatasi pembahasan sa satu gerakan spesifik di seta daerah spesiflk. Saya telah men pemberontakan Banten tahun 1888 dengan latar belakang ma Banten abad XIX, dan, dalam hal kebangkitan kembali ke keagamaan yang dibahas dalam Bab V, di dalam kerangka keagamaan pada umumnya di Jawa abad XIX. Harapan saya bahwa karya ini akan sekedar menandai suatu awal dari kegiat semacam ini dan mungkin akan digunakan sebagai sebuah dalam riset mengenai messiah ini di masa-masa mendatang. demikian maka dapatlah kiranya diharapkan suatu pemaham lebih baik mengenai implikasi-implikasi - di bidang ekonomi politik dan kebudayaan - dari dampak dominasi Barat t masyarakat tradisional Indonesia di satu pihak, dan mengenai rakyat biasa dalam pembentukan sejarah Indonesia di lain pihal

Kita, yang hidup dalam abad krisis-krisis, yang me pembaharuan dan revolusi, tentunya akan mengangga mengenai gerakan-gerakan sosial tidak hanya menarik teta bermanfaat. Selain dari itu, di dalam suatu kurun waktu yan dengan konflik dan ketegangan, sebagai akibat perubahan sos cepat, semakin dirasakan perlunya memahami kekuatank penggerak di dalam masyarakat. Studi kasus mengenai g gerakan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan i faktual mengenai pemberontakan tahun 1888 di Banten, m juga dimaksudkan sebagai sumbangsih kepada usaha-usah menjelaskan proses sosial umumnya di Indonesia aba Pemahaman mengenai hakikat gerakan-gerakan sosial di masa sering kali dapat diterapkan kepada studi mengenai gerakan-ge masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa dengan istilah " ("native") di dalam buku ini senantiasa dimaksudkan pendu bukan Eropa dalam masyarakat Indonesia. Dengan dimaksudkan Jakarta sekarang. Penggunaan sebutan-sebu hanyalah untuk memudahkan saja, sesuai dengan terminolo yang berlaku di zaman kolonial, dan kiranya tak perlu lagi dijel sini bahwa penggunaan sebutan-sebutan itu tidak mencerminka pendirian tertentu.

Sepatah kata perlu dikemukakan mengenai ejaan k

Pemberontakan Petani di Banten 1888

PRAKATA

BAB I. PENGANTAR

Pokok Pembahasan

Orientasi-orientasi Historis Yang Ada

Tinjauan Mengenai Beberapa Studi

Lingkup dan Tujuan Studi

Orientasi dan Pendekatan Teoretis

Bahan Sumber

Rangkuman Masalah

Catatan Metodologis

BAB II. LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMIS

Daerah Peristiwa dan Faktor-faktor Ekologis Yang Relevan

Struktur Sosial dan Ekonomi Agraria

Konflik Mengenai Hak Tanah

Wajib Kerja Bakti

Pembaruan-pembaruan Pemerintah

Kerja Wajib Berkelanjutan

Sistem Status

Elite Pedesaan

Rasa Tidak Puas Yang Dirangsang Oleh Pembaruan

Kesulitan Ekonomi Yang Disebabkan Oleh Bencana-bencana Fisik

BAB III. PERKEMBANGAN POLITIK

Bagian Konsep

Struktur Politik Tradisional dan Keruntuhannya

Peranan Politik Kaum Bangsawan

Peranan Putri Ratu Siti Aminah

Peristiwa Sabidin

Kebijaksanaan Mengenai Penerimaan Pegawai Pemerintah
Struktur Birokrasi Kolonial dan Konflik Kelembagaan
Peranan Politik Elite Agama
Hubungan Antara Pejabat-pejabat Banten dan Eropa
Situasi Politik Dalam Tahun-tahun 1870-an dan 1880-an

BAB IV. KERESAHAN SOSIAL
Beberapa Ciri dan Faktor Keresahan Sosial
Kepemimpinan Revolusioner
Peranan Unsur-Unsur Perubahan Dalam Gerakan-gerakan Protes
Satu Dasawarsa Situasi Politik Yang Memburuk (1808-1819)
Pemberontakan-pemberontakan Berkala Antara 1820 -1845
Peristiwa Cikandi Tahun 1845
Pemberontakan Wakhia Tahun 1850
Kerusuhan-kerusuhan Besar Antara 1851 dan 1870
Perampokan, Banditisme dan Kegiatan di Luar Hukum

BAB V. KEBANGUNAN AGAMA
Kecenderungan-kecenderungan Umum
Ibadah Haji
Pesantren
Gerakan Tarekat
Aspek-aspek Eskatologis Gerakan-gerakan Keagamaan
Gerakan Jihad
Khatib-khatib Keliling dan Buku-buku Khotbah Yang Beredar
Ledakan-ledakan Fanatisme Agama Yang Terpisah-pisah
Unsur-unsur Gerakan Protes Yang Sangat Penting
Rangkuman

BAB VI. GERAKAN PEMBERONTAKAN
Haji Abdul Karim
Kiyai Haji Tubagus Ismail
Pematangan Gagasan Pemberontakan

Haji Marjuki
Haji Wasid
Meluasnya Semangat Revolusioner dan Beberapa Kegiatan Persiapan
Enam Bulan Terakhir Tahap Persiapan
Menjelang Pemberontakan

BAB VII. PEMBERONTAKAN DIMULAI
Serangan Pertama
Serangan Umum
Pengejaran Terhadap Orang-orang Yang Melarikan Diri
Pusat Peristiwa
Pengejaran Terhadap Gubbels
Di Markas Pemberontak
Raden Penna Bertindak
Pemberontakan di Kecamatan-kecamatan
Pemusatan Pasukan Pemberontak Sekitar Serang
Hal-Hal Yang Menarik Mengenai Pemberontakan

BAB VIII. PENUMPASAN PEMBERONTAKAN
Pertempuran Di Toyomerto
Operasi Pertolongan
Tindakan Ekspedisi Militer
Pemberontak Berjuang Terus
Perlawanan Pemimpin-pemimpin Pemberontak Yang Memisahkan Diri
"Long March" Ke Selatan
Kekalahan Terakhir
Kelanjutannya
Tanda-Tanda Pemberontakan Baru
Catatan Tentang Gerakan-gerakan Milenari di Jawa Tengah dan Jawa Timur

BAB IX. KELANJUTAN PEMBERONTAKAN
Mencari Penjelasan
Pandangan-pandangan Kontemporer

Laporan Komisaris Pemerintah
Pengaturan-pengaturan Administratif
Penempatan Detasemen-detasemen Tentara
Masalah Kedudukan Kepala Desa
Masalah Pajak
Masalah Pencacaran Kembali
Masalah-masalah Urusan Agama
Kondisi Administrasi

BAB X. AKHIR KATA
Skala Gerakan dan Faktor-faktor Yang Relevan
Beberapa Aspek Proses Modernisasi
Aspek Nativism
Aspek Ketersingkiran
Aspek Agama
Proses Integrasi
Ciri-ciri Khas Gerakan Pemberontakan Di Banten

Peta Cilegon tahun 1888
Bibliografi
Daftar Singkatan
Glosarium

DAFTAR SINGKATAN

AA	*American Antropologist*
AES	*Archives Europeennes de Sociologie*.
AJS	*American Journal of Sociology*.
ASR	*American Sociological Review*.
BJ	*Bibliotheca Javanica*, diterbitkan oleh Konikligk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
BKI	*Bijdragen tot de Taal-, Land- ert Volkenkunde*, diterbitkan oleh Koninkljk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde.
CIS	*Cahiers Internationaux de Sociologie*.
CJHSS	*The Ceylon Journal of Historical and Social Studies*
CSSH	*Comparative Studies in Society and History*.
DDI	Director of the Department of Interior (Direktur Departemen Dalam Negeri).
EI	Encyclopaedia of Islam.
ENI	Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
Exh.	Exhibitum.
Gov.Gen.	Governor General.
H.	Haji.
IG	*De Indische Gids*.
ITR	*Indisch Tijdschrift voor het Recht*.
IWR	*Indisch Weekblad van het Regt*.
JRAI	*Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*.
JRASMB	*Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*.
JSAH	*Journal of Southeast Asian History*.
KT	*Koloniaal Tiqdschrift*.
M.J.	Militair Journaal.
MNGZ	*Mededeelingen vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap*.
MR	*Mailrapport* (Laporan melalui post).
NZT	*Nederlandsch Zendingstgdschrift*.
OIB	Oost-Indisch Besluit (Keputusan pemerintah Hindia Belanda).
PKI	Partai Komunis Indonesia.
PV	Process Verbaal (Berita acara pengadilan).
R.	Raden (gelar bangsawan tingkat rendah di Jawa).

R.A.	Raden Adipati (gelar yang menunjukkan pangkat seorang bupati).
R.A.A.	Raden Adipati Aria (ibidem).
R.B.	Raden Bagus (gelar bangsawan Banten).
R.M.	Raden Mas (gelar bangsawan).
R.T.	Raden Tumenggung (gelar yang menunjukkan pangkat seorang bupati).
R.T.A.	RadenTumenggung Aria (ibidem).
SEI	Shorter Encyclopaedia of Islam.
SF	*Social Forces*.
SIAH	Schriften des Instituts fur Asienkunde in Hamburg.
SSR	*Sociology and Social Research*.
T.	Tubagus (gelar bangsawan Banten).
TBB	*Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur*.
TBG	*Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkunde*, diterbitkan oleh (Koninklijk) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
TNAG	*Tijdschrift van her Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*.
TNI	*Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*:
Vb.	Verbaal (notulen).
VBG	*Verhandelingen van het (Koninkljk) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.
VG	*Verspreide Geschriften*. (Tulisan-tulisan yang terpencar-pencar).
WNI	*Weekblad van Nederlandsch-Indie*.
WHS	Works issued by the Hakluyt Society.

e-books a.mudjahid chudari 2006

GLOSARIUM

Catatan : Kata-kata Banten diberi tanda +) Kata-kata Arab (dalam tanda kurung) dieja menurut EI atau SEI; karena alasan teknis, maka beberapa tanda diakritis ditiadakan. Menganai arti/kata-kata itu, saya menuruti dengan seksama perjelasan-penjelasan yang diberikan dalam EI atau SEI. Singkatan : B = Belanda.

abangan : golongan Muslim dalam masyarakat Jawa yang dalam melakukan ibadah mereka memperlihatkan sinkritisme agama Jawa.

abdi+) : "hamba" atau "budak"; mereka yang ditundukkan dengan kekerasan dan dijadikan budak oleh penakluk-penakluk yang beragama Islam.

afdeling (B) : kesatuan daerah administratif yang dikepalai oleh seorang asisten residen.

Agus+) : gelar yang diberikan kepada orang-orang kelas terhormat yang tidak tergolong kaum bangsawan.

Ayu+) : gelar yang dtberikan kepada wanita bangsawan yang bukan anggota keluarga sultan.

alun-alun : lapangan terbuka di muka tempat tinggal pejabat-pejabat setempat.

amil : pamong desa yang bertugas mengumpulkan jakat.

Apun : gelar yang drberikan kepada bangsawan yang bukan anggota keluarga sultan.

Bagus+) : gelar yang diberrican kepada orang-orang golongan terhormat yang bukan bangsawan.

baku : laki-laki berbadan sehat yang dapat dikenakan kerja wajjib.

barakat (baraka) : "berkat", segala-sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang keramat : cara-care magis untuk mendapat segala macam keberuntungan.

bau : 7096, 5 meter persegi.

*bek*el : anggota pamong desa; di bagian akhir zaman Mataram bertugas menarik pajak.

bengat (bai'a) : perjanjian resmi antara guru dan murid.

Besar : nama bulan ke-12 tahun Jawa.

braja : satu kekuatan jahat yang terutama menimpa anak-anak, orang-yang sudah tua dan yang sakit.

brandal : pemberontak.

bujang+) : satu golongan buruh tani yang tidak punya tanah.

bumi+) : kepala daerah di Lebak di zaman kesultanan.

bupati+) : kepala daerah di Pontang dan Jasinga di zaman kesultanan.

caeng+) : 1 caeng = 40 sanga (lihat sanga dan kati)

carita : cerita.

cungkak : mandor desa di daerah perkebunan, yang bertugas mengutip pajak dan jasa.

dar al-Islam (dar al-Islam) : setup negeri di mana, berlaku hukum Islam.

daup : "perkawinan"; kombinasi antara unsur-unsur dua tarekat Sufi yang berlainan.

Dedjal (al-dadjdjal) : nabi palsu di akhir zaman.

demang : kepala distrik di Banten dan Batavia dalam abad XIX.

Desa-diensten (B) : kerja wajib untuk kepentingan desa.

Dulkaidah (Dhu'l-ka'da) : nama bulan ke-11 tahun Jawa.

Dulhijah (Dhu'l-Hijja) : nama bulan ke-12 tahun Jawa. (Lihat juga : Besar).

dusun : berpengetahuan sempit.

Entol[+)] : gelar yang dberikan kepada orang-orang bangsawan yang bukan anggota keluarga sultan.

Erucakra : (lihat Herucokro).

Fakih Najamudin[+)] : gelar/sebutan pejabat agama yang tertinggi dalam kesultanan Banten.

gambir : Uncaria Gambir Roxb., keluarga Rubiaecae.

gugur gunung : kerja wajib yang bersifat umum, yang mengerahkan semua laki-laki yang berbadan sehat.

gundal : orang yang mengawal pejabat-pejabat dalam perjalanan inspeksi mereka.

haj akbar (hajj akbar) : apabila tanggal 9 Dulhijah (hari wukuf di padang Arafat) jatuh pada hari Jumat ("haji besar").

hejoan[+)] : ijon, pinjaman uang yang harus dibayar dengan hasil panen.

herendiensten (B) : kerja wajib pada pekerjaan umum.

Herucokro : sinonim Ratu Adil.

huma : ladang yang ditanami padi.

ijazah (ijaza) : sertifikat yang diberikan kepada orang yang baru masuk dalam tarekat.

jagakersa[+)] : polisi desa

jaga surat[+)] : petugas pos desa

Jayabaya : seorang raja di Kediri dalam abad XII; ramalan-ramalan Jayabaya menyebut-nyebut tentang akan datangnya Ratu Adil

jayengsekar : laskar pribumi untuk pertahanan setempat.

jalrna leutik[+)] : rakyat biasa (rakyat kecil).

jaro[+)] : kepala desa.

jawah (Jawah) : masyarakat orang-orang Indonesia yang bermukim di Mekah.

jawara[+)] : satu golongan sosial, terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyal pekerjaan yang tetap.

jihad (jihad) : Perang Suci; penaklukan orang-orang kafir dengan senjata Muslim.

pohon johar : Cassia siamea.

Jumadilakir (Jumada al-'Akhira) : nama bulan ke-6 tahun Jawa.

kapetengan : petugas pos desa.

kataman : upacara yang diadakan apabila seorang murid tamat mengaji.

kati : 1 /60 pikol; 1 pikol = lk.122 atau 125 pon.

kelewang : pedang.

kebon maung[+)] : tempat macan.

kemit : polisi desa.

kepala somah : kepala rumah tangga.

kepatihan : rumah patih.

pohon kepuh : Sterculia foetida.

kiras (Charajj) : semacam pajak rumah tangga.

kitab (kitab) : buku suci.

kiyai : gelar yang diberikan kepada guru agama yang terkemuka.

kliwon : pejabat tingkat menengah golongan rendah dalam birokrasi kesultanan.

knevelarijen (B) : penyalahgunaan administratif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dengan menuntut jasa dan sumbangan-sumbangan yang melampaui batas dari rakyat.

Kolot-kolot[+)] : kaum tua-tua di desa.

kongsi : kerjasama.

koyang : lk.1667,55 kg (di Banten).

kujang : semacam keris.

l*elanjan* : kutipan berupa hasil tanaman yang dikenakan terhadap pemilik sawah negara.

maleman : acara-acara yang diadakan pada tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 bulan Puasa (Ramadan).

Mandoor : mandor.

rnandoor gardu : kepala jasa desa.

rnantri : (1) pelayan dalam rumah tangga sultan; (2) pejabat menengah golongan bawah dalam bitokrasi kolonial.

mantri ulu : pejabat urusan irigasi.

Mas[+)] : gelar yang diberikan kepada bangsawan yang bukan anggota keluarga sultan.

memaro : perjanjian menggadaikan tanah dan bagi hasil, di mana orang yang menggadaikan tanah menerima separo dari basil panen.

menumpang : satu golongan buruh tani, yang diberi tempat pemondokan oleh majikan mereka.

merbot : yang bertugas merawat mesjid.

merdika[+)] : mereka yang diberi status orang bebas setelah menyatakan tunduk kepada penakluk-penakluk yang beragama Islam dan memeluk agama itu.

mertelu : perjanjian menggadaikan tanah dan bagi hasil, di mana orang yang menggadaikan tanah itu menerima sepertiga bagian dari hasil panen.

modin (mu'adhdhin) : pegawal mesjid yang bertugas menyerukan azan.

murid : pengikut.

nagara agung : wilayah inti dari kerajaan Mataram.

nahu (nahw) : ilmu tata bahasa Arab.

naib (na'ib) : wakil panghulu.

nayaka[+)] : keturunan sultan sesudah generasi ketiga.

ndara : anggota bangsawan di daerah kerajaan di Jawa.

ngabeuy[+)] : pejabat menengah dari golongan bawah dalam birokrasi kesultanan.

nglanjak[+)] : satu jenis transaksi sawah di kabupaten Banten Utara, yang merupakan jalan tengah antara menyewakan dan menggadaikan tanah.

orang kunceng[+)] : orang-orang yang terampil dalam pembuatan minyak kelapa.

orang tani[+)] : satu golongan sosial yang mencakup penggarap tanah, tukang dan pedagang.

Paal : 1506,943 meter.

pakukusut[+)] : kutipan berupa hasil tanaman yang dikenakan atas pemilik sawah yasa

paliwara[+)] : pejabat menengah golongan bawah dalam birokrasi kesultanan.

Panca Darma : ajaran tentang lima kewajiban.

pancalang[+)] : petugas pos desa, khususnya di Lebak.

Panca Setia : ajaran tentang lima kesetiaan.

pancen : kewajiban penduduk desa untuk sekali-kali menyumbangkan tenaga kerja mereka kepada pejabat-pejabat pnbumi.

Pangeran[+)] : gelar yang diberikan kepada anggota-anggota bangsawan tingkat tinggi.

panghulu : orang yang mengepalai pegawai-pegawai mesjid.

pangiwa[+)] : pembawa perintah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat-pejabat yang lebih tinggi.

panglaku[+)] : pembawa perintah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat yang lebih tinggi, khususnya di Caringin.

pangrambe : daerah apanase yang letaknya paling dekat dengan keraton.

patitiang[+)] : pajak kepala menurut hukum Islam.

pecaton[+)] : tanah yang dihadiahkan kepada anggota keluarga sultan, pejabat-pejabat dan orang-orang kesayangan sultan.

postweg (B) : jalan pos antara Anyer dan Panarukan, yang dibangun dalam tahun 1808 atas perintah Daendels.

prajurit : anggota pasukan tentara pribumi.

priyayi : golongan elite di Jawa yang terutama terdiri dari "kelas atasan" birokrasi dan kaum inteligensia.

punggawa[+)] : pejabat menengah golongan bawah dalam bitokrasi kesultanan.

pusaka laden[+)] : sinonim untuk pecaton.

Raden : gelar yang diberikan kepada bangsawan tingkat bawah.

raja ireng : raja hitam.

repartitie (B) : pembagian beban sewa tanah yang ditetapkan untuk seluruh desa di antara penduduk desa itu menurut kebijaksanaan mereka sendiri.

Ratu[+)] : gelar yang drberikan kepada wanita-wanita bangsawan tingkat tinggi.

Ratu Adil : tokoh mesianik menurut ramalan Jayabaya.

rooverijen (B) : perampokan.

Ruwah : nama bulan ke-8 tahun Jawa.

salasilah (silsila) : garis keturunan.

sambatan : tenaga pembantu untuk satu hari yang drberi makan.

sanga : 1 sanga = 50 kati.

santri : (1) orang yang sedang belajar pelbagai cabang ilmu pengetahuan Islam; (2) golongan Muslim yang menjalankan Ibadah dengan taat.

saraf (Sarf) : sintaksis Arab.

sawah ganjaran[+)] : tanah yang dihadiahkan kepada pejabat-pejabat, anggota keluarga dan orang-orang kesayangan sultan.

sawah yasa[+)] : tanah yang dibuka dengan menggunakan tenaga kerja wajib yang terikat pada tanah pusaka.

sawah negara : tanah yang dibuka atas perintah sultan atau pemegang apanasenya; tanah sultan.

Sawal (Shawwal) : nama bulan ke-10 tahun Jawa.

sayid (saiyid) : gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi.

Sentana : anggota keluarga sultan.

Sultan Adil : varian dari Ratu Adil

sumbangan : hadiah atau pemberian pada kesempatan-kesempatan yang khusus, seperti kelahiran, perkawinan atau kematian.

Sunan Herucokro : sinonim untuk Ratu Adil.

Sura : nama bulan pertama tahun Jawa.

syahbandar : pembesar di negara-negara tradisional yang bertugas mengelola dan mengawasi perdagangan dengan orang-orang asing di kota-kota pelabuhan.

syarif (syarif) : gelar yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atas kedudukan tinggi karena merupakan keturunan orang-orang besar.

Syekh (syaikh) : (1) orang yang sudah berusia lanjut; (2) gelar yang diberikan kepada pejabat tinggi agama, guru dan ulama.

tandu : usungan.

tarekat (tarika) : jalan mistik; perkumpulan Sufi.

tasauf (tasawwuf) : mistik.

terbang : rebana.

tipar[+)] : bertanam padi di tanah kering.

Tubagus[+)] : gelar yang diberikan kepada orang-orang bangsawan anggota keluarga sultan.

Tumenggung : pembesar dalam birokrasi kesultanan; pegawai yang bertugas di istal, dapur atau kebun raja; gelar yang diberikan kepada bupati di zaman kolonial.

tutupen : menutup-nutupi; kebijaksanaan pejabat-pejabat untuk merahasiakan informasi terhadap atasan mereka dengan maksud untuk menghindari pengusutan lebih lanjut atau agar mereka tidak dipersalahkan dalam hal terjadi kesalahan atau

keteledoran administratif.

tuwa-tuwa[+)] : kaum tua-tua di desa (lihat : kolot-kolot).

uang bebuntut[+)] : pajak kerbau dan sapi.

uang lawang[+)] : pajak kepala menurut hukum Islam.

Ujang[+)] : gelar yang diberikan kepada orang bangsawan yang bukan keluarga sultan.

undakan[+)] : stratifikasi sosial menurut paham orang Banten.

usul (usul) : ajaran tentang prinsip-prinsip hukum Islam, (usul al-f'ikh).

utangan+) : budak, orang-orang yang telah dikalahkan oleh penakluk-penakluk yang beragama Islam lalu memeluk agama itu; mereka harus menjadi laskar untuk memerangi bajak-bajak laut.

Wali (Wali) : "pelindung", "orang yang berbuat kebajikan", atau "orang suci."

Wali Allah (Wali Allah) : utusan Tuhan; orang suci.

warga[+)] : keturunan sultan sampai generasi ke-3.

Wawu : nama bulan ke-7 tahun Jawa.

wedana : kepala distrik.

e-books a.mudjahid chudari 2006

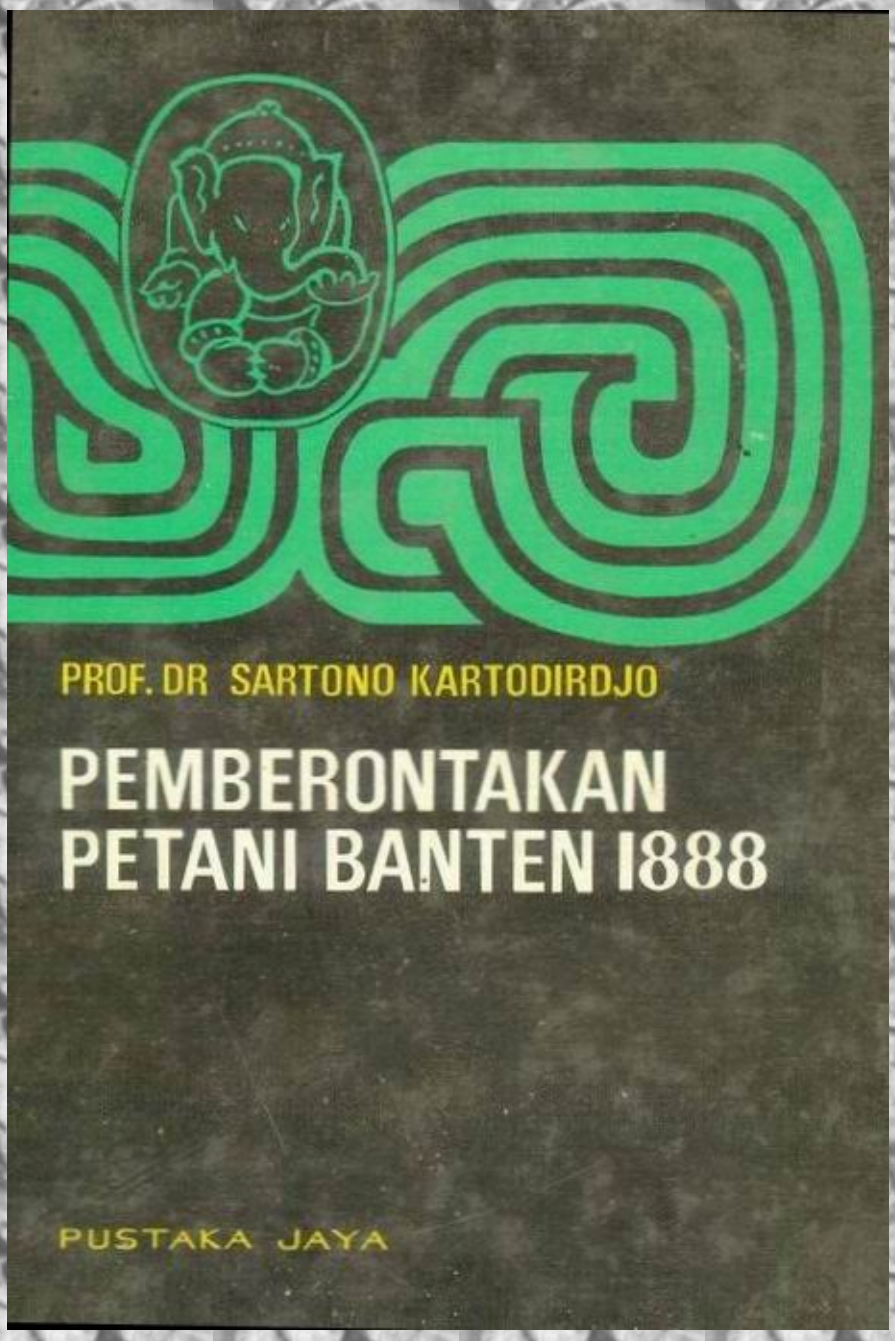
PROF. DR SARTONO KARTODIRDJO
PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 1888
PUSTAKA JAYA

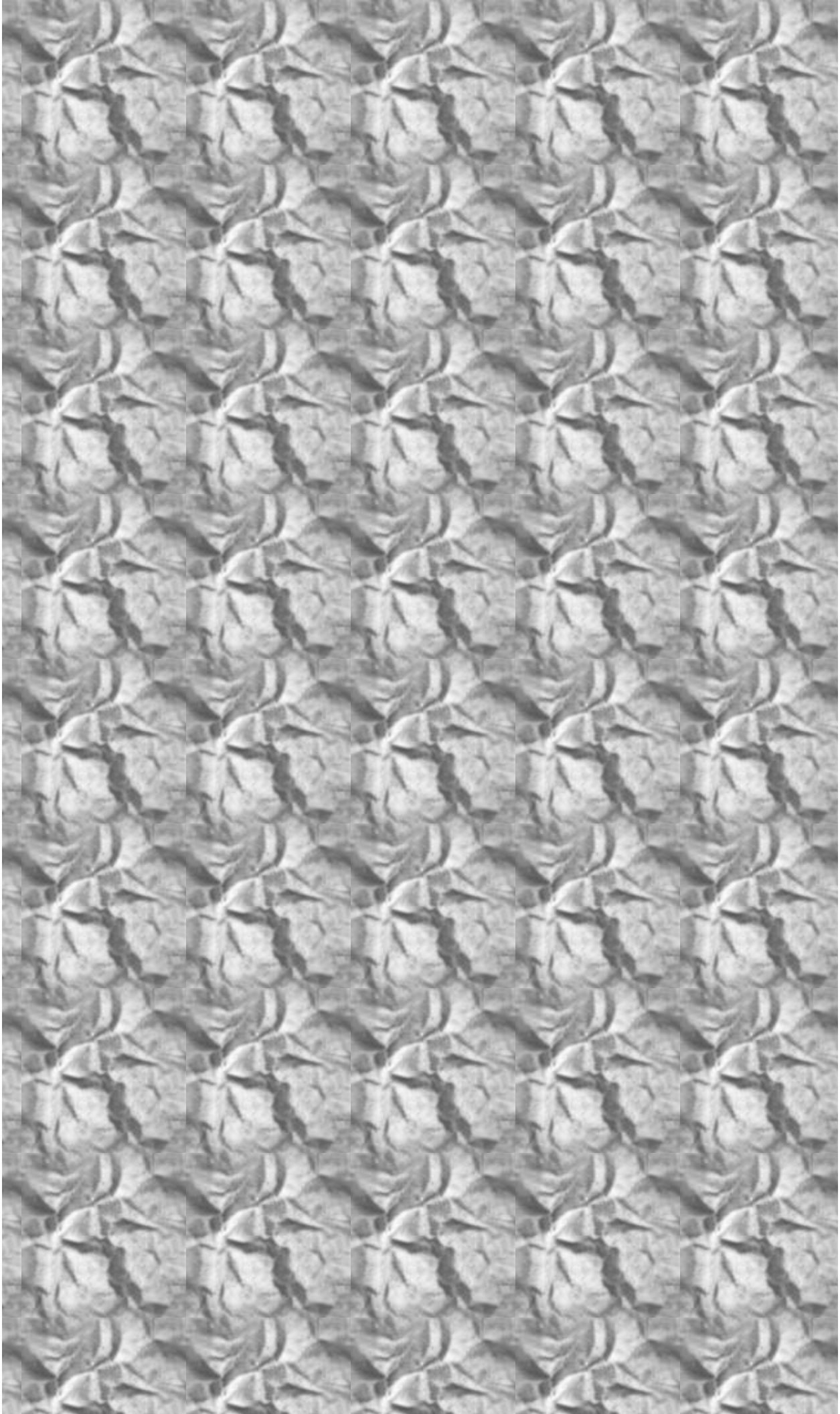

PETA CILEGON

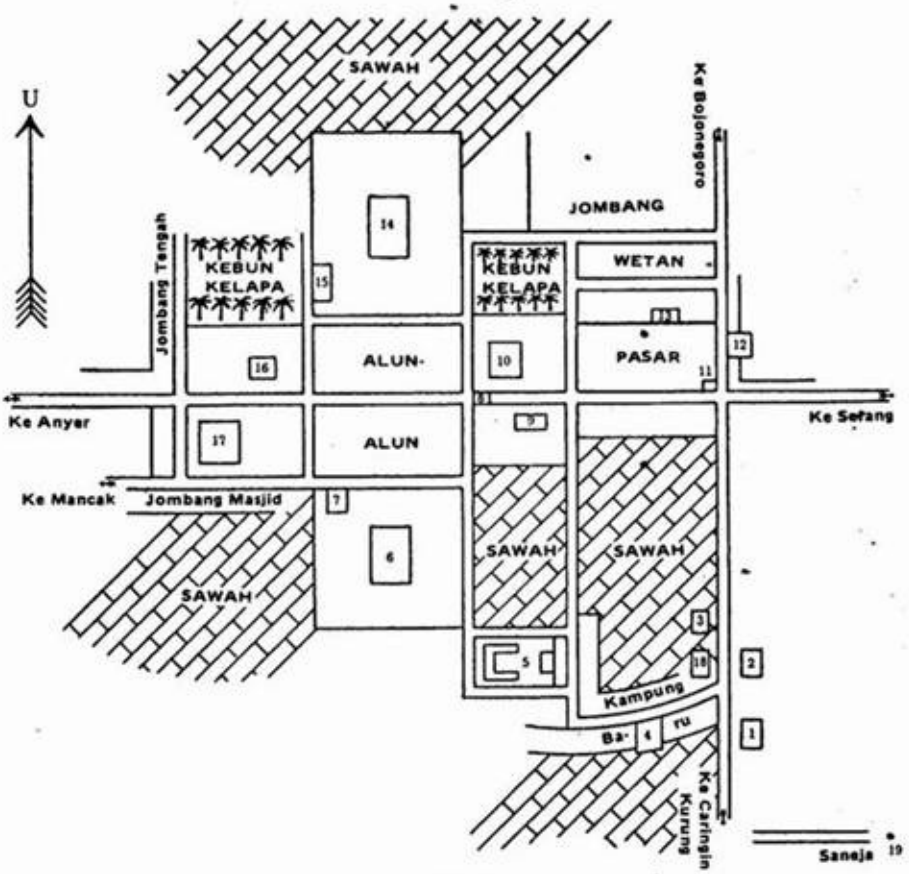

PETA CILEGON

1. Rumah Dumas
2. Rumah Jaksa
3. Rumah Ajun-Kolektor
4. Rumah Wedana
5. Penjara
6. Kapatihan
7. Penjara Kewedanaan
8. Pos (stasiun) Cilegon
9. Rumah Grondhout
10. Rumah Kontrolir Muda
11. Gardu Pasar Jombang Wetan
12. Gudang Garam
13. Rumah Tan Keng Hok
14. Tempat tinggal Asisten Residen
15. Kantor Asisten Residen
16. Rumah Bachet
17. Mesjid
18. Rumah Penghulu
19. Rumah Haji Iskak

e-books a.mudjahid chudari 2006